PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 4 TAHUN 2022

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2021

D A F T A R I S I

Kode REKENING		BIDANG, UNIT ORGANISASI	HAL
1		2	
LAMPIRAN I		LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	
LAMPIRAN I.1		RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN ORGANISASI	1
LAMPIRAN 1.2		RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN	14
LAMPIRAN 1.3		RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN	
	1	URUSAN WAJIB	
	1.01.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
	1.01.01	PENDIDIKAN	
	1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN	16
	1.01.02.	KESEHATAN	
	1.01.02.01.	DINAS KESEHATAN	21
	1.01.02.02.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	29
	1.01.03.	PEKERJAAN UMUM	
	1. 01.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG	31
	1.01.04.	PEKERJAAN UMUM	
	1.01.04.01.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	37
	1.01.05.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
	1.01.05.01.	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	40
	1.01.06.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	43

	1.01.06.	SOSIAL	
	1.01.06.01.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	46
	2.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	
	2.03.	PANGAN	
	2.03.01.01	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	51
	2.05.	LINGKUNGAN HIDUP	
	2.05.01.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	54
	2.06	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2.06.01.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	58
	2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.07.01.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	62
	2.02.09	PERHUBUNGAN	
	2.02.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	65
	2.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.10.01.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	68
	2.11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.11.01.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	71
	2.12	DINAS PENANAMAN MODAL	
	2.12.01.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	74
	2.16	KEBUDAYAAN	
	2.16.01.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAH RAGA	76
	2.17	`	
	2.17.01.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	81
	3	URUSAN PILIHAN	

	3.03	PERTANIAN	
	3.03.01.01	DINAS PERTANIAN	84
	3.08	TRANSMIGRASI	
	3.08.01.01	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	87
	4.	PENUNJANG URUSAN	
	4.01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	
	4.01.01.01	SEKRETARIAT DAERAH	90
	4.01.01.02	SEKERTARIAT DPRD	96
	4.01.01.03	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	99
	4.01.01.04	BADAN KEUANGAN DAERAH	102
	4.01.01.05	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	108
	4.01.01.06	INSPEKTORAT KABUPATEN	111
	4.01.01.07	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	114
	4.01.01.08	KECAMATAN SITIUNG	117
	4.01.01.09	KECAMATAN KOTO BARU	119
	4.01.01.10	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	121
	4.01.01.11	KECAMATAN IX KOTO	124
	4.01.01.12	KECAMATAN TIMPEH	126
	4.01.01.13	KECAMATAN KOTO SALAK	128
	4.01.01.14	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	130
	4.01.01.15	KECAMATAN KOTO BESAR	132
	4.01.01.16	KECAMATAN PADANG LAWEH	135
	4.01.01.17	KECAMATAN TIUMANG	138
	4.01.01.18	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	140

LAMPIRAN 1.4		REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	143
LAMPIRAN II		LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	286
LAMPIRAN III		LAPORAN OPERASIONAL	287
LAMPIRAN IV		LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	289
LAMPIRAN V		NERACA	290
LAMPIRAN VI		LAPORAN ARUS KAS	293
LAMPIRAN VII		CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	296
LAMPIRAN VIII		DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH	713
LAMPIRAN IX		DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	714
LAMPIRAN X		DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR	715
LAMPIRAN XI		DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	717
LAMPIRAN XII		DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH	718
LAMPIRAN XIII		DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP	719

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

dan

BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat:
   a. Laporan Realisasi Anggaran;
   b. Neraca;
   c. Laporan Arus Kas;
   d. Laporan Operasional;
   e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
   g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

a.	Pendapatan	Rp.	978.920.717.101,87
b.	Belanja	Rp.	917.048.156.325,65
	Surplus		Rp. 61.872.560.776,22

c. Pembiayaan

- Penerimaan	Rp. 8.334.425.206,49	
- Pengeluaran	Rp. 0,00	
Surplus		Rp. 8.334.425.206,49

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp1.505.381.620,13 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	980.426.098.722,00
2.	Realisasi	Rp.	978.920.717.101,87
	Selisih kurang	Rp.	1.505.381.620,13

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp70.540.691.960,35 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp.	988.760.523.928,00
2.	Realisasi	Rp.	917.048.156.325,65
	Selisih kurang	Rp.	71.712.367.602,35

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(70.206.985.982,71) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Surpus/Defisit setelah perubahan	Rp.	(8.334.425.206,49)
2.	Realisasi	Rp.	61.872.560.776,22
	Selisih kurang	Rp.	(70.206.985.982,71)

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan Rp0,49 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	8.334.425.206,00
2.	Realisasi	Rp.	8.334.425.206,49
	Selisih kurang	Rp.	0,49

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Anggaran pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00
2.	Realisasi	Rp.	0,00
	Selisih kurang	Rp.	0,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2021 terdiri atas:

a.	Jumlah Aset	Rp.	2.506.115.489.910,43
b.	Jumlah Kewajiban	Rp.	18.045.680.349,38
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	2.488.069.809.561,05

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut:

a.	Saldo kas awal per 1 Januari 2021	Rp.	8.328.171.654,49
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	227.762.019.892,71
c.	Arus kas dari aktivitas investasi	Rp.	(165.889.459.116,49)
d.	Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	0,00
e.	Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp.	(305.386.907,27)
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember 2021	Rp.	70.506.119.337,98

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan – LO

1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp.	93.834.740.104,23
2.	Pendapatan Transfer	Rp.	835.428.784.613,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp.	122.122.055.776,00
	Jumlah Pendapatan	Rp.	1.051.385.580.493,23

b.	Beban		
	1. Beban Operasi	Rp.	923.556.448.119,09
	2. Surplus/Defisit Beban Operasi	Rp.	127.829.132.374,14
	3. Surplus/Defisit Beban Non Operasi	Rp.	363.292.100,00
	4. Pos Luar Biasa	Rp.	197.439.330,00
c.	Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp.	127.994.985.144,14

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut :

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	8.334.425.206,49
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	8.334.425.206,49
c.	Subtotal (a-b)	Rp.	0,00
d.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp.	70.206.985.982,71
e.	Subtotal (c+d)	Rp.	70.206.985.982,71
f.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
g.	Lain-lain	Rp.	0,00
h.	Saldo Anggaran Lebih Akhir (e+f+g)	Rp.	70.206.985.982,71

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut :

a.	Ekuitas Awal	Rp.	2.346.493.866.411,02
b.	Surplus/Defisit-LO	Rp.	127.994.985.144,14
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar		
	1. Dampak Komulatif Perubahan Kebijakan	Rp.	0,00

2.	Dampak Komulatif Kesalahan Mendasar	Rp.	13.580.958.005,89
d.	Ekuitas Akhir	Rp.	2.488.069.809.561,05

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.	Lampiran I	:	Laporan Realisasi Anggaran;
b.	Lampiran II	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.	Lampiran III	:	Laporan Operasional;
d.	Lampiran IV	:	Laporan Perubahan Ekuitas;
e.	Lampiran V	:	Neraca;
f.	Lampiran VI	:	Laporan Arus Kas;
g.	Lampiran VII	:	Catatan Atas Laporan Keuangan;
h.	Lampiran VIII	:	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.	Lampiran IX	:	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j.	Lampiran X	:	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir;
k.	Lampiran XI	:	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
l.	Lampiran XII	:	Daftar Rekapitulasi Realisasi Panambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m.	Lampiran XIII	:	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n.	Lampiran XIV	:	Daftar Rekapitulasi kontruksi dalam pengerjaan;
o.	Lampiran XV	:	Daftar Rekapitulasi Aset lainnya;
p.	Lampiran XVI	:	Daftar Dana Cadangan Daerah;
q.	Lampiran XVII	:	Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.	Lampiran XVIII	:	Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

t. Lampiran XX : Iktisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas; Iktisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah; Iktisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 13 Juli 2022

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 13 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH,

ADLISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT : (4/28/2022)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI DHARMASRAYA,

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sebagai tindaklanjut dari amanat Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021.

Secara Umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun secara sistematis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022 NOMOR 4/28/2022

Lampiran I.1 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 4 Tahun 2022
Tanggal : 13 Juli 2022

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	980.426.098.722,00	978.920.717.101,87	(1.505.381.620,13)	99,85
4 . 1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	45.714.271.400,00	51.534.430.432,83	5.820.159.032,83	112,73
4 . 1.01	**Pendidikan**	45.750.000,00	76.815.000,00	31.065.000,00	167,90
4 . 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01	DINAS PENDIDIKAN	45.750.000,00	76.815.000,00	31.065.000,00	167,90
4 . 1.02	**Kesehatan**	43.993.243.000,00	50.410.319.784,67	6.417.076.784,67	114,59
4 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01	DINAS KESEHATAN	3.980.743.000,00	10.031.837.431,00	6.051.094.431,00	252,01
4 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02	RSUD SUNGAI DAREH	40.012.500.000,00	40.378.482.353,67	365.982.353,67	100,91
4 . 1.03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	1.490.000.000,00	806.570.552,16	(683.429.447,84)	54,13
4 . 1.03 . 0-03.0-00.0-00.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.490.000.000,00	806.570.552,16	683.429.447,84	54,13
4 . 1.04	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	185.278.400,00	231.904.400,00	46.626.000,00	125,17
4 . 1.04 . 1-04.2-10.0-00.01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN	185.278.400,00	231.904.400,00	46.626.000,00	125,17
4 . 2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**	1.210.064.000,00	1.101.135.795,00	(108.928.205,00)	91,00
4 . 2.03	**Pangan**	105.000.000,00	105.160.100,00	160.100,00	100,15
4 . 2.03 . 2-09.3-25.0-00.01	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	105.000.000,00	105.160.100,00	160.100,00	100,15
4 . 2.05	**Lingkungan Hidup**	100.000.000,00	129.612.000,00	29.612.000,00	129,61
4 . 2.05 . 2-11.0-00.0-00.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	100.000.000,00	129.612.000,00	29.612.000,00	129,61
4 . 2.09	**Perhubungan**	350.000.000,00	280.240.495,00	(69.759.505,00)	80,07
4 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.15	DINAS PERHUBUNGAN	350.000.000,00	280.240.495,00	(69.759.505,00)	80,07
4 . 2.10	**Komunikasi dan Informatika**	315.000.000,00	199.897.100,00	(115.102.900,00)	63,46
4 . 2.10 . 2-16.2-20.2-21.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	315.000.000,00	199.897.100,00	(115.102.900,00)	63,46
4 . 2.11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	140.064.000,00	212.526.500,00	72.462.500,00	151,74
4 . 2.11 . 2-17.3-30.3-31.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN	140.064.000,00	212.526.500,00	72.462.500,00	151,74
4 . 2.12	**Penanaman Modal**	200.000.000,00	173.699.600,00	(26.300.400,00)	86,85

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4 . 2.12 . 2-18.0-00.0-00.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	200.000.000,00	173.699.600,00	(26.300.400,00)	86,85
4 . 3	**Urusan Pilihan**	70.480.000,00	132.563.634,00	62.083.634,00	188,09
4 . 3.03	**Pertanian**	56.500.000,00	62.125.000,00	5.625.000,00	109,96
4 . 3.03 . 3-27.0-00.0-00.01	DINAS PERTANIAN	56.500.000,00	62.125.000,00	5.625.000,00	109,96
4 . 3.08	**Transmigrasi**	13.980.000,00	16.391.634,00	2.411.634,00	117,25
4 . 3.08 . 3-32.2-07.0-00.01	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	13.980.000,00	16.391.634,00	2.411.634,00	117,25
4 . 4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**	933.431.283.322,00	926.206.634.240,04	(7.224.649.081,96)	99,23
4 . 4.01	**Administrasi Pemerintahan**	933.431.283.322,00	926.206.634.240,04	(7.224.649.081,96)	99,23
4 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01	SEKRETARIAT DAERAH	10.000.000,00	11.500.000,00	1.500.000,00	115,00
4 . 4.01 . 5-02.0-00.0-00.01	BADAN KEUANGAN DAERAH	933.378.563.322,00	926.177.676.186,04	(7.200.887.135,96)	99,23
4 . 4.01 . 7-01.0-00.0-00.01	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	6.000.000,00	7.656.250,00	1.656.250,00	127,60
4 . 4.01 . 7-01.0-00.0-00.02	KECAMATAN SITIUNG	6.460.000,00	5.355.000,00	(1.105.000,00)	82,89
4 . 4.01 . 7-01.0-00.0-00.03	KECAMATAN KOTO BARU	3.600.000,00	3.225.000,00	(375.000,00)	89,58
4 . 4.01 . 7-01.0-00.0-00.04	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	8.500.000,00	5.280.000,00	(3.220.000,00)	62,12
4 . 4.01 . 7-01.0-00.0-00.05	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	2.500.000,00	250.000,00	(2.250.000,00)	10,00
4 . 4.01 . 7-01.0-00.0-00.06	KECAMATAN TIMPEH	6.160.000,00	2.762.500,00	(3.397.500,00)	44,85
4 . 4.01 . 7-01.0-00.0-00.07	KECAMATAN KOTO SALAK	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00
4 . 4.01 . 7-01.0-00.0-00.08	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	50,00
4 . 4.01 . 7-01.0-00.0-00.09	KECAMATAN KOTO BESAR	3.500.000,00	750.000,00	(2.750.000,00)	21,43
4 . 4.01 . 7-01.0-00.0-00.10	KECAMATAN PADANG LAWEH	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	33,33
4 . 4.01 . 7-01.0-00.0-00.11	KECAMATAN TIUMANG	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00
5	**BELANJA DAERAH**	988.760.523.928,00	917.048.156.325,65	71.712.367.602,35	92,75
5 . 1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	670.153.261.849,00	614.287.033.625,65	(55.866.228.223,35)	91,66
5 . 1.01	**Pendidikan**	289.119.182.393,00	280.921.982.966,83	(8.197.199.426,17)	97,16
5 . 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01	**DINAS PENDIDIKAN**	289.119.182.393,00	280.921.982.966,83	(8.197.199.426,17)	97,16
5 . 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	242.700.748.555,00	236.053.095.331,00	(6.647.653.224,00)	97,26
5 . 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	202.932.821.808,00	196.784.800.128,00	(6.148.021.680,00)	96,97
5 . 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.892.126.747,00	33.458.949.786,00	(433.176.961,00)	98,72
5 . 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	5.875.800.000,00	5.809.345.417,00	(66.454.583,00)	98,87
5 . 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	46.418.433.838,00	44.868.887.635,83	(1.549.546.202,17)	96,66
5 . 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.721.132.801,00	13.380.478.590,00	(340.654.211,00)	97,52
5 . 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.717.764.699,00	25.519.049.157,83	(1.198.715.541,17)	95,51
5 . 1.01 . 1-01.0-00.0-00.01 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.979.536.338,00	5.969.359.888,00	(10.176.450,00)	99,83
5 . 1.02	**Kesehatan**	232.273.733.093,00	210.202.446.396,99	(22.071.286.696,01)	90,50

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01	**DINAS KESEHATAN**	130.799.218.193,00	119.761.199.820,07	(11.038.018.372,93)	91,56
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	99.502.880.919,00	91.827.464.337,33	(7.675.416.581,67)	92,29
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	48.309.087.693,00	47.411.943.318,81	(897.144.374,19)	98,14
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.193.793.226,00	44.415.521.018,52	(6.778.272.207,48)	86,76
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	31.296.337.274,00	27.933.735.482,74	(3.362.601.791,26)	89,26
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.977.353.750,00	6.365.271.461,00	(612.082.289,00)	91,23
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.213.551.524,00	20.606.556.021,74	(2.606.995.502,26)	88,77
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.050.332.000,00	939.358.000,00	(110.974.000,00)	89,43
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	55.100.000,00	22.550.000,00	(32.550.000,00)	40,93
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02	**RSUD SUNGAI DAREH**	101.474.514.900,00	90.441.246.576,92	(11.033.268.323,08)	89,13
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 1	**BELANJA OPERASI**	73.344.643.000,00	65.115.908.383,00	(8.228.734.617,00)	88,78
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 1 . 1	Belanja Pegawai	35.475.625.586,00	34.912.692.894,00	(562.932.692,00)	98,41
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.869.017.414,00	30.203.215.489,00	(7.665.801.925,00)	79,76
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 2	**BELANJA MODAL**	28.129.871.900,00	25.325.338.193,92	(2.804.533.706,08)	90,03
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.779.871.900,00	24.447.505.167,92	(2.332.366.732,08)	91,29
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	750.000.000,00	679.833.026,00	(70.166.974,00)	90,64
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	600.000.000,00	198.000.000,00	(402.000.000,00)	33,00
5 . 1.03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	104.907.476.590,00	103.773.454.904,51	(1.134.021.685,49)	98,92
5 . 1.03 . 0-03.0-00.0-00.01	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	104.907.476.590,00	103.773.454.904,51	(1.134.021.685,49)	98,92
5 . 1.03 . 0-03.0-00.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	41.278.455.490,00	46.275.356.973,51	4.996.901.483,51	112,11
5 . 1.03 . 0-03.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.625.772.507,00	4.762.822.726,00	(862.949.781,00)	84,66
5 . 1.03 . 0-03.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.306.182.983,00	40.200.009.247,51	5.893.826.264,51	117,18
5 . 1.03 . 0-03.0-00.0-00.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	1.346.500.000,00	1.312.525.000,00	(33.975.000,00)	97,48
5 . 1.03 . 0-03.0-00.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	63.629.021.100,00	57.498.097.931,00	(6.130.923.169,00)	90,36
5 . 1.03 . 0-03.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	203.304.900,00	167.924.000,00	(35.380.900,00)	82,60
5 . 1.03 . 0-03.0-00.0-00.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.464.827.200,00	37.141.876.231,00	(5.322.950.969,00)	87,47
5 . 1.03 . 0-03.0-00.0-00.01 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.910.889.000,00	20.188.297.700,00	(722.591.300,00)	96,54
5 . 1.03 . 0-03.0-00.0-00.01 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00
5 . 1.04	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	4.664.079.634,00	4.473.238.950,32	(190.840.683,68)	95,91
5 . 1.04 . 1-04.2-10.0-00.01	**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN**	4.664.079.634,00	4.473.238.950,32	(190.840.683,68)	95,91
5 . 1.04 . 1-04.2-10.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	4.427.769.424,00	4.238.887.470,32	(188.881.953,68)	95,73
5 . 1.04 . 1-04.2-10.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.631.344.962,00	1.556.164.011,00	(75.180.951,00)	95,39
5 . 1.04 . 1-04.2-10.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.796.424.462,00	2.682.723.459,32	(113.701.002,68)	95,93
5 . 1.04 . 1-04.2-10.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	236.310.210,00	234.351.480,00	(1.958.730,00)	99,17

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5 . 1.04 . 1-04.2-10.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.560.210,00	28.955.000,00	(1.605.210,00)	94,75
5 . 1.04 . 1-04.2-10.0-00.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.04 . 1-04.2-10.0-00.01 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	205.750.000,00	205.396.480,00	(353.520,00)	99,83
5 . 1.05	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan**	34.520.271.589,00	10.347.478.254,00	(24.172.793.335,00)	29,98
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01	**DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN**	6.935.686.000,00	6.800.297.548,00	(135.388.452,00)	98,05
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	6.890.854.000,00	6.756.537.548,00	(134.316.452,00)	98,05
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.094.736.000,00	2.030.125.416,00	(64.610.584,00)	96,92
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.796.118.000,00	4.726.412.132,00	(69.705.868,00)	98,55
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	44.832.000,00	43.760.000,00	(1.072.000,00)	97,61
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.832.000,00	43.760.000,00	(1.072.000,00)	97,61
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.02	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	27.584.585.589,00	3.170.766.706,00	24.413.818.883,00	11,49
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 1	**BELANJA OPERASI**	2.954.500.538,00	2.792.855.524,00	(43.911.102,00)	94,53
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 1 . 1	Belanja Pegawai	789.039.000,00	730.172.044,00	58.866.956,00	92,54
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.165.461.538,00	2.062.683.480,00	(102.778.058,00)	95,25
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 2	**BELANJA MODAL**	24.630.085.051,00	377.911.182,00	24.252.173.869,00	1,53
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.735.000,00	26.735.000,00	0,00	100,00
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	0,00
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.602.600.051,00	351.176.182,00	(24.251.423.869,00)	1,43
5 . 1.06	**Sosial**	4.668.518.550,00	4.568.432.153,00	(100.086.397,00)	97,86
5 . 1.06 . 1-06.2-08.2-14.01	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,**	4.668.518.550,00	4.568.432.153,00	(100.086.397,00)	97,86
5 . 1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	4.659.518.550,00	4.559.432.153,00	(100.086.397,00)	97,85
5 . 1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.536.601.000,00	2.455.059.223,00	(81.541.777,00)	96,79
5 . 1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.122.917.550,00	2.104.372.930,00	(18.544.620,00)	99,13
5 . 1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 2	**BELANJA MODAL**	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
5 . 1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
5 . 2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**	52.779.156.974,00	50.899.363.887,00	(1.879.793.087,00)	96,44
5 . 2.01	**Tenaga Kerja**	190.592.750,00	181.162.700,00	(9.430.050,00)	95,05
5 . 2.01 . 3-32.2-07.0-00.01	**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**	190.592.750,00	181.162.700,00	(9.430.050,00)	95,05
5 . 2.01 . 3-32.2-07.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	189.792.750,00	180.762.700,00	(9.030.050,00)	95,24
5 . 2.01 . 3-32.2-07.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	189.792.750,00	180.762.700,00	(9.030.050,00)	95,24
5 . 2.01 . 3-32.2-07.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	800.000,00	400.000,00	(400.000,00)	50,00
5 . 2.01 . 3-32.2-07.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.01 . 3-32.2-07.0-00.01 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	800.000,00	400.000,00	(400.000,00)	50,00
5 . 2.02	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	850.574.150,00	829.122.271,00	(21.451.879,00)	97,48

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5 . 2.02 . 1-06.2-08.2-14.01	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,**	850.574.150,00	829.122.271,00	(21.451.879,00)	97,48
5 . 2.02 . 1-06.2-08.2-14.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	850.574.150,00	829.122.271,00	(21.451.879,00)	97,48
5 . 2.02 . 1-06.2-08.2-14.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	850.574.150,00	829.122.271,00	(21.451.879,00)	97,48
5 . 2.03	**Pangan**	4.105.343.190,00	3.984.062.856,00	(121.280.334,00)	97,05
5 . 2.03 . 2-09.3-25.0-00.01	**DINAS PANGAN DAN PERIKANAN**	4.105.343.190,00	3.984.062.856,00	(121.280.334,00)	97,05
5 . 2.03 . 2-09.3-25.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	4.098.518.190,00	3.977.237.856,00	(121.280.334,00)	97,04
5 . 2.03 . 2-09.3-25.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.538.167.000,00	2.481.088.882,00	(57.078.118,00)	97,75
5 . 2.03 . 2-09.3-25.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.560.351.190,00	1.496.148.974,00	(64.202.216,00)	95,89
5 . 2.03 . 2-09.3-25.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	6.825.000,00	6.825.000,00	0,00	100,00
5 . 2.03 . 2-09.3-25.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.825.000,00	6.825.000,00	0,00	100,00
5 . 2.04	**Pertanahan**	492.324.000,00	234.165.210,00	(258.158.790,00)	47,56
5 . 2.04 . 1-04.2-10.0-00.01	**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN**	492.324.000,00	234.165.210,00	(258.158.790,00)	47,56
5 . 2.04 . 1-04.2-10.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	492.324.000,00	234.165.210,00	(258.158.790,00)	47,56
5 . 2.04 . 1-04.2-10.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	492.324.000,00	234.165.210,00	(258.158.790,00)	47,56
5 . 2.05	**Lingkungan Hidup**	5.177.087.320,00	4.873.779.742,00	(303.307.578,00)	94,14
5 . 2.05 . 2-11.0-00.0-00.01	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	5.177.087.320,00	4.873.779.742,00	(303.307.578,00)	94,14
5 . 2.05 . 2-11.0-00.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	5.066.562.320,00	4.764.893.380,00	(301.668.940,00)	94,05
5 . 2.05 . 2-11.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.168.352.040,00	2.065.099.965,00	(103.252.075,00)	95,24
5 . 2.05 . 2-11.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.898.210.280,00	2.699.793.415,00	(198.416.865,00)	93,15
5 . 2.05 . 2-11.0-00.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	110.525.000,00	108.886.362,00	(1.638.638,00)	98,52
5 . 2.05 . 2-11.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.525.000,00	108.886.362,00	(1.638.638,00)	98,52
5 . 2.06	**Administrasi Kependudukan dan Capil**	4.532.304.400,00	4.442.247.416,00	(90.056.984,00)	98,01
5 . 2.06 . 2-12.0-00.0-00.01	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	4.532.304.400,00	4.442.247.416,00	(90.056.984,00)	98,01
5 . 2.06 . 2-12.0-00.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	4.350.804.400,00	4.262.511.316,00	(88.293.084,00)	97,97
5 . 2.06 . 2-12.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.416.218.000,00	2.349.247.164,00	(66.970.836,00)	97,23
5 . 2.06 . 2-12.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.934.586.400,00	1.913.264.152,00	(21.322.248,00)	98,90
5 . 2.06 . 2-12.0-00.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	181.500.000,00	179.736.100,00	(1.763.900,00)	99,03
5 . 2.06 . 2-12.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	181.500.000,00	179.736.100,00	(1.763.900,00)	99,03
5 . 2.07	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**	4.830.770.220,00	4.740.212.728,00	(90.557.492,00)	98,13
5 . 2.07 . 2-13.0-00.0-00.01	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	4.830.770.220,00	4.740.212.728,00	(90.557.492,00)	98,13
5 . 2.07 . 2-13.0-00.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	4.830.770.220,00	4.740.212.728,00	(90.557.492,00)	98,13
5 . 2.07 . 2-13.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.405.837.020,00	2.334.812.415,00	(71.024.605,00)	97,05
5 . 2.07 . 2-13.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.424.933.200,00	2.405.400.313,00	(19.532.887,00)	99,19
5 . 2.07 . 2-13.0-00.0-00.01 . 4	**BELANJA TRANSFER**	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5 . 2.07 . 2-13.0-00.0-00.01 . 4 . 1	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.07 . 2-13.0-00.0-00.01 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.08	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	3.707.342.250,00	3.666.444.000,00	(40.898.250,00)	98,90
5 . 2.08 . 1-06.2-08.2-14.01	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,**	3.707.342.250,00	3.666.444.000,00	(40.898.250,00)	98,90
5 . 2.08 . 1-06.2-08.2-14.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	2.618.642.250,00	2.592.514.000,00	(26.128.250,00)	99,00
5 . 2.08 . 1-06.2-08.2-14.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	21.600.000,00	16.500.000,00	(5.100.000,00)	76,39
5 . 2.08 . 1-06.2-08.2-14.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.597.042.250,00	2.576.014.000,00	(21.028.250,00)	99,19
5 . 2.08 . 1-06.2-08.2-14.01 . 2	**BELANJA MODAL**	1.088.700.000,00	1.073.930.000,00	(14.770.000,00)	98,64
5 . 2.08 . 1-06.2-08.2-14.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	597.700.000,00	583.840.000,00	(13.860.000,00)	97,68
5 . 2.08 . 1-06.2-08.2-14.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	491.000.000,00	490.090.000,00	(910.000,00)	99,81
5 . 2.09	**Perhubungan**	5.759.891.323,00	5.516.678.485,00	(243.212.838,00)	95,78
5 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.15	**DINAS PERHUBUNGAN**	5.759.891.323,00	5.516.678.485,00	(243.212.838,00)	95,78
5 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.15 . 1	**BELANJA OPERASI**	5.541.567.050,00	5.302.339.385,00	(239.227.665,00)	95,68
5 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.15 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.319.886.000,00	2.250.902.399,00	(68.983.601,00)	97,03
5 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.15 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.221.681.050,00	3.051.436.986,00	(170.244.064,00)	94,72
5 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.15 . 2	**BELANJA MODAL**	218.324.273,00	214.339.100,00	(3.985.173,00)	98,17
5 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.15 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.824.273,00	64.839.100,00	(3.985.173,00)	94,21
5 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.15 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	149.500.000,00	149.500.000,00	0,00	100,00
5 . 2.10	**Komunikasi dan Informatika**	4.271.165.896,00	4.113.194.703,00	(157.971.193,00)	96,30
5 . 2.10 . 2-16.2-20.2-21.01	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	4.271.165.896,00	4.113.194.703,00	(157.971.193,00)	96,30
5 . 2.10 . 2-16.2-20.2-21.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	3.775.665.896,00	3.618.945.553,00	(156.720.343,00)	95,85
5 . 2.10 . 2-16.2-20.2-21.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.970.090.600,00	1.911.143.833,00	(58.946.767,00)	97,01
5 . 2.10 . 2-16.2-20.2-21.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.805.575.296,00	1.707.801.720,00	(97.773.576,00)	94,58
5 . 2.10 . 2-16.2-20.2-21.01 . 2	**BELANJA MODAL**	495.500.000,00	494.249.150,00	(1.250.850,00)	99,75
5 . 2.10 . 2-16.2-20.2-21.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	495.500.000,00	494.249.150,00	(1.250.850,00)	99,75
5 . 2.11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	3.485.011.734,00	3.287.130.942,00	(197.880.792,00)	94,32
5 . 2.11 . 2-17.3-30.3-31.01	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN**	3.485.011.734,00	3.287.130.942,00	(197.880.792,00)	94,32
5 . 2.11 . 2-17.3-30.3-31.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	3.467.431.734,00	3.269.550.942,00	(197.880.792,00)	94,29
5 . 2.11 . 2-17.3-30.3-31.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.844.988.044,00	1.773.699.388,00	(71.288.656,00)	96,14
5 . 2.11 . 2-17.3-30.3-31.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.622.443.690,00	1.495.851.554,00	(126.592.136,00)	92,20
5 . 2.11 . 2-17.3-30.3-31.01 . 2	**BELANJA MODAL**	17.580.000,00	17.580.000,00	0,00	100,00
5 . 2.11 . 2-17.3-30.3-31.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.580.000,00	17.580.000,00	0,00	100,00
5 . 2.12	**Penanaman Modal**	4.240.620.570,00	4.138.234.554,00	(102.386.016,00)	97,59
5 . 2.12 . 2-18.0-00.0-00.01	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	4.240.620.570,00	4.138.234.554,00	(102.386.016,00)	97,59

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5 . 2.12 . 2-18.0-00.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	4.142.355.670,00	4.040.848.554,00	(101.507.116,00)	97,55
5 . 2.12 . 2-18.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.894.047.000,00	1.834.358.649,00	(59.688.351,00)	96,85
5 . 2.12 . 2-18.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.248.308.670,00	2.206.489.905,00	(41.818.765,00)	98,14
5 . 2.12 . 2-18.0-00.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	98.264.900,00	97.386.000,00	(878.900,00)	99,11
5 . 2.12 . 2-18.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.264.900,00	77.399.000,00	(865.900,00)	98,89
5 . 2.12 . 2-18.0-00.0-00.01 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	19.987.000,00	(13.000,00)	99,94
5 . 2.13	**Kepemudaan dan Olah Raga**	1.237.828.650,00	1.221.666.900,00	(16.161.750,00)	98,69
5 . 2.13 . 2-22.3-26.2-19.01	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN**	1.237.828.650,00	1.221.666.900,00	(16.161.750,00)	98,69
5 . 2.13 . 2-22.3-26.2-19.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	1.234.798.450,00	1.219.886.900,00	(14.911.550,00)	98,79
5 . 2.13 . 2-22.3-26.2-19.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	383.598.450,00	371.357.250,00	(12.241.200,00)	96,81
5 . 2.13 . 2-22.3-26.2-19.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	851.200.000,00	848.529.650,00	(2.670.350,00)	99,69
5 . 2.13 . 2-22.3-26.2-19.01 . 2	**BELANJA MODAL**	3.030.200,00	1.780.000,00	(1.250.200,00)	58,74
5 . 2.13 . 2-22.3-26.2-19.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.030.200,00	1.780.000,00	(1.250.200,00)	58,74
5 . 2.14	**Statistik**	118.339.500,00	117.873.300,00	(466.200,00)	99,61
5 . 2.14 . 2-16.2-20.2-21.01	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	118.339.500,00	117.873.300,00	(466.200,00)	99,61
5 . 2.14 . 2-16.2-20.2-21.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	118.339.500,00	117.873.300,00	(466.200,00)	99,61
5 . 2.14 . 2-16.2-20.2-21.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.339.500,00	117.873.300,00	(466.200,00)	99,61
5 . 2.15	**Persandian**	52.234.250,00	50.608.350,00	(1.625.900,00)	96,89
5 . 2.15 . 2-16.2-20.2-21.01	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	52.234.250,00	50.608.350,00	(1.625.900,00)	96,89
5 . 2.15 . 2-16.2-20.2-21.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	52.234.250,00	50.608.350,00	(1.625.900,00)	96,89
5 . 2.15 . 2-16.2-20.2-21.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.234.250,00	50.608.350,00	(1.625.900,00)	96,89
5 . 2.16	**Kebudayaan**	5.886.192.514,00	5.780.956.523,00	(105.235.991,00)	98,21
5 . 2.16 . 2-22.3-26.2-19.01	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN**	5.886.192.514,00	5.780.956.523,00	(105.235.991,00)	98,21
5 . 2.16 . 2-22.3-26.2-19.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	5.871.892.514,00	5.766.856.523,00	(105.035.991,00)	98,21
5 . 2.16 . 2-22.3-26.2-19.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.244.936.000,00	2.174.137.518,00	(70.798.482,00)	96,85
5 . 2.16 . 2-22.3-26.2-19.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.785.826.514,00	1.755.570.605,00	(30.255.909,00)	98,31
5 . 2.16 . 2-22.3-26.2-19.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	1.841.130.000,00	1.837.148.400,00	(3.981.600,00)	99,78
5 . 2.16 . 2-22.3-26.2-19.01 . 2	**BELANJA MODAL**	14.300.000,00	14.100.000,00	(200.000,00)	98,60
5 . 2.16 . 2-22.3-26.2-19.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.300.000,00	14.100.000,00	(200.000,00)	98,60
5 . 2.17	**Perpustakaan**	3.795.724.257,00	3.676.549.457,00	(119.174.800,00)	96,86
5 . 2.17 . 2-23.2-24.0-00.01	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	3.795.724.257,00	3.676.549.457,00	(119.174.800,00)	96,86
5 . 2.17 . 2-23.2-24.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	3.066.374.257,00	2.968.662.357,00	(97.711.900,00)	96,81
5 . 2.17 . 2-23.2-24.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.469.007.600,00	2.382.583.309,00	(86.424.291,00)	96,50
5 . 2.17 . 2-23.2-24.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	597.366.657,00	586.079.048,00	(11.287.609,00)	98,11

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5 . 2.17 . 2-23.2-24.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	729.350.000,00	707.887.100,00	(21.462.900,00)	97,06
5 . 2.17 . 2-23.2-24.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	529.350.000,00	510.155.500,00	(19.194.500,00)	96,37
5 . 2.17 . 2-23.2-24.0-00.01 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	197.731.600,00	(2.268.400,00)	98,87
5 . 2.18	**Kearsipan**	45.810.000,00	45.273.750,00	(536.250,00)	98,83
5 . 2.18 . 2-23.2-24.0-00.01	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	45.810.000,00	45.273.750,00	(536.250,00)	98,83
5 . 2.18 . 2-23.2-24.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	45.810.000,00	45.273.750,00	(536.250,00)	98,83
5 . 2.18 . 2-23.2-24.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.810.000,00	45.273.750,00	(536.250,00)	98,83
5 . 3	**Urusan Pilihan**	25.828.963.622,00	38.001.176.544,00	12.172.212.922,00	147,13
5 . 3.01	**Kelautan dan Perikanan**	1.503.330.800,00	1.499.151.800,00	(4.179.000,00)	99,72
5 . 3.01 . 2-09.3-25.0-00.01	**DINAS PANGAN DAN PERIKANAN**	1.503.330.800,00	1.499.151.800,00	(4.179.000,00)	99,72
5 . 3.01 . 2-09.3-25.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	1.320.330.800,00	1.316.534.800,00	(3.796.000,00)	99,71
5 . 3.01 . 2-09.3-25.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.320.330.800,00	1.316.534.800,00	(3.796.000,00)	99,71
5 . 3.01 . 2-09.3-25.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	183.000.000,00	182.617.000,00	(383.000,00)	99,79
5 . 3.01 . 2-09.3-25.0-00.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	183.000.000,00	182.617.000,00	(383.000,00)	99,79
5 . 3.02	**Pariwisata**	466.916.600,00	445.268.293,00	(21.648.307,00)	95,36
5 . 3.02 . 2-22.3-26.2-19.01	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN**	466.916.600,00	445.268.293,00	(21.648.307,00)	95,36
5 . 3.02 . 2-22.3-26.2-19.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	361.916.600,00	360.482.193,00	(1.434.407,00)	99,60
5 . 3.02 . 2-22.3-26.2-19.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	361.916.600,00	360.482.193,00	(1.434.407,00)	99,60
5 . 3.02 . 2-22.3-26.2-19.01 . 2	**BELANJA MODAL**	105.000.000,00	84.786.100,00	(20.213.900,00)	80,75
5 . 3.02 . 2-22.3-26.2-19.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	4.932.500,00	(67.500,00)	98,65
5 . 3.02 . 2-22.3-26.2-19.01 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	79.853.600,00	(20.146.400,00)	79,85
5 . 3.03	**Pertanian**	20.203.504.297,00	32.550.151.408,00	12.346.647.111,00	161,11
5 . 3.03 . 3-27.0-00.0-00.01	**DINAS PERTANIAN**	20.203.504.297,00	19.778.916.114,00	421.770.947,00	97,90
5 . 3.03 . 3-27.0-00.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	19.051.020.679,00	18.627.841.114,00	423.179.565,00	97,78
5 . 3.03 . 3-27.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	10.992.044.000,00	10.710.279.599,00	281.764.401,00	97,44
5 . 3.03 . 3-27.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.058.976.679,00	7.917.561.515,00	141.415.164,00	98,25
5 . 3.03 . 3-27.0-00.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	1.152.483.618,00	1.151.075.000,00	(1.408.618,00)	99,88
5 . 3.03 . 3-27.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	297.483.618,00	297.025.000,00	(458.618,00)	99,85
5 . 3.03 . 3-27.0-00.0-00.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	855.000.000,00	854.050.000,00	(950.000,00)	99,89
5 . 3.06	**Perdagangan**	114.340.725,00	112.586.197,00	(1.754.528,00)	98,47
5 . 3.06 . 2-17.3-30.3-31.01	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN**	114.340.725,00	112.586.197,00	(1.754.528,00)	98,47
5 . 3.06 . 2-17.3-30.3-31.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	114.340.725,00	112.586.197,00	(1.754.528,00)	98,47
5 . 3.06 . 2-17.3-30.3-31.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 3.06 . 2-17.3-30.3-31.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.340.725,00	112.586.197,00	(1.754.528,00)	98,47

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5 . 3.07	**Perindustrian**	460.100.600,00	432.490.150,00	(27.610.450,00)	94,00
5 . 3.07 . 2-17.3-30.3-31.01	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN**	460.100.600,00	432.490.150,00	(27.610.450,00)	94,00
5 . 3.07 . 2-17.3-30.3-31.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	460.100.600,00	432.490.150,00	(27.610.450,00)	94,00
5 . 3.07 . 2-17.3-30.3-31.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	460.100.600,00	432.490.150,00	(27.610.450,00)	94,00
5 . 3.07 . 2-17.3-30.3-31.01 . 2	**BELANJA MODAL**	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 3.07 . 2-17.3-30.3-31.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 3.08	**Transmigrasi**	3.080.770.600,00	2.961.528.696,00	(119.241.904,00)	96,13
5 . 3.08 . 3-32.2-07.0-00.01	**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**	3.080.770.600,00	2.961.528.696,00	(119.241.904,00)	96,13
5 . 3.08 . 3-32.2-07.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	3.072.270.600,00	2.953.528.696,00	(118.741.904,00)	96,14
5 . 3.08 . 3-32.2-07.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.281.818.000,00	2.213.982.661,00	(67.835.339,00)	97,03
5 . 3.08 . 3-32.2-07.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	790.452.600,00	739.546.035,00	(50.906.565,00)	93,56
5 . 3.08 . 3-32.2-07.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	8.500.000,00	8.000.000,00	(500.000,00)	94,12
5 . 3.08 . 3-32.2-07.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.500.000,00	8.000.000,00	(500.000,00)	94,12
5 . 4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**	239.999.141.483,00	234.594.583.986,00	(5.404.557.497,00)	97,75
5 . 4.01	**Administrasi Pemerintahan**	34.429.386.096,00	90.784.817.327,00	56.355.431.231,00	263,68
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	34.429.386.096,00	34.244.751.327,00	(184.634.769,00)	99,46
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	30.138.581.996,00	29.975.200.127,00	(163.381.869,00)	99,46
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	7.674.235.041,00	7.545.714.928,00	(128.520.113,00)	98,33
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.259.346.955,00	21.224.485.199,00	(34.861.756,00)	99,84
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	1.205.000.000,00	1.205.000.000,00	0,00	100,00
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	4.290.804.100,00	4.269.551.200,00	(21.252.900,00)	99,50
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.700.008.100,00	3.681.449.000,00	(18.559.100,00)	99,50
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	510.046.000,00	507.352.200,00	(2.693.800,00)	99,47
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	80.750.000,00	80.750.000,00	0,00	100,00
5 . 4.01 . 5-02.0-00.0-00.01	**BADAN KEUANGAN DAERAH**	0,00	56.540.066.000,00	56.540.066.000,00	0,00
5 . 4.01 . 5-02.0-00.0-00.01 . 4	**BELANJA TRANSFER**	0,00	56.540.066.000,00	56.540.066.000,00	0,00
5 . 4.01 . 5-02.0-00.0-00.01 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	56.540.066.000,00	56.540.066.000,00	0,00
5 . 4.02	**Pengawasan**	5.429.651.900,00	5.282.020.848,00	(147.631.052,00)	97,28
5 . 4.02 . 6-01.0-00.0-00.01	**INSPEKTORAT KABUPATEN**	5.429.651.900,00	5.282.020.848,00	(147.631.052,00)	97,28
5 . 4.02 . 6-01.0-00.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	5.210.674.100,00	5.075.869.548,00	(134.804.552,00)	97,41
5 . 4.02 . 6-01.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.095.714.050,00	3.025.853.103,00	(69.860.947,00)	97,74
5 . 4.02 . 6-01.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.114.960.050,00	2.050.016.445,00	(64.943.605,00)	96,93
5 . 4.02 . 6-01.0-00.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	218.977.800,00	206.151.300,00	(12.826.500,00)	94,14
5 . 4.02 . 6-01.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	218.977.800,00	206.151.300,00	(12.826.500,00)	94,14

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5 . 4.03	**Perencanaan**	4.889.318.352,00	4.676.835.910,00	(212.482.442,00)	95,65
5 . 4.03 . 5-01.5-05.0-00.01	**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN**	4.889.318.352,00	4.676.835.910,00	(212.482.442,00)	95,65
5 . 4.03 . 5-01.5-05.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	4.879.318.352,00	4.666.985.910,00	(212.332.442,00)	95,65
5 . 4.03 . 5-01.5-05.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.501.578.000,00	2.405.008.313,00	(96.569.687,00)	96,14
5 . 4.03 . 5-01.5-05.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.377.740.352,00	2.261.977.597,00	(115.762.755,00)	95,13
5 . 4.03 . 5-01.5-05.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	10.000.000,00	9.850.000,00	(150.000,00)	98,50
5 . 4.03 . 5-01.5-05.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	9.850.000,00	(150.000,00)	98,50
5 . 4.04	**Keuangan**	132.520.070.730,00	130.707.270.572,00	1.812.800.158,00	98,63
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01	**BADAN KEUANGAN DAERAH**	132.520.070.730,00	130.707.270.572,00	530.551.126,00	55,97
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	19.043.634.945,00	18.438.339.999,00	(605.294.946,00)	96,82
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	12.511.130.383,00	12.123.166.251,00	(387.964.132,00)	96,90
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.532.504.562,00	6.315.173.748,00	(217.330.814,00)	96,67
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	180.718.900,00	180.450.000,00	(268.900,00)	99,85
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.718.900,00	81.450.000,00	(268.900,00)	99,67
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	100,00
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01 . 3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	200.000.000,00	164.439.330,00	(35.560.670,00)	82,22
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01 . 3 . 1	Belanja Tidak Terduga	200.000.000,00	164.439.330,00	(35.560.670,00)	82,22
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01 . 4	**BELANJA TRANSFER**	113.095.716.885,00	111.924.041.243,00	1.171.675.642,00	48,97
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01 . 4 . 1	Belanja Bagi Hasil	3.032.853.885,00	1.861.178.243,00	1.171.675.642,00	61,37
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	110.062.863.000,00	110.062.863.000,00	0,00	48,63
5 . 4.05	**Kepegawaian**	5.073.000.814,00	4.843.440.613,00	(229.560.201,00)	95,47
5 . 4.05 . 5-03.5-04.0-00.01	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**	5.073.000.814,00	4.843.440.613,00	(229.560.201,00)	95,47
5 . 4.05 . 5-03.5-04.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	4.988.271.914,00	4.761.604.613,00	(226.667.301,00)	95,46
5 . 4.05 . 5-03.5-04.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.430.259.994,00	3.237.479.916,00	(192.780.078,00)	94,38
5 . 4.05 . 5-03.5-04.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.558.011.920,00	1.524.124.697,00	(33.887.223,00)	97,82
5 . 4.05 . 5-03.5-04.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	84.728.900,00	81.836.000,00	(2.892.900,00)	96,59
5 . 4.05 . 5-03.5-04.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.728.900,00	81.836.000,00	(2.892.900,00)	96,59
5 . 4.06	**Pendidikan dan Pelatihan**	1.009.748.000,00	1.009.055.750,00	(692.250,00)	99,93
5 . 4.06 . 5-03.5-04.0-00.01	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**	1.009.748.000,00	1.009.055.750,00	(692.250,00)	99,93
5 . 4.06 . 5-03.5-04.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	1.009.748.000,00	1.009.055.750,00	(692.250,00)	99,93
5 . 4.06 . 5-03.5-04.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.009.748.000,00	1.009.055.750,00	(692.250,00)	99,93
5 . 4.07	**Penelitian dan Pengembangan**	123.107.550,00	114.557.592,00	(8.549.958,00)	93,05
5 . 4.07 . 5-01.5-05.0-00.01	**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN**	123.107.550,00	114.557.592,00	(8.549.958,00)	93,05
5 . 4.07 . 5-01.5-05.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	123.107.550,00	114.557.592,00	(8.549.958,00)	93,05

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5 . 4.07 . 5-01.5-05.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	123.107.550,00	114.557.592,00	(8.549.958,00)	93,05
5 . 4.08	**Sekretariat DPRD**	38.800.211.471,00	36.708.201.189,00	(2.092.010.282,00)	94,61
5 . 4.08 . 4-02.0-00.0-00.01	**SEKRETARIAT DPRD**	38.800.211.471,00	36.708.201.189,00	(2.092.010.282,00)	94,61
5 . 4.08 . 4-02.0-00.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	37.828.442.571,00	35.837.947.290,00	(1.990.495.281,00)	94,74
5 . 4.08 . 4-02.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	14.574.308.076,00	14.026.540.752,00	(547.767.324,00)	96,24
5 . 4.08 . 4-02.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.254.134.495,00	21.811.406.538,00	(1.442.727.957,00)	93,80
5 . 4.08 . 4-02.0-00.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	971.768.900,00	870.253.899,00	(101.515.001,00)	89,55
5 . 4.08 . 4-02.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	740.268.900,00	646.768.999,00	(93.499.901,00)	87,37
5 . 4.08 . 4-02.0-00.0-00.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 4.08 . 4-02.0-00.0-00.01 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	124.000.000,00	123.484.900,00	(515.100,00)	99,58
5 . 4.08 . 4-02.0-00.0-00.01 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	107.500.000,00	100.000.000,00	(7.500.000,00)	93,02
5 . 4.11	**Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan**	15.476.593.390,00	14.863.807.047,00	(612.786.343,00)	96,04
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.01	**KECAMATAN PULAU PUNJUNG**	1.608.481.440,00	1.563.240.440,00	(45.241.000,00)	97,19
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	1.608.481.440,00	1.563.240.440,00	(45.241.000,00)	97,19
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.310.273.290,00	1.275.142.742,00	(35.130.548,00)	97,32
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	298.208.150,00	288.097.698,00	(10.110.452,00)	96,61
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.02	**KECAMATAN SITIUNG**	1.627.404.800,00	1.585.748.265,00	(41.656.535,00)	97,44
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.02 . 1	**BELANJA OPERASI**	1.627.404.800,00	1.585.748.265,00	(41.656.535,00)	97,44
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.02 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.401.328.000,00	1.360.873.021,00	(40.454.979,00)	97,11
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.02 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	226.076.800,00	224.875.244,00	(1.201.556,00)	99,47
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.03	**KECAMATAN KOTO BARU**	1.697.773.200,00	1.530.418.845,00	(167.354.355,00)	90,14
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.03 . 1	**BELANJA OPERASI**	1.697.773.200,00	1.530.418.845,00	(167.354.355,00)	90,14
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.03 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.371.313.000,00	1.209.373.604,00	(161.939.396,00)	88,19
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.03 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	326.460.200,00	321.045.241,00	(5.414.959,00)	98,34
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.04	**KECAMATAN SUNGAI RUMBAI**	1.404.666.400,00	1.366.707.712,00	(37.958.688,00)	97,30
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.04 . 1	**BELANJA OPERASI**	1.404.666.400,00	1.366.707.712,00	(37.958.688,00)	97,30
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.04 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.141.550.400,00	1.104.457.995,00	(37.092.405,00)	96,75
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.04 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	263.116.000,00	262.249.717,00	(866.283,00)	99,67
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.05	**KECAMATAN SEMBILAN KOTO**	1.714.944.000,00	1.661.350.473,00	(53.593.527,00)	96,87
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.05 . 1	**BELANJA OPERASI**	1.714.944.000,00	1.661.350.473,00	(53.593.527,00)	96,87
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.05 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.453.267.000,00	1.403.126.223,00	(50.140.777,00)	96,55
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.05 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	261.677.000,00	258.224.250,00	(3.452.750,00)	98,68
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.06	**KECAMATAN TIMPEH**	1.153.703.000,00	1.098.919.537,00	(54.783.463,00)	95,25

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.06 . 1	**BELANJA OPERASI**	1.153.703.000,00	1.098.919.537,00	(54.783.463,00)	95,25
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.06 . 1 . 1	Belanja Pegawai	915.689.000,00	862.510.503,00	(53.178.497,00)	94,19
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.06 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	238.014.000,00	236.409.034,00	(1.604.966,00)	99,33
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.07	**KECAMATAN KOTO SALAK**	1.357.181.200,00	1.306.920.615,00	(50.260.585,00)	96,30
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.07 . 1	**BELANJA OPERASI**	1.357.181.200,00	1.306.920.615,00	(50.260.585,00)	96,30
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.07 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.109.381.200,00	1.063.343.237,00	(46.037.963,00)	95,85
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.07 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	247.800.000,00	243.577.378,00	(4.222.622,00)	98,30
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.08	**KECAMATAN ASAM JUJUHAN**	1.177.221.776,00	1.135.263.702,00	(41.958.074,00)	96,44
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.08 . 1	**BELANJA OPERASI**	1.177.221.776,00	1.135.263.702,00	(41.958.074,00)	96,44
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.08 . 1 . 1	Belanja Pegawai	945.339.400,00	907.878.018,00	(37.461.382,00)	96,04
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.08 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	231.882.376,00	227.385.684,00	(4.496.692,00)	98,06
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.09	**KECAMATAN KOTO BESAR**	1.403.710.800,00	1.371.786.582,00	(31.924.218,00)	97,73
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.09 . 1	**BELANJA OPERASI**	1.403.710.800,00	1.371.786.582,00	(31.924.218,00)	97,73
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.09 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.144.763.000,00	1.113.132.182,00	(31.630.818,00)	97,24
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.09 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	258.947.800,00	258.654.400,00	(293.400,00)	99,89
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.10	**KECAMATAN PADANG LAWEH**	1.084.899.700,00	1.043.962.483,00	(40.937.217,00)	96,23
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.10 . 1	**BELANJA OPERASI**	1.084.899.700,00	1.043.962.483,00	(40.937.217,00)	96,23
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.10 . 1 . 1	Belanja Pegawai	854.108.000,00	816.340.299,00	(37.767.701,00)	95,58
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.10 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	230.791.700,00	227.622.184,00	(3.169.516,00)	98,63
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.11	**KECAMATAN TIUMANG**	1.246.607.074,00	1.199.488.393,00	(47.118.681,00)	96,22
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.11 . 1	**BELANJA OPERASI**	1.246.607.074,00	1.199.488.393,00	(47.118.681,00)	96,22
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.11 . 1 . 1	Belanja Pegawai	943.493.974,00	904.871.020,00	(38.622.954,00)	95,91
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.11 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	303.113.100,00	294.617.373,00	(8.495.727,00)	97,20
5 . 4.12	**Kesatuan Bangsa dan Politik**	2.248.053.180,00	2.144.643.138,00	(103.410.042,00)	95,40
5 . 4.12 . 8-01.0-00.0-00.01	**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	2.248.053.180,00	2.144.643.138,00	(103.410.042,00)	95,40
5 . 4.12 . 8-01.0-00.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	2.248.053.180,00	2.144.643.138,00	(103.410.042,00)	95,40
5 . 4.12 . 8-01.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	816.527.000,00	763.393.658,00	(53.133.342,00)	93,49
5 . 4.12 . 8-01.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	603.135.300,00	589.686.860,00	(13.448.440,00)	97,77
5 . 4.12 . 8-01.0-00.0-00.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	828.390.880,00	791.562.620,00	(36.828.260,00)	95,55
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
6 . 4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**				
6 . 4.01	**Administrasi Pemerintahan**				

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
6 . 4.01 . 5-02.0-00.0-00.01	**BADAN KEUANGAN DAERAH**				
6 . 4.01 . 5-02.0-00.0-00.01 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	8.334.425.206,00	8.334.425.206,49	0,49	100,00
6 . 4.01 . 5-02.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	8.334.425.206,00	8.334.425.206,49	0,49	100,00

Printed By SimDa

Lampiran I.2 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
Nomor : 4 Tahun 2022
Tanggal : 13 Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode Rek	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp	%
1	2	3	4	5	6
4.	**PENDAPATAN**	**980.426.098.722,00**	**978.920.717.101,87**	**(1.505.381.620,13)**	99,85
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**84.352.675.707,00**	**82.829.461.520,87**	**(1.523.214.186,13)**	98,19
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	20.381.633.896,00	20.495.633.388,25	113.999.492,25	100,56
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	3.161.472.400,00	2.411.365.382,00	(750.107.018,00)	76,27
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.524.570.411,00	3.524.570.411,00	0,00	100,00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	57.284.999.000,00	56.397.892.339,62	(887.106.660,38)	98,45
4.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**838.634.243.015,00**	**838.657.002.069,00**	**22.759.054,00**	100,00
4.2.1.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**707.287.175.461,00**	**713.844.105.329,00**	**6.556.929.868,00**	**100,93**
4.2.1.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18.220.352.461,00	33.662.555.569,00	15.442.203.108,00	184,75
4.2.1.3.	Dana Alokasi Umum (DAU)	472.416.143.000,00	472.416.143.000,00	0,00	100,00
4.2.1.4.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	216.650.680.000,00	207.765.406.760,00	(8.885.273.240,00)	95,90
4.2.2.	**Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya**	**73.540.405.000,00**	**73.540.405.000,00**	0,00	**100,00**
4.2.2.1.	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.2.	Dana Penyesuaian	73.540.405.000,00	73.540.405.000,00	0,00	100,00
4.2.3.	**Transfer Pemerintah Provinsi**	**57.806.662.554,00**	**51.272.491.740,00**	**(6.534.170.814,00)**	**88,70**
4.2.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	57.806.662.554,00	51.272.491.740,00	(6.534.170.814,00)	88,70
4.2.3.2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.	Bantuan keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**57.439.180.000,00**	**57.434.253.512,00**	**(4.926.488,00)**	**99,99**
4.3.1.	Pendapatan Hibah Pemerintah	26.550.000.000,00	26.548.313.512,00	(1.686.488,00)	99,99
4.3.3.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.6.	Pendapatan Lainnya	30.889.180.000,00	30.885.940.000,00	(3.240.000,00)	99,99
	JUMLAH PENDAPATAN	**980.426.098.722,00**	**978.920.717.101,87**	**(1.505.381.620,13)**	**99,85**
5.	**BELANJA DAERAH**	**875.664.807.043,00**	**805.124.115.082,65**	**70.540.691.960,35**	**91,94**
5.1.	**BELANJA OPERASI**	**670.900.234.079,00**	**638.706.924.536,16**	**32.193.309.542,84**	**95,20**
5.1.1.	Belanja Pegawai	392.156.278.668,00	380.289.821.307,81	11.866.457.360,19	96,97
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	266.795.934.531,00	246.612.992.141,35	20.182.942.389,65	92,44
5.1.3.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5.	Belanja Hibah	11.948.020.880,00	11.804.111.087,00	143.909.793,00	98,80
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	**BELANJA MODAL**	**204.564.572.964,00**	**166.252.751.216,49**	**38.311.821.747,51**	**81,27**
5.2.1.	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Peralatan dan mesin	55.037.876.152,00	51.541.549.729,92	3.496.326.422,08	93,65

Kode Rek	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.	Gedung dan Bangunan	95.190.939.423,00	85.986.356.136,57	9.204.583.286,43	90,33
5.2.4.	Jalan, irigasi dan jaringan	47.643.071.051,00	22.155.213.262,00	25.487.857.789,00	46,50
5.2.5.	Aset Tetap lainnya	6.692.686.338,00	6.569.632.088,00	123.054.250,00	98,16
5.3.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**200.000.000,00**	**164.439.330,00**	**35.560.670,00**	**82,22**
5.3.1.	Belanja Tidak Terduga	200.000.000,00	164.439.330,00	35.560.670,00	82,22
	JUMLAH BELANJA	**875.664.807.043,00**	**805.124.115.082,65**	**70.540.691.960,35**	**91,94**
6.	**TRANSFER**	**113.095.716.885,00**	**111.924.041.243,00**	**1.171.675.642,00**	**98,96**
6.1.	**TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN**	**3.032.853.885,00**	**1.861.178.243,00**	**1.171.675.642,00**	**61,37**
6.1.1.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2.646.367.375,00	1.658.321.536,00	988.045.839,00	62,66
6.1.2.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	386.486.510,00	202.856.707,00	(183.629.803,00)	52,49
6.2.	**TRANSFER BANTUAN KEUANGAN**	**110.062.863.000,00**	**110.062.863.000,00**	0,00	**100,00**
6.2.1.	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	110.062.863.000,00	110.062.863.000,00	0,00	100,00
6.2.3.	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	**988.760.523.928,00**	**917.048.156.325,65**	**71.712.367.602,35**	**92,75**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(8.334.425.206,00)**	**61.872.560.776,22**	**(70.206.985.982,22)**	**- 742,37**
7.	**PEMBIAYAAN**	**8.334.425.206,00**	**8.334.425.206,49**	0,49	**100,00**
7.1.	**PENERIMAAN DAERAH**	**8.334.425.206,00**	**8.334.425.206,49**	0,49	**100,00**
7.1.1.	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	8.334.425.206,00	8.334.425.206,49	0,49	100,00
7.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	
7.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	
7.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	
7.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman Daerah	-	-	-	
7.1.6.	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN	**8.334.425.206,00**	**8.334.425.206,49**	**0,49**	**100,00**
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-		-	100,00
6.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	-	-	100,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN	-	-	-	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**8.334.425.206,00**	**8.334.425.206,49**		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) SEBELUM KOREKSI		70.206.985.982,71	70.206.985.982,71	-
	Koreksi SILPA				
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)SETELAH KOREKSI		70.206.985.982,71	70.206.985.982,71	-

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Lampiran 1.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	45.750.000,00	76.815.000,00	31.065.000,00	167,90	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	45.750.000,00	76.815.000,00	31.065.000,00	167,90	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	45.750.000,00	76.815.000,00	31.065.000,00	167,90	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 02 . 01 . 5	**BELANJA DAERAH**	289.119.182.393,00	280.921.982.966,83	8.197.199.426,17	97,16	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	202.729.421.808,00	196.581.400.128,00	6.148.021.680,00	96,97	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	202.729.421.808,00	196.581.400.128,00	6.148.021.680,00	96,97	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	202.729.421.808,00	196.581.400.128,00	6.148.021.680,00	96,97	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	295.098.250,00	294.816.115,00	282.135,00	99,90	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	7.522.000,00	7.503.000,00	19.000,00	99,75	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.522.000,00	7.503.000,00	19.000,00	99,75	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	58.296.000,00	58.296.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.296.000,00	58.296.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 06 . 03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	17.191.400,00	17.170.400,00	21.000,00	99,88	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.191.400,00	17.170.400,00	21.000,00	99,88	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	40.000.000,00	39.980.000,00	20.000,00	99,95	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.980.000,00	20.000,00	99,95	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	71.626.600,00	71.595.000,00	31.600,00	99,96	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.626.600,00	71.595.000,00	31.600,00	99,96	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	100.462.250,00	100.271.715,00	190.535,00	99,81	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.462.250,00	100.271.715,00	190.535,00	99,81	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	6.761.870.000,00	6.512.424.130,00	249.445.870,00	96,31	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	113.000.000,00	110.744.130,00	2.255.870,00	98,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.000.000,00	110.744.130,00	2.255.870,00	98,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 08 . 03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	9.020.000,00	9.020.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 08 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.020.000,00	9.020.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	6.639.850.000,00	6.392.660.000,00	247.190.000,00	96,28	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	153.400.000,00	153.400.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.486.450.000,00	6.239.260.000,00	247.190.000,00	96,19	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	64.275.850,00	63.337.650,00	938.200,00	98,54	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	64.275.850,00	63.337.650,00	938.200,00	98,54	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.275.850,00	63.337.650,00	938.200,00	98,54	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	18.632.101.391,00	18.513.675.319,00	118.426.072,00	99,36	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 06	*Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah*	230.000.000,00	229.600.000,00	400.000,00	99,83	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	230.000.000,00	229.600.000,00	400.000,00	99,83	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 1 . 5	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 23	*Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik*	36.807.000,00	34.299.000,00	2.508.000,00	93,19	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 23 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.807.000,00	34.299.000,00	2.508.000,00	93,19	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 25	*Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa*	26.673.800,00	20.330.700,00	6.343.100,00	76,22	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 25 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.673.800,00	20.330.700,00	6.343.100,00	76,22	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 27	*Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar*	644.986.050,00	643.462.050,00	1.524.000,00	99,76	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 27 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	644.986.050,00	643.462.050,00	1.524.000,00	99,76	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 29	*Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar*	17.693.634.541,00	17.585.983.569,00	107.650.972,00	99,39	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 29 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.693.634.541,00	17.585.983.569,00	107.650.972,00	99,39	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 29 . 5 . 1 . 5	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	8.464.179.056,00	8.415.340.117,00	48.838.939,00	99,42	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 12	*Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah*	550.000.000,00	549.370.417,00	629.583,00	99,89	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.575.000,00	425.000,00	99,79	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 1 . 5	Belanja Hibah	350.000.000,00	349.795.417,00	204.583,00	99,94	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 36	*Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik*	27.539.000,00	21.449.000,00	6.090.000,00	77,89	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 36 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.539.000,00	21.449.000,00	6.090.000,00	77,89	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 38	*Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa*	22.368.000,00	21.488.000,00	880.000,00	96,07	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 38 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.368.000,00	21.488.000,00	880.000,00	96,07	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 42	*Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama*	7.864.272.056,00	7.823.032.700,00	41.239.356,00	99,48	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 42 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.864.272.056,00	7.823.032.700,00	41.239.356,00	99,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 42 . 5 . 1 . 5	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	4.688.063.750,00	4.673.125.422,00	14.938.328,00	99,68	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 02	*Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 1 . 5	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 11	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD*	4.609.800.000,00	4.599.300.000,00	10.500.000,00	99,77	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 11 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 11 . 5 . 1 . 5	Belanja Hibah	4.609.800.000,00	4.599.300.000,00	10.500.000,00	99,77	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 12	*Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD*	7.607.000,00	4.550.872,00	3.056.128,00	59,82	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 12 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.607.000,00	4.550.872,00	3.056.128,00	59,82	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 17	*Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD*	70.656.750,00	69.274.550,00	1.382.200,00	98,04	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 17 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.656.750,00	69.274.550,00	1.382.200,00	98,04	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 18	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	938.215.450,00	878.641.250,00	59.574.200,00	93,65	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 18 . 12	*Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan*	938.215.450,00	878.641.250,00	59.574.200,00	93,65	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 18 . 12 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.215.450,00	18.391.250,00	3.824.200,00	82,79	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 18 . 12 . 5 . 1 . 5	Belanja Hibah	916.000.000,00	860.250.000,00	55.750.000,00	93,91	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 19	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	19.527.000,00	14.330.000,00	5.197.000,00	73,39	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 19 . 01	*Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar*	19.527.000,00	14.330.000,00	5.197.000,00	73,39	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.527.000,00	14.330.000,00	5.197.000,00	73,39	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 21	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	107.996.000,00	106.005.200,00	1.990.800,00	98,16	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 21 . 01	*Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	107.996.000,00	106.005.200,00	1.990.800,00	98,16	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.996.000,00	56.005.200,00	1.990.800,00	96,57	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	291.358.300,00	289.465.000,00	1.893.300,00	99,35	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 07 . 10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	291.358.300,00	289.465.000,00	1.893.300,00	99,35	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156.358.300,00	154.755.000,00	1.603.300,00	98,97	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 07 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	135.000.000,00	134.710.000,00	290.000,00	99,79	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	33.218.726.528,00	32.038.533.204,68	1.180.193.323,32	96,45	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 06	*Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah*	170.000.000,00	169.700.000,00	300.000,00	99,82	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	170.000.000,00	169.700.000,00	300.000,00	99,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 08	*Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas*	15.232.313.898,00	14.633.707.508,00	598.606.390,00	96,07	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.232.313.898,00	14.633.707.508,00	598.606.390,00	96,07	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 09	*Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU*	2.359.040.052,00	2.207.325.488,76	151.714.563,24	93,57	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.359.040.052,00	2.207.325.488,76	151.714.563,24	93,57	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 10	*Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah*	222.646.750,00	195.922.776,46	26.723.973,54	88,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	222.646.750,00	195.922.776,46	26.723.973,54	88,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 11	*Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah*	948.475.115,00	894.178.713,46	54.296.401,54	94,28	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	948.475.115,00	894.178.713,46	54.296.401,54	94,28	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 14	*Pengadaan Mebel Sekolah*	1.672.277.185,00	1.476.731.038,00	195.546.147,00	88,31	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.672.277.185,00	1.476.731.038,00	195.546.147,00	88,31	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 16	*Pengadaan Perlengkapan Sekolah*	1.193.900.000,00	1.189.625.400,00	4.274.600,00	99,64	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.170.000.000,00	1.170.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.900.000,00	19.625.400,00	4.274.600,00		
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 22	*Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa*	6.888.800.000,00	6.747.680.652,00	141.119.348,00	97,95	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.854.300.000,00	6.747.680.652,00	106.619.348,00	98,44	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.500.000,00	0,00	34.500.000,00	82,11	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 29	*Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar*	4.531.273.528,00	4.523.661.628,00	7.611.900,00	99,83	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.531.273.528,00	4.523.661.628,00	7.611.900,00	99,83	-
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	11.634.322.810,00	11.274.509.511,15	359.813.298,85	96,91	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 12	*Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 14	*Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah*	5.239.484.400,00	4.982.725.864,78	256.758.535,22	95,10	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.239.484.400,00	4.982.725.864,78	256.758.535,22	95,10	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 15	*Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah*	969.345.634,00	944.943.045,11	24.402.588,89	97,48	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	969.345.634,00	944.943.045,11	24.402.588,89	97,48	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 17	*Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah*	675.794.700,00	642.294.871,55	33.499.828,45	95,04	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	675.794.700,00	642.294.871,55	33.499.828,45	95,04	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 18	*Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium*	441.548.400,00	409.372.489,71	32.175.910,29	92,71	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.060.000,00	170.235.000,00	28.825.000,00	85,52	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	242.488.400,00	239.137.489,71	3.350.910,29	98,62	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 24	*Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah*	53.894.500,00	52.210.000,00	1.684.500,00	96,87	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.894.500,00	52.210.000,00	1.684.500,00	96,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 25	*Pengadaan Mebel Sekolah*	620.442.366,00	617.058.480,00	3.383.886,00	99,45	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	620.442.366,00	617.058.480,00	3.383.886,00	99,45	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 27	*Pengadaan Perlengkapan Sekolah*	184.450.000,00	181.500.000,00	2.950.000,00	98,40	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	184.450.000,00	181.500.000,00	2.950.000,00	98,40	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 35	*Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa*	2.008.100.000,00	2.005.706.500,00	2.393.500,00	99,88	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.000.700.000,00	2.000.021.500,00	678.500,00	99,97	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 35 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.400.000,00	5.685.000,00	1.715.000,00	85,52	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 42	*Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama*	1.441.262.810,00	1.438.698.260,00	2.564.550,00	99,82	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 42 . 5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.441.262.810,00	1.438.698.260,00	2.564.550,00	99,82	-
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	1.274.026.200,00	1.266.379.920,00	7.646.280,00	99,40	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 02	*Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD*	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 03	*Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD*	1.052.835.000,00	1.046.042.000,00	6.793.000,00	99,35	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	650.203.750,00	649.159.000,00	1.044.750,00	99,84	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	402.631.250,00	396.883.000,00	5.748.250,00	98,57	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 12	*Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD*	196.191.200,00	195.337.920,00	853.280,00	99,57	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	195.341.200,00	195.337.920,00	3.280,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 17	*Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD*	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 17 . 17 . 5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	-
	SURPLUS / (DEFISIT)	(289.073.432.393,00)	(280.845.167.966,83)	(8.228.264.426,17)	97,15	

Printed By SimDa

Lampiran 1.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit : 1 . 02 . DINAS KESEHATAN

		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	3.980.743.000,00	3.122.952.231,00	(857.790.769,00)	257,68	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	3.980.743.000,00	3.122.952.231,00	(857.790.769,00)	257,68	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	254.680.000,00	245.225.100,00	(9.454.900,00)	96,29	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain PAD yang Sah	3.726.063.000,00	2.877.727.131,00	(848.335.869,00)	262,65	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 01 . 5	**BELANJA DAERAH**	130.799.218.193,00	119.761.199.820,07	11.038.018.372,93	91,56	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	384.430.800,00	344.304.360,00	40.126.440,00	89,56	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	17.760.800,00	17.712.750,00	48.050,00	99,73	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.760.800,00	17.712.750,00	48.050,00	99,73	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	18.678.000,00	18.598.000,00	80.000,00	99,57	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.678.000,00	18.598.000,00	80.000,00	99,57	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	347.992.000,00	307.993.610,00	39.998.390,00	88,51	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	347.992.000,00	307.993.610,00	39.998.390,00	88,51	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	47.408.210.000,00	46.980.917.401,00	427.292.599,00	99,10	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	47.408.210.000,00	46.980.917.401,00	427.292.599,00	99,10	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	44.101.310.000,00	43.748.115.882,00	353.194.118,00	99,20	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.306.900.000,00	3.232.801.519,00	74.098.481,00	97,76	

		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	308.680.082,00	308.549.491,00	130.591,00	99,96	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	7.984.000,00	7.984.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.984.000,00	7.984.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	59.999.732,00	59.999.732,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.999.732,00	59.999.732,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	14.996.000,00	14.940.000,00	56.000,00	99,63	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.996.000,00	14.940.000,00	56.000,00	99,63	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	49.999.800,00	49.992.800,00	7.000,00	99,99	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.999.800,00	49.992.800,00	7.000,00	99,99	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	166.700.550,00	166.632.959,00	67.591,00	99,96	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	166.700.550,00	166.632.959,00	67.591,00	99,96	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	3.799.105.000,00	3.707.001.678,00	92.103.322,00	97,58	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	111.800.000,00	71.976.678,00	39.823.322,00	64,38	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.800.000,00	71.976.678,00	39.823.322,00	64,38	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	3.397.860.000,00	3.345.710.000,00	52.150.000,00	98,47	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	222.650.000,00	222.550.000,00	100.000,00	99,96	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.175.210.000,00	3.123.160.000,00	52.050.000,00	98,36	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	344.790.000,00	337.433.200,00	7.356.800,00	97,87	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	11.790.000,00	11.754.000,00	36.000,00	99,69	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.790.000,00	11.754.000,00	36.000,00	99,69	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	133.000.000,00	127.733.200,00	5.266.800,00	96,04	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.000.000,00	127.733.200,00	5.266.800,00	96,04	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	200.000.000,00	197.946.000,00	2.054.000,00	98,97	

		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00 . 09 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	197.946.000,00	2.054.000,00	98,97	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	10.841.522.347,00	9.482.708.023,33	1.358.814.323,67	87,47	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 10 . 01	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	10.841.522.347,00	9.482.708.023,33	1.358.814.323,67	87,47	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 10 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.985.127.693,00	3.441.277.436,81	543.850.256,19	86,35	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 10 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.856.394.654,00	6.041.430.586,52	814.964.067,48	88,11	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	3.094.674.400,00	2.781.399.705,00	313.274.695,00	89,88	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 01	*Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya*	653.600.000,00	532.045.200,00	121.554.800,00	81,40	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	653.600.000,00	532.045.200,00	121.554.800,00	81,40	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 02	*Pembangunan Puskesmas*	75.156.400,00	36.540.270,00	38.616.130,00	48,62	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.156.400,00	36.540.270,00	38.616.130,00	48,62	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 06	*Pengembangan Puskesmas*	60.005.000,00	59.718.400,00	286.600,00	99,52	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.005.000,00	59.718.400,00	286.600,00	99,52	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 09	*Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 13	*Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	55.200.000,00	1.494.000,00	53.706.000,00	2,71	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 13 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.200.000,00	1.494.000,00	53.706.000,00	2,71	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 14	*Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	36.800.000,00	11.377.000,00	25.423.000,00	30,92	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 14 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.800.000,00	11.377.000,00	25.423.000,00	30,92	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 16	*Pengadaan Obat, Vaksin*	1.073.894.480,00	1.060.082.340,00	13.812.140,00	98,71	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.073.894.480,00	1.060.082.340,00	13.812.140,00	98,71	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 17	*Pengadaan Bahan Habis Pakai*	1.140.018.520,00	1.080.142.495,00	59.876.025,00	94,75	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 17 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.140.018.520,00	1.080.142.495,00	59.876.025,00	94,75	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	32.693.476.790,00	27.280.278.779,00	5.413.198.011,00	83,44	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 01	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil*	48.990.000,00	43.752.000,00	5.238.000,00	89,31	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.990.000,00	43.752.000,00	5.238.000,00	89,31	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 02	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin*	1.075.194.100,00	695.002.675,00	380.191.425,00	64,64	

		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.075.194.100,00	695.002.675,00	380.191.425,00	64,64	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 05	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar*	34.835.200,00	32.607.000,00	2.228.200,00	93,60	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.835.200,00	32.607.000,00	2.228.200,00	93,60	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 07	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut*	39.900.000,00	37.857.900,00	2.042.100,00	94,88	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 07 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.900.000,00	37.857.900,00	2.042.100,00	94,88	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 08	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi*	84.624.000,00	84.497.700,00	126.300,00	99,85	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 08 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.624.000,00	84.497.700,00	126.300,00	99,85	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 11	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis*	60.000.000,00	59.910.000,00	90.000,00	99,85	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 11 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.910.000,00	90.000,00	99,85	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 12	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV*	43.000.000,00	42.951.750,00	48.250,00	99,89	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000,00	42.951.750,00	48.250,00	99,89	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 13	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)*	4.704.267.750,00	2.307.873.183,00	2.396.394.567,00	49,06	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 13 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.704.267.750,00	2.307.873.183,00	2.396.394.567,00	49,06	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 15	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	43.110.000,00	37.619.000,00	5.491.000,00	87,26	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 15 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.110.000,00	37.619.000,00	5.491.000,00	87,26	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 16	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	31.985.000,00	31.519.000,00	466.000,00	98,54	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 16 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.985.000,00	31.519.000,00	466.000,00	98,54	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 17	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	68.637.000,00	68.453.500,00	183.500,00	99,73	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 17 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.637.000,00	68.453.500,00	183.500,00	99,73	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 19	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya*	77.086.000,00	76.960.500,00	125.500,00	99,84	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 19 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.086.000,00	76.960.500,00	125.500,00	99,84	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 20	*Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	650.608.754,00	648.961.803,00	1.646.951,00	99,75	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 20 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	650.608.754,00	648.961.803,00	1.646.951,00	99,75	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 22	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA*	48.199.000,00	48.064.700,00	134.300,00	99,72	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 22 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.199.000,00	48.064.700,00	134.300,00	99,72	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 23	*Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus*	119.887.900,00	119.032.800,00	855.100,00	99,29	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 23 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.887.900,00	119.032.800,00	855.100,00	99,29	

		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 25	*Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	113.332.000,00	113.216.250,00	115.750,00	99,90	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 25 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.332.000,00	113.216.250,00	115.750,00	99,90	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 26	*Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*	9.391.298.200,00	9.342.576.600,00	48.721.600,00	99,48	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 26 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.391.298.200,00	9.342.576.600,00	48.721.600,00	99,48	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 29	*Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*	37.375.000,00	37.083.000,00	292.000,00	99,22	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 29 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.375.000,00	37.083.000,00	292.000,00	99,22	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 32	*Operasional Pelayanan Rumah Sakit*	3.103.893.000,00	2.176.229.432,00	927.663.568,00	70,11	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 32 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.103.893.000,00	2.176.229.432,00	927.663.568,00	70,11	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 33	*Operasional Pelayanan Puskesmas*	11.142.683.000,00	10.407.313.774,00	735.369.226,00	93,40	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 33 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.142.683.000,00	10.407.313.774,00	735.369.226,00	93,40	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 34	*Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	861.857.886,00	825.596.212,00	36.261.674,00	95,79	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 34 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	861.857.886,00	825.596.212,00	36.261.674,00	95,79	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 35	*Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota*	912.713.000,00	43.200.000,00	869.513.000,00	4,73	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 35 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	912.713.000,00	43.200.000,00	869.513.000,00	4,73	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 17	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	105.199.300,00	104.703.650,00	495.650,00	99,53	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 02	*Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	105.199.300,00	104.703.650,00	495.650,00	99,53	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.199.300,00	104.703.650,00	495.650,00	99,53	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 19	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	64.804.600,00	64.770.600,00	34.000,00	99,95	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 02	*Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan*	64.804.600,00	64.770.600,00	34.000,00	99,95	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.804.600,00	64.770.600,00	34.000,00	99,95	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 20	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	35.160.800,00	32.887.400,00	2.273.400,00	93,53	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 03	*Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan*	35.160.800,00	32.887.400,00	2.273.400,00	93,53	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.160.800,00	32.887.400,00	2.273.400,00	93,53	

		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	201.461.100,00	189.046.700,00	12.414.400,00	93,84	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 01	*Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*	190.660.000,00	178.266.000,00	12.394.000,00	93,50	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	190.660.000,00	178.266.000,00	12.394.000,00	93,50	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 02	*Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*	10.801.100,00	10.780.700,00	20.400,00	99,81	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.801.100,00	10.780.700,00	20.400,00	99,81	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 24	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	315.123.000,00	309.301.600,00	5.821.400,00	98,15	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 24 . 01	*Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*	315.123.000,00	309.301.600,00	5.821.400,00	98,15	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 24 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	315.123.000,00	309.301.600,00	5.821.400,00	98,15	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 25	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	28.837.500,00	28.623.500,00	214.000,00	99,26	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 01	*Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)*	28.837.500,00	28.623.500,00	214.000,00	99,26	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.837.500,00	28.623.500,00	214.000,00	99,26	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 28	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	64.763.400,00	63.725.250,00	1.038.150,00	98,40	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 28 . 01	*Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	64.763.400,00	63.725.250,00	1.038.150,00	98,40	

		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00 . 28 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.763.400,00	63.725.250,00	1.038.150,00	98,40	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 29	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	33.150.000,00	32.632.500,00	517.500,00	98,44	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 29 . 01	*Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat*	33.150.000,00	32.632.500,00	517.500,00	98,44	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 29 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.150.000,00	32.632.500,00	517.500,00	98,44	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 30	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	68.936.800,00	68.495.500,00	441.300,00	99,36	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 30 . 01	*Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	68.936.800,00	68.495.500,00	441.300,00	99,36	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 30 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.936.800,00	68.495.500,00	441.300,00	99,36	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	87.149.800,00	86.908.800,00	241.000,00	99,72	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	87.149.800,00	86.908.800,00	241.000,00	99,72	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.149.800,00	86.908.800,00	241.000,00	99,72	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	230.300.600,00	204.938.600,00	25.362.000,00	88,99	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 07 . 05	*Pengadaan Mebel*	230.300.600,00	204.938.600,00	25.362.000,00	88,99	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	230.300.600,00	204.938.600,00	25.362.000,00	88,99	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	683.019.416,00	335.864.740,00	347.154.676,00	49,17	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 10 . 01	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	683.019.416,00	335.864.740,00	347.154.676,00	49,17	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	602.919.416,00	313.314.740,00	289.604.676,00	51,97	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 10 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 10 . 01 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 10 . 01 . 5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	55.100.000,00	22.550.000,00	32.550.000,00	40,93	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	29.508.161.044,00	26.524.717.368,74	2.983.443.675,26	89,89	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 01	*Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya*	9.859.551.524,00	8.492.568.302,00	1.366.983.222,00	86,14	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.859.551.524,00	8.492.568.302,00	1.366.983.222,00	86,14	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 02	*Pembangunan Puskesmas*	5.950.000.000,00	5.363.633.182,00	586.366.818,00	90,15	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.950.000.000,00	5.363.633.182,00	586.366.818,00	90,15	

		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 03	*Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	4.265.000.000,00	3.764.427.877,13	500.572.122,87	88,26	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.265.000.000,00	3.764.427.877,13	500.572.122,87	88,26	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 06	*Pengembangan Puskesmas*	2.959.000.000,00	2.826.451.988,42	132.548.011,58	95,52	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.959.000.000,00	2.826.451.988,42	132.548.011,58	95,52	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 09	*Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 10	*Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	150.000.000,00	148.484.672,19	1.515.327,81	98,99	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	148.484.672,19	1.515.327,81	98,99	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 13	*Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	2.415.332.000,00	2.298.057.000,00	117.275.000,00	95,14	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.360.000.000,00	1.347.709.000,00	12.291.000,00	99,10	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.000.000,00	10.990.000,00	10.000,00	99,91	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.044.332.000,00	939.358.000,00	104.974.000,00	89,95	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 14	*Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	3.909.277.520,00	3.631.094.347,00	278.183.173,00	92,88	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.909.277.520,00	3.631.094.347,00	278.183.173,00	92,88	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	787.706.414,00	781.305.974,00	6.400.440,00	99,19	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 32	*Operasional Pelayanan Rumah Sakit*	721.090.000,00	715.474.560,00	5.615.440,00	99,22	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	721.090.000,00	715.474.560,00	5.615.440,00	99,22	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 34	*Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	66.616.414,00	65.831.414,00	785.000,00	98,82	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.616.414,00	65.831.414,00	785.000,00	98,82	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(126.818.475.193,00)	(116.638.247.589,07)	(10.180.227.603,93)	91,97	

Lampiran I.3 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 RSUD SUNGAI DAREH
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 RSUD SUNGAI DAREH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	40.012.500.000,00	40.378.482.353,67	365.982.353,67	100,91	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	40.012.500.000,00	40.378.482.353,67	365.982.353,67	100,91	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	12.500.000,00	34.299.703,00	21.799.703,00	274,40	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain PAD yang Sah	40.000.000.000,00	40.344.182.650,67	344.182.650,67	100,86	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 01 . 5	**BELANJA DAERAH**	101.474.514.900,00	90.441.246.576,92	11.033.268.323,08	89,13	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	27.457.748.000,00	23.528.096.544,00	3.929.651.456,00	85,69	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	27.457.748.000,00	23.528.096.544,00	3.929.651.456,00	85,69	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	21.857.748.000,00	21.601.103.686,00	256.644.314,00	98,83	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000.000,00	1.926.992.858,00	3.673.007.142,00	34,41	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	38.813.585.000,00	37.667.084.781,00	1.146.500.219,00	97,05	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 . 01	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	38.813.585.000,00	37.667.084.781,00	1.146.500.219,00	97,05	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	13.617.877.586,00	13.311.589.208,00	306.288.378,00	97,75	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.195.707.414,00	24.355.495.573,00	840.211.841,00	96,67	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP**	4.373.310.000,00	2.809.234.201,00	1.564.075.799,00	64,24	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 13	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada*	4.373.310.000,00	2.809.234.201,00	1.564.075.799,00	64,24	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 13 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.373.310.000,00	2.809.234.201,00	1.564.075.799,00	64,24	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan**	2.700.000.000,00	1.111.492.857,00	1.588.507.143,00	41,17	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 02	*Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan*	2.700.000.000,00	1.111.492.857,00	1.588.507.143,00	41,17	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000.000,00	1.111.492.857,00	1.588.507.143,00	41,17	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	1.186.415.000,00	671.407.500,00	515.007.500,00	56,59	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 . 01	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	1.186.415.000,00	671.407.500,00	515.007.500,00	56,59	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	986.415.000,00	473.407.500,00	513.007.500,00	47,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	198.000.000,00	2.000.000,00	99,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM**	26.306.656.900,00	24.266.098.593,92	2.040.558.306,08	92,24	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 01	*Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana*	750.000.000,00	679.833.026,00	70.166.974,00	90,64	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	750.000.000,00	679.833.026,00	70.166.974,00	90,64	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 13	*Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan*	1.400.000.000,00	996.699.000,00	403.301.000,00	71,19	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.000.000,00	996.699.000,00	3.301.000,00	99,67	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 14	*Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas*	24.156.656.900,00	22.589.566.567,92	1.567.090.332,08	93,51	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.156.656.900,00	22.589.566.567,92	1.567.090.332,08	93,51	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP**	636.800.000,00	387.832.100,00	248.967.900,00	60,90	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 13	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada*	636.800.000,00	387.832.100,00	248.967.900,00	60,90	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	636.800.000,00	387.832.100,00	248.967.900,00	60,90	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(61.462.014.900,00)	(50.062.764.223,25)	11.399.250.676,75	81,45	

Lampiran 1.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	1.490.000.000,00	815.391.248,16	(674.608.751,84)	54,72	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	1.490.000.000,00	815.391.248,16	(674.608.751,84)	54,72	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	1.330.000.000,00	605.690.000,00	(724.310.000,00)	45,54	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain PAD yang Sah	160.000.000,00	209.701.248,16	49.701.248,16	131,06	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 06 . 5	**BELANJA DAERAH**	104.907.476.590,00	96.187.102.481,51	8.720.374.108,49	91,69	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	8.775.000,00	8.715.000,00	60.000,00	99,32	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	8.775.000,00	8.715.000,00	60.000,00	99,32	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.775.000,00	8.715.000,00	60.000,00	99,32	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	4.332.502.507,00	4.198.712.726,00	133.789.781,00	96,91	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	4.332.502.507,00	4.198.712.726,00	133.789.781,00	96,91	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.332.502.507,00	4.198.712.726,00	133.789.781,00	96,91	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	449.797.840,00	440.450.186,00	9.347.654,00	97,92	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	4.822.000,00	4.819.000,00	3.000,00	99,94	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.822.000,00	4.819.000,00	3.000,00	99,94	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	127.742.040,00	127.644.400,00		99,92	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.742.040,00	127.644.400,00	97.640,00	99,92	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	36.000.000,00	34.410.000,00	1.590.000,00	95,58	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	34.410.000,00	1.590.000,00	95,58	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	281.233.800,00	273.576.786,00	7.657.014,00	97,28	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	281.233.800,00	273.576.786,00	7.657.014,00	97,28	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	60.588.500,00	46.796.750,00	13.791.750,00	77,24	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03 . 1.03.01 . 00 . 07 . 06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	60.588.500,00	46.796.750,00	13.791.750,00	77,24	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 07 . 06 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 07 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.588.500,00	46.796.750,00	13.791.750,00	77,24	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	3.371.986.250,00	3.138.661.797,00	233.324.453,00	93,08	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 08 . 01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	552.086.250,00	548.111.797,00	3.974.453,00	99,28	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	552.086.250,00	548.111.797,00	3.974.453,00	99,28	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	2.814.800.000,00	2.585.450.000,00	229.350.000,00	91,85	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	343.800.000,00	229.600.000,00	114.200.000,00	66,78	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.471.000.000,00	2.355.850.000,00	115.150.000,00	95,34	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	1.150.139.768,00	851.837.990,00	298.301.778,00	74,06	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	170.095.000,00	134.741.960,00	35.353.040,00	79,22	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	170.095.000,00	134.741.960,00	35.353.040,00	79,22	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	969.244.768,00	706.391.030,00	262.853.738,00	72,88	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	969.244.768,00	706.391.030,00	262.853.738,00	72,88	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 09 . 06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	10.800.000,00	10.705.000,00	95.000,00	99,12	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 09 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.705.000,00	95.000,00	99,12	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	87.381.671,00	39.963.959,00	47.417.712,00	45,73	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 10	*Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing*	87.381.671,00	39.963.959,00	47.417.712,00	45,73	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 10 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	35.850.000,00	1.050.000,00	34.800.000,00	2,93	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 10 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.531.671,00	38.913.959,00	12.617.712,00	75,51	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	259.787.800,00	110.379.400,00	149.408.400,00	42,49	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 14	*Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan*	259.787.800,00	110.379.400,00	149.408.400,00	42,49	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	55.220.000,00	22.700.000,00	32.520.000,00	41,11	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	204.567.800,00	87.679.400,00	116.888.400,00	42,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	8.287.293.400,00	8.056.269.378,51	231.024.021,49	97,21	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 04	*Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan*	7.864.943.400,00	7.725.426.323,51	139.517.076,49	98,23	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	99.000.000,00	23.750.000,00	75.250.000,00	23,99	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.745.943.400,00	7.701.676.323,51	44.267.076,49	99,43	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 04 . 5 . 1 . 5	Belanja Hibah	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 15	*Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan*	422.350.000,00	330.843.055,00	91.506.945,00	78,33	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 15 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	422.350.000,00	330.843.055,00	91.506.945,00	78,33	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 19	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	4.851.871.449,00	4.691.273.558,00	160.597.891,00	96,69	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 19 . 05	*Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman*	268.569.000,00	257.678.500,00	10.890.500,00	95,94	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 19 . 05 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 19 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	267.219.000,00	257.678.500,00	9.540.500,00	96,43	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 19 . 06	*Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan*	4.499.212.949,00	4.398.705.199,00	100.507.750,00	97,77	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 19 . 06 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	29.400.000,00	11.000.000,00	18.400.000,00	37,41	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 19 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.469.812.949,00	4.387.705.199,00	82.107.750,00	98,16	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 19 . 16	*Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT*	84.089.500,00	34.889.859,00	49.199.641,00	41,49	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 19 . 16 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.089.500,00	34.889.859,00	49.199.641,00	41,49	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 20	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	1.166.685.130,00	1.155.271.450,00	11.413.680,00	99,02	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 20 . 05	*Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan*	1.166.685.130,00	1.155.271.450,00	11.413.680,00	99,02	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 20 . 05 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	42.350.000,00	37.570.000,00	4.780.000,00	88,71	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 20 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.124.335.130,00	1.117.701.450,00	6.633.680,00	99,41	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	9.740.192.555,00	9.489.391.696,00	250.800.859,00	97,43	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 01	*Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota*	4.321.122.555,00	4.236.336.200,00	84.786.355,00	98,04	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	60.200.000,00	51.830.000,00	8.370.000,00	86,10	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.260.922.555,00	4.184.506.200,00	76.416.355,00	98,21	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 02	*Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota*	5.419.070.000,00	5.253.055.496,00	166.014.504,00	96,94	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.419.070.000,00	5.253.055.496,00	166.014.504,00	96,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan**	1.676.206.500,00	1.506.197.450,00	170.009.050,00	89,86	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 02	*Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota*	1.676.206.500,00	1.506.197.450,00	170.009.050,00	89,86	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	136.800.000,00	99.800.000,00	37.000.000,00	72,95	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	212.906.500,00	93.872.450,00	119.034.050,00	44,09	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 02 . 5 . 1 . 5	Belanja Hibah	1.326.500.000,00	1.312.525.000,00	13.975.000,00	98,95	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	5.596.535.570,00	4.751.116.349,00	845.419.221,00	84,89	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 05	*Pembangunan Jalan*	2.149.680.600,00	1.527.143.714,00	622.536.886,00	71,04	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 05 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	283.550.000,00	53.010.000,00	230.540.000,00	18,70	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.866.130.600,00	1.474.133.714,00	391.996.886,00	78,99	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 09	*Rehabilitasi Jalan*	1.661.500.000,00	1.577.803.606,00	83.696.394,00	94,96	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 09 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	90.400.000,00	6.750.000,00	83.650.000,00	7,47	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.571.100.000,00	1.571.053.606,00	46.394,00	100,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 12	*Pembangunan Jembatan*	258.281.400,00	183.287.311,00	74.994.089,00	70,96	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 12 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	45.250.000,00	20.400.000,00	24.850.000,00	45,08	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 12 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	213.031.400,00	162.887.311,00	50.144.089,00	76,46	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 18	*Rehabilitasi Jembatan*	1.527.073.570,00	1.462.881.718,00	64.191.852,00	95,80	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 18 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	70.100.000,00	6.650.000,00	63.450.000,00	9,49	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 18 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.456.973.570,00	1.456.231.718,00	741.852,00	99,95	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 25	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil**	109.312.500,00	100.366.300,00	8.946.200,00	91,82	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 25 . 04	*Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi*	109.312.500,00	100.366.300,00	8.946.200,00	91,82	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 25 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.312.500,00	100.366.300,00	8.946.200,00	91,82	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 28	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	3.132.400,00	1.886.450,00	1.245.950,00	60,22	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 28 . 03	*Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi*	3.132.400,00	1.886.450,00	1.245.950,00	60,22	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 28 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.132.400,00	1.886.450,00	1.245.950,00	60,22	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 32	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	126.266.650,00	101.714.111,00	24.552.539,00	80,56	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 32 . 04	*Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang*	126.266.650,00	101.714.111,00	24.552.539,00	80,56	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 32 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	126.266.650,00	101.714.111,00	24.552.539,00	80,56	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	52.351.000,00	52.079.000,00	272.000,00	99,48	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	52.351.000,00	52.079.000,00	272.000,00	99,48	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.351.000,00	52.079.000,00	272.000,00	99,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03 . 1.03.01 . 00 . 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 07 . 06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	380.554.000,00	348.876.000,00	31.678.000,00	91,68	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 01	*Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya*	75.904.000,00	75.904.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.904.000,00	75.904.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 10	*Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing*	304.650.000,00	272.972.000,00	31.678.000,00	89,60	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.770.000,00	37.600.000,00	1.170.000,00	96,98	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	265.880.000,00	235.372.000,00	30.508.000,00	88,53	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	2.972.070.000,00	2.326.581.700,00	645.488.300,00	78,28	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 14	*Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan*	2.972.070.000,00	2.326.581.700,00	645.488.300,00	78,28	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.970.000,00	23.000.000,00	970.000,00	95,95	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.948.100.000,00	2.303.581.700,00	644.518.300,00	78,14	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	150.000.000,00	99.000.000,00	51.000.000,00	66,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 15	*Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan*	150.000.000,00	99.000.000,00	51.000.000,00	66,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.000.000,00	99.000.000,00	1.000.000,00	99,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	-
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	68.728.900,00	18.450.000,00	50.278.900,00	26,84	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 02	*Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota*	68.728.900,00	18.450.000,00	50.278.900,00	26,84	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.728.900,00	18.450.000,00	278.900,00	98,51	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	42.414.827.200,00	37.141.876.231,00	5.272.950.969,00	87,57	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 02	*Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota*	42.414.827.200,00	37.141.876.231,00	5.272.950.969,00	87,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.414.827.200,00	37.141.876.231,00	5.272.950.969,00	87,57	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	17.521.005.000,00	17.474.440.000,00	46.565.000,00	99,73	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 05	*Pembangunan Jalan*	16.346.505.000,00	16.306.560.000,00	39.945.000,00	99,76	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.346.505.000,00	16.306.560.000,00	39.945.000,00	99,76	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 12	*Pembangunan Jembatan*	1.174.500.000,00	1.167.880.000,00	6.620.000,00	99,44	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 12 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.174.500.000,00	1.167.880.000,00	6.620.000,00	99,44	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 25	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	17.500.000,00	3.300.000,00	14.200.000,00	18,86	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 25 . 04	*Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi*	17.500.000,00	3.300.000,00	14.200.000,00	18,86	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.500.000,00	3.300.000,00	14.200.000,00	18,86	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 28	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	20.000.000,00	17.300.000,00	2.700.000,00	86,50	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 28 . 03	*Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi*	20.000.000,00	17.300.000,00	2.700.000,00	86,50	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	17.300.000,00	2.700.000,00	86,50	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 32	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	24.485.000,00	16.195.000,00	8.290.000,00	66,14	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 32 . 04	*Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang*	24.485.000,00	16.195.000,00	8.290.000,00	66,14	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.485.000,00	16.195.000,00	8.290.000,00	66,14	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(103.417.476.590,00)	(95.371.711.233,35)	-8.045.765.356,65	92,22	

Lampiran 1.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4		6	7
1.04 . 1.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	185.278.400,00	231.904.400,00	46.626.000,00	125,17	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	185.278.400,00	231.904.400,00	46.626.000,00	125,17	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	185.278.400,00	231.904.400,00	46.626.000,00	125,17	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 01 . 5	**BELANJA DAERAH**	5.156.403.634,00	4.707.404.160,32	(448.999.473,68)	91,29	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	1.517.494.962,00	1.442.664.011,00	(74.830.951,00)	95,07	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	1.517.494.962,00	1.442.664.011,00	(74.830.951,00)	95,07	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.517.494.962,00	1.442.664.011,00	(74.830.951,00)	95,07	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	198.321.996,00	191.153.015,00	(7.168.981,00)	96,39	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	28.391.196,00	28.376.400,00	(14.796,00)	99,95	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.391.196,00	28.376.400,00	(14.796,00)	99,95	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	18.733.000,00	17.975.000,00	(758.000,00)	95,95	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.733.000,00	17.975.000,00	(758.000,00)	95,95	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	11.703.000,00	11.571.500,00	(131.500,00)	98,88	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.703.000,00	11.571.500,00	(131.500,00)	98,88	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	139.494.800,00	133.230.115,00	(6.264.685,00)	95,51	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.494.800,00	133.230.115,00	(6.264.685,00)	95,51	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	437.580.000,00	423.140.000,00	(14.440.000,00)	96,70	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	8.000.000,00	7.890.000,00	(110.000,00)	98,63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4		6	7
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.890.000,00	(110.000,00)	98,63	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	429.580.000,00	415.250.000,00	(14.330.000,00)	96,66	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	110.700.000,00	110.350.000,00	(350.000,00)	99,68	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	318.880.000,00	304.900.000,00	(13.980.000,00)	95,62	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	40.075.000,00	38.774.000,00	(1.301.000,00)	96,75	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	40.075.000,00	38.774.000,00	(1.301.000,00)	96,75	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.075.000,00	38.774.000,00	(1.301.000,00)	96,75	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	63.437.250,00	40.725.150,00	(22.712.100,00)	64,20	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 02	*Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh*	63.437.250,00	40.725.150,00	(22.712.100,00)	64,20	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.437.250,00	40.725.150,00	(22.712.100,00)	64,20	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	1.459.201.450,00	1.447.586.416,97	(11.615.033,03)	99,20	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 03	*Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU*	1.459.201.450,00	1.447.586.416,97	(11.615.033,03)	99,20	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.459.201.450,00	1.447.586.416,97	(11.615.033,03)	99,20	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 25	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	61.563.800,00	58.405.206,00	(3.158.594,00)	94,87	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 25 . 01	*Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha*	61.563.800,00	58.405.206,00	(3.158.594,00)	94,87	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 25 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.563.800,00	58.405.206,00	(3.158.594,00)	94,87	
2.04 . 1.04.01 . 01 . 25	**Penerbitan Izin Membuka Tanah**	482.988.500,00	224.844.910,00	(258.143.590,00)	46,55	
2.04 . 1.04.01 . 01 . 25 . 02	*Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara*	482.988.500,00	224.844.910,00	(258.143.590,00)	46,55	
2.04 . 1.04.01 . 01 . 25 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	482.988.500,00	224.844.910,00	(258.143.590,00)	46,55	
2.04 . 1.04.01 . 01 . 26	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	9.335.500,00	9.320.300,00	(15.200,00)	99,84	
2.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 01	*Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah*	9.335.500,00	9.320.300,00	(15.200,00)	99,84	
2.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.335.500,00	9.320.300,00	(15.200,00)	99,84	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	650.094.966,00	596.439.671,35	(53.655.294,65)	91,75	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 01	*Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan*	517.831.000,00	472.323.665,35	(45.507.334,65)	91,21	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	514.681.000,00	469.173.665,35	(45.507.334,65)	91,16	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4		6	7
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 02	*Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian*	132.263.966,00	124.116.006,00	(8.147.960,00)	93,84	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.263.966,00	124.116.006,00	(8.147.960,00)	93,84	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	19.185.210,00	17.650.000,00	(1.535.210,00)	92,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	19.185.210,00	17.650.000,00	(1.535.210,00)	92,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.185.210,00	17.650.000,00	(1.535.210,00)	92,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	217.125.000,00	216.701.480,00	(423.520,00)	99,80	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 01	*Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan*	205.750.000,00	205.396.480,00	(353.520,00)	99,83	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	205.750.000,00	205.396.480,00	(353.520,00)	99,83	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 02	*Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian*	11.375.000,00	11.305.000,00	(70.000,00)	99,38	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.375.000,00	11.305.000,00	(70.000,00)	99,38	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.971.125.234,00)	(4.475.499.760,32)	495.625.473,68	90,03	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 01 . 5	**BELANJA DAERAH**	**6.935.686.000,00**	**6.800.297.548,00**	**135.388.452,00**	**98,05**	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.027.086.000,00**	**1.964.675.416,00**	**62.410.584,00**	**96,92**	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	2.027.086.000,00	1.964.675.416,00	62.410.584,00	96,92	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.027.086.000,00	1.964.675.416,00	62.410.584,00	96,92	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**216.984.850,00**	**215.654.970,00**	**1.329.880,00**	**99,38**	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	9.910.000,00	9.892.500,00	17.500,00	99,82	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.910.000,00	9.892.500,00	17.500,00	99,82	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	40.034.250,00	39.840.290,00	193.960,00	99,52	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.034.250,00	39.840.290,00	193.960,00	99,52	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	26.995.600,00	26.988.000,00	7.600,00	99,97	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.995.600,00	26.988.000,00	7.600,00	99,97	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	16.492.000,00	16.479.000,00	13.000,00	99,92	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.492.000,00	16.479.000,00	13.000,00	99,92	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	9.996.000,00	9.990.000,00	6.000,00	99,94	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.996.000,00	9.990.000,00	6.000,00	99,94	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	133.463.000,00	132.347.680,00	1.115.320,00	99,16	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.463.000,00	132.347.680,00	1.115.320,00	99,16	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.883.230.000,00**	**3.822.077.606,00**	**61.152.394,00**	**98,39**	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05 . 1.05.01 . 00 . 08 . 01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	34.600.000,00	33.797.606,00	802.394,00	97,68	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.600.000,00	33.797.606,00	802.394,00	97,68	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	3.845.130.000,00	3.784.780.000,00	60.350.000,00	98,43	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	67.650.000,00	65.450.000,00	2.200.000,00	96,75	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.777.480.000,00	3.719.330.000,00	58.150.000,00	98,46	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**217.049.650,00**	**208.422.706,00**	**8.626.944,00**	**96,03**	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	201.379.650,00	192.752.706,00	8.626.944,00	95,72	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	201.379.650,00	192.752.706,00	8.626.944,00		
1.05 . 1.05.01 . 00 . 09 . 06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	15.670.000,00	15.670.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 09 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.670.000,00	15.670.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 15	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**79.327.500,00**	**79.029.350,00**	**298.150,00**	**99,62**	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 15 . 01	*Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan*	79.327.500,00	79.029.350,00	298.150,00	99,62	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.327.500,00	79.029.350,00	298.150,00	99,62	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 16	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**441.195.000,00**	**440.827.500,00**	**367.500,00**	**99,92**	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 16 . 01	*Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota*	441.195.000,00	440.827.500,00	367.500,00	99,92	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	441.195.000,00	440.827.500,00	367.500,00	99,92	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 23	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**50.907.000,00**	**49.727.500,00**	**1.179.500,00**	**97,68**	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 23 . 02	*Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*	40.475.000,00	40.267.500,00	207.500,00	99,49	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 23 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.475.000,00	40.267.500,00	207.500,00	99,49	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**10.432.000,00**	**9.460.000,00**	**972.000,00**	**99,71**	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	10.432.000,00	9.460.000,00	972.000,00	99,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.432.000,00	9.460.000,00	972.000,00	99,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 23	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 23 . 02	*Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**-6.935.686.000,00**	**-6.800.297.548,00**	**-135.388.452,00**	**98,05**	

Printed By SimDa

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 06 Sosial
Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 01 . 5	**BELANJA DAERAH**	**9.226.434.950,00**	**9.063.998.424,00**	**162.436.526,00**	**98,24**	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.439.251.000,00**	**2.358.009.223,00**	**81.241.777,00**	**96,67**	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	2.439.251.000,00	2.358.009.223,00	81.241.777,00	96,67	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.439.251.000,00	2.358.009.223,00	81.241.777,00	96,67	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**220.593.000,00**	**220.480.250,00**	**112.750,00**	**99,95**	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	3.960.000,00	3.939.000,00	21.000,00	99,47	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	3.939.000,00	21.000,00	99,47	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	47.952.000,00	47.951.650,00	350,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.952.000,00	47.951.650,00	350,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	4.998.500,00	4.992.000,00	6.500,00	99,87	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.998.500,00	4.992.000,00	6.500,00	99,87	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	13.980.000,00	13.980.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.980.000,00	13.980.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	54.786.100,00	54.781.100,00	5.000,00	99,99	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.786.100,00	54.781.100,00	5.000,00	99,99	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	94.916.400,00	94.836.500,00	79.900,00	99,92	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.916.400,00	94.836.500,00	79.900,00	99,92	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.058.622.000,00**	**1.044.884.084,00**	**13.737.916,00**	**98,70**	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 08 . 01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	7.998.000,00	7.990.000,00	8.000,00	99,90	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.998.000,00	7.990.000,00	8.000,00	99,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06 . 1.06.01 . 00 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	57.804.000,00	49.734.084,00	8.069.916,00	86,04	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.804.000,00	49.734.084,00	8.069.916,00	86,04	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	992.820.000,00	987.160.000,00	5.660.000,00	99,43	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	97.350.000,00	97.050.000,00	300.000,00	99,69	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	895.470.000,00	890.110.000,00	5.360.000,00	99,40	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**152.470.000,00**	**148.137.196,00**	**4.332.804,00**	**97,16**	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	19.000.000,00	18.661.253,00	338.747,00	98,22	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	18.661.253,00	338.747,00	98,22	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	125.300.000,00	121.405.943,00	3.894.057,00	96,89	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.300.000,00	121.405.943,00	3.894.057,00	96,89	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 09 . 06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	8.170.000,00	8.070.000,00	100.000,00	98,78	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 09 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.170.000,00	8.070.000,00	100.000,00	98,78	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 15	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**48.172.000,00**	**46.805.400,00**	**1.366.600,00**	**97,16**	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 15 . 02	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota*	48.172.000,00	46.805.400,00	1.366.600,00	97,16	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.172.000,00	46.805.400,00	1.366.600,00	97,16	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 17	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**2.476.047.000,00**	**2.450.280.900,00**	**25.766.100,00**	**98,96**	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 17 . 01	*Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja*	2.476.047.000,00	2.450.280.900,00	25.766.100,00	98,96	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	21.600.000,00	16.500.000,00	5.100.000,00	76,39	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.454.447.000,00	2.433.780.900,00	20.666.100,00	99,16	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 17	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**90.832.200,00**	**90.621.800,00**	**210.400,00**	**99,77**	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 17 . 02	*Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota*	60.168.400,00	60.131.250,00	37.150,00	99,94	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.168.400,00	60.131.250,00	37.150,00	99,94	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 17 . 04	*Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota*	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06 . 1.06.01 . 00 . 17 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 17 . 05	*Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)*	30.663.800,00	30.490.550,00	173.250,00	99,44	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 17 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.663.800,00	30.490.550,00	173.250,00	99,44	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 17	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**660.043.200,00**	**641.306.021,00**	**18.737.179,00**	**97,16**	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 17 . 01	*Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	660.043.200,00	641.306.021,00	18.737.179,00	97,16	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	660.043.200,00	641.306.021,00	18.737.179,00	97,16	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 18	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**75.286.550,00**	**74.736.400,00**	**550.150,00**	**99,27**	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 18 . 01	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*	75.286.550,00	74.736.400,00	550.150,00	99,27	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 18 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.286.550,00	74.736.400,00	550.150,00	99,27	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 19	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**67.242.000,00**	**66.997.700,00**	**244.300,00**	**99,64**	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 19 . 05	*Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB*	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 19 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 19 . 06	*Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB*	57.242.000,00	56.997.700,00	244.300,00	99,57	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 19 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.242.000,00	56.997.700,00	244.300,00	99,57	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**63.365.550,00**	**63.239.750,00**	**125.800,00**	**99,80**	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 03	*Penyediaan Alat Bantu*	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 04	*Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga*	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 05	*Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial*	43.165.550,00	43.039.750,00	125.800,00	99,71	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.165.550,00	43.039.750,00	125.800,00	99,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 09	*Pemberian Layanan Data dan Pengaduan*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 21	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**75.353.250,00**	**75.235.400,00**	**117.850,00**	**99,84**	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 21 . 03	*Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan*	75.353.250,00	75.235.400,00	117.850,00	99,84	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 21 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.353.250,00	75.235.400,00	117.850,00	99,84	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**93.417.800,00**	**93.379.300,00**	**38.500,00**	**99,96**	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 01	*Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*	93.417.800,00	93.379.300,00	38.500,00	99,96	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.417.800,00	93.379.300,00	38.500,00	99,96	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 23	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**540.967.000,00**	**540.680.550,00**	**286.450,00**	**99,95**	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 23 . 01	*Penyediaan Makanan*	540.967.000,00	540.680.550,00	286.450,00	99,95	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 23 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	540.967.000,00	540.680.550,00	286.450,00	99,95	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 26	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**67.072.400,00**	**66.274.450,00**	**797.950,00**	**98,81**	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 26 . 03	*Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah*	67.072.400,00	66.274.450,00	797.950,00	98,81	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 26 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.072.400,00	66.274.450,00	797.950,00	98,81	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 07 . 05	*Pengadaan Mebel*	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 17	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 17 . 01	*Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.08 . 1.06.01 . 00 . 19	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**1.088.700.000,00**	**1.073.930.000,00**	**14.770.000,00**	**98,64**	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 19 . 06	*Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB*	1.088.700.000,00	1.073.930.000,00	14.770.000,00	98,64	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	597.700.000,00	583.840.000,00	13.860.000,00	97,68	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	491.000.000,00	490.090.000,00	910.000,00	99,81	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.226.434.950,00)	(9.063.998.424,00)	(162.436.526,00)	98,24	

Lampiran 1.3 : Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Unit Organisasi : 1 . 05 . 02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 01 . 5	**BELANJA DAERAH**	27.584.585.589,00	3.170.766.706,00	24.413.818.883,00	11,49	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	728.339.000,00	674.722.044,00	53.616.956,00	92,64	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	728.339.000,00	674.722.044,00	53.616.956,00	92,64	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	728.339.000,00	674.722.044,00	53.616.956,00	92,64	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	235.136.488,00	234.585.132,00	551.356,00	99,77	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	1.502.000,00	1.458.000,00	44.000,00	97,07	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.502.000,00	1.458.000,00	44.000,00	97,07	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	36.347.688,00	36.076.988,00	270.700,00	99,26	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.347.688,00	36.076.988,00	270.700,00	99,26	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	67.010.000,00	66.947.000,00	63.000,00	99,91	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.010.000,00	66.947.000,00	63.000,00	99,91	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	2.823.900,00	2.767.200,00	56.700,00	97,99	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.823.900,00	2.767.200,00	56.700,00	97,99	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	127.452.900,00	127.335.944,00	116.956,00	99,91	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.452.900,00	127.335.944,00	116.956,00	99,91	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	604.168.100,00	590.611.500,00	13.556.600,00	97,76	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	2.085.000,00	2.080.000,00	5.000,00	99,76	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.085.000,00	2.080.000,00	5.000,00	99,76	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	18.000.000,00	17.876.000,00	124.000,00	99,31	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	17.876.000,00	124.000,00	99,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	7.083.100,00	6.665.500,00	417.600,00	94,10	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.083.100,00	6.665.500,00	417.600,00	94,10	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	577.000.000,00	563.990.000,00	13.010.000,00	97,75	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	60.700.000,00	55.450.000,00	5.250.000,00	91,35	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	516.300.000,00	508.540.000,00	7.760.000,00	98,50	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	123.800.000,00	120.669.650,00	3.130.350,00	97,47	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	73.800.000,00	70.669.650,00	3.130.350,00	95,76	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.800.000,00	70.669.650,00	3.130.350,00	95,76	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 09 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	20.068.650,00	18.181.250,00	1.887.400,00	90,60	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 01	*Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota*	20.068.650,00	18.181.250,00	1.887.400,00	90,60	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.068.650,00	18.181.250,00	1.887.400,00	90,60	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	149.735.000,00	83.148.548,00	66.586.452,00	55,53	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 07	*Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota*	149.735.000,00	83.148.548,00	66.586.452,00	55,53	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 07 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	149.735.000,00	83.148.548,00	66.586.452,00	55,53	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	1.014.585.000,00	998.287.550,00	16.297.450,00	98,39	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21 . 02	*Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota*	1.014.585.000,00	998.287.550,00	16.297.450,00	98,39	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.014.585.000,00	998.287.550,00	16.297.450,00	98,39	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 22	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	78.668.300,00	72.649.850,00	6.018.450,00	92,35	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 22 . 01	*Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota*	78.668.300,00	72.649.850,00	6.018.450,00	92,35	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 22 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.668.300,00	72.649.850,00	6.018.450,00	92,35	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	8.735.000,00	8.735.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 05	*Pengadaan Mebel*	8.735.000,00	8.735.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.735.000,00	8.735.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	24.602.600.051,00	351.176.182,00	24.251.423.869,00	1,43	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 07	*Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota*	24.602.600.051,00	351.176.182,00	24.251.423.869,00	1,43	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.602.600.051,00	351.176.182,00	24.251.423.869,00	1,43	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 22	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 22 . 01	*Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota*	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(27.584.585.589,00)	(3.170.766.706,00)	(24.413.818.883,00)	11,49	

Printed By SimDa

Lampiran 1.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 03 Pangan
Unit Organisasi : 2 . 03 . 01 DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 03 . 01 . 01 DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.03 . 2.03.01 . 01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	105.000.000,00	105.160.100,00	160.100,00	100,15	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	105.000.000,00	105.160.100,00	5.123.200,00	100,15	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	105.000.000,00	105.160.100,00	5.123.200,00	100,15	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 01 . 5	**BELANJA DAERAH**	5.608.673.990,00	5.483.214.656,00	(5.980.251.622,00)	97,72	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	2.471.617.000,00	2.414.538.882,00	(3.938.390.142,00)	97,69	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	2.471.617.000,00	2.414.538.882,00	(3.938.390.142,00)	97,69	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.471.617.000,00	2.414.538.882,00	(3.938.390.142,00)	97,69	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	146.964.940,00	146.586.900,00	(11.341.200,00)	99,74	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	2.573.000,00	2.573.000,00	0,00	100,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.573.000,00	2.573.000,00	0,00	100,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	19.078.200,00	19.014.000,00	(1.926.000,00)	99,66	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.078.200,00	19.014.000,00	(1.926.000,00)	99,66	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	3.002.190,00	2.994.550,00	(229.200,00)	99,75	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.002.190,00	2.994.550,00	(229.200,00)	99,75	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	13.100.000,00	13.080.000,00	(600.000,00)	99,85	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.100.000,00	13.080.000,00	(600.000,00)	99,85	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	9.430.800,00	9.430.800,00	0,00	100,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.430.800,00	9.430.800,00	0,00	100,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	99.780.750,00	99.494.550,00	(8.586.000,00)	99,71	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.780.750,00	99.494.550,00	(8.586.000,00)	99,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	802.375.000,00	739.611.746,00	(1.882.897.620,00)	92,94	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08 . 01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1.125.000,00	1.120.000,00	(150.000,00)	99,56	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	1.120.000,00	(150.000,00)	99,56	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	46.200.000,00	45.531.746,00	(20.047.620,00)	98,55	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.200.000,00	45.531.746,00	(20.047.620,00)	98,55	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	755.050.000,00	692.960.000,00	(1.862.700.000,00)	92,62	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	66.550.000,00	66.550.000,00	0,00	100,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	688.500.000,00	626.410.000,00	(1.862.700.000,00)	90,98	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	87.575.500,00	87.313.828,00	(7.850.160,00)	99,70	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	38.465.500,00	38.290.500,00	(5.250.000,00)	99,55	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.465.500,00	38.290.500,00	(5.250.000,00)	99,55	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	45.050.000,00	44.968.328,00	(2.450.160,00)	99,82	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.050.000,00	44.968.328,00	(2.450.160,00)	99,82	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 09 . 06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	4.060.000,00	4.055.000,00	(150.000,00)	99,88	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 09 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.060.000,00	4.055.000,00	(150.000,00)	99,88	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 16	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	29.379.650,00	29.249.350,00	(3.909.000,00)	99,56	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 16 . 01	*Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan*	17.514.750,00	17.485.750,00	(870.000,00)	99,83	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.514.750,00	17.485.750,00	(870.000,00)	99,83	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 16 . 04	*Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan*	11.864.900,00	11.763.600,00	(3.039.000,00)	99,15	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.864.900,00	11.763.600,00	(3.039.000,00)	99,15	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	527.778.850,00	527.309.050,00	(14.094.000,00)	99,91	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 . 01	*Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun*	18.112.000,00	17.822.050,00	(8.698.500,00)	98,40	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.112.000,00	17.822.050,00	(8.698.500,00)	98,40	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 . 02	*Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	509.666.850,00	509.487.000,00	(5.395.500,00)	99,96	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	509.666.850,00	509.487.000,00	(5.395.500,00)	99,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.03 . 2.03.01 . 01 . 21	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	17.384.000,00	17.189.000,00	(5.850.000,00)	98,88	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 21 . 02	*Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	17.384.000,00	17.189.000,00	(5.850.000,00)	98,88	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.384.000,00	17.189.000,00	(5.850.000,00)	98,88	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 22	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	15.443.250,00	15.439.100,00	(124.500,00)	99,97	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 22 . 04	*Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota*	15.443.250,00	15.439.100,00	(124.500,00)	99,97	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 22 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.443.250,00	15.439.100,00	(124.500,00)	99,97	
3.01 . 2.03.01 . 01 . 24	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	1.283.876.800,00	1.280.143.200,00	(112.008.000,00)	99,71	
3.01 . 2.03.01 . 01 . 24 . 02	*Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	1.023.625.100,00	1.021.146.900,00	(74.346.000,00)	99,76	
3.01 . 2.03.01 . 01 . 24 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.023.625.100,00	1.021.146.900,00	(74.346.000,00)	99,76	
3.01 . 2.03.01 . 01 . 24 . 03	*Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	260.251.700,00	258.996.300,00	(37.662.000,00)	99,52	
3.01 . 2.03.01 . 01 . 24 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	260.251.700,00	258.996.300,00	(37.662.000,00)	99,52	
3.01 . 2.03.01 . 01 . 25	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	22.385.000,00	22.374.700,00	(309.000,00)	99,95	
3.01 . 2.03.01 . 01 . 25 . 01	*Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota*	22.385.000,00	22.374.700,00	(309.000,00)	99,95	
3.01 . 2.03.01 . 01 . 25 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.385.000,00	22.374.700,00	(309.000,00)	99,95	
3.01 . 2.03.01 . 01 . 28	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	14.069.000,00	14.016.900,00	(1.563.000,00)	99,63	
3.01 . 2.03.01 . 01 . 28 . 01	*Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	14.069.000,00	14.016.900,00	(1.563.000,00)	99,63	
3.01 . 2.03.01 . 01 . 28 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.069.000,00	14.016.900,00	(1.563.000,00)	99,63	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	6.825.000,00	6.825.000,00	0,00	100,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	6.825.000,00	6.825.000,00	0,00	100,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.825.000,00	6.825.000,00	0,00	100,00	
3.01 . 2.03.01 . 01 . 24	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	183.000.000,00	182.617.000,00	(1.915.000,00)	99,79	
3.01 . 2.03.01 . 01 . 24 . 03	*Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	183.000.000,00	182.617.000,00	(1.915.000,00)	99,79	
3.01 . 2.03.01 . 01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	183.000.000,00	182.617.000,00	(1.915.000,00)	99,79	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.503.673.990,00)	(5.378.054.556,00)	125.619.434,00	97,72	

Printed By SimDa

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 05 Lingkungan Hidup
Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	100.000.000,00	129.612.000,00	29.612.000,00	129,61	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	100.000.000,00	129.612.000,00	29.612.000,00	129,61	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	100.000.000,00	129.612.000,00	29.612.000,00	129,61	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 01 . 5	**BELANJA DAERAH**	**5.177.087.320,00**	**4.873.779.742,00**	**99.452.075,00**	**94,14**	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.085.102.040,00**	**1.985.649.965,00**	**99.452.075,00**	**95,23**	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	2.085.102.040,00	1.985.649.965,00	99.452.075,00	95,23	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.085.102.040,00	1.985.649.965,00	99.452.075,00	95,23	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**125.566.250,00**	**123.427.433,00**	**2.138.817,00**	98,30	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	100,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	100,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	15.038.000,00	15.038.000,00	0,00	100,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.038.000,00	15.038.000,00	0,00	100,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	5.500.200,00	5.500.200,00	0,00	100,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.200,00	5.500.200,00	0,00	100,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	102.968.050,00	100.829.233,00	2.138.817,00	97,92	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.968.050,00	100.829.233,00	2.138.817,00	97,92	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.218.459.430,00**	**1.035.427.652,00**	**182.865.322,00**	**84,98**	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	51.090.000,00	48.611.700,00	2.478.300,00	95,15	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.090.000,00	48.611.700,00	2.478.300,00	95,15	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 08 . 03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	74.335.380,00	74.252.152,00	(83.228,00)	99,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.05 . 2.05.01 . 00 . 08 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.335.380,00	74.252.152,00	83.228,00	99,89	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	1.093.034.050,00	912.563.800,00	180.470.250,00	83,49	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	80.400.000,00	76.650.000,00	3.750.000,00	95,34	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.012.634.050,00	835.913.800,00	176.720.250,00	82,55	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**41.775.000,00**	**41.454.079,00**	**320.921,00**	**99,23**	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	41.775.000,00	41.454.079,00	320.921,00	99,23	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.775.000,00	41.454.079,00	320.921,00	99,23	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**325.645.950,00**	**325.170.131,00**	**475.819,00**	**99,85**	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 01	*Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota*	307.380.200,00	307.018.381,00	361.819,00	99,88	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	307.380.200,00	307.018.381,00	361.819,00	99,88	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 02	*Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota*	18.265.750,00	18.151.750,00	114.000,00	99,38	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.265.750,00	18.151.750,00	114.000,00	99,38	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 17	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**175.941.300,00**	**172.480.508,00**	**3.460.792,00**	**98,03**	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 17 . 01	*Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media*	65.605.500,00	65.470.500,00	135.000,00	99,79	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.605.500,00	65.470.500,00	135.000,00	99,79	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 17 . 02	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim*	110.335.800,00	107.010.008,00	3.325.792,00	96,99	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.335.800,00	107.010.008,00	3.325.792,00	96,99	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 18	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**522.046.400,00**	**519.836.000,00**	**2.210.400,00**	**99,58**	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 18 . 03	*Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup*	522.046.400,00	519.836.000,00	2.210.400,00	99,58	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.800.000,00	50.000,00	98,25	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	519.196.400,00	517.036.000,00	2.160.400,00	99,58	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 20	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**19.303.600,00**	**19.257.250,00**	**46.350,00**	**99,76**	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 04	*Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)*	19.303.600,00	19.257.250,00	46.350,00	99,76	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.303.600,00	19.257.250,00	46.350,00	99,76	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 21	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**7.247.200,00**	**6.837.900,00**	**14.085.100,00**	**94,35**	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 21 . 01	*Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik*	7.247.200,00	6.837.900,00	14.085.100,00	94,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.05 . 2.05.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.247.200,00	6.837.900,00	14.085.100,00	94,35	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 23	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**33.534.250,00**	**33.423.500,00**	**110.750,00**	**99,67**	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 23 . 01	*Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH*	14.356.250,00	14.270.950,00	85.300,00	99,41	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 23 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.356.250,00	14.270.950,00	85.300,00	99,41	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 23 . 03	*Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	19.178.000,00	19.152.550,00	25.450,00	99,87	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 23 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.178.000,00	19.152.550,00	25.450,00	99,87	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 25	**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**15.792.400,00**	**15.730.250,00**	**62.150,00**	**99,61**	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 25 . 01	*Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional,*	15.792.400,00	15.730.250,00	62.150,00	99,61	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.792.400,00	15.730.250,00	62.150,00	99,61	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 27	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**16.500.000,00**	**16.325.200,00**	**(5.244.000,00)**	**98,94**	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 27 . 01	*Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*	16.500.000,00	16.325.200,00	(5.244.000,00)	98,94	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 27 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	16.325.200,00	(5.244.000,00)	98,94	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 28	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**10.698.000,00**	**10.455.850,00**	**242.150,00**	**97,74**	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 28 . 01	*Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota*	10.698.000,00	10.455.850,00	242.150,00	97,74	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 28 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.698.000,00	10.455.850,00	242.150,00	97,74	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 29	**Pengelolaan Sampah**	**470.965.500,00**	**461.392.662,00**	**(287.185.140,00)**	**97,97**	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 29 . 03	*Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota*	470.965.500,00	461.392.662,00	(287.185.140,00)	97,97	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 29 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	470.965.500,00	461.392.662,00	(287.185.140,00)	97,97	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**32.100.000,00**	**32.086.362,00**	**(695.538,00)**	**99,96**	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 08 . 03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	32.100.000,00	32.086.362,00	(695.538,00)	99,96	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.100.000,00	32.086.362,00	(695.538,00)	99,96	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 17	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,01**	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.05 . 2.05.01 . 00 . 17 . 01	*Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut*	0,00	0,00	0,00	98,01	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	98,01	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 18	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**40.000.000,00**	**38.415.000,00**	**(80.835.000,00)**	**96,04**	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 18 . 03	*Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup*	40.000.000,00	38.415.000,00	(80.835.000,00)	96,04	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	38.415.000,00	(80.835.000,00)	96,04	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 20	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**100,00**	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 04	*Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)*	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 29	**Pengelolaan Sampah**	**35.710.000,00**	**35.710.000,00**	**0,00**	**100,00**	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 29 . 03	*Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota*	35.710.000,00	35.710.000,00	0,00	100,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.710.000,00	35.710.000,00	0,00	100,00	
SURPLUS / (DEFISIT)		**(5.077.087.320,00)**	**(4.744.167.742,00)**	**(69.840.075,00)**	**93,44**	

PrinTed By SimDa

Lampiran 1.3 : PeraturanDaerahDaerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 06 Administrasi Kependudukan dan Capil
Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 02 . 5	**BELANJA DAERAH**	4.532.304.400,00	4.442.247.416,00	90.056.984,00	98,01	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	49.082.000,00	48.734.900,00	347.100,00	99,29	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 02	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	32.238.000,00	32.134.000,00	104.000,00	99,68	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.238.000,00	32.134.000,00	104.000,00	99,68	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	14.044.000,00	13.800.900,00	243.100,00	98,27	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.044.000,00	13.800.900,00	243.100,00	98,27	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	2.350.568.000,00	2.294.297.164,00	56.270.836,00	97,61	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	2.350.568.000,00	2.294.297.164,00	56.270.836,00	97,61	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.350.568.000,00	2.294.297.164,00	56.270.836,00	97,61	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	30.598.000,00	28.657.486,00	1.940.514,00	93,66	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 05 . 10	*Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	12.730.000,00	11.015.000,00	1.715.000,00	86,53	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 05 . 10 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.730.000,00	11.015.000,00	1.715.000,00	86,53	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 05 . 11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	17.868.000,00	17.642.486,00	225.514,00	98,74	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 05 . 11 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.868.000,00	17.642.486,00	225.514,00	98,74	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	743.332.000,00	737.834.683,00	5.497.317,00	99,26	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	4.822.500,00	4.506.000,00	316.500,00	93,44	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.822.500,00	4.506.000,00	316.500,00	93,44	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	417.078.000,00	414.516.200,00	2.561.800,00	99,39	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	417.078.000,00	414.516.200,00	2.561.800,00	99,39	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	8.704.500,00	7.847.200,00	857.300,00	90,15	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.704.500,00	7.847.200,00	857.300,00	90,15	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	9.880.000,00	9.654.000,00	226.000,00	97,71	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 08 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.880.000,00	9.654.000,00	226.000,00	97,71	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	299.847.000,00	298.311.283,00	1.535.717,00	99,49	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	299.847.000,00	298.311.283,00	1.535.717,00	99,49	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	994.300.900,00	972.037.033,00	22.263.867,00	97,76	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	3.931.900,00	3.717.000,00	214.900,00	94,53	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.931.900,00	3.717.000,00	214.900,00	94,53	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	136.020.000,00	131.052.033,00	4.967.967,00	96,35	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	136.020.000,00	131.052.033,00	4.967.967,00	96,35	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	48.590.000,00	48.095.000,00	495.000,00	98,98	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.590.000,00	48.095.000,00	495.000,00	98,98	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	805.759.000,00	789.173.000,00	16.586.000,00	97,94	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	65.650.000,00	54.950.000,00	10.700.000,00	83,70	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	740.109.000,00	734.223.000,00	5.886.000,00	99,20	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	122.718.500,00	120.969.050,00	1.749.450,00	98,57	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	22.140.000,00	21.823.250,00	316.750,00	98,57	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.140.000,00	21.823.250,00	316.750,00	98,57	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	45.578.500,00	44.205.200,00	1.373.300,00	96,99	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.578.500,00	44.205.200,00	1.373.300,00	96,99	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	55.000.000,00	54.940.600,00	59.400,00	99,89	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	54.940.600,00	59.400,00	99,89	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 01	*Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 04	*Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 16	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 02	*Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 01	*Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 02	*Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 05	*Sosialisasi Pendaftaran Penduduk*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	17.510.000,00	17.510.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 02	*Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil*	17.510.000,00	17.510.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.510.000,00	17.510.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 03	*Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 04	*Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 08	*Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 08 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 22	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 22 . 02	*Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 22 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 24	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	19.222.000,00	19.071.800,00	150.200,00	99,22	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.06 . 2.06.01 . 01 . 24 . 01	*Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	19.222.000,00	19.071.800,00	150.200,00	99,22	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 24 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.222.000,00	19.071.800,00	150.200,00	99,22	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 24 . 05	*Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 26	**Penyusunan Profil Kependudukan**	23.473.000,00	23.399.200,00	73.800,00	99,69	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 26 . 02	*Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain*	23.473.000,00	23.399.200,00	73.800,00	99,69	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 26 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.473.000,00	23.399.200,00	73.800,00	99,69	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	96.500.000,00	94.805.100,00	1.694.900,00	98,24	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	96.500.000,00	94.805.100,00	1.694.900,00	98,24	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.500.000,00	94.805.100,00	1.694.900,00	98,24	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 24	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	85.000.000,00	84.931.000,00	69.000,00	99,92	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 24 . 03	*Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	85.000.000,00	84.931.000,00	69.000,00	99,92	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.000.000,00	84.931.000,00	69.000,00	99,92	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.532.304.400,00)	(4.442.247.416,00)	(90.056.984,00)	98,01	

PrinTed By SimDa

Lampiran 1.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 07 Pemberdayaan Masyarakat Desa
Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 01 . 5	**BELANJA DAERAH**	4.830.770.220,00	4.740.212.728,00	(90.557.492,00)	98,13	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	2.329.937.020,00	2.258.912.415,00	(71.024.605,00)	96,95	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	2.329.937.020,00	2.258.912.415,00	(71.024.605,00)	96,95	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.329.937.020,00	2.258.912.415,00	(71.024.605,00)	96,95	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	336.788.570,00	336.537.575,00	(250.995,00)	99,93	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	2.466.200,00	2.465.200,00	(1.000,00)	99,96	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.466.200,00	2.465.200,00	(1.000,00)	99,96	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	48.076.120,00	48.026.000,00	(50.120,00)	99,90	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.076.120,00	48.026.000,00	(50.120,00)	99,90	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	3.547.050,00	3.547.050,00	0,00	100,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.547.050,00	3.547.050,00	0,00	100,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	30.980.000,00	30.930.000,00	(50.000,00)	99,84	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.980.000,00	30.930.000,00	(50.000,00)	99,84	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	18.983.200,00	18.981.300,00	(1.900,00)	99,99	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.983.200,00	18.981.300,00	(1.900,00)	99,99	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	232.736.000,00	232.588.025,00	(147.975,00)	99,94	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	232.736.000,00	232.588.025,00	(147.975,00)	99,94	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	446.285.000,00	439.025.319,00	(7.259.681,00)	98,37	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	5.085.000,00	5.079.000,00	(6.000,00)	99,88	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.085.000,00	5.079.000,00	(6.000,00)	99,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	41.100.000,00	39.566.319,00	(1.533.681,00)	96,27	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.100.000,00	39.566.319,00	(1.533.681,00)	96,27	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	400.100.000,00	394.380.000,00	(5.720.000,00)	98,57	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	75.900.000,00	75.900.000	0,00	100,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	324.200.000,00	318.480.000,00	(5.720.000,00)	98,24	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	139.797.300,00	139.350.250,00	(447.050,00)	99,68	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	23.953.300,00	23.948.300,00	(5.000,00)	99,98	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.953.300,00	23.948.300,00	(5.000,00)	99,98	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	92.424.000,00	92.051.950,00	(372.050,00)	99,60	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.424.000,00	92.051.950,00	(372.050,00)	99,60	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	8.470.000,00	8.400.000,00	(70.000,00)	99,17	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.470.000,00	8.400.000,00	(70.000,00)	99,17	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16	**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	55.758.850,00	55.429.475,00	(329.375,00)	99,41	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 02	*Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota*	28.111.350,00	27.937.650,00	(173.700,00)	99,38	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.111.350,00	27.937.650,00	(173.700,00)	99,38	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 03	*Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan*	27.647.500,00	27.491.825,00	(155.675,00)	99,44	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.647.500,00	27.491.825,00	(155.675,00)	99,44	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	737.055.030,00	726.697.194,00	(10.357.836,00)	98,59	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 01	*Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*	288.872.162,00	288.463.760,00	(408.402,00)	99,86	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	288.872.162,00	288.463.760,00	(408.402,00)	99,86	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 04	*Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa*	22.140.000,00	22.021.750,00	(118.250,00)	99,47	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.140.000,00	22.021.750,00	(118.250,00)	99,47	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 08	*Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa*	61.181.400,00	61.118.500,00	(62.900,00)	99,90	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.181.400,00	61.118.500,00	(62.900,00)	99,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 09	*Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa*	323.586.468,00	313.936.534,00	(9.649.934,00)	97,02	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	323.586.468,00	313.936.534,00	(9.649.934,00)	97,02	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 11	*Fasilitasi Penyusunan Profil Desa*	41.275.000,00	41.156.650,00	(118.350,00)	99,71	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 11 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.275.000,00	41.156.650,00	(118.350,00)	99,71	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	785.148.450,00	784.260.500,00	(887.950,00)	99,89	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 02	*Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat*	679.909.850,00	679.378.650,00	(531.200,00)	99,92	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	679.909.850,00	679.378.650,00	(531.200,00)	99,92	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 03	*Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat*	85.240.600,00	85.102.300,00	(138.300,00)	99,84	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.240.600,00	85.102.300,00	(138.300,00)	99,84	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 05	*Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*	7.050.000,00	6.925.000,00	(125.000,00)	98,23	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.050.000,00	6.925.000,00	(125.000,00)	98,23	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 06	*Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna*	12.948.000,00	12.854.550,00	(93.450,00)	99,28	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.948.000,00	12.854.550,00	(93.450,00)	99,28	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 04	*Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 4 . 1	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.830.770.220,00)	(4.740.212.728,00)	90.557.492,00	98,13	

Printed By SimDa

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 09 Perhubungan
Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	**350.000.000,00**	**280.240.495,00**	**(69.759.505,00)**	**80,07**	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**350.000.000,00**	**280.240.495,00**	**(69.759.505,00)**	80,07	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	350.000.000,00	280.240.495,00	(69.759.505,00)	80,07	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 02	**BELANJA DAERAH**	**5.759.891.323,00**	**5.516.678.485,00**	**243.212.838,00**	**95,78**	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.239.036.000,00**	**2.170.052.399,00**	**68.983.601,00**	**96,92**	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	2.239.036.000,00	2.170.052.399,00	68.983.601,00	96,92	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.239.036.000,00	2.170.052.399,00	68.983.601,00	96,92	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**356.803.850,00**	**356.635.628,00**	**168.222,00**	**99,95**	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan*	150.494.000,00	150.494.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.494.000,00	150.494.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	13.055.000,00	13.024.050,00	30.950,00	99,76	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.055.000,00	13.024.050,00	30.950,00	99,76	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	2.500.600,00	2.500.600,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.600,00	2.500.600,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	7.656.000,00	7.640.000,00	16.000,00	99,79	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.656.000,00	7.640.000,00	16.000,00	99,79	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	58.157.200,00	58.157.200,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.157.200,00	58.157.200,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	124.941.050,00	124.819.778,00	121.272,00	99,90	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.941.050,00	124.819.778,00	121.272,00	99,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.09 . 2.09.01 . 00 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.623.510.000,00**	**2.475.387.253,00**	**148.122.747,00**	**94,35**	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 08 . 01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	112.500.000,00	100.557.253,00	11.942.747,00	89,38	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.500.000,00	100.557.253,00	11.942.747,00	89,38	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 08 . 03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	8.040.000,00	8.030.000,00	10.000,00	99,88	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 08 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.040.000,00	8.030.000,00	10.000,00	99,88	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	2.499.970.000,00	2.363.800.000,00	136.170.000,00	94,55	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	80.850.000,00	80.850.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.419.120.000,00	2.282.950.000,00	136.170.000,00	94,37	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**164.083.600,00**	**147.667.555,00**	**16.416.045,00**	**90,00**	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak*	144.083.600,00	130.462.555,00	13.621.045,00	90,55	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.083.600,00	130.462.555,00	13.621.045,00	90,55	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan*	20.000.000,00	17.205.000,00	2.795.000,00	86,03	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	17.205.000,00	2.795.000,00	86,03	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 16	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**25.118.000,00**	**24.983.250,00**	**134.750,00**	**99,46**	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 16 . 02	*Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota*	25.118.000,00	24.983.250,00	134.750,00	99,46	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.118.000,00	24.983.250,00	134.750,00	99,46	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 16 . 04	*Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**133.319.000,00**	**132.715.800,00**	**603.200,00**	**99,55**	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 07	*Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala*	133.319.000,00	132.715.800,00	603.200,00	99,55	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 07 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.319.000,00	132.715.800,00	603.200,00	99,55	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 20	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**20.095.000,00**	**18.183.900,00**	**1.911.100,00**	**90,49**	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 20 . 05	*Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota*	20.095.000,00	18.183.900,00	1.911.100,00	90,49	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 20 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.095.000,00	18.183.900,00	1.911.100,00	90,49	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 22	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**102.191.600,00**	**99.970.900,00**	**2.220.700,00**	**97,83**	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 22 . 04	*Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan*	102.191.600,00	99.970.900,00	2.220.700,00	97,83	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 22 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.191.600,00	99.970.900,00	2.220.700,00	97,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 08 . 03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 16	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**87.234.273,00**	**82.581.800,00**	**2.276.648,00**	**94,67**	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 16 . 02	*Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota*	43.399.648,00	41.123.000,00	2.276.648,00	94,75	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.399.648,00	41.123.000,00	2.276.648,00	94,75	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 16 . 04	*Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan*	43.834.625,00	41.458.800,00	0,00	94,58	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.834.625,00	43.834.625,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 07	*Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(5.409.891.323,00)**	**(5.236.437.990,00)**	**(312.972.343,00)**	**96,79**	

PrinTed By SimDa

Lampiran 1.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 10 Komunikasi dan Informatika
Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.10 . 2.10.01 . 01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	315.000.000,00	199.897.100,00	(115.102.900,00)	63,46	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	315.000.000,00	199.897.100,00	(115.102.900,00)	63,46	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	315.000.000,00	199.897.100,00	(115.102.900,00)	63,46	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 01 . 5	**BELANJA DAERAH**	4.441.739.646,00	4.281.676.353,00	(160.063.293,00)	96,40	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	1.906.290.600,00	1.850.993.833,00	(55.296.767,00)	97,10	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	1.906.290.600,00	1.850.993.833,00	(55.296.767,00)	97,10	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.906.290.600,00	1.850.993.833,00	(55.296.767,00)	97,10	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	115.605.450,00	115.305.905,00	(299.545,00)	99,74	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	2.012.000,00	2.011.000,00	(1.000,00)	99,95	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.012.000,00	2.011.000,00	(1.000,00)	99,95	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	1.328.900,00	1.272.700,00	(56.200,00)	95,77	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.328.900,00	1.272.700,00	(56.200,00)	95,77	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	10.697.000,00	10.642.000,00	(55.000,00)	99,49	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.697.000,00	10.642.000,00	(55.000,00)	99,49	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	8.240.000,00	8.209.300,00	(30.700,00)	99,63	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.240.000,00	8.209.300,00	(30.700,00)	99,63	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	93.327.550,00	93.170.905,00	(156.645,00)	99,83	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.327.550,00	93.170.905,00	(156.645,00)	99,83	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	1.142.262.796,00	1.043.958.658,00	(98.304.138,00)	91,39	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	3.250.000,00	3.000.000,00	(250.000,00)	92,31	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	3.000.000,00	(250.000,00)	92,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	736.084.984,00	649.518.058,00	(86.566.926,00)	88,24	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	736.084.984,00	649.518.058,00	(86.566.926,00)	88,24	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	11.417.812,00	11.250.600,00	(167.212,00)	98,54	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.417.812,00	11.250.600,00	(167.212,00)	98,54	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	391.510.000,00	380.190.000,00	(11.320.000,00)	97,11	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	63.800.000,00	60.150.000,00	(3.650.000,00)	94,28	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	327.710.000,00	320.040.000,00	(7.670.000,00)	97,66	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	28.652.000,00	27.911.250,00	(740.750,00)	97,41	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	24.552.000,00	23.811.250,00	(740.750,00)	96,98	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.552.000,00	23.811.250,00	(740.750,00)	96,98	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 09 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	204.603.750,00	202.716.657,00	(1.887.093,00)	99,08	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 05	*Pengelolaan Media Komunikasi Publik*	51.505.000,00	50.799.289,00	(705.711,00)	98,63	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.505.000,00	50.799.289,00	(705.711,00)	98,63	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 08	*Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan*	108.995.750,00	108.693.918,00	(301.832,00)	99,72	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.995.750,00	108.693.918,00	(301.832,00)	99,72	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 10	*Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik*	44.103.000,00	43.223.450,00	(879.550,00)	98,01	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 10 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.103.000,00	43.223.450,00	(879.550,00)	98,01	
2.15 . 2.10.01 . 01 . 15	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	52.234.250,00	50.608.350,00	(1.625.900,00)	96,89	
2.15 . 2.10.01 . 01 . 15 . 04	*Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	52.234.250,00	50.608.350,00	(1.625.900,00)	96,89	
2.15 . 2.10.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.234.250,00	50.608.350,00	(1.625.900,00)	96,89	
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	118.339.500,00	117.873.300,00	(466.200,00)	99,61	
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 01	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral*	61.354.300,00	61.272.700,00	(81.600,00)	99,87	
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.354.300,00	61.272.700,00	(81.600,00)	99,87	
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 03	*Membangun Metadata Statistik Sektoral*	19.529.000,00	19.389.600,00	(139.400,00)	99,29	
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.529.000,00	19.389.600,00	(139.400,00)	99,29	
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 04	*Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral*	37.456.200,00	37.211.000,00	(245.200,00)	99,35	
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.456.200,00	37.211.000,00	(245.200,00)	99,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	378.251.300,00	378.059.250,00	(192.050,00)	99,95	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 04	*Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah*	378.251.300,00	378.059.250,00	(192.050,00)	99,95	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	378.251.300,00	378.059.250,00	(192.050,00)	99,95	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	195.500.000,00	194.976.000,00	(524.000,00)	99,73	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 05	*Pengelolaan Media Komunikasi Publik*	195.500.000,00	194.976.000,00	(524.000,00)	99,73	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	195.500.000,00	194.976.000,00	(524.000,00)	99,73	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	300.000.000,00	299.273.150,00	(726.850,00)	99,76	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 04	*Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah*	300.000.000,00	299.273.150,00	(726.850,00)	99,76	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000.000,00	299.273.150,00	(726.850,00)	99,76	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.126.739.646,00)	(4.081.779.253,00)	44.960.393,00	98,91	

Printed By SimDa

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Unit Organisasi : 2 . 11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.11 . 2.11.00 . 00 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	140.064.000,00	212.526.500,00	72.462.500,00	151,74	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	140.064.000,00	212.526.500,00	72.462.500,00	151,74	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	140.064.000,00	212.526.500,00	72.462.500,00	151,74	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 02 . 01 . 5	**BELANJA DAERAH**	4.059.453.059,00	3.832.207.289,00	227.245.770,00	94,40	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	1.754.238.044,00	1.682.949.388,00	71.288.656,00	95,94	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	1.754.238.044,00	1.682.949.388,00	71.288.656,00	95,94	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.754.238.044,00	1.682.949.388,00	71.288.656,00	95,94	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	233.536.390,00	233.515.100,00	21.290,00	99,99	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan*	5.966.000,00	5.965.100,00	900,00	99,98	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.966.000,00	5.965.100,00	900,00	99,98	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	26.555.340,00	26.555.300,00	40,00	100,00	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.555.340,00	26.555.300,00	40,00	100,00	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 06 . 03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	6.970.250,00	6.961.300,00	8.950,00	99,87	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.970.250,00	6.961.300,00	8.950,00	99,87	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	19.223.000,00	19.223.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.223.000,00	19.223.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	19.892.100,00	19.892.100,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.892.100,00	19.892.100,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	154.929.700,00	154.918.300,00	11.400,00	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.11 . 2.11.00 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.929.700,00	154.918.300,00	11.400,00	99,99	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	918.211.000,00	857.932.504,00	60.278.496,00	94,18	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 08 . 01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	7.011.000,00	7.011.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.011.000,00	7.011.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	147.000.000,00	140.681.504,00	6.318.496,00	95,70	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.000.000,00	140.681.504,00	6.318.496,00	95,70	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	764.200.000,00	710.240.000,00	53.960.000,00	93,88	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	90.750.000,00	90.750.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	673.450.000,00	619.490.000,00	53.960.000,00	91,99	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	94.920.000,00	94.915.800,00	4.200,00	100,00	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	25.000.000,00	24.995.800,00	4.200,00	99,98	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.995.800,00	4.200,00	99,98	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,*	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 09 . 06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	17.420.000,00	17.420.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 09 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.420.000,00	17.420.000,00	0,00	100,00	
3.07 . 2.11.00 . 00 . 15	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	397.842.400,00	370.399.200,00	27.443.200,00	93,10	
3.07 . 2.11.00 . 00 . 15 . 05	*Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan*	397.842.400,00	370.399.200,00	27.443.200,00	93,10	
3.07 . 2.11.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	397.842.400,00	370.399.200,00	27.443.200,00	93,10	
3.07 . 2.11.00 . 00 . 16	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan**	24.600.500,00	24.510.550,00	89.950,00	99,63	
3.07 . 2.11.00 . 00 . 16 . 01	*Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI*	24.600.500,00	24.510.550,00	89.950,00	99,63	
3.07 . 2.11.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.600.500,00	24.510.550,00	89.950,00	99,63	
3.07 . 2.11.00 . 00 . 17	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi**	37.657.700,00	37.580.400,00	77.300,00	99,79	
3.07 . 2.11.00 . 00 . 17 . 01	*Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data*	37.657.700,00	37.580.400,00	77.300,00	99,79	
3.07 . 2.11.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.657.700,00	37.580.400,00	77.300,00	99,79	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 18	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit**	45.252.300,00	24.705.900,00	20.546.400,00	54,60	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 18 . 01	*Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi*	45.252.300,00	24.705.900,00	20.546.400,00	54,60	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.252.300,00	24.705.900,00	20.546.400,00	54,60	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 19	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi**	197.379.000,00	186.376.650,00	11.002.350,00	94,43	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 19 . 01	*Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian*	197.379.000,00	186.376.650,00	11.002.350,00	94,43	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.379.000,00	186.376.650,00	11.002.350,00	94,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.11 . 2.11.00 . 00 . 21	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui**	223.895.000,00	189.155.600,00	34.739.400,00	84,48	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 21 . 02	*Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro*	30.970.000,00	18.150.000,00	12.820.000,00	58,61	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 21 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.970.000,00	18.150.000,00	12.820.000,00	58,61	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 21 . 04	*Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan*	192.925.000,00	171.005.600,00	21.919.400,00	88,64	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 21 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.925.000,00	171.005.600,00	21.919.400,00	88,64	
3.06 . 2.11.00 . 00 . 22	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi**	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.00 . 00 . 22 . 01	*Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan*	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.00 . 00 . 22 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.00 . 00 . 22 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.00 . 00 . 23	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi**	13.730.850,00	13.508.400,00	222.450,00	98,38	
3.06 . 2.11.00 . 00 . 23 . 02	*Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan*	13.730.850,00	13.508.400,00	222.450,00	98,38	
3.06 . 2.11.00 . 00 . 23 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.730.850,00	13.508.400,00	222.450,00	98,38	
3.06 . 2.11.00 . 00 . 25	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan**	22.368.360,00	22.110.600,00	257.760,00	98,85	
3.06 . 2.11.00 . 00 . 25 . 02	*Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan*	22.368.360,00	22.110.600,00	257.760,00	98,85	
3.06 . 2.11.00 . 00 . 25 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.368.360,00	22.110.600,00	257.760,00	98,85	
3.06 . 2.11.00 . 00 . 28	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang,**	78.241.515,00	76.967.197,00	1.274.318,00	98,37	
3.06 . 2.11.00 . 00 . 28 . 01	*Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang*	63.398.605,00	62.470.197,00	928.408,00	98,54	
3.06 . 2.11.00 . 00 . 28 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.398.605,00	62.470.197,00	928.408,00	98,54	
3.06 . 2.11.00 . 00 . 28 . 02	*Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal*	14.842.910,00	14.497.000,00	345.910,00	97,67	
3.06 . 2.11.00 . 00 . 28 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.842.910,00	14.497.000,00	345.910,00	97,67	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	17.580.000,00	17.580.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 07 . 10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau*	17.580.000,00	17.580.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.00 . 00 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.580.000,00	17.580.000,00	0,00	100,00	
3.07 . 2.11.00 . 00 . 15	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan**	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.00 . 00 . 15 . 05	*Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan*	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.919.389.059,00)	(3.619.680.789,00)	(154.783.270,00)	92,35	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 12 Penanaman Modal
Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.12 . 2.12.01 . 01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	200.000.000,00	173.699.600,00	(26.300.400,00)	86,85	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	200.000.000,00	173.699.600,00	(26.300.400,00)	86,85	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	200.000.000,00	173.699.600,00	(26.300.400,00)	86,85	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 01 . 5	**BELANJA DAERAH**	4.240.620.570,00	4.138.244.554,00	102.376.016,00	97,59	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	1.831.097.000,00	1.771.408.649,00	59.688.351,00	96,74	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	1.831.097.000,00	1.771.408.649,00	59.688.351,00	96,74	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.831.097.000,00	1.771.408.649,00	59.688.351,00	96,74	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	351.828.800,00	351.551.540,00	277.260,00	99,92	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan*	3.635.000,00	3.633.000,00	2.000,00	99,94	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.635.000,00	3.633.000,00	2.000,00	99,94	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	56.855.400,00	56.826.100,00	29.300,00	99,95	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.855.400,00	56.826.100,00	29.300,00	99,95	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	10.150.600,00	10.148.000,00	2.600,00	99,97	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.150.600,00	10.148.000,00	2.600,00	99,97	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	27.182.000,00	27.182.000,00	0,00	100,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.182.000,00	27.182.000,00	0,00	100,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	26.650.500,00	26.641.400,00	9.100,00	99,97	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.650.500,00	26.641.400,00	9.100,00	99,97	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	227.355.300,00	227.121.040,00	234.260,00	99,90	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	227.355.300,00	227.121.040,00	234.260,00	99,90	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	510.720.000,00	505.571.383,00	5.148.617,00	98,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	76.080.000,00	71.291.383,00	4.788.617,00	93,71	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.080.000,00	71.291.383,00	4.788.617,00	93,71	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	434.640.000,00	434.280.000,00	360.000,00	99,92	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	62.950.000,00	62.950.000,00	0,00	100,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	371.690.000,00	371.330.000,00	360.000,00	99,90	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	92.730.000,00	92.632.955,00	97.045,00	99,90	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan*	18.250.000,00	18.221.955,00	28.045,00	99,85	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	18.221.955,00	28.045,00	99,85	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,*	20.500.000,00	20.491.000,00	9.000,00	99,96	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	20.491.000,00	9.000,00	99,96	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	3.980.000,00	3.980.000,00	0,00	100,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.980.000,00	3.980.000,00	0,00	100,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan*	50.000.000,00	49.940.000,00	60.000,00	99,88	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.940.000,00	60.000,00	99,88	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang**	150.322.000,00	135.947.250,00	14.374.750,00	90,44	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 01	*Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian*	150.322.000,00	135.947.250,00	14.374.750,00	90,44	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.322.000,00	135.947.250,00	14.374.750,00	90,44	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	94.073.800,00	93.085.200,00	988.600,00	98,95	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 01	*Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah*	94.073.800,00	93.085.200,00	988.600,00	98,95	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.073.800,00	93.085.200,00	988.600,00	98,95	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang**	650.391.750,00	635.884.329,00	14.507.421,00	97,77	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 02	*Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah*	650.391.750,00	635.884.329,00	14.507.421,00	97,77	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	650.391.750,00	635.884.329,00	14.507.421,00	97,77	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu**	135.070.300,00	134.411.800,00	658.500,00	99,51	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 01	*Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan*	135.070.300,00	134.411.800,00	658.500,00	99,51	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	135.070.300,00	134.411.800,00	658.500,00	99,51	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang**	326.122.020,00	320.365.448,00	5.756.572,00	98,23	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 01	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan*	48.300.000,00	48.120.000,00	180.000,00	99,63	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.300.000,00	48.120.000,00	180.000,00	99,63	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 02	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan*	181.222.020,00	175.645.448,00	5.576.572,00	96,92	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	181.222.020,00	175.645.448,00	5.576.572,00	96,92	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 03	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan*	96.600.000,00	96.600.000,00	0,00	100,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.600.000,00	96.600.000,00	0,00	100,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	98.264.900,00	97.386.000,00	878.900,00	99,11	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau*	98.264.900,00	97.386.000,00	878.900,00	99,11	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.264.900,00	77.399.000,00	865.900,00	98,89	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	19.987.000,00	13.000,00	99,94	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.040.620.570,00)	(3.964.534.954,00)	(76.085.616,00)	98,12	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 13 Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.16 . 2.13.01 . 00 . 01 . 01 . 5	**BELANJA DAERAH**	**7.590.937.764,00**	**7.447.891.716,00**	**143.046.048,00**	**98,12**	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**58.060.800,00**	**57.166.008,00**	**1.714.980.240,00**	**98,46**	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 01 . 01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	58.060.800,00	57.166.008,00	894.792,00	98,46	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.060.800,00	57.166.008,00	894.792,00	98,46	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.141.786.000,00**	**2.072.987.518,00**	**68.798.482,00**	**96,79**	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	2.141.786.000,00	2.072.987.518,00	68.798.482,00	96,79	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.141.786.000,00	2.072.987.518,00	68.798.482,00	96,79	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	339.317.314,00	338.510.459,00	806.855,00	99,76	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	5.144.400,00	5.144.300,00	100,00	100,00	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.144.400,00	5.144.300,00	100,00	100,00	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	33.207.914,00	33.183.914,00	24.000,00	100,00	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.207.914,00	33.183.914,00	24.000,00	99,93	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	25.980.000,00	25.781.000,00	199.000,00	99,23	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.980.000,00	25.781.000,00	199.000,00	99,23	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	15.210.000,00	15.210.000,00	0,00	100,00	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.210.000,00	15.210.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.16 . 2.13.01 . 00 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	259.775.000,00	259.191.245,00	583.755,00	99,78	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	259.775.000,00	259.191.245,00	583.755,00	99,78	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**839.685.000,00**	**814.535.669,00**	**25.149.331,00**	**97,15**	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	140.400.000,00	124.301.669,00	16.098.331,00	88,53	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.400.000,00	124.301.669,00	16.098.331,00	88,53	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 08 . 03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	15.900.000,00	15.650.000,00	250.000,00	98,43	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 08 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.900.000,00	15.650.000,00	250.000,00	98,43	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	683.385.000,00	674.584.000,00	8.801.000,00	98,61	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	103.150.000,00	101.150.000,00	2.000.000,00	98,06	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	580.235.000,00	573.434.000,00	6.801.000,00	98,83	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**98.578.800,00**	**96.694.650,00**	**1.884.150,00**	**98,09**	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	40.750.000,00	40.241.800,00	508.200,00	98,75	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.750.000,00	40.241.800,00	508.200,00	98,75	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	43.200.000,00	42.005.850,00	1.194.150,00	97,24	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	42.005.850,00	1.194.150,00	97,24	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	14.628.800,00	14.447.000,00	181.800,00	98,76	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 09 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.628.800,00	14.447.000,00	181.800,00	98,76	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 15	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.658.483.000,00**	**1.653.603.650,00**	**4.879.350,00**	**99,68**	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 15 . 01	*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan*	1.658.483.000,00	1.653.603.650,00	4.879.350,00	99,68	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.353.000,00	16.280.250,00	1.072.750,00	93,82	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 1 . 5	Belanja Hibah	1.641.130.000,00	1.637.323.400,00	3.806.600,00	99,77	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 15 . 02	*Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13 . 2.13.01 . 00 . 15	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**141.823.150,00**	**131.752.300,00**	**10.070.850,00**	**92,06**	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 15 . 01	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor*	68.183.150,00	67.595.500,00	587.650,00	98,90	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.183.150,00	17.595.500,00	587.650,00	96,77	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 1 . 5	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 15 . 03	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota*	73.640.000,00	64.156.800,00	9.483.200,00	87,12	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.640.000,00	64.156.800,00	9.483.200,00	87,12	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 15 . 04	*Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 15 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.13.01 . 00 . 16	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**141.886.600,00**	**140.935.950,00**	**950.650,00**	**99,33**	
3.02 . 2.13.01 . 00 . 16 . 04	*Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota*	141.886.600,00	140.935.950,00	950.650,00	99,33	
3.02 . 2.13.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.886.600,00	140.935.950,00	950.650,00	99,33	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 17	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**254.977.850,00**	**254.814.919,00**	**0,00**	**99,94**	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 17 . 01	*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat*	254.977.850,00	254.814.919,00	162.931,00	99,93	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.977.850,00	154.814.919,00	162.931,00	99,89	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 1 . 5	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 18	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**410.061.150,00**	**409.509.750,00**	**551.400,00**	**99,87**	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 18 . 03	*Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional*	410.061.150,00	409.509.750,00	551.400,00	99,87	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	310.061.150,00	309.684.750,00	376.400,00	99,88	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 1 . 5	Belanja Hibah	100.000.000,00	99.825.000,00	175.000,00	99,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13 . 2.13.01 . 00 . 18	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100.000.000,00**	**99.732.000,00**	**268.000,00**	**99,73**	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 18 . 03	*Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan*	100.000.000,00	99.732.000,00	268.000,00	99,73	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 1 . 5	Belanja Hibah	100.000.000,00	99.732.000,00	268.000,00	99,73	
3.02 . 2.13.01 . 00 . 19	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	189.796.250,00	189.556.343,00	239.907,00	99,87	
3.02 . 2.13.01 . 00 . 19 . 02	*Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan*	189.796.250,00	189.556.343,00	239.907,00	99,87	
3.02 . 2.13.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	189.796.250,00	189.556.343,00	239.907,00	99,87	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 19	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**172.500.000,00**	**171.990.000,00**	**510.000,00**	**99,72**	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 19 . 04	*Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota*	172.500.000,00	171.990.000,00	510.000,00	99,72	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 19 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 19 . 04 . 5 . 1 . 5	Belanja Hibah	150.000.000,00	149.490.000,00	510.000,00	99,66	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 20	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**70.942.600,00**	**69.033.900,00**	**1.908.700,00**	**97,31**	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 20 . 01	*Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya*	70.942.600,00	69.033.900,00	1.908.700,00	97,31	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 20 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.942.600,00	69.033.900,00	1.908.700,00	97,31	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 21	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**745.475.300,00**	**741.412.600,00**	**4.062.700**	**99,46**	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 21 . 03	*Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi*	745.475.300,00	741.412.600,00	4.062.700,00	99,46	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 21 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	269.275.300,00	267.104.950,00	209.095.050,00	56,09	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 21 . 03 . 5 . 1 . 5	Belanja Hibah	476.200.000,00	474.307.650,00	1.892.350,00	99,60	
3.02 . 2.13.01 . 00 . 22	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**30.233.750,00**	**29.989.900,00**	**243.850,00**	**99,19**	
3.02 . 2.13.01 . 00 . 22 . 02	*Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata*	30.233.750,00	29.989.900,00	243.850,00	99,19	
3.02 . 2.13.01 . 00 . 22 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.233.750,00	29.989.900,00	243.850,00	99,19	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 22	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 22 . 08	*Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan*	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 22 . 08 . 5 . 1 . 5	Belanja Hibah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.16 . 2.13.01 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**14.300.000,00**	**14.100.000,00**	**200.000,00**	**98,60**	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	14.300.000,00	14.100.000,00	200.000,00	98,60	
2.16 . 2.13.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.300.000,00	14.100.000,00	200.000,00	98,60	
3.02 . 2.13.01 . 00 . 16	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**105.000.000,00**	**84.786.100,00**	**20.213.900,00**	**80,75**	
3.02 . 2.13.01 . 00 . 16 . 04	*Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota*	105.000.000,00	84.786.100,00	20.213.900,00	80,75	
3.02 . 2.13.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	4.932.500,00	67.500,00	0,00	
3.02 . 2.13.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	79.853.600,00	20.146.400,00	79,85	-
2.13 . 2.13.01 . 00 . 21	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**3.030.200,00**	**1.780.000,00**	**1.250.200,00**	**58,74**	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 21 . 03	*Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi*	3.030.200,00	1.780.000,00	1.250.200,00	58,74	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.030.200,00	1.780.000,00	1.250.200,00	58,74	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(7.590.937.764)**	**(7.447.891.716)**	**(143.046.048)**	**98,12**	

Printed By SimDa

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 17 Perpustakaan
Unit Organisasi : 2 . 17 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 01 . 5	**BELANJA DAERAH**	**8.351.713.514,00**	**8.112.318.164,00**	**239.395.350,00**	**97,13**	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.410.457.600,00**	**2.324.133.309,00**	**86.324.291,00**	**96,42**	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	2.410.457.600,00	2.324.133.309,00	86.324.291,00	96,42	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.410.457.600,00	2.324.133.309,00	86.324.291,00	96,42	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**147.605.407,00**	**146.677.725,00**	**927.682,00**	**99,37**	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan*	9.752.607,00	9.745.000,00	7.607,00	99,92	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.752.607,00	9.745.000,00	7.607,00	99,92	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	33.240.900,00	32.560.300,00	680.600,00	97,95	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.240.900,00	32.560.300,00	680.600,00	97,95	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	12.000.000,00	11.980.000,00	20.000,00	99,83	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.980.000,00	20.000,00	99,83	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	4.037.400,00	4.037.400,00	0,00	100,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.037.400,00	121.122.000,00	0,00	100,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	88.574.500,00	88.355.025,00	219.475,00	99,75	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.574.500,00	88.355.025,00	219.475,00	99,75	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**379.880.000,00**	**370.747.023,00**	**9.132.977,00**	**97,97**	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	28.080.000,00	25.587.023,00	2.492.977,00	91,12	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.080.000,00	25.587.023,00	2.492.977,00	91,12	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	351.800.000,00	345.160.000,00	6.640.000,00	98,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 01 . 5	**BELANJA DAERAH**	**8.351.713.514,00**	**8.112.318.164,00**	**239.395.350,00**	**97,13**	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	58.550.000,00	58.450.000,00	100.000,00	99,83	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	293.250.000,00	286.710.000,00	6.540.000,00	97,77	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**96.392.000,00**	**94.898.600,00**	**1.493.400,00**	**98,45**	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan*	19.026.000,00	18.654.000,00	372.000,00	98,04	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.026.000,00	18.654.000,00	372.000,00	98,04	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,*	23.996.000,00	22.974.600,00	1.021.400,00	95,74	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.996.000,00	22.974.600,00	1.021.400,00	95,74	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 09 . 06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	3.370.000,00	3.270.000,00	100.000,00	97,03	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 09 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.370.000,00	3.270.000,00	100.000,00	97,03	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan*	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 09 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
2.18 . 2.17.01 . 00 . 15	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**33.605.000,00**	**33.172.000,00**	**433.000,00**	**98,71**	
2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 01	*Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis*	11.245.000,00	11.145.000,00	100.000,00	99,11	
2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.245.000,00	11.145.000,00	100.000,00	99,11	
2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 02	*Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis*	22.360.000,00	22.027.000,00	333.000,00	98,51	
2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.360.000,00	22.027.000,00	333.000,00	98,51	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 15	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah**	24.243.250,00	24.243.250,00	0,00	100,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 07	*Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat*	24.243.250,00	24.243.250,00	0,00	100,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.243.250,00	24.243.250,00	0,00	100,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 16	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah**	**13.796.000,00**	**13.762.450,00**	**33.550,00**	**99,76**	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 16 . 04	*Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial*	13.796.000,00	13.762.450,00	33.550,00	99,76	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.796.000,00	13.762.450,00	33.550,00	99,76	
2.18 . 2.17.01 . 00 . 16	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**3.841.534.257,00**	**3.721.823.207,00**	**119.711.050,00**	**99,15**	
2.18 . 2.17.01 . 00 . 16 . 02	*Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis*	3.841.534.257,00	3.721.823.207,00	119.711.050,00	99,15	
2.18 . 2.17.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.841.534.257,00	3.721.823.207,00	119.711.050,00	96,88	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**13.350.000,00**	**13.348.500,00**	**1.500,00**	**96,67**	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	13.350.000,00	13.348.500,00	1.500,00	96,67	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.350.000,00	13.348.500,00	1.500,00	99,99	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**890.850.000,00**	**886.605.500,00**	**4.244.500,00**	**99,52**	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 07 . 05	*Pengadaan Mebel*	210.000.000,00	205.832.000,00	4.168.000,00	98,02	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	210.000.000,00	205.832.000,00	4.168.000,00	98,02	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 07 . 06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	680.850.000,00	680.773.500,00	76.500,00	99,99	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	680.850.000,00	680.773.500,00	76.500,00	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 01 . 5	**BELANJA DAERAH**	**8.351.713.514,00**	**8.112.318.164,00**	**239.395.350,00**	**97,13**	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 15	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**500.000.000,00**	**482.906.600,00**	**17.093.400,00**	**96,08**	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 01	*Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan*	300.000.000,00	285.175.000,00	76.500,00	95,06	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000.000,00	285.175.000,00	76.500,00	95,06	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 08	*Pengembangan Bahan Pustaka*	200.000.000,00	197.731.600,00	2.268.400,00	98,87	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	197.731.600,00	2.268.400,00	98,87	-
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(8.351.713.514)**	**(8.112.318.164)**	**(239.395.350)**	**97,13**	

PrinTed By SimDa

Lampiran 1.3 : Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*)
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 03 Pertanian
Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 DINAS PERTANIAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.03 . 3.03.01 . 01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	56.500.000,00	62.125.000,00	5.625.000,00	109,96	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	56.500.000,00	62.125.000,00	5.625.000,00	109,96	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	56.500.000,00	62.125.000,00	5.625.000,00	109,96	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 01 . 5	**BELANJA DAERAH**	20.203.504.297,00	19.778.916.114,00	424.588.183,00	97,90	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	10.825.644.000,00	10.553.779.599,00	271.864.401,00	97,49	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	10.825.644.000,00	10.553.779.599,00	271.864.401,00	97,49	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	10.825.644.000,00	10.553.779.599,00	271.864.401,00	97,49	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	402.855.830,00	402.637.762,00	218.068,00	99,95	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	8.625.000,00	8.625.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.625.000,00	8.625.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	83.726.380,00	83.723.561,00	2.819,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.726.380,00	83.723.561,00	2.819,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	34.500.000,00	34.350.000,00	150.000,00	99,57	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.500.000,00	34.350.000,00	150.000,00	99,57	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	239.004.450,00	238.939.201,00	65.249,00	99,97	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	239.004.450,00	238.939.201,00	65.249,00	99,97	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	1.575.315.600,00	1.536.274.679,00	39.040.921,00	97,52	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	68.400.000,00	46.591.679,00	21.808.321,00	68,12	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.400.000,00	46.591.679,00	21.808.321,00	68,12	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 . 03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	5.165.600,00	5.163.000,00	2.600,00	99,95	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.165.600,00	5.163.000,00	2.600,00	99,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	1.501.750.000,00	1.484.520.000,00	17.230.000,00	98,85	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	157.300.000,00	156.500.000,00	800.000,00	99,49	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.344.450.000,00	1.328.020.000,00	16.430.000,00	98,78	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	338.800.000,00	304.849.912,00	33.950.088,00	89,98	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	26.500.000,00	26.429.989,00	70.011,00	99,74	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	26.429.989,00	70.011,00	99,74	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	312.300.000,00	278.419.923,00	33.880.077,00	89,15	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	312.300.000,00	278.419.923,00	33.880.077,00	89,15	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	35.515.000,00	34.915.700,00	599.300,00	98,31	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 01	*Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*	16.405.000,00	15.895.350,00	509.650,00	96,89	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.405.000,00	15.895.350,00	509.650,00	96,89	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 02	*Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*	19.110.000,00	19.020.350,00	89.650,00	99,53	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.110.000,00	19.020.350,00	89.650,00	99,53	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 16	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	217.835.000,00	214.827.700,00	3.007.300,00	98,62	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 01	*Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman*	17.635.000,00	17.631.100,00	3.900,00	99,98	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.635.000,00	17.631.100,00	3.900,00	99,98	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 03	*Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman*	200.200.000,00	197.196.600,00	3.003.400,00	98,50	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.200.000,00	197.196.600,00	3.003.400,00	98,50	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	404.799.750,00	401.641.550,00	3.158.200,00	99,22	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 01	*Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain*	404.799.750,00	401.641.550,00	3.158.200,00	99,22	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	404.799.750,00	401.641.550,00	3.158.200,00	99,22	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	4.811.711.549,00	4.740.751.362,00	70.960.187,00	98,53	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 01	*Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani*	648.979.700,00	646.099.700,00	2.880.000,00	99,56	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	648.979.700,00	646.099.700,00	2.880.000,00	99,56	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 02	*Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian*	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 03	*Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani*	3.298.940.049,00	3.272.285.834,00	26.654.215,00	99,19	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.298.940.049,00	3.272.285.834,00	26.654.215,00	99,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 04	*Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit*	228.000.000,00	228.000.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	228.000.000,00	228.000.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 08	*Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya*	208.682.000,00	198.978.828,00	9.703.172,00	95,35	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 08 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 08 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	199.582.000,00	198.978.828,00	603.172,00	99,70	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 09	*Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya*	313.109.800,00	281.387.000,00	31.722.800,00	89,87	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	313.109.800,00	281.387.000,00	31.722.800,00	89,87	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 32	**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**	175.532.950,00	175.280.850,00	252.100,00	99,86	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 32 . 01	*Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan*	175.532.950,00	175.280.850,00	252.100,00	99,86	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 32 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.532.950,00	175.280.850,00	252.100,00	99,86	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 34	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	263.011.000,00	262.882.000,00	129.000,00	99,95	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 34 . 01	*Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa*	244.406.100,00	244.320.300,00	85.800,00	99,96	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 34 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	244.406.100,00	244.320.300,00	85.800,00	99,96	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 34 . 03	*Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian*	18.604.900,00	18.561.700,00	43.200,00	99,77	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 34 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.604.900,00	18.561.700,00	43.200,00	99,77	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah**	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 01	*Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain*	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	855.000.000,00	854.050.000,00	950.000,00	99,89	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 08	*Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya*	855.000.000,00	854.050.000,00	950.000,00	99,89	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	855.000.000,00	854.050.000,00	950.000,00	99,89	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 34	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	293.483.618,00	293.025.000,00	458.618,00	99,84	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 34 . 03	*Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian*	293.483.618,00	293.025.000,00	458.618,00	99,84	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	293.483.618,00	293.025.000,00	458.618,00	99,84	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(20.147.004.297,00)	(19.716.791.114,00)	(430.213.183,00)	97,86	

Printed By SimDa

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 08 Transmigrasi
Unit Organisasi : 3 . 08 . 01 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.08 . 3.08.01 . 00 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	**13.980.000,00**	**16.391.634,00**	***2.411.634,00***	***117,25***	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	13.980.000,00	16.391.634,00	2.411.634,00	117,25	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	13.980.000,00	16.391.634,00	2.411.634,00	117,25	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 01 . 06 . 5	**BELANJA DAERAH**	**3.271.363.350,00**	**3.142.691.396,00**	**128.671.954,00**	**96,07**	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**18.732.000,00**	**18.552.455,00**	**179.545,00**	99,04	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 01 . 06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	18.732.000,00	18.552.455,00	179.545,00	99,04	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.732.000,00	18.552.455,00	179.545,00	99,04	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.222.718.000,00**	**2.158.432.661,00**	**64.285.339,00**	**97,11**	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	2.222.718.000,00	2.158.432.661,00	64.285.339,00	97,11	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.222.718.000,00	2.158.432.661,00	64.285.339,00	97,11	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**238.944.400,00**	**226.272.701,00**	**12.671.699,00**	**94,70**	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	6.341.000,00	6.339.000,00	2.000,00	99,97	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.341.000,00	6.339.000,00	2.000,00	99,97	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	37.031.000,00	35.341.850,00	1.689.150,00	95,44	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.031.000,00	35.341.850,00	1.689.150,00	95,44	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	12.900.000,00	12.878.000,00	22.000,00	99,83	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	12.878.000,00	22.000,00	99,83	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	14.886.400,00	14.731.100,00	155.300,00	98,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.08 . 3.08.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.886.400,00	14.731.100,00	155.300,00	98,96	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	167.786.000,00	156.982.751,00	10.803.249,00	93,56	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	167.786.000,00	156.982.751,00	10.803.249,00	93,56	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**509.860.000,00**	**476.410.029,00**	**33.449.971,00**	**93,44**	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	57.000.000,00	42.780.029,00	14.219.971,00	75,05	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	42.780.029,00	14.219.971,00	75,05	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	452.860.000,00	433.630.000,00	19.230.000,00	95,75	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	59.100.000,00	55.550.000,00	3.550.000,00	93,99	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	393.760.000,00	378.080.000,00	15.680.000,00	96,02	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**56.140.000,00**	**48.329.500,00**	**7.810.500,00**	**86,09**	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	4.500.000,00	1.692.000,00	2.808.000,00	37,60	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	1.692.000,00	2.808.000,00	37,60	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	42.500.000,00	38.757.500,00	3.742.500,00	91,19	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.500.000,00	38.757.500,00	3.742.500,00	91,19	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 09 . 06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	9.140.000,00	7.880.000,00	1.260.000,00	86,21	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 09 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.140.000,00	7.880.000,00	1.260.000,00	86,21	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 15	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**27.552.000,00**	**26.185.800,00**	**1.366.200,00**	**95,04**	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 15 . 01	*Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro*	27.552.000,00	26.185.800,00	1.366.200,00	95,04	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.552.000,00	26.185.800,00	1.366.200,00	95,04	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 16	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**112.342.500,00**	**108.317.400,00**	**4.025.100,00**	**96,42**	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 16 . 01	*Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi*	112.342.500,00	108.317.400,00	4.025.100,00	96,42	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.342.500,00	108.317.400,00	4.025.100,00	96,42	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 17	**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian**	**34.376.200,00**	**33.531.350,00**	**844.850,00**	**97,54**	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 17 . 01	*Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman*	34.376.200,00	33.531.350,00	844.850,00	97,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.08 . 3.08.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.376.200,00	33.531.350,00	844.850,00	97,54	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 23	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**18.953.350,00**	**16.714.500,00**	**2.238.850,00**	**88,19**	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 23 . 02	*Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online*	18.953.350,00	16.714.500,00	2.238.850,00	88,19	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 23 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.953.350,00	16.714.500,00	2.238.850,00	88,19	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 26	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**14.875.000,00**	**13.524.100,00**	**1.350.900,00**	**90,92**	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 26 . 01	*Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan*	14.875.000,00	13.524.100,00	1.350.900,00	90,92	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 26 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.875.000,00	13.524.100,00	1.350.900,00	90,92	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 27	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**16.869.900,00**	**16.420.900,00**	**449.000,00**	**97,34**	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 27 . 02	*Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	16.869.900,00	16.420.900,00	449.000,00	97,34	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 27 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.869.900,00	16.420.900,00	449.000,00	97,34	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 16	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 16 . 01	*Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.01 . 3.08.01 . 00 . 23	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 23 . 02	*Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(3.257.383.350,00)**	**(3.126.299.762,00)**	**95,98**	**95,98**	

Printed By SimDa

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	**10.000.000,00**	**11.500.000,00**	**1.500.000,00**	**115,00**	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**10.000.000,00**	**11.500.000,00**	**1.500.000,00**	**115,00**	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	10.000.000,00	11.500.000,00	1.500.000,00	115,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 02 . 01 . 5	**BELANJA DAERAH**	**34.429.386.096,00**	**34.244.751.327,00**	**184.557.269,00**	**99,46**	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.595.512.000,00**	**6.479.563.583,00**	**115.948.417,00**	**98,24**	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	6.595.512.000,00	6.479.563.583,00	115.948.417,00	98,24	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.595.512.000,00	6.479.563.583,00	115.948.417,00	98,24	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**200.000.000,00**	**187.738.362,00**	**12.261.638,00**	**93,87**	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 03 . 02	*Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	200.000.000,00	187.738.362,00	12.261.638,00	93,87	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 03 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	187.738.362,00	12.261.638,00	93,87	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**3.584.692.448,00**	**3.584.456.928,00**	**235.520,00**	**99,99**	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	243.516.700,00	243.497.040,00	19.660,00	99,99	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	243.516.700,00	243.497.040,00	19.660,00	99,99	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	261.747.598,00	261.747.598,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	261.747.598,00	261.747.598,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 06 . 03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	30.312.850,00	30.294.850,00	18.000,00	99,94	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.312.850,00	30.294.850,00	18.000,00	99,94	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	1.953.860.000,00	1.953.860.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.953.860.000,00	1.953.860.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	91.101.500,00	91.100.000,00	1.500,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.101.500,00	91.100.000,00	1.500,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.01 . 00 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1.004.153.800,00	1.003.957.440,00	196.360,00	99,98	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.004.153.800,00	1.003.957.440,00	196.360,00	99,98	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**153.144.000,00**	**153.144.000,00**	**0,00**	**100,00**	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 07 . 10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	153.144.000,00	153.144.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 07 . 10 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	153.144.000,00	153.144.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.379.102.300,00**	**5.373.191.290,00**	**5.911.010,00**	**99,89**	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 08 . 01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	780.814.300,00	780.553.290,00	261.010,00	99,97	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	780.814.300,00	780.553.290,00	261.010,00	99,97	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 08 . 03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	631.538.000,00	631.538.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 08 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	631.538.000,00	631.538.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	3.940.150.000,00	3.934.500.000,00	5.650.000,00	99,86	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	234.800.000,00	229.150.000,00	5.650.000,00	97,59	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.705.350.000,00	3.705.350.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.899.088.950,00**	**1.899.069.288,00**	**19.662,00**	**100,00**	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas*	297.843.800,00	297.843.800,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	297.843.800,00	297.843.800,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	1.084.495.150,00	1.084.475.488,00	19.662,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.084.495.150,00	1.084.475.488,00	19.662,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 09 . 06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	174.650.000,00	174.650.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 09 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	174.650.000,00	174.650.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	342.100.000,00	342.100.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 09 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	342.100.000,00	342.100.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 15	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**1.185.433.041,00**	**1.178.511.345,00**	**6.921.696,00**	**99,42**	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 15 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	177.933.041,00	171.015.345,00	6.917.696,00	96,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	177.933.041,00	171.015.345,00	6.917.696,00	96,11	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 15 . 02	*Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	507.500.000,00	507.500.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	507.500.000,00	507.500.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 15 . 03	*Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 15 . 04	*Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	400.000.000,00	399.996.000,00	4.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 15 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	400.000.000,00	399.996.000,00	4.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 16	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**55.494.000,00**	**55.470.000,00**	**24.000,00**	**99,96**	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 16 . 01	*Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah*	35.470.000,00	35.470.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.470.000,00	35.470.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 16 . 02	*Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah*	20.024.000,00	20.000.000,00	24.000,00	99,88	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.024.000,00	20.000.000,00	24.000,00	99,88	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 17	**Penataan Organisasi**	**219.357.952,00**	**215.708.150,00**	**3.649.802,00**	**98,34**	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 17 . 01	*Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan*	97.292.802,00	95.467.800,00	1.825.002,00	98,12	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.292.802,00	95.467.800,00	1.825.002,00	98,12	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 17 . 02	*Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana*	47.762.650,00	47.287.350,00	475.300,00	99,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.762.650,00	47.287.350,00	475.300,00	99,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 17 . 03	*Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi*	74.302.500,00	72.953.000,00	1.349.500,00	98,18	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 17 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.302.500,00	72.953.000,00	1.349.500,00	98,18	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 18	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**4.804.974.100,00**	**4.804.871.850,00**	**24.750,00**	**100,00**	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 18 . 01	*Fasilitasi Keprotokolan*	2.928.146.000,00	2.928.046.250,00	99.750,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 18 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.928.146.000,00	2.928.046.250,00	99.750,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 18 . 02	*Fasilitasi Komunikasi Pimpinan*	33.622.100,00	33.622.100,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 18 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.622.100,00	33.622.100,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 18 . 03	*Pendokumentasian Tugas Pimpinan*	1.843.206.000,00	1.843.203.500,00	(75.000,00)	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.843.206.000,00	1.843.203.500,00	2.500,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 19	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**269.657.000,00**	**257.928.257,00**	**11.728.743,00**	**95,65**	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 19 . 01	*Penataan Administrasi Pemerintahan*	64.823.000,00	64.805.700,00	17.300,00	99,97	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.823.000,00	64.805.700,00	17.300,00	99,97	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 19 . 02	*Pengelolaan Administrasi Kewilayahan*	32.370.000,00	32.259.780,00	110.220,00	99,66	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.370.000,00	32.259.780,00	110.220,00	99,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.01 . 00 . 19 . 03	*Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*	172.464.000,00	160.862.777,00	11.601.223,00	93,27	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 19 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	172.464.000,00	160.862.777,00	11.601.223,00	93,27	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 20	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**4.119.292.640,00**	**4.117.765.605,00**	**1.527.035,00**	**99,96**	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 20 . 01	*Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual*	3.918.103.130,00	3.916.591.095,00	1.512.035,00	99,96	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 20 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.713.103.130,00	2.711.591.095,00	1.512.035,00	99,94	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 20 . 01 . 5 . 1 . 5	Belanja Hibah	1.205.000.000,00	1.205.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 20 . 02	*Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial*	163.625.810,00	163.625.810,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 20 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	163.625.810,00	163.625.810,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 20 . 03	*Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat*	37.563.700,00	37.548.700,00	15.000,00	99,96	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 20 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.563.700,00	37.548.700,00	15.000,00	99,96	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 21	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**337.445.500,00**	**337.351.800,00**	**93.700,00**	**99,97**	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 21 . 01	*Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah*	138.672.400,00	138.672.400,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.672.400,00	138.672.400,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 21 . 02	*Fasilitasi Bantuan Hukum*	170.549.100,00	170.549.100,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 21 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	170.549.100,00	170.549.100,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 21 . 03	*Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum*	28.224.000,00	28.130.300,00	93.700,00	99,67	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 21 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.224.000,00	28.130.300,00	93.700,00	99,67	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 22	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**50.966.760,00**	**50.966.760,00**	**0,00**	**100,00**	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 22 . 01	*Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri*	50.966.760,00	50.966.760,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 22 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.966.760,00	50.966.760,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 23	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**346.767.025,00**	**346.588.003,00**	**179.022,00**	**99,95**	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 23 . 01	*Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD*	77.832.050,00	77.789.250,00	42.800,00	99,95	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 23 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.832.050,00	77.789.250,00	42.800,00	99,95	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 23 . 02	*Pengendalian dan Distribusi Perekonomian*	99.615.600,00	99.494.700,00	120.900,00	99,88	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 23 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.615.600,00	99.494.700,00	120.900,00	99,88	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 23 . 03	*Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil*	169.319.375,00	169.304.053,00	15.322,00	99,99	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 23 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.319.375,00	169.304.053,00	15.322,00	99,99	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 24	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**205.050.500,00**	**204.634.900,00**	**415.600,00**	**99,80**	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 24 . 01	*Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan*	53.532.000,00	53.289.800,00	242.200,00	99,55	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 24 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.532.000,00	53.289.800,00	242.200,00	99,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.01 . 00 . 24 . 02	*Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan*	79.271.900,00	79.246.500,00	25.400,00	99,97	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 24 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.271.900,00	79.246.500,00	25.400,00	99,97	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 24 . 03	*Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan*	72.246.600,00	72.098.600,00	148.000,00	99,80	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 24 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.246.600,00	72.098.600,00	148.000,00	99,80	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 25	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**759.007.780,00**	**754.646.806,00**	**4.360.974,00**	**99,43**	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 25 . 01	*Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*	529.620.500,00	529.389.576,00	230.924,00	99,96	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	265.990.000,00	265.990.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	263.630.500,00	263.399.576,00	230.924,00	99,91	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 25 . 02	*Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik*	166.792.440,00	162.869.440,00	3.923.000,00	97,65	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 25 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	166.792.440,00	162.869.440,00	3.923.000,00	97,65	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 25 . 03	*Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa*	62.594.840,00	62.387.790,00	207.050,00	99,67	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 25 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.594.840,00	62.387.790,00	207.050,00	99,67	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 26	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**96.490.000,00**	**96.387.200,00**	**102.800,00**	**99,89**	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 26 . 02	*Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup*	96.490.000,00	96.387.200,00	102.800,00	99,89	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 26 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.490.000,00	96.387.200,00	102.800,00	99,89	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6.300.000,00**	**6.300.000,00**	**0,00**	**100,00**	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	-
4.01 . 4.01.01 . 00 . 06 . 03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.959.260.000,00**	**2.943.300.000,00**	**15.960.000,00**	**99,46**	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 07 . 01	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	947.355.000,00	947.210.000,00	145.000,00	99,98	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	947.355.000,00	947.210.000,00	145.000,00	99,98	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 07 . 02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	1.775.155.000,00	1.759.340.000,00	15.815.000,00	99,11	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.775.155.000,00	1.759.340.000,00	15.815.000,00	99,11	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 07 . 05	*Pengadaan Mebel*	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 07 . 10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	147.750.000,00	147.750.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	147.750.000,00	147.750.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 07 . 10 . 5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.01 . 00 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**545.046.000,00**	**542.252.200,00**	**2.793.800,00**	**99,49**	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	545.046.000,00	542.252.200,00	2.793.800,00	99,49	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	34.900.000,00	100.000,00	99,71	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 09 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	510.046.000,00	507.352.200,00	2.693.800,00	99,47	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 16	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**470.019.200,00**	**469.802.000,00**	**217.200,00**	**99,95**	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 16 . 01	*Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah*	344.512.000,00	344.512.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	344.512.000,00	344.512.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 16 . 02	*Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah*	125.507.200,00	125.290.000,00	217.200,00	99,83	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.507.200,00	125.290.000,00	217.200,00	99,83	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 16 . 03	*Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 18	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**24.228.000,00**	**24.228.000,00**	**0,00**	**100,00**	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 18 . 01	*Fasilitasi Keprotokolan*	24.228.000,00	24.228.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.228.000,00	24.228.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 20	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**39.250.000,00**	**39.250.000,00**	**0,00**	**100,00**	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 20 . 01	*Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual*	39.250.000,00	39.250.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.250.000,00	39.250.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 21	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**12.500.000,00**	**11.000.000,00**	**1.500.000,00**	**88,00**	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 21 . 01	*Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah*	12.500.000,00	11.000.000,00	1.500.000,00	88,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.500.000,00	11.000.000,00	1.500.000,00	88,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 25	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**111.306.900,00**	**110.625.000,00**	**681.900,00**	**99,39**	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 25 . 01	*Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*	11.578.000,00	11.550.000,00	28.000,00	99,76	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.578.000,00	11.550.000,00	28.000,00	99,76	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 25 . 02	*Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik*	75.000.000,00	74.525.000,00	475.000,00	99,37	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.000.000,00	74.525.000,00	475.000,00	99,37	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 25 . 03	*Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa*	24.728.900,00	24.550.000,00	178.900,00	99,28	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.728.900,00	24.550.000,00	178.900,00	99,28	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(34.419.386.096,00)**	**(34.233.251.327,00)**	**(183.057.269,00)**	**99,46**	

Printed By SimDa

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 02 SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.08 . 4.01.02 . 01 . 02 . 01 . 5	**BELANJA DAERAH**	38.800.211.471,00	36.708.201.189,00	2.092.010.282,00	94,61	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	14.418.258.076,00	13.891.140.752,00	527.117.324,00	96,34	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	14.418.258.076,00	13.891.140.752,00	527.117.324,00	96,34	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	14.418.258.076,00	13.891.140.752,00	527.117.324,00	96,34	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	391.845.500,00	377.777.736,00	14.067.764,00	96,41	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 05 . 02	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	226.500.000,00	224.400.000,00	2.100.000,00	99,07	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 05 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	226.500.000,00	224.400.000,00	2.100.000,00	99,07	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 05 . 09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan*	165.345.500,00	153.377.736,00	11.967.764,00	92,76	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 05 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	165.345.500,00	153.377.736,00	11.967.764,00	92,76	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	1.274.254.295,00	1.112.679.685,00	161.574.610,00	87,32	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan*	26.365.000,00	25.000.000,00	1.365.000,00	94,82	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.365.000,00	25.000.000,00	1.365.000,00	94,82	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	57.049.900,00	56.423.500,00	626.400,00	98,90	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.049.900,00	56.423.500,00	626.400,00	98,90	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	283.537.895,00	244.731.590,00	38.806.305,00	86,31	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	283.537.895,00	244.731.590,00	38.806.305,00	86,31	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	211.500.000,00	131.106.000,00	80.394.000,00	61,99	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	211.500.000,00	131.106.000,00	80.394.000,00	61,99	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	66.270.000,00	53.609.040,00	12.660.960,00	80,89	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.270.000,00	53.609.040,00	12.660.960,00	80,89	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-*	236.050.000,00	218.550.000,00	17.500.000,00	92,59	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	236.050.000,00	218.550.000,00	17.500.000,00	92,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	393.481.500,00	383.259.555,00	10.221.945,00	97,40	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	393.481.500,00	383.259.555,00	10.221.945,00	97,40	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	1.950.708.000,00	1.514.823.916,00	435.884.084,00	77,66	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 08 . 01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	23.692.000,00	18.750.000,00	4.942.000,00	79,14	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.692.000,00	18.750.000,00	4.942.000,00	79,14	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	373.600.000,00	255.081.416,00	118.518.584,00	68,28	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	373.600.000,00	255.081.416,00	118.518.584,00	68,28	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 08 . 03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	329.825.000,00	290.682.500,00	39.142.500,00	88,13	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 08 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	329.825.000,00	290.682.500,00	39.142.500,00	88,13	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	1.223.591.000,00	950.310.000,00	273.281.000,00	77,67	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.223.591.000,00	950.310.000,00	273.281.000,00	77,67	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	663.398.000,00	594.880.650,00	68.517.350,00	89,67	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan*	250.898.000,00	206.006.650,00	44.891.350,00	82,11	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	250.898.000,00	206.006.650,00	44.891.350,00	82,11	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,*	112.500.000,00	91.319.000,00	21.181.000,00	81,17	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.500.000,00	91.319.000,00	21.181.000,00	81,17	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan*	300.000.000,00	297.555.000,00	2.445.000,00	99,19	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 09 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	297.555.000,00	2.445.000,00	99,19	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 15	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	4.505.591.500,00	4.385.809.730,00	119.781.770,00	97,34	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 15 . 01	*Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan*	4.505.591.500,00	4.385.809.730,00	119.781.770,00	97,34	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 15 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.505.591.500,00	4.385.809.730,00	119.781.770,00	97,34	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 18	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	2.052.283.000,00	1.803.209.530,00	249.073.470,00	87,86	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 18 . 02	*Bimbingan Teknis DPRD*	1.626.283.000,00	1.431.959.530,00	194.323.470,00	88,05	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 18 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.626.283.000,00	1.431.959.530,00	194.323.470,00	88,05	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 18 . 04	*Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli*	426.000.000,00	371.250.000,00	54.750.000,00	87,15	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 18 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	426.000.000,00	371.250.000,00	54.750.000,00	87,15	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 19	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	11.515.464.200,00	11.279.297.491,00	236.166.709,00	97,95	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 19 . 01	*Kunjungan Kerja dalam Daerah*	11.091.209.200,00	11.054.720.241,00	36.488.959,00	99,67	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.091.209.200,00	11.054.720.241,00	36.488.959,00	99,67	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 19 . 03	*Pelaksanaan Reses*	424.255.000,00	224.577.250,00	199.677.750,00	52,93	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 19 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	424.255.000,00	224.577.250,00	199.677.750,00	52,93	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 21	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	571.090.000,00	505.169.800,00	65.920.200,00	88,46	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 21 . 02	*Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi*	571.090.000,00	505.169.800,00	65.920.200,00	88,46	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 21 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	571.090.000,00	505.169.800,00	65.920.200,00	88,46	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 150	**Layanan Administrasi DPRD**	263.500.000,00	173.014.000,00	90.486.000,00	65,66	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 150 . 153	*Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD*	263.500.000,00	173.014.000,00	90.486.000,00	65,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.08 . 4.01.02 . 01 . 150 . 153 . 5 . 1 .	Belanja Barang dan Jasa	263.500.000,00	173.014.000,00	90.486.000,00	65,66	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 151	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	222.050.000,00	200.144.000,00	21.906.000,00	90,13	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 151 . 151	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD*	222.050.000,00	200.144.000,00	21.906.000,00	90,13	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 151 . 151 . 5 . 1 .	Belanja Pegawai	156.050.000,00	135.400.000,00	20.650.000,00	86,77	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 151 . 151 . 5 . 1 .	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	64.744.000,00	1.256.000,00	98,10	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	456.528.900,00	410.183.400,00	46.345.500,00	89,85	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan*	124.000.000,00	123.484.900,00	515.100,00	99,58	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	124.000.000,00	123.484.900,00	515.100,00	99,58	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	306.528.900,00	262.138.500,00	44.390.400,00	85,52	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	306.528.900,00	262.138.500,00	44.390.400,00	85,52	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	26.000.000,00	24.560.000,00	1.440.000,00	94,46	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.000.000,00	24.560.000,00	1.440.000,00	94,46	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	41.630.000,00	0,00	41.630.000,00	0,00	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 07 . 05	*Pengadaan Mebel*	41.630.000,00	0,00	41.630.000,00	0,00	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.630.000,00	0,00	41.630.000,00	0,00	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	191.110.000,00	185.661.000,00	5.449.000,00	97,15	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan*	191.110.000,00	185.661.000,00	5.449.000,00	97,15	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	191.110.000,00	185.661.000,00	5.449.000,00	97,15	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 21	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	282.500.000,00	274.409.499,00	8.090.501,00	97,14	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 21 . 02	*Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi*	282.500.000,00	274.409.499,00	8.090.501,00	97,14	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	175.000.000,00	174.409.499,00	590.501,00	99,66	
4.08 . 4.01.02 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	107.500.000,00	100.000.000,00	7.500.000,00	93,02	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(38.800.211.471,00)	(36.708.201.189,00)	(2.092.010.282,00)	94,61	

Printed By SimDa

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.03 . 4.01.03 . 01 . 02 . 01 . 5	**BELANJA DAERAH**	5.012.425.902,00	4.791.393.502,00	221.032.400,00	95,59	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	2.409.728.000,00	2.314.258.313,00	95.469.687,00	96,04	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	2.409.728.000,00	2.314.258.313,00	95.469.687,00	96,04	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.409.728.000,00	2.314.258.313,00	95.469.687,00	96,04	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	382.383.652,00	374.812.230,00	7.571.422,00	98,02	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan*	4.995.000,00	4.820.000,00	175.000,00	96,50	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.995.000,00	4.820.000,00	175.000,00	96,50	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	76.198.352,00	75.806.352,00	392.000,00	99,49	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.198.352,00	75.806.352,00	392.000,00	99,49	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 06 . 03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	21.170.700,00	20.151.050,00	1.019.650,00	95,18	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.170.700,00	20.151.050,00	1.019.650,00	95,18	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	30.000.000,00	29.804.000,00	196.000,00	99,35	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.804.000,00	196.000,00	99,35	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	30.223.100,00	25.137.100,00	5.086.000,00	83,17	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.223.100,00	25.137.100,00	5.086.000,00	83,17	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	219.796.500,00	219.093.728,00	702.772,00	99,68	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	219.796.500,00	219.093.728,00	702.772,00	99,68	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	566.300.000,00	513.186.252,00	53.113.748,00	90,62	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 08 . 01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	7.200.000,00	6.000.000,00	1.200.000,00	83,33	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	6.000.000,00	1.200.000,00	83,33	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	85.000.000,00	83.236.252,00	1.763.748,00	97,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.03 . 4.01.03 . 01 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	83.236.252,00	1.763.748,00	97,93	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 08 . 03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	13.560.000,00	11.390.000,00	2.170.000,00	84,00	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 08 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.560.000,00	11.390.000,00	2.170.000,00	84,00	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	460.540.000,00	412.560.000,00	47.980.000,00	89,58	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	91.850.000,00	90.750.000,00	1.100.000,00	98,80	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	368.690.000,00	321.810.000,00	46.880.000,00	87,28	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	46.790.000,00	31.133.394,00	15.656.606,00	66,54	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	19.090.000,00	17.580.912,00	1.509.088,00	92,09	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.090.000,00	17.580.912,00	1.509.088,00	92,09	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	27.700.000,00	13.552.482,00	14.147.518,00	48,93	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.700.000,00	13.552.482,00	14.147.518,00	48,93	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 09 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 15	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	968.022.900,00	947.886.314,00	20.136.586,00	97,92	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 15 . 05	*Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota*	138.024.450,00	131.104.518,00	6.919.932,00	94,99	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 15 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.024.450,00	131.104.518,00	6.919.932,00	94,99	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 15 . 07	*Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota*	829.998.450,00	816.781.796,00	13.216.654,00	98,41	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 15 . 07 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	829.998.450,00	816.781.796,00	13.216.654,00	98,41	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 16	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	22.992.000,00	19.995.400,00	2.996.600,00	86,97	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 16 . 01	*Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah*	22.992.000,00	19.995.400,00	2.996.600,00	86,97	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 16 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.992.000,00	19.995.400,00	2.996.600,00	86,97	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 16 . 02	*Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 16 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 17	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	15.821.000,00	13.606.700,00	2.214.300,00	86,00	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 17 . 03	*Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah*	15.821.000,00	13.606.700,00	2.214.300,00	86,00	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 17 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.821.000,00	13.606.700,00	2.214.300,00	86,00	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 18	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	128.970.950,00	125.879.624,00	3.091.326,00	97,60	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 18 . 03	*Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang*	58.005.500,00	56.080.796,00	1.924.704,00	96,68	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 18 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.005.500,00	56.080.796,00	1.924.704,00	96,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.03 . 4.01.03 . 01 . 18 . 05	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan*	70.965.450,00	69.798.828,00	1.166.622,00	98,36	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 18 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.965.450,00	69.798.828,00	1.166.622,00	98,36	
4.07 . 4.01.03 . 01 . 18	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	123.107.550,00	114.557.592,00	8.549.958,00	93,05	
4.07 . 4.01.03 . 01 . 18 . 01	*Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi*	123.107.550,00	114.557.592,00	8.549.958,00	93,05	
4.07 . 4.01.03 . 01 . 18 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	123.107.550,00	114.557.592,00	8.549.958,00	93,05	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 19	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	98.967.950,00	91.291.050,00	7.676.900,00	92,24	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 19 . 01	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	50.272.900,00	48.198.300,00	2.074.600,00	95,87	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.272.900,00	48.198.300,00	2.074.600,00	95,87	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 19 . 03	*Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian*	17.042.200,00	15.154.150,00	1.888.050,00	88,92	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 19 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.042.200,00	15.154.150,00	1.888.050,00	88,92	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 19 . 05	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	31.652.850,00	27.938.600,00	3.714.250,00	88,27	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 20	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	239.341.900,00	234.936.633,00	4.405.267,00	98,16	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 20 . 01	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 20 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 20 . 05	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	199.369.000,00	195.392.853,00	3.976.147,00	98,01	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 20 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	199.369.000,00	195.392.853,00	3.976.147,00	98,01	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 20 . 08	*Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan*	39.972.900,00	39.543.780,00	429.120,00	98,93	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 20 . 08 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.972.900,00	39.543.780,00	429.120,00	98,93	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	10.000.000,00	9.850.000,00	150.000,00	98,50	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	10.000.000,00	9.850.000,00	150.000,00	98,50	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	9.850.000,00	150.000,00	98,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.03 . 4.01.03 . 01 . 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 07 . 02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.012.425.902,00)	(4.791.393.502,00)	(221.032.400,00)	95,59	

Printed By SimDa

Lampiran 1.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 . 01 BADAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	933.378.563.322,00	926.177.676.186,04	(7.200.887.135,96)	99,23	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	37.305.140.307,00	30.086.420.605,04	(7.218.719.701,96)	80,65	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1	Pajak Daerah	20.381.633.896,00	20.495.633.388,25	113.999.492,25	100,56	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.524.570.411,00	3.524.570.411,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain PAD yang Sah	13.398.936.000,00	6.066.216.805,79	(7.332.719.194,21)	45,27	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 00 . 00 . 4 . 2	**PENDAPATAN TRANSFER**	838.634.243.015,00	838.657.002.069,00	22.759.054,00	100,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	780.827.580.461,00	787.384.510.329,00	6.556.929.868,00	100,84	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.806.662.554,00	51.272.491.740,00	(6.534.170.814,00)	88,70	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 00 . 00 . 4 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	57.439.180.000,00	57.434.253.512,00	(4.926.488,00)	99,99	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	26.550.000.000,00	26.548.313.512,00	(1.686.488,00)	99,99	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30.889.180.000,00	30.885.940.000,00	(3.240.000,00)	99,99	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 02 . 01 . 5	**BELANJA DAERAH**	132.520.070.730,00	130.707.270.572,00	1.812.800.158,00	98,63	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	12.201.430.383,00	11.821.716.251,00	379.714.132,00	96,89	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	12.201.430.383,00	11.821.716.251,00	379.714.132,00	96,89	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	12.201.430.383,00	11.821.716.251,00	379.714.132,00	96,89	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	5.000.000,00	4.468.000,00	532.000,00	89,36	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 05 . 09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	5.000.000,00	4.468.000,00	532.000,00	89,36	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 05 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.468.000,00	532.000,00	89,36	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	1.140.539.962,00	1.138.203.292,00	2.336.670,00	99,80	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	14.715.812,00	14.643.000,00	72.812,00	99,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.715.812,00	14.643.000,00	72.812,00	99,51	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	197.569.000,00	197.568.000,00	1.000,00	100,00	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.569.000,00	197.568.000,00	1.000,00	100,00	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	74.256.650,00	74.243.300,00	13.350,00	99,98	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.256.650,00	74.243.300,00	13.350,00	99,98	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	88.344.000,00	88.248.000,00	96.000,00	99,89	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.344.000,00	88.248.000,00	96.000,00	99,89	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	225.792.900,00	225.792.900,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	225.792.900,00	225.792.900,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	539.861.600,00	537.708.092,00	2.153.508,00	99,60	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	539.861.600,00	537.708.092,00	2.153.508,00	99,60	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	1.124.683.500,00	1.070.299.384,00	54.384.116,00	95,16	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 08 . 01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1.000.000,00	169.650,00	830.350,00	16,97	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	169.650,00	830.350,00	16,97	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	195.060.000,00	183.379.984,00	11.680.016,00	94,01	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.060.000,00	183.379.984,00	11.680.016,00	94,01	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 08 . 03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	134.505.500,00	134.269.750,00	235.750,00	99,82	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 08 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.505.500,00	134.269.750,00	235.750,00	99,82	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	794.118.000,00	752.480.000,00	41.638.000,00	94,76	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	309.700.000,00	301.450.000,00	8.250.000,00	97,34	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	484.418.000,00	451.030.000,00	33.388.000,00	93,11	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	170.700.000,00	152.848.540,00	17.851.460,00	89,54	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	16.500.000,00	8.590.000,00	7.910.000,00	52,06	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	8.590.000,00	7.910.000,00	52,06	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	71.700.000,00	61.799.400,00	9.900.600,00	86,19	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.700.000,00	61.799.400,00	9.900.600,00	86,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.01.04 . 01 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	82.500.000,00	82.459.140,00	40.860,00	99,95	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 09 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.500.000,00	82.459.140,00	40.860,00	99,95	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 15	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	1.691.223.150,00	1.638.778.736,00	52.444.414,00	96,90	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 15 . 01	*Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS*	203.204.050,00	203.054.160,00	149.890,00	99,93	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 15 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	203.204.050,00	203.054.160,00	149.890,00	99,93	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 15 . 02	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS*	206.642.500,00	206.481.416,00	161.084,00	99,92	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 15 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	206.642.500,00	206.481.416,00	161.084,00	99,92	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 15 . 07	*Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	309.875.800,00	297.624.810,00	12.250.990,00	96,05	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 15 . 07 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	309.875.800,00	297.624.810,00	12.250.990,00	96,05	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 15 . 08	*Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD*	971.500.800,00	931.618.350,00	39.882.450,00	95,89	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 15 . 08 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	971.500.800,00	931.618.350,00	39.882.450,00	95,89	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 16	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	148.438.000,00	145.124.925,00	3.313.075,00	97,77	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 16 . 07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)*	42.432.000,00	41.205.936,00	1.226.064,00	97,11	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 16 . 07 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.432.000,00	41.205.936,00	1.226.064,00	97,11	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 16 . 11	*Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	106.006.000,00	103.918.989,00	2.087.011,00	98,03	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 16 . 11 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.006.000,00	103.918.989,00	2.087.011,00	98,03	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	398.727.100,00	389.460.236,00	9.266.864,00	97,68	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 01	*Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah*	31.757.000,00	31.548.250,00	208.750,00	99,34	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.757.000,00	31.548.250,00	208.750,00	99,34	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 04	*Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*	125.784.000,00	123.309.650,00	2.474.350,00	98,03	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.784.000,00	123.309.650,00	2.474.350,00	98,03	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 05	*Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*	120.859.750,00	120.842.750,00	17.000,00	99,99	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.859.750,00	120.842.750,00	17.000,00	99,99	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 07	*Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah*	70.345.500,00	64.245.200,00	6.100.300,00	91,33	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 07 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.345.500,00	64.245.200,00	6.100.300,00	91,33	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 08	*Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD*	21.180.600,00	20.777.250,00	403.350,00	98,10	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 08 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.180.600,00	20.777.250,00	403.350,00	98,10	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 09	*Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah*	28.800.250,00	28.737.136,00	63.114,00	99,78	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.800.250,00	28.737.136,00	63.114,00	99,78	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 18	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan**	429.797.000,00	370.690.240,00	59.106.760,00	86,25	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 18 . 08	*Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan*	429.797.000,00	370.690.240,00	59.106.760,00	86,25	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 18 . 08 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	429.797.000,00	370.690.240,00	59.106.760,00	86,25	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 19	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	194.273.000,00	192.581.411,00	1.691.589,00	99,13	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 19 . 02	*Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah*	194.273.000,00	192.581.411,00	1.691.589,00	99,13	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 19 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.273.000,00	192.581.411,00	1.691.589,00	99,13	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	896.591.350,00	887.604.687,00	8.986.663,00	99,00	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 01	*Penyusunan Standar Harga*	380.716.000,00	379.923.822,00	792.178,00	99,79	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	380.716.000,00	379.923.822,00	792.178,00	99,79	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 03	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah*	99.721.000,00	98.496.800,00	1.224.200,00	98,77	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.721.000,00	98.496.800,00	1.224.200,00	98,77	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 05	*Penatausahaan Barang Milik Daerah*	53.187.000,00	52.091.896,00	1.095.104,00	97,94	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.187.000,00	52.091.896,00	1.095.104,00	97,94	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 08	*Penilaian Barang Milik Daerah*	94.841.000,00	93.791.800,00	1.049.200,00	98,89	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 08 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.841.000,00	93.791.800,00	1.049.200,00	98,89	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 10	*Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah*	199.870.100,00	196.199.726,00	3.670.374,00	98,16	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 10 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	199.870.100,00	196.199.726,00	3.670.374,00	98,16	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 11	*Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah*	47.569.000,00	46.536.543,00	1.032.457,00	97,83	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 11 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.569.000,00	46.536.543,00	1.032.457,00	97,83	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 13	*Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*	20.687.250,00	20.564.100,00	123.150,00	99,40	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 13 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.687.250,00	20.564.100,00	123.150,00	99,40	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 21	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	642.231.500,00	626.564.297,00	15.667.203,00	97,56	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 21 . 02	*Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.*	316.522.900,00	310.162.202,00	6.360.698,00	97,99	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 21 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	316.522.900,00	310.162.202,00	6.360.698,00	97,99	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 21 . 04	*Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah*	147.863.800,00	146.945.995,00	917.805,00	99,38	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 21 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.863.800,00	146.945.995,00	917.805,00	99,38	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 21 . 05	*Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah*	27.260.000,00	24.334.000,00	2.926.000,00	89,27	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 21 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.260.000,00	24.334.000,00	2.926.000,00	89,27	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 21 . 08	*Penetapan Wajib Pajak Daerah*	150.584.800,00	145.122.100,00	5.462.700,00	96,37	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 21 . 08 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.584.800,00	145.122.100,00	5.462.700,00	96,37	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	81.418.900,00	81.150.000,00	268.900,00	99,67	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 07 . 05	*Pengadaan Mebel*	25.000.000,00	24.900.000,00	100.000,00	99,60	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	24.900.000,00	100.000,00	99,60	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 07 . 06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	56.418.900,00	56.250.000,00	168.900,00	99,70	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.418.900,00	56.250.000,00	168.900,00	99,70	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 19	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 19 . 02	*Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah*	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	100,00	-
4.04 . 4.01.04 . 01 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 02 . 01 . 5 . 3 . 1	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.01.04 . 01 . 18	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	200.000.000,00	164.439.330,00	35.560.670,00	82,22	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 18 . 09	*Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*	200.000.000,00	164.439.330,00	35.560.670,00	82,22	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 18 . 09 . 5 . 3 . 1	Belanja Tidak Terduga	200.000.000,00	164.439.330,00	35.560.670,00	82,22	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 00	**Non Program**	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 00 . 00	*Non Kegiatan*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 00 . 00 . 5 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 18	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan**	113.095.716.885,00	111.924.041.243,00	1.171.675.642,00	98,96	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 18 . 08	*Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan*	113.095.716.885,00	111.924.041.243,00	1.171.675.642,00	98,96	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 18 . 08 . 5 . 4 . 1	Belanja Bagi Hasil	3.032.853.885,00	1.861.178.243,00	1.171.675.642,00	61,37	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 18 . 08 . 5 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	110.062.863.000,00	110.062.863.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	800.858.492.592,00	795.470.405.614,04	5.388.086.977,96	99,33	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 00 . 00 . 6 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	8.334.425.206,00	8.334.425.206,49	(0,49)	100,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	8.334.425.206,00	8.334.425.206,49	(0,49)	100,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	809.192.917.798,00	803.804.830.820,53	5.388.086.977,47	99,33	

Printed By SimDa

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.05 . 4.01.05 . 01 . 02 . 01 . 5	**BELANJA DAERAH**	6.082.748.814,00	5.852.496.363,00	230.252.451,00	96,21	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	3.344.309.994,00	3.151.679.916,00	192.630.078,00	94,24	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	3.344.309.994,00	3.151.679.916,00	192.630.078,00	94,24	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.344.309.994,00	3.151.679.916,00	192.630.078,00	94,24	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	198.400.720,00	198.307.123,00	93.597,00	99,95	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan*	4.489.500,00	4.489.500,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.489.500,00	4.489.500,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	41.139.970,00	41.139.800,00	170,00	100,00	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.139.970,00	41.139.800,00	170,00	100,00	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	17.490.000,00	17.489.000,00	1.000,00	99,99	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.490.000,00	17.489.000,00	1.000,00	99,99	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	12.830.000,00	12.830.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.830.000,00	12.830.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	122.451.250,00	122.358.823,00	92.427,00	99,92	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.451.250,00	122.358.823,00	92.427,00	99,92	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	349.766.000,00	345.093.565,00	4.672.435,00	98,66	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	46.896.000,00	43.097.565,00	3.798.435,00	91,90	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.896.000,00	43.097.565,00	3.798.435,00	91,90	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	302.870.000,00	301.996.000,00	874.000,00	99,71	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	85.950.000,00	85.800.000,00	150.000,00	99,83	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	216.920.000,00	216.196.000,00	724.000,00	99,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.05 . 4.01.05 . 01 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	45.490.000,00	44.647.400,00	842.600,00	98,15	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan*	16.700.000,00	16.229.750,00	470.250,00	97,18	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.700.000,00	16.229.750,00	470.250,00	97,18	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,*	20.750.000,00	20.377.650,00	372.350,00	98,21	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.750.000,00	20.377.650,00	372.350,00	98,21	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 09 . 06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	8.040.000,00	8.040.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 09 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.040.000,00	8.040.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 15	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi**	603.115.750,00	585.659.370,00	17.456.380,00	97,11	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 02	*Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah*	20.983.000,00	20.654.956,00	328.044,00	98,44	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.983.000,00	20.654.956,00	328.044,00	98,44	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 03	*Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK*	489.912.650,00	473.032.364,00	16.880.286,00	96,55	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	489.912.650,00	473.032.364,00	16.880.286,00	96,55	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 06	*Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian*	20.467.900,00	20.454.500,00	13.400,00	99,93	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.467.900,00	20.454.500,00	13.400,00	99,93	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 10	*Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian*	54.008.200,00	53.822.050,00	186.150,00	99,66	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 10 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.008.200,00	53.822.050,00	186.150,00	99,66	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 11	*Pengelolaan Data Kepegawaian*	17.744.000,00	17.695.500,00	48.500,00	99,73	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 11 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.744.000,00	17.695.500,00	48.500,00	99,73	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 16	**Mutasi dan Promosi ASN**	40.569.500,00	40.345.650,00	223.850,00	99,45	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 16 . 02	*Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN*	40.569.500,00	40.345.650,00	223.850,00	99,45	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 16 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.569.500,00	40.345.650,00	223.850,00	99,45	
4.06 . 4.01.05 . 01 . 16	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi**	1.009.748.000,00	1.009.055.750,00	692.250,00	99,93	
4.06 . 4.01.05 . 01 . 16 . 07	*Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi*	1.009.748.000,00	1.009.055.750,00	692.250,00	99,93	
4.06 . 4.01.05 . 01 . 16 . 07 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.009.748.000,00	1.009.055.750,00	692.250,00	99,93	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 17	**Pengembangan Kompetensi ASN**	360.408.950,00	351.009.159,00	9.399.791,00	97,39	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 17 . 01	*Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN*	60.365.000,00	57.750.050,00	2.614.950,00	95,67	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 17 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.365.000,00	57.750.050,00	2.614.950,00	95,67	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 17 . 02	*Pengelolaan Assessment Center*	273.163.450,00	267.325.509,00	5.837.941,00	97,86	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 17 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	273.163.450,00	267.325.509,00	5.837.941,00	97,86	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 17 . 03	*Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN*	20.401.000,00	19.708.350,00	692.650,00	96,60	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 17 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.401.000,00	19.708.350,00	692.650,00	96,60	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 17 . 04	*Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN*	6.479.500,00	6.225.250,00	254.250,00	96,08	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 17 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.479.500,00	6.225.250,00	254.250,00	96,08	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 18	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	46.211.000,00	44.862.430,00	1.348.570,00	97,08	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 18 . 02	*Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*	7.000.000,00	6.530.000,00	470.000,00	93,29	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 18 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.530.000,00	470.000,00	93,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.05 . 4.01.05 . 01 . 18 . 04	*Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai*	12.278.000,00	12.012.100,00	265.900,00	97,83	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 18 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.278.000,00	12.012.100,00	265.900,00	97,83	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 18 . 08	*Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN*	26.933.000,00	26.320.330,00	612.670,00	97,73	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 18 . 08 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.933.000,00	26.320.330,00	612.670,00	97,73	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	84.728.900,00	81.836.000,00	2.892.900,00	96,59	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	84.728.900,00	81.836.000,00	2.892.900,00	96,59	
4.05 . 4.01.05 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.728.900,00	81.836.000,00	2.892.900,00	96,59	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.082.748.814,00)	(5.852.496.363,00)	(230.252.451,00)	96,21	

PrinTed By SimDa

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 06 INSPEKTORAT KABUPATEN
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 06 . 01 INSPEKTORAT KABUPATEN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02 . 4.01.06 . 01 . 01 . 01 . 5	**BELANJA DAERAH**	5.429.651.900,00	5.282.020.848,00	147.631.052,00	97,28	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	20.215.000,00	19.975.700,00	239.300,00	98,82	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 01 . 01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	20.215.000,00	19.975.700,00	239.300,00	98,82	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 01 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.215.000,00	19.975.700,00	239.300,00	98,82	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	3.020.034.050,00	2.953.503.103,00	66.530.947,00	97,80	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	3.020.034.050,00	2.953.503.103,00	66.530.947,00	97,80	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.020.034.050,00	2.953.503.103,00	66.530.947,00	97,80	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	243.892.550,00	237.306.968,00	6.585.582,00	97,30	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 05 . 09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan*	243.892.550,00	237.306.968,00	6.585.582,00	97,30	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 05 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	243.892.550,00	237.306.968,00	6.585.582,00	97,30	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	455.519.950,00	451.189.087,00	4.330.863,00	99,05	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan*	3.745.000,00	3.740.000,00	5.000,00	99,87	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.745.000,00	3.740.000,00	5.000,00	99,87	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	78.294.950,00	78.188.637,00	106.313,00	99,86	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.294.950,00	78.188.637,00	106.313,00	99,86	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	37.500.000,00	37.285.000,00	215.000,00	99,43	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	37.285.000,00	215.000,00	99,43	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	12.560.000,00	12.484.000,00	76.000,00	99,39	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.560.000,00	12.484.000,00	76.000,00	99,39	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 06 . 06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-*	4.500.000,00	1.320.000,00	3.180.000,00	29,33	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 06 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	1.320.000,00	3.180.000,00	29,33	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	318.920.000,00	318.171.450,00	748.550,00	99,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02 . 4.01.06 . 01 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	318.920.000,00	318.171.450,00	748.550,00	99,77	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	415.550.000,00	400.183.268,00	15.366.732,00	96,30	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 08 . 01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	5.600.000,00	3.556.000,00	2.044.000,00	63,50	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	3.556.000,00	2.044.000,00	63,50	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	94.440.000,00	86.208.668,00	8.231.332,00	91,28	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.440.000,00	86.208.668,00	8.231.332,00	91,28	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 08 . 03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	30.250.000,00	28.488.600,00	1.761.400,00	94,18	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 08 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.250.000,00	28.488.600,00	1.761.400,00	94,18	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	285.260.000,00	281.930.000,00	3.330.000,00	98,83	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	75.680.000,00	72.350.000,00	3.330.000,00	95,60	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	209.580.000,00	209.580.000,00	0,00	100,00	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	259.500.000,00	255.041.838,00	4.458.162,00	98,28	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan*	7.000.000,00	3.739.100,00	3.260.900,00	53,42	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	3.739.100,00	3.260.900,00	53,42	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,*	77.500.000,00	76.598.738,00	901.262,00	98,84	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.500.000,00	76.598.738,00	901.262,00	98,84	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan*	175.000.000,00	174.704.000,00	296.000,00	99,83	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 09 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	174.704.000,00	296.000,00	99,83	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 15	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	491.444.450,00	461.999.358,00	29.445.092,00	94,01	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 15 . 01	*Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah*	81.264.600,00	79.187.500,00	2.077.100,00	97,44	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 15 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.264.600,00	79.187.500,00	2.077.100,00	97,44	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 15 . 02	*Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah*	93.518.800,00	87.373.750,00	6.145.050,00	93,43	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 15 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.518.800,00	87.373.750,00	6.145.050,00	93,43	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 15 . 03	*Reviu Laporan Kinerja*	51.225.000,00	50.758.750,00	466.250,00	99,09	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 15 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.225.000,00	50.758.750,00	466.250,00	99,09	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 15 . 04	*Reviu Laporan Keuangan*	81.071.050,00	80.071.000,00	1.000.050,00	98,77	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 15 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.071.050,00	80.071.000,00	1.000.050,00	98,77	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 15 . 05	*Pengawasan Desa*	63.231.500,00	60.417.356,00	2.814.144,00	95,55	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 15 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.231.500,00	60.417.356,00	2.814.144,00	95,55	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 15 . 06	*Kerjasama Pengawasan Internal*	39.670.500,00	38.829.650,00	840.850,00	97,88	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 15 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.670.500,00	38.829.650,00	840.850,00	97,88	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 15 . 07	*Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan*	81.463.000,00	65.361.352,00	16.101.648,00	80,23	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 15 . 07 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.463.000,00	65.361.352,00	16.101.648,00	80,23	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 16	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	30.775.500,00	28.144.000,00	2.631.500,00	91,45	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 16 . 02	*Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*	30.775.500,00	28.144.000,00	2.631.500,00	91,45	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 16 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.775.500,00	28.144.000,00	2.631.500,00	91,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02 . 4.01.06 . 01 . 17	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan**	20.559.500,00	20.203.600,00	355.900,00	98,27	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 17 . 02	*Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi*	20.559.500,00	20.203.600,00	355.900,00	98,27	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 17 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.559.500,00	20.203.600,00	355.900,00	98,27	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 18	**Pendampingan dan Asistensi**	253.183.100,00	248.322.626,00	4.860.474,00	98,08	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 18 . 01	*Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah*	118.985.500,00	118.588.550,00	396.950,00	99,67	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 18 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.985.500,00	118.588.550,00	396.950,00	99,67	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 18 . 02	*Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian*	46.174.600,00	45.473.750,00	700.850,00	98,48	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 18 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.174.600,00	45.473.750,00	700.850,00	98,48	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 18 . 03	*Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi*	88.023.000,00	84.260.326,00	3.762.674,00	95,73	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 18 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.023.000,00	84.260.326,00	3.762.674,00	95,73	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	141.586.800,00	136.686.800,00	4.900.000,00	96,54	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	141.586.800,00	136.686.800,00	4.900.000,00	96,54	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.586.800,00	136.686.800,00	4.900.000,00	96,54	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	77.391.000,00	69.464.500,00	7.926.500,00	89,76	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 07 . 02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 07 . 05	*Pengadaan Mebel*	77.391.000,00	69.464.500,00	7.926.500,00	89,76	
4.02 . 4.01.06 . 01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.391.000,00	69.464.500,00	7.926.500,00	89,76	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.429.651.900,00)	(5.282.020.848,00)	(147.631.052,00)	97,28	

Printed By SimDa

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 07 KECAMATAN PULAU PUNJUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	**6.000.000,00**	**7.656.250,00**	**1.656.250,00**	**127,60**	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**6.000.000,00**	**7.656.250,00**	**1.656.250,00**	**127,60**	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	6.000.000,00	7.656.250,00	1.656.250,00	127,60	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 02 . 01 . 5	**BELANJA DAERAH**	**1.608.481.440,00**	**1.563.240.440,00**	**45.241.000,00**	**97,19**	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.278.373.290,00**	**1.243.242.742,00**	**1.278.373.290,00**	**97,25**	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	1.278.373.290,00	1.243.242.742,00	35.130.548,00	97,25	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.278.373.290,00	1.243.242.742,00	35.130.548,00	97,25	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**98.928.150,00**	**98.903.450,00**	**24.700,00**	**99,98**	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	1.817.100,00	1.817.100,00	0,00 0,00	100,00	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.817.100,00	1.817.100,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	24.817.400,00	24.817.400,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.817.400,00	24.817.400,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	10.580.000,00	10.580.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.580.000,00	10.580.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	4.095.000,00	4.095.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.095.000,00	4.095.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	57.618.650,00	57.593.950,00	24.700,00	99,96	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.618.650,00	57.593.950,00	24.700,00	99,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.11 . 4.01.07 . 00 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**206.680.000,00**	**196.917.898,00**	**9.762.102,00**	**95,28**	
				0,00		
4.11 . 4.01.07 . 00 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	7.000.000,00	6.977.898,00	22.102,00	99,68	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.977.898,00	22.102,00	99,68	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	199.680.000,00	189.940.000,00	9.740.000,00	95,12	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	31.900.000,00	31.900.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	167.780.000,00	158.040.000,00	9.740.000,00	94,19	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**17.495.000,00**	**17.181.350,00**	**313.650,00**	**98,21**	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	11.405.000,00	11.402.350,00	2.650,00	99,98	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.405.000,00	11.402.350,00	2.650,00	99,98	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	3.650.000,00	3.339.000,00	311.000,00	91,48	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	3.339.000,00	311.000,00	91,48	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 09 . 06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 09 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 18	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
4.11 . 4.01.07 . 00 . 18 . 01	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha*	0,00	0,00	0,00		
4.11 . 4.01.07 . 00 . 18 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00		
4.11 . 4.01.07 . 00 . 18 . 02	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan*	0,00	0,00	0,00		
4.11 . 4.01.07 . 00 . 18 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00		
4.11 . 4.01.07 . 00 . 19	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**4.935.000,00**	**4.935.000,00**	**0,00**	**100,00**	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 19 . 01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	4.935.000,00	4.935.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.935.000,00	4.935.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 24	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**100,00**	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 24 . 01	*Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.11 . 4.01.07 . 00 . 24 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 28	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**1.470.000,00**	**1.460.000,00**	**10.000,00**	**99,32**	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 28 . 02	*Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	1.470.000,00	1.460.000,00	10.000,00	99,32	
4.11 . 4.01.07 . 00 . 28 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.470.000,00	1.460.000,00	10.000,00	99,32	
	SURPLUS / (DEFISIT)	-1.602.481.440,00	-1.555.584.190,00	-46.897.250,00	97,07	

Printed By SimDa

Lampiran 1.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 08 KECAMATAN SITIUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.08 . 01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	6.460.000,00	5.355.000,00	(1.105.000,00)	82,89	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	6.460.000,00	5.355.000,00	(1.105.000,00)	82,89	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	6.460.000,00	5.355.000,00	(1.105.000,00)	82,89	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 02 . 01 . 5	**BELANJA DAERAH**	1.627.404.800,00	1.585.748.265,00	(41.656.535,00)	97,44	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	1.373.828.000,00	1.333.373.021,00	(40.454.979,00)	97,06	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	1.373.828.000,00	1.333.373.021,00	(40.454.979,00)	97,06	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.373.828.000,00	1.333.373.021,00	(40.454.979,00)	97,06	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	87.756.800,00	87.511.544,00	(245.256,00)	99,72	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	526.000,00	526.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	526.000,00	526.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	16.343.700,00	16.343.350,00	(350,00)	100,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.343.700,00	16.343.350,00	(350,00)	100,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	4.043.100,00	4.043.100,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.043.100,00	4.043.100,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	63.694.000,00	63.449.094,00	(244.906,00)	99,62	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.694.000,00	63.449.094,00	(244.906,00)	99,62	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	139.140.000,00	138.447.000,00	(693.000,00)	99,50	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	6.000.000,00	5.907.000,00	(93.000,00)	98,45	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.907.000,00	(93.000,00)	98,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.11 . 4.01.08 . 01 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	133.140.000,00	132.540.000,00	(600.000,00)	99,55	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.640.000,00	105.040.000,00	(600.000,00)	99,43	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	20.900.000,00	20.636.700,00	(263.300,00)	98,74	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	11.200.000,00	11.130.000,00	(70.000,00)	99,38	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	11.130.000,00	(70.000,00)	99,38	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	4.700.000,00	4.506.700,00	(193.300,00)	95,89	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	4.506.700,00	(193.300,00)	95,89	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 09 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 18	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 18 . 01	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha*	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 18 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 18 . 02	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 18 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 19	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 19 . 01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 24	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 24 . 01	*Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 24 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 28	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 28 . 02	*Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.08 . 01 . 28 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.620.944.800,00)	(1.580.393.265,00)	40.551.535,00	97,50	

Printed By SimDa

Lampiran 1.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 KECAMATAN KOTO BARU
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 . 01 KECAMATAN KOTO BARU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.09 . 01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	3.600.000,00	3.225.000,00	(375.000,00)	89,58	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	3.600.000,00	3.225.000,00	(375.000,00)	89,58	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	3.600.000,00	3.225.000,00	(375.000,00)	89,58	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 02 . 01 . 5	**BELANJA DAERAH**	1.697.773.200,00	1.530.418.845,00	(167.354.355,00)	90,14	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	1.342.713.000,00	1.180.773.604,00	(161.939.396,00)	87,94	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	1.342.713.000,00	1.180.773.604,00	(161.939.396,00)	87,94	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.342.713.000,00	1.180.773.604,00	(161.939.396,00)	87,94	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	86.583.200,00	86.264.652,00	(318.548,00)	99,63	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	1.499.500,00	1.421.000,00	(78.500,00)	94,76	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.499.500,00	1.421.000,00	(78.500,00)	94,76	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	13.556.900,00	13.556.000,00	(900,00)	99,99	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.556.900,00	13.556.000,00	(900,00)	99,99	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	8.952.000,00	8.948.000,00	(4.000,00)	99,96	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.952.000,00	8.948.000,00	(4.000,00)	99,96	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	2.994.800,00	2.911.800,00	(83.000,00)	97,23	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.994.800,00	2.911.800,00	(83.000,00)	97,23	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	59.580.000,00	59.427.852,00	(152.148,00)	99,74	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.580.000,00	59.427.852,00	(152.148,00)	99,74	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	240.917.000,00	236.493.424,00	(4.423.576,00)	98,16	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	8.400.000,00	6.673.424,00	(1.726.576,00)	79,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.11 . 4.01.09 . 01 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	6.673.424,00	(1.726.576,00)	79,45	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	232.517.000,00	229.820.000,00	(2.697.000,00)	98,84	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	203.917.000,00	201.220.000,00	(2.697.000,00)	98,68	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	18.740.000,00	18.517.165,00	(222.835,00)	98,81	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	1.900.000,00	1.892.850,00	(7.150,00)	99,62	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.892.850,00	(7.150,00)	99,62	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	14.000.000,00	13.784.315,00	(215.685,00)	98,46	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	13.784.315,00	(215.685,00)	98,46	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 09 . 06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 09 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 18	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	1.210.000,00	1.000.000,00	(210.000,00)	82,64	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 18 . 02	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan*	1.210.000,00	1.000.000,00	(210.000,00)	82,64	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 18 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.210.000,00	1.000.000,00	(210.000,00)	82,64	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 19	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	4.910.000,00	4.850.000,00	(60.000,00)	98,78	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 19 . 01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	4.910.000,00	4.850.000,00	(60.000,00)	98,78	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.910.000,00	4.850.000,00	(60.000,00)	98,78	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 24	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	1.340.000,00	1.200.000,00	(140.000,00)	89,55	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 24 . 01	*Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	1.340.000,00	1.200.000,00	(140.000,00)	89,55	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 24 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.340.000,00	1.200.000,00	(140.000,00)	89,55	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 28	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	1.360.000,00	1.320.000,00	(40.000,00)	97,06	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 28 . 02	*Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	1.360.000,00	1.320.000,00	(40.000,00)	97,06	
4.11 . 4.01.09 . 01 . 28 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.360.000,00	1.320.000,00	(40.000,00)	97,06	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.694.173.200,00)	(1.527.193.845,00)	166.979.355,00	90,14	

Printed By SimDa

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 KECAMATAN SUNGAI RUMBAI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	**8.500.000,00**	**5.280.000,00**	**-3.220.000,00**	**62,12**	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**8.500.000,00**	**5.280.000,00**	**-3.220.000,00**	**62,12**	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	8.500.000,00	5.280.000,00	-3.220.000,00	62,12	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 02 . 01 . 5	**BELANJA DAERAH**	**1.404.666.400,00**	**1.366.707.712,00**	**37.092.405,00**	**97,30**	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.112.950.400,00**	**1.075.857.995,00**	**37.092.405,00**	**96,67**	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	1.112.950.400,00	1.075.857.995,00	37.092.405,00	96,67	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.112.950.400,00	1.075.857.995,00	37.092.405,00	96,67	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**105.963.000,00**	**105.847.468,00**	**115.532,00**	**99,89**	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	1.543.700,00	1.543.700,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.543.700,00	1.543.700,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	15.749.700,00	15.749.700,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.749.700,00	15.749.700,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	17.530.000,00	17.530.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.530.000,00	17.530.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	4.541.600,00	4.526.600,00	15.000,00	99,67	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.541.600,00	4.526.600,00	15.000,00	99,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.11 . 4.01.10 . 00 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	66.598.000,00	66.497.468,00	100.532,00	99,67	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.598.000,00	66.497.468,00	100.532,00	99,67	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**157.668.000,00**	**157.463.000,00**	**205.000,00**	**99,89**	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	9.000.000,00	8.983.000,00	17.000,00	99,81	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	8.983.000,00	17.000,00	99,81	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	148.668.000,00	148.480.000,00	188.000,00	99,90	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.068.000,00	119.880.000,00	188.000,00	99,84	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**16.990.000,00**	**16.519.249,00**	**470.751,00**	**97,23**	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	11.200.000,00	10.729.249,00	470.751,00	95,80	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	**11.200.000,00**	**10.729.249,00**	**470.751,00**	**95,80**	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 09 . 06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 09 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 18	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**2.080.000,00**	**2.045.000,00**	**35.000,00**	**98,32**	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 18 . 01	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha*	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 18 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 18 . 02	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan*	1.000.000,00	965.000,00	35.000,00	96,50	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 18 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	965.000,00	35.000,00	96,50	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 19	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**6.435.000,00**	**6.395.000,00**	**40.000,00**	**99,38**	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 19 . 01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	6.435.000,00	6.395.000,00	40.000,00	99,38	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.435.000,00	6.395.000,00	40.000,00	99,38	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 24	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**100,00**	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.11 . 4.01.10 . 00 . 24 . 01	*Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 24 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 28	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**1.980.000,00**	**1.980.000,00**	**0,00**	**100,00**	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 28 . 02	*Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.10 . 00 . 28 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.396.166.400)	(1.361.427.712)	(34.738.688)	97,51	

Printed By SimDa

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 11 KECAMATAN SEMBILAN KOTO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	2.500.000,00	250.000,00	-2.250.000,00	10,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	2.500.000,00	250.000,00	-2.250.000,00	10,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	2.500.000,00	250.000,00	-2.250.000,00	10,00	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 02 . 01 . 5	**BELANJA DAERAH**	**1.714.944.000,00**	**1.661.350.473,00**	**53.593.527,00**	**96,87**	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.424.117.000,00**	**1.373.976.223,00**	**50.140.777,00**	**96,48**	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	1.424.117.000,00	1.373.976.223,00	50.140.777,00	96,48	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.424.117.000,00	1.373.976.223,00	50.140.777,00	96,48	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**86.707.000,00**	**86.305.250,00**	**401.750,00**	**99,54**	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	1.526.000,00	1.526.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.526.000,00	1.526.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	14.173.000,00	14.156.400,00	16.600,00	99,88	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.173.000,00	14.156.400,00	16.600,00	99,88	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	8.010.000,00	7.990.000,00	20.000,00	99,75	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.010.000,00	7.990.000,00	20.000,00	99,75	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	3.000.000,00	2.995.000,00	5.000,00	99,83	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.995.000,00	5.000,00	99,83	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	59.998.000,00	59.637.850,00	360.150,00	99,40	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.998.000,00	59.637.850,00	360.150,00	99,40	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**154.980.000,00**	**153.221.000,00**	**1.759.000,00**	**98,87**	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.11 . 4.01.11 . 00 . 08 . 01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	6.000.000,00	5.551.000,00	449.000,00	92,52	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.551.000,00	449.000,00	92,52	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	147.630.000,00	146.320.000,00	1.310.000,00	99,11	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	29.150.000,00	29.150.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.480.000,00	117.170.000,00	1.310.000,00	98,89	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**42.400.000,00**	**41.158.000,00**	**1.242.000,00**	**97,07**	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	2.900.000,00	2.037.500,00	862.500,00	70,26	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	2.037.500,00	862.500,00	70,26	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	17.800.000,00	17.470.500,00	329.500,00	98,15	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.800.000,00	17.470.500,00	329.500,00	98,15	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 09 . 06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 09 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	20.000.000,00	19.950.000,00	50.000,00	99,75	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 09 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.950.000,00	50.000,00	99,75	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 19	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**5.240.000,00**	**5.200.000,00**	**40.000,00**	**99,24**	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 19 . 01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	5.240.000,00	5.200.000,00	40.000,00	99,24	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.240.000,00	5.200.000,00	40.000,00	99,24	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 28	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**1.500.000,00**	**1.490.000,00**	**10.000,00**	**99,33**	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 28 . 02	*Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	1.500.000,00	1.490.000,00	10.000,00	99,33	
4.11 . 4.01.11 . 00 . 28 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.490.000,00	10.000,00	99,33	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(1.712.444.000)**	**(1.661.100.473)**	**(51.343.527)**	**97,00**	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 12 KECAMATAN TIMPEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	**6.160.000,00**	**2.762.500,00**	**(3.397.500,00)**	**44,85**	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**6.160.000,00**	**2.762.500,00**	**(3.397.500,00)**	**44,85**	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	6.160.000,00	2.762.500,00	(3.397.500,00)	44,85	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 02 . 01 . 5	**BELANJA DAERAH**	1.153.703.000,00	1.098.919.537,00	54.783.463,00	95,25	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**889.689.000,00**	**836.510.503,00**	**53.178.497,00**	**94,02**	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	889.689.000,00	836.510.503,00	53.178.497,00	94,02	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	889.689.000,00	836.510.503,00	53.178.497,00	94,02	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**99.049.000,00**	**98.557.434,00**	**491.566,00**	**99,50**	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	17.977.000,00	17.895.500,00	81.500,00	99,55	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.977.000,00	17.895.500,00	81.500,00	99,55	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	9.520.000,00	9.516.000,00	4.000,00	99,96	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.520.000,00	9.516.000,00	4.000,00	99,96	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	3.390.000,00	3.345.000,00	45.000,00	98,67	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.390.000,00	3.345.000,00	45.000,00	98,67	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	68.162.000,00	67.800.934,00	361.066,00	99,47	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.162.000,00	67.800.934,00	361.066,00	99,47	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**141.715.000,00**	**141.614.000,00**	**101.000,00**	**99,94**	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	3.365.000,00	3.324.000,00	41.000,00	98,78	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.365.000,00	3.324.000,00	41.000,00	98,78	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	138.350.000,00	138.290.000,00	60.000,00	99,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.11 . 4.01.12 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.350.000,00	112.290.000,00	60.000,00	99,95	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**17.990.000,00**	**16.977.600,00**	**1.012.400,00**	**94,37**	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan*	10.900.000,00	10.556.250,00	343.750,00	96,85	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.900.000,00	10.556.250,00	343.750,00	96,85	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,*	4.900.000,00	4.796.350,00	103.650,00	97,88	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	4.796.350,00	103.650,00	97,88	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 09 . 06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	2.190.000,00	1.625.000,00	565.000,00	74,20	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 09 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.190.000,00	1.625.000,00	565.000,00	74,20	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 19	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**5.260.000,00**	**5.260.000,00**	**0,00**	**100,00**	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 19 . 01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum*	5.260.000,00	5.260.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.12 . 00 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.260.000,00	5.260.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(1.147.543.000,00)**	**(1.096.157.037,00)**	**(51.385.963,00)**	**95,52**	

Printed By SimDa

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 13 KECAMATAN KOTO SALAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.000.000,00**	**0,00**	**(1.000.000,00)**	**0,00**	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.000.000,00**	**0,00**	**(1.000.000,00)**	**0,00**	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	1.000.000,00	0,00	(32.000.000,00)	0,00	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 02 . 01 . 5	**BELANJA DAERAH**	**1.357.181.200,00**	**1.306.920.615,00**	**50.260.585,00**	**96,30**	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.081.331.200,00**	**1.035.543.237,00**	**45.787.963,00**	**95,77**	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	1.081.331.200,00	1.035.543.237,00	45.787.963,00	95,77	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.081.331.200,00	1.035.543.237,00	45.787.963,00	95,77	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**85.884.000,00**	**85.614.114,00**	**269.886,00**	**99,69**	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan*	2.750.000,00	2.747.000,00	3.000,00	99,89	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	2.747.000,00	3.000,00	99,89	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	19.192.000,00	19.151.514,00	40.486,00	99,79	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.192.000,00	19.151.514,00	40.486,00	99,79	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 06 . 03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	6.478.000,00	6.464.000,00	14.000,00	99,78	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.478.000,00	6.464.000,00	14.000,00	99,78	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	3.990.000,00	3.866.600,00	123.400,00	96,91	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.700.000,00	115.998.000,00	3.702.000,00	96,91	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	53.474.000,00	53.385.000,00	89.000,00	99,83	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.474.000,00	53.385.000,00	89.000,00	99,83	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**164.526.000,00**	**160.876.714,00**	**3.649.286,00**	**97,78**	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.11 . 4.01.13 . 00 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	8.400.000,00	7.116.714,00	1.283.286,00	84,72	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	7.116.714,00	1.283.286,00	84,72	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	156.126.000,00	153.760.000,00	2.366.000,00	98,48	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	28.050.000,00	27.800.000,00	250.000,00	99,11	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	128.076.000,00	125.960.000,00	2.116.000,00	98,35	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**19.520.000,00**	**19.156.550,00**	**363.450,00**	**98,14**	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan*	10.670.000,00	10.628.750,00	41.250,00	99,61	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.670.000,00	10.628.750,00	41.250,00	99,61	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,*	1.950.000,00	1.807.800,00	142.200,00	92,71	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.807.800,00	142.200,00	92,71	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 09 . 06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	6.900.000,00	6.720.000,00	180.000,00	97,39	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 09 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	6.720.000,00	180.000,00	97,39	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 18	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan**	**1.080.000,00**	**930.000,00**	**150.000,00**	**86,11**	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 18 . 02	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan*	1.080.000,00	930.000,00	150.000,00	86,11	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 18 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	930.000,00	150.000,00	86,11	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 19	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**4.840.000,00**	**4.800.000,00**	**40.000,00**	**99,17**	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 19 . 01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum*	4.840.000,00	4.800.000,00	40.000,00	99,17	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.840.000,00	4.800.000,00	40.000,00	99,17	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 28	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 28 . 02	*Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.11 . 4.01.13 . 00 . 28 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.356.181.200,00)	(1.306.920.615,00)	96,37	96,37	

Printed By SimDa

Lampiran 1.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 KECAMATAN ASAM JUJUHAN
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 . 01 KECAMATAN ASAM JUJUHAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.14 . 01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	50,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	50,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	50,00	
4.11 . 4.01.14 . 01 . 02 . 01 . 5	**BELANJA DAERAH**	1.177.221.776,00	1.135.263.702,00	(41.958.074,00)	96,44	
4.11 . 4.01.14 . 01 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	910.689.400,00	873.678.018,00	(37.011.382,00)	95,94	
4.11 . 4.01.14 . 01 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	910.689.400,00	873.678.018,00	(37.011.382,00)	95,94	
4.11 . 4.01.14 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	910.689.400,00	873.678.018,00	(37.011.382,00)	95,94	
4.11 . 4.01.14 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	91.036.376,00	89.287.884,00	(1.748.492,00)	98,08	
4.11 . 4.01.14 . 01 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	895.000,00	850.300,00	(44.700,00)	95,01	
4.11 . 4.01.14 . 01 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	895.000,00	850.300,00	(44.700,00)	95,01	
4.11 . 4.01.14 . 01 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	11.411.376,00	10.958.600,00	(452.776,00)	96,03	
4.11 . 4.01.14 . 01 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.411.376,00	10.958.600,00	(452.776,00)	96,03	
4.11 . 4.01.14 . 01 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	10.425.000,00	9.300.000,00	(1.125.000,00)	89,21	
4.11 . 4.01.14 . 01 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.425.000,00	9.300.000,00	(1.125.000,00)	89,21	
4.11 . 4.01.14 . 01 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.14 . 01 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.14 . 01 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	63.505.000,00	63.378.984,00	(126.016,00)	99,80	
4.11 . 4.01.14 . 01 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.505.000,00	63.378.984,00	(126.016,00)	99,80	
4.11 . 4.01.14 . 01 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	146.600.000,00	144.650.000,00	(1.950.000,00)	98,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.11 . 4.01.14 . 01 . 08 . 01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.14 . 01 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.14 . 01 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.14 . 01 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.14 . 01 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	140.440.000,00	138.490.000,00	(1.950.000,00)	98,61	
4.11 . 4.01.14 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	34.650.000,00	34.200.000,00	(450.000,00)	98,70	
4.11 . 4.01.14 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.790.000,00	104.290.000,00	(1.500.000,00)	98,58	
4.11 . 4.01.14 . 01 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	20.320.000,00	19.071.800,00	(1.248.200,00)	93,86	
4.11 . 4.01.14 . 01 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	12.220.000,00	12.216.650,00	(3.350,00)	99,97	
4.11 . 4.01.14 . 01 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.220.000,00	12.216.650,00	(3.350,00)	99,97	
4.11 . 4.01.14 . 01 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	8.100.000,00	6.855.150,00	(1.244.850,00)	84,63	
4.11 . 4.01.14 . 01 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	6.855.150,00	(1.244.850,00)	84,63	
4.11 . 4.01.14 . 01 . 18	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	1.576.000,00	1.576.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.14 . 01 . 18 . 01	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha*	1.576.000,00	1.576.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.14 . 01 . 18 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.576.000,00	1.576.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.14 . 01 . 19	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.14 . 01 . 19 . 01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.14 . 01 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.176.221.776,00)	(1.134.763.702,00)	41.458.074,00	96,48	

Printed By SimDa

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 15 KECAMATAN KOTO BESAR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	**3.500.000,00**	**750.000,00**	**-2.750.000,00**	**21,43**	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**3.500.000,00**	**750.000,00**	**-2.750.000,00**	**21,43**	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	3.500.000,00	750.000,00	-2.750.000,00	21,43	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 02 . 01 . 5	**BELANJA DAERAH**	**1.403.710.800,00**	**1.371.786.582,00**	**31.924.218,00**	**97,73**	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.116.163.000,00**	**1.084.532.182,00**	**31.630.818,00**	**97,17**	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	1.116.163.000,00	1.084.532.182,00	31.630.818,00	97,17	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.116.163.000,00	1.084.532.182,00	31.630.818,00	97,17	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**91.937.800,00**	**91.911.750,00**	**26.050,00**	**99,97**	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	1.449.000,00	1.449.000,00	0,00 0,00	100,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.449.000,00	1.449.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	16.814.900,00	16.790.950,00	23.950,00	99,86	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.814.900,00	16.790.950,00	23.950,00	99,86	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	8.480.000,00	8.478.000,00	2.000,00	99,98	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.480.000,00	8.478.000,00	2.000,00	99,98	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	3.916.100,00	3.916.000,00	100,00	100,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.916.100,00	3.916.000,00	100,00	100,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	61.277.800,00	61.277.800,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.277.800,00	61.277.800,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.11 . 4.01.15 . 00 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**174.850.000,00**	**174.827.500,00**	**22.500,00 0,00**	**99,99**	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	4.200.000,00	4.177.500,00	22.500,00	99,46	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.177.500,00	22.500,00	99,46	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 08 . 03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	4.910.000,00	4.910.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 08 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.910.000,00	4.910.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	165.740.000,00	165.740.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	137.140.000,00	137.140.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**14.840.000,00**	**14.595.150,00**	**244.850,00 0,00**	**98,35**	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	11.200.000,00	11.114.450,00	85.550,00 0,00	99,24	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	11.114.450,00	85.550,00	99,24	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	3.640.000,00	3.480.700,00	159.300,00	95,62	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.640.000,00	3.480.700,00	159.300,00	95,62	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 18	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 18 . 01	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha*	0,00	0,00	0,00		
4.11 . 4.01.15 . 00 . 18 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00		
4.11 . 4.01.15 . 00 . 18 . 02	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan*	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 0,00	100,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 18 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 19	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**4.920.000,00**	**4.920.000,00**	**0,00**	**100,00**	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 19 . 01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 24	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 24 . 01	*Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.11 . 4.01.15 . 00 . 24 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 28	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 28 . 02	*Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.11 . 4.01.15 . 00 . 28 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**-1.403.710.800,00**	**-1.371.786.582,00**	**-31.924.218,00**	**97,73**	

Printed By SimDa

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 16 KECAMATAN PADANG LAWEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.500.000,00**	**500.000,00**	**-1.000.000,00**	**33,33**	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.500.000,00**	**500.000,00**	**-1.000.000,00**	**33,33**	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	1.500.000,00	500.000,00	-1.000.000,00	33,33	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 02 . 01 . 5	**BELANJA DAERAH**	**1.084.899.700,00**	**1.043.962.483,00**	**-40.937.217,00**	**96,23**	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**822.758.000,00**	**784.990.299,00**	**37.767.701,00**	**95,41**	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	822.758.000,00	784.990.299,00	37.767.701,00	95,41	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	822.758.000,00	784.990.299,00	37.767.701,00	95,41	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**97.687.450,00**	**97.294.634,00**	**392.816,00**	**99,60**	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan*	695.600,00	579.000,00	116.600,00	83,24	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	695.600,00	579.000,00	116.600,00	83,24	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	11.087.950,00	10.976.450,00	111.500,00	98,99	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.087.950,00	10.976.450,00	111.500,00	98,99	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	14.402.000,00	14.402.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.402.000,00	14.402.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	3.508.400,00	3.508.400,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.508.400,00	3.508.400,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	67.993.500,00	67.828.784,00	164.716,00	99,76	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.993.500,00	67.828.784,00	164.716,00	99,76	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**126.884.000,00**	**124.586.500,00**	**2.297.500,00**	**98,19**	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.11 . 4.01.16 . 00 . 08 . 01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1.194.000,00	1.194.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.194.000,00	1.194.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	1.200.000,00	1.002.500,00	197.500,00	83,54	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.002.500,00	197.500,00	83,54	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	124.490.000,00	122.390.000,00	2.100.000,00	98,31	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.140.000,00	91.040.000,00	2.100.000,00	97,75	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**27.720.250,00**	**27.301.050,00**	**419.200,00**	**98,49**	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan*	24.020.000,00	23.829.250,00	190.750,00	99,21	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.020.000,00	23.829.250,00	190.750,00	99,21	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,*	3.700.250,00	3.471.800,00	228.450,00	93,83	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.700.250,00	3.471.800,00	228.450,00	93,83	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 09 . 06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 09 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 18	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan**	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 18 . 02	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan*	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 18 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 19	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	6.110.000,00	6.050.000,00	60.000,00	99,02	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 19 . 01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum*	6.110.000,00	6.050.000,00	60.000,00	99,02	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.110.000,00	6.050.000,00	60.000,00	99,02	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 24	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan**	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 24 . 01	*Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 24 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 28	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan**	2.740.000,00	2.740.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 28 . 02	*Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	2.740.000,00	2.740.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.16 . 00 . 28 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.740.000,00	2.740.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	-1.083.399.700,00	-1.043.462.483,00	39.937.217,00	96,31	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 17 KECAMATAN TIUMANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.500.000,00**	**0,00**	**(2.500.000,00)**	**0,00**	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**2.500.000,00**	**0,00**	**(2.500.000,00)**	**0,00**	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 02 . 01 . 5	**BELANJA DAERAH**	**1.246.607.074,00**	**1.199.488.393,00**	**47.118.681,00**	**96,22**	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**912.143.974,00**	**877.471.020,00**	**34.672.954,00**	**96,20**	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	912.143.974,00	877.471.020,00	34.672.954,00	96,20	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	912.143.974,00	877.471.020,00	34.672.954,00	96,20	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**92.633.100,00**	**88.528.630,00**	**4.104.470,00**	**95,57**	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan*	2.012.700,00	2.000.000,00	12.700,00	99,37	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.012.700,00	2.000.000,00	12.700,00	99,37	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	11.804.100,00	11.538.090,00	266.010,00	97,75	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.804.100,00	11.538.090,00	266.010,00	97,75	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	9.980.000,00	9.766.500,00	213.500,00	97,86	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.980.000,00	9.766.500,00	213.500,00	97,86	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	3.631.300,00	3.629.090,00	2.210,00	99,94	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.631.300,00	3.629.090,00	2.210,00	99,94	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	65.205.000,00	61.594.950,00	3.610.050,00	94,46	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.205.000,00	61.594.950,00	3.610.050,00	94,46	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**213.940.000,00**	**207.640.903,00**	**6.299.097,00**	**97,06**	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	5.000.000,00	4.810.903,00	189.097,00	96,22	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.810.903,00	189.097,00	96,22	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	208.940.000,00	202.830.000,00	6.110.000,00	97,08	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	31.350.000,00	27.400.000,00	3.950.000,00	87,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.11 . 4.01.17 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	177.590.000,00	175.430.000,00	2.160.000,00	98,78	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**23.740.000,00**	**21.697.840,00**	**2.042.160,00**	**91,40**	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan*	23.740.000,00	21.697.840,00	2.042.160,00	91,40	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.740.000,00	21.697.840,00	2.042.160,00	91,40	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 19	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**4.150.000,00**	**4.150.000,00**	**0,00**	**100,00**	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 19 . 01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum*	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.01.17 . 00 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(1.244.107.074,00)**	**(1.199.488.393,00)**	**(44.618.681,00)**	**96,41**	

PrinTed By SimDa

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.12 . 4.01.18 . 00 . 02 . 01 . 5	**BELANJA DAERAH**	**2.248.053.180,00**	**2.144.643.138,00**	**103.410.042,00**	**95,40**	
4.12 . 4.01.18 . 00 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	773.577.000,00	721.193.658,00	52.383.342,00	93,23	
4.12 . 4.01.18 . 00 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	773.577.000,00	721.193.658,00	52.383.342,00	93,23	
4.12 . 4.01.18 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	773.577.000,00	721.193.658,00	52.383.342,00	93,23	
4.12 . 4.01.18 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**147.928.550,00**	**147.443.158,00**	**485.392,00**	**99,67**	
4.12 . 4.01.18 . 00 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	1.496.200,00	1.428.300,00	67.900,00	95,46	
4.12 . 4.01.18 . 00 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.496.200,00	1.428.300,00	67.900,00	95,46	
4.12 . 4.01.18 . 00 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	22.187.900,00	22.055.400,00	132.500,00	99,40	
4.12 . 4.01.18 . 00 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.187.900,00	22.055.400,00	132.500,00	99,40	
4.12 . 4.01.18 . 00 . 06 . 03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	5.486.150,00	5.415.600,00	70.550,00	98,71	
4.12 . 4.01.18 . 00 . 06 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.486.150,00	5.415.600,00	70.550,00	98,71	
4.12 . 4.01.18 . 00 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	12.780.000,00	12.750.000,00	30.000,00	99,77	
4.12 . 4.01.18 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.780.000,00	12.750.000,00	30.000,00	99,77	
4.12 . 4.01.18 . 00 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	10.800.300,00	10.786.000,00	14.300,00	99,87	
4.12 . 4.01.18 . 00 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.800.300,00	10.786.000,00	14.300,00	99,87	

	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	95.178.000,00	95.007.858,00	170.142,00	99,82	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.178.000,00	95.007.858,00	170.142,00	99,82	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**183.320.000,00**	**177.468.132,00**	**5.851.868,00**	**96,81**	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 08 . 01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 08 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	14.160.000,00	13.153.132,00	1.006.868,00	92,89	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.160.000,00	13.153.132,00	1.006.868,00	92,89	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 08 . 03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	4.870.000,00	4.825.000,00	45.000,00	99,08	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 08 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.870.000,00	4.825.000,00	45.000,00	99,08	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	162.040.000,00	157.240.000,00	4.800.000,00	97,04	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	42.950.000,00	42.200.000,00	750.000,00	98,25	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 08 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.090.000,00	115.040.000,00	4.050.000,00	96,60	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**50.660.000,00**	**50.355.050,00**	**304.950,00**	**99,40**	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas*	660.000,00	645.050,00	14.950,00	97,73	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	660.000,00	645.050,00	14.950,00	97,73	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	25.000.000,00	24.710.000,00	290.000,00	98,84	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.710.000,00	290.000,00	98,84	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 09 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 15	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter**	**16.898.300,00**	**15.584.700,00**	**1.313.600,00**	**92,23**	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 15 . 04	*Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran*	16.898.300,00	15.584.700,00	1.313.600,00	92,23	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 15 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.898.300,00	15.584.700,00	1.313.600,00	92,23	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 16	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya**	**837.778.230,00**	**797.207.120,00**	**40.571.110,00**	**95,16**	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 16 . 02	*Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan*	837.778.230,00	797.207.120,00	40.571.110,00	95,16	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 16 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.387.350,00	35.644.500,00	3.742.850,00	0,00	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 16 . 02 . 5 . 1 . 5	Belanja Hibah	798.390.880,00	761.562.620,00	36.828.260,00	95,39	

	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 17	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 17 . 05	*Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan*	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 17 . 05 . 5 . 1 . 5	Belanja Hibah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 18	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan**	**56.419.250,00**	**55.420.400,00**	**998.850,00**	**98,23**	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 18 . 03	*Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,*	6.415.000,00	6.173.800,00	241.200,00	96,24	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 18 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.415.000,00	6.173.800,00	241.200,00	96,24	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 18 . 04	*Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan*	50.004.250,00	49.246.600,00	757.650,00	98,48	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 18 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.004.250,00	49.246.600,00	757.650,00	98,48	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 19	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan**	**151.471.850,00**	**149.970.920,00**	**1.500.930,00**	**99,01**	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 19 . 01	*Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja*	135.413.500,00	134.665.020,00	748.480,00	99,45	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	135.413.500,00	134.665.020,00	748.480,00	99,45	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 19 . 02	*Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang*	16.058.350,00	15.305.900,00	752.450,00	95,31	
	4.12 . 4.01.18 . 00 . 19 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.058.350,00	15.305.900,00	752.450,00	95,31	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(2.248.053.180,00)**	**(2.144.643.138,00)**	**(103.410.042,00)**	**95,40**	

PrinTed By SimDa

Lampiran I.4 Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 4 Tahun 2022
Tanggal : 13 Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	475.759.370.476,00	194.393.891.373,00	0,00	0,00
		450.033.185.297,16	156.291.081.905,49	0,00	0,00
1.01	**Pendidikan**	242.700.748.555,00	46.418.433.838,00	0,00	0,00
		236.053.095.331,00	44.868.887.635,83	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01	**DINAS PENDIDIKAN**	242.700.748.555,00	46.418.433.838,00	0,00	0,00
		236.053.095.331,00	44.868.887.635,83	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01	**DINAS PENDIDIKAN**	217.142.841.958,00	40.445.897.500,00	0,00	0,00
		210.644.079.062,00	38.906.527.747,83	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	202.729.421.808,00	0,00	0,00	0,00
		196.581.400.128,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	202.729.421.808,00	0,00	0,00	0,00
		196.581.400.128,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	295.098.250,00	0,00	0,00	0,00
		294.816.115,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.522.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.503.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.296.000,00	0,00	0,00	0,00
		58.296.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.191.400,00	0,00	0,00	0,00
		17.170.400,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		39.980.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	71.626.600,00	0,00	0,00	0,00
		71.595.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.462.250,00	0,00	0,00	0,00
		100.271.715,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	0,00	291.358.300,00	0,00	0,00
		0,00	289.465.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	291.358.300,00	0,00	0,00
		0,00	289.465.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	6.761.870.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.512.424.130,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		110.744.130,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.020.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.020.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.639.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.392.660.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	64.275.850,00	0,00	0,00	0,00
		63.337.650,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.275.850,00	0,00	0,00	0,00
		63.337.650,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	938.466.850,00	28.687.453.000,00	0,00	0,00
		927.691.750,00	27.514.871.576,68	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	230.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00
		229.600.000,00	169.700.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	0,00	15.232.313.898,00	0,00	0,00
		0,00	14.633.707.508,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0,00	2.359.040.052,00	0,00	0,00
		0,00	2.207.325.488,76	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	222.646.750,00	0,00	0,00
		0,00	195.922.776,46	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0,00	948.475.115,00	0,00	0,00
		0,00	894.178.713,46	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 14	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	1.672.277.185,00	0,00	0,00
		0,00	1.476.731.038,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0,00	1.193.900.000,00	0,00	0,00
		0,00	1.189.625.400,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0,00	6.888.800.000,00	0,00	0,00
		0,00	6.747.680.652,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	36.807.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.299.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	26.673.800,00	0,00	0,00	0,00
		20.330.700,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	644.986.050,00	0,00	0,00	0,00
		643.462.050,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	599.907.000,00	10.193.060.000,00	0,00	0,00
		592.307.417,00	9.835.811.251,15	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		549.370.417,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0,00	5.239.484.400,00	0,00	0,00
		0,00	4.982.725.864,78	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	0,00	969.345.634,00	0,00	0,00
		0,00	944.943.045,11	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0,00	675.794.700,00	0,00	0,00
		0,00	642.294.871,55	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	0,00	441.548.400,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		0,00	409.372.489,71	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	53.894.500,00	0,00	0,00
		0,00	52.210.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 25	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	620.442.366,00	0,00	0,00
		0,00	617.058.480,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0,00	184.450.000,00	0,00	0,00
		0,00	181.500.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0,00	2.008.100.000,00	0,00	0,00
		0,00	2.005.706.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	27.539.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.449.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	22.368.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.488.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	***Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)***	4.688.063.750,00	1.274.026.200,00	0,00	0,00
		4.673.125.422,00	1.266.379.920,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	0,00	1.052.835.000,00	0,00	0,00
		0,00	1.046.042.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	4.609.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.599.300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	7.607.000,00	196.191.200,00	0,00	0,00
		4.550.872,00	195.337.920,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	70.656.750,00	7.000.000,00	0,00	0,00
		69.274.550,00	7.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	***Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan***	938.215.450,00	0,00	0,00	0,00
		878.641.250,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	938.215.450,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		878.641.250,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	***Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar***	19.527.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.330.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	19.527.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.330.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21	***Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan***	107.996.000,00	0,00	0,00	0,00
		106.005.200,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	107.996.000,00	0,00	0,00	0,00
		106.005.200,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 02	**SDN 01 KOTO BARU**	332.440.116,00	90.996.000,00	0,00	0,00
		331.921.000,00	90.996.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	332.440.116,00	90.996.000,00	0,00	0,00
		331.921.000,00	90.996.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	332.440.116,00	90.996.000,00	0,00	0,00
		331.921.000,00	90.996.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 03	**SDN 02 KOTO BARU**	201.238.500,00	42.276.500,00	0,00	0,00
		201.175.875,00	42.276.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 03 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	201.238.500,00	42.276.500,00	0,00	0,00
		201.175.875,00	42.276.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 03 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	201.238.500,00	42.276.500,00	0,00	0,00
		201.175.875,00	42.276.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 04	**SDN 03 KOTO BARU**	92.474.766,00	42.345.700,00	0,00	0,00
		91.898.500,00	42.345.700,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 04 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	92.474.766,00	42.345.700,00	0,00	0,00
		91.898.500,00	42.345.700,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 04 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	92.474.766,00	42.345.700,00	0,00	0,00
		91.898.500,00	42.345.700,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 05	**SDN 04 KOTO BARU**	73.780.477,00	16.135.900,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		73.144.100,00	16.135.900,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	73.780.477,00	16.135.900,00	0,00	0,00
		73.144.100,00	16.135.900,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	73.780.477,00	16.135.900,00	0,00	0,00
		73.144.100,00	16.135.900,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 06	**SDN 05 KOTO BARU**	119.012.673,00	39.653.000,00	0,00	0,00
		118.980.700,00	39.653.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	119.012.673,00	39.653.000,00	0,00	0,00
		118.980.700,00	39.653.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	119.012.673,00	39.653.000,00	0,00	0,00
		118.980.700,00	39.653.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 07	**SDN 06 KOTO BARU**	121.944.452,00	69.396.900,00	0,00	0,00
		121.943.100,00	69.396.900,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	121.944.452,00	69.396.900,00	0,00	0,00
		121.943.100,00	69.396.900,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	121.944.452,00	69.396.900,00	0,00	0,00
		121.943.100,00	69.396.900,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 08	**SDN 07 KOTO BARU**	214.263.943,00	24.455.000,00	0,00	0,00
		213.989.000,00	24.455.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 08 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	214.263.943,00	24.455.000,00	0,00	0,00
		213.989.000,00	24.455.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 08 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	214.263.943,00	24.455.000,00	0,00	0,00
		213.989.000,00	24.455.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 09	**SDN 08 KOTO BARU**	92.717.700,00	21.722.300,00	0,00	0,00
		92.703.899,00	21.722.300,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	92.717.700,00	21.722.300,00	0,00	0,00
		92.703.899,00	21.722.300,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	92.717.700,00	21.722.300,00	0,00	0,00
		92.703.899,00	21.722.300,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 10	**SDN 09 KOTO BARU**	114.852.991,00	21.867.500,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		114.241.000,00	21.867.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	114.852.991,00	21.867.500,00	0,00	0,00
		114.241.000,00	21.867.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	114.852.991,00	21.867.500,00	0,00	0,00
		114.241.000,00	21.867.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 11	**SDN 10 KOTO BARU**	73.751.300,00	23.678.700,00	0,00	0,00
		73.751.300,00	23.678.700,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 11 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	73.751.300,00	23.678.700,00	0,00	0,00
		73.751.300,00	23.678.700,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 11 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	73.751.300,00	23.678.700,00	0,00	0,00
		73.751.300,00	23.678.700,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 12	**SDN 11 KOTO BARU**	175.046.200,00	66.893.800,00	0,00	0,00
		174.931.200,00	66.893.800,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 12 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	175.046.200,00	66.893.800,00	0,00	0,00
		174.931.200,00	66.893.800,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 12 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	175.046.200,00	66.893.800,00	0,00	0,00
		174.931.200,00	66.893.800,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 13	**SDN 12 KOTO BARU**	84.973.303,00	24.193.000,00	0,00	0,00
		82.492.000,00	24.193.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 13 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	84.973.303,00	24.193.000,00	0,00	0,00
		82.492.000,00	24.193.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 13 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	84.973.303,00	24.193.000,00	0,00	0,00
		82.492.000,00	24.193.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 14	**SDN 13 KOTO BARU**	232.651.000,00	84.048.717,00	0,00	0,00
		230.841.348,00	84.048.717,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 14 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	232.651.000,00	84.048.717,00	0,00	0,00
		230.841.348,00	84.048.717,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 14 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	232.651.000,00	84.048.717,00	0,00	0,00
		230.841.348,00	84.048.717,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 15	**SDN 14 KOTO BARU**	130.513.701,00	55.298.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		130.513.630,00	55.298.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	130.513.701,00	55.298.000,00	0,00	0,00
		130.513.630,00	55.298.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	130.513.701,00	55.298.000,00	0,00	0,00
		130.513.630,00	55.298.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 16	**SDN 15 KOTO BARU**	78.805.671,00	21.060.400,00	0,00	0,00
		78.805.600,00	21.060.400,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	78.805.671,00	21.060.400,00	0,00	0,00
		78.805.600,00	21.060.400,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	78.805.671,00	21.060.400,00	0,00	0,00
		78.805.600,00	21.060.400,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 17	**SDN 16 KOTO BARU**	322.775.126,00	69.570.600,00	0,00	0,00
		310.097.325,00	69.570.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	322.775.126,00	69.570.600,00	0,00	0,00
		310.097.325,00	69.570.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	322.775.126,00	69.570.600,00	0,00	0,00
		310.097.325,00	69.570.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 18	**SDN 01 PULAU PUNJUNG**	167.653.199,00	39.011.500,00	0,00	0,00
		167.614.616,00	39.011.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	167.653.199,00	39.011.500,00	0,00	0,00
		167.614.616,00	39.011.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	167.653.199,00	39.011.500,00	0,00	0,00
		167.614.616,00	39.011.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 19	**SDN 02 PULAU PUNJUNG**	44.190.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		44.041.258,00	3.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	44.190.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		44.041.258,00	3.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	44.190.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		44.041.258,00	3.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 20	**SDN 03 PULAU PUNJUNG**	173.333.480,00	53.482.475,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		169.764.598,00	53.482.475,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	173.333.480,00	53.482.475,00	0,00	0,00
		169.764.598,00	53.482.475,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	173.333.480,00	53.482.475,00	0,00	0,00
		169.764.598,00	53.482.475,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 21	**SDN 04 PULAU PUNJUNG**	193.724.764,00	39.896.200,00	0,00	0,00
		193.413.764,00	39.896.200,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	193.724.764,00	39.896.200,00	0,00	0,00
		193.413.764,00	39.896.200,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	193.724.764,00	39.896.200,00	0,00	0,00
		193.413.764,00	39.896.200,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 22	**SDN 05 PULAU PUNJUNG**	102.534.437,00	53.076.280,00	0,00	0,00
		102.534.218,00	53.076.280,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	102.534.437,00	53.076.280,00	0,00	0,00
		102.534.218,00	53.076.280,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	102.534.437,00	53.076.280,00	0,00	0,00
		102.534.218,00	53.076.280,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 23	**SDN 06 PULAU PUNJUNG**	248.305.763,00	62.468.100,00	0,00	0,00
		247.865.030,00	62.468.100,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	248.305.763,00	62.468.100,00	0,00	0,00
		247.865.030,00	62.468.100,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	248.305.763,00	62.468.100,00	0,00	0,00
		247.865.030,00	62.468.100,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 24	**SDN 07 PULAU PUNJUNG**	130.223.516,00	22.279.700,00	0,00	0,00
		130.223.432,00	22.279.700,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	130.223.516,00	22.279.700,00	0,00	0,00
		130.223.432,00	22.279.700,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	130.223.516,00	22.279.700,00	0,00	0,00
		130.223.432,00	22.279.700,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 25	**SDN 08 PULAU PUNJUNG**	391.564.800,00	126.534.800,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		391.315.000,00	126.534.800,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 25 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	391.564.800,00	126.534.800,00	0,00	0,00
		391.315.000,00	126.534.800,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 25 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	391.564.800,00	126.534.800,00	0,00	0,00
		391.315.000,00	126.534.800,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 26	**SDN 09 PULAU PUNJUNG**	196.487.878,00	106.600.600,00	0,00	0,00
		187.346.050,00	106.600.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	196.487.878,00	106.600.600,00	0,00	0,00
		187.346.050,00	106.600.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	196.487.878,00	106.600.600,00	0,00	0,00
		187.346.050,00	106.600.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 27	**SDN 10 PULAU PUNJUNG**	163.174.500,00	26.545.000,00	0,00	0,00
		163.174.500,00	26.545.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 27 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	163.174.500,00	26.545.000,00	0,00	0,00
		163.174.500,00	26.545.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 27 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	163.174.500,00	26.545.000,00	0,00	0,00
		163.174.500,00	26.545.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 28	**SDN 11 PULAU PUNJUNG**	138.972.172,00	33.040.800,00	0,00	0,00
		138.931.506,00	33.040.800,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 28 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	138.972.172,00	33.040.800,00	0,00	0,00
		138.931.506,00	33.040.800,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 28 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	138.972.172,00	33.040.800,00	0,00	0,00
		138.931.506,00	33.040.800,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 29	**SDN 12 PULAU PUNJUNG**	21.828.869,00	1.674.400,00	0,00	0,00
		21.814.600,00	1.674.400,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 29 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	21.828.869,00	1.674.400,00	0,00	0,00
		21.814.600,00	1.674.400,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 29 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	21.828.869,00	1.674.400,00	0,00	0,00
		21.814.600,00	1.674.400,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 30	**SDN 13 PULAU PUNJUNG**	114.904.634,00	18.655.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		114.756.400,00	18.604.800,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 30 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	114.904.634,00	18.655.000,00	0,00	0,00
		114.756.400,00	18.604.800,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 30 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	114.904.634,00	18.655.000,00	0,00	0,00
		114.756.400,00	18.604.800,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 31	**SDN 14 PULAU PUNJUNG**	148.832.500,00	16.511.600,00	0,00	0,00
		148.818.150,00	16.511.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 31 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	148.832.500,00	16.511.600,00	0,00	0,00
		148.818.150,00	16.511.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 31 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	148.832.500,00	16.511.600,00	0,00	0,00
		148.818.150,00	16.511.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 32	**SDN 15 PULAU PUNJUNG**	79.386.471,00	23.139.300,00	0,00	0,00
		77.300.700,00	23.139.300,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 32 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	79.386.471,00	23.139.300,00	0,00	0,00
		77.300.700,00	23.139.300,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 32 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	79.386.471,00	23.139.300,00	0,00	0,00
		77.300.700,00	23.139.300,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 33	**SDN 16 PULAU PUNJUNG**	160.422.659,00	41.268.100,00	0,00	0,00
		160.398.400,00	41.268.100,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 33 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	160.422.659,00	41.268.100,00	0,00	0,00
		160.398.400,00	41.268.100,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 33 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	160.422.659,00	41.268.100,00	0,00	0,00
		160.398.400,00	41.268.100,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 34	**SDN 17 PULAU PUNJUNG**	85.008.500,00	7.110.000,00	0,00	0,00
		85.007.100,00	7.110.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 34 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	85.008.500,00	7.110.000,00	0,00	0,00
		85.007.100,00	7.110.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 34 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	85.008.500,00	7.110.000,00	0,00	0,00
		85.007.100,00	7.110.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 35	**SDN 18 PULAU PUNJUNG**	76.720.904,00	3.443.500,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		76.651.300,00	3.443.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 35 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	76.720.904,00	3.443.500,00	0,00	0,00
		76.651.300,00	3.443.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 35 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	76.720.904,00	3.443.500,00	0,00	0,00
		76.651.300,00	3.443.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 36	**SDN 19 PULAU PUNJUNG**	245.826.321,00	45.457.100,00	0,00	0,00
		245.377.042,00	45.457.100,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 36 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	245.826.321,00	45.457.100,00	0,00	0,00
		245.377.042,00	45.457.100,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 36 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	245.826.321,00	45.457.100,00	0,00	0,00
		245.377.042,00	45.457.100,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 37	**SDN 20 PULAU PUNJUNG**	47.927.696,00	28.540.000,00	0,00	0,00
		47.902.995,00	28.540.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 37 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	47.927.696,00	28.540.000,00	0,00	0,00
		47.902.995,00	28.540.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 37 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	47.927.696,00	28.540.000,00	0,00	0,00
		47.902.995,00	28.540.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 38	**SDN 21 PULAU PUNJUNG**	227.399.658,00	56.821.300,00	0,00	0,00
		227.399.658,00	56.821.300,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 38 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	227.399.658,00	56.821.300,00	0,00	0,00
		227.399.658,00	56.821.300,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 38 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	227.399.658,00	56.821.300,00	0,00	0,00
		227.399.658,00	56.821.300,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 39	**SDN 22 PULAU PUNJUNG**	120.172.167,00	26.619.400,00	0,00	0,00
		119.989.100,00	26.619.400,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 39 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	120.172.167,00	26.619.400,00	0,00	0,00
		119.989.100,00	26.619.400,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 39 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	120.172.167,00	26.619.400,00	0,00	0,00
		119.989.100,00	26.619.400,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 40	**SDN 23 PULAU PUNJUNG**	26.514.545,00	690.900,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		26.399.100,00	690.900,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 40 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	26.514.545,00	690.900,00	0,00	0,00
		26.399.100,00	690.900,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 40 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	26.514.545,00	690.900,00	0,00	0,00
		26.399.100,00	690.900,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 41	**SDN 24 PULAU PUNJUNG**	108.297.152,00	50.852.900,00	0,00	0,00
		108.282.315,00	50.852.900,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 41 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	108.297.152,00	50.852.900,00	0,00	0,00
		108.282.315,00	50.852.900,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 41 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	108.297.152,00	50.852.900,00	0,00	0,00
		108.282.315,00	50.852.900,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 42	**SDN 25 PULAU PUNJUNG**	85.036.400,00	13.873.600,00	0,00	0,00
		85.036.400,00	13.873.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 42 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	85.036.400,00	13.873.600,00	0,00	0,00
		85.036.400,00	13.873.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 42 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	85.036.400,00	13.873.600,00	0,00	0,00
		85.036.400,00	13.873.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 43	**SDN 01 SUNGAI RUMBAI**	177.430.034,00	22.355.000,00	0,00	0,00
		177.325.000,00	22.355.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 43 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	177.430.034,00	22.355.000,00	0,00	0,00
		177.325.000,00	22.355.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 43 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	177.430.034,00	22.355.000,00	0,00	0,00
		177.325.000,00	22.355.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 44	**SDN 02 SUNGAI RUMBAI**	197.054.180,00	55.000.000,00	0,00	0,00
		190.790.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 44 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	197.054.180,00	55.000.000,00	0,00	0,00
		190.790.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 44 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	197.054.180,00	55.000.000,00	0,00	0,00
		190.790.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 45	**SDN 03 SUNGAI RUMBAI**	170.420.000,00	35.410.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		169.070.000,00	35.410.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 45 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	170.420.000,00	35.410.000,00	0,00	0,00
		169.070.000,00	35.410.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 45 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	170.420.000,00	35.410.000,00	0,00	0,00
		169.070.000,00	35.410.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 46	**SDN 04 SUNGAI RUMBAI**	163.210.032,00	42.103.400,00	0,00	0,00
		162.142.000,00	42.103.400,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 46 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	163.210.032,00	42.103.400,00	0,00	0,00
		162.142.000,00	42.103.400,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 46 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	163.210.032,00	42.103.400,00	0,00	0,00
		162.142.000,00	42.103.400,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 47	**SDN 05 SUNGAI RUMBAI**	296.551.800,00	126.968.200,00	0,00	0,00
		296.551.800,00	126.968.200,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 47 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	296.551.800,00	126.968.200,00	0,00	0,00
		296.551.800,00	126.968.200,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 47 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	296.551.800,00	126.968.200,00	0,00	0,00
		296.551.800,00	126.968.200,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 48	**SDN 06 SUNGAI RUMBAI**	123.588.700,00	19.691.300,00	0,00	0,00
		123.588.700,00	19.691.300,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 48 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	123.588.700,00	19.691.300,00	0,00	0,00
		123.588.700,00	19.691.300,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 48 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	123.588.700,00	19.691.300,00	0,00	0,00
		123.588.700,00	19.691.300,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 49	**SDN 07 SUNGAI RUMBAI**	134.144.085,00	11.200.000,00	0,00	0,00
		134.103.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 49 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	134.144.085,00	11.200.000,00	0,00	0,00
		134.103.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 49 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	134.144.085,00	11.200.000,00	0,00	0,00
		134.103.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 50	**SDN 08 SUNGAI RUMBAI**	300.473.921,00	51.890.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		300.413.700,00	51.890.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 50 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	300.473.921,00	51.890.000,00	0,00	0,00
		300.413.700,00	51.890.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 50 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	300.473.921,00	51.890.000,00	0,00	0,00
		300.413.700,00	51.890.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 51	**SDN 09 SUNGAI RUMBAI**	275.103.857,00	39.590.000,00	0,00	0,00
		270.569.000,00	39.590.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 51 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	275.103.857,00	39.590.000,00	0,00	0,00
		270.569.000,00	39.590.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 51 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	275.103.857,00	39.590.000,00	0,00	0,00
		270.569.000,00	39.590.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 52	**SDN 10 SUNGAI RUMBAI**	53.476.605,00	13.365.800,00	0,00	0,00
		53.475.500,00	13.365.800,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 52 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	53.476.605,00	13.365.800,00	0,00	0,00
		53.475.500,00	13.365.800,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 52 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	53.476.605,00	13.365.800,00	0,00	0,00
		53.475.500,00	13.365.800,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 53	**SDN 11 SUNGAI RUMBAI**	84.399.900,00	34.310.100,00	0,00	0,00
		84.399.900,00	34.310.100,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 53 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	84.399.900,00	34.310.100,00	0,00	0,00
		84.399.900,00	34.310.100,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 53 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	84.399.900,00	34.310.100,00	0,00	0,00
		84.399.900,00	34.310.100,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 54	**SDN 01 SITIUNG**	94.214.207,00	32.260.700,00	0,00	0,00
		94.214.207,00	32.260.700,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 54 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	94.214.207,00	32.260.700,00	0,00	0,00
		94.214.207,00	32.260.700,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 54 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	94.214.207,00	32.260.700,00	0,00	0,00
		94.214.207,00	32.260.700,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 55	**SDN 02 SITIUNG**	97.998.154,00	15.746.500,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		95.674.100,00	12.246.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 55 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	97.998.154,00	15.746.500,00	0,00	0,00
		95.674.100,00	12.246.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 55 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	97.998.154,00	15.746.500,00	0,00	0,00
		95.674.100,00	12.246.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 56	**SDN 03 SITIUNG**	107.929.900,00	1.300.000,00	0,00	0,00
		107.743.279,00	1.300.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 56 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	107.929.900,00	1.300.000,00	0,00	0,00
		107.743.279,00	1.300.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 56 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	107.929.900,00	1.300.000,00	0,00	0,00
		107.743.279,00	1.300.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 57	**SDN 04 SITIUNG**	212.584.107,00	47.660.000,00	0,00	0,00
		212.503.503,00	47.660.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 57 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	212.584.107,00	47.660.000,00	0,00	0,00
		212.503.503,00	47.660.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 57 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	212.584.107,00	47.660.000,00	0,00	0,00
		212.503.503,00	47.660.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 58	**SDN 05 SITIUNG**	81.301.946,00	2.302.200,00	0,00	0,00
		81.269.593,00	2.302.200,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 58 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	81.301.946,00	2.302.200,00	0,00	0,00
		81.269.593,00	2.302.200,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 58 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	81.301.946,00	2.302.200,00	0,00	0,00
		81.269.593,00	2.302.200,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 59	**SDN 06 SITIUNG**	115.742.005,00	9.628.000,00	0,00	0,00
		115.731.310,00	9.628.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 59 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	115.742.005,00	9.628.000,00	0,00	0,00
		115.731.310,00	9.628.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 59 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	115.742.005,00	9.628.000,00	0,00	0,00
		115.731.310,00	9.628.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 60	**SDN 07 SITIUNG**	104.551.200,00	8.938.800,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.01 . 1.01.01 . 60 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	104.081.200,00	8.938.800,00	0,00	0,00
		104.551.200,00	8.938.800,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 60 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	104.081.200,00	8.938.800,00	0,00	0,00
		104.551.200,00	8.938.800,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 61	**SDN 08 SITIUNG**	104.081.200,00	8.938.800,00	0,00	0,00
		113.372.417,00	2.188.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 61 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	113.371.500,00	2.188.500,00	0,00	0,00
		113.372.417,00	2.188.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 61 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	113.371.500,00	2.188.500,00	0,00	0,00
		113.372.417,00	2.188.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 62	**SDN 09 SITIUNG**	113.371.500,00	2.188.500,00	0,00	0,00
		59.025.688,00	10.730.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 62 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	58.806.400,00	10.730.000,00	0,00	0,00
		59.025.688,00	10.730.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 62 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	58.806.400,00	10.730.000,00	0,00	0,00
		59.025.688,00	10.730.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 63	**SDN 10 SITIUNG**	58.806.400,00	10.730.000,00	0,00	0,00
		100.094.352,00	2.150.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 63 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	100.088.243,00	2.150.000,00	0,00	0,00
		100.094.352,00	2.150.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 63 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	100.088.243,00	2.150.000,00	0,00	0,00
		100.094.352,00	2.150.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 64	**SDN 11 SITIUNG**	100.088.243,00	2.150.000,00	0,00	0,00
		70.246.700,00	27.150.700,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 64 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	70.226.200,00	27.150.700,00	0,00	0,00
		70.246.700,00	27.150.700,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 64 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	70.226.200,00	27.150.700,00	0,00	0,00
		70.246.700,00	27.150.700,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 65	**SDN 12 SITIUNG**	70.226.200,00	27.150.700,00	0,00	0,00
		56.665.249,00	10.940.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		56.561.300,00	10.940.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 65 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	56.665.249,00	10.940.000,00	0,00	0,00
		56.561.300,00	10.940.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 65 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	56.665.249,00	10.940.000,00	0,00	0,00
		56.561.300,00	10.940.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 66	**SDN 13 SITIUNG**	150.802.750,00	17.610.100,00	0,00	0,00
		150.589.391,00	17.610.100,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 66 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	150.802.750,00	17.610.100,00	0,00	0,00
		150.589.391,00	17.610.100,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 66 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	150.802.750,00	17.610.100,00	0,00	0,00
		150.589.391,00	17.610.100,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 67	**SDN 14 SITIUNG**	170.380.000,00	35.450.000,00	0,00	0,00
		170.380.000,00	35.450.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 67 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	170.380.000,00	35.450.000,00	0,00	0,00
		170.380.000,00	35.450.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 67 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	170.380.000,00	35.450.000,00	0,00	0,00
		170.380.000,00	35.450.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 68	**SDN 15 SITIUNG**	204.705.500,00	28.654.500,00	0,00	0,00
		204.705.500,00	24.654.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 68 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	204.705.500,00	28.654.500,00	0,00	0,00
		204.705.500,00	24.654.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 68 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	204.705.500,00	28.654.500,00	0,00	0,00
		204.705.500,00	24.654.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 69	**SDN 16 SITIUNG**	60.678.994,00	7.034.100,00	0,00	0,00
		59.565.900,00	7.034.100,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 69 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	60.678.994,00	7.034.100,00	0,00	0,00
		59.565.900,00	7.034.100,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 69 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	60.678.994,00	7.034.100,00	0,00	0,00
		59.565.900,00	7.034.100,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 70	**SDN 17 SITIUNG**	94.841.500,00	2.088.500,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		94.841.500,00	2.088.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 70 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	94.841.500,00	2.088.500,00	0,00	0,00
		94.841.500,00	2.088.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 70 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	94.841.500,00	2.088.500,00	0,00	0,00
		94.841.500,00	2.088.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 71	**SDN 18 SITIUNG**	134.860.619,00	43.036.900,00	0,00	0,00
		134.816.521,00	43.036.900,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 71 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	134.860.619,00	43.036.900,00	0,00	0,00
		134.816.521,00	43.036.900,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 71 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	134.860.619,00	43.036.900,00	0,00	0,00
		134.816.521,00	43.036.900,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 72	**SDN 19 SITIUNG**	134.250.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00
		134.244.699,00	2.850.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 72 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	134.250.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00
		134.244.699,00	2.850.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 72 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	134.250.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00
		134.244.699,00	2.850.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 73	**SDN 20 SITIUNG**	218.257.901,00	55.199.800,00	0,00	0,00
		217.418.675,00	55.199.800,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 73 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	218.257.901,00	55.199.800,00	0,00	0,00
		217.418.675,00	55.199.800,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 73 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	218.257.901,00	55.199.800,00	0,00	0,00
		217.418.675,00	55.199.800,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 74	**SDN 01 IX KOTO**	70.510.700,00	43.475.000,00	0,00	0,00
		70.333.500,00	43.475.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 74 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	70.510.700,00	43.475.000,00	0,00	0,00
		70.333.500,00	43.475.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 74 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	70.510.700,00	43.475.000,00	0,00	0,00
		70.333.500,00	43.475.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 75	**SDN 02 IX KOTO**	51.518.029,00	45.095.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		51.467.000,00	45.095.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 75 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	51.518.029,00	45.095.000,00	0,00	0,00
		51.467.000,00	45.095.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 75 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	51.518.029,00	45.095.000,00	0,00	0,00
		51.467.000,00	45.095.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 76	**SDN 03 IX KOTO**	42.945.498,00	7.360.700,00	0,00	0,00
		42.945.498,00	7.306.700,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 76 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	42.945.498,00	7.360.700,00	0,00	0,00
		42.945.498,00	7.306.700,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 76 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	42.945.498,00	7.360.700,00	0,00	0,00
		42.945.498,00	7.306.700,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 77	**SDN 04 IX KOTO**	100.628.617,00	15.150.000,00	0,00	0,00
		100.583.000,00	15.150.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 77 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	100.628.617,00	15.150.000,00	0,00	0,00
		100.583.000,00	15.150.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 77 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	100.628.617,00	15.150.000,00	0,00	0,00
		100.583.000,00	15.150.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 78	**SDN 05 IX KOTO**	56.076.800,00	11.965.000,00	0,00	0,00
		56.052.500,00	11.965.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 78 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	56.076.800,00	11.965.000,00	0,00	0,00
		56.052.500,00	11.965.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 78 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	56.076.800,00	11.965.000,00	0,00	0,00
		56.052.500,00	11.965.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 79	**SDN 06 IX KOTO**	66.718.551,00	18.445.440,00	0,00	0,00
		66.610.300,00	18.445.440,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 79 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	66.718.551,00	18.445.440,00	0,00	0,00
		66.610.300,00	18.445.440,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 79 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	66.718.551,00	18.445.440,00	0,00	0,00
		66.610.300,00	18.445.440,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 80	**SDN 07 IX KOTO**	43.699.037,00	45.350.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		41.539.000,00	45.350.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 80 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	43.699.037,00	45.350.000,00	0,00	0,00
		41.539.000,00	45.350.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 80 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	43.699.037,00	45.350.000,00	0,00	0,00
		41.539.000,00	45.350.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 81	**SDN 08 IX KOTO**	72.735.812,00	71.718.500,00	0,00	0,00
		72.591.500,00	71.718.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 81 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	72.735.812,00	71.718.500,00	0,00	0,00
		72.591.500,00	71.718.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 81 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	72.735.812,00	71.718.500,00	0,00	0,00
		72.591.500,00	71.718.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 82	**SDN 09 IX KOTO**	48.170.771,00	13.699.800,00	0,00	0,00
		47.704.400,00	13.699.800,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 82 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	48.170.771,00	13.699.800,00	0,00	0,00
		47.704.400,00	13.699.800,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 82 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	48.170.771,00	13.699.800,00	0,00	0,00
		47.704.400,00	13.699.800,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 83	**SDN 10 IX KOTO**	43.339.312,00	41.250.000,00	0,00	0,00
		43.054.000,00	41.250.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 83 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	43.339.312,00	41.250.000,00	0,00	0,00
		43.054.000,00	41.250.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 83 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	43.339.312,00	41.250.000,00	0,00	0,00
		43.054.000,00	41.250.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 84	**SDN 11 IX KOTO**	63.051.834,00	13.605.000,00	0,00	0,00
		62.750.550,00	13.605.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 84 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	63.051.834,00	13.605.000,00	0,00	0,00
		62.750.550,00	13.605.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 84 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	63.051.834,00	13.605.000,00	0,00	0,00
		62.750.550,00	13.605.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 85	**SDN 12 IX KOTO**	49.904.919,00	45.328.300,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		49.859.700,00	45.320.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 85 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	49.904.919,00	45.328.300,00	0,00	0,00
		49.859.700,00	45.320.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 85 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	49.904.919,00	45.328.300,00	0,00	0,00
		49.859.700,00	45.320.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 86	**SDN 13 IX KOTO**	86.873.219,00	18.432.600,00	0,00	0,00
		86.805.400,00	18.432.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 86 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	86.873.219,00	18.432.600,00	0,00	0,00
		86.805.400,00	18.432.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 86 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	86.873.219,00	18.432.600,00	0,00	0,00
		86.805.400,00	18.432.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 87	**SDN 14 IX KOTO**	45.402.188,00	5.461.300,00	0,00	0,00
		44.038.700,00	5.461.300,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 87 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	45.402.188,00	5.461.300,00	0,00	0,00
		44.038.700,00	5.461.300,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 87 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	45.402.188,00	5.461.300,00	0,00	0,00
		44.038.700,00	5.461.300,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 88	**SDN 15 IX KOTO**	47.400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
		47.400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 88 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	47.400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
		47.400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 88 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	47.400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
		47.400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 89	**SDN 01 TIMPEH**	196.295.643,00	48.795.200,00	0,00	0,00
		195.394.800,00	48.795.200,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 89 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	196.295.643,00	48.795.200,00	0,00	0,00
		195.394.800,00	48.795.200,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 89 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	196.295.643,00	48.795.200,00	0,00	0,00
		195.394.800,00	48.795.200,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 90	**SDN 02 TIMPEH**	191.801.375,00	40.186.400,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		191.736.000,00	40.186.400,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 90 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	191.801.375,00	40.186.400,00	0,00	0,00
		191.736.000,00	40.186.400,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 90 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	191.801.375,00	40.186.400,00	0,00	0,00
		191.736.000,00	40.186.400,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 91	**SDN 03 TIMPEH**	113.217.205,00	35.090.600,00	0,00	0,00
		112.937.000,00	35.090.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 91 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	113.217.205,00	35.090.600,00	0,00	0,00
		112.937.000,00	35.090.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 91 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	113.217.205,00	35.090.600,00	0,00	0,00
		112.937.000,00	35.090.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 92	**SDN 04 TIMPEH**	75.144.779,00	7.668.300,00	0,00	0,00
		73.423.000,00	7.668.300,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 92 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	75.144.779,00	7.668.300,00	0,00	0,00
		73.423.000,00	7.668.300,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 92 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	75.144.779,00	7.668.300,00	0,00	0,00
		73.423.000,00	7.668.300,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 93	**SDN 05 TIMPEH**	112.067.414,00	36.807.600,00	0,00	0,00
		112.032.400,00	36.807.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 93 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	112.067.414,00	36.807.600,00	0,00	0,00
		112.032.400,00	36.807.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 93 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	112.067.414,00	36.807.600,00	0,00	0,00
		112.032.400,00	36.807.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 94	**SDN 06 TIMPEH**	195.925.640,00	36.055.400,00	0,00	0,00
		191.439.600,00	36.055.400,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 94 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	195.925.640,00	36.055.400,00	0,00	0,00
		191.439.600,00	36.055.400,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 94 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	195.925.640,00	36.055.400,00	0,00	0,00
		191.439.600,00	36.055.400,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 95	**SDN 07 TIMPEH**	126.984.457,00	104.819.500,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		126.550.100,00	104.819.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 95 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	126.984.457,00	104.819.500,00	0,00	0,00
		126.550.100,00	104.819.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 95 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	126.984.457,00	104.819.500,00	0,00	0,00
		126.550.100,00	104.819.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 96	**SDN 08 TIMPEH**	96.860.892,00	16.661.800,00	0,00	0,00
		92.778.200,00	16.661.800,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 96 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	96.860.892,00	16.661.800,00	0,00	0,00
		92.778.200,00	16.661.800,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 96 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	96.860.892,00	16.661.800,00	0,00	0,00
		92.778.200,00	16.661.800,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 97	**SDN 09 TIMPEH**	83.367.965,00	3.960.000,00	0,00	0,00
		80.550.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 97 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	83.367.965,00	3.960.000,00	0,00	0,00
		80.550.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 97 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	83.367.965,00	3.960.000,00	0,00	0,00
		80.550.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 98	**SDN 10 TIMPEH**	76.197.731,00	2.025.000,00	0,00	0,00
		76.197.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 98 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	76.197.731,00	2.025.000,00	0,00	0,00
		76.197.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 98 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	76.197.731,00	2.025.000,00	0,00	0,00
		76.197.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 99	**SDN 11 TIMPEH**	83.571.297,00	10.548.200,00	0,00	0,00
		82.781.800,00	10.548.200,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 99 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	83.571.297,00	10.548.200,00	0,00	0,00
		82.781.800,00	10.548.200,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 99 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	83.571.297,00	10.548.200,00	0,00	0,00
		82.781.800,00	10.548.200,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 00	**SDN 01 KOTO SALAK**	107.892.185,00	31.630.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		107.751.600,00	31.630.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	107.892.185,00	31.630.000,00	0,00	0,00
		107.751.600,00	31.630.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	107.892.185,00	31.630.000,00	0,00	0,00
		107.751.600,00	31.630.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01	**SDN 02 KOTO SALAK**	205.711.200,00	101.188.800,00	0,00	0,00
		196.148.200,00	101.188.800,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	205.711.200,00	101.188.800,00	0,00	0,00
		196.148.200,00	101.188.800,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	205.711.200,00	101.188.800,00	0,00	0,00
		196.148.200,00	101.188.800,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 02	**SDN 03 KOTO SALAK**	129.352.000,00	25.830.000,00	0,00	0,00
		129.279.530,00	25.830.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	129.352.000,00	25.830.000,00	0,00	0,00
		129.279.530,00	25.830.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	129.352.000,00	25.830.000,00	0,00	0,00
		129.279.530,00	25.830.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 03	**SDN 04 KOTO SALAK**	89.851.816,00	5.601.000,00	0,00	0,00
		89.546.954,00	5.601.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 03 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	89.851.816,00	5.601.000,00	0,00	0,00
		89.546.954,00	5.601.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 03 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	89.851.816,00	5.601.000,00	0,00	0,00
		89.546.954,00	5.601.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 04	**SDN 05 KOTO SALAK**	149.450.376,00	28.693.000,00	0,00	0,00
		149.327.000,00	28.693.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 04 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	149.450.376,00	28.693.000,00	0,00	0,00
		149.327.000,00	28.693.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 04 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	149.450.376,00	28.693.000,00	0,00	0,00
		149.327.000,00	28.693.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 05	**SDN 06 KOTO SALAK**	71.411.320,00	2.522.500,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		71.367.500,00	2.522.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	71.411.320,00	2.522.500,00	0,00	0,00
		71.367.500,00	2.522.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	71.411.320,00	2.522.500,00	0,00	0,00
		71.367.500,00	2.522.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 06	**SDN 07 KOTO SALAK**	77.068.468,00	24.270.500,00	0,00	0,00
		76.979.500,00	24.270.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	77.068.468,00	24.270.500,00	0,00	0,00
		76.979.500,00	24.270.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	77.068.468,00	24.270.500,00	0,00	0,00
		76.979.500,00	24.270.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 07	**SDN 08 KOTO SALAK**	100.757.636,00	29.879.600,00	0,00	0,00
		100.712.500,00	29.879.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	100.757.636,00	29.879.600,00	0,00	0,00
		100.712.500,00	29.879.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	100.757.636,00	29.879.600,00	0,00	0,00
		100.712.500,00	29.879.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 08	**SDN 09 KOTO SALAK**	59.175.900,00	10.679.900,00	0,00	0,00
		59.142.666,00	10.679.900,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 08 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	59.175.900,00	10.679.900,00	0,00	0,00
		59.142.666,00	10.679.900,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 08 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	59.175.900,00	10.679.900,00	0,00	0,00
		59.142.666,00	10.679.900,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 09	**SDN 10 KOTO SALAK**	58.096.628,00	29.698.000,00	0,00	0,00
		57.962.000,00	29.698.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	58.096.628,00	29.698.000,00	0,00	0,00
		57.962.000,00	29.698.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	58.096.628,00	29.698.000,00	0,00	0,00
		57.962.000,00	29.698.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 10	**SDN 11 KOTO SALAK**	59.884.604,00	25.644.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		59.316.000,00	25.644.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	59.884.604,00	25.644.000,00	0,00	0,00
		59.316.000,00	25.644.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	59.884.604,00	25.644.000,00	0,00	0,00
		59.316.000,00	25.644.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 11	**SDN 12 KOTO SALAK**	51.045.717,00	9.040.000,00	0,00	0,00
		50.948.000,00	9.040.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 11 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	51.045.717,00	9.040.000,00	0,00	0,00
		50.948.000,00	9.040.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 11 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	51.045.717,00	9.040.000,00	0,00	0,00
		50.948.000,00	9.040.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 12	**SDN 01 TIUMANG**	119.338.303,00	53.905.000,00	0,00	0,00
		119.225.000,00	53.905.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 12 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	119.338.303,00	53.905.000,00	0,00	0,00
		119.225.000,00	53.905.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 12 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	119.338.303,00	53.905.000,00	0,00	0,00
		119.225.000,00	53.905.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 13	**SDN 02 TIUMANG**	83.246.872,00	24.128.900,00	0,00	0,00
		83.241.100,00	24.128.900,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 13 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	83.246.872,00	24.128.900,00	0,00	0,00
		83.241.100,00	24.128.900,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 13 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	83.246.872,00	24.128.900,00	0,00	0,00
		83.241.100,00	24.128.900,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 14	**SDN 03 TIUMANG**	147.147.497,00	48.264.500,00	0,00	0,00
		147.141.000,00	48.264.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 14 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	147.147.497,00	48.264.500,00	0,00	0,00
		147.141.000,00	48.264.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 14 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	147.147.497,00	48.264.500,00	0,00	0,00
		147.141.000,00	48.264.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 15	**SDN 04 TIUMANG**	78.620.000,00	5.695.766,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		78.494.005,00	5.695.766,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	78.620.000,00	5.695.766,00	0,00	0,00
		78.494.005,00	5.695.766,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	78.620.000,00	5.695.766,00	0,00	0,00
		78.494.005,00	5.695.766,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 16	**SDN 05 TIUMANG**	41.874.900,00	9.130.000,00	0,00	0,00
		41.728.000,00	9.130.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	41.874.900,00	9.130.000,00	0,00	0,00
		41.728.000,00	9.130.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	41.874.900,00	9.130.000,00	0,00	0,00
		41.728.000,00	9.130.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 17	**SDN 06 TIUMANG**	54.997.025,00	15.871.000,00	0,00	0,00
		54.637.325,00	15.871.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	54.997.025,00	15.871.000,00	0,00	0,00
		54.637.325,00	15.871.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	54.997.025,00	15.871.000,00	0,00	0,00
		54.637.325,00	15.871.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 18	**SDN 07 TIUMANG**	86.596.111,00	23.278.500,00	0,00	0,00
		83.345.500,00	23.278.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	86.596.111,00	23.278.500,00	0,00	0,00
		83.345.500,00	23.278.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	86.596.111,00	23.278.500,00	0,00	0,00
		83.345.500,00	23.278.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 19	**SDN 08 TIUMANG**	43.206.688,00	5.744.500,00	0,00	0,00
		41.685.500,00	5.744.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	43.206.688,00	5.744.500,00	0,00	0,00
		41.685.500,00	5.744.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	43.206.688,00	5.744.500,00	0,00	0,00
		41.685.500,00	5.744.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 20	**SDN 09 TIUMANG**	90.101.022,00	28.152.900,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		89.832.100,00	28.152.900,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	90.101.022,00	28.152.900,00	0,00	0,00
		89.832.100,00	28.152.900,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	90.101.022,00	28.152.900,00	0,00	0,00
		89.832.100,00	28.152.900,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 21	**SDN 10 TIUMANG**	98.408.399,00	34.162.000,00	0,00	0,00
		98.408.000,00	34.162.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	98.408.399,00	34.162.000,00	0,00	0,00
		98.408.000,00	34.162.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	98.408.399,00	34.162.000,00	0,00	0,00
		98.408.000,00	34.162.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 22	**SDN 11 TIUMANG**	92.211.020,00	12.200.000,00	0,00	0,00
		92.208.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	92.211.020,00	12.200.000,00	0,00	0,00
		92.208.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	92.211.020,00	12.200.000,00	0,00	0,00
		92.208.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 23	**SDN 12 TIUMANG**	44.067.416,00	21.345.000,00	0,00	0,00
		44.005.000,00	21.345.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	44.067.416,00	21.345.000,00	0,00	0,00
		44.005.000,00	21.345.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	44.067.416,00	21.345.000,00	0,00	0,00
		44.005.000,00	21.345.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 24	**SDN 01 PADANG LAWEH**	104.612.287,00	12.825.000,00	0,00	0,00
		103.005.000,00	12.825.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	104.612.287,00	12.825.000,00	0,00	0,00
		103.005.000,00	12.825.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	104.612.287,00	12.825.000,00	0,00	0,00
		103.005.000,00	12.825.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 25	**SDN 02 PADANG LAWEH**	79.044.200,00	29.354.500,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		78.343.500,00	29.354.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 25 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	79.044.200,00	29.354.500,00	0,00	0,00
		78.343.500,00	29.354.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 25 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	79.044.200,00	29.354.500,00	0,00	0,00
		78.343.500,00	29.354.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 26	**SDN 03 PADANG LAWEH**	57.251.236,00	2.102.300,00	0,00	0,00
		56.550.194,00	2.102.300,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	57.251.236,00	2.102.300,00	0,00	0,00
		56.550.194,00	2.102.300,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	57.251.236,00	2.102.300,00	0,00	0,00
		56.550.194,00	2.102.300,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 27	**SDN 04 PADANG LAWEH**	179.680.040,00	106.076.600,00	0,00	0,00
		179.672.800,00	106.076.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 27 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	179.680.040,00	106.076.600,00	0,00	0,00
		179.672.800,00	106.076.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 27 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	179.680.040,00	106.076.600,00	0,00	0,00
		179.672.800,00	106.076.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 28	**SDN 05 PADANG LAWEH**	131.969.045,00	5.060.000,00	0,00	0,00
		131.509.139,00	5.060.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 28 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	131.969.045,00	5.060.000,00	0,00	0,00
		131.509.139,00	5.060.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 28 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	131.969.045,00	5.060.000,00	0,00	0,00
		131.509.139,00	5.060.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 29	**SDN 01 ASAM JUJUHAN**	127.898.400,00	43.726.900,00	0,00	0,00
		127.898.400,00	43.726.900,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 29 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	127.898.400,00	43.726.900,00	0,00	0,00
		127.898.400,00	43.726.900,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 29 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	127.898.400,00	43.726.900,00	0,00	0,00
		127.898.400,00	43.726.900,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 30	**SDN 02 ASAM JUJUHAN**	64.616.047,00	1.477.800,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		61.814.040,00	1.477.800,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 30 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	64.616.047,00	1.477.800,00	0,00	0,00
		61.814.040,00	1.477.800,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 30 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	64.616.047,00	1.477.800,00	0,00	0,00
		61.814.040,00	1.477.800,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 31	**SDN 03 ASAM JUJUHAN**	177.933.010,00	27.020.000,00	0,00	0,00
		180.186.050,00	27.020.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 31 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	177.933.010,00	27.020.000,00	0,00	0,00
		180.186.050,00	27.020.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 31 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	177.933.010,00	27.020.000,00	0,00	0,00
		180.186.050,00	27.020.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 32	**SDN 04 ASAM JUJUHAN**	103.061.180,00	13.198.600,00	0,00	0,00
		103.053.300,00	13.198.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 32 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	103.061.180,00	13.198.600,00	0,00	0,00
		103.053.300,00	13.198.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 32 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	103.061.180,00	13.198.600,00	0,00	0,00
		103.053.300,00	13.198.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 33	**SDN 05 ASAM JUJUHAN**	52.094.750,00	14.903.750,00	0,00	0,00
		52.094.153,00	14.903.750,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 33 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	52.094.750,00	14.903.750,00	0,00	0,00
		52.094.153,00	14.903.750,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 33 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	52.094.750,00	14.903.750,00	0,00	0,00
		52.094.153,00	14.903.750,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 34	**SDN 01 KOTO BESAR**	222.796.636,00	64.184.000,00	0,00	0,00
		222.466.000,00	64.184.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 34 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	222.796.636,00	64.184.000,00	0,00	0,00
		222.466.000,00	64.184.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 34 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	222.796.636,00	64.184.000,00	0,00	0,00
		222.466.000,00	64.184.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 35	**SDN 02 KOTO BESAR**	101.480.953,00	18.725.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		101.410.500,00	18.725.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 35 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	101.480.953,00	18.725.000,00	0,00	0,00
		101.410.500,00	18.725.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 35 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	101.480.953,00	18.725.000,00	0,00	0,00
		101.410.500,00	18.725.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 36	**SDN 03 KOTO BESAR**	123.549.800,00	33.590.200,00	0,00	0,00
		123.512.629,00	33.590.200,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 36 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	123.549.800,00	33.590.200,00	0,00	0,00
		123.512.629,00	33.590.200,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 36 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	123.549.800,00	33.590.200,00	0,00	0,00
		123.512.629,00	33.590.200,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 37	**SDN 04 KOTO BESAR**	102.365.222,00	17.800.000,00	0,00	0,00
		102.360.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 37 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	102.365.222,00	17.800.000,00	0,00	0,00
		102.360.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 37 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	102.365.222,00	17.800.000,00	0,00	0,00
		102.360.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 38	**SDN 05 KOTO BESAR**	198.929.400,00	33.484.500,00	0,00	0,00
		198.929.400,00	33.484.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 38 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	198.929.400,00	33.484.500,00	0,00	0,00
		198.929.400,00	33.484.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 38 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	198.929.400,00	33.484.500,00	0,00	0,00
		198.929.400,00	33.484.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 39	**SDN 06 KOTO BESAR**	103.227.000,00	71.083.000,00	0,00	0,00
		103.227.000,00	71.083.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 39 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	103.227.000,00	71.083.000,00	0,00	0,00
		103.227.000,00	71.083.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 39 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	103.227.000,00	71.083.000,00	0,00	0,00
		103.227.000,00	71.083.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 40	**SDN 07 KOTO BESAR**	136.313.451,00	26.304.100,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		136.195.900,00	26.304.100,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 40 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	136.313.451,00	26.304.100,00	0,00	0,00
		136.195.900,00	26.304.100,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 40 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	136.313.451,00	26.304.100,00	0,00	0,00
		136.195.900,00	26.304.100,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 41	**SDN 08 KOTO BESAR**	72.113.248,00	35.204.600,00	0,00	0,00
		72.112.400,00	35.204.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 41 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	72.113.248,00	35.204.600,00	0,00	0,00
		72.112.400,00	35.204.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 41 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	72.113.248,00	35.204.600,00	0,00	0,00
		72.112.400,00	35.204.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 42	**SDN 09 KOTO BESAR**	120.543.365,00	52.406.700,00	0,00	0,00
		119.482.800,00	52.406.700,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 42 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	120.543.365,00	52.406.700,00	0,00	0,00
		119.482.800,00	52.406.700,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 42 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	120.543.365,00	52.406.700,00	0,00	0,00
		119.482.800,00	52.406.700,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 43	**SDN 10 KOTO BESAR**	117.479.700,00	26.680.300,00	0,00	0,00
		110.119.700,00	26.680.300,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 43 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	117.479.700,00	26.680.300,00	0,00	0,00
		110.119.700,00	26.680.300,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 43 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	117.479.700,00	26.680.300,00	0,00	0,00
		110.119.700,00	26.680.300,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 44	**SDN 11 KOTO BESAR**	151.596.660,00	39.234.700,00	0,00	0,00
		151.510.300,00	39.234.700,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 44 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	151.596.660,00	39.234.700,00	0,00	0,00
		151.510.300,00	39.234.700,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 44 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	151.596.660,00	39.234.700,00	0,00	0,00
		151.510.300,00	39.234.700,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 45	**SDN 12 KOTO BESAR**	95.122.000,00	38.438.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		95.122.000,00	38.438.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 45 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	95.122.000,00	38.438.000,00	0,00	0,00
		95.122.000,00	38.438.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 45 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	95.122.000,00	38.438.000,00	0,00	0,00
		95.122.000,00	38.438.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 46	**SDN 13 KOTO BESAR**	207.388.504,00	17.449.300,00	0,00	0,00
		206.999.600,00	17.449.300,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 46 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	207.388.504,00	17.449.300,00	0,00	0,00
		206.999.600,00	17.449.300,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 46 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	207.388.504,00	17.449.300,00	0,00	0,00
		206.999.600,00	17.449.300,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 47	**SDN 14 KOTO BESAR**	51.713.900,00	455.000,00	0,00	0,00
		51.540.900,00	455.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 47 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	51.713.900,00	455.000,00	0,00	0,00
		51.540.900,00	455.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 47 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	51.713.900,00	455.000,00	0,00	0,00
		51.540.900,00	455.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 48	**SDN 15 KOTO BESAR**	112.890.512,00	24.791.000,00	0,00	0,00
		112.832.506,00	24.791.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 48 . 15	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	112.890.512,00	24.791.000,00	0,00	0,00
		112.832.506,00	24.791.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 48 . 15 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	112.890.512,00	24.791.000,00	0,00	0,00
		112.832.506,00	24.791.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 49	**SMPN 1 KOTO BARU**	351.008.750,00	107.331.250,00	0,00	0,00
		348.777.278,00	107.331.250,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 49 . 16	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	351.008.750,00	107.331.250,00	0,00	0,00
		348.777.278,00	107.331.250,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 49 . 16 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	351.008.750,00	107.331.250,00	0,00	0,00
		348.777.278,00	107.331.250,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 50	**SMPN 2 KOTO BARU**	607.289.597,00	120.000.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		607.111.353,00	120.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 50 . 16	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	607.289.597,00	120.000.000,00	0,00	0,00
		607.111.353,00	120.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 50 . 16 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	607.289.597,00	120.000.000,00	0,00	0,00
		607.111.353,00	120.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 51	**SMPN 3 KOTO BARU**	142.913.407,00	26.568.660,00	0,00	0,00
		142.690.290,00	26.568.660,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 51 . 16	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	142.913.407,00	26.568.660,00	0,00	0,00
		142.690.290,00	26.568.660,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 51 . 16 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	142.913.407,00	26.568.660,00	0,00	0,00
		142.690.290,00	26.568.660,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 52	**SMPN 4 KOTO BARU**	200.348.200,00	39.881.800,00	0,00	0,00
		200.186.949,00	39.881.800,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 52 . 16	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	200.348.200,00	39.881.800,00	0,00	0,00
		200.186.949,00	39.881.800,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 52 . 16 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	200.348.200,00	39.881.800,00	0,00	0,00
		200.186.949,00	39.881.800,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 53	**SMPN 1 PULAU PUNJUNG**	613.119.064,00	66.038.100,00	0,00	0,00
		612.249.162,00	66.038.100,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 53 . 16	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	613.119.064,00	66.038.100,00	0,00	0,00
		612.249.162,00	66.038.100,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 53 . 16 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	613.119.064,00	66.038.100,00	0,00	0,00
		612.249.162,00	66.038.100,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 54	**SMPN 2 PULAU PUNJUNG**	442.791.547,00	71.534.000,00	0,00	0,00
		442.326.400,00	71.534.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 54 . 16	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	442.791.547,00	71.534.000,00	0,00	0,00
		442.326.400,00	71.534.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 54 . 16 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	442.791.547,00	71.534.000,00	0,00	0,00
		442.326.400,00	71.534.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 55	**SMPN 3 PULAU PUNJUNG**	327.470.000,00	20.240.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		327.180.000,00	20.240.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 55 . 16	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	327.470.000,00	20.240.000,00	0,00	0,00
		327.180.000,00	20.240.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 55 . 16 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	327.470.000,00	20.240.000,00	0,00	0,00
		327.180.000,00	20.240.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 56	**SMPN 4 PULAU PUNJUNG**	84.362.261,00	12.376.000,00	0,00	0,00
		84.351.802,00	12.376.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 56 . 16	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	84.362.261,00	12.376.000,00	0,00	0,00
		84.351.802,00	12.376.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 56 . 16 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	84.362.261,00	12.376.000,00	0,00	0,00
		84.351.802,00	12.376.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 57	**SMPN 5 PULAU PUNJUNG**	77.084.150,00	13.448.250,00	0,00	0,00
		76.827.215,00	13.320.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 57 . 16	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	77.084.150,00	13.448.250,00	0,00	0,00
		76.827.215,00	13.320.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 57 . 16 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	77.084.150,00	13.448.250,00	0,00	0,00
		76.827.215,00	13.320.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 58	**SMPN 6 PULAU PUNJUNG**	88.459.390,00	25.463.500,00	0,00	0,00
		87.687.500,00	25.463.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 58 . 16	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	88.459.390,00	25.463.500,00	0,00	0,00
		87.687.500,00	25.463.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 58 . 16 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	88.459.390,00	25.463.500,00	0,00	0,00
		87.687.500,00	25.463.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 59	**SMPN UNGGUL DHARMASRAYA**	223.850.389,00	39.213.400,00	0,00	0,00
		223.522.389,00	39.213.400,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 59 . 16	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	223.850.389,00	39.213.400,00	0,00	0,00
		223.522.389,00	39.213.400,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 59 . 16 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	223.850.389,00	39.213.400,00	0,00	0,00
		223.522.389,00	39.213.400,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 60	**SMPN 1 SUNGAI RUMBAI**	499.974.233,00	118.117.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		499.822.805,00	118.117.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 60 . 16	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	499.974.233,00	118.117.000,00	0,00	0,00
		499.822.805,00	118.117.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 60 . 16 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	499.974.233,00	118.117.000,00	0,00	0,00
		499.822.805,00	118.117.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 61	**SMPN 2 SUNGAI RUMBAI**	251.508.622,00	36.780.050,00	0,00	0,00
		250.801.894,00	36.780.050,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 61 . 16	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	251.508.622,00	36.780.050,00	0,00	0,00
		250.801.894,00	36.780.050,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 61 . 16 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	251.508.622,00	36.780.050,00	0,00	0,00
		250.801.894,00	36.780.050,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 62	**SMPN 3 SUNGAI RUMBAI**	188.561.000,00	51.129.000,00	0,00	0,00
		188.534.100,00	51.129.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 62 . 16	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	188.561.000,00	51.129.000,00	0,00	0,00
		188.534.100,00	51.129.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 62 . 16 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	188.561.000,00	51.129.000,00	0,00	0,00
		188.534.100,00	51.129.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 63	**SMPN 1 SITIUNG**	681.982.806,00	107.735.000,00	0,00	0,00
		681.491.412,00	107.735.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 63 . 16	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	681.982.806,00	107.735.000,00	0,00	0,00
		681.491.412,00	107.735.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 63 . 16 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	681.982.806,00	107.735.000,00	0,00	0,00
		681.491.412,00	107.735.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 64	**SMPN 2 SITIUNG**	198.729.821,00	29.920.000,00	0,00	0,00
		189.937.101,00	29.920.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 64 . 16	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	198.729.821,00	29.920.000,00	0,00	0,00
		189.937.101,00	29.920.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 64 . 16 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	198.729.821,00	29.920.000,00	0,00	0,00
		189.937.101,00	29.920.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 65	**SMPN 3 SITIUNG**	149.818.000,00	46.679.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		149.656.153,00	46.679.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 65 . 16	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	149.818.000,00	46.679.000,00	0,00	0,00
		149.656.153,00	46.679.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 65 . 16 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	149.818.000,00	46.679.000,00	0,00	0,00
		149.656.153,00	46.679.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 66	**SMPN 1 IX KOTO**	174.935.770,00	42.020.000,00	0,00	0,00
		174.681.960,00	42.020.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 66 . 16	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	174.935.770,00	42.020.000,00	0,00	0,00
		174.681.960,00	42.020.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 66 . 16 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	174.935.770,00	42.020.000,00	0,00	0,00
		174.681.960,00	42.020.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 67	**SMPN 2 IX KOTO**	96.760.088,00	49.110.900,00	0,00	0,00
		96.739.100,00	49.110.900,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 67 . 16	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	96.760.088,00	49.110.900,00	0,00	0,00
		96.739.100,00	49.110.900,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 67 . 16 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	96.760.088,00	49.110.900,00	0,00	0,00
		96.739.100,00	49.110.900,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 68	**SMPN 3 IX KOTO**	50.467.000,00	17.703.000,00	0,00	0,00
		50.467.000,00	17.703.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 68 . 16	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	50.467.000,00	17.703.000,00	0,00	0,00
		50.467.000,00	17.703.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 68 . 16 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	50.467.000,00	17.703.000,00	0,00	0,00
		50.467.000,00	17.703.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 69	**SMPN 1 TIMPEH**	229.607.000,00	13.165.700,00	0,00	0,00
		229.203.146,00	13.165.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 69 . 16	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	229.607.000,00	13.165.700,00	0,00	0,00
		229.203.146,00	13.165.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 69 . 16 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	229.607.000,00	13.165.700,00	0,00	0,00
		229.203.146,00	13.165.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 70	**SMPN 2 TIMPEH**	190.852.936,00	13.925.600,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		188.777.800,00	13.925.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 70 . 16	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	190.852.936,00	13.925.600,00	0,00	0,00
		188.777.800,00	13.925.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 70 . 16 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	190.852.936,00	13.925.600,00	0,00	0,00
		188.777.800,00	13.925.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 71	**SMPN 3 TIMPEH**	117.137.887,00	16.224.000,00	0,00	0,00
		108.083.790,00	16.224.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 71 . 16	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	117.137.887,00	16.224.000,00	0,00	0,00
		108.083.790,00	16.224.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 71 . 16 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	117.137.887,00	16.224.000,00	0,00	0,00
		108.083.790,00	16.224.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 72	**SMPN 4 TIMPEH**	118.586.202,00	7.704.500,00	0,00	0,00
		118.584.050,00	7.704.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 72 . 16	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	118.586.202,00	7.704.500,00	0,00	0,00
		118.584.050,00	7.704.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 72 . 16 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	118.586.202,00	7.704.500,00	0,00	0,00
		118.584.050,00	7.704.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 73	**SMPN 1 KOTO SALAK**	325.604.675,00	89.323.600,00	0,00	0,00
		317.603.450,00	88.964.900,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 73 . 16	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	325.604.675,00	89.323.600,00	0,00	0,00
		317.603.450,00	88.964.900,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 73 . 16 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	325.604.675,00	89.323.600,00	0,00	0,00
		317.603.450,00	88.964.900,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 74	**SMPN 2 KOTO SALAK**	57.214.620,00	1.136.500,00	0,00	0,00
		57.214.620,00	1.136.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 74 . 16	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	57.214.620,00	1.136.500,00	0,00	0,00
		57.214.620,00	1.136.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 74 . 16 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	57.214.620,00	1.136.500,00	0,00	0,00
		57.214.620,00	1.136.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 75	**SMPN 3 KOTO SALAK**	163.326.824,00	36.167.500,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		162.453.037,00	36.167.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 75 . 16	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	163.326.824,00	36.167.500,00	0,00	0,00
		162.453.037,00	36.167.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 75 . 16 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	163.326.824,00	36.167.500,00	0,00	0,00
		162.453.037,00	36.167.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 76	**SMPN 1 TIUMANG**	188.853.000,00	48.983.000,00	0,00	0,00
		188.853.000,00	48.983.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 76 . 16	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	188.853.000,00	48.983.000,00	0,00	0,00
		188.853.000,00	48.983.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 76 . 16 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	188.853.000,00	48.983.000,00	0,00	0,00
		188.853.000,00	48.983.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 77	**SMPN 1 PADANG LAWEH**	125.023.921,00	10.019.500,00	0,00	0,00
		120.781.739,00	7.942.100,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 77 . 16	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	125.023.921,00	10.019.500,00	0,00	0,00
		120.781.739,00	7.942.100,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 77 . 16 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	125.023.921,00	10.019.500,00	0,00	0,00
		120.781.739,00	7.942.100,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 78	**SMPN 1 ASAM JUJUHAN**	98.573.618,00	35.000.000,00	0,00	0,00
		98.552.840,00	35.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 78 . 16	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	98.573.618,00	35.000.000,00	0,00	0,00
		98.552.840,00	35.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 78 . 16 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	98.573.618,00	35.000.000,00	0,00	0,00
		98.552.840,00	35.000.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 79	**SMPN 1 KOTO BESAR**	245.219.194,00	42.724.000,00	0,00	0,00
		245.138.500,00	42.724.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 79 . 16	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	245.219.194,00	42.724.000,00	0,00	0,00
		245.138.500,00	42.724.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 79 . 16 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	245.219.194,00	42.724.000,00	0,00	0,00
		245.138.500,00	42.724.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 80	**SMPN 2 KOTO BESAR**	436.085.884,00	55.090.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		436.085.365,00	55.090.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 80 . 16	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	436.085.884,00	55.090.000,00	0,00	0,00
		436.085.365,00	55.090.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 80 . 16 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	436.085.884,00	55.090.000,00	0,00	0,00
		436.085.365,00	55.090.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 81	**SMPN 3 KOTO BESAR**	116.752.200,00	30.510.000,00	0,00	0,00
		116.659.500,00	30.510.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 81 . 16	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	116.752.200,00	30.510.000,00	0,00	0,00
		116.659.500,00	30.510.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1.01.01 . 81 . 16 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	116.752.200,00	30.510.000,00	0,00	0,00
		116.659.500,00	30.510.000,00	0,00	0,00
1.02	**Kesehatan**	172.847.523.919,00	59.426.209.174,00	0,00	0,00
		156.943.372.720,33	53.259.073.676,66	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01	**DINAS KESEHATAN**	99.502.880.919,00	31.296.337.274,00	0,00	0,00
		91.827.464.337,33	27.933.735.482,74	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01	**Dinas Kesehatan**	72.860.559.986,00	14.851.701.920,00	0,00	0,00
		68.443.673.396,00	13.540.641.529,74	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	384.430.800,00	0,00	0,00	0,00
		344.304.360,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.760.800,00	0,00	0,00	0,00
		17.712.750,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineria SKPD	18.678.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.598.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	347.992.000,00	0,00	0,00	0,00
		307.993.610,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	47.408.210.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.980.917.401,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	47.408.210.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.980.917.401,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	308.680.082,00	87.149.800,00	0,00	0,00
		308.549.491,00	86.908.800,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.984.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.984.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.999.732,00	87.149.800,00	0,00	0,00
		59.999.732,00	86.908.800,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.996.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.940.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.999.800,00	0,00	0,00	0,00
		49.992.800,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166.700.550,00	0,00	0,00	0,00
		166.632.959,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	0,00	230.300.600,00	0,00	0,00
		0,00	204.938.600,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 05	Pengadaan Mebel	0,00	230.300.600,00	0,00	0,00
		0,00	204.938.600,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	3.509.660.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.417.686.678,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		71.976.678,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.397.860.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.345.710.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	344.790.000,00	0,00	0,00	0,00
		337.433.200,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pero	11.790.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.754.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.000.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		127.733.200,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		197.946.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15	***Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	2.349.074.400,00	14.534.251.520,00	0,00	0,00
		2.236.483.505,00	13.248.794.129,74	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 02	Pembangunan Puskesmas	75.156.400,00	5.950.000.000,00	0,00	0,00
		36.540.270,00	5.363.633.182,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	4.265.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	3.764.427.877,13	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 06	Pengembangan Puskesmas	60.005.000,00	2.959.000.000,00	0,00	0,00
		59.718.400,00	2.826.451.988,42	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	148.484.672,19	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	418.796.000,00	0,00	0,00
		0,00	409.746.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehata	0,00	791.455.520,00	0,00	0,00
		0,00	736.050.410,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 16	Pengadaan Obat, Vaksin	1.073.894.480,00	0,00	0,00	0,00
		1.060.082.340,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.140.018.520,00	0,00	0,00	0,00
		1.080.142.495,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	17.638.278.204,00	0,00	0,00	0,00
		13.924.112.061,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	48.990.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.752.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.075.194.100,00	0,00	0,00	0,00
		695.002.675,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	34.835.200,00	0,00	0,00	0,00
		32.607.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	39.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.857.900,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	84.624.000,00	0,00	0,00	0,00
		84.497.700,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.910.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.951.750,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar B	4.704.267.750,00	0,00	0,00	0,00
		2.307.873.183,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	43.110.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.619.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	31.985.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.519.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	68.637.000,00	0,00	0,00	0,00
		68.453.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan	77.086.000,00	0,00	0,00	0,00
		76.960.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	650.608.754,00	0,00	0,00	0,00
		648.961.803,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	48.199.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.064.700,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	119.887.900,00	0,00	0,00	0,00
		119.032.800,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	113.332.000,00	0,00	0,00	0,00
		113.216.250,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	9.391.298.200,00	0,00	0,00	0,00
		9.342.576.600,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	37.375.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.083.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	53.235.300,00	0,00	0,00	0,00
		52.972.700,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	912.713.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17	***Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi***	105.199.300,00	0,00	0,00	0,00
		104.703.650,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	105.199.300,00	0,00	0,00	0,00
		104.703.650,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19	***Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota***	64.804.600,00	0,00	0,00	0,00
		64.770.600,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	64.804.600,00	0,00	0,00	0,00
		64.770.600,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20	***Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Ke***	35.160.800,00	0,00	0,00	0,00
		32.887.400,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	35.160.800,00	0,00	0,00	0,00
		32.887.400,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22	***Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)***	201.461.100,00	0,00	0,00	0,00
		189.046.700,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat	190.660.000,00	0,00	0,00	0,00
		178.266.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	10.801.100,00	0,00	0,00	0,00
		10.780.700,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24	***Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman***	315.123.000,00	0,00	0,00	0,00
		309.301.600,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	315.123.000,00	0,00	0,00	0,00
		309.301.600,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25	***Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)***	28.837.500,00	0,00	0,00	0,00
		28.623.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	28.837.500,00	0,00	0,00	0,00
		28.623.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 28	***Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	64.763.400,00	0,00	0,00	0,00
		63.725.250,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 . 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	64.763.400,00	0,00	0,00	0,00
		63.725.250,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 29	***Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	33.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.632.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 29 . 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	33.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.632.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 30	***Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	68.936.800,00	0,00	0,00	0,00
		68.495.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 30 . 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	68.936.800,00	0,00	0,00	0,00
		68.495.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 02	**RS Umum Sungai Rumbai**	4.586.493.000,00	15.757.999.524,00	0,00	0,00
		3.244.601.703,00	14.023.882.799,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10	***Peningkatan Pelayanan BLUD***	737.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00
		523.456.071,00	32.485.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	737.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00
		523.456.071,00	32.485.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 15	***Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	745.600.000,00	14.973.909.524,00	0,00	0,00
		544.916.200,00	13.275.923.239,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 15 . 01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	653.600.000,00	9.859.551.524,00	0,00	0,00
		532.045.200,00	8.492.568.302,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 15 . 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	55.200.000,00	1.996.536.000,00	0,00	0,00
		1.494.000,00	1.888.311.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 15 . 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehata	36.800.000,00	3.117.822.000,00	0,00	0,00
		11.377.000,00	2.895.043.937,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 16	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	3.103.893.000,00	721.090.000,00	0,00	0,00
		2.176.229.432,00	715.474.560,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 16 . 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3.103.893.000,00	721.090.000,00	0,00	0,00
		2.176.229.432,00	715.474.560,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 03	**Puskesmas sungai Rumbai**	1.576.069.729,00	18.250.000,00	0,00	0,00
		1.497.052.026,00	18.250.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 03 . 10	***Peningkatan Pelayanan BLUD***	851.069.729,00	18.250.000,00	0,00	0,00
		781.563.426,00	18.250.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 03 . 10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	851.069.729,00	18.250.000,00	0,00	0,00
		781.563.426,00	18.250.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 03 . 16	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	725.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		715.488.600,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 03 . 16 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	725.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		715.488.600,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 04	**Puskesmas Koto Besar**	1.427.154.849,00	30.000.000,00	0,00	0,00
		1.365.140.869,66	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 04 . 10	***Peningkatan Pelayanan BLUD***	708.138.849,00	30.000.000,00	0,00	0,00
		705.145.869,66	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 04 . 10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	708.138.849,00	30.000.000,00	0,00	0,00
		705.145.869,66	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.02 . 1.02.01 . 04 . 16	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	719.016.000,00	0,00	0,00	0,00
		659.995.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 04 . 16 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	719.016.000,00	0,00	0,00	0,00
		659.995.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 05	**Puskesmas Sungai Limau**	1.383.555.140,00	50.810.000,00	0,00	0,00
		1.202.124.022,00	2.200.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 10	***Peningkatan Pelayanan BLUD***	521.555.140,00	50.810.000,00	0,00	0,00
		410.247.772,00	2.200.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	521.555.140,00	50.810.000,00	0,00	0,00
		410.247.772,00	2.200.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 16	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	862.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		791.876.250,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 16 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	862.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		791.876.250,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 06	**Puskesmas Koto Baru**	2.421.126.230,00	66.296.000,00	0,00	0,00
		1.889.831.914,00	47.131.050,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10	***Peningkatan Pelayanan BLUD***	1.691.126.230,00	66.296.000,00	0,00	0,00
		1.313.977.439,00	47.131.050,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.691.126.230,00	66.296.000,00	0,00	0,00
		1.313.977.439,00	47.131.050,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 16	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	730.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		575.854.475,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 16 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	730.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		575.854.475,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 07	**Puskesmas Tiumang**	1.181.129.858,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		1.116.737.543,00	15.124.090,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 10	***Peningkatan Pelayanan BLUD***	321.129.858,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		269.051.543,00	15.124.090,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	321.129.858,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		269.051.543,00	15.124.090,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.02 . 1.02.01 . 07 . 16	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	860.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		847.686.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 16 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	860.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		847.686.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 08	**Puskesmas Padang Laweh**	1.306.300.578,00	13.000.000,00	0,00	0,00
		1.214.549.132,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 08 . 10	***Peningkatan Pelayanan BLUD***	436.300.578,00	13.000.000,00	0,00	0,00
		351.646.382,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 08 . 10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	436.300.578,00	13.000.000,00	0,00	0,00
		351.646.382,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 08 . 16	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	870.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		862.902.750,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 08 . 16 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	870.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		862.902.750,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 09	**Puskesmas Sitiung I**	1.982.175.652,00	80.000.000,00	0,00	0,00
		1.569.839.427,00	41.173.600,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 09 . 10	***Peningkatan Pelayanan BLUD***	1.142.175.652,00	80.000.000,00	0,00	0,00
		887.962.827,00	41.173.600,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 09 . 10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.142.175.652,00	80.000.000,00	0,00	0,00
		887.962.827,00	41.173.600,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 09 . 16	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	840.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		681.876.600,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 09 . 16 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	840.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		681.876.600,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 10	**Puskesmas Timpeh**	1.440.779.216,00	35.500.000,00	0,00	0,00
		1.403.790.780,00	3.080.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 10 . 10	***Peningkatan Pelayanan BLUD***	525.779.216,00	35.500.000,00	0,00	0,00
		505.882.280,00	3.080.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 10 . 10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	525.779.216,00	35.500.000,00	0,00	0,00
		505.882.280,00	3.080.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.02 . 1.02.01 . 10 . 16	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	915.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		897.908.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 10 . 16 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	915.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		897.908.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 11	**Puskesmas Gunung Medan**	1.409.509.426,00	32.500.000,00	0,00	0,00
		1.317.188.761,00	4.950.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 11 . 10	***Peningkatan Pelayanan BLUD***	609.509.426,00	32.500.000,00	0,00	0,00
		520.113.761,00	4.950.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 11 . 10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	609.509.426,00	32.500.000,00	0,00	0,00
		520.113.761,00	4.950.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 11 . 16	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		797.075.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 11 . 16 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		797.075.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 12	**Puskesmas Sitiung II**	1.427.949.950,00	17.600.000,00	0,00	0,00
		1.317.865.250,00	17.600.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 12 . 10	***Peningkatan Pelayanan BLUD***	737.949.950,00	17.600.000,00	0,00	0,00
		734.059.750,00	17.600.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 12 . 10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	737.949.950,00	17.600.000,00	0,00	0,00
		734.059.750,00	17.600.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 12 . 16	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	690.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		583.805.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 12 . 16 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	690.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		583.805.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 13	**Puskesmas Beringin Sakti**	872.041.674,00	4.000.000,00	0,00	0,00
		809.208.194,67	3.960.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 13 . 10	***Peningkatan Pelayanan BLUD***	210.041.674,00	4.000.000,00	0,00	0,00
		199.676.545,67	3.960.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 13 . 10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	210.041.674,00	4.000.000,00	0,00	0,00
		199.676.545,67	3.960.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.02 . 1.02.01 . 13 . 16	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	662.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		609.531.649,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 13 . 16 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	662.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		609.531.649,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 14	**Puskesmas Silago**	1.603.227.154,00	44.885.000,00	0,00	0,00
		1.594.439.767,00	27.275.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 14 . 10	***Peningkatan Pelayanan BLUD***	723.227.154,00	44.885.000,00	0,00	0,00
		723.139.767,00	27.275.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 14 . 10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	723.227.154,00	44.885.000,00	0,00	0,00
		723.139.767,00	27.275.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 14 . 16	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	880.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		871.300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 14 . 16 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	880.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		871.300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 15	**Puskesmas Sungai Dareh**	1.875.044.226,00	169.883.416,00	0,00	0,00
		1.801.276.678,00	104.991.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10	***Peningkatan Pelayanan BLUD***	1.175.044.226,00	169.883.416,00	0,00	0,00
		1.116.374.328,00	104.991.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.175.044.226,00	169.883.416,00	0,00	0,00
		1.116.374.328,00	104.991.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		684.902.350,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		684.902.350,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 16	**Puskesmas Sialang**	1.341.141.665,00	37.295.000,00	0,00	0,00
		1.267.521.362,00	17.645.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10	***Peningkatan Pelayanan BLUD***	451.474.665,00	37.295.000,00	0,00	0,00
		440.410.262,00	17.645.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	451.474.665,00	37.295.000,00	0,00	0,00
		440.410.262,00	17.645.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	889.667.000,00	0,00	0,00	0,00
		827.111.100,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	889.667.000,00	0,00	0,00	0,00
		827.111.100,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 17	**Instalasi Laboratorium Kesehatan Daerah**	560.251.986,00	12.748.014,00	0,00	0,00
		540.198.362,00	12.748.014,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 16	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	560.251.986,00	12.748.014,00	0,00	0,00
		540.198.362,00	12.748.014,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 16 . 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	560.251.986,00	12.748.014,00	0,00	0,00
		540.198.362,00	12.748.014,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 18	**Gudang Farmasi Kabupaten**	248.370.600,00	53.868.400,00	0,00	0,00
		232.425.150,00	53.083.400,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 16	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	248.370.600,00	53.868.400,00	0,00	0,00
		232.425.150,00	53.083.400,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 16 . 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	248.370.600,00	53.868.400,00	0,00	0,00
		232.425.150,00	53.083.400,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.02	**RSUD SUNGAI DAREH**	73.344.643.000,00	28.129.871.900,00	0,00	0,00
		65.115.908.383,00	25.325.338.193,92	0,00	0,00
1.02 . 1.02.02 . 01	**RSUD SUNGAI DAREH**	73.344.643.000,00	28.129.871.900,00	0,00	0,00
		65.115.908.383,00	25.325.338.193,92	0,00	0,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	27.457.748.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.528.096.544,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.457.748.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.528.096.544,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10	***Peningkatan Pelayanan BLUD***	38.813.585.000,00	1.186.415.000,00	0,00	0,00
		37.667.084.781,00	671.407.500,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	38.813.585.000,00	1.186.415.000,00	0,00	0,00
		37.667.084.781,00	671.407.500,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15	***Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	0,00	26.306.656.900,00	0,00	0,00
		0,00	24.266.098.593,92	0,00	0,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	0,00	750.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	679.833.026,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	996.699.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehata	0,00	24.156.656.900,00	0,00	0,00
		0,00	22.589.566.567,92	0,00	0,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	4.373.310.000,00	636.800.000,00	0,00	0,00
		2.809.234.201,00	387.832.100,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar B	4.373.310.000,00	636.800.000,00	0,00	0,00
		2.809.234.201,00	387.832.100,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20	***Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota***	2.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.111.492.857,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	2.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.111.492.857,00	0,00	0,00	0,00
1.03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	41.278.455.490,00	63.629.021.100,00	0,00	0,00
		38.689.004.550,51	57.498.097.931,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	41.278.455.490,00	63.629.021.100,00	0,00	0,00
		38.689.004.550,51	57.498.097.931,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	40.354.760.722,00	63.629.021.100,00	0,00	0,00
		38.001.951.720,51	57.498.097.931,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	8.775.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.715.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.775.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.715.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	4.332.502.507,00	0,00	0,00	0,00
		4.198.712.726,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.332.502.507,00	0,00	0,00	0,00
		4.198.712.726,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	449.797.840,00	52.351.000,00	0,00	0,00
		440.450.186,00	52.079.000,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.822.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.819.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	127.742.040,00	52.351.000,00	0,00	0,00
		127.644.400,00	52.079.000,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.410.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	281.233.800,00	0,00	0,00	0,00
		273.576.786,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	60.588.500,00	7.500.000,00	0,00	0,00
		46.796.750,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.588.500,00	7.500.000,00	0,00	0,00
		46.796.750,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	3.371.986.250,00	0,00	0,00	0,00
		3.138.661.797,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	552.086.250,00	0,00	0,00	0,00
		548.111.797,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.814.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.585.450.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	226.445.000,00	0,00	0,00	0,00
		164.785.160,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	170.095.000,00	0,00	0,00	0,00
		134.741.960,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.550.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.338.200,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.705.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15	***Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***	87.381.671,00	380.554.000,00	0,00	0,00
		39.963.959,00	348.876.000,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruks	0,00	75.904.000,00	0,00	0,00
		0,00	75.904.000,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	87.381.671,00	304.650.000,00	0,00	0,00
		39.963.959,00	272.972.000,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16	***Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu)***	259.787.800,00	2.972.070.000,00	0,00	0,00
		110.379.400,00	2.326.581.700,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	259.787.800,00	2.972.070.000,00	0,00	0,00
		110.379.400,00	2.326.581.700,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17	***Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota***	8.287.293.400,00	150.000.000,00	0,00	0,00
		8.056.269.378,51	99.000.000,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	7.864.943.400,00	0,00	0,00	0,00
		7.725.426.323,51	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	422.350.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
		330.843.055,00	99.000.000,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19	***Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota***	4.851.871.449,00	0,00	0,00	0,00
		4.691.273.558,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik T	268.569.000,00	0,00	0,00	0,00
		257.678.500,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	4.499.212.949,00	0,00	0,00	0,00
		4.398.705.199,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	84.089.500,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		34.889.859,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20	***Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota***	1.166.685.130,00	0,00	0,00	0,00
		1.155.271.450,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.166.685.130,00	0,00	0,00	0,00
		1.155.271.450,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21	***Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota***	9.740.192.555,00	68.728.900,00	0,00	0,00
		9.489.391.696,00	18.450.000,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4.321.122.555,00	0,00	0,00	0,00
		4.236.336.200,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5.419.070.000,00	68.728.900,00	0,00	0,00
		5.253.055.496,00	18.450.000,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22	***Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan***	1.676.206.500,00	42.414.827.200,00	0,00	0,00
		1.506.197.450,00	37.141.876.231,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1.676.206.500,00	42.414.827.200,00	0,00	0,00
		1.506.197.450,00	37.141.876.231,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24	***Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota***	5.596.535.570,00	17.521.005.000,00	0,00	0,00
		4.751.116.349,00	17.474.440.000,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 05	Pembangunan Jalan	2.149.680.600,00	16.346.505.000,00	0,00	0,00
		1.527.143.714,00	16.306.560.000,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 09	Rehabilitasi Jalan	1.661.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.577.803.606,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 12	Pembangunan Jembatan	258.281.400,00	1.174.500.000,00	0,00	0,00
		183.287.311,00	1.167.880.000,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 18	Rehabilitasi Jembatan	1.527.073.570,00	0,00	0,00	0,00
		1.462.881.718,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 25	***Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi***	109.312.500,00	17.500.000,00	0,00	0,00
		100.366.300,00	3.300.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.03 . 1.03.01 . 01 . 25 . 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	109.312.500,00	17.500.000,00	0,00	0,00
		100.366.300,00	3.300.000,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28	***Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi***	3.132.400,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		1.886.450,00	17.300.000,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	3.132.400,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		1.886.450,00	17.300.000,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32	***Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota***	126.266.650,00	24.485.000,00	0,00	0,00
		101.714.111,00	16.195.000,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	126.266.650,00	24.485.000,00	0,00	0,00
		101.714.111,00	16.195.000,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 02	**UPT Alat Berat dan Perbekalan (ALKAL)**	923.694.768,00	0,00	0,00	0,00
		687.052.830,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	923.694.768,00	0,00	0,00	0,00
		687.052.830,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	923.694.768,00	0,00	0,00	0,00
		687.052.830,00	0,00	0,00	0,00
1.04	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	4.427.769.424,00	236.310.210,00	0,00	0,00
		4.238.887.470,32	234.351.480,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.01	**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN**	4.427.769.424,00	236.310.210,00	0,00	0,00
		4.238.887.470,32	234.351.480,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.01 . 01	**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN**	4.427.769.424,00	236.310.210,00	0,00	0,00
		4.238.887.470,32	234.351.480,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	1.517.494.962,00	0,00	0,00	0,00
		1.442.664.011,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.517.494.962,00	0,00	0,00	0,00
		1.442.664.011,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	198.321.996,00	19.185.210,00	0,00	0,00
		191.153.015,00	17.650.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.391.196,00	19.185.210,00	0,00	0,00
		28.376.400,00	17.650.000,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.733.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.975.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.703.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.571.500,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139.494.800,00	0,00	0,00	0,00
		133.230.115,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	437.580.000,00	0,00	0,00	0,00
		423.140.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.890.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	429.580.000,00	0,00	0,00	0,00
		415.250.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	40.075.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.774.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.075.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.774.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22	***Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukim***	63.437.250,00	0,00	0,00	0,00
		40.725.150,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	63.437.250,00	0,00	0,00	0,00
		40.725.150,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24	***Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha***	1.459.201.450,00	0,00	0,00	0,00
		1.447.586.416,97	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1.459.201.450,00	0,00	0,00	0,00
		1.447.586.416,97	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.04 . 1.04.01 . 01 . 25	***Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota***	61.563.800,00	0,00	0,00	0,00
		58.405.206,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 25 . 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	61.563.800,00	0,00	0,00	0,00
		58.405.206,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26	***Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan***	650.094.966,00	217.125.000,00	0,00	0,00
		596.439.671,35	216.701.480,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	517.831.000,00	205.750.000,00	0,00	0,00
		472.323.665,35	205.396.480,00	0,00	0,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	132.263.966,00	11.375.000,00	0,00	0,00
		124.116.006,00	11.305.000,00	0,00	0,00
1.05	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	9.845.354.538,00	24.674.917.051,00	0,00	0,00
		9.549.393.072,00	421.671.182,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.01	**DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**	6.890.854.000,00	44.832.000,00	0,00	0,00
		6.756.537.548,00	43.760.000,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.01 . 01	**DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**	6.890.854.000,00	44.832.000,00	0,00	0,00
		6.756.537.548,00	43.760.000,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	2.027.086.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.964.675.416,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.027.086.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.964.675.416,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	202.490.850,00	34.400.000,00	0,00	0,00
		201.237.470,00	34.300.000,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.910.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.892.500,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.034.250,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		29.940.290,00	9.900.000,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.595.600,00	24.400.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		2.588.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.492.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.479.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.996.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.990.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.463.000,00	0,00	0,00	0,00
		132.347.680,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	3.883.230.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.822.077.606,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.797.606,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.845.130.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.784.780.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	217.049.650,00	0,00	0,00	0,00
		208.422.706,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	201.379.650,00	0,00	0,00	0,00
		192.752.706,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.670.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.670.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15	***Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (***	79.327.500,00	0,00	0,00	0,00
		79.029.350,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	79.327.500,00	0,00	0,00	0,00
		79.029.350,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 16	***Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan***	441.195.000,00	0,00	0,00	0,00
		440.827.500,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	441.195.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		440.827.500,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 23	***Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah***	40.475.000,00	10.432.000,00	0,00	0,00
		40.267.500,00	9.460.000,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 23 . 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	40.475.000,00	10.432.000,00	0,00	0,00
		40.267.500,00	9.460.000,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.02	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	2.954.500.538,00	24.630.085.051,00	0,00	0,00
		2.792.855.524,00	377.911.182,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.02 . 01	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	2.954.500.538,00	24.630.085.051,00	0,00	0,00
		2.792.855.524,00	377.911.182,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	728.339.000,00	0,00	0,00	0,00
		674.722.044,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	728.339.000,00	0,00	0,00	0,00
		674.722.044,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	235.136.488,00	18.000.000,00	0,00	0,00
		234.585.132,00	18.000.000,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.502.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.458.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.347.688,00	18.000.000,00	0,00	0,00
		36.076.988,00	18.000.000,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.010.000,00	0,00	0,00	0,00
		66.947.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.823.900,00	0,00	0,00	0,00
		2.767.200,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127.452.900,00	0,00	0,00	0,00
		127.335.944,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	0,00	8.735.000,00	0,00	0,00
		0,00	8.735.000,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 05	Pengadaan Mebel	0,00	8.735.000,00	0,00	0,00
		0,00	8.735.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	604.168.100,00	0,00	0,00	0,00
		590.611.500,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.080.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.876.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.083.100,00	0,00	0,00	0,00
		6.665.500,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	577.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		563.990.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	123.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		120.669.650,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.669.650,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19	***Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota***	20.068.650,00	0,00	0,00	0,00
		18.181.250,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	20.068.650,00	0,00	0,00	0,00
		18.181.250,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20	***Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana***	149.735.000,00	24.602.600.051,00	0,00	0,00
		83.148.548,00	351.176.182,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	149.735.000,00	24.602.600.051,00	0,00	0,00
		83.148.548,00	351.176.182,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21	***Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***	1.014.585.000,00	0,00	0,00	0,00
		998.287.550,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21 . 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.014.585.000,00	0,00	0,00	0,00
		998.287.550,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 22	***Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana***	78.668.300,00	750.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		72.649.850,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 22 . 01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	78.668.300,00	750.000,00	0,00	0,00
		72.649.850,00	0,00	0,00	0,00
1.06	**Sosial**	4.659.518.550,00	9.000.000,00	0,00	0,00
		4.559.432.153,00	9.000.000,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEN**	4.659.518.550,00	9.000.000,00	0,00	0,00
		4.559.432.153,00	9.000.000,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 01	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PI**	4.659.518.550,00	9.000.000,00	0,00	0,00
		4.559.432.153,00	9.000.000,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	2.439.251.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.358.009.223,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.439.251.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.358.009.223,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	220.593.000,00	0,00	0,00	0,00
		220.480.250,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.960.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.939.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.952.000,00	0,00	0,00	0,00
		47.951.650,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.998.500,00	0,00	0,00	0,00
		4.992.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.980.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	54.786.100,00	0,00	0,00	0,00
		54.781.100,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.916.400,00	0,00	0,00	0,00
		94.836.500,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 05	Pengadaan Mebel	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	1.058.622.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.044.884.084,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.998.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.990.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.804.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.734.084,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	992.820.000,00	0,00	0,00	0,00
		987.160.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	152.470.000,00	0,00	0,00	0,00
		148.137.196,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.661.253,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		121.405.943,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.170.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.070.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17	***Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota***	90.832.200,00	0,00	0,00	0,00
		90.621.800,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	60.168.400,00	0,00	0,00	0,00
		60.131.250,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	30.663.800,00	0,00	0,00	0,00
		30.490.550,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19	***Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar***	63.365.550,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		63.239.750,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 03	Penyediaan Alat Bantu	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	43.165.550,00	0,00	0,00	0,00
		43.039.750,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22	***Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota***	93.417.800,00	0,00	0,00	0,00
		93.379.300,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	93.417.800,00	0,00	0,00	0,00
		93.379.300,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23	***Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota***	540.967.000,00	0,00	0,00	0,00
		540.680.550,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 01	Penyediaan Makanan	540.967.000,00	0,00	0,00	0,00
		540.680.550,00	0,00	0,00	0,00
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**	49.814.457.601,00	2.964.699.373,00	0,00	0,00
		47.982.265.075,00	2.917.098.812,00	0,00	0,00
2.01	**Tenaga Kerja**	189.792.750,00	800.000,00	0,00	0,00
		180.762.700,00	400.000,00	0,00	0,00
2.01 . 3.08.01	**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**	189.792.750,00	800.000,00	0,00	0,00
		180.762.700,00	400.000,00	0,00	0,00
2.01 . 3.08.01 . 01	**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**	189.792.750,00	800.000,00	0,00	0,00
		180.762.700,00	400.000,00	0,00	0,00
2.01 . 3.08.01 . 01 . 15	***Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)***	27.552.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.185.800,00	0,00	0,00	0,00
2.01 . 3.08.01 . 01 . 15 . 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	27.552.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.185.800,00	0,00	0,00	0,00
2.01 . 3.08.01 . 01 . 16	***Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi***	111.542.500,00	800.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		107.917.400,00	400.000,00	0,00	0,00
2.01 . 3.08.01 . 01 . 16 . 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	111.542.500,00	800.000,00	0,00	0,00
		107.917.400,00	400.000,00	0,00	0,00
2.01 . 3.08.01 . 01 . 23	***Pengelolaan Informasi Pasar Kerja***	18.953.350,00	0,00	0,00	0,00
		16.714.500,00	0,00	0,00	0,00
2.01 . 3.08.01 . 01 . 23 . 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	18.953.350,00	0,00	0,00	0,00
		16.714.500,00	0,00	0,00	0,00
2.01 . 3.08.01 . 01 . 26	***Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***	14.875.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.524.100,00	0,00	0,00	0,00
2.01 . 3.08.01 . 01 . 26 . 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	14.875.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.524.100,00	0,00	0,00	0,00
2.01 . 3.08.01 . 01 . 27	***Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota***	16.869.900,00	0,00	0,00	0,00
		16.420.900,00	0,00	0,00	0,00
2.01 . 3.08.01 . 01 . 27 . 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	16.869.900,00	0,00	0,00	0,00
		16.420.900,00	0,00	0,00	0,00
2.02	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	850.574.150,00	0,00	0,00	0,00
		829.122.271,00	0,00	0,00	0,00
2.02 . 1.06.01	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	850.574.150,00	0,00	0,00	0,00
		829.122.271,00	0,00	0,00	0,00
2.02 . 1.06.01 . 01	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	850.574.150,00	0,00	0,00	0,00
		829.122.271,00	0,00	0,00	0,00
2.02 . 1.06.01 . 01 . 15	***Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota***	48.172.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.805.400,00	0,00	0,00	0,00
2.02 . 1.06.01 . 01 . 15 . 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	48.172.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.805.400,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.02 . 1.06.01 . 01 . 17	***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota***	660.043.200,00	0,00	0,00	0,00
		641.306.021,00	0,00	0,00	0,00
2.02 . 1.06.01 . 01 . 17 . 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	660.043.200,00	0,00	0,00	0,00
		641.306.021,00	0,00	0,00	0,00
2.02 . 1.06.01 . 01 . 18	***Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota***	75.286.550,00	0,00	0,00	0,00
		74.736.400,00	0,00	0,00	0,00
2.02 . 1.06.01 . 01 . 18 . 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	75.286.550,00	0,00	0,00	0,00
		74.736.400,00	0,00	0,00	0,00
2.02 . 1.06.01 . 01 . 26	***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota***	67.072.400,00	0,00	0,00	0,00
		66.274.450,00	0,00	0,00	0,00
2.02 . 1.06.01 . 01 . 26 . 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat	67.072.400,00	0,00	0,00	0,00
		66.274.450,00	0,00	0,00	0,00
2.03	**Pangan**	4.098.518.190,00	6.825.000,00	0,00	0,00
		3.977.237.856,00	6.825.000,00	0,00	0,00
2.03 . 2.03.01	**DINAS PANGAN DAN PERIKANAN**	4.098.518.190,00	6.825.000,00	0,00	0,00
		3.977.237.856,00	6.825.000,00	0,00	0,00
2.03 . 2.03.01 . 01	**DINAS PANGAN DAN PERIKANAN**	4.098.518.190,00	6.825.000,00	0,00	0,00
		3.977.237.856,00	6.825.000,00	0,00	0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	2.471.617.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.414.538.882,00	0,00	0,00	0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.471.617.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.414.538.882,00	0,00	0,00	0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	146.964.940,00	6.825.000,00	0,00	0,00
		146.586.900,00	6.825.000,00	0,00	0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.573.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.573.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.078.200,00	6.825.000,00	0,00	0,00
		19.014.000,00	6.825.000,00	0,00	0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.002.190,00	0,00	0,00	0,00
		2.994.550,00	0,00	0,00	0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.080.000,00	0,00	0,00	0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.430.800,00	0,00	0,00	0,00
		9.430.800,00	0,00	0,00	0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.780.750,00	0,00	0,00	0,00
		99.494.550,00	0,00	0,00	0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	802.375.000,00	0,00	0,00	0,00
		739.611.746,00	0,00	0,00	0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.120.000,00	0,00	0,00	0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.531.746,00	0,00	0,00	0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	755.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		692.960.000,00	0,00	0,00	0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	87.575.500,00	0,00	0,00	0,00
		87.313.828,00	0,00	0,00	0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.465.500,00	0,00	0,00	0,00
		38.290.500,00	0,00	0,00	0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.968.328,00	0,00	0,00	0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.060.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.055.000,00	0,00	0,00	0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 16	***Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka***	29.379.650,00	0,00	0,00	0,00
		29.249.350,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.03 . 2.03.01 . 01 . 16 . 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	17.514.750,00	0,00	0,00	0,00
		17.485.750,00	0,00	0,00	0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 16 . 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	11.864.900,00	0,00	0,00	0,00
		11.763.600,00	0,00	0,00	0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19	***Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi***	527.778.850,00	0,00	0,00	0,00
		527.309.050,00	0,00	0,00	0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 . 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	18.112.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.822.050,00	0,00	0,00	0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 . 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	509.666.850,00	0,00	0,00	0,00
		509.487.000,00	0,00	0,00	0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 21	***Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota***	17.384.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.189.000,00	0,00	0,00	0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 21 . 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah	17.384.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.189.000,00	0,00	0,00	0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 22	***Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten***	15.443.250,00	0,00	0,00	0,00
		15.439.100,00	0,00	0,00	0,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 22 . 04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kot	15.443.250,00	0,00	0,00	0,00
		15.439.100,00	0,00	0,00	0,00
2.04	**Pertanahan**	492.324.000,00	0,00	0,00	0,00
		234.165.210,00	0,00	0,00	0,00
2.04 . 1.04.01	**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN**	492.324.000,00	0,00	0,00	0,00
		234.165.210,00	0,00	0,00	0,00
2.04 . 1.04.01 . 01	**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN**	492.324.000,00	0,00	0,00	0,00
		234.165.210,00	0,00	0,00	0,00
2.04 . 1.04.01 . 01 . 25	***Penerbitan Izin Membuka Tanah***	482.988.500,00	0,00	0,00	0,00
		224.844.910,00	0,00	0,00	0,00
2.04 . 1.04.01 . 01 . 25 . 02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	482.988.500,00	0,00	0,00	0,00
		224.844.910,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.04 . 1.04.01 . 01 . 26	***Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/***	9.335.500,00	0,00	0,00	0,00
		9.320.300,00	0,00	0,00	0,00
2.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	9.335.500,00	0,00	0,00	0,00
		9.320.300,00	0,00	0,00	0,00
2.05	**Lingkungan Hidup**	5.066.562.320,00	110.525.000,00	0,00	0,00
		4.764.893.380,00	108.886.362,00	0,00	0,00
2.05 . 2.05.01	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	5.066.562.320,00	110.525.000,00	0,00	0,00
		4.764.893.380,00	108.886.362,00	0,00	0,00
2.05 . 2.05.01 . 01	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	5.066.562.320,00	110.525.000,00	0,00	0,00
		4.764.893.380,00	108.886.362,00	0,00	0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	2.085.102.040,00	0,00	0,00	0,00
		1.985.649.965,00	0,00	0,00	0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.085.102.040,00	0,00	0,00	0,00
		1.985.649.965,00	0,00	0,00	0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	125.566.250,00	0,00	0,00	0,00
		123.427.433,00	0,00	0,00	0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.060.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.060.000,00	0,00	0,00	0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.038.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.038.000,00	0,00	0,00	0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.500.200,00	0,00	0,00	0,00
		5.500.200,00	0,00	0,00	0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.968.050,00	0,00	0,00	0,00
		100.829.233,00	0,00	0,00	0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	1.218.459.430,00	32.100.000,00	0,00	0,00
		1.035.427.652,00	32.086.362,00	0,00	0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.090.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.611.700,00	0,00	0,00	0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.335.380,00	32.100.000,00	0,00	0,00
		74.252.152,00	32.086.362,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.093.034.050,00	0,00	0,00	0,00
		912.563.800,00	0,00	0,00	0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	41.775.000,00	0,00	0,00	0,00
		41.454.079,00	0,00	0,00	0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.775.000,00	0,00	0,00	0,00
		41.454.079,00	0,00	0,00	0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15	***Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Ka***	325.645.950,00	0,00	0,00	0,00
		325.170.131,00	0,00	0,00	0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	307.380.200,00	0,00	0,00	0,00
		307.018.381,00	0,00	0,00	0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	18.265.750,00	0,00	0,00	0,00
		18.151.750,00	0,00	0,00	0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17	***Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabu***	173.926.300,00	2.015.000,00	0,00	0,00
		170.505.508,00	1.975.000,00	0,00	0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	63.590.500,00	2.015.000,00	0,00	0,00
		63.495.500,00	1.975.000,00	0,00	0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	110.335.800,00	0,00	0,00	0,00
		107.010.008,00	0,00	0,00	0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18	***Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup***	522.046.400,00	40.000.000,00	0,00	0,00
		519.836.000,00	38.415.000,00	0,00	0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	522.046.400,00	40.000.000,00	0,00	0,00
		519.836.000,00	38.415.000,00	0,00	0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20	***Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota***	19.303.600,00	700.000,00	0,00	0,00
		19.257.250,00	700.000,00	0,00	0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	19.303.600,00	700.000,00	0,00	0,00
		19.257.250,00	700.000,00	0,00	0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21	***Penyimpanan Sementara Limbah B3***	7.247.200,00	0,00	0,00	0,00
		6.837.900,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	7.247.200,00	0,00	0,00	0,00
		6.837.900,00	0,00	0,00	0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23	***Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang***	33.534.250,00	0,00	0,00	0,00
		33.423.500,00	0,00	0,00	0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin	14.356.250,00	0,00	0,00	0,00
		14.270.950,00	0,00	0,00	0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19.178.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.152.550,00	0,00	0,00	0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25	***Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisio***	15.792.400,00	0,00	0,00	0,00
		15.730.250,00	0,00	0,00	0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 . 01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan	15.792.400,00	0,00	0,00	0,00
		15.730.250,00	0,00	0,00	0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 27	***Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten***	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.325.200,00	0,00	0,00	0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 27 . 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.325.200,00	0,00	0,00	0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 28	***Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Peng***	10.698.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.455.850,00	0,00	0,00	0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 28 . 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	10.698.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.455.850,00	0,00	0,00	0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 29	***Pengelolaan Sampah***	470.965.500,00	35.710.000,00	0,00	0,00
		461.392.662,00	35.710.000,00	0,00	0,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 29 . 03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangku	470.965.500,00	35.710.000,00	0,00	0,00
		461.392.662,00	35.710.000,00	0,00	0,00
2.06	**Administrasi Kependudukan dan Capil**	4.350.804.400,00	181.500.000,00	0,00	0,00
		4.262.511.316,00	179.736.100,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	4.350.804.400,00	181.500.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		4.262.511.316,00	179.736.100,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	4.350.804.400,00	181.500.000,00	0,00	0,00
		4.262.511.316,00	179.736.100,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	49.082.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.734.900,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	32.238.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.134.000,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	14.044.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.800.900,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	2.350.568.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.294.297.164,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.350.568.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.294.297.164,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	30.598.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.657.486,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 05 . 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.015.000,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 05 . 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17.868.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.642.486,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	743.332.000,00	96.500.000,00	0,00	0,00
		737.834.683,00	94.805.100,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.822.500,00	0,00	0,00	0,00
		4.506.000,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	417.078.000,00	96.500.000,00	0,00	0,00
		414.516.200,00	94.805.100,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.704.500,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		7.847.200,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.880.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.654.000,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299.847.000,00	0,00	0,00	0,00
		298.311.283,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	994.300.900,00	0,00	0,00	0,00
		972.037.033,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.931.900,00	0,00	0,00	0,00
		3.717.000,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136.020.000,00	0,00	0,00	0,00
		131.052.033,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.590.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.095.000,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	805.759.000,00	0,00	0,00	0,00
		789.173.000,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	122.718.500,00	0,00	0,00	0,00
		120.969.050,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.140.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.823.250,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.578.500,00	0,00	0,00	0,00
		44.205.200,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.940.600,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15	***Pelayanan Pendaftaran Penduduk***	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 16	***Penataan Pendaftaran Penduduk***	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17	***Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk***	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19	***Pelayanan Pencatatan Sipil***	17.510.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.510.000,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	17.510.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.510.000,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20	***Penyelenggaraan Pencatatan Sipil***	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 22	***Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Da***	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.06 . 2.06.01 . 01 . 22 . 02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 24	***Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan***	19.222.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00
		19.071.800,00	84.931.000,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 24 . 01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabup	19.222.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.071.800,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 24 . 03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0,00	85.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	84.931.000,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 24 . 05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 26	***Penyusunan Profil Kependudukan***	23.473.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.399.200,00	0,00	0,00	0,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 26 . 02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	23.473.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.399.200,00	0,00	0,00	0,00
2.07	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**	4.830.770.220,00	0,00	0,00	0,00
		4.740.212.728,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2.07.01	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	4.830.770.220,00	0,00	0,00	0,00
		4.740.212.728,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2.07.01 . 01	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	4.830.770.220,00	0,00	0,00	0,00
		4.740.212.728,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	2.329.937.020,00	0,00	0,00	0,00
		2.258.912.415,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.329.937.020,00	0,00	0,00	0,00
		2.258.912.415,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	336.788.570,00	0,00	0,00	0,00
		336.537.575,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.466.200,00	0,00	0,00	0,00
		2.465.200,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.076.120,00	0,00	0,00	0,00
		48.026.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.547.050,00	0,00	0,00	0,00
		3.547.050,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.930.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.983.200,00	0,00	0,00	0,00
		18.981.300,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	232.736.000,00	0,00	0,00	0,00
		232.588.025,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	446.285.000,00	0,00	0,00	0,00
		439.025.319,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.085.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.079.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.566.319,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	400.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		394.380.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	139.797.300,00	0,00	0,00	0,00
		139.350.250,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.953.300,00	0,00	0,00	0,00
		23.948.300,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.424.000,00	0,00	0,00	0,00
		92.051.950,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.470.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.950.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16	***Fasilitasi Kerja sama antar Desa***	55.758.850,00	0,00	0,00	0,00
		55.429.475,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	28.111.350,00	0,00	0,00	0,00
		27.937.650,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	27.647.500,00	0,00	0,00	0,00
		27.491.825,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17	***Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa***	737.055.030,00	0,00	0,00	0,00
		726.697.194,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	288.872.162,00	0,00	0,00	0,00
		288.463.760,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	22.140.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.021.750,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	61.181.400,00	0,00	0,00	0,00
		61.118.500,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	323.586.468,00	0,00	0,00	0,00
		313.936.534,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	41.275.000,00	0,00	0,00	0,00
		41.156.650,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18	***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota***	785.148.450,00	0,00	0,00	0,00
		784.260.500,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM,	679.909.850,00	0,00	0,00	0,00
		679.378.650,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),	85.240.600,00	0,00	0,00	0,00
		85.102.300,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	7.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.925.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	12.948.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.854.550,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.08	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	2.618.642.250,00	1.088.700.000,00	0,00	0,00
		2.592.514.000,00	1.073.930.000,00	0,00	0,00
2.08 . 1.06.01	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	2.618.642.250,00	1.088.700.000,00	0,00	0,00
		2.592.514.000,00	1.073.930.000,00	0,00	0,00
2.08 . 1.06.01 . 01	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	2.618.642.250,00	1.088.700.000,00	0,00	0,00
		2.592.514.000,00	1.073.930.000,00	0,00	0,00
2.08 . 1.06.01 . 01 . 17	***Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal***	2.476.047.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.450.280.900,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 1.06.01 . 01 . 17 . 01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	2.476.047.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.450.280.900,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 1.06.01 . 01 . 19	***Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah***	67.242.000,00	1.088.700.000,00	0,00	0,00
		66.997.700,00	1.073.930.000,00	0,00	0,00
2.08 . 1.06.01 . 01 . 19 . 05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 1.06.01 . 01 . 19 . 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	57.242.000,00	1.088.700.000,00	0,00	0,00
		56.997.700,00	1.073.930.000,00	0,00	0,00
2.08 . 1.06.01 . 01 . 21	***Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan da***	75.353.250,00	0,00	0,00	0,00
		75.235.400,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 1.06.01 . 01 . 21 . 03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	75.353.250,00	0,00	0,00	0,00
		75.235.400,00	0,00	0,00	0,00
2.09	**Perhubungan**	5.541.567.050,00	218.324.273,00	0,00	0,00
		5.302.339.385,00	214.339.100,00	0,00	0,00
2.09 . 2.09.01	**DINAS PERHUBUNGAN**	5.541.567.050,00	218.324.273,00	0,00	0,00
		5.302.339.385,00	214.339.100,00	0,00	0,00
2.09 . 2.09.01 . 01	**DINAS PERHUBUNGAN**	5.541.567.050,00	218.324.273,00	0,00	0,00
		5.302.339.385,00	214.339.100,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	2.239.036.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.170.052.399,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.239.036.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.170.052.399,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	207.303.850,00	149.500.000,00	0,00	0,00
		207.135.628,00	149.500.000,00	0,00	0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	994.000,00	149.500.000,00	0,00	0,00
		994.000,00	149.500.000,00	0,00	0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.055.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.024.050,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.600,00	0,00	0,00	0,00
		2.500.600,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.656.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.640.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	58.157.200,00	0,00	0,00	0,00
		58.157.200,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.941.050,00	0,00	0,00	0,00
		124.819.778,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	2.623.510.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00
		2.475.387.253,00	8.500.000,00	0,00	0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.557.253,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.040.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00
		8.030.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.499.970.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.363.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	164.083.600,00	0,00	0,00	0,00
		147.667.555,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.205.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.083.600,00	0,00	0,00	0,00
		130.462.555,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16	***Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota***	52.028.000,00	60.324.273,00	0,00	0,00
		51.225.950,00	56.339.100,00	0,00	0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	25.118.000,00	43.399.648,00	0,00	0,00
		24.983.250,00	41.123.000,00	0,00	0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	26.910.000,00	16.924.625,00	0,00	0,00
		26.242.700,00	15.216.100,00	0,00	0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19	***Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor***	133.319.000,00	0,00	0,00	0,00
		132.715.800,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	133.319.000,00	0,00	0,00	0,00
		132.715.800,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20	***Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jala***	20.095.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.183.900,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	20.095.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.183.900,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 22	***Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan***	102.191.600,00	0,00	0,00	0,00
		99.970.900,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 22 . 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	102.191.600,00	0,00	0,00	0,00
		99.970.900,00	0,00	0,00	0,00
2.10	**Komunikasi dan Informatika**	3.775.665.896,00	495.500.000,00	0,00	0,00
		3.618.945.553,00	494.249.150,00	0,00	0,00
2.10 . 2.10.01	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	3.775.665.896,00	495.500.000,00	0,00	0,00
		3.618.945.553,00	494.249.150,00	0,00	0,00
2.10 . 2.10.01 . 01	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	3.775.665.896,00	495.500.000,00	0,00	0,00
		3.618.945.553,00	494.249.150,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	1.906.290.600,00	0,00	0,00	0,00
		1.850.993.833,00	0,00	0,00	0,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.906.290.600,00	0,00	0,00	0,00
		1.850.993.833,00	0,00	0,00	0,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	115.605.450,00	0,00	0,00	0,00
		115.305.905,00	0,00	0,00	0,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.012.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.011.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.328.900,00	0,00	0,00	0,00
		1.272.700,00	0,00	0,00	0,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.697.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.642.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.240.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.209.300,00	0,00	0,00	0,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.327.550,00	0,00	0,00	0,00
		93.170.905,00	0,00	0,00	0,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	1.142.262.796,00	0,00	0,00	0,00
		1.043.958.658,00	0,00	0,00	0,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	736.084.984,00	0,00	0,00	0,00
		649.518.058,00	0,00	0,00	0,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.417.812,00	0,00	0,00	0,00
		11.250.600,00	0,00	0,00	0,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	391.510.000,00	0,00	0,00	0,00
		380.190.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	28.652.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.911.250,00	0,00	0,00	0,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.552.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		23.811.250,00	0,00	0,00	0,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15	***Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab***	204.603.750,00	195.500.000,00	0,00	0,00
		202.716.657,00	194.976.000,00	0,00	0,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	51.505.000,00	195.500.000,00	0,00	0,00
		50.799.289,00	194.976.000,00	0,00	0,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	108.995.750,00	0,00	0,00	0,00
		108.693.918,00	0,00	0,00	0,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	44.103.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.223.450,00	0,00	0,00	0,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17	***Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/***	378.251.300,00	300.000.000,00	0,00	0,00
		378.059.250,00	299.273.150,00	0,00	0,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	378.251.300,00	300.000.000,00	0,00	0,00
		378.059.250,00	299.273.150,00	0,00	0,00
2.11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	3.467.431.734,00	17.580.000,00	0,00	0,00
		3.269.550.942,00	17.580.000,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.01	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN**	3.467.431.734,00	17.580.000,00	0,00	0,00
		3.269.550.942,00	17.580.000,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.01 . 01	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN**	3.467.431.734,00	17.580.000,00	0,00	0,00
		3.269.550.942,00	17.580.000,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	1.754.238.044,00	0,00	0,00	0,00
		1.682.949.388,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.754.238.044,00	0,00	0,00	0,00
		1.682.949.388,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	233.536.390,00	0,00	0,00	0,00
		233.515.100,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.966.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.965.100,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.555.340,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		26.555.300,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.970.250,00	0,00	0,00	0,00
		6.961.300,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.223.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.223.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.892.100,00	0,00	0,00	0,00
		19.892.100,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.929.700,00	0,00	0,00	0,00
		154.918.300,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	0,00	17.580.000,00	0,00	0,00
		0,00	17.580.000,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 . 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	17.580.000,00	0,00	0,00
		0,00	17.580.000,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	918.211.000,00	0,00	0,00	0,00
		857.932.504,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.011.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.011.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	147.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		140.681.504,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	764.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		710.240.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	94.920.000,00	0,00	0,00	0,00
		94.915.800,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.995.800,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.420.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		17.420.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18	***Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah***	45.252.300,00	0,00	0,00	0,00
		24.705.900,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/K	45.252.300,00	0,00	0,00	0,00
		24.705.900,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19	***Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	197.379.000,00	0,00	0,00	0,00
		186.376.650,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	197.379.000,00	0,00	0,00	0,00
		186.376.650,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 21	***Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan***	223.895.000,00	0,00	0,00	0,00
		189.155.600,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 21 . 02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	30.970.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.150.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 21 . 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	192.925.000,00	0,00	0,00	0,00
		171.005.600,00	0,00	0,00	0,00
2.12	**Penanaman Modal**	4.142.355.670,00	98.264.900,00	0,00	0,00
		4.040.848.554,00	97.386.000,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.01	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	4.142.355.670,00	98.264.900,00	0,00	0,00
		4.040.848.554,00	97.386.000,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.01 . 01	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	4.142.355.670,00	98.264.900,00	0,00	0,00
		4.040.848.554,00	97.386.000,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	1.831.097.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.771.408.649,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.831.097.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.771.408.649,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	351.828.800,00	0,00	0,00	0,00
		351.551.540,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.635.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.633.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.855.400,00	0,00	0,00	0,00
		56.826.100,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.150.600,00	0,00	0,00	0,00
		10.148.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.182.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.182.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.650.500,00	0,00	0,00	0,00
		26.641.400,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227.355.300,00	0,00	0,00	0,00
		227.121.040,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	0,00	98.264.900,00	0,00	0,00
		0,00	97.386.000,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	98.264.900,00	0,00	0,00
		0,00	97.386.000,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	510.720.000,00	0,00	0,00	0,00
		505.571.383,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.080.000,00	0,00	0,00	0,00
		71.291.383,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	434.640.000,00	0,00	0,00	0,00
		434.280.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	92.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		92.632.955,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.221.955,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.491.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.980.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		3.980.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.940.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15	***Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	150.322.000,00	0,00	0,00	0,00
		135.947.250,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	150.322.000,00	0,00	0,00	0,00
		135.947.250,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16	***Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota***	94.073.800,00	0,00	0,00	0,00
		93.085.200,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	94.073.800,00	0,00	0,00	0,00
		93.085.200,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17	***Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	650.391.750,00	0,00	0,00	0,00
		635.884.329,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	650.391.750,00	0,00	0,00	0,00
		635.884.329,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18	***Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah***	135.070.300,00	0,00	0,00	0,00
		134.411.800,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	135.070.300,00	0,00	0,00	0,00
		134.411.800,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19	***Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	326.122.020,00	0,00	0,00	0,00
		320.355.448,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	48.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.120.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	181.222.020,00	0,00	0,00	0,00
		175.645.448,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	96.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		96.590.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.13	**Kepemudaan dan Olah Raga**	1.234.798.450,00	3.030.200,00	0,00	0,00
		1.219.886.900,00	1.780.000,00	0,00	0,00
2.13 . 2.13.01	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**	1.234.798.450,00	3.030.200,00	0,00	0,00
		1.219.886.900,00	1.780.000,00	0,00	0,00
2.13 . 2.13.01 . 01	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**	1.234.798.450,00	3.030.200,00	0,00	0,00
		1.219.886.900,00	1.780.000,00	0,00	0,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 15	***Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemu***	141.823.150,00	0,00	0,00	0,00
		131.752.300,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 15 . 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	68.183.150,00	0,00	0,00	0,00
		67.595.500,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 15 . 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	73.640.000,00	0,00	0,00	0,00
		64.156.800,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 15 . 04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 18	***Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.732.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 18 . 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.732.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19	***Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Prov***	172.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		171.990.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 . 04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	172.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		171.990.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 21	***Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi***	745.475.300,00	3.030.200,00	0,00	0,00
		741.412.600,00	1.780.000,00	0,00	0,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 21 . 03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	745.475.300,00	3.030.200,00	0,00	0,00
		741.412.600,00	1.780.000,00	0,00	0,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 22	***Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan***	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 22 . 08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14	**Statistik**	118.339.500,00	0,00	0,00	0,00
		117.873.300,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2.10.01	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	118.339.500,00	0,00	0,00	0,00
		117.873.300,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2.10.01 . 01	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	118.339.500,00	0,00	0,00	0,00
		117.873.300,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15	***Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota***	118.339.500,00	0,00	0,00	0,00
		117.873.300,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	61.354.300,00	0,00	0,00	0,00
		61.272.700,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	19.529.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.389.600,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	37.456.200,00	0,00	0,00	0,00
		37.211.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15	**Persandian**	52.234.250,00	0,00	0,00	0,00
		50.608.350,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2.10.01	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	52.234.250,00	0,00	0,00	0,00
		50.608.350,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2.10.01 . 01	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	52.234.250,00	0,00	0,00	0,00
		50.608.350,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2.10.01 . 01 . 15	***Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerinta***	52.234.250,00	0,00	0,00	0,00
		50.608.350,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2.10.01 . 01 . 15 . 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	52.234.250,00	0,00	0,00	0,00
		50.608.350,00	0,00	0,00	0,00
2.16	**Kebudayaan**	5.871.892.514,00	14.300.000,00	0,00	0,00
		5.766.856.523,00	14.100.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.16 . 2.13.01	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**	5.871.892.514,00	14.300.000,00	0,00	0,00
		5.766.856.523,00	14.100.000,00	0,00	0,00
2.16 . 2.13.01 . 01	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**	5.871.892.514,00	14.300.000,00	0,00	0,00
		5.766.856.523,00	14.100.000,00	0,00	0,00
2.16 . 2.13.01 . 01 . 01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	58.060.800,00	0,00	0,00	0,00
		57.166.008,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2.13.01 . 01 . 01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58.060.800,00	0,00	0,00	0,00
		57.166.008,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2.13.01 . 01 . 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	2.141.786.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.072.987.518,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2.13.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.141.786.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.072.987.518,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2.13.01 . 01 . 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	339.317.314,00	14.300.000,00	0,00	0,00
		338.510.459,00	14.100.000,00	0,00	0,00
2.16 . 2.13.01 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.144.400,00	0,00	0,00	0,00
		5.144.300,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2.13.01 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.207.914,00	14.300.000,00	0,00	0,00
		33.183.914,00	14.100.000,00	0,00	0,00
2.16 . 2.13.01 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.781.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2.13.01 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.210.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.210.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2.13.01 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	259.775.000,00	0,00	0,00	0,00
		259.191.245,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2.13.01 . 01 . 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	839.685.000,00	0,00	0,00	0,00
		814.535.669,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2.13.01 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		124.301.669,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2.13.01 . 01 . 08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.650.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.16 . 2.13.01 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	683.385.000,00	0,00	0,00	0,00
		674.584.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2.13.01 . 01 . 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	98.578.800,00	0,00	0,00	0,00
		96.694.650,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2.13.01 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.241.800,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2.13.01 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.005.850,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2.13.01 . 01 . 09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.628.800,00	0,00	0,00	0,00
		14.447.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2.13.01 . 01 . 15	***Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah K***	1.658.483.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.653.603.650,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2.13.01 . 01 . 15 . 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.658.483.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.653.603.650,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2.13.01 . 01 . 15 . 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2.13.01 . 01 . 17	***Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupate***	254.977.850,00	0,00	0,00	0,00
		254.814.919,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2.13.01 . 01 . 17 . 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	254.977.850,00	0,00	0,00	0,00
		254.814.919,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2.13.01 . 01 . 18	***Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabup***	410.061.150,00	0,00	0,00	0,00
		409.509.750,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2.13.01 . 01 . 18 . 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	410.061.150,00	0,00	0,00	0,00
		409.509.750,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2.13.01 . 01 . 20	***Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota***	70.942.600,00	0,00	0,00	0,00
		69.033.900,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2.13.01 . 01 . 20 . 01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	70.942.600,00	0,00	0,00	0,00
		69.033.900,00	0,00	0,00	0,00
2.17	**Perpustakaan**	3.066.374.257,00	729.350.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		2.968.662.357,00	707.887.100,00	0,00	0,00
2.17 . 2.17.01	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	3.066.374.257,00	729.350.000,00	0,00	0,00
		2.968.662.357,00	707.887.100,00	0,00	0,00
2.17 . 2.17.01 . 01	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	3.066.374.257,00	729.350.000,00	0,00	0,00
		2.968.662.357,00	707.887.100,00	0,00	0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	2.410.457.600,00	0,00	0,00	0,00
		2.324.133.309,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.410.457.600,00	0,00	0,00	0,00
		2.324.133.309,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	141.605.407,00	6.000.000,00	0,00	0,00
		140.877.725,00	5.800.000,00	0,00	0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.752.607,00	0,00	0,00	0,00
		9.745.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.240.900,00	6.000.000,00	0,00	0,00
		26.760.300,00	5.800.000,00	0,00	0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.980.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.037.400,00	0,00	0,00	0,00
		4.037.400,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.574.500,00	0,00	0,00	0,00
		88.355.025,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	0,00	223.350.000,00	0,00	0,00
		0,00	219.180.500,00	0,00	0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 05	Pengadaan Mebel	0,00	210.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	205.832.000,00	0,00	0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	13.350.000,00	0,00	0,00
		0,00	13.348.500,00	0,00	0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	379.880.000,00	0,00	0,00	0,00
		370.747.023,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.080.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		25.587.023,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	351.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		345.160.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	96.392.000,00	0,00	0,00	0,00
		94.898.600,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.026.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.654.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.996.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.974.600,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.370.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.270.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15	***Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	24.243.250,00	500.000.000,00	0,00	0,00
		24.243.250,00	482.906.600,00	0,00	0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	285.175.000,00	0,00	0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	24.243.250,00	0,00	0,00	0,00
		24.243.250,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 08	Pengembangan Bahan Pustaka	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	197.731.600,00	0,00	0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 16	***Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	13.796.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.762.450,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 16 . 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	13.796.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.762.450,00	0,00	0,00	0,00
2.18	**Kearsipan**	45.810.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.273.750,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2.17.01	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	45.810.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.273.750,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.18 . 2.17.01 . 01	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	45.810.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.273.750,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2.17.01 . 01 . 15	***Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota***	33.605.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.172.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	11.245.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.145.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	22.360.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.027.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2.17.01 . 01 . 16	***Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota***	12.205.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.101.750,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2.17.01 . 01 . 16 . 02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	12.205.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.101.750,00	0,00	0,00	0,00
3	**Urusan Pilihan**	24.379.980.004,00	1.448.983.618,00	0,00	0,00
		23.803.463.150,00	1.426.478.100,00	0,00	0,00
3.01	**Kelautan dan Perikanan**	1.320.330.800,00	183.000.000,00	0,00	0,00
		1.316.534.800,00	182.617.000,00	0,00	0,00
3.01 . 2.03.01	**DINAS PANGAN DAN PERIKANAN**	1.320.330.800,00	183.000.000,00	0,00	0,00
		1.316.534.800,00	182.617.000,00	0,00	0,00
3.01 . 2.03.01 . 01	**DINAS PANGAN DAN PERIKANAN**	1.320.330.800,00	183.000.000,00	0,00	0,00
		1.316.534.800,00	182.617.000,00	0,00	0,00
3.01 . 2.03.01 . 01 . 24	***Pengelolaan Pembudidayaan Ikan***	1.283.876.800,00	183.000.000,00	0,00	0,00
		1.280.143.200,00	182.617.000,00	0,00	0,00
3.01 . 2.03.01 . 01 . 24 . 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/	1.023.625.100,00	0,00	0,00	0,00
		1.021.146.900,00	0,00	0,00	0,00
3.01 . 2.03.01 . 01 . 24 . 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	260.251.700,00	183.000.000,00	0,00	0,00
		258.996.300,00	182.617.000,00	0,00	0,00
3.01 . 2.03.01 . 01 . 25	***Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota***	22.385.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.374.700,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
3.01 . 2.03.01 . 01 . 25 . 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam	22.385.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.374.700,00	0,00	0,00	0,00
3.01 . 2.03.01 . 01 . 28	***Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota***	14.069.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.016.900,00	0,00	0,00	0,00
3.01 . 2.03.01 . 01 . 28 . 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.069.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.016.900,00	0,00	0,00	0,00
3.02	**Pariwisata**	361.916.600,00	105.000.000,00	0,00	0,00
		360.482.193,00	84.786.100,00	0,00	0,00
3.02 . 2.13.01	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**	361.916.600,00	105.000.000,00	0,00	0,00
		360.482.193,00	84.786.100,00	0,00	0,00
3.02 . 2.13.01 . 01	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**	361.916.600,00	105.000.000,00	0,00	0,00
		360.482.193,00	84.786.100,00	0,00	0,00
3.02 . 2.13.01 . 01 . 16	***Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota***	141.886.600,00	105.000.000,00	0,00	0,00
		140.935.950,00	84.786.100,00	0,00	0,00
3.02 . 2.13.01 . 01 . 16 . 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	141.886.600,00	105.000.000,00	0,00	0,00
		140.935.950,00	84.786.100,00	0,00	0,00
3.02 . 2.13.01 . 01 . 19	***Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota***	189.796.250,00	0,00	0,00	0,00
		189.556.343,00	0,00	0,00	0,00
3.02 . 2.13.01 . 01 . 19 . 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	189.796.250,00	0,00	0,00	0,00
		189.556.343,00	0,00	0,00	0,00
3.02 . 2.13.01 . 01 . 22	***Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar***	30.233.750,00	0,00	0,00	0,00
		29.989.900,00	0,00	0,00	0,00
3.02 . 2.13.01 . 01 . 22 . 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisa	30.233.750,00	0,00	0,00	0,00
		29.989.900,00	0,00	0,00	0,00
3.03	**Pertanian**	19.051.020.679,00	1.152.483.618,00	0,00	0,00
		18.627.841.114,00	1.151.075.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
3.03 . 3.03.01	**DINAS PERTANIAN**	19.051.020.679,00	1.152.483.618,00	0,00	0,00
		18.627.841.114,00	1.151.075.000,00	0,00	0,00
3.03 . 3.03.01 . 01	**DINAS PERTANIAN**	19.051.020.679,00	1.152.483.618,00	0,00	0,00
		18.627.841.114,00	1.151.075.000,00	0,00	0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	10.825.644.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.553.779.599,00	0,00	0,00	0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.825.644.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.553.779.599,00	0,00	0,00	0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	402.855.830,00	0,00	0,00	0,00
		402.637.762,00	0,00	0,00	0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.625.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.625.000,00	0,00	0,00	0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.726.380,00	0,00	0,00	0,00
		83.723.561,00	0,00	0,00	0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.350.000,00	0,00	0,00	0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	239.004.450,00	0,00	0,00	0,00
		238.939.201,00	0,00	0,00	0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	1.575.315.600,00	0,00	0,00	0,00
		1.536.274.679,00	0,00	0,00	0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.591.679,00	0,00	0,00	0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.165.600,00	0,00	0,00	0,00
		5.163.000,00	0,00	0,00	0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.501.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.484.520.000,00	0,00	0,00	0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	338.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		304.849.912,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
3.03 . 3.03.01 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.429.989,00	0,00	0,00	0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	312.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		278.419.923,00	0,00	0,00	0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15	***Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian***	35.515.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.915.700,00	0,00	0,00	0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	16.405.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.895.350,00	0,00	0,00	0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	19.110.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.020.350,00	0,00	0,00	0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 16	***Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota***	217.835.000,00	0,00	0,00	0,00
		214.827.700,00	0,00	0,00	0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	17.635.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.631.100,00	0,00	0,00	0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	200.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		197.196.600,00	0,00	0,00	0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20	***Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain***	404.799.750,00	4.000.000,00	0,00	0,00
		401.641.550,00	4.000.000,00	0,00	0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota L	404.799.750,00	4.000.000,00	0,00	0,00
		401.641.550,00	4.000.000,00	0,00	0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22	***Pembangunan Prasarana Pertanian***	4.811.711.549,00	855.000.000,00	0,00	0,00
		4.740.751.362,00	854.050.000,00	0,00	0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	648.979.700,00	0,00	0,00	0,00
		646.099.700,00	0,00	0,00	0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	114.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		114.000.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.298.940.049,00	0,00	0,00	0,00
		3.272.285.834,00	0,00	0,00	0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	228.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		228.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	208.682.000,00	855.000.000,00	0,00	0,00
		198.978.828,00	854.050.000,00	0,00	0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	313.109.800,00	0,00	0,00	0,00
		281.387.000,00	0,00	0,00	0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 32	***Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan***	175.532.950,00	0,00	0,00	0,00
		175.280.850,00	0,00	0,00	0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 32 . 01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan,	175.532.950,00	0,00	0,00	0,00
		175.280.850,00	0,00	0,00	0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 34	***Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian***	263.011.000,00	293.483.618,00	0,00	0,00
		262.882.000,00	293.025.000,00	0,00	0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 34 . 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan I	244.406.100,00	0,00	0,00	0,00
		244.320.300,00	0,00	0,00	0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 34 . 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	18.604.900,00	293.483.618,00	0,00	0,00
		18.561.700,00	293.025.000,00	0,00	0,00
3.06	**Perdagangan**	114.340.725,00	0,00	0,00	0,00
		112.586.197,00	0,00	0,00	0,00
3.06 . 2.11.01	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN**	114.340.725,00	0,00	0,00	0,00
		112.586.197,00	0,00	0,00	0,00
3.06 . 2.11.01 . 01	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN**	114.340.725,00	0,00	0,00	0,00
		112.586.197,00	0,00	0,00	0,00
3.06 . 2.11.01 . 01 . 22	***Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan***	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.06 . 2.11.01 . 01 . 22 . 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
3.06 . 2.11.01 . 01 . 23	***Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya***	13.730.850,00	0,00	0,00	0,00
		13.508.400,00	0,00	0,00	0,00
3.06 . 2.11.01 . 01 . 23 . 02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	13.730.850,00	0,00	0,00	0,00
		13.508.400,00	0,00	0,00	0,00
3.06 . 2.11.01 . 01 . 25	***Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota***	22.368.360,00	0,00	0,00	0,00
		22.110.600,00	0,00	0,00	0,00
3.06 . 2.11.01 . 01 . 25 . 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	22.368.360,00	0,00	0,00	0,00
		22.110.600,00	0,00	0,00	0,00
3.06 . 2.11.01 . 01 . 28	***Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasa***	78.241.515,00	0,00	0,00	0,00
		76.967.197,00	0,00	0,00	0,00
3.06 . 2.11.01 . 01 . 28 . 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	63.398.605,00	0,00	0,00	0,00
		62.470.197,00	0,00	0,00	0,00
3.06 . 2.11.01 . 01 . 28 . 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	14.842.910,00	0,00	0,00	0,00
		14.497.000,00	0,00	0,00	0,00
3.07	**Perindustrian**	460.100.600,00	0,00	0,00	0,00
		432.490.150,00	0,00	0,00	0,00
3.07 . 2.11.01	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN**	460.100.600,00	0,00	0,00	0,00
		432.490.150,00	0,00	0,00	0,00
3.07 . 2.11.01 . 01	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN**	460.100.600,00	0,00	0,00	0,00
		432.490.150,00	0,00	0,00	0,00
3.07 . 2.11.01 . 01 . 15	***Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/***	397.842.400,00	0,00	0,00	0,00
		370.399.200,00	0,00	0,00	0,00
3.07 . 2.11.01 . 01 . 15 . 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	397.842.400,00	0,00	0,00	0,00
		370.399.200,00	0,00	0,00	0,00
3.07 . 2.11.01 . 01 . 16	***Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan***	24.600.500,00	0,00	0,00	0,00
		24.510.550,00	0,00	0,00	0,00
3.07 . 2.11.01 . 01 . 16 . 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional	24.600.500,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		24.510.550,00	0,00	0,00	0,00
3.07 . 2.11.01 . 01 . 17	***Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota***	37.657.700,00	0,00	0,00	0,00
		37.580.400,00	0,00	0,00	0,00
3.07 . 2.11.01 . 01 . 17 . 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	37.657.700,00	0,00	0,00	0,00
		37.580.400,00	0,00	0,00	0,00
3.08	**Transmigrasi**	3.072.270.600,00	8.500.000,00	0,00	0,00
		2.953.528.696,00	8.000.000,00	0,00	0,00
3.08 . 3.08.01	**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**	3.072.270.600,00	8.500.000,00	0,00	0,00
		2.953.528.696,00	8.000.000,00	0,00	0,00
3.08 . 3.08.01 . 01	**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**	3.072.270.600,00	8.500.000,00	0,00	0,00
		2.953.528.696,00	8.000.000,00	0,00	0,00
3.08 . 3.08.01 . 01 . 01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	18.732.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.552.455,00	0,00	0,00	0,00
3.08 . 3.08.01 . 01 . 01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.732.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.552.455,00	0,00	0,00	0,00
3.08 . 3.08.01 . 01 . 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	2.222.718.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.158.432.661,00	0,00	0,00	0,00
3.08 . 3.08.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.222.718.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.158.432.661,00	0,00	0,00	0,00
3.08 . 3.08.01 . 01 . 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	230.444.400,00	8.500.000,00	0,00	0,00
		218.272.701,00	8.000.000,00	0,00	0,00
3.08 . 3.08.01 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.341.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.339.000,00	0,00	0,00	0,00
3.08 . 3.08.01 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.531.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00
		27.341.850,00	8.000.000,00	0,00	0,00
3.08 . 3.08.01 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.878.000,00	0,00	0,00	0,00
3.08 . 3.08.01 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.886.400,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		14.731.100,00	0,00	0,00	0,00
3.08 . 3.08.01 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.786.000,00	0,00	0,00	0,00
		156.982.751,00	0,00	0,00	0,00
3.08 . 3.08.01 . 01 . 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	509.860.000,00	0,00	0,00	0,00
		476.410.029,00	0,00	0,00	0,00
3.08 . 3.08.01 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.780.029,00	0,00	0,00	0,00
3.08 . 3.08.01 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	452.860.000,00	0,00	0,00	0,00
		433.630.000,00	0,00	0,00	0,00
3.08 . 3.08.01 . 01 . 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	56.140.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.329.500,00	0,00	0,00	0,00
3.08 . 3.08.01 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.692.000,00	0,00	0,00	0,00
3.08 . 3.08.01 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.757.500,00	0,00	0,00	0,00
3.08 . 3.08.01 . 01 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.140.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.880.000,00	0,00	0,00	0,00
3.08 . 3.08.01 . 01 . 17	***Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian***	34.376.200,00	0,00	0,00	0,00
		33.531.350,00	0,00	0,00	0,00
3.08 . 3.08.01 . 01 . 17 . 01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	34.376.200,00	0,00	0,00	0,00
		33.531.350,00	0,00	0,00	0,00
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**	234.242.142.883,00	5.756.998.600,00	0,00	0,00
		172.436.425.587,00	5.618.092.399,00	0,00	0,00
4.01	**Administrasi Pemerintahan**	30.138.581.996,00	4.290.804.100,00	0,00	0,00
		29.975.200.127,00	4.269.551.200,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	30.138.581.996,00	4.290.804.100,00	0,00	0,00
		29.975.200.127,00	4.269.551.200,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01	**SEKRETARIAT DAERAH**	30.138.581.996,00	4.290.804.100,00	0,00	0,00
		29.975.200.127,00	4.269.551.200,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.01 . 4.01.01 . 01 . 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	6.595.512.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.479.563.583,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.595.512.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.479.563.583,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		196.238.362,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 03 . 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		196.238.362,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	3.584.692.448,00	6.300.000,00	0,00	0,00
		3.584.456.928,00	6.300.000,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	243.516.700,00	0,00	0,00	0,00
		243.497.040,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	261.747.598,00	3.500.000,00	0,00	0,00
		261.747.598,00	3.500.000,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.312.850,00	2.800.000,00	0,00	0,00
		30.294.850,00	2.800.000,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.953.860.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.953.860.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	91.101.500,00	0,00	0,00	0,00
		91.100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.004.153.800,00	0,00	0,00	0,00
		1.003.957.440,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	30.250.000,00	3.082.154.000,00	0,00	0,00
		30.250.000,00	3.066.094.000,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 07 . 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	947.355.000,00	0,00	0,00
		0,00	947.210.000,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 07 . 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	1.775.155.000,00	0,00	0,00
		0,00	1.759.340.000,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 07 . 05	Pengadaan Mebel	0,00	89.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	89.000.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.01 . 4.01.01 . 01 . 07 . 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.250.000,00	270.644.000,00	0,00	0,00
		30.250.000,00	270.544.000,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	5.379.102.300,00	0,00	0,00	0,00
		5.372.817.067,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.600.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	780.814.300,00	0,00	0,00	0,00
		780.553.290,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	631.538.000,00	0,00	0,00	0,00
		631.538.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.940.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.934.125.777,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	1.899.088.950,00	545.046.000,00	0,00	0,00
		1.899.069.288,00	542.252.200,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	297.843.800,00	0,00	0,00	0,00
		297.843.800,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.084.495.150,00	0,00	0,00	0,00
		1.084.475.488,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	174.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		174.650.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	342.100.000,00	545.046.000,00	0,00	0,00
		342.100.000,00	542.252.200,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 15	***Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah***	1.185.433.041,00	0,00	0,00	0,00
		1.178.511.345,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 15 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	177.933.041,00	0,00	0,00	0,00
		171.015.345,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 15 . 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil K	507.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		507.500.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.01 . 4.01.01 . 01 . 15 . 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 15 . 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dae	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		399.996.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 16	***Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah***	55.494.000,00	470.019.200,00	0,00	0,00
		55.470.000,00	469.802.000,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 16 . 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	35.470.000,00	344.512.000,00	0,00	0,00
		35.470.000,00	344.512.000,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 16 . 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	20.024.000,00	125.507.200,00	0,00	0,00
		20.000.000,00	125.290.000,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 16 . 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17	***Penataan Organisasi***	219.357.952,00	0,00	0,00	0,00
		215.708.150,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17 . 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	97.292.802,00	0,00	0,00	0,00
		95.467.800,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17 . 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	47.762.650,00	0,00	0,00	0,00
		47.287.350,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17 . 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	74.302.500,00	0,00	0,00	0,00
		72.953.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 18	***Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan***	4.804.974.100,00	24.228.000,00	0,00	0,00
		4.804.871.850,00	24.228.000,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 18 . 01	Fasilitasi Keprotokolan	2.928.146.000,00	24.228.000,00	0,00	0,00
		2.928.046.250,00	24.228.000,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 18 . 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	33.622.100,00	0,00	0,00	0,00
		33.622.100,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 18 . 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.843.206.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.843.203.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 19	***Administrasi Tata Pemerintahan***	269.657.000,00	0,00	0,00	0,00
		249.902.480,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.01 . 4.01.01 . 01 . 19 . 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	64.823.000,00	0,00	0,00	0,00
		64.805.700,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 19 . 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	32.370.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.259.780,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 19 . 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	172.464.000,00	0,00	0,00	0,00
		152.837.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 20	***Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat***	4.119.292.640,00	39.250.000,00	0,00	0,00
		4.117.765.605,00	39.250.000,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 20 . 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.918.103.130,00	39.250.000,00	0,00	0,00
		3.916.591.095,00	39.250.000,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 20 . 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan So	163.625.810,00	0,00	0,00	0,00
		163.625.810,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 20 . 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Ma	37.563.700,00	0,00	0,00	0,00
		37.548.700,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 21	***Fasilitasi dan Koordinasi Hukum***	337.445.500,00	12.500.000,00	0,00	0,00
		337.351.800,00	11.000.000,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 21 . 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	138.672.400,00	12.500.000,00	0,00	0,00
		138.672.400,00	11.000.000,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 21 . 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	170.549.100,00	0,00	0,00	0,00
		170.549.100,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 21 . 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	28.224.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.130.300,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 22	***Fasilitasi Kerjasama Daerah***	50.966.760,00	0,00	0,00	0,00
		50.966.760,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 22 . 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	50.966.760,00	0,00	0,00	0,00
		50.966.760,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 23	***Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian***	346.767.025,00	0,00	0,00	0,00
		346.588.003,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 23 . 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD	77.832.050,00	0,00	0,00	0,00
		77.789.250,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.01 . 4.01.01 . 01 . 23 . 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	99.615.600,00	0,00	0,00	0,00
		99.494.700,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 23 . 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	169.319.375,00	0,00	0,00	0,00
		169.304.053,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 24	***Pelaksanaan Administrasi Pembangunan***	205.050.500,00	0,00	0,00	0,00
		204.634.900,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 24 . 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	53.532.000,00	0,00	0,00	0,00
		53.289.800,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 24 . 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	79.271.900,00	0,00	0,00	0,00
		79.246.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 24 . 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	72.246.600,00	0,00	0,00	0,00
		72.098.600,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 25	***Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa***	759.007.780,00	111.306.900,00	0,00	0,00
		754.646.806,00	110.625.000,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 25 . 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	529.620.500,00	11.578.000,00	0,00	0,00
		529.389.576,00	11.550.000,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 25 . 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	166.792.440,00	75.000.000,00	0,00	0,00
		162.869.440,00	74.525.000,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 25 . 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	62.594.840,00	24.728.900,00	0,00	0,00
		62.387.790,00	24.550.000,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 26	***Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam***	96.490.000,00	0,00	0,00	0,00
		96.387.200,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.01 . 01 . 26 . 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkunga	96.490.000,00	0,00	0,00	0,00
		96.387.200,00	0,00	0,00	0,00
4.02	**Pengawasan**	5.210.674.100,00	218.977.800,00	0,00	0,00
		5.075.869.548,00	206.151.300,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06	**INSPEKTORAT KABUPATEN**	5.210.674.100,00	218.977.800,00	0,00	0,00
		5.075.869.548,00	206.151.300,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01	**INSPEKTORAT KABUPATEN**	5.210.674.100,00	218.977.800,00	0,00	0,00
		5.075.869.548,00	206.151.300,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.02 . 4.01.06 . 01 . 01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	20.215.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.975.700,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.215.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.975.700,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	3.020.034.050,00	0,00	0,00	0,00
		2.953.503.103,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.020.034.050,00	0,00	0,00	0,00
		2.953.503.103,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	243.892.550,00	0,00	0,00	0,00
		237.306.968,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 05 . 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	243.892.550,00	0,00	0,00	0,00
		237.306.968,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	455.519.950,00	141.586.800,00	0,00	0,00
		451.189.087,00	136.686.800,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.745.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.740.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.294.950,00	141.586.800,00	0,00	0,00
		78.188.637,00	136.686.800,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.285.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.560.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.484.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.320.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	318.920.000,00	0,00	0,00	0,00
		318.171.450,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	0,00	77.391.000,00	0,00	0,00
		0,00	69.464.500,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 07 . 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.02 . 4.01.06 . 01 . 07 . 05	Pengadaan Mebel	0,00	77.391.000,00	0,00	0,00
		0,00	69.464.500,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	415.550.000,00	0,00	0,00	0,00
		400.183.268,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.556.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.440.000,00	0,00	0,00	0,00
		86.208.668,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.488.600,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	285.260.000,00	0,00	0,00	0,00
		281.930.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	259.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		255.041.838,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.739.100,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		76.598.738,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		174.704.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 15	***Penyelenggaraan Pengawasan Internal***	491.444.450,00	0,00	0,00	0,00
		461.999.358,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 15 . 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	81.264.600,00	0,00	0,00	0,00
		79.187.500,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 15 . 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	93.518.800,00	0,00	0,00	0,00
		87.373.750,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 15 . 03	Reviu Laporan Kinerja	51.225.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.758.750,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 15 . 04	Reviu Laporan Keuangan	81.071.050,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		80.071.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 15 . 05	Pengawasan Desa	63.231.500,00	0,00	0,00	0,00
		60.417.356,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 15 . 06	Kerjasama Pengawasan Internal	39.670.500,00	0,00	0,00	0,00
		38.829.650,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 15 . 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	81.463.000,00	0,00	0,00	0,00
		65.361.352,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 16	***Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu***	30.775.500,00	0,00	0,00	0,00
		28.144.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 16 . 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30.775.500,00	0,00	0,00	0,00
		28.144.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 17	***Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan***	20.559.500,00	0,00	0,00	0,00
		20.203.600,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 17 . 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	20.559.500,00	0,00	0,00	0,00
		20.203.600,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 18	***Pendampingan dan Asistensi***	253.183.100,00	0,00	0,00	0,00
		248.322.626,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 18 . 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	118.985.500,00	0,00	0,00	0,00
		118.588.550,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 18 . 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	46.174.600,00	0,00	0,00	0,00
		45.473.750,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4.01.06 . 01 . 18 . 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	88.023.000,00	0,00	0,00	0,00
		84.260.326,00	0,00	0,00	0,00
4.03	**Perencanaan**	4.879.318.352,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		4.666.985.910,00	9.850.000,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03	**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	4.879.318.352,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		4.666.985.910,00	9.850.000,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01	**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	4.879.318.352,00	10.000.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		4.666.985.910,00	9.850.000,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01 . 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	2.409.728.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.314.258.313,00	0,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.409.728.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.314.258.313,00	0,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01 . 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	382.383.652,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		374.812.230,00	9.850.000,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.995.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.820.000,00	0,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.198.352,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		75.806.352,00	9.850.000,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.170.700,00	0,00	0,00	0,00
		20.151.050,00	0,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.804.000,00	0,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.223.100,00	0,00	0,00	0,00
		25.137.100,00	0,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	219.796.500,00	0,00	0,00	0,00
		219.093.728,00	0,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01 . 07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01 . 07 . 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01 . 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	566.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		513.186.252,00	0,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		83.236.252,00	0,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01 . 08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.560.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		11.390.000,00	0,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	460.540.000,00	0,00	0,00	0,00
		412.560.000,00	0,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01 . 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	46.790.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.133.394,00	0,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.090.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.580.912,00	0,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.552.482,00	0,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01 . 09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01 . 15	***Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan***	968.022.900,00	0,00	0,00	0,00
		947.886.314,00	0,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01 . 15 . 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	138.024.450,00	0,00	0,00	0,00
		131.104.518,00	0,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01 . 15 . 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	829.998.450,00	0,00	0,00	0,00
		816.781.796,00	0,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01 . 16	***Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah***	22.992.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.995.400,00	0,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01 . 16 . 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	22.992.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.995.400,00	0,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01 . 16 . 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01 . 17	***Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah***	15.821.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.606.700,00	0,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01 . 17 . 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	15.821.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.606.700,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.03 . 4.01.03 . 01 . 18	***Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Man***	128.970.950,00	0,00	0,00	0,00
		125.879.624,00	0,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01 . 18 . 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	58.005.500,00	0,00	0,00	0,00
		56.080.796,00	0,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01 . 18 . 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	70.965.450,00	0,00	0,00	0,00
		69.798.828,00	0,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01 . 19	***Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya***	98.967.950,00	0,00	0,00	0,00
		91.291.050,00	0,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01 . 19 . 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.272.900,00	0,00	0,00	0,00
		48.198.300,00	0,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01 . 19 . 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	17.042.200,00	0,00	0,00	0,00
		15.154.150,00	0,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01 . 19 . 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	31.652.850,00	0,00	0,00	0,00
		27.938.600,00	0,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01 . 20	***Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan***	239.341.900,00	0,00	0,00	0,00
		234.936.633,00	0,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01 . 20 . 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01 . 20 . 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	199.369.000,00	0,00	0,00	0,00
		195.392.853,00	0,00	0,00	0,00
4.03 . 4.01.03 . 01 . 20 . 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	39.972.900,00	0,00	0,00	0,00
		39.543.780,00	0,00	0,00	0,00
4.04	**Keuangan**	18.613.837.945,00	180.718.900,00	200.000.000,00	113.525.513.885,00
		18.067.649.759,00	180.450.000,00	164.439.330,00	112.294.731.483,00
4.04 . 4.01.04	**BADAN KEUANGAN DAERAH**	18.613.837.945,00	180.718.900,00	200.000.000,00	113.525.513.885,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		18.067.649.759,00	180.450.000,00	164.439.330,00	112.294.731.483,00
4.04 . 4.01.04 . 01	**BADAN KEUANGAN DAERAH**	18.613.837.945,00	180.718.900,00	200.000.000,00	113.525.513.885,00
		18.067.649.759,00	180.450.000,00	164.439.330,00	112.294.731.483,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	12.201.430.383,00	0,00	0,00	0,00
		11.821.716.251,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.201.430.383,00	0,00	0,00	0,00
		11.821.716.251,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.468.000,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 05 . 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.468.000,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	1.140.539.962,00	300.000,00	0,00	0,00
		1.138.203.292,00	300.000,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.715.812,00	0,00	0,00	0,00
		14.643.000,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	197.569.000,00	0,00	0,00	0,00
		197.568.000,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	74.256.650,00	300.000,00	0,00	0,00
		74.243.300,00	300.000,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.344.000,00	0,00	0,00	0,00
		88.248.000,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	225.792.900,00	0,00	0,00	0,00
		225.792.900,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	539.861.600,00	0,00	0,00	0,00
		537.708.092,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	0,00	81.418.900,00	0,00	0,00
		0,00	81.150.000,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 07 . 05	Pengadaan Mebel	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		0,00	24.900.000,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 07 . 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	56.418.900,00	0,00	0,00
		0,00	56.250.000,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	1.124.683.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.070.299.384,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		169.650,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	195.060.000,00	0,00	0,00	0,00
		183.379.984,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	134.505.500,00	0,00	0,00	0,00
		134.269.750,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	794.118.000,00	0,00	0,00	0,00
		752.480.000,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	170.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		152.848.540,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.590.000,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		61.799.400,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	82.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		82.459.140,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 15	***Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah***	1.691.223.150,00	0,00	0,00	0,00
		1.638.778.736,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 15 . 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	203.204.050,00	0,00	0,00	0,00
		203.054.160,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 15 . 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	206.642.500,00	0,00	0,00	0,00
		206.481.416,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 15 . 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	309.875.800,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		297.624.810,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 15 . 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	971.500.800,00	0,00	0,00	0,00
		931.618.350,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 16	***Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah***	148.438.000,00	0,00	0,00	0,00
		145.124.925,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 16 . 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Ka	42.432.000,00	0,00	0,00	0,00
		41.205.936,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 16 . 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	106.006.000,00	0,00	0,00	0,00
		103.918.989,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17	***Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daera***	398.727.100,00	0,00	0,00	0,00
		389.460.236,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	31.757.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.548.250,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	125.784.000,00	0,00	0,00	0,00
		123.309.650,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan	120.859.750,00	0,00	0,00	0,00
		120.842.750,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	70.345.500,00	0,00	0,00	0,00
		64.245.200,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	21.180.600,00	0,00	0,00	0,00
		20.777.250,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 17 . 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akur	28.800.250,00	0,00	0,00	0,00
		28.737.136,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 18	***Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah***	0,00	0,00	200.000.000,00	113.525.513.885,00
		0,00	0,00	164.439.330,00	112.294.731.483,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 18 . 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0,00	0,00		113.525.513.885,00
		0,00	0,00		112.294.731.483,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.04 . 4.01.04 . 01 . 18 . 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0,00	0,00	200.000.000,00	
		0,00	0,00	164.439.330,00	
4.04 . 4.01.04 . 01 . 19	***Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah***	194.273.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00
		192.581.411,00	99.000.000,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 19 . 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	194.273.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00
		192.581.411,00	99.000.000,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20	***Pengelolaan Barang Milik Daerah***	896.591.350,00	0,00	0,00	0,00
		887.604.687,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 01	Penyusunan Standar Harga	380.716.000,00	0,00	0,00	0,00
		379.923.822,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	99.721.000,00	0,00	0,00	0,00
		98.496.800,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	53.187.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.091.896,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 08	Penilaian Barang Milik Daerah	94.841.000,00	0,00	0,00	0,00
		93.791.800,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	199.870.100,00	0,00	0,00	0,00
		196.199.726,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	47.569.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.536.543,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 20 . 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	20.687.250,00	0,00	0,00	0,00
		20.564.100,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 21	***Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah***	642.231.500,00	0,00	0,00	0,00
		626.564.297,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 21 . 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak D	316.522.900,00	0,00	0,00	0,00
		310.162.202,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 21 . 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	147.863.800,00	0,00	0,00	0,00
		146.945.995,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.04 . 4.01.04 . 01 . 21 . 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	27.260.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.334.000,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.01.04 . 01 . 21 . 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	150.584.800,00	0,00	0,00	0,00
		145.122.100,00	0,00	0,00	0,00
4.05	**Kepegawaian**	4.988.271.914,00	84.728.900,00	0,00	0,00
		4.761.604.613,00	81.836.000,00	0,00	0,00
4.05 . 4.01.05	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	4.988.271.914,00	84.728.900,00	0,00	0,00
		4.761.604.613,00	81.836.000,00	0,00	0,00
4.05 . 4.01.05 . 01	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	4.988.271.914,00	84.728.900,00	0,00	0,00
		4.761.604.613,00	81.836.000,00	0,00	0,00
4.05 . 4.01.05 . 01 . 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	3.344.309.994,00	0,00	0,00	0,00
		3.151.679.916,00	0,00	0,00	0,00
4.05 . 4.01.05 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.344.309.994,00	0,00	0,00	0,00
		3.151.679.916,00	0,00	0,00	0,00
4.05 . 4.01.05 . 01 . 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	198.400.720,00	84.728.900,00	0,00	0,00
		198.307.123,00	81.836.000,00	0,00	0,00
4.05 . 4.01.05 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.489.500,00	0,00	0,00	0,00
		4.489.500,00	0,00	0,00	0,00
4.05 . 4.01.05 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.139.970,00	84.728.900,00	0,00	0,00
		41.139.800,00	81.836.000,00	0,00	0,00
4.05 . 4.01.05 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.490.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.489.000,00	0,00	0,00	0,00
4.05 . 4.01.05 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.830.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.830.000,00	0,00	0,00	0,00
4.05 . 4.01.05 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.451.250,00	0,00	0,00	0,00
		122.358.823,00	0,00	0,00	0,00
4.05 . 4.01.05 . 01 . 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	349.766.000,00	0,00	0,00	0,00
		345.093.565,00	0,00	0,00	0,00
4.05 . 4.01.05 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.896.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.097.565,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.05 . 4.01.05 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	302.870.000,00	0,00	0,00	0,00
		301.996.000,00	0,00	0,00	0,00
4.05 . 4.01.05 . 01 . 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	45.490.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.647.400,00	0,00	0,00	0,00
4.05 . 4.01.05 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.229.750,00	0,00	0,00	0,00
4.05 . 4.01.05 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.377.650,00	0,00	0,00	0,00
4.05 . 4.01.05 . 01 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.040.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.040.000,00	0,00	0,00	0,00
4.05 . 4.01.05 . 01 . 15	***Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN***	603.115.750,00	0,00	0,00	0,00
		585.659.370,00	0,00	0,00	0,00
4.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	20.983.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.654.956,00	0,00	0,00	0,00
4.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	489.912.650,00	0,00	0,00	0,00
		473.032.364,00	0,00	0,00	0,00
4.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	20.467.900,00	0,00	0,00	0,00
		20.454.500,00	0,00	0,00	0,00
4.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	54.008.200,00	0,00	0,00	0,00
		53.822.050,00	0,00	0,00	0,00
4.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	17.744.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.695.500,00	0,00	0,00	0,00
4.05 . 4.01.05 . 01 . 16	***Mutasi dan Promosi ASN***	40.569.500,00	0,00	0,00	0,00
		40.345.650,00	0,00	0,00	0,00
4.05 . 4.01.05 . 01 . 16 . 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	40.569.500,00	0,00	0,00	0,00
		40.345.650,00	0,00	0,00	0,00
4.05 . 4.01.05 . 01 . 17	***Pengembangan Kompetensi ASN***	360.408.950,00	0,00	0,00	0,00
		351.009.159,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.05 . 4.01.05 . 01 . 17 . 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	60.365.000,00	0,00	0,00	0,00
		57.750.050,00	0,00	0,00	0,00
4.05 . 4.01.05 . 01 . 17 . 02	Pengelolaan Assessment Center	273.163.450,00	0,00	0,00	0,00
		267.325.509,00	0,00	0,00	0,00
4.05 . 4.01.05 . 01 . 17 . 03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	20.401.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.708.350,00	0,00	0,00	0,00
4.05 . 4.01.05 . 01 . 17 . 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	6.479.500,00	0,00	0,00	0,00
		6.225.250,00	0,00	0,00	0,00
4.05 . 4.01.05 . 01 . 18	***Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur***	46.211.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.862.430,00	0,00	0,00	0,00
4.05 . 4.01.05 . 01 . 18 . 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.530.000,00	0,00	0,00	0,00
4.05 . 4.01.05 . 01 . 18 . 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	12.278.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.012.100,00	0,00	0,00	0,00
4.05 . 4.01.05 . 01 . 18 . 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	26.933.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.320.330,00	0,00	0,00	0,00
4.06	**Pendidikan dan Pelatihan**	1.009.748.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.009.055.750,00	0,00	0,00	0,00
4.06 . 4.01.05	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	1.009.748.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.009.055.750,00	0,00	0,00	0,00
4.06 . 4.01.05 . 01	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	1.009.748.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.009.055.750,00	0,00	0,00	0,00
4.06 . 4.01.05 . 01 . 16	***Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional***	1.009.748.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.009.055.750,00	0,00	0,00	0,00
4.06 . 4.01.05 . 01 . 16 . 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.009.748.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.009.055.750,00	0,00	0,00	0,00
4.07	**Penelitian dan Pengembangan**	123.107.550,00	0,00	0,00	0,00
		114.557.592,00	0,00	0,00	0,00
4.07 . 4.01.03	**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	123.107.550,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		114.557.592,00	0,00	0,00	0,00
4.07 . 4.01.03 . 01	**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	123.107.550,00	0,00	0,00	0,00
		114.557.592,00	0,00	0,00	0,00
4.07 . 4.01.03 . 01 . 18	***Pengembangan Inovasi dan Teknologi***	123.107.550,00	0,00	0,00	0,00
		114.557.592,00	0,00	0,00	0,00
4.07 . 4.01.03 . 01 . 18 . 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	123.107.550,00	0,00	0,00	0,00
		114.557.592,00	0,00	0,00	0,00
4.08	**Sekretariat DPRD**	37.828.442.571,00	971.768.900,00	0,00	0,00
		35.837.947.290,00	870.253.899,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02	**SEKRETARIAT DPRD**	37.828.442.571,00	971.768.900,00	0,00	0,00
		35.837.947.290,00	870.253.899,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02 . 01	**SEKRETARIAT DPRD**	37.828.442.571,00	971.768.900,00	0,00	0,00
		35.837.947.290,00	870.253.899,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02 . 01 . 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	14.418.258.076,00	0,00	0,00	0,00
		13.891.140.752,00	0,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.418.258.076,00	0,00	0,00	0,00
		13.891.140.752,00	0,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02 . 01 . 05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	391.845.500,00	0,00	0,00	0,00
		377.777.736,00	0,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02 . 01 . 05 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	226.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		224.400.000,00	0,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02 . 01 . 05 . 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	165.345.500,00	0,00	0,00	0,00
		153.377.736,00	0,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	1.274.254.295,00	456.528.900,00	0,00	0,00
		1.112.679.685,00	410.183.400,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.365.000,00	124.000.000,00	0,00	0,00
		25.000.000,00	123.484.900,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.049.900,00	306.528.900,00	0,00	0,00
		56.423.500,00	262.138.500,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	283.537.895,00	26.000.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		244.731.590,00	24.560.000,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	211.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		131.106.000,00	0,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	66.270.000,00	0,00	0,00	0,00
		53.609.040,00	0,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	236.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		218.550.000,00	0,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	393.481.500,00	0,00	0,00	0,00
		383.259.555,00	0,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02 . 01 . 07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	0,00	41.630.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02 . 01 . 07 . 05	Pengadaan Mebel	0,00	41.630.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02 . 01 . 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	1.950.708.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.514.823.916,00	0,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.692.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.750.000,00	0,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	373.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		255.081.416,00	0,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02 . 01 . 08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	329.825.000,00	0,00	0,00	0,00
		290.682.500,00	0,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.223.591.000,00	0,00	0,00	0,00
		950.310.000,00	0,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02 . 01 . 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	663.398.000,00	191.110.000,00	0,00	0,00
		594.880.650,00	185.661.000,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.898.000,00	0,00	0,00	0,00
		206.006.650,00	0,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		91.319.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.08 . 4.01.02 . 01 . 09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.000.000,00	191.110.000,00	0,00	0,00
		297.555.000,00	185.661.000,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02 . 01 . 15	***Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD***	4.505.591.500,00	0,00	0,00	0,00
		4.385.809.730,00	0,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02 . 01 . 15 . 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4.505.591.500,00	0,00	0,00	0,00
		4.385.809.730,00	0,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02 . 01 . 18	***Peningkatan Kapasitas DPRD***	2.052.283.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.803.209.530,00	0,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02 . 01 . 18 . 02	Bimbingan Teknis DPRD	1.626.283.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.431.959.530,00	0,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02 . 01 . 18 . 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	426.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		371.250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02 . 01 . 19	***Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat***	11.515.464.200,00	0,00	0,00	0,00
		11.279.297.491,00	0,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02 . 01 . 19 . 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	11.091.209.200,00	0,00	0,00	0,00
		11.054.720.241,00	0,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02 . 01 . 19 . 03	Pelaksanaan Reses	424.255.000,00	0,00	0,00	0,00
		224.577.250,00	0,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02 . 01 . 21	***Pembahasan Kerja Sama Daerah***	571.090.000,00	282.500.000,00	0,00	0,00
		505.169.800,00	274.409.499,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02 . 01 . 21 . 02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	571.090.000,00	282.500.000,00	0,00	0,00
		505.169.800,00	274.409.499,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02 . 01 . 150	***Layanan Administrasi DPRD***	263.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		173.014.000,00	0,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02 . 01 . 150 . 153	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	263.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		173.014.000,00	0,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02 . 01 . 151	***Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD***	222.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		200.144.000,00	0,00	0,00	0,00
4.08 . 4.01.02 . 01 . 151 . 151	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	222.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		200.144.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.11	**Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan**	15.476.593.390,00	0,00	0,00	0,00
		14.863.807.047,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.07	**KECAMATAN PULAU PUNJUNG**	1.608.481.440,00	0,00	0,00	0,00
		1.563.240.440,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.07 . 01	**KECAMATAN PULAU PUNJUNG**	1.608.481.440,00	0,00	0,00	0,00
		1.563.240.440,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.07 . 01 . 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	1.278.373.290,00	0,00	0,00	0,00
		1.243.242.742,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.07 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.278.373.290,00	0,00	0,00	0,00
		1.243.242.742,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.07 . 01 . 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	98.928.150,00	0,00	0,00	0,00
		98.903.450,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.07 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.817.100,00	0,00	0,00	0,00
		1.817.100,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.07 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.817.400,00	0,00	0,00	0,00
		24.817.400,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.07 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.580.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.580.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.07 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.095.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.095.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.07 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.618.650,00	0,00	0,00	0,00
		57.593.950,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.07 . 01 . 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	206.680.000,00	0,00	0,00	0,00
		196.917.898,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.07 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.977.898,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.07 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.680.000,00	0,00	0,00	0,00
		189.940.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.07 . 01 . 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	17.495.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.181.350,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.11 . 4.01.07 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.405.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.402.350,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.07 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.339.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.07 . 01 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.440.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.440.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.07 . 01 . 18	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.07 . 01 . 18 . 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.07 . 01 . 18 . 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.07 . 01 . 19	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	4.935.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.935.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.07 . 01 . 19 . 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.935.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.935.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.07 . 01 . 24	***Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan***	600.000,00	0,00	0,00	0,00
		600.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.07 . 01 . 24 . 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	600.000,00	0,00	0,00	0,00
		600.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.07 . 01 . 28	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.460.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.07 . 01 . 28 . 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.460.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.08	**KECAMATAN SITIUNG**	1.627.404.800,00	0,00	0,00	0,00
		1.585.748.265,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.11 . 4.01.08 . 01	**KECAMATAN SITIUNG**	1.627.404.800,00	0,00	0,00	0,00
		1.585.748.265,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.08 . 01 . 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	1.373.828.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.333.373.021,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.08 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.373.828.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.333.373.021,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.08 . 01 . 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	87.756.800,00	0,00	0,00	0,00
		87.511.544,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.08 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	526.000,00	0,00	0,00	0,00
		526.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.08 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.343.700,00	0,00	0,00	0,00
		16.343.350,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.08 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.08 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.043.100,00	0,00	0,00	0,00
		4.043.100,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.08 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.694.000,00	0,00	0,00	0,00
		63.449.094,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.08 . 01 . 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	139.140.000,00	0,00	0,00	0,00
		138.447.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.08 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.907.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.08 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.140.000,00	0,00	0,00	0,00
		132.540.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.08 . 01 . 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	20.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.636.700,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.08 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.130.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.08 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		4.506.700,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.08 . 01 . 09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.08 . 01 . 18	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	450.000,00	0,00	0,00	0,00
		450.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.08 . 01 . 18 . 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	450.000,00	0,00	0,00	0,00
		450.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.08 . 01 . 18 . 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.08 . 01 . 19	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.650.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.08 . 01 . 19 . 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.650.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.08 . 01 . 24	***Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan***	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.08 . 01 . 24 . 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.08 . 01 . 28	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.680.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.08 . 01 . 28 . 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.680.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.09	**KECAMATAN KOTO BARU**	1.697.773.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.530.418.845,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.09 . 01	**KECAMATAN KOTO BARU**	1.697.773.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.530.418.845,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.09 . 01 . 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	1.342.713.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.180.773.604,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.09 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.342.713.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		1.180.773.604,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	86.583.200,00	0,00	0,00	0,00
		86.264.652,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.499.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.421.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.556.900,00	0,00	0,00	0,00
		13.556.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.952.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.948.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.994.800,00	0,00	0,00	0,00
		2.911.800,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.09 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.580.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.427.852,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.09 . 01 . 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	240.917.000,00	0,00	0,00	0,00
		236.493.424,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.09 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.673.424,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.09 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	232.517.000,00	0,00	0,00	0,00
		229.820.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.09 . 01 . 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	18.740.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.517.165,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.09 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.892.850,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.09 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.784.315,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.09 . 01 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.840.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.09 . 01 . 18	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.11 . 4.01.09 . 01 . 18 . 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.09 . 01 . 19	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	4.910.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.850.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.09 . 01 . 19 . 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.910.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.850.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.09 . 01 . 24	***Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan***	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.09 . 01 . 24 . 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.09 . 01 . 28	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.320.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.09 . 01 . 28 . 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.320.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.10	**KECAMATAN SUNGAI RUMBAI**	1.404.666.400,00	0,00	0,00	0,00
		1.366.707.712,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.10 . 01	**KECAMATAN SUNGAI RUMBAI**	1.404.666.400,00	0,00	0,00	0,00
		1.366.707.712,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.10 . 01 . 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	1.112.950.400,00	0,00	0,00	0,00
		1.075.857.995,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.10 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.112.950.400,00	0,00	0,00	0,00
		1.075.857.995,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.10 . 01 . 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	105.963.000,00	0,00	0,00	0,00
		105.847.468,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.10 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.543.700,00	0,00	0,00	0,00
		1.543.700,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.10 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.749.700,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		15.749.700,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.10 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.530.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.530.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.10 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.541.600,00	0,00	0,00	0,00
		4.526.600,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.10 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.598.000,00	0,00	0,00	0,00
		66.497.468,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.10 . 01 . 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	157.668.000,00	0,00	0,00	0,00
		157.463.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.10 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.983.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.10 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	148.668.000,00	0,00	0,00	0,00
		148.480.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.10 . 01 . 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	16.990.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.519.249,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.10 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.729.249,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.10 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.720.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.720.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.10 . 01 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.070.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.10 . 01 . 18	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.045.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.10 . 01 . 18 . 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.10 . 01 . 18 . 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		965.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.10 . 01 . 19	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	6.435.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		6.395.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.10 . 01 . 19 . 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.435.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.395.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.10 . 01 . 24	***Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah***	600.000,00	0,00	0,00	0,00
		600.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.10 . 01 . 24 . 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	600.000,00	0,00	0,00	0,00
		600.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.10 . 01 . 28	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.980.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.10 . 01 . 28 . 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.980.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.11	**KECAMATAN SEMBILAN KOTO**	1.714.944.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.661.350.473,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.11 . 01	**KECAMATAN SEMBILAN KOTO**	1.714.944.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.661.350.473,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.11 . 01 . 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	1.424.117.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.373.976.223,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.11 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.424.117.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.373.976.223,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.11 . 01 . 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	86.707.000,00	0,00	0,00	0,00
		86.305.250,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.11 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.526.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.526.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.11 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.173.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.156.400,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.11 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.010.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.990.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.11 . 4.01.11 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.995.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.11 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.998.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.637.850,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.11 . 01 . 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	154.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		153.221.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.11 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.11 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.551.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.11 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147.630.000,00	0,00	0,00	0,00
		146.320.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.11 . 01 . 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	42.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		41.158.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.11 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.037.500,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.11 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.470.500,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.11 . 01 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.11 . 01 . 09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.950.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.11 . 01 . 19	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	5.240.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.11 . 01 . 19 . 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.240.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.11 . 01 . 28	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		1.490.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.11 . 01 . 28 . 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.490.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.12	**KECAMATAN TIMPEH**	1.153.703.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.098.919.537,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.12 . 01	**KECAMATAN TIMPEH**	1.153.703.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.098.919.537,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.12 . 01 . 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	889.689.000,00	0,00	0,00	0,00
		836.510.503,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.12 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	889.689.000,00	0,00	0,00	0,00
		836.510.503,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.12 . 01 . 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	99.049.000,00	0,00	0,00	0,00
		98.557.434,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.12 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.977.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.895.500,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.12 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.520.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.516.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.12 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.390.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.345.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.12 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.162.000,00	0,00	0,00	0,00
		67.800.934,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.12 . 01 . 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	141.715.000,00	0,00	0,00	0,00
		141.614.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.12 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.365.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.324.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.12 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	138.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		138.290.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.12 . 01 . 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	17.990.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.977.600,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.11 . 4.01.12 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.556.250,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.12 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.796.350,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.12 . 01 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.625.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.12 . 01 . 19	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	5.260.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.260.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.12 . 01 . 19 . 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.260.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.260.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.13	**KECAMATAN KOTO SALAK**	1.357.181.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.306.920.615,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.13 . 01	**KECAMATAN KOTO SALAK**	1.357.181.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.306.920.615,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.13 . 01 . 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	1.081.331.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.035.543.237,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.13 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.081.331.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.035.543.237,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.13 . 01 . 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	85.884.000,00	0,00	0,00	0,00
		85.614.114,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.13 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.747.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.13 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.192.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.151.514,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.13 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.13 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.478.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.464.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.11 . 4.01.13 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.990.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.866.600,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.13 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.474.000,00	0,00	0,00	0,00
		53.385.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.13 . 01 . 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	164.526.000,00	0,00	0,00	0,00
		160.876.714,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.13 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.116.714,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.13 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	156.126.000,00	0,00	0,00	0,00
		153.760.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.13 . 01 . 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	19.520.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.156.550,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.13 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.670.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.628.750,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.13 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.807.800,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.13 . 01 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.720.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.13 . 01 . 18	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
		930.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.13 . 01 . 18 . 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
		930.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.13 . 01 . 19	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	4.840.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.13 . 01 . 19 . 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.840.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.13 . 01 . 28	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.13 . 01 . 28 . 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.14	**KECAMATAN ASAM JUJUHAN**	1.177.221.776,00	0,00	0,00	0,00
		1.135.263.702,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.14 . 01	**KECAMATAN ASAM JUJUHAN**	1.177.221.776,00	0,00	0,00	0,00
		1.135.263.702,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.14 . 01 . 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	910.689.400,00	0,00	0,00	0,00
		873.678.018,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.14 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	910.689.400,00	0,00	0,00	0,00
		873.678.018,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.14 . 01 . 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	91.036.376,00	0,00	0,00	0,00
		89.287.884,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.14 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	895.000,00	0,00	0,00	0,00
		850.300,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.14 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.411.376,00	0,00	0,00	0,00
		10.958.600,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.14 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.425.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.14 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.14 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.505.000,00	0,00	0,00	0,00
		63.378.984,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.14 . 01 . 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	146.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		144.650.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.14 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.160.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.14 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.14 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	140.440.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		138.490.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.14 . 01 . 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	20.320.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.071.800,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.14 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.220.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.216.650,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.14 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.855.150,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.14 . 01 . 18	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	1.576.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.576.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.14 . 01 . 18 . 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.576.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.576.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.14 . 01 . 19	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.14 . 01 . 19 . 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.15	**KECAMATAN KOTO BESAR**	1.403.710.800,00	0,00	0,00	0,00
		1.371.786.582,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.15 . 01	**KECAMATAN KOTO BESAR**	1.403.710.800,00	0,00	0,00	0,00
		1.371.786.582,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.15 . 01 . 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	1.116.163.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.084.532.182,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.15 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.116.163.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.084.532.182,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.15 . 01 . 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	91.937.800,00	0,00	0,00	0,00
		91.911.750,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.15 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.449.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.449.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.15 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.814.900,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		16.790.950,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.15 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.480.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.478.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.15 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.916.100,00	0,00	0,00	0,00
		3.916.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.15 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.277.800,00	0,00	0,00	0,00
		61.277.800,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.15 . 01 . 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	174.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		174.827.500,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.15 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.177.500,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.15 . 01 . 08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.910.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.910.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.15 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.740.000,00	0,00	0,00	0,00
		165.740.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.15 . 01 . 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	14.840.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.595.150,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.15 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.114.450,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.15 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.640.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.480.700,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.15 . 01 . 18	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.15 . 01 . 18 . 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.15 . 01 . 18 . 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.15 . 01 . 19	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	4.920.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		4.920.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.15 . 01 . 19 . 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.920.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.920.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.15 . 01 . 24	***Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan***	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.15 . 01 . 24 . 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.15 . 01 . 28	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.15 . 01 . 28 . 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.16	**KECAMATAN PADANG LAWEH**	1.084.899.700,00	0,00	0,00	0,00
		1.043.962.483,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.16 . 01	**KECAMATAN PADANG LAWEH**	1.084.899.700,00	0,00	0,00	0,00
		1.043.962.483,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.16 . 01 . 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	822.758.000,00	0,00	0,00	0,00
		784.990.299,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.16 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	822.758.000,00	0,00	0,00	0,00
		784.990.299,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.16 . 01 . 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	97.687.450,00	0,00	0,00	0,00
		97.294.634,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.16 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	695.600,00	0,00	0,00	0,00
		579.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.16 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.087.950,00	0,00	0,00	0,00
		10.976.450,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.16 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.402.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.402.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.16 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.508.400,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		3.508.400,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.16 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.993.500,00	0,00	0,00	0,00
		67.828.784,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.16 . 01 . 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	126.884.000,00	0,00	0,00	0,00
		124.586.500,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.16 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.194.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.194.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.16 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.002.500,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.16 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	124.490.000,00	0,00	0,00	0,00
		122.390.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.16 . 01 . 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	27.720.250,00	0,00	0,00	0,00
		27.301.050,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.16 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.020.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.829.250,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.16 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.700.250,00	0,00	0,00	0,00
		3.471.800,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.16 . 01 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.16 . 01 . 18	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.16 . 01 . 18 . 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.16 . 01 . 19	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	6.110.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.050.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.16 . 01 . 19 . 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.110.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.050.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.16 . 01 . 24	***Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan***	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.16 . 01 . 24 . 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.16 . 01 . 28	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	2.740.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.740.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.16 . 01 . 28 . 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.740.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.740.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.17	**KECAMATAN TIUMANG**	1.246.607.074,00	0,00	0,00	0,00
		1.199.488.393,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.17 . 01	**KECAMATAN TIUMANG**	1.246.607.074,00	0,00	0,00	0,00
		1.199.488.393,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.17 . 01 . 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	912.143.974,00	0,00	0,00	0,00
		877.471.020,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.17 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	912.143.974,00	0,00	0,00	0,00
		877.471.020,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.17 . 01 . 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	92.633.100,00	0,00	0,00	0,00
		88.528.630,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.17 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.012.700,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.17 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.804.100,00	0,00	0,00	0,00
		11.538.090,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.17 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.766.500,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.17 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.631.300,00	0,00	0,00	0,00
		3.629.090,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.17 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.205.000,00	0,00	0,00	0,00
		61.594.950,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.17 . 01 . 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	213.940.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		207.640.903,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.17 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.810.903,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.17 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	208.940.000,00	0,00	0,00	0,00
		202.830.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.17 . 01 . 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	23.740.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.697.840,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.17 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.740.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.697.840,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.17 . 01 . 19	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.11 . 4.01.17 . 01 . 19 . 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.12	**Kesatuan Bangsa dan Politik**	2.248.053.180,00	0,00	0,00	0,00
		2.144.643.138,00	0,00	0,00	0,00
4.12 . 4.01.18	**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	2.248.053.180,00	0,00	0,00	0,00
		2.144.643.138,00	0,00	0,00	0,00
4.12 . 4.01.18 . 01	**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	2.248.053.180,00	0,00	0,00	0,00
		2.144.643.138,00	0,00	0,00	0,00
4.12 . 4.01.18 . 01 . 02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	773.577.000,00	0,00	0,00	0,00
		721.193.658,00	0,00	0,00	0,00
4.12 . 4.01.18 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	773.577.000,00	0,00	0,00	0,00
		721.193.658,00	0,00	0,00	0,00
4.12 . 4.01.18 . 01 . 06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	147.928.550,00	0,00	0,00	0,00
		147.443.158,00	0,00	0,00	0,00
4.12 . 4.01.18 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.496.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.428.300,00	0,00	0,00	0,00
4.12 . 4.01.18 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.187.900,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		22.055.400,00	0,00	0,00	0,00
4.12 . 4.01.18 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.486.150,00	0,00	0,00	0,00
		5.415.600,00	0,00	0,00	0,00
4.12 . 4.01.18 . 01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.780.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.750.000,00	0,00	0,00	0,00
4.12 . 4.01.18 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.800.300,00	0,00	0,00	0,00
		10.786.000,00	0,00	0,00	0,00
4.12 . 4.01.18 . 01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.178.000,00	0,00	0,00	0,00
		95.007.858,00	0,00	0,00	0,00
4.12 . 4.01.18 . 01 . 08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	183.320.000,00	0,00	0,00	0,00
		177.468.132,00	0,00	0,00	0,00
4.12 . 4.01.18 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.12 . 4.01.18 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.160.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.153.132,00	0,00	0,00	0,00
4.12 . 4.01.18 . 01 . 08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.870.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.825.000,00	0,00	0,00	0,00
4.12 . 4.01.18 . 01 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	162.040.000,00	0,00	0,00	0,00
		157.240.000,00	0,00	0,00	0,00
4.12 . 4.01.18 . 01 . 09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	50.660.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.355.050,00	0,00	0,00	0,00
4.12 . 4.01.18 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	660.000,00	0,00	0,00	0,00
		645.050,00	0,00	0,00	0,00
4.12 . 4.01.18 . 01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.710.000,00	0,00	0,00	0,00
4.12 . 4.01.18 . 01 . 09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.12 . 4.01.18 . 01 . 15	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan***	16.898.300,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
		15.584.700,00	0,00	0,00	0,00
4.12 . 4.01.18 . 01 . 15 . 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	16.898.300,00	0,00	0,00	0,00
		15.584.700,00	0,00	0,00	0,00
4.12 . 4.01.18 . 01 . 16	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan***	837.778.230,00	0,00	0,00	0,00
		797.207.120,00	0,00	0,00	0,00
4.12 . 4.01.18 . 01 . 16 . 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Polit	837.778.230,00	0,00	0,00	0,00
		797.207.120,00	0,00	0,00	0,00
4.12 . 4.01.18 . 01 . 17	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan***	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.12 . 4.01.18 . 01 . 17 . 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.12 . 4.01.18 . 01 . 18	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya***	56.419.250,00	0,00	0,00	0,00
		55.420.400,00	0,00	0,00	0,00
4.12 . 4.01.18 . 01 . 18 . 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6.415.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.173.800,00	0,00	0,00	0,00
4.12 . 4.01.18 . 01 . 18 . 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50.004.250,00	0,00	0,00	0,00
		49.246.600,00	0,00	0,00	0,00
4.12 . 4.01.18 . 01 . 19	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial***	151.471.850,00	0,00	0,00	0,00
		149.970.920,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.12 . 4.01.18 . 01 . 19 . 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	135.413.500,00	0,00	0,00	0,00
		134.665.020,00	0,00	0,00	0,00
4.12 . 4.01.18 . 01 . 19 . 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	16.058.350,00	0,00	0,00	0,00
		15.305.900,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	670.470.437.079,00	204.564.572.964,00	200.000.000,00	113.525.513.885,00
		638.336.234.296,16	166.252.751.216,49	164.439.330,00	112.294.731.483,00

Printed By SimDa

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 4 Tahun 2022
Tanggal : 13 Juli 2022

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

URAIAN	Ref	2021	2020
1	2	3	4
Saldo Anggaran Lebih Awal	V.B	**8.334.425.206,49**	**3.893.451.613,32**
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		8.334.425.206,49	3.893.451.613,32
Subtotal		-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		70.206.985.982,71	8.334.425.206,49
Subtotal		**70.206.985.982,71**	**8.334.425.206,49**
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	-
Lain-Lain		-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir		**70.206.985.982,71**	**8.334.425.206,49**

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 4 Tahun 2022
Tanggal : 13 Juli 2022

LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

URAIAN	Ref	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Pendapatan Pajak Daerah	V.D.1.a.1	22.455.754.207,25	20.059.644.354,45	2.396.109.852,80	11,94
Pendapatan Retribusi Daerah	V.D.1.a.2	2.499.784.055,43	1.985.918.356,61	513.865.698,82	25,88
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.D.1.a.3	10.284.830	3.524.570.411,00	(3.514.285.581,00)	(99,71)
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	V.D.1.a.4	68.868.917.011,55	52.667.089.645,80	16.201.827.365,75	30,76
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		**93.834.740.104,23**	**78.237.222.767,86**	**15.597.517.336,37**	**19,94**
PENDAPATAN TRANSFER					
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN					
Dana Bagi Hasil Pajak	V.D.1.b.1.a	26.352.048.498,00	17.525.407.792,00	8.826.640.706,00	50,36
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	V.D.1.b.1.b	3.419.652.416,00	2.390.550.383,00	1.029.102.033,00	43,05
Dana Alokasi Umum (DAU)	V.D.1.b.1.c	472.416.143.000,00	478.355.774.000,00	(5.939.631.000,00)	(1,24)
Dana Alokasi Khusus (DAK)	V.D.1.b.1.d	207.765.406.760,00	237.995.156.977,00	(30.229.750.217,00)	(12,70)
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		**709.953.250.674,00**	**736.266.889.152,00**	**(26.313.638.478,00)**	**(3,57)**
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA					
Dana Penyesuaian		73.540.405.000,00	46.554.026.000,00	26.986.379.000,00	57,97
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		**73.540.405.000,00**	**46.554.026.000,00**	**26.986.379.000,00**	**57,97**
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	V.D.1.b.3.a	51.935.128.939,00	46.678.966.816,00	5.256.162.123,00	11,26
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	V.D.1.b.3.b	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		**51.935.128.939,00**	**46.678.966.816,00**	**5.256.162.123,00**	**11,26**
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		**835.428.784.613,00**	**829.499.881.968,00**	**5.928.902.645,00**	**0,71**
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah	V.D.1.c.1	91.236.115.776,00	22.543.662.861,20	68.692.452.914,80	304,71

URAIAN	Ref	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
Pendapatan Dana Darurat	V.D.1.c.2	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	V.D.1.c.3	30.885.940.000,00	32.420.830.000,00	(1.534.890.000,00)	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		**122.122.055.776,00**	**54.964.492.861,20**	**67.157.562.914,80**	**122,18**
JUMLAH PENDAPATAN		**1.051.385.580.493,23**	**962.701.597.597,06**	**88.683.982.896,17**	**9,21**
BEBAN					
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	V.D.2.a	382.354.718.195,46	425.276.572.735,00	(42.921.854.539,54)	(10,09)
Beban Persediaan	V.D.2.b.	72.600.984.126,33	69.109.719.631,87	3.491.264.494,46	5,05
Beban Jasa	V.D.2.c	98.084.318.217,81	61.054.627.884,27	37.029.690.333,54	60,65
Beban Sewa	V.D.2.d	2.509.976.767,12	2.217.298.064,03	292.678.703,09	13,20
Beban Pemeliharaan	V.D.2.e	11.196.376.603,00	8.647.223.670,00	2.549.152.933,00	29,48
Beban Perjalanan Dinas	V.D.2.f	47.517.031.727,00	36.283.810.392,00	11.233.221.335,00	30,96
Beban Hibah	V.D.2.g	21.567.610.832,00	72.886.229.581,03	(51.318.618.749,03)	(70,41)
Beban Bantuan Sosial	V.D.2.h	-	17.918.600.000,00	(17.918.600.000,00)	(100,00)
Beban Penyusutan/Amortisasi	V.D.2.i	168.473.799.471,73	139.560.243.919,26	28.913.555.552,47	20,72
Beban Penyisihan Piutang	V.D.2.j	3.573.789.229,02	2.991.191.038,83	582.598.190,19	19,48
Beban Transfer	V.D.2.k	112.110.404.801,00	54.609.952.788,00	57.500.452.013,00	105,29
Beban Lain-Lain	V.D.2.l	3.567.438.148,62	-	-	-
JUMLAH BEBAN OPERASI		**923.556.448.119,09**	**890.555.469.704,29**	**33.000.978.414,80**	**3,71**
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	**V.D.3**	**127.829.132.374,14**	**72.146.127.892,77**	**55.683.004.481,37**	**77,18**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**V.D.4**				
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		363.292.100,00	60.050.000,00	303.242.100,00	504,98
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	(26.621.600,00)	(26.621.600,00)	100,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	V.D.4.1	-	(235.756.441,00)	(235.756.441,00)	-
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional		**363.292.100,00**	**(202.328.041,00)**	**565.620.141,00**	**(279,56)**
Jumlah Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	**V.D.5**	**128.192.424.474,14**	**71.943.799.851,77**	**56.248.624.622,37**	**78,18**
POS LUAR BIASA	V.D.6				
Pendapatan Luar Biasa	V.D.6.1	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	V.D.6.2	197.439.330,00	312.313.950,00	(114.874.620,00)	(36,78)
Jumlah Pos Luar Biasa		**197.439.330,00**	**312.313.950,00**	**(114.874.620,00)**	**(36,78)**
SURPLUS/DEFISIT LO	V.D.7	**127.994.985.144,14**	**71.631.485.901,77**	**56.363.499.242,37**	**78,69**

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 4 Tahun 2022
Tanggal : 13 Juli 2022

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

URAIAN	Ref	2021	2020
1	2	3	4
Ekuitas Awal	V.F	**2.346.493.866.411,02**	**2.424.445.022.003,03**
Surplus/Defisit-LO		127.994.985.144,14	71.631.485.901,77
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar			
a. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan		-	-
b Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar		13.580.958.005,89	(149.582.641.493,78)
Ekuitas Akhir		**2.488.069.809.561,05**	**2.346.493.866.411,02**

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 4 Tahun 2022
Tanggal : 13 Juli 2022

NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

URAIAN	Ref	SALDO 31 DES 2021	SALDO 31 DES 2020
1	2	3	4
ASET	V.C.1		
ASET LANCAR	V.C.1.a		
Kas di Kas Daerah	V.C.1.a.1	66.539.152.597,42	6.154.888.601,54
Kas di Bendahara Pengeluaran	V.C.1.a.2	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	V.C.1.a.3	-	991.000,00
Kas di BLUD	V.C.1.a.4	3.500.297.770,29	1.526.712.732,95
Kas di BOS	V.C.1.a.5	154.484.863,00	0,00
Kas Lainnya	V.C.1.a.6	312.184.107,27	0,00
Setara Kas	V.C.1.a.7	0,00	645.579.320,00
.		-	-
Piutang Pajak	V.C.1.a.8	36.232.224.028,00	34.309.133.716,00
Penyisihan Piutang Pajak		(26.498.466.733,38)	(24.365.360.319,38)
Piutang Pajak Netto		9.733.757.294,62	9.943.773.396,62
Piutang Retribusi	V.C.1.a.9	767.327.811,00	242.685.161,00
Penyisihan Piutang Retribusi		(486.855.897,00)	(100.954.575,00)
Piutang Retribusi Netto		280.471.914,00	141.730.586,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.C.1.a.10	10.284.830	3.524.570.411,00
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		(51.424,15)	(17.622.852,06)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto		10.233.406	3.506.947.558,95
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	V.C.1.a.11	18.281.799.828,37	5.821.956.799,88
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		(2.215.645.745,10)	(923.326.882,67)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto		16.066.154.083,27	4.898.629.917,21
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	V.C.1.a.11	-	6.505.389.322,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	V.C.1.a.13	9.630.356.468,00	8.967.719.269,00
Piutang Pendapatan Lainnya	V.C.1.a.14	13.050.752,00	13.050.752,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya		(13.050.752,00)	(1.305.075,20)
Piutang Lainnya Netto		-	11.745.676,80
Belanja Dibayar Dimuka	V.C.1.a.15	1.558.223.934,04	231.012.527,83
Persediaan	V.C.1.a.16	38.086.898.001,69	27.219.306.442,17
Jumlah Aset Lancar		**145.872.214.439,45**	**69.754.426.351,07**
INVESTASI JANGKA PANJANG	V.C.1.b		
Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Investasi Nonpermanen		-	-

URAIAN	Ref	SALDO 31 DES 2021	SALDO 31 DES 2020
1	2	3	4
Investasi Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	V.C.1.b.1	27.452.000.000,00	27.452.000.000,00
Investasi Permanen Lainnya		-	-
Jumlah Investasi Permanen		**27.452.000.000,00**	**27.452.000.000,00**
Jumlah Investasi Jangka Panjang		**27.452.000.000,00**	**27.452.000.000,00**
ASET TETAP			
Tanah	V.C.1.c.1	667.421.012.047,00	649.170.781.447,00
Peralatan dan Mesin	V.C.1.c.2	365.830.496.579,36	310.784.964.569,44
Gedung dan Bangunan	V.C.1.c.3	828.611.661.247,80	665.269.927.412,85
Jalan, Irigasi dan Jaringan	V.C.1.c.4	1.347.104.392.370,42	1.268.023.945.040,42
Aset Tetap Lainnya	V.C.1.c.5	108.279.890.823,00	105.717.574.583,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	V.C.1.c.6	11.750.539.457,00	113.119.888.237,00
Akumulasi Penyusutan		(1.055.277.207.905,60)	(901.217.948.545,60)
Aset Tetap Setelah Akumulasi Penyusutan		**2.273.720.784.618,98**	**2.210.869.132.744,11**
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan	V.C.1.d	-	-
Jumlah Dana Cadangan		-	-
ASET LAINNYA	V.C.1.e		
Tuntutan Ganti Rugi	V.C.1.e.1	293.258.963,00	293.258.963,00
Aset Tak Berwujud	V.C.1.e.2	4.013.267.277,00	3.834.413.677,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud		(1.906.478.687,00)	(1.569.821.608,17)
Aset Tak Berwujud Setelah Amortisasi		2.106.788.590,00	2.264.592.068,83
Aset Lain-Lain	V.C.1.e.3	205.255.939.395,84	213.829.466.684,84
Penyusutan Aset Lain-Lain		(148.585.496.096,84)	(142.013.028.477,75)
Aset Lain-Lain Setelah Penyusutan		56.670.443.299,00	71.816.438.207,09
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	V.C.1.e.4	-	-
Jumlah Aset Lainnya		**59.070.490.852,00**	**74.374.289.238,92**
JUMLAH ASET		**2.506.115.489.910,43**	**2.382.449.848.334,09**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	V.C.2.a.1	765.399.544,27	4.900.000,00
Pendapatan Diterima Dimuka	V.C.2.a.2	102.623.340,64	2.661.665.181,07
Utang Belanja	V.C.2.a.3	12.286.454.764,47	33.289.416.742,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	V.C.2.a.4	4.891.202.700,00	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**18.045.680.349,38**	**35.955.981.923,07**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Lainnya	V.C.2.b	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		***18.045.680.349,38***	***35.955.981.923,07***

URAIAN	Ref	SALDO 31 DES 2021	SALDO 31 DES 2020
1	2	3	4
EKUITAS			
EKUITAS	V.A.3	2.488.069.809.561,05	2.346.493.866.411,02
JUMLAH EKUITAS		2.488.069.809.561,05	2.346.493.866.411,02
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**2.506.115.489.910,43**	**2.382.449.848.334,09**

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 4 Tahun 2022
Tanggal : 13 Juli 2022

LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

URAIAN	Ref	TAHUN 2021	TAHUN 2020
1	2	3	4
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	V.E.1		
Arus Masuk Kas	V.E.1.a		
Penerimaan Pajak Daerah		20.495.633.388,25	17.751.808.580,45
Penerimaan Retribusi Daerah		2.411.365.382,00	1.861.712.711,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3.524.570.411,00	4.063.752.034,00
Lain-Lain PAD yang Sah		56.034.600.239,62	59.135.018.327,67
Dana Bagi Hasil Pajak		30.199.842.269,00	12.973.433.646,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		3.462.713.300,00	2.174.079.602,00
Dana Alokasi Umum		472.416.143.000,00	478.355.774.000,00
Dana Alokasi Khusus		207.765.406.760,00	237.995.156.977,00
Dana Otonomi Khusus		-	-
Dana Penyesuaian		73.540.405.000,00	99.826.676.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		51.272.491.740,00	41.101.030.883,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		-	-
Penerimaan Hibah		26.548.313.512,00	2.466.323.721,00
Penerimaan Dana Darurat		-	-
Penerimaan Lainnya		30.885.940.000,00	32.420.830.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**978.557.425.001,87**	**990.125.596.482,12**
Arus Keluar Kas	V.E.1.b		
Pembayaran Pegawai		380.289.821.307,81	418.043.145.643,00
Pembayaran Barang		246.612.992.141,35	185.947.730.070,85
Pembayaran Bunga			
Pembayaran Subsidi			
Pembayaran Hibah		11.804.111.087,00	54.874.970.568,83
Pembayaran Bantuan Sosial		0,00	164.000.000,00
Pembayaran Tak Terduga		164.439.330,00	24.924.272.319,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		1.708.764.771,00	829.546.015,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		152.413.472,00	103.473.040,00
Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan		110.062.863.000,00	106.337.583.054,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**750.795.405.109,16**	**791.224.720.710,68**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**227.762.019.892,71**	**198.900.875.771,44**

URAIAN	Ref	TAHUN 2021	TAHUN 2020
1	2	3	4
Arus Kas dari Aktifitas Investasi	V.E.2		
Arus Masuk Kas	V.E.2.a		
Penjualan atas Tanah		-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		354.867.100,00	60.050.000,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		8.425.000,00	600.000,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-	-
Penjualan Aset Lainnya		-	4.900.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**363.292.100,00**	**65.550.000,00**
Arus Keluar Kas	V.E.2.b		
Perolehan Tanah			
Perolehan Peralatan dan Mesin		51.541.549.729,92	64.751.373.002,50
Perolehan Gedung dan Bangunan		85.986.356.136,57	94.052.704.714,97
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		22.155.213.262,00	34.663.993.010,80
Perolehan Aset Tetap Lainnya		6.569.632.088,00	1.057.381.450,00
Perolehan Aset Lainnya			
Jumlah Arus Keluar Kas		**166.252.751.216,49**	**194.525.452.178,27**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		**(165.889.459.116,49)**	**(194.459.902.178,27)**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	V.E.3		
Arus Masuk Kas	V.E.3.a		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas			
Arus Keluar Kas	V.E.3.b		
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-

URAIAN	Ref	TAHUN 2021	TAHUN 2020
1	2	3	4
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	V.E.4		
Arus Masuk Kas	V.E.4.a		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		62.122.057.999,27	47.828.833.482,00
Penerimaan Kas		38.500.244	1.894.200,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**62.160.558.243,27**	**47.830.727.682,00**
Arus Keluar Kas	V.E.4.b		
Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		61.853.274.136,00	47.824.534.567,00
Pengeluaran Kas		1.897.200,00	3.392.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**61.855.171.336,00**	**47.827.926.567,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		**305.386.907,27**	**2.801.115,00**
Kenaikan/Penurunan Kas		**62.177.947.683,50**	**4.443.774.708,17**
Saldo Awal Kas di Kas Daerah dan Setara Kas		6.155.879.601,54	94.194.632,52
Saldo Awal Kas di BLUD		1.526.712.732,95	1.094.990.941,80
Saldo Awal Kas di Dana BOS		645.579.320,00	2.695.211.372,00
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah		66.539.152.597,42	6.154.888.601,54
Saldo Akhir Kas di BLUD		3.500.297.770,29	1.526.712.732,95
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		-	991.000,00
Saldo Akhir Kas di Dana BOS		154.484.863,00	645.579.320,00
Saldo Akhir Kas Lainnya		312.184.107,27	-
Saldo Akhir Kas		**70.506.119.337,98**	**8.328.171.654,49**

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Informasi Umum

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabilitas, setiap pengelola keuangan Negara wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan secara tertip dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan dimaksud disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang berdampak kepada masyarakat dan atau golongan tertentu.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak hanya bertanggung jawab dalam hal keuangan (*financial accountability*) tetapi juga kaidah-kaidah yang baik (*best practices*), serta bertanggung jawab atas kinerja dari dana yang telah dialokasikan (*performance accountability*), dalam bentuk efektifitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah guna pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang *Good Governance and Clean Government*.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya selaku Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK RI setelah direviu oleh Inspektorat untuk dilakukan Audit dan diberikan opini sebelum disampaikan kepada DPRD Kabupaten Dharmasraya dalam pembahasan rapat paripurna antara Eksekutif dan Legislatif.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021 disusun dengan cara menggabungkan laporan keuangan SKPD dan SKPKD selaku Entitas Akuntansi. Laporan Keuangan dimaksud disusun dan disajikan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada Lampiran 1.01. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Kerangka tersebut di atas dapat dimaknai bahwa Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut.

1. mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
2. menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
7. menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 dimaksudkan untuk memberikan informasi yang relevan dan handal mengenai pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh seluruh entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya selama Tahun 2021 sehingga dapat dievaluasi dan dinilai kinerjanya oleh *stake holder*, dan tujuan secara umum adalah memberikan informasi dalam rangka:

1. pembuatan keputusan baik di bidang ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bahan bukti pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah;
2. informasi kinerja Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya yang berhubungan dengan anggaran/keuangan daerah sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi baik dari segi manajerial maupun organisasi untuk perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya di masa yang akan datang;
3. melaporkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan serta kinerja keuangan daerah selama periode Tahun 2021;
4. menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek;
5. menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit kerja pemerintah dan perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya, dalam satu tahun anggaran;
6. memonitor kinerja, dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang telah disyaratkan;
7. perencanaan dan penganggaran serta untuk memprediksi pengaruh pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional;

8. mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi, antara lain: untuk menentukan biaya pelaksanaan program, fungsi dan aktivitas suatu satker sehingga mempermudah dalam melakukan analisis dan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja sebelumnya dengan kinerja unit pemerintahan, mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan serta target yang telah ditetapkan.

C. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan konsolidasi dari laporan keuangan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2014;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021;
47. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 46 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya;
48. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 23 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Kas Non Anggaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
49. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
50. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya;
51. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud;
52. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya;
53. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 22 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya;
54. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penjabara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021;
55. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021.

D. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Agar laporan keuangan dapat dipahami oleh para *stake holder* secara luas, tidak terbatas pada kepentingan tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan serta menghindari kesalahpahaman dan multitafsir dalam memahami laporan maka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai pengungkapan hal-hal penting yang diperlukan dalam penyajian Laporan Keuangan, dimana secara umum bertujuan untuk:

1. Laporan keuangan mudah dipahami;
2. Menghindari kesalahpahaman;
3. Pemahaman mendalam melalui pengungkapan setiap pos penting;
4. Mampu menjawab bagaimana perkembangan kondisi keuangan entitas;
5. Pengungkapan paripurna *(full disclosure)*.

Untuk lebih mudah memahami Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021, maka CaLK disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

A. Informasi Umum
B. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
C. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
D. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Kinerja APBD

A. Ekonomi Makro
B. Kebijakan Keuangan Daerah
C. Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

A. Penjelasan Atas Kinerja Dan Posisi Keuangan
B. Hambatan Dan Kendala Pencapaian Target Keuangan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

A. Entitas Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah
B. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.
C. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
D. Kebijakan Akuntansi

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

A. Laporan Realisasi Anggaran
B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
C. Neraca
D. Laporan Operasional
E. Laporan Arus Kas
F. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

A. Gambaran Umum Kabupaten Dharmasraya
B. Susunan Perangkat Daerah
C. Pelaksanaan Transaksi Non Tunai
D. Revaluasi Aset Tetap

Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

A. Ekonomi Makro

Secara garis besar ekonomi makro merupakan kajian tentang ekonomi yang menjelaskan perubahan ekonomi yang dapat mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijakan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran APBD Tahun 2021 dipengaruhi kondisi tahun 2020 karena proses perencanaan dan penganggaran tahun 2021 dilaksanakan pada tahun 2020.

Kondisi perekonomian makro secara langsung maupun tidak langsung turut mempengaruhi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi perkembangan kondisi perekonomian di Kabupaten Dharmasraya yang berjalan pada periode sebelumnya. Asumsi dasar ekonomi makro mencakup variabel-variabel yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBD. Meskipun asumsi dasar tersebut hanya sebagai ancar-ancar dalam menghitung postur APBD, namun dalam kondisi tertentu, asumsi dasar tersebut dapat menjadi target yang harus dicapai. Berkaitan dengan itu, menjaga stabilitas ekonomi makro menjadi keharusan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBD. APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021 disusun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian secara makro yang terjadi pada Kabupaten Dharmasraya selama tahun 2020. Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya yang direncanakan dalam APBD mempunyai asumsi tetap dalam masa anggaran berjalan. Sedangkan apabila terdapat perubahan atas kondisi perekonomian maupun pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan perubahan mendasar maka dilaksanakan penyesuaian dalam perencanaan anggaran didalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun berjalan untuk membiayai kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD.

Indikator Ekonomi Makro yang mempengaruhi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya baik secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu meliputi pertumbuhan PDRB, laju inflasi provinsi, PDRB perkapita, indeks gini, persentase penduduk di atas garis kemiskinan. Ringkasan indikator ekonomi makro dapat dilihat pada tabel berikut:

A.1. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan asumsi penyusunan APBD yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah atau merupakan nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Kondisi perekonomian Kabupaten Dharmasraya hingga tahun 2019 menunjukkan tanda perbaikan dan percepatan perputaran roda perekonomian. Adanya pandemi Covid-19 sejak akhir 2019 turut memberikan dampak penurunan yang luar biasa terhadap perekonomian di dunia, tak terkecuali Kabupaten Dharmasraya. Kontraksi ekonomi tersebut tergambar melalui nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan PDRB total yang negatif di tahun 2020.

Nilai PDRB ADHB Kabupaten Dharmasraya selama periode tahun 2016 sampai dengan 2019 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Nilainya pada tahun 2016 tercatat sebesar 8,43 triliun rupiah, kemudian meningkat hingga pada tahun 2019 tercatat sudah sebesar 10,34 triliun rupiah, atau tumbuh sebesar 22,59 persen. Namun, di tahun 2020 terjadi penurunan nilai PDRB sebagai imbas dari pandemi Covid-19 yang telah melanda seluruh negara di dunia. Nilai PDRB ADHB Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 adalah sebesar 10,24 triliun, atau merosot 0,98 persen dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas dan tingkat produksi di sebagian besar lapangan usaha sebagai efek buruk dari pandemi Covid-19. Perkembangan PDRB ADHB menurut lapangan usaha di Kabupaten Dharmasraya periode 2016-2020 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.1
Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2016-2020 (Jutaan Rupiah)

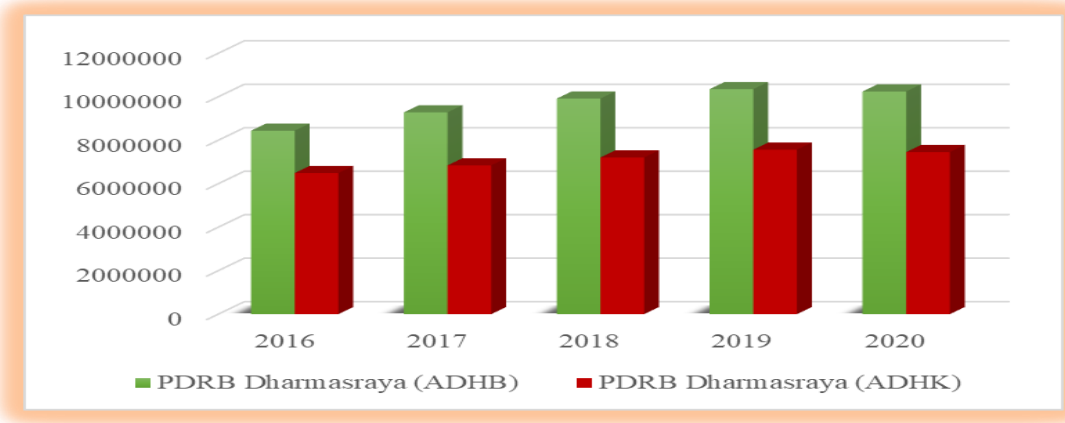
PDRB	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.646.716,98	2.852.097,92	2.949.573,35	2.897.945,76	2 .784.872,62
B. Pertambangan dan Penggalian	684.589.75	674.407,94	700.488,64	728.630,78	690.128,35
C. Industri Pengolahan	511.210.21	564.907.91	578.751.87	509.422,40	512.063,92
D. Pengadaan Listrik dan Gas	79,24	91,70	2.371.90	2.364,29	2.233,23
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	48,15	52,73	1343.69	1.374,85	1.347,51
F. Konstruksi	1.113.105,74	1.242.481,06	1.368.732,37	1.528.778,65	1.518.921,00
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.159.040.84	1.309.136,86	1.431.109,11	1.536.370,11	1.526.575,49
H. Transportasi dan Pergudangan	494.720.46	556.334,00	606.728.93	674.451,04	610.900,94

PDRB	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	80.131.22	90.275.81	98.432.60	108.608,81	93.709,18
J. Informasi dan Komunikasi	447.286.33	546.480,60	604.748.84	638.260,51	687.553,31
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	194.795.27	208.172,57	218.323,35	229.137,08	234.258,10
L. Real Estat	186.751,97	204.116,27	219.837,17	236.684,00	237.121,72
M,N. Jasa Perusahaan	1.800,81	80,08	2.055.70	2.190,45	2.094,33
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	492.819,73	540.821,72	594.587,38	656.363,92	711.018,92
P. Jasa Pendidikan	224.760,10	262.198,82	287.288,26	322.993,17	711.018,92
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	135.148,05	154.792,33	172.267,78	187.701,55	206.681,63
R,S,T,U. Jasa lainnya	61.726,42	70.837,91	80.380,33	89.945,22	83.388,43
PDRB Dharmasraya (ADHB)	**8.437.660,72**	**9.282.449,03**	**9.917.021,29**	**10.351.222,59**	**10.242.190,77**
PDRB Dharmasraya (ADHK)	**6.490.285,83**	**6.844.131,09**	**7.208.321,66**	**7.565.212,12**	**7.454.968,15**

Sumber : www.bps.go.id

Untuk perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten tahun 2016-2020, dapat dilihat di Gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.1
Grafik Nilai PDRB ADHB dan PDRB ADHK
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020



Dari grafik di atas terlihat secara umum bahwa PDRB Kabupaten Dharmasraya baik ADHB maupun ADHK selalu meningkat tiap tahunnya kecuali dari tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami penurunan.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2020 mencapai 10,24 triliun rupiah. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,10 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 10,34 triliun rupiah. Turunnya nilai PDRB ini utamanya dipengaruhi oleh menurunnya nilai produksi di sebagian lapangan usaha. Sementara itu, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 juga mengalami penurunan sebesar 0,10 triliun rupiah, dari 7,56 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 7,46 triliun rupiah pada tahun 2020. Penurunan nilai PDRB ini mengindikasikan telah terjadinya penurunan output produksi. Pada 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya terkontraksi sebesar -1,39 persen, sedangkan pada 2019 mampu tumbuh sebesar 4,94 persen. Perlambatan ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Dharmasraya, tetapi juga telah menjadi permasalahan global akibat merebaknya pandemi Covid-19 yang di Indonesia sendiri dirasakan sejak Maret 2020 hingga saat ini.

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 27,19 persen, meskipun kontribusinyai menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 27.99 persen.

Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 14,90 persen, atau naik dibanding 2019 yang sebesar 14.84 persen. Kontribusi lapangan usaha Konstruksi tercatat sebesar 14,83 persen, naik dibandingkan 2019 yang tercatat sebesar 14,77 persen. Kontribusi lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib adalah sebesar 6,94 persen, juga naik jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 6,34 persen. Terakhir, kontribusi lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian adalah sebesar 6,74 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan 2019 sebesar 7,04 persen.

Dapat disimpulkan bahwa Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib adalah kategori yang kontribusinya mengalami peningkatan dibandingkan 2019. Sebaliknya, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta kategori Pertambangan dan Penggalian kontribusinya berangsur-angsur menurun. Untuk lapangan usaha lainnya, selain Informasi dan Komunikasi, kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Dharmasraya dibawah 6 persen.

Tabel 2.2
Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (PDRB ADHB)
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 s/d 2020

PDRB	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31,37	30,85	30,23	27,99	27,19
B. Pertambangan dan Penggalian	8,11	7,44	7,09	7,04	6,74
C. Industri Pengolahan	6,06	6,00	5,73	4,92	5,00
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F. Konstruksi	13,19	13,56	13,88	14,77	14,83
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,74	13,92	14,23	14,84	14,90
si dan Pergudangan	5,86	6,00	6,20	6,51	5,96
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,95	0,96	0,98	1,05	0,91
J. Informasi dan Komunikasi	5,30	5,51	5,67	6,16	6,71
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,31	2,24	2,19	2,22	2,29
L. Real Estat	2,21	2,23	2,25	2,29	2,32
M,N. Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,84	6,05	6,07	6, 43	6,94
P. Jasa Pendidikan	2,66	2,76	2,89	3,12	3,31
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,60	1,65	1,72	1,81	2,02
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,73	0,77	0,81	0,87	0,81
PDRB Dharmasraya	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : dharmasrayakab.bps.go.id

A.2. Laju Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil pada suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB ADHK tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama setahun.

Laju pertumbuhan PDRB merupakan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu, biasanya dihitung setiap tahun. Salah satu tujuan dihitungnya pertumbuhan PDRB adalah untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional, serta sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perencanaan pembangunan, selain itu pertumbuhan PDRB juga dijadikan dasar pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan bagi perusahaan swasta. Dalam menghitung pertumbuhan PDRB, maka PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya dilihat berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 tercatat menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh penurunan jumlah produksi di beberapa lapangan usaha. Nilai PDRB ADHK Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 adalah sebesar 7,46 triliun rupiah. Nilainya menurun dari tahun 2019 yang mencapai 7,56 triliun rupiah. Dengan demikian, maka terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,39 persen. Selain dampak dari pandemi Covid-19, penurunan produksi komoditi pertanian juga disinyalir menjadi sebab perlambatan kinerja perekonomian Kabupaten Dharmasraya.

Efek pandemi Covid 19 yang melanda dunia, telah menahan laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2020. Di Dharmasraya, Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, 11 kategori mengalami pertumbuhan negatif, sementara 6 lainnya masih mampu untuk tumbuh positif. 6 lapangan usaha bertumbuh positif, menurut yang tertinggi berturut-turut: lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 7,89 persen, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,11 persen, lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 4,11 persen, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,73 persen, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,69 persen, dan lapangan usaha Real Estate sebesar 0,04 persen.

Sedangkan 11 lapangan usaha yang pertumbuhannya negatif, diantaranya dari yang terendah adalah lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar -15,19 persen, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar -13,18 persen, lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar -9,40 persen, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar -6,52 persen, lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar -5,67 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar -5,31 persen, lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar -3,35 persen, lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar -2,08 persen, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan

Sosial Wajib sebesar -0,93 persen, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar -0,76 persen, serta lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar -0,34 persen.

Laju Pertumbuhan Rill PDRB Kabupaten Dharmasraya ADHK Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020.

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan Rill PDRB (ADHK 2010) Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2016-2020 (persen)

PDRB	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,22	4,01	4,99	**2,23**	(0,76)
B. Pertambangan dan Penggalian	(9,21)	(5,51)	(2,23)	3,61	0,69
C. Industri Pengolahan	6,51	4,73	2,44	(4,88)	(3,35)
D. Pengadaan Listrik dan Gas	10,50	4,12	4,14	2,53	(6,52)
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,68	4,41	2,46	3,79	(2,08)
F. Konstruksi	10,31	9,88	8,02	9,13	7,89
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,91	8,34	6,74	6,97	(0,34)
H. Transportasi dan Pergudangan	8,34	8,42	7,82	8,31	(13,18)
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,24	6,89	6,50	6,75	(15,19)
J. Informasi dan Komunikasi	10,31	9,88	8,02	9,13	7,89
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	5,74	2,65	1,26	2,62	0,89
L. Real Estat	5,65	6,64	4,74	5,41	0,04
M,N. Jasa Perusahaan	6,23	2,91	4,64	4,33	(5,67)
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,03	5,16	6,37	6,73	(0,93)
P. Jasa Pendidikan	8,67	9,61	8,05	8,54	4,11

PDRB	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,66	9,13	7,85	7,52	7,11
R,S,T,U. Jasa lainnya	10,92	11,35	8,29	9,33	(9,40)
PDRB Dharmasraya	**5,42**	**5,44**	**5,28**	**4,94**	**(1,39)**

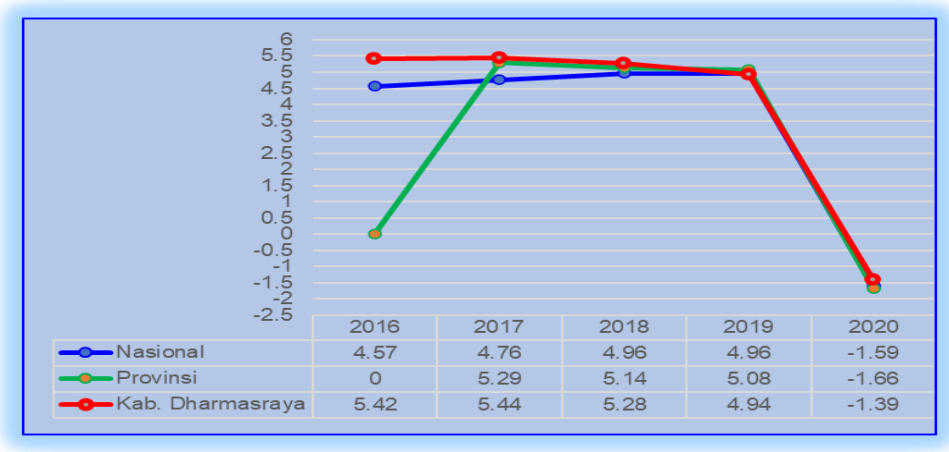
Sumber : dharmasrayakab.bps.go.id

Dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami sedikit pelambatan disepanjang tahun 2020 sebagai dampak dari adanya pertumbuhan ekonomi global yang mengalami penurunan termasuk Kabupaten Dharmasraya. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia. Akan tetapi pada triwulan III 2020 perekonomian Indonesia menunjukkan perbaikan yang signifikan. Titik balik (turning point) pemulihan ekonomi di triwulan III 2020 ini juga tercermin dari data ekonomi yang menunjukkan adanya perbaikan di berbagai sektor.

Pada triwulan III 2020 perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan negatif (kontraksi) sebesar minus 3,49% (y-on-y), membaik dari triwulan sebelumnya yang sebesar minus 5,32%. Diakhir tahun 2020 menjadi semakin membaik menjadi minus 1,59%. Hal ini menunjukkan proses pemulihan ekonomi dan pembalikan arah dari aktivitas-aktivitas ekonomi nasional menunjukkan ke arah zona positif. Seluruh komponen pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi pengeluaran mengalami peningkatan, maupun dari sisi produksi. Perbaikan kinerja perekonomian didorong oleh peran stimulus fiskal atau peran instrumen APBD didalam penanganan pandemi COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional.

Pandemi covid-19 yang sudah berlangsung sejak triwulan pertama tahun 2020, membawa pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sehingga banyak sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif dan berkurangnya aktifitas perekonomian masyarakat. Namun demikian adanya harapan efek ini akan berkurang dan mereda di tahun 2021, maka pertumbuhan ekonomi juga akan tumbuh positif.

Gambar 2.2
Laju Pertumbuhan PDRB (ADHK 2010) Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 (persen)



	2016	2017	2018	2019	2020
Nasional	4.57	4.76	4.96	4.96	-1.59
Provinsi	0	5.29	5.14	5.08	-1.66
Kab. Dharmasraya	5.42	5.44	5.28	4.94	-1.39

Pada gambar 2.1 dapat dilihat bahwa perbandingan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya dengan laju pertumbuhan PDRB Propinsi Sumatera Barat dan PDRB Nasional pada harga konstan selama periode 2016 – 2020. Terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2017 baik secara nasional, provinsi maupun Kabupaten Dharmasraya sendiri. Bahkan terjadi pertumbuhan PDRB yang negatif pada tahun 2020 yang disebabkan oleh dampak pendemi Covid-19 yang sudah berlangsung sejak triwulan pertama tahun 2020. Secara global, pertumbuhan ekonomi negatif terjadi sekitar 70 persen dari negara di dunia. Kondisi ini mengakibatkan banyaknya sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif dan berkurangnya aktifitas perekonomian masyarakat. Namun demikian adanya harapan efek ini akan berkurang dan mereda di tahun 2021 ini, maka pertumbuhan ekonomi juga akan tumbuh positif. Perlu adanya perencanaan yang strategis untuk memulihkan perekonomian.

A.3. Pendapatan Perkapita

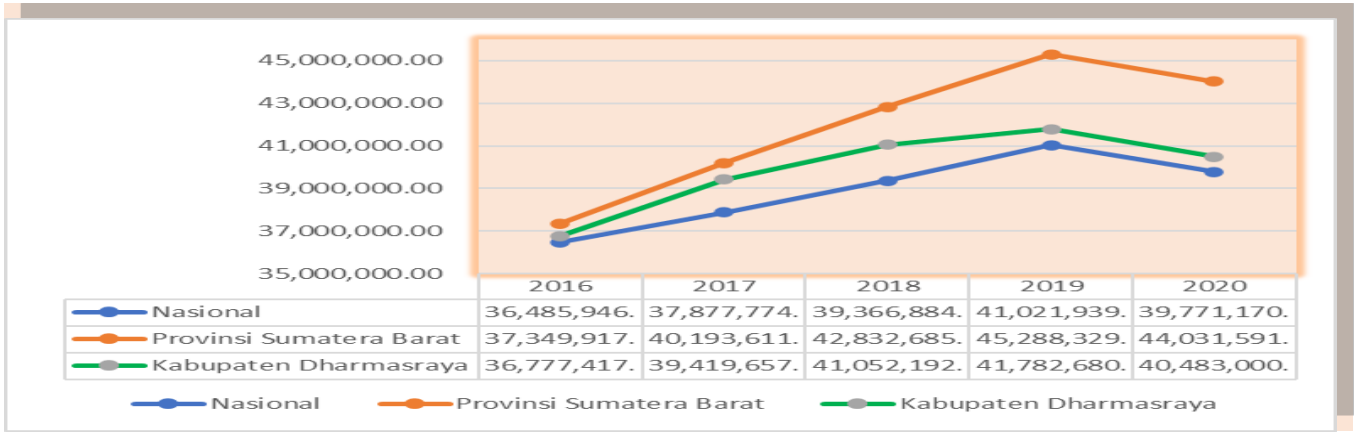
Salah satu indikator makro tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah, dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam

dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB perkapita menggambarkan besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk di wilayah. PDRB perkapita didapatkan dari hasil pembagian PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dengan jumlah penduduk. PDRB perkapita direfleksikan sebagai pendapatan perkapita. Indikator ini digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu daerah. Semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin besar juga kemungkinan daerah tersebut memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata masyarakatnya.

PDRB per kapita menunjukkan PDRB per kepala atau per satu orang penduduk, atau secara umum dapat menggambarkan perkembangan pendapatan perkapita penduduk secara tahunan yang dihitung berdasarkan nilai PDRB ADHB. Trend nilai PDRB per kapita ADHB Kabupaten Dharmasraya sejak tahun 2017 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan, namun di tahun 2020 terjadi penurunan sebagai dampak dari pandemi Covid 19. PDRB perkapita mrnurut ADHB maupun ADHK, sama-sama mengalami penurunan. PDRB perkapita ADHB pada 2020 sebesar 40,48 juta rupiah, menurun bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang sudah sebesar 41,71 juta rupiah. Sementara PDRB perkapita ADHK pada 2020 mencapai 29,47 juta rupiah, juga menurun dibandingkan dengan 2019 yang sebesar 30,48 juta rupiah.

Gambar 2.3
Laju Pertumbuhan PDRB (ADHB) Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 (Rupiah)



	2016	2017	2018	2019	2020
Nasional	36,485,946.	37,877,774.	39,366,884.	41,021,939.	39,771,170.
Provinsi Sumatera Barat	37,349,917.	40,193,611.	42,832,685.	45,288,329.	44,031,591.
Kabupaten Dharmasraya	36,777,417.	39,419,657.	41,052,192.	41,782,680.	40,483,000.

Tabel 2.4
PDRB Pendapatan Perkapita Nasional Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya ADHB Tahun 2016-2020 (Rupiah)

No.	Uraian	Pendapatan Perkapita (Rp.)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PDRB perkapita Nasional (non migas)	36.485,946.23	37,877,774.92	39,366,884.53	41,021,939.07	39,771,170.17
2	Provinsi Sumatera Barat	37,349,917.15	40,193,611.27	40,193,611.27	45,288,329.90	44,031,591.54
3	Kabupaten Dharmasraya	44,031,591.54	39,419,657.12	41,052,192.85	41,782,680.36	40,483,000.00

Sumber : http://www.bps.go.id, dan data diolah

Jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita nasional dan Provinsi Sumatera Barat seperti terlihat pada tabel 2.5 dan gambar 2.2 di atas, dapat dilihat bahwa PDRB perkapita penduduk Dharmasraya berada di atas nasional, tapi masih di bawah Provinsi Sumatera Barat. Selain berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB. Dampak pertumbuhan ekonomi negartif akibat dampak pandemi covid-19 juga mempengaruhi turunnya PDRB perkapita di tahun 2020.

A.3. Inflasi

Laju inflasi digunakan untuk memperlihatkan perkembangan harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dengan belum adanya perhitungan inflasi untuk Kabupaten Dharmasraya, maka berpedoman terhadap nilai inflasi provinsi serta 2 kota lainnya, yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi yang sudah dihitung sejak 2014. Perkembangan inflasi tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah.

Tabel 2.5
Perkembangan Inflasi Nasional, Provinsi Sumbar, Kota Padang dan Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nasional	3,02	**3,61**	**3,13**	**2,72**	**1,68**
2	Sumatera Barat	**5,02**	2,11	2,60	1,67	0,67
3	Kota Padang	2,11	1,45	0,16	1,72	2,12
4	Kota Bukittinggi	1,37	0,43	0,41	1,31	2,02

Sumber : Bank Indonesia, Kajian Ekonomi Regional berbagai tahun edisi 2016 s.d. 2020

Ditinjau dari perkembangan inflasi tahun 2016 sampai dengan 2020 nilai inflasi Provinsi Sumbar maupun dua kota lainnya berada di atas nasional, namun pada tahun 2017 terlihat nilainya turun sangat rendah bahkan tercatat sebagi angka terendah se-Indonesia. Berdasarkan analisa Kajian ekonomi regional Bank Indonesia, rendahnya angka inflasi ini karena melambatnya perekonomian yang berasal dari penurunan kinerja industri pertanian, perdagangan, pengolahan dan industri transportasi dan komunikasi. Melambatnya perekonomian ini berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.

A.4. Indeks Gini (Ketimpangan pendapatan)

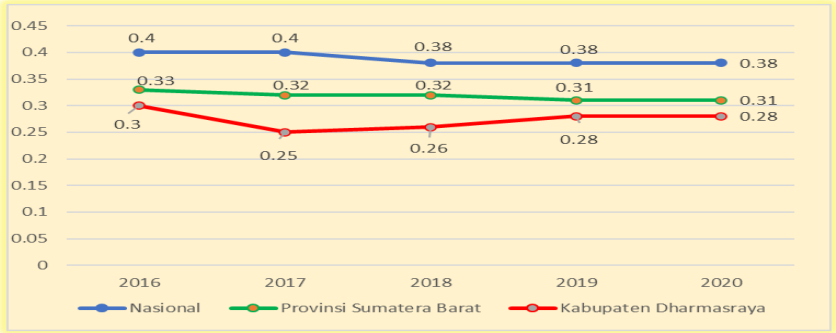
Indeks Gini atau disebut juga dengan Gini rasio digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 (nol) berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Ratio mengalami penuruan berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan. Dilihat dari pengelompokannya, maka indeks Gini dengan nilai di atas 0,5 dikelompokkan sebagai tingkat ketimpangan tinggi, untuk ketimpangan 0,4 - 0,5 disebut dengan tingkat ketimpangan sedang, sedangan apabila rendah dari 0,4 disebut dengan tingkat ketimpangan rendah.

Tabel 2.6
Indeks Gini Rasio Nasional, Provinsi Sumbar dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

No.	Indeks Gini	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nasional	0,40	0,40	0,38	0,38	0,38
2	Provinsi Sumatera Barat	0.33	0.32	0.32	0,31	0,305
3	Kabupaten Dharmasraya	0.30	0.25	0.26	0,28	0,28

Sumber : sumbar.bps.go.id

Gambar 2.4
Indeks Gini Rasio Nasional, Provinsi Sumbar dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020



Berdasarkan data di atas, maka terlihat indeks Gini Kabupaten Dharmasraya maupun Provinsi Sumbar berada pada kategori ketimpangan rendah (lebih baik) dibandingkan angka nasional, dimana indeks Gini nasional berada pada tingkat ketimpangan sedang. Berdasarkan perkembangan nilai, dari tahun 2016 hingga 2020 indeks Gini Kabupaten Dharmasraya dan Provinsi Sumbar sedikit mengalami fluktuatif. Dalam mencapai tujuan yang lebih baik, maka nilai Gini diusahakan agar semakin mendekati nol, sehingga ketimpangan pendapatan masyarakat antar golongan semakin kecil, atau pemerataan pendapatan semakin baik.

A.5. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dari jumlah penduduk seluruhnya. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan (GK). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Berdasarkan pendekatan ini BPS menetapkan garis kemiskinan setiap tahun. Pada tahun 2020, garis kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya ditetapkan sebesar Rp.477.421 per orang/bulan. Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan makanan dan minuman (setara 2.100 kkalori per kapita per hari). Per kapita adalah per orang. Sebagian besar negara di dunia menggunakan standar 2.100 kkalori per kapita per hari, ditambah kebutuhan dasar non-makanan. Sedangkan garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai paling rendah pengeluaran untuk

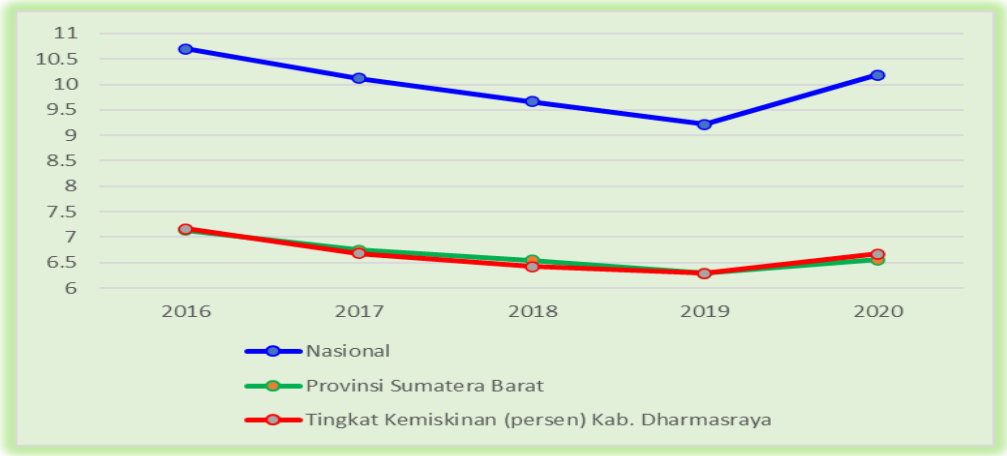
perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok bukan makanan lainnya. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per orang setiap bulan di bawah garis kemiskinan itu.

Tabel 2.7
Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Keterangan	Tingkat Kemeiskinan Tahun (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nasional	10,70	10,12	9,66	9,22	10,19
Provinsi Sumatera Barat	7,14	6,75	6,55	6,29	6,56
Tingkat Kemiskinan (persen) Kab. Dharmasraya	7,16	6,68	6,42	6,29	6,67

Sumber : sumbar.bps.go.id

Gambar 2.5
Grafik Perkembangan Penduduk Miskin
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020



Berdasarkan tabel dan gambar di atas terlihat bahwa tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya berada di bawah nasional. Terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya selama 5 tahun terkahir dari 7,16% pada tahun 2016 menjadi 6,67% pada tahun 2020. Meskipun pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, namun tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya tidak meningkat. Hal ini karena data tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan data BPS yang tersedia yaitu pada bulan Maret 2020. Sehingga kondisi ini belum dapat menggambarkan dampak dari Covid-19.

A.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM digunakan untuk Mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), dengan nilai tersebut maka IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :

1. Umur panjang dan hidup sehat *(a long and healthy life)*
2. Pengetahuan *(knowledge)*
3. Standar hidup layak *(decent standard of living)*

Tabel 2.1 menggambarkan perkembangan IPM Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yang dibandingkan dengan kondisi IPM tingkat propinsi dan nasional. Selama periode 2016 - 2020 IPM Kabupaten Dharmasraya cenderung mengalami peningkatan. Namun memasuki tahun 2020 terjadi sedikit penurunan, penurunan tersebut disebabkan oleh kondisi covid-19 yang sangat mempengaruhi aspek ekonomi maupun sosial masyarakat. Dari 4 indikator pembentuk IPM, maka yang mengalami penurunan terlihat pada pengeluaran pekapita saja, namun tiga indikator lainnya tidak berpengaruh signifikan.

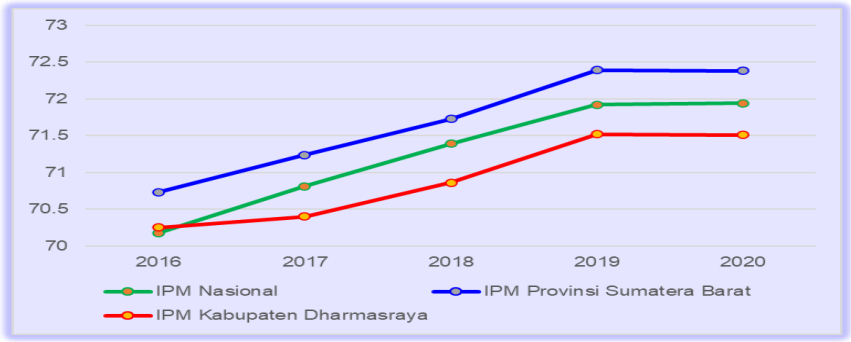
Tabel 2.8
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dharmasraya,
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
A	IPM Nasional	Indeks	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94
1	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	70,9	71,06	71,2	71,34	71,47
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,95	8,1	8,17	8,34	8,48
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,72	12,85	12,91	12,95	12,98
4	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	(000 Rp/ Orang/ Tahun)	10.420	10.664	11.059	11.299	11.013
B	IPM Provinsi Sumatera Barat	Indeks	70,73	71,24	71,73	72,39	72,38
1	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	68,73	68,78	69,01	69,31	69,47
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,59	8,72	8,76	8,92	8,99
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,79	13,94	13,95	14,01	14,02
4	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	(000 Rp/ Orang/ Tahun)	10.126	10.306	10.638	10.925	10.733
C	IPM Kabupaten Dharmasraya	Indeks	70,25	70,4	70,86	71,52	71,51
1	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	70,3	70,44	70,73	71,1	71,33
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,23	8,24	8,25	8,46	8,47
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,39	12,4	12,41	12,42	12,43
4	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	(000 Rp/ Orang/ Tahun)	10.781	10.851	11.189	11.431	11.273

Sumber BPS, Tahun 2021 dan Data Olahan

Dibandingkan dengan nasional dan provinsi, maka IPM kabupaten Dharmasraya berada di bawah nasional maupun provinsi (Gambar 2.1). Namun Kabupaten Dharmasraya berada di peringkat 10 dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Padahal pada tahun 2010 Kabupaten Dharmasraya telah berada di peringkat 8. Namun seiring berjalannya waktu, IPM Dharmasraya saat ini berada di bawah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar maupun propinsi.

Gambar 2.6
Grafik Perkembangan IPM Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2016-2020



Sumber BPS, tahun 2021

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan indikator rata-rata lama sekolah di Dharmasraya adalah 0,73% yang lebih rendah dari tingkat propinsi dan nasional yaitu 1,15% dan 1,63% masing-masingnya. Rata-rata pertumbuhan indikator harapan lama sekolah di Dharmasraya selama periode 2016 – 2020 sebesar 0,08% yang juga lebih rendah dibandingkan tingkat propinsi (0,42%) dan nasional (0,51%). Hal ini perlu menjadi perhatian untuk membentuk strategi untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang menempuh pendidikan lebih tinggi.

A.7. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran yang dilihat berdasarkan tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator ini mengindikasikan besaran persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

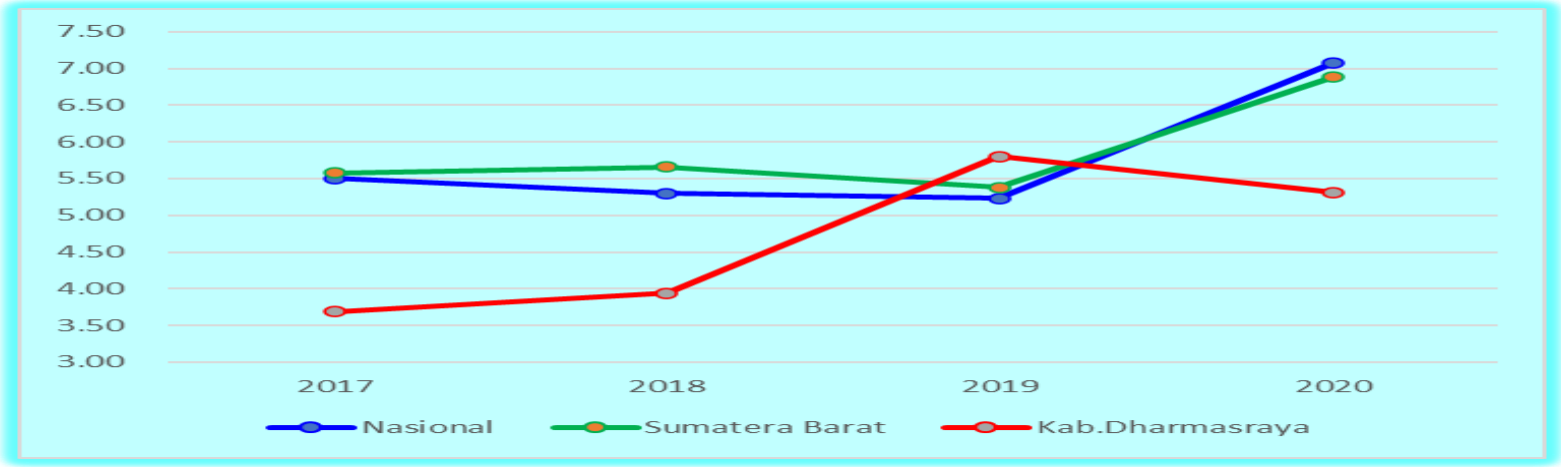
Saat ini Kabupaten Dharmasraya memiliki tingkat pasrtisipasi angkatan kerja sekitar 72,72% dengan tingkat pengangguran 5,31%. Tingkat pengangguran ini menalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2016 yang berjumlah 3,38%. Hal ini menunjukan bahwa pengangguran terus meningkat dari tahun ke tahun terhadap total jumlah angkatan kerja yang ada.

Tabel 2.9
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,38	3.69	4.02	5.06	5.31
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,50	66,96	64,53	65,50	72.72

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 dan Data Olahan

Gambar 2.7
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



Pada gambar diatas terlihat bahwa Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Dharmasraya jauh di bawah kondisi tingkat pengangguran secara nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Angka TPT di Dharmasraya selalu meningkat sejak tahun 2017 hingga tahun 2020, namun tidak dengan provinsi dan nasional yang mengalami fluktuatif. Meskipun demikian dari tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi peningkatan TPT yang cukup tinggi di tingkat provinsi Sumatera barat dan nasional, namun kenaikan TPT di Kabupaten Dharmasraya tidak sebesar nasional ataupun provinsi. Berdasarkan hasil analisa data, maka kenaikan tingkat pengangguran di Dharmasraya hanya disebabkan oleh adanya penambahan jumlah pencari kerja yang baru menyelesaikan Pendidikan.

Untuk lebih jelasnya, berikut gambaran perkembangan indikator makro ekonomi di Kabupaten Dharmasraya :

Tabel 2.10
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2019-2020

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Bertambah/ Berkurang
			2019	2020	
1	2	3	5	6	7
1.	**PDRB (Harga Berlaku)**	Jutaan Rupiah	**10.351.222,59**	**10 242 190,77**	-109031.82
2.	**PDRB (Harga Konstan)**	Jutaan Rupiah	**7.565.212,12**	**7 454 968,15**	356.890.46
3.	**PDRB Perkapita ADHB (Juta)**	Rp	41,80	40,48	0.75
5.	**Tingkat Pertumbuhan Ekonomi**	%	4,98	**(-1,39)**	-6.37
6.	**Tingkat Inflasi (Bukittinggi)**	%	1,31	2,02	-0.34
7.	**Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha**				
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	27,99	27,19	-0.8
B	Pertambangan dan Penggalian	%	7,04	6,74	-0.3
C	Industri Pengolahan	%	4,92	5,00	0.08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	%	0,02	0,02	0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	%	0,01	0,01	0
F	Konstruksi	%	14,77	14,83	0.06
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	14,84	14,90	0.06
H	Transportasi dan Pergudangan	%	6,51	5,96	-0.55
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	1,05	0,91	-0.14
J	Informasi dan Komunikasi	%	6,16	6,71	0.55

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Bertambah/ Berkurang
			2019	2020	
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	%	2,22	2,29	0.07
L	Real Estat	%	2,29	2,32	0.03
M,N	Jasa Perusahaan	%	0,02	0,02	0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosiall Wajib	%	6, 43	6,94	0,51
P	Jasa Pendidikan	%	3,12	3,31	0.19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	%	1,81	2,02	0.21
R, S, T, U	Jasa lainnya	%	0,87	0,81	-0.06
10.	**Indeks Gini**	Indeks	0,28	0,28	0
11.	**Prosentase Penduduk Miskin**	%	6,29	6,67	0.38
12.	**Indeks Pembangunan Manusia**	Indeks	71,52	71,51	-0.01
13.	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	%	5.06	5.31	0.25

Sumber : Hasil Analisis

Berdasarkan tabel indikator ekonomi makro Kabupaten Dharmasraya di atas dilihat terlihat bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami perlambatan dari 4,98 % di tahun 2019 menjadi -1,39% di tahun 2020. Hal ini juga berdampak terhadap nilai PDRB dan pendapatan perkapita. Jika dibandingkan tahun 2019 pendapatan perkapita sebesar Rp. 41,80 juta menjadi Rp.40.8 juta di tahun 2020. Berdasarkan struktur PDRB, maka sektor pertanian masih menduduki kontribusi terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya tetapi juga mengalami perlambatan.

Dilihat berdasarkan rasio gini untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk, pada tahun 2019 sampai 2020 tetap yaitu sebesar 0,28 artinya indeks ini dikategorikan rendah dimana pemerataan pendapatan penduduk Kabupaten Dharmasraya tiap tahunnya semakin membaik.

Sebagai dampak dari covid-19, melambatnya indikator perekonomian secara umum, maka hal ini juga berdampak pada tingkat kemiskinan daerah, terakhir pada tahun 2019 tercatat sebanyak 6,29% dan meningkat menjadi 6,67% di tahun 2020. Meskipun dilihat dari indikator makro secara umum semuanya melambat tetapi kita tetap optimis bahwa capaian keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut dapat memicu meningkatkan daya saing Dharmasraya semakin baik di tingkat regional maupun nasional.

B. Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu untuk melaksanaan pelayanan publik dengan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah kabupaten/kota menjalankan urusan wajib dan urusan pilihan, dimana kewajiban dalam menjalankan urusan tersebut dilaksanakan melalui penganggaran yang dibiayai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, baik secara internal maupun oleh daerah dengan skala yang lebih besar misalnya provinsi, regional maupun nasional. Oleh sebab itu untuk penempatan belanja daerah harus dialokasikan secara efektif dan efisien. Adapun hal ini dilakukan dengan perumusan prioritas pembangunan daerah yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan provinsi. Terutama dalam menanggulangi dampak covid-19 selama tahun 2020.

B.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Dilakukan Tahun 2021

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Adapun kebijakan perencanaan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

B.1. 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

B.1.1.1 Pajak Daerah

a) Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
f) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
g) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

B.1.1.2. Retribusi Daerah

a) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam Peraturan Daerah.
b) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
c) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

d) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
e) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia.
f) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
g) Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU- XV/2017 sepanjang peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 belum ditetapkan.
h) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
    1) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:
    2) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
    3) menghambat mobilitas penduduk;
    4) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
    5) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.
i) Hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum pada butir o) dan butir p) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.
j) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

B.1.1.3. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2021 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-udangan.

B.1.1.4. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
c) hasil kerja sama daerah;
d) jasa giro;
e) hasil pengelolaan dana bergulir;
f) pendapatan bunga;
g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
k) pendapatan denda pajak daerah;
l) Pendapatan denda retribusi daerah;
m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
n) pendapatan dari pengembalian;
o) pendapatan dari BLUD; dan
p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

B.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

B.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari :

1. **Dana Perimbangan, terdiri atas rincian objek:**
   1) Dana Transfer Umum, terdiri atas:
      a) Dana Bagi Hasil (DBH)

         Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata- rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

         Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi /kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

b) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam, terdiri dari:
   - DBH-Kehutanan;
   - DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
   - DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
   - DBH-Pertambangan Gas Bumi;
   - DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
   - DBH-Perikanan;

   dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata- rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah

ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2020, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun

Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

d) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan:

- DAK Fisik; dan
- DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

2. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

3. Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

B.1.2.2. Transfer Antar Daerah, terdiri dari :

Transfer Antar Daerah, terdiri dari

a) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2021, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2020, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

b) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.
Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

a. bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
b. bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
c. bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan
d. bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Sesuai dengan kebijakan pendapatan sebagaimana dijelaskan di atas, maka diperoleh target terhadap pendapatan daerah sebagai berikut :

Tabel 2.11
Pendapatan Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2020 Dan Proyeksi 2021

Kode Akun					Uraian Akun	2020	2021	Selisih	%
1					2	3	4	(5=4-3)	6
4					**PENDAPATAN DAERAH**	**987.308.413.127**	**951.024.985.306**	**(36.283.427.821)**	**(3,67)**
4	**1**				**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**82.888.244.907**	**84.181.605.330**	**1.293.360.423**	**1,56**
4	1	1			Pajak Daerah	17.887.500.000	18.714.133.896	**826.633.896**	**4,62**
4	1	2			Retribusi Daerah	3.310.782.400	3.138.472.400	**(172.310.000)**	**(5,20)**
4	1	3			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.073.610.034	4.063.752.034	**(9.858.000)**	**(0,24)**
4	1	4			Lain-lain PAD yang Sah	57.616.352.473	58.265.247.000	**648.894.527**	**1,13**
4	**2**				**PENDAPATAN TRANSFER**	**857.063.323.220**	**835.392.279.976**	**(21.671.043.244)**	**(2,53)**
4	2	1			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	812.096.028.920	795.317.896.000	**(16.778.132.920)**	**(2,07)**
4	2	1	1		Dana Perimbangan	741.338.362.920	721.777.491.000	**(19.560.871.920)**	**(2,64)**
4	2	1	1	1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	20.208.713.920	17.078.465.000	**(3.130.248.920)**	**(15,49)**
4	2	1	1	2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	482.461.174.000	488.046.996.000	**5.585.822.000**	**1,16**
4	2	1	1	3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus(DAK) Fisik	152.766.632.000	126.655.180.000	**(26.111.452.000)**	**(17,09)**

Kode Akun					Uraian Akun	2020	2021	Selisih	%
4	2	1	1	4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	85.901.843.000	89.996.850.000	**4.095.007.000**	**4,77**
4	2	1	2		Dana Insentif Daerah (DID)	17.485.016.000	17.000.339.000	**(484.677.000)**	**(2,77)**
4	2	1	3		Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
4	2	1	4		Dana Keistimewaan	-	-	-	-
4	2	1	5		Dana Desa	53.272.650.000	56.540.066.000	**3.267.416.000**	**6,13**
4	2	2			Pendapatan Transfer Antar Daerah	44.967.294.300	40.074.383.976	**(4.892.910.324)**	**(10,88)**
4	2	2	1		Pendapatan Bagi Hasil	44.967.294.300	40.074.383.976	**(4.892.910.324)**	**(10,88)**
4	2	2	2		Bantuan Keuangan	-	-	-	-
4	**3**				**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**47.356.845.000**	**31.451.100.000**	**(15.905.745.000)**	**(33,59)**
4	3	1			Pendapatan Hibah	1.500.000.000	500.000.000	**(1.000.000.000)**	**(66,67)**
4	3	2			Dana Darurat	-	-	-	-
4	3	3			Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	45.856.845.000	30.951.100.000	**(14.905.745.000)**	**(32,50)**

Sumber : BKD Kabupaten Dharmasraya

Secara umum pendapatan daerah tahun 2021 diperkirakan masih dibawah nilai pendapatan daerah tahun 2020, yaitu turun dari 987,3 milyar menjadi 951,02 milyar, hal ini dominan disebabkan oleh asumsi yang digunakan untuk penyusunan APBD sesuai dengan Permendagri nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2021 yang masih menjadi acuan dalam penyusunan APBD tahun 2021.

Adapun proyeksi pendapatan daerah tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Proyeksi Pendapatan Asli daerah (PAD) ditargetkan meningkat dibandingkan dengan PAD Tahun 2020, yaitu naik dari 82,8 milyar menjadi 84,18 milyar. Kenaikan ini didasarkan pada asumsi membaiknya perekonomian makro, dengan demikian sektor perekonomian yang terkait dengan pajak maupun retribusi daerah mengalami peningkatan pendapatan, selain peningkatan tersebut juga dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan daerah dan diantaranya pajak daerah yang berasal dari Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir Air Tanah, Sarang Burung Walet, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Berbeda dengan pajak daerah, untuk pendapatan daerah dari retribusi mengalami sedikit penurunan dari 3,3 milyar di tahun 2020 menjadi 2,6 milyar di tahun 2021, untuk retribusi jasa umum seperti pelayanan kesehatan, dan retribusi lainnya tidak mengalami perubahan yang cukup berarti dibandingkan dengan tahun 2020, namun untuk retribusi jasa usaha belum dapat ditarget meningkat dibandingkan tahun 2020, baik untuk retribusi pemakaian kekayaan, parkir, tera ulang maupun jenis retribusi lainnya, dan ini tidak dapat ditargetkan meningkat namun diharapkan pengurangan pungutan retribusi usaha ini akan dapat memperbaiki prospek dunia usaha untuk bangkit selama tahun 2021. Tak jauh berbeda dengan tahun 2020, target retribusi perizinan IMB yang juga belum ditargetkan meningkat karena pembangunan konstruksi bangunan pada umumnya belum sepenuhnya pulih.

2. Pendapatan transfer, terdiri dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah atau provinsi.
   Untuk pendapatan transfer pusat, maka nilai yang digunakan didasarkan alokasi yang diumumkan secara resmi oleh Kementerian Keuangan yang terdiri dari DBH, DAU, DAK Fisik dan DAK Non Fisik, DID, dan Dana Desa. Sehingga dengan demikian pendapatan transfer pusat nilainya berkurang dari 741,3 milyar rupiah menjadi 792,85 milyar rupiah.
   Untuk pendapatan transfer dari provinsi tahun 2021 nilainya juga berkurang dibandingkan alokasi tahun 2020 yaitu dari 44,96 milyar rupiah menjadi 40,07 milyar rupiah, pendapatan transfer dari provinsi berasal dari dana bagi hasil pajak, yaitu bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bagi hasil pajak bea balik nama, bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bagi hasil pajak air permukaan, dan pajak rokok.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, untuk jenis pendapatan ini di tahun 2021 terdiri dari pendapatan hibah sebesar 500 juta rupiah. Selain itu pendapatan hibah juga berasal dari alokasi dana Belanja Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan oleh pemerintah pusat melalui APBD provinsi sebesar 30,9 milyar rupiah.

B.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

B.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
Belanja operasi dirinci atas jenis:

B.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang- undangan, dan honorarium.
Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
- Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2021.
c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

h) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

i) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

B.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta

memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.

C. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi walinagari dan perangkat nagari serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.
Kategori skema ganda, yaitu:
   a. Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

b. Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Kategori bukan skema ganda, yaitu:

a) Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan.
b) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah.
c) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya.
d) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
e) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:
    1) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;
    2) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
    3) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
    4) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

f) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
    a. Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
   a. pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
   b. pimpinan dan anggota DPRD; serta
   c. unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

   Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

   Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

   Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

   Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan infomasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19.

2) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
   a. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
   b. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
   c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
   d. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
   e. Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19).

   Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

7) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

8) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
   a) hadiah yang bersifat perlombaan;
   b) penghargaan atas suatu prestasi;
   c) beasiswa kepada masyarakat;
   d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   e) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.2.1.3. Belanja Bunga dan Subsidi

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak memiliki kewajiban pembayaran bunga dan subsidi yang harus dibayarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021.

B.2.1.4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan social dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2021 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.
Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

- Belanja hibah
  Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
  Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
  Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
  a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
  c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

     i. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

     ii. ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Belanja Bantuan Sosial
  Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

B.2.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan asset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

   a) belanja modal tanah; belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

   b) belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

   c) belanja modal bangunan dan gedung; belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

   d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

   e) Belanja modal aset tetap lainnya; Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

   f) Belanja modal aset tidak berwujud; Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

1) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

(a) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
(b) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
(c) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
(d) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.
Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

(1) keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) keperluan mendesak; dan/atau
(3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

B.2.4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
Belanja transfer dirinci atas jenis:

B.2.4.1. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota

Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
(2) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
(3) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
(4) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2021.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dapat dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil penerimaan pajak daerah provinsi.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2020, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2020, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2021.

Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

B.2.4.1. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

(a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
(b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
(c) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
(d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
(e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.
Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.
Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa.
Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

Adapun Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga, maka untuk rencana belanja daerah sesuai dengan priorotas pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 2.12
Rencana Belanja Daerah Tahun 2021

Kode Akun					Uraian Akun	2020	2021	Selisih	%
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5					**BELANJA DAERAH**	**991.201.864.740**	**1.075.065.334.530**	**83.863.469.790**	**8,46**
5	**1**				**BELANJA OPERASI**	**689.280.035.161**	**758.278.379.873**	**68.998.344.712**	**10,01**
5	1	01			Belanja Pegawai	457.166.043.008	520.724.467.523	63.558.424.515	13,90
5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	185.971.092.153	196.105.312.350	10.134.220.197	5,45
5	1	03			Belanja Bunga	0	0	0	
5	1	04			Belanja Subsidi	0	0	0	
5	1	05			Belanja Hibah	42.942.900.000	41.411.600.000	-1.531.300.000	-3,57
5	1	06			Belanja Bantuan Sosial	3.200.000.000	37.000.000	-3.163.000.000	-98,84
5	**2**				**BELANJA MODAL**	**170.920.399.389**	**224.945.231.005**	**54.024.831.616**	**31,61**
5	2	01			Belanja Modal Tanah	0	0	0	
5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.225.987.189	48.092.899.805	-6.133.087.384	-11,31
5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.879.173.209	105.377.405.200	11.498.231.991	12,25

Kode Akun					Uraian Akun	2020	2021	Selisih	%
5	2	04			Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.154.502.741	70.858.926.000	48.704.423.259	219,84
5	2	05			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	660.736.250	616.000.000	-44.736.250	-6,77
5	**3**				**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**22.860.201.950**	**5.000.000.000**	**-17.860.201.950**	**-78,13**
5	3	01			Belanja Tidak Terduga	22.860.201.950	5.000.000.000	-17.860.201.950	-78,13
5	**4**				**BELANJA TRANSFER**	**108.141.228.240**	**86.841.723.652**	**-21.299.504.588**	**-19,70**
5	4	01			Belanja Bagi Hasil	1.768.578.240	2.115.260.630	346.682.390	19,60
5	4	02			Belanja Bantuan Keuangan	106.372.650.000	84.726.463.022	-21.646.186.978	-20,35

Sumber Data : Badan Keuangan Daerah, dan proyeksi Bapppeda, Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih belanja tahun 2021 dibanding tahun 2020, yaitu berkurang sebesar 261 milyar rupiah, kondisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja operasi, terdiri dari
    a. Belanja pegawai, jenis belanja ini terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN, DPRD dan Kepala Daerah/Wakil kepala daerah serta tambahan/penerimaan lainnya yang telah diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belanja pegawai diperkirakan akan turun dari 457,1 milyar rupiah menjadi 373,9 milyar rupiah atau turun sekitar 83,2 milyar rupiah. Untuk belanja gaji diperhitungkan sebanyak 14 bulan dengan tambahan acress sebesar 2,5 persen dari kondisi tahun 2020, yaitu untuk ASN yang mengalami kenaikan pangkat maupun impasing gaji, adanya penyesuaian besaran gaji akibat adanya perubahan status CPNS yang diangkat tahun 2018 menjadi PNS di tahun 2020 dan belanja gaji CPNS yang lulus di tahun 2020. Sedangkan tambahan penghasilan ASN (tunjangan daerah) hanya dihitung sebanyak 12 bulan, sedangkan sebelumnya di APBD tahun 2019 dan APBD tahun 2020 awal besaran tambahan penghasilan ASN dihitung sebanyak 14 bulan. Begitu juga dengan penyesuaian belanja honor dan insentif juga diperkirakan akan turun. Hal ini mengikuti kondisi proyeksi besaran dan struktur keuangan daerah tahun 2021
    b. belanja barang dan jasa terdiri dari belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja barang yang akan diserahkan ke masyarakat serta belanja jasa yang diantaranya untuk honorarium ASN maupun honor THL, serta untuk sementara baru dapat dialokasikan sebagian besar hanya untuk belanja rutin atau belanja kesekretariatan yang akan dilaksanakan melalui kegiatan di perangkat daerah.
    c. belanja hibah, jenis belanja ini turun dibandingkan belanja hibah tahun 2020 sebesar 42,9 milyar rupiah yang diangarkan diantaranya untuk Pilkada 30 milyar lebih dan dan hibah untuk lembaga tertentu dan hibah yang diberikan kepada

masyarakat. Sedangkan belanja hibah di tahun 2021 diperkirakan hanya sebesar 41,41 milyar rupiah, belanja hibah yang dianggarkan untuk badan/lembaga/organisasi tertentu dan hibah yang diserahkan ke masyarakat.

d. Sedangkan untuk belanja subsidi dan belanja bunga tidak dialokasikan, dengan alasan tidak adanya pembayaran bunga yang diakibatkan oleh hutang maupun tidak adanya belanja subsidi.

2. Belanja modal, untuk alokasi belanja modal diproyeksikan sebesar 98 Milyar rupiah yang terdiri dari belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan (masjid agung), dan belanja jalan, jaringan dan irigasi, serta belanja aset tetap lainnya.
3. Belanja tak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Besaran belanja ini dialokasikan sebesar lima milyar rupiah
4. Belanja transfer. Terdiri dari
   a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada nagari, belanja bagi hasil ini dialokasikan sebesar 2,1 milyar rupiah
   b. Belanja bantuan keuangan kepada nagari, alokasi ini diperkiran sebesar 84,72 milyar rupiah, bantuan keuangan ini berasal pendapatan dari dana desa, dan alokasi dana desa yang dihitung sebesar 10% dari penjumlahan DAU dan DBH yang diterima kabupaten dari pemerintah pusat.

B.3. Arah Kebijakan Pembiayaan

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan besaran APBD Tahun Anggaran 2020, maka diasumsikan tidak adanya pembiayaan daerah. Dilihat dari sisi penerimaan pembiayaan, maka dengan melihat struktur dan besaran APBD tahun 2020 maka diasumsikan secara cermat tidak adanya SILPA selama tahun 2020, dan apabila akan terjadi SILPA maka nilainya tidak terlalu signifikan terhadap APBD tahun 2021.

Begitu juga dengan pengeluaran pembiayaan yang tidak dialokasikan untuk tahun 2021, belum mampunya pemerintah untuk penyertaan modal karena APBD tahun 2021 masih diarahkan untuk kebutuhan memenuhi kebutuhan belanja sesuai prioritas pembangunan daerah.

Tabel 2.13
Target Pembiayan Daerah Tahun 2021

Kode Akun					Uraian Akun	2020	2021	Selisih	%
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6					**PEMBIAYAAN DAERAH**	**3.893.451.613**	**0**	**-3.893.451.613**	**-100**
6	**1**				**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**3.893.451.613**	**0**	**-3.893.451.613**	**-100**
6	1	01			Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunSebelumnya	3.893.451.613	0	-3.893.451.613	-100
6	1	02			Pencairan Dana Cadangan	-	0	-	-
6	1	03			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	0	-	-
6	1	04			Penerimaan Pinjaman Daerah	-	0	-	-
6	1	05			Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	0	-	-
6	1	06			Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	0	0	0
6	**2**				**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**-**	**0**	**-**	**-**
6	2	01			Pembentukan Dana Cadangan	-	0	-	-
6	2	02			Penyertaan Modal Daerah	-	0	-	-
6	2	03			Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang JatuhTempo	-	0	-	-
6	2	04			Pemberian Pinjaman Daerah	-	0	-	-
6	2	05			Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	-	0	-	-
					SILPA	**-**	**0**	**0**	**-**

Sumber : BKD dan Proyeksi Bapppeda Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2020

C. Pencapaian Target Kinerja APBD

Target penerimaan Pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp980.426.098.722,00 dapat direalisasikan sebesar Rp978.920.717.101,87 atau sebesar 99,85% terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 84.352.675.707,00 terealisasi sebesar Rp82.829.461.520,87 atau 98,19%;
b. Pendapatan Transfer sebesar Rp838.634.243.015,00 dengan terealisasi sebesar Rp838.657.002.069,00 atau 100 %;
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp57.439.180.000,00 terealisasi sebesar Rp57.434.253.512,00 atau 99,99%.

Anggaran Belanja Daerah pada Tahun 2021 direncanakan sebesar Rp988.760.523.928,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp670.900.234.079,00, belanja modal sebesar Rp204.564.572.964,00, belanja tak terduga sebesar Rp200.000.000,00, dan belanja transfer sebesar Rp113.095.716.885,00.

Dari total target Belanja Daerah tersebut terealisasi sebesar Rp917.045.656.325,65 atau 92,75% yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp638.704.424.536,16 belanja modal sebesar Rp166.252.751.216,49, belanja tak terduga sebesar Rp164.439.330,00 dan belanja transfer sebesar Rp111.924.041.243,00.

Sementara dari nilai penerimaan pembiayaan yang ditargetkan pada APBD perubahan sebesar Rp8.334.425.206,00 terealisasi 100% dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00, sehingga nilai pembiayaan netto menjadi sebesar Rp8.334.425.206,49.

\

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Penjelasan atas Kinerja dan Posisi Keuangan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah di Tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021.

Dalam Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan sebesar Rp 980.426.098.722,00 yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp84.352.675.707,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp838.634.243.015,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp57.439.180.000,00.

Rencana penerimaan sejumlah tersebut, akan digunakan untuk membiayai belanja daerah sebesar Rp 988.760.523.928,00 direncanakan untuk membiayai :

- Belanja Operasi Rp670.900.234.079,00
- Belanja Modal Rp204.564.572.964,00
- Belanja Tidak Terduga Rp200.000.000,00
- Belanja Transfer Rp113.095.716.885,00

Kekurangan dana untuk membiayai belanja daerah selama Tahun 2021 sebesar Rp8.334.425.206,00 akan di danai dari SiLPA Tahun Lalu setelah koreksi sebesar Rp8.334.425.206,00.

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2021

URAIAN	APBD TA. 2021	REALISASI
Pendapatan	980.426.098.722,00	978.920.717.101,87
Belanja	988.760.523.928,00	917.045.656.325,65
Surflus/Defisit	-8.334.425.206,00	61.875.060.776,22

Persentase Target dan Realisasi capaian keuangan sebagaimana Tabel 3.1 di atas yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat di Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Persentase Pendapatan dan Belanja SKPD TA 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN (%)	BELANJA (%)
1	Dinas Pendidikan	167,90	97,16
2	Dinas Kesehatan	78,45	91,56
3	Rumah Sakit Umum Daerah	100,91	89,13
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	54,73	91,69
5	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	125,17	91,29
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	98,05
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengedalian Penduduk dan keluarga Berencana	-	98,24
8	Dinas Pangan Perikanan	100,15	97,76
9	Dinas Lingkungan Hidup	129,61	94,14
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	98,01
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	98,13
12	Dinas Perhubungan	80,07	95,78
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	63,46	96,40
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	151,74	94,40
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	86,85	97,59
16	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	-	98,12
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	96,88
18	Dinas Pertanian	109,96	97,90
19	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	117,25	96,07
20	Inspektorat Kabupaten	-	97,28
21	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	95,59
22	Badan Keuangan Daerah	99,97	98,63
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	96,21
24	Sekretariat Daerah	115,00	99,46
25	Sekretariat DPRD	-	94,61
26	Kecamatan Pulau Punjung	127,60	97,19
27	Kecamatan Sitiung	82,89	97,44
28	Kecamatan Koto Baru	89,58	90,14
29	Kecamatan Sungai Rumbai	62,12	97,30
30	Kecamatan IX Koto	10,00	96,87
31	Kecamatan Timpeh	44,85	95,25
32	Kecamatan Koto Salak	-	96,30
33	Kecamatan Asam Jujuhan	50,00	96,44

NO	PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN (%)	BELANJA (%)
34	Kecamatan Koto Besar	21,43	97,73
35	Kecamatan Padang Laweh	33,33	96,23
36	Kecamatan Tiumang	-	96,22
37	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	95,40
38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	11,49

Untuk lebih rinci, Target Pendapatan dan Belanja dari masing-masing Perangkat Daerah di atas dapat dilihat berikut ini.

Tabel 3.3
Target Capaian Kinerja APBD Kabupaten Dharmasraya Per SKPD Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	%
1	2	3	4	5	6
1	**Dinas Pendidikan**	**PENDAPATAN**	**45.750.000,00**	**76.815.000,00**	167,90
		Pendapatan Asli Daerah	**45.750.000,00**	**76.815.000,00**	167,90
		Pendapatan Retribusi Daerah	45.750.000,00	76.815.000,00	167,90
		Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	0,00	0,00	0,00
		Pendapatan Hibah - LRA	0,00	0,00	0,00
		BELANJA	**289.119.182.393,00**	**280.921.982.966,83**	**97,16**
		Belanja Operasi	**242.700.748.555,00**	**236.053.095.331,00**	**97,26**
		Belanja Pegawai	202.932.821.808,00	196.784.800.128,00	96,97
		Belanja Barang dan Jasa	33.892.126.747,00	33.458.949.786,00	98,72
		Belanja Hibah	5.875.800.000,00	5.809.345.417,00	98,87
		Belanja Modal	**46.418.433.838,00**	**44.868.887.635,83**	96,66
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.721.132.801,00	13.380.478.590,00	97,52
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.717.764.699,00	25.519.049.157,83	95,51
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.979.536.338,00	5.969.359.888,00	99,83
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(289.073.432.393,00)**	**(280.845.167.966,83)**	**96,87**
2	**Dinas Kesehatan**	**PENDAPATAN**	**254.680.000,00**	**245.225.100,00**	96,29
		Pendapatan Asli Daerah	**254.680.000,00**	**245.225.100,00**	96,29
		Pendapatan Retribusi Daerah	254.680.000,00	245.225.100,00	96,29
		BELANJA	**87.712.261.906,00**	**81.984.314.925,74**	93,47
		Belanja Operasi	**72.860.559.986,00**	**68.443.673.396,00**	93,94
		Belanja Pegawai	44.323.960.000,00	43.970.665.882,00	99,20
		Belanja Barang dan Jasa	28.536.599.986,00	24.473.007.514,00	85,76
		Belanja Modal	**14.851.701.920,00**	**13.540.641.529,74**	91,17
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	%
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.468.905.920,00	1.378.907.810,00	93,87
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.335.000.000,00	12.113.987.719,74	90,84
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	47.796.000,00	47.746.000,00	99,90
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(87.457.581.906,00)**	**(81.739.089.825,74)**	**93,46**
3	**BLUD Puskesmas**	**PENDAPATAN**	**3.726.063.000,00**	**36.906.469.536,00**	990,50
		Pendapatan Asli Daerah	**3.726.063.000,00**	**36.906.469.536,00**	990,50
		Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	3.726.063.000,00	36.906.469.536,00	990,50
		BELANJA	**43.086.956.287,00**	**36.938.429.968,33**	85,73
		Belanja Operasi	**26.642.320.933,00**	**22.611.167.429,33**	84,87
		Belanja Pegawai	3.985.127.693,00	3.441.277.436,81	86,35
		Belanja Barang dan Jasa	22.657.193.240,00	19.169.889.992,52	84,61
		Belanja Modal	**16.444.635.354,00**	**14.327.262.539,00**	87,12
		Belanja Modal Tanah	0.00		0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.508.447.830,00	4.920.532.237,00	89,33
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.878.551.524,00	8.492.568.302,00	85,97
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.002.536.000,00	891.612.000,00	88,94
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	55100000,00	22.550.000,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(39.360.893.287,00)**	**(31.960.432,33)**	**0,08**
		PEMBIAYAAN			
		PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**-**	**732.706.761,95**	0,00
		Penggunaan SiLPA	-	732.706.761,95	0,00
		PEMBIAYAAN NETTO	**-**	**732.706.761,95**	0,00
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**-**	**700.746.329,62**	
4	**Rumah Sakit Umum Daerah**	**PENDAPATAN**	**12.500.000,00**	**34.299.703,00**	274,40
		Pendapatan Asli Daerah	**12.500.000,00**	**34.299.703,00**	274,40
		Pendapatan Retribusi Daerah	12.500.000,00	34.299.703,00	274,40
		BELANJA	**61.474.514.900,00**	**52.102.754.295,92**	84,76
		Belanja Operasi	**34.531.058.000,00**	**27.448.823.602,00**	79,49
		Belanja Pegawai	21.857.748.000,00	21.601.103.686,00	98,83
		Belanja Barang dan Jasa	12.673.310.000,00	5.847.719.916,00	46,14
		Belanja Modal	**26.943.456.900,00**	**24.653.930.693,92**	91,50
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.793.456.900,00	23.974.097.667,92	92,95
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	750.000.000,00	679.833.026,00	90,64
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	400.000.000,00		-
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(61.462.014.900,00)**	**(52.068.454.592,92)**	**84,72**
5	**BLUD RSUD**	**PENDAPATAN**	**40.000.000,00**	**40.344.182.650,67**	100860
		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	40.000.000,00	40.344.182.650,67	100860
		Lain Lain PAD yang sah	40.000.000,00	40.344.182.650,67	100860

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	%
		BELANJA	**40.000.000.000,00**	**38.338.492.281,00**	95,85
		Belanja Operasi	**38.813.585.000,00**	**37.667.084.781,00**	97,05
		Belanja Pegawai	13.617.877.586,00	13.311.589.208,00	97,75
		Belanja Barang dan Jasa	25.195.707.414,00	24.355.495.573,00	96,67
		Belanja Modal	**1.186.415.000,00**	**671.407.500,00**	56,59
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	986.415.000,00	473.407.500,00	47,99
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	200.000.000,00	198.000.000,00	99,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(39.960.000.000,00)**	**2.005.690.369,67**	**(5,02)**
		PEMBIAYAAN			
		PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**-**	**793.861.071,00**	0,00
		Penggunaan SiLPA	-	793.861.071,00	0,00
		PEMBIAYAAN NETTO	**-**	**793.861.071,00**	0,00
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(39.960.000.000,00)**	**2.799.551.440,67**	0.00
6	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang**	**PENDAPATAN**	**1.490.000.000,00**	**806.570.552,16**	54,13
		Pendapatan Asli Daerah	**1.490.000.000,00**	**806.570.552,16**	54,13
		Pendapatan Retribusi Daerah	1.330.000.000,00	605.690.000,00	45,54
		Lain-lain PAD Yang Sah	160.000.000,00	200.880.552,16	125,55
		BELANJA	**104.907.476.590,00**	**96.187.102.481,51**	91,69
		Belanja Operasi	**41.278.455.490,00**	**38.689.004.550,51**	93,73
		Belanja Pegawai	5.625.772.507,00	4.762.822.726,00	84,66
		Belanja Barang dan Jasa	34.306.182.983,00	32.613.656.824,51	95,07
		Belanja Hibah	1.346.500.000,00	1.312.525.000,00	97,48
		Belanja Modal	**63.629.021.100,00**	**57.498.097.931,00**	90,36
		Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	203.304.900,00	167.924.000,00	82,60
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.464.827.200,00	37.141.876.231,00	87,47
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	20.910.889.000,00	20.188.297.700,00	96,54
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	0.00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(103.417.476.590,00)**	**(95.380.531.929,35)**	**92,23**
7	**Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan**	**PENDAPATAN**	**185.278.400,00**	**231.904.400,00**	125,17
		Pendapatan Asli Daerah	**185.278.400,00**	**231.904.400,00**	125,17
		Pendapatan Retribusi Daerah	185.278.400,00	231.904.400,00	125,17
		BELANJA	**5.156.403.634,00**	**4.707.404.160,32**	91,29
		Belanja Operasi	**4.920.093.424,00**	**4.473.052.680,32**	90,91
		Belanja Pegawai	1.631.344.962,00	1.556.164.011,00	95,39
		Belanja Barang dan Jasa	3.288.748.462,00	2.916.888.669,32	88,69
		Belanja Modal	**236.310.210,00**	**234.351.480,00**	99,17
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.560.210,00	28.955.000,00	94,75

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	%
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0.00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	205.750.000,00	205.396.480,00	99,83
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(4.971.125.234,00)**	**(4.475.499.760,32)**	**90,03**
8	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**	**PENDAPATAN**	**0,00**	**0,00**	0,00
		Pendapatan Asli Daerah	**0,00**	**0,00**	0,00
		Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
		BELANJA	**6.935.686.000,00**	**6.800.297.548,00**	98,05
		Belanja Operasi	**6.890.854.000,00**	**6.756.537.548,00**	98,05
		Belanja Pegawai	2.094.736.000,00	2.030.125.416,00	96,92
		Belanja Barang dan Jasa	4.796.118.000,00	4.726.412.132,00	98,55
		Belanja Modal	**44.832.000,00**	**43.760.000,00**	97,61
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.832.000,00	43.760.000,00	97,61
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(6.935.686.000,00)**	**(6.800.297.548,00)**	**98,05**
9	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengedalian Penduduk dan keluarga Berencana**	**PENDAPATAN**	**0,00**	**0,00**	0,00
		Pendapatan Asli Daerah	**0,00**	**0,00**	0,00
		Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
		BELANJA	**9.226.434.950,00**	**9.063.998.424,00**	98,24
		Belanja Operasi	**8128734950,00**	**7981068424,00**	98,18
		Belanja Pegawai	2.558.201.000,00	2.471.559.223,00	96,61
		Belanja Barang dan Jasa	5.570.533.950,00	5.509.509.201,00	98,90
		Belanja Modal	**1.097.700.000,00**	**1.082.930.000,00**	98,65
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	606.700.000,00	592.840.000,00	97,72
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	491.000.000,00	490.090.000,00	99,81
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(9.226.434.950,00)**	**(9.063.998.424,00)**	**98,24**
10	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**PENDAPATAN**	**0,00**	**0,00**	0,00
		Pendapatan Asli Daerah	**0,00**	**0,00**	0,00
		Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
		BELANJA	**27.584.585.589,00**	**3.547.180.706,00**	12,86
		Belanja Operasi	**2.954.500.538,00**	**3.169.269.524,00**	107,27
		Belanja Pegawai	789.039.000,00	1.106.586.044,00	140,24
		Belanja Barang dan Jasa	2.165.461.538,00	2.062.683.480,00	95,25
		Belanja Modal	**24.630.085.051,00**	**377.911.182,00**	1,53
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.735.000,00	26.735.000,00	100,00

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	%
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	750.000,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.602.600.051,00	351.176.182,00	1,43
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(27.584.585.589,00)**	**(3.547.180.706,00)**	**12,86**
11	**Dinas Pangan Perikanan**	**PENDAPATAN**	**105.000.000,00**	**105.160.100,00**	100,15
		Pendapatan Asli Daerah	**105.000.000,00**	**105.160.100,00**	100,15
		Pendapatan Retribusi Daerah	105.000.000,00	105.160.100,00	100,15
		BELANJA	**5.608.673.990,00**	**5.483.214.656,00**	97,76
		Belanja Operasi	**5.418.848.990,00**	**5.293.772.656,00**	97,69
		Belanja Pegawai	2.538.167.000,00	2.481.088.882,00	97,75
		Belanja Barang dan Jasa	2.880.681.990,00	2.812.683.774,00	97,64
		Belanja Modal	**189.825.000,00**	**189.442.000,00**	99,80
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.825.000,00	6.825.000,00	100,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	183.000.000,00	182.617.000,00	99,79
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(5.503.673.990,00)**	**(5.378.054.556,00)**	**97,72**
12	**Dinas Lingkungan Hidup**	**PENDAPATAN**	**100.000.000,00**	**129.612.000,00**	129,61
		Pendapatan Asli Daerah	**100.000.000,00**	**129.612.000,00**	129,61
		Pendapatan Retribusi Daerah	100.000.000,00	129.612.000,00	129,61
		BELANJA	**5.177.087.320,00**	**4.873.779.742,00**	94,14
		Belanja Operasi	**5.066.562.320,00**	**4.764.893.380,00**	94,05
		Belanja Pegawai	2.168.352.040,00	2.065.099.965,00	95,24
		Belanja Barang dan Jasa	2.898.210.280,00	2.699.793.415,00	93,15
		Belanja Modal	**110.525.000,00**	**108.886.362,00**	98,52
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.525.000,00	108.886.362,00	98,52
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(5.077.087.320,00)**	**(4.744.167.742,00)**	**93,44**
13	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**PENDAPATAN**	**0,00**	**0,00**	0,00
		Pendapatan Asli Daerah	**0,00**	**0,00**	0,00
		Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
		BELANJA	**4.532.304.400,00**	**4.442.247.416,00**	98,01
		Belanja Operasi	**4.350.804.400,00**	**4.262.511.316,00**	97,97
		Belanja Pegawai	2.416.218.000,00	2.349.247.164,00	97,23
		Belanja Barang dan Jasa	1.934.586.400,00	1.913.264.152,00	98,90
		Belanja Modal	**181.500.000,00**	**179.736.100,00**	99,03
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	181.500.000,00	179.736.100,00	99,03

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	%
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(4.532.304.400,00)**	**(4.442.247.416,00)**	**98,01**
14	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**PENDAPATAN**	**0,00**	**0,00**	0,00
		Pendapatan Asli Daerah	**0,00**	**0,00**	0,00
		Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
		BELANJA	**4.830.770.220,00**	**4.740.212.728,00**	98,13
		Belanja Operasi	**4.830.770.220,00**	**4.740.212.728,00**	98,13
		Belanja Pegawai	2.405.837.020,00	2.334.812.415,00	97,05
		Belanja Barang dan Jasa	2.424.933.200,00	2.405.400.313,00	99,19
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	0,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(4.830.770.220,00)**	**(4.740.212.728,00)**	**98,13**
15	**Dinas Perhubungan**	**PENDAPATAN**	**350.000.000,00**	**280.240.495,00**	80,07
		Pendapatan Asli Daerah	**350.000.000,00**	**280.240.495,00**	80,07
		Pendapatan Retribusi Daerah	350.000.000,00	280.240.495,00	80,07
		BELANJA	**5.759.891.323,00**	**5.516.678.485,00**	95,78
		Belanja Operasi	**5.541.567.050,00**	**5.302.339.385,00**	95,68
		Belanja Pegawai	2.319.886.000,00	2.250.902.399,00	97,03
		Belanja Barang dan Jasa	3.221.681.050,00	3.051.436.986,00	94,72
		Belanja Modal	**218.324.273,00**	**214.339.100,00**	98,17
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.824.273,00	64.839.100,00	94,21
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	149.500.000,00	149.500.000,00	100,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(5.409.891.323,00)**	**(5.236.437.990,00)**	**96,79**
16	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**PENDAPATAN**	**315.000.000,00**	**199.897.100,00**	63,46
		Pendapatan Asli Daerah	**315.000.000,00**	**199.897.100,00**	63,46
		Pendapatan Retribusi Daerah	315.000.000,00	199.897.100,00	63,46
		BELANJA	**4.441.739.646,00**	**4.281.676.353,00**	96,40
		Belanja Operasi	**3.946.239.646,00**	**3.787.427.203,00**	95,98
		Belanja Pegawai	1.970.090.600,00	1.911.143.833,00	97,01
		Belanja Barang dan Jasa	1.976.149.046,00	1.876.283.370,00	94,95
		Belanja Modal	**495.500.000,00**	**494.249.150,00**	99,75
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	495.500.000,00	494.249.150,00	99,75

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	%
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(4.126.739.646,00)**	**(4.081.779.253,00)**	**98,91**
17	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan**	**PENDAPATAN**	**140.064.000,00**	**212.526.500,00**	151,74
		Pendapatan Asli Daerah	**140.064.000,00**	**212.526.500,00**	151,74
		Pendapatan Retribusi Daerah	140.064.000,00	212.526.500,00	151,74
		BELANJA	**4.059.453.059,00**	**3.832.207.289,00**	94,40
		Belanja Operasi	**4.041.873.059,00**	**3.814.627.289,00**	94,38
		Belanja Pegawai	1.844.988.044,00	1.773.699.388,00	96,14
		Belanja Barang dan Jasa	2.196.885.015,00	2.040.927.901,00	92,90
		Belanja Modal	**17.580.000,00**	**17.580.000,00**	100,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.580.000,00	17.580.000,00	100,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(3.919.389.059,00)**	**(3.619.680.789,00)**	**92,35**
18	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu**	**PENDAPATAN**	**200.000.000,00**	**173.699.600,00**	86,85
		Pendapatan Asli Daerah	**200.000.000,00**	**173.699.600,00**	86,85
		Pendapatan Retribusi Daerah	200.000.000,00	173.699.600,00	86,85
		BELANJA	**4.240.620.570,00**	**4.138.234.554,00**	97,59
		Belanja Operasi	**4.142.355.670,00**	**4.040.848.554,00**	97,55
		Belanja Pegawai	1.894.047.000,00	1.834.358.649,00	96,85
		Belanja Barang dan Jasa	2.248.308.670,00	2.206.489.905,00	98,14
		Belanja Modal	**98.264.900,00**	**97.386.000,00**	99,11
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.264.900,00	77.399.000,00	98,89
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	19.987.000,00	99,94
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(4.040.620.570,00)**	**(3.964.534.954,00)**	**98,12**
19	**Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga**	**PENDAPATAN**	**0,00**	**0,00**	0,00
		Pendapatan Asli Daerah	**0,00**	**0,00**	0,00
		Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
		BELANJA	**7.590.937.764,00**	**7.447.891.716,00**	98,12
		Belanja Operasi	**7.468.607.564,00**	**7.347.225.616,00**	98,37
		Belanja Pegawai	2.244.936.000,00	2.174.137.518,00	96,85
		Belanja Barang dan Jasa	2.531.341.564,00	2.487.410.048,00	98,26
		Belanja Hibah	2.692.330.000,00	2.685.678.050,00	99,75
		Belanja Modal	**122.330.200,00**	**100.666.100,00**	82,29
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	%
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.330.200,00	15.880.000,00	91,63
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	4.932.500,00	98,65
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	79.853.600,00	79,85
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(7.590.937.764,00)**	**(7.447.891.716,00)**	**98,12**
20	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	**PENDAPATAN**	**0,00**	**0,00**	0,00
		Pendapatan Asli Daerah	**0,00**	**0,00**	0,00
		Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
		BELANJA	**3.841.534.257,00**	**3.721.823.207,00**	96,88
		Belanja Operasi	**3.112.184.257,00**	**3.013.936.107,00**	96,84
		Belanja Pegawai	2.469.007.600,00	2.382.583.309,00	96,50
		Belanja Barang dan Jasa	643.176.657,00	631.352.798,00	98,16
		Belanja Modal	**729.350.000,00**	**707.887.100,00**	97,06
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	529.350.000,00	510.155.500,00	96,37
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	197.731.600,00	98,87
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(3.841.534.257,00)**	**(3.721.823.207,00)**	**96,88**
21	**Dinas Pertanian**	**PENDAPATAN**	**56.500.000,00**	**116.172.000,00**	205,61
		Pendapatan Asli Daerah	**56.500.000,00**	**116.172.000,00**	205,61
		Pendapatan Retribusi Daerah	56.500.000,00	116.172.000,00	205,61
		BELANJA	**20.203.504.297,00**	**32.550.151.408,00**	161,11
		Belanja Operasi	**19.051.020.679,00**	**31.399.076.408,00**	164,82
		Belanja Pegawai	10.992.044.000,00	22.148.297.975,00	201,49
		Belanja Barang dan Jasa	8.058.976.679,00	9.250.778.433,00	114,79
		Belanja Modal	**1.152.483.618,00**	**1.151.075.000,00**	99,88
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	297.483.618,00	297.025.000,00	99,85
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	855.000.000,00	854.050.000,00	99,89
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(20.147.004.297,00)**	**(32.433.979.408,00)**	**160,99**
22	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**	**PENDAPATAN**	**13.980.000,00**	**16.391.634,00**	117,25
		Pendapatan Asli Daerah	**13.980.000,00**	**16.391.634,00**	117,25
		Pendapatan Retribusi Daerah	13.980.000,00	16.391.634,00	117,25
		BELANJA	**3.271.363.350,00**	**3.142.691.396,00**	96,07
		Belanja Operasi	**3.262.063.350,00**	**3.134.291.396,00**	96,08
		Belanja Pegawai	2.281.818.000,00	2.213.982.661,00	97,03
		Belanja Barang dan Jasa	980.245.350,00	920.308.735,00	93,89
		Belanja Modal	**9.300.000,00**	**8.400.000,00**	90,32
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	%
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.500.000,00	8.000.000,00	94,12
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	800.000,00	400.000,00	50,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(3.257.383.350,00)**	**(3.126.299.762,00)**	**95,98**
23	**Sekretariat Daerah**	**PENDAPATAN**	**10.000.000,00**	**11.500.000,00**	115,00
		Pendapatan Asli Daerah	**10.000.000,00**	**11.500.000,00**	115,00
		Pendapatan Retribusi Daerah	10.000.000,00	11.500.000,00	115,00
		BELANJA	**34.429.386.096,00**	**34.244.751.327,00**	99,46
		Belanja Operasi	**30.138.581.996,00**	**29.975.200.127,00**	99,46
		Belanja Pegawai	7.674.235.041,00	7.545.714.928,00	98,33
		Belanja Barang dan Jasa	21.259.346.955,00	21.224.485.199,00	99,84
		Belanja Hibah	1.205.000.000,00	1.205.000.000,00	100,00
		Belanja Modal	**4.290.804.100,00**	**4.269.551.200,00**	99,50
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.700.008.100,00	3.681.449.000,00	99,50
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	510.046.000,00	507.352.200,00	99,47
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	80.750.000,00	80.750.000,00	100,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(34.419.386.096,00)**	**(34.233.251.327,00)**	**99,46**
24	**Sekretariat DPRD**	**PENDAPATAN**	**0,00**	**0,00**	0,00
		Pendapatan Asli Daerah	**0,00**	**0,00**	0,00
		Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
		BELANJA	**38.800.211.471,00**	**36.708.201.189,00**	94,61
		Belanja Operasi	**37.828.442.571,00**	**35.837.947.290,00**	94,74
		Belanja Pegawai	14.574.308.076,00	14.026.540.752,00	96,24
		Belanja Barang dan Jasa	23.254.134.495,00	21.811.406.538,00	93,80
		Belanja Modal	**971.768.900,00**	**870.253.899,00**	89,55
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	740.268.900,00	646.768.999,00	87,37
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	124.000.000,00	123.484.900,00	99,58
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	107.500.000,00	100.000.000,00	93,02
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(38.800.211.471,00)**	**(36.708.201.189,00)**	**94,61**
25	**Kecamatan Pulau Punjung**	**PENDAPATAN**	**6.000.000,00**	**7.656.250,00**	127,60
		Pendapatan Asli Daerah	**6.000.000,00**	**7.656.250,00**	127,60
		Pendapatan Retribusi Daerah	6.000.000,00	7.656.250,00	127,60
		BELANJA	**1.608.481.440,00**	**1.563.240.440,00**	97,19
		Belanja Operasi	**1.608.481.440,00**	**1.563.240.440,00**	97,19
		Belanja Pegawai	1.310.273.290,00	1.275.142.742,00	97,32
		Belanja Barang dan Jasa	298.208.150,00	288.097.698,00	96,61
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	0,00

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	%
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(1.602.481.440,00)**	**(1.555.584.190,00)**	**97,07**
26	**Kecamatan Sitiung**	**PENDAPATAN**	**6.460.000,00**	**5.355.000,00**	82,89
		Pendapatan Asli Daerah	**6.460.000,00**	**5.355.000,00**	82,89
		Pendapatan Retribusi Daerah	6.460.000,00	5.355.000,00	82,89
		BELANJA	**1.627.404.800,00**	**1.585.748.265,00**	97,44
		Belanja Operasi	**1.627.404.800,00**	**1.585.748.265,00**	97,44
		Belanja Pegawai	1.401.328.000,00	1.360.873.021,00	97,11
		Belanja Barang dan Jasa	226.076.800,00	224.875.244,00	99,47
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(1.620.944.800,00)**	**(1.580.393.265,00)**	**97,50**
27	**Kecamatan Koto Baru**	**PENDAPATAN**	**3.600.000,00**	**3.225.000,00**	89,58
		Pendapatan Asli Daerah	**3.600.000,00**	**3.225.000,00**	89,58
		Pendapatan Retribusi Daerah	3.600.000,00	3.225.000,00	89,58
		BELANJA	**1.697.773.200,00**	**1.530.418.845,00**	90,14
		Belanja Operasi	**1.697.773.200,00**	**1.530.418.845,00**	90,14
		Belanja Pegawai	1.371.313.000,00	1.209.373.604,00	88,19
		Belanja Barang dan Jasa	326.460.200,00	321.045.241,00	98,34
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	0,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(1.694.173.200,00)**	**(1.527.193.845,00)**	**90,14**
28	**Kec. Sungai Rumbai**	**PENDAPATAN**	**8.500.000,00**	**5.280.000,00**	62,12
		Pendapatan Asli Daerah	**8.500.000,00**	**5.280.000,00**	62,12
		Pendapatan Retribusi Daerah	8.500.000,00	5.280.000,00	62,12
		BELANJA	**1.404.666.400,00**	**1.366.707.712,00**	97,30
		Belanja Operasi	**1.404.666.400,00**	**1.366.707.712,00**	97,30
		Belanja Pegawai	1.141.550.400,00	1.104.457.995,00	96,75
		Belanja Barang dan Jasa	263.116.000,00	262.249.717,00	99,67
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	0,00

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	%
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(1.396.166.400,00)**	**(1.361.427.712,00)**	**97,51**
29	**Kecamatan IX Koto**	**PENDAPATAN**	**2.500.000,00**	**250.000,00**	10,00
		Pendapatan Asli Daerah	**2.500.000,00**	**250.000,00**	10,00
		Pendapatan Retribusi Daerah	2.500.000,00	250.000,00	10,00
		BELANJA	**1.714.944.000,00**	**1.661.350.473,00**	96,87
		Belanja Operasi	**1.714.944.000,00**	**1.661.350.473,00**	96,87
		Belanja Pegawai	1.453.267.000,00	1.403.126.223,00	96,55
		Belanja Barang dan Jasa	261.677.000,00	258.224.250,00	98,68
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	0,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(1.712.444.000,00)**	**(1.661.100.473,00)**	**97,00**
30	**Kecamatan Timpeh**	**PENDAPATAN**	**6.160.000,00**	**2.762.500,00**	44,85
		Pendapatan Asli Daerah	**6.160.000,00**	**2.762.500,00**	44,85
		Pendapatan Retribusi Daerah	6.160.000,00	2.762.500,00	44,85
		BELANJA	**1.153.703.000,00**	**1.098.919.537,00**	95,25
		Belanja Operasi	**1.153.703.000,00**	**1.098.919.537,00**	95,25
		Belanja Pegawai	915.689.000,00	862.510.503,00	94,19
		Belanja Barang dan Jasa	238.014.000,00	236.409.034,00	99,33
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	0,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(1.147.543.000,00)**	**(1.096.157.037,00)**	**95,52**
31	**Kecamatan Koto Salak**	**PENDAPATAN**	**1.000.000,00**	**0,00**	0,00
		Pendapatan Asli Daerah	**1.000.000,00**	**0,00**	0,00
		Pendapatan Retribusi Daerah	1.000.000,00	0,00	0,00
		BELANJA	**1.357.181.200,00**	**1.306.920.615,00**	96,30
		Belanja Operasi	**1.357.181.200,00**	**1.306.920.615,00**	96,30
		Belanja Pegawai	1.109.381.200,00	1.063.343.237,00	95,85
		Belanja Barang dan Jasa	247.800.000,00	243.577.378,00	98,30
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	0.00

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	%
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0.00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0.00
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(1.356.181.200,00)**	**(1.306.920.615,00)**	**96,37**
32	**Kecamatan Asam Jujuhan**	**PENDAPATAN**	**1.000.000,00**	**500.000,00**	50,00
		Pendapatan Asli Daerah	**1.000.000,00**	**500.000,00**	50,00
		Pendapatan Retribusi Daerah	1.000.000,00	500.000,00	50,00
		BELANJA	**1.177.221.776,00**	**1.135.263.702,00**	96,44
		Belanja Operasi	**1.177.221.776,00**	**1.135.263.702,00**	96,44
		Belanja Pegawai	945.339.400,00	907.878.018,00	96,04
		Belanja Barang dan Jasa	231.882.376,00	227.385.684,00	98,06
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	0,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(1.176.221.776,00)**	**(1.134.763.702,00)**	**96,48**
33	**Kecamatan Koto Besar**	**PENDAPATAN**	**3.500.000,00**	**750.000,00**	21,43
		Pendapatan Asli Daerah	**3.500.000,00**	**750.000,00**	21,43
		Pendapatan Retribusi Daerah	3.500.000,00	750.000,00	21,43
		BELANJA	**1.403.710.800,00**	**1.371.786.582,00**	97,73
		Belanja Operasi	**1.403.710.800,00**	**1.371.786.582,00**	97,73
		Belanja Pegawai	1.144.763.000,00	1.113.132.182,00	97,24
		Belanja Barang dan Jasa	258.947.800,00	258.654.400,00	99,89
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	0,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(1.400.210.800,00)**	**(1.371.036.582,00)**	**97,92**
34	**Kecamatan Padang Laweh**	**PENDAPATAN**	**1.500.000,00**	**500.000,00**	33,33
		Pendapatan Asli Daerah	**1.500.000,00**	**500.000,00**	33,33
		Pendapatan Retribusi Daerah	1.500.000,00	500.000,00	33,33
		BELANJA	**1.084.899.700,00**	**1.043.962.483,00**	96,23
		Belanja Operasi	**1.084.899.700,00**	**1.043.962.483,00**	96,23
		Belanja Pegawai	854.108.000,00	816.340.299,00	95,58
		Belanja Barang dan Jasa	230.791.700,00	227.622.184,00	98,63
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	0,00

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	%
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(1.083.399.700,00)**	**(1.043.462.483,00)**	**96,31**
35	**Kecamatan Tiumang**	**PENDAPATAN**	**2.500.000,00**	**0,00**	0,00
		Pendapatan Asli Daerah	**2.500.000,00**	**0,00**	0,00
		Pendapatan Retribusi Daerah	2.500.000,00	0,00	0,00
		BELANJA	**1.246.607.074,00**	**1.199.488.393,00**	96,22
		Belanja Operasi	**1.246.607.074,00**	**1.199.488.393,00**	96,22
		Belanja Pegawai	943.493.974,00	904.871.020,00	95,91
		Belanja Barang dan Jasa	303.113.100,00	294.617.373,00	97,20
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	0,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(1.244.107.074,00)**	**(1.199.488.393,00)**	**96,41**
36	**Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**	**PENDAPATAN**	**0,00**	**0,00**	0,00
		Pendapatan Asli Daerah	**0,00**	**0,00**	0,00
		Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
		BELANJA	**2.248.053.180,00**	**2.144.643.138,00**	95,40
		Belanja Operasi	**2.248.053.180,00**	**2.144.643.138,00**	95,40
		Belanja Pegawai	816.527.000,00	763.393.658,00	93,49
		Belanja Barang dan Jasa	603.135.300,00	589.686.860,00	97,77
		Belanja Hibah	828.390.880,00	791.562.620,00	95,55
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	0,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(2.248.053.180,00)**	**(2.144.643.138,00)**	**95,40**
37	**Inspektorat Kabupaten**	**PENDAPATAN**	**0,00**	**0,00**	0,00
		Pendapatan Asli Daerah	**0,00**	**0,00**	0,00
		Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
		BELANJA	**5.429.651.900,00**	**5.282.020.848,00**	97,28
		Belanja Operasi	**5.210.674.100,00**	**5.075.869.548,00**	97,41
		Belanja Pegawai	3.095.714.050,00	3.025.853.103,00	97,74
		Belanja Barang dan Jasa	2.114.960.050,00	2.050.016.445,00	96,93

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	%
		Belanja Modal	**218.977.800,00**	**206.151.300,00**	0,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	218.977.800,00	206.151.300,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(5.429.651.900,00)**	**(5.282.020.848,00)**	**97,28**
38	**Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**PENDAPATAN**	**0,00**	**0,00**	0,00
		Pendapatan Asli Daerah	**0,00**	**0,00**	0,00
		Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
		BELANJA	**5.012.425.902,00**	**4.791.393.502,00**	95,59
		Belanja Operasi	**5.002.425.902,00**	**4.781.543.502,00**	95,58
		Belanja Pegawai	2.501.578.000,00	2.405.008.313,00	96,14
		Belanja Barang dan Jasa	2.500.847.902,00	2.376.535.189,00	95,03
		Belanja Modal	**10.000.000,00**	**9.850.000,00**	0,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	9.850.000,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(5.012.425.902,00)**	**(4.791.393.502,00)**	**95,59**
39	**Badan Keuangan Daerah**	**PENDAPATAN DAERAH**	**933.378.563.322,00**	**926.177.676.186,04**	**99,23**
		Pendapatan Asli Daerah	**37.305.140.307,00**	**30.086.420.605,04**	**80,65**
		Pendapatan Pajak Daerah	20.381.633.896,00	20.536.818.148,25	**100,76**
		Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.524.570.411,00	3.524.570.411,00	100,00
		Lain-lain PAD Yang Sah	13.398.936.000,00	6.025.032.045,79	44,97
		PENDAPATAN TRANSFER	**838.634.243.015,00**	**838.657.002.069,00**	**100,00**
		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	780.827.580.461,00	787.384.510.329,00	100,84
		Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.806.662.554,00	51.272.491.740,00	88,70
		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	57.439.180.000,00	57.434.253.512,00	99,99
		Pendapatan Hibah	26.550.000.000,00	26.548.313.512,00	99,99
		Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	30.889.180.000,00	30.885.940.000,00	99,99
		BELANJA	**132.520.070.730,00**	**130.707.270.572,00**	**98,63**
		Belanja Operasi	**19.043.634.945,00**	**18.438.339.999,00**	**96,82**
		Belanja Pegawai	12.511.130.383,00	12.123.166.251,00	96,90
		Belanja Barang dan Jasa	6.532.504.562,00	6.315.173.748,00	96,67
		Belanja Modal	**180.718.900,00**	**180.450.000,00**	**99,85**
		Belanja Modal Tanah	-	-	0,00

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	%
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.718.900,00	81.450.000,00	**99,67**
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	99.000.000,00	99.000.000,00	100,00
		BELANJA TIDAK TERDUGA	**200.000.000,00**	**164.439.330,00**	**82,22**
		Belanja Tak Terduga	200.000.000,00	164.439.330,00	82,22
		BELANJA TRANSFER	**113.095.716.885,00**	**111.924.041.243,00**	**98,96**
		Belanja Bagi Hasil	3.032.853.885,00	1.861.178.243,00	61,37
		Belanja Bantuan Keuangan	110.062.863.000,00	110.062.863.000,00	100,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	**800.858.492.592,00**	**795.470.405.614,04**	**99,33**
		PEMBIAYAAN			
		PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**8.334.425.206,00**	**8.334.425.206,49**	**0,00**
		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	8.334.425.206,00	8.334.425.206,49	0,00
		PEMBIAYAAN NETTO	8.334.425.206,00	8.334.425.206,49	**100,00**
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**809.192.917.798,00**	**803.804.830.820,53**	**99,33**
40	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**PENDAPATAN**	**0,00**	**0,00**	0,00
		Pendapatan Asli Daerah	**0,00**	**0,00**	0,00
		Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
		BELANJA	**6.082.748.814,00**	**5.852.496.363,00**	96,21
		Belanja Operasi	**5.998.019.914,00**	**5.770.660.363,00**	96,21
		Belanja Pegawai	3.430.259.994,00	3.237.479.916,00	94,38
		Belanja Barang dan Jasa	2.567.759.920,00	2.533.180.447,00	98,65
		Belanja Modal	**84.728.900,00**	**81.836.000,00**	0,00
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.728.900,00	81.836.000,00	0,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(6.082.748.814,00)**	**(5.852.496.363,00)**	**96,21**
	Rekapitulasi	**PENDAPATAN DAERAH**	**980.426.098.722,00**	**978.920.717.101,87**	**99,85**
		Pendapatan Asli Daerah	**84.352.675.707,00**	**82.829.461.520,87**	**98,19**
		Pendapatan Pajak Daerah	20.381.633.896,00	20.536.818.148,25	**100,76**
		Pendapatan Retribusi Daerah	3.161.472.400,00	2.411.365.382,00	
		Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.524.570.411,00	3.524.570.411,00	100,00
		Lain-lain PAD Yang Sah	57.284.999.000,00	56.356.707.579,62	98,38
		PENDAPATAN TRANSFER	**838.634.243.015,00**	**838.657.002.069,00**	**100,00**
		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	780.827.580.461,00	787.384.510.329,00	100,84

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	%
		Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.806.662.554,00	51.272.491.740,00	88,70
		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	57.439.180.000,00	57.434.253.512,00	99,99
		Pendapatan Hibah	26.550.000.000,00	26.548.313.512,00	99,99
		Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	30.889.180.000,00	30.885.940.000,00	99,99
		BELANJA	**988.760.523.928,00**	**917.048.156.325,65**	**92,75**
		Belanja Operasi	**670.900.234.079,00**	**638.706.924.536,16**	**95,20**
		Belanja Pegawai	392.156.278.668,00	380.289.821.307,81	96,97
		Belanja Barang dan Jasa	266.795.934.531,00	246.612.992.141,35	92,44
		Belanja Hibah	11.948.020.880,00	11.804.111.087,00	
		Belanja Modal	**204.564.572.964,00**	**166.252.751.216,49**	**81,27**
		Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.037.876.152,00	51.541.549.729,92	**93,65**
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.190.939.423,00	85.986.356.136,57	0,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	47.643.071.051,00	22.155.213.262,00	0,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.692.686.338,00	6.569.632.088,00	98,16
		BELANJA TIDAK TERDUGA	**200.000.000,00**	**164.439.330,00**	**82,22**
		Belanja Tak Terduga	200.000.000,00	164.439.330,00	82,22
		BELANJA TRANSFER	**113.095.716.885,00**	**111.924.041.243,00**	**98,96**
		Belanja Bagi Hasil	3.032.853.885,00	1.861.178.243,00	61,37
		Belanja Bantuan Keuangan	110.062.863.000,00	110.062.863.000,00	C
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(8.334.425.206,00)**	**61.872.560.776,22**	**(742,37)**
		PEMBIAYAAN			
		PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**8.334.425.206,00**	**8.334.425.206,49**	**100,00**
		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	8.334.425.206,00	8.334.425.206,49	100,00
		PEMBIAYAAN NETTO	8.334.425.206,00	8.334.425.206,49	**100,00**
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**-**	**70.206.985.982,71**	0,00

Berdasarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut diatas, maka dapat digambarkan pencapaian target kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlihat pada ringkasan realasasi APBD pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4

Ringkasan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Dharmasraya TA 2021

URAIAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	LEBIH/ KURANG
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH	84.116.605.330,00	84.352.675.707,00	82.829.461.520,87	98,19	(1.523.214.186,13)
PENDAPATAN TRANSFER	835.392.279.976,00	838.634.243.015,00	838.657.002.069,00	100,00	22.759.054,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	31.451.100.000,00	57.439.180.000,00	57.434.253.512,00	99,99	(4.926.488,00)
JUMLAH PENDAPATAN	**950.959.985.306,00**	**980.426.098.722,00**	**978.920.717.101,87**	**99,85**	**(1.505.381.620,13)**
BELANJA	**1.038.476.229.202,00**	**988.760.523.928,00**	**917.045.656.325,65**	**92,75**	**71.714.867.602,35**
BELANJA OPERASI	731.293.221.750,00	670.900.234.079,00	638.704.424.536,16	95,20	32.195.809.542,84
BELANJA MODAL	191.968.383.822,00	204.564.572.964,00	166.252.751.216,49	81,27	38.311.821.747,51
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	200.000.000,00	164.439.330,00	82,22	35.560.670,00
TRANSFER	110.214.623.630,00	113.095.716.885,00	111.924.041.243,00	**98,96**	**1.171.675.642,00**
SURPLUS/(DEFISIT)	**(87.516.243.896,00)**	**(8.334.425.206,00)**	**61.875.060.776,22**	**742,40**	**70.209.485.982,22**
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	87.516.243.896,00	8.334.425.206,00	8.334.425.206,00	100,00	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-		-
PEMBIAYAAN NETTO	**87.516.243.896,00**	**8.334.425.206,00**	**8.334.425.206,00**	**100,00**	-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**-**	**-**	**70.209.485.982,22**		**70.209.485.982,22**

B. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Keuangan

Secara umum, pelaksanaan masing masing program dan kegiatan berjalan lancar, ini dapat terlihat dalam target pencapaian kinerja APBD Tahun 2021 untuk belanja operasional capaian kinerjanya sebesar 95,20%, akan tetapi masih ada beberapa kegiatan yang capaian kinerja keuangannya masih rendah, dapat diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5.
Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Keuangan Tahun 2021

No	Kode Rekening	OPD	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan / Kendala
1	**1 . 05 . 02**	**BPBD**				
	1.05 . 1.05.02.01 . 22 . 01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	24.752.519.000,00	374.400.530,00	1,51	Dharmasraya memperoleh penerimaan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dari pemerintah pusat sebesar Rp24.000.000.000,00 telah diakhir tahun anggaran 2021, sehingga pelaksanaannya belum terealisasi pada Tahun 2021.
2	**1 . 02 . 01**	**Dinas Kesehatan**				
	1.02 . 1.02.01.01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.800.000,00	71.976.678,00	64,38	Adanya efisiensi anggaran Tahun 2021. Penghitungan rencana berpedoman dari pemakaian tahun lalu, tetapi realisasi pemakaian tahun ini lebih sedikit.
	1.02 . 1.02.01.01 . 16 . 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.075.194.100,00	695.002.675,00	64,64	Realisasi tergantung kasus ibuhamil, Ibu Bersalin, dan Bayi barul ahir, serta komplikasi yang ada, sehingga kita tidak bisa memberikan target dalam hal untuk mendapatkan realisasi penuh. Serta ada beberapa sasaran yang mendapatkan pelayanan dengan biaya pribadi dan BPJS kesehatan.
	1.02 . 1.02.01.01 . 16 . 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	4.704.267.750,00	2.038.493.183,00	43,33	Sudah menurunnya angka kasus Covid 19 di tahun 2021 sehingga tidak semua anggaran terealisasi
	1.02 . 1.02.01.01 . 16 . 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	912.713.000,00	43.200.000,00	4,73	Pelaksanaan akreditasi RSUD Sungai Rumbai belum terlaksana pada tahun 2021
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3.824.983.000,00	2.891.703.992	75,60	Karena Penurunan Kasus Covid-19 Adanya Bantuan Obat Covid-19 dari Dinkes Provinsi Realisasi Pasien yang kurang dari jumlah yang direncanakan,karena dengan kebutuhan Makan minum sesuai dengan jumlah pasien Covid yang di rawat
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Sungai Rumbai	800.000.000,00	555.941.071,00	69,49	Pendapatan jasa pelayanan BLUD RSUD Sungai Rumbai hanya terealisasi sebesar Rp555.941.071,00 mengakibatkan belanja BLUD juga tidak terealisasi optimal.
3	**3 . 08 . 01**	**Dinas Transnaker**				
	3.08 . 3.08.01.01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.500.000,00	1.692.000,00	37,60	Karena kendaraan dinas roda empat pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tahun 2020 ada 2 (dua) unit, pada tahun 2021 hanya 1 (satu) unit kendaraan kepala dinas saja. Dan kendaraan bermotor roda 2 terdapat 6 (enam) unit sepeda motor, 3 (tiga) unit diantaranya sudah rusak berat dan tidak dapat dioperasikan lagi. Menyebabkan pembayaran pajak pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja terkendala jadinya.

No	Kode Rekening	OPD	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan / Kendala
4	**3 . 03 . 01**	**Dinas Pertanian**				
	3.03 . 3.03.01.01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.400.000,00	46.591.679,00	68,12	Adanya efisiensi dan penghematan penggunaan anggaran
5	**1 . 03 . 01**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang**				
	1.03 . 1.03.01.01 . 07 . 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.088.500,00	46.796.750,00	68,73	Kegiatan perjalanan perjalanan dinas dalam kota tidak terealisasi karena peralatan belum di kalibrasi dan sedang di lakukan inventarisasi peralatan dan pergantian koordinator laboratorium di tahun 2021, sehingga terfokus ke perbaikan ruang laboratorium dan inventarisasi peralatan laboratorium
	1.03 . 1.03.01.01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.550.000,00	19.338.200,00	42,45	Pemegang kendaraan tidak melaporkan jadwal pembayaran pajak dan kir kendaraan yang menjadi tanggungjawabnya
	1.03 . 1.03.01.01 . 19 . 16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	84.089.500,00	34.889.859,00	41,49	Biaya perawatan yang diperlukan tahun 2021 dari kedua mobil tangki air hanya servis berkala. Tidak ada kerusakan parah yang perlu perbaikan.
6	**4 . 01 . 06**	**Inspektorat**				
	4.02 . 4.01.06.01 . 06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000,00	1.320.000,00	29,33	Adanya efisiensi dan penghematan penggunaan anggaran
	4.02 . 4.01.06.01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.000.000,00	3.739.100,00	53,42	Direncanakan Inspektorat akan mengadakan pembelian kendaraan dinas Tahun 2021, karena refocusing anggaran, kegiatan kendaraan tersebut ditiadakan.
7	**2 . 11 . 01**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan**				
	2.11 . 2.11.01.01 . 18 . 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	45.252.300,00	24.705.900,00	54,60	Dana kegiatan ini pada APBD pergeseran sudah dikurangi untuk Refocusing Anggaran, pada APBD perubahan kegiatan tersebut dimunculkan lagi, sehingga tidak terealisasi secara optimal kegiatannya diakhir tahun.
	2.11 . 2.11.01.01 . 21 . 02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	30.970.000,00	18.150.000,00	58,61	Dana kegiatan ini pada APBD pergeseran sudah dikurangi untuk Refocusing Anggaran, pada APBD perubahan kegiatan tersebut dimunculkan lagi, sehingga tidak terealisasi secara optimal kegiatannya diakhir tahun.

No	Kode Rekening	OPD	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan / Kendala
8	**1 . 04 . 01**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan**				
	1.04 . 1.04.01.01 . 22 . 02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	63.437.250,00	11.422.900,00	64,20	Dalam proses penyusunan Ranperda oleh Kanwil Kemenkumham. Pada akhir tahun 2021, Tim Penyusun Perda RP3KP menyelesaikan hingga tahapan Naskah Akademik.
	2.04 . 1.04.01.01 . 25 . 02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	482.988.500,00	224.844.910,00	46,55	Pada rekening perjalaan dinas luar daerah luar propinsi dialokasikan untuk pembahasan penetapan/pengusulan quata land reform redistribusi lahan di Kementerian ATR/BPN di Jakarta. Disebab covid sehingga quota land reform redist kehutanan langsung ditetapkan melalui Kanwil BPN di Padang. pada rekening perjalanan dinas dalam daerah, rencana pelaksanaan pengukuran dan penelitian untuk proses sertipikat lahan milik daerah terkendala sinkronisasi dengan BPN disebabkan kendala covid.
9	**1 . 02 . 02**	**RSUD Sungai Dareh**				
	1.02 . 1.02.02.01 . 20 . 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	2.700.000.000,00	1.111.492.857,00	41,17	karena pemberian insentif petugas covid non ASN berdasarkan jumlah pasien positif covid 19, karena pada bulan Oktober dan november 2021 terjadi penurunan pasien positif covid dan pada bulan Desember nihil pasien positif covid maka berpengaruh terhadap pembayaran insentif tersebut.
	1.02 . 1.02.02.01 . 16 . 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	5.110.110.000,00	3.197.066.301,00	62,56	Untuk kegiatan KLB karena pasien kurang maka permintaan obat dan BHP juga berkurang
10	**4 . 01 . 02**	**Sekretariat DPRD**				
	4.08 . 4.01.02.01 . 06 . 04	Penyediaan bahan logistik kantor	211.500.000,00	131.106.000,00	61,99	Dikarenakan masih dalam kondisi Pandemic covid 19, tamu yang berkunjung ke DPRD Dharmasraya menjadi sedikit menurun dari tahun sebelumnya, dan juga kebijakan dari pimpinan untuk membatasi jumlah tamu yang akan melakukan sharing dan konsultasi ke DPRD
	4.08 . 4.01.02.01 . 08 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	373.600.000,00	255.081.416,00	68,28	Adanya sisa anggaran sebab penggunaan Listrik Pembantu (genset) lebih sering dipakai karena Listrik PLN sering mati

No	Kode Rekening	OPD	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan / Kendala
	4.08 . 4.01.02.01 . 07 . 05	Pengadaan Mebel	41.630.000,00	0,00	0,00	Karena kebutuhan mebel di tahun 2021 dirasa sudah cukup
	4.08 . 4.01.02.01 . 19 . 03	Pelaksanaan Reses	424.255.000,00	224.577.250,00	52,93	Masih dalam Pandemic Covid 19 sehingga jumlah audien yang akan bertemu DPRD dibatasi, sulit mengumpulkan masyarakat untuk memenuhi undangan reses, tempat atau gedung pertemuan masyarakat yang kurang memadai, jarak tempuh rumah masyarakat ke tempat acara terlalu jauh.
	4.08 . 4.01.02.01 . 150 . 153	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	263.500.000,00	173.014.000,00	65,66	dengan adanya Pandemic Covid 19 makan kegiatan DPRD dilaksanakan secara terbatas dan dengan jumlah terbatas

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Struktur akuntansi pemerintah daerah menggunakan konsep transaksi Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Organisasi pemerintah daerah yang bertindak sebagai kantor pusat adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan yang bertindak sebagai kantor cabang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pemilihan struktur ini disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 10 ayat (3) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 189 ayat (1) menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

Entitas akuntansi berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang. Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 sebanyak 38 SKPD yaitu :

1) Dinas Pendidikan
2) Dinas Kesehatan
3) RSUD Sungai Dareh
4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
7) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
8) Dinas Pangan dan Perikanan
9) Dinas Lingkungan Hidup
10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12) Dinas Perhubungan
13) Dinas Komunikasi Dan Informatika
14) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan
15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
17) Dinas Perpustakaan Kearsipan

18) Dinas Pertanian
19) Dinas Transmisgrasi dan Tenaga Kerja
20) Inspektorat Kabupaten
21) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
22) Badan Keuangan Daerah
23) Kecamatan Pulau Punjung
24) Kecamatan Sitiung
25) Kecamatan Koto Baru
26) Kecamatan Sungai Rumbai
27) Kecamatan IX Koto
28) Kecamatan Timpeh
29) Kecamatan Koto Salak
30) Kecamatan Asam Jujuhan
31) Kecamatan Koto Besar
32) Kecamatan Padang Laweh
33) Kecamatan Tiumang
34) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
35) Sekretariat Daerah
36) Sekretariat DPRD
37) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
38) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sebagai entitas pelaporan, maka Laporan Keuangan yang disusun oleh SKPKD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terdiri dari.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah disusun merupakan gabungan dari seluruh Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan SKPKD sebagai PPKD/Bendahara Umum Daerah. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan Informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi kas untuk tingkat SKPD, PPKD, dan Pemda.

- *Angka Realisasi Pendapatan* yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran TA. 2021 adalah menurut kelompok pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Daerah atas seluruh penerimaan uang yang masuk pada Rekening Kas Daerah dan ditambah dengan realisasi pendapatan BLUD dan Dana BOS yang terdiri dari 147 SD Negeri dan 33 SMP Negeri yang tidak melalui Rekening Kas Daerah. Adapun BLUD yang dikelola sebanyak 16 BLUD yaitu.
  1. BLUD RSUD Sungai Dareh.
  2. BLUD RSUD Sungai Rumbai
  3. BLUD Puskesmas Sungai Rumbai.
  4. BLUD Puskesmas Sungai Limau.
  5. BLUD Puskesmas Sitiung II.
  6. BLUD Puskesmas Padang Laweh.
  7. BLUD Puskesmas Sungai Dareh.
  8. BLUD Puskesmas Silago.
  9. BLUD Puskesmas Gunung Medan.
  10. BLUD Puskesmas Sitiung I.
  11. BLUD Puskesmas Koto Baru.
  12. BLUD Puskesmas Timpeh.
  13. BLUD Puskesmas Sialang.
  14. BLUD Puskesmas Tiumang.
  15. BLUD Puskesmas Koto Besar
  16. BLUD Puskesmas Beringin Sakti

- *Angka Realisasi Belanja* yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 berdasarkan kompilasi realisasi belanja seluruh entitas (SKPD), dimana pengguna anggaran bertanggungjawab atas seluruh pengeluaran yang dibelanjakan. Sedangkan data realisasi pengeluaran kas daerah yang dikelola oleh Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Daerah berfungsi sebagai kontrol melalui rekonsiliasi dengan SKPKD, ditambah dengan realisasi belanja BLUD sebanyak 16 BLUD dan Dana BOS yang terdiri dari 147 SD Negeri dan 33 SMP Negeri yang tidak melalui rekening Kas Daerah
- *Angka Realisasi Pembiayaan* yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran yang dikelola oleh Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Daerah.

b. Laporan Operasional

Laporan Finansial menyangkut laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut.

a. Pendapatan- LO dari kegiatan operasional;

b. Beban dari kegiatan operasional;
c. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional, bila ada;
d. Pos luar biasa, bila ada;
e. Surplus/defisit-LO.

Laporan Operasional disusun berdasarkan konsolidasi dari seluruh Laporan Operasional SKPD dan PPKD.

c. Neraca

Neraca Pemerintah Kabupaten Dharmasraya disusun berdasarkan konsolidasi Neraca SKPD dan SKPKD/PPKD. Dalam Penyusunan Neraca, rekening-rekening yang sifatnya *reciprocal* (timbal balik antar unit dalam satu Pemda) harus dihilangkan terlebih dahulu. Mekanisme penghilangan akun *reciprocal* tersebut, yaitu melalui proses eliminasi akun-akun *reciprocal.* Akun-akun *reciprocal* yang terjadi dalam sistem akuntansi keuangan daerah ini adalah akun RK-SKPD dan akun RK-PPKD. Akun RK- SKPD dicatat oleh PPKD, sedangkan akun RK-PPKD dicatat oleh SKPD. Kedua akun tersebut digunakan untuk menggambarkan transaksi yang dilakukan antar unit tersebut, dan akan berpengaruh terhadap Neraca kedua unit tersebut yang menggambarkan posisi keuangan SKPD/PPKD/Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

d. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran untuk menilai pengaruh dari aktifitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah Daerah.

e. Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut.

a) Saldo Anggaran Lebih Awal;
b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun berjalan;
d) Koreksi kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya; dan
e) Lain-lain;
f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos.

a) Ekuitas awal

b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas,
d) Ekuitas Akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian informasi yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Selain itu juga meliputi kinerja keuangan entitas akuntansi/pelaporan dalam Laporan Realisasi Anggaran harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan.

B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah ***basis kas*** untuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas, dan ***basis akrual*** untuk Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Ekuitas.

Basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau oleh entitas pelaporan dan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan.

Basis akrual untuk LO dan Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos (akun) dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos (akun) dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dinyatakan dalam mata uang rupiah.

D. Kebijakan Akuntansi

1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

1.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

a. Umum

Klasifikasi pendapatan-LRA berdasarkan kewenangan SKPD dan PPKD adalah sebagai berikut.

Adapun klasifikasi pendapatan dapat dirinci berdasarkan objek pendapatan, yaitu.

1) Pendapatan Asli Daerah
   a) Pajak Daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah.
   b) Retribusi Daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang retribusi daerah.
   c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
   d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pengelolaan aset lainnya, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan dan pendapatan dari hasil pemanfaatan kekayaan daerah serta pendapatan BLUD.

2) Pendapatan Transfer
   a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
      Terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan rinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
   b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya menurut obyek pendapatan ditetapkan oleh pemerintah, seperti dana otonomi khusus, dana penyesuaian, dana BOS, tunjangan profesi guru, dana insentif daerah dan lain sejenisnya.
   c) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya menurut obyek pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti pendapatan bagi hasil lainnya dan lain sejenisnya.
   d) Kelompok bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi lainnya atau Pemerintah Kabupaten terdiri dari bantuan keuangan dari provinsi lainnya dan bantuan keuangan dari kabupaten.
3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

a) Kelompok pendapatan hibah dirinci berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
b) Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
c) Pendapatan lainnya berupa pendapatan sumbangan pihak ketiga dan lain sejenisnya.

b. Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di RKUD yang mencakup hal- hal sebagai berikut.

a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
c. Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

   Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LRA adalah bukti pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan.

c. Pengukuran

1) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3) Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

d. Penyajian

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS.

e. Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rinciannya lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah.

1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

1. Pendapatan Perpajakan

a. Umum

Definisi Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Defenisi *pendapatan Perpajakan–LRA* adalah semua penerimaan RKUD yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

b. Klasifikasi

Jenis Pajak Daerah terdiri atas.

a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Parkir;
g. Pajak Air Bawah Tanah;
h. Pajak Sarang Burung Walet;
i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
j. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
k. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

c. Pengukuran

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengembalian Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang keluar dari kas daerah.

Akuntansi Perpajakan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan Pajak Daerah-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

d. Penyajian

Ilustrasi Penyajian Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Pendapatan Perpajakan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas per jenis pajak dalam mata uang rupiah.

Pendapatan Pajak Daerah-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA tahun berkenaan serta realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA tahun sebelumnya.

e. Pengungkapan

Pendapatan Perpajakan-LRA yang dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi tersebut antara lain.

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran Pendapatan Perpajakan-LRA.
b. Informasi tentang kebijakan keuangan, ekonomi makro, pencapaian target APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
c. Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah-LRA per jenis pajak.

2. Pendapatan Nonperpajakan

a. Umum

1. Definisi pendapatan nonperpajakan diartikan sebagai pendapatan negara atau daerah yang tidak berasal dari pendapatan perpajakan.
2. Klasifikasi Nonperpajakan

   Klasifikasi Pendapatan Nonperpajakan dapat dibagi berdasarkan proses memperoleh pendapatan tersebut yang digolongkan menjadi.

   a. Pendapatan perizinan;
   b. Pendapatan layanan;
   c. Pendapatan pemanfatan sumber daya alam
   d. Pendapatan hasil investasi;

e. Pendapatan hasil investasi aset non keuangan;
f. Pendapatan nonperpajakan lainnya.

Dalam rangka penyusunan LRA, basis akuntansi yang digunakan untuk mencatat pendapatan nonperpajakan adalah basis kas. Pendapatan nonperpajakan-LRA adalah semua penerimaan pendapatan nonperpajakan pada rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Pengakuan

Secara umum pendapatan LRA diakui pada saat diterima di RKUD.

Pendapatan LRA yang berasal dari pendapatan nonperpajakan diakui pada saat.

a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
c. Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima telah melaporkan/mengesahkan kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
d. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Dokumen sumber pencatatan pengakuan pendapatan nonperpajakan basis kas adalah bukti setor seperti SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) atau dokumen lainnya yang dipersamakan setelah mendapat otorisasi dari bank/pos tempat menyetor, seperti Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atau sejenisnya maupun dokumen lain yang ditetapkan oleh BUD sebagai dasar pengakuan pendapatan tersebut.

1.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan -LO

a. Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat.

1. Timbulnya hak atas pendapatan;
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Contohnya adalah penetapan yang dilakukan atas kekurangan pembayaran Pajak Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contohnya

adalah Wajib Pajak Daerah melakukan penyetoran atas kewajiban perpajakannya tanpa terlebih dahulu adanya penagihan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

1. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *self assesment system*.
   Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *self assessment system* diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di Rekening Kas Daerah tanpa terlebih dahulu pemerintah daerah menerbitkan ketetapan.
   Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO dengan *self assessment system* antara lain bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Bendahara Penerimaan atau ke Kas Daerah. Contoh dokumen sumber antara lain Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

2. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *official assessment system*
   Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan *official assessment system* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan pajak. Timbulnya hak menagih tersebut adalah pada saat diterbitkan ketetapan.
   Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *official assessment system* antara lain ketetapan yang diterbitkan oleh otoritas pajak daerah. Contoh dokumen sumber *official assessment system* antara lain: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB (SPPT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

3. Pengembalian Pajak
   Wajib Pajak dalam sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, dimungkinkan membayar ke Kas Daerah lebih besar dari pada kewajibannya pada suatu masa atau tahun pajak. Untuk itu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajaknya.
   Dokumen sumber pencatatan pengembalian Pajak-LO antara lain surat ketetapan kelebihan pajak yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan daerah. Contoh dokumen sumber pengembalian pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).

b. Pengukuran

Pendapatan Perpajakan-LO diukur sebesar nilai nominal yaitu.

1. Nilai aliran masuk yang telah diterima oleh pemerintah untuk *self asesment*.
2. Nilai aliran masuk yang akan diterima pemerintah untuk *official assessment*.

Akuntansi pendapatan Pendapatan Pajak Daerah-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan Pajak Daerah-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

c. Penyajian

Pendapatan Perpajakan-LO disajikan pada Laporan Operasional per jenis pajak dalam mata uang rupiah. Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dalam Laporan Operasional. Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dengan membandingkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun berkenaan dengan realisasi tahun sebelumnya.

d. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai Pendapatan Pajak Daerah-LO antara lain adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, pengukuran Pendapatan Pajak Daerah-LO;
2. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO per jenis pajak.

2. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Tujuan kebijakan akuntansi beban dan belanja ialah mengatur perlakuan akuntansi beban dan belanja. Perlakuan akuntasi beban dan belanja mencakup definisi dan klasifikasi; pengakuan dan penilaian; serta penyajian dan pengungkapan belanja.

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Ada beberapa perbedaan antara Beban dan Belanja, yaitu.

No	Beban	Belanja
a	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas
b	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO)	Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
c	Menggunakan Kode Akun 9	Menggunakan Kode Akun 5

a.2. Klasifikasi

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

1. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

2. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

3. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja Sekretariat DPRD, belanja Sekretariat Daerah provinsi/kota/kabupaten, belanja dinas pemerintah tingkat provinsi/kota/kabupaten dan lembaga teknis daerah tingkat provinsi/kota/kabupaten.

b. Pengakuan

Menurut PSAP Nomor 12 tentang Akuntansi Beban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban diakui pada saat.

1. Timbulnya kewajiban
   Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

2. Terjadinya konsumsi aset
   Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
   Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Menurut PSAP Nomor 02 tentang Akuntansi Belanja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja diakui pada saat.

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.

2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Metode Pendekatan Beban
   Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

2. Metode Pendekatan Aset
   Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.

c. Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari RKUD dan/atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

d. Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*). Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.

e. Penyajian

Penyajian Beban dan Belanja disesuaikan dengan format yang terdapat pada Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi, Kebijakan Akuntansi dan Bagan Akun Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

f. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah.

1. rincian beban per SKPD.
2. penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
3. informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

1. rincian belanja per SKPD.

2. penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
3. penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
4. informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Kebijakan Akuntansi Transfer

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1. Definisi

1) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

2) Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

3) Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan.

a.2. Klasifikasi

Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejadiaannya dan diklasifikasikan antara lain.

1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan.
2. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya.
3. Transfer Pemerintah Provinsi.
4. Transfer/Bagi Hasil ke Desa.
5. Transfer/Bantuan Keuangan.

b. Pengakuan

1. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya PMK/Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk.
2. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

c. Pengukuran

1. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di RKUD.
2. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari RKUD.

d. Penilaian

Transfer masuk dinilai sebagai berikut:

1. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

e. Penyajian

Transfer disajikan sebagai pengeluaran transfer.

f. Pengungkapan

1. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah.
   1) penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
   2) penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
   3) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah;
   4) informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah.
   1) transfer keluar harus dirinci;
   2) penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
   3) penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar;
   4) informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara lain.
   1) Penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
   2) Penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar;
   3) Informasi lainnya yang diangggap perlu.

4. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1. Definisi

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 02 Paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil investasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

a.2. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi kedalam dua bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 02, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Penerimaan Pembiayaan
   Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
2. Pengeluaran Pembiayaan
   Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

b. Pengakuan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

c. Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

d. Penyajian di Laporan Keuangan

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Berikut adalah contoh penyajian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah.

e. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut.

1. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah;
3. Informasi lainnya yang diangggap perlu.

5. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Mengacu pada Paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari tiga bulan dari tanggal perolehannya.

a.2. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain BUD, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab BUD terdiri dari.

1. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.

2. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola oleh BUD.

b. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

c. Penyajian

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

d. Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

6. Kebijakan Akuntansi Piutang

a. Definisi dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Buletin Teknis SAP Nomor 02 Tahun 2010 menyatakan piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

a.2. Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas.

1. Pungutan
   Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas.
   1. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi;
   2. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
   3. Piutang Retribusi;
   4. Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

2. Perikatan
   Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas.
   1) Pemberian Pinjaman;
   2) Penjualan;
   3) Kemitraan;
   4) Pemberian fasilitas.

3. Transfer antar Pemerintahan
   Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas.
   1) Piutang Dana Bagi Hasil;
   2) Piutang Dana Alokasi Umum;
   3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
   4) Piutang Dana Otonomi Khusus;

5) Piutang Transfer Lainnya;
6) Piutang Bagi Hasil dari Provinsi;
7) Piutang Transfer antar Daerah;
8) Piutang Kelebihan Transfer.

4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas.
1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Piutang antara lain diklasifikasikan sebagai berikut:

Piutang Pendapatan	Piutang Pajak Daerah
	Piutang Retribusi Daerah
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat
	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
	Piutang Pendapatan Lainnya
Piutang Lainnya	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
	Uang Muka

b. Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.
Piutang dapat diakui ketika.

1. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
2. Jumlah piutang dapat diukur;
3. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
4. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.
Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran.

Piutang transfer lainnya diakui apabila.
1. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
2. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian kabupaten/kota pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemda yang bersangkutan.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.
Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

c. Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut.

1. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
2. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
3. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke Kas Daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut.

1. Pemberian pinjaman
   Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2. Penjualan
   Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3. Kemitraan
   Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4. Pemberian fasilitas/jasa
   Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut.
1. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
2. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
3. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut.

1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
2. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal. Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/ pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

d. Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut.

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari.

1. Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
2. Pajak Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan.

1. Kualitas lancar, dengan kriteria.
   a. Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
   c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
   d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
   e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria.
   a. Umur piutang satu sampai dengan dua tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
   c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
   d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria.
   a. Umur piutang tiga sampai dengan lima tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
   c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
   d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria.
   a. Umur piutang diatas lima tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
   c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria.
   a. Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
   c. Wajib Pajak likuid; dan/atau
   d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria.
   a. Umur piutang satu sampai dengan dua tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
   c. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria.
   a. Umur piutang tiga sampai dengan lima tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
   c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria.
   a. Umur piutang diatas lima tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
   c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
   d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut.

1. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan satu bulan;
2. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang satu sampai dengan tiga bulan;
3. Kualitas Diragukan, jika umur piutang tiga sampai dengan 12 bulan;
4. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan.

1. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
3. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan

4. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut.

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar.
1. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar.
1. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:
1. 0,5 % dari Piutang dengan kualitas lancar;
2. 10 % dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. 50% dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. 100% dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

e. Penyajian

Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Berikut adalah contoh penyajian piutang dalam Neraca Pemerintah Daerah.

f. Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa.

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

7. Kebijakan Akuntansi Persediaan

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Persediaan merupakan aset yang berwujud.

a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;

b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
d. Barang yang disimpan untuk atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

a.2. Klasifikasi

1. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen perlatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
2. Dalam hal Pemerintah Daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan bakupembuatan alat-alat pertanian.
3. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
4. Persediaan dapat terdiri dari.
   a. Barang Konsumsi;
   b. Barang pakai habis;
   c. Barang cetakan
   d. Perangko dan materai
   e. Obat-obatan dan bahan farmasi
   f. Amunisi;
   g. Bahan untuk pemeliharaan;
   h. Suku cadang;
   i. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
   j. Pita cukai dan leges;
   k. Bahan Baku;
   l. Barang dalam proses / setengah jadi;
   m. Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
   n. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

5. Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

6. Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman

7. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang dan persediaan yang tidak lagi digunakan disebakan karena tidak sesuainya dengan peraturan perundang-undangan tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Pengakuan

1. Pengakuan Persediaan
   Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
2. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah (memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah) dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi, dan bersifat netral). Dokumen sumber adalah faktur, kwitansi, dan kwitansi, dan berita acara serah terima (BAST).

3. Persedian bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun asset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan kostruksi belum terselesaikan.
4. Beban Persediaan diakui dengan dua pendekatan yaitu.
   a. Pendekatan Aset
      Pengakuan Beban Persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan Aset digunakan untuk persedian-persediaan yang dimaksud penggunannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga.
      Contohnya antara lain adalah persediaan obat di Rumah Sakit, persediaan di Sekretariat SKPD.
   b. Pendekatan Beban
      Setiap pembelian Persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang dimaksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.
5. Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname.* Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.
6. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka persediaan ini diperlukan sebagai beban.
7. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlukan sebagai kerugian daerah.

c. Metode Pencatatan

1. Metode Periodik yaitu pencatatan berdasarkan inventarisasi fisik (*stock opname*) yang digunakan untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). barang habis pakai, barang cetakan, dan sejenisnya yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD. Dengan metode ini

pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-*update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.

2. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*.

d. Pengukuran

1. Persediaan disajikan sebesar.
   (a) Harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian.
   (b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
   (c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
2. Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan.
   (a) Metode *First In First Out* (FIFO)
   (b) Harga pembelian terakhir
3. Persediaan yang dinilai dengan harga pembelian terakhir yaitu.

   a. Unit persediaan yang nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis
   b. Barang Konsumsi
   c. Barang habis pakai
   d. Barang cetakan
   e. Perangko dan materai
   f. Obat-obatan dan bahan farmasi
4. Tanah dan bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dinilai dengan biaya perolehan masing-masing
5. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan baik untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dinilai dengan menggunakan nilai wajar dan indeks nilai wajar dari Persediaan hewan dan tanaman tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait.
6. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar *(arm length transaction)*.

e. Beban Persediaan

1. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*)
2. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional

3. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan dalam jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.
4. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
5. Selisih persediaan pencatatan antara hasil inventarisasi fisik *(stock opname)* dengan yang dibukukan yang disebabkan karena persediaan hilang, using, kadaluarsa ataupun rusak maka selisih persediaan inidipertimbangkan sebagai suatu kejadian yang abnormal dan diperlakukan sebagai beban.

f. Pengungkapan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan.

(a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan
(b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
(c) Kondisi Persediaan.

8. Kebijakan Akuntansi Investasi

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

a.2 Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasi menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 06 tentang Investasi antara lain.

a) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu tiga bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari tiga bulan dari tanggal perolehannya.

b) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu.

1) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

b. Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*)

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

c. Pengukuran

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

1. Pengukuran investasi jangka pendek

a) Investasi dalam bentuk surat berharga.

1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

b) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu enam bulan.

2. Pengukuran investasi jangka panjang
   a) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
   b) Investasi non permanen
      1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
      2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
      3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

d. Metode Penilaian Investasi

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu.

1. Metode biaya.
   Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
2. Metode ekuitas
   Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
   Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

a) Kepemilikan kurang dari 20%, menggunakan metode biaya.
b) Kepemilikan 20 sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
d) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain.

1. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
3. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
4. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

e. Penyajian

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.

f. Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.

9. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

1. **Definis**i

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan (*material*) dan perlengkapan (*supplies*).

2. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas dalam rangka penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah yang berkaitan dengan penatausahaan dan pelaporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016 tentang Kodefikasi dan Penggolongan Barang Milik Daerah maka untuk Laporan Barang Milik Daerah TA 2019 telah diharuskan untuk menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi dan Penggolongan Barang Milik Daerah terkait hal tersebut Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menerbitkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud dan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, dengan adanya perubahan regulasi tersebut berakibat pada perubahan klasifikasi dan penyajian data aset tetap dengan ketentuan sebagai berikut.

- Nilai Aset Tetap yang tidak berubah sebagai akibat implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 adalah sebagai berikut.
  - Aset Tetap Tanah
  - Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan
  - Kontruksi Dalam Pengerjaan

- Nilai Aset Tetap yang berubah sebagai akibat implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 adalah sebagai berikut.
  - KIB peralatan mesin dari 9 sub KIB menjadi 19 sub KIB
  - KIB Bangunan gedung dari 2 sub KIB menjadi 4 sub KIB
  - KIB Aset Tetap Lainnya dari 4 sub KIB menjadi 6 sub KIB
  - Aset tetap rambu-rambu yang semula dicatat pada KIB Bangunan Gedung, sub KIB monumen, pindah ke KIB Peralatan Mesin, sub KIB rambu-rambu
  - Aset tetap peralatan olahraga yang semula dicatat pada KIB Aset Tetap Lainnya pindah ke KIB Peralatan Mesin sub KIB peralatan olahraga
  - Saldo Aset Lain-Lain berubah mengikut pada perpindahan aset rambu-rambu dan alat olahraga

Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan klasifikasi aset sebagai berikut.

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk pertanian, perkebunan, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan mesin memiliki variasi terbanyak dalam kelompok aset tetap. Peralatan dan mesin ini dapat berupa alat-alat besar, alat-alat angkutan, alat bengkel, alat kantor, alat rumah tangga, alat kedokteran, alat kounikasi, rambu-rambu, alat olahraga dan lain sebagainya.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Khusus untuk gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penujang utama yang berupa mechanical engineering (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin air conditioning), dan komponen penunjang lain yang antara lain berupa saluran air dan telepon.

Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, tugu, dan candi serta bangunan sejenis lainnya dan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon serta sejenis lainnya dan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi

perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, dan biota air. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

f. Konstuksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

g. Akumulasi Penyusutan
Merupakan akumulasi dari penyusutan nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikkannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikkannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut.

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
  Suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
  Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
  Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

Aset tetap tersebut diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah.

- Merupakan objek pemeliharaan
  Aset tetap tersebut merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- Memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
  Nilai perolehan aset tetap tersebut harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) dari aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai barang inventaris ekstrakomtabel.

1. Tanah

Tanah diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria berikut: (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, (2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, (3) tidak dimaksudkan untuk dijual, dan (4) diperoleh dengan maksud untuk digunakan. Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah daerah.

Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah daerah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintahan, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah daerah. Atau terdapat tanah milik pemerintah daerah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidakterdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah tersebut penyajiannya dalam laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah daerah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah daerah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan.
   1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2) Dalam hal pemerintah daerah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanah wakaf yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah daerah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Peralatan dan Mesin

Barang berwujud dapat diakui sebagai Peralatan dan Mesin apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, dan harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) dari aset tetap yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp1.000.000,00

Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran serta dilakukan melakui mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran belanja modal.

Peralatan dan Mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan.

3. Gedung dan Bangunan

Untuk dapat diakui sebagai Gedung dan Bangunan, suatu aset harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, merupakan objek pemeliharaan dan harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) dari aset tetap yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp20.000.000,00.

Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikkannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah secara hukum misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima serta telah siap dipakai.

Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran dalam belanja modal. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Untuk dapat diakui sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan, maka Jalan, Irigasi, dan Jaringan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan dan merupakan objek pemeliharaan.

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi dalam belanja modal.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap pakai.

Terhadap hewan dan tanaman memiliki batasan kapitasilasi sebesar Rp1.000.000,00. Hewan dan tanaman yang telah dikembangbiakkan dimaksud untuk dijual kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap tetapi dikelompokkan kepada aset persediaan.

Mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik pemerintah daerah, diatur sebagai berikut.

a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai belanja operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.
b. Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir (a) di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari satu tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai belanja operasional tahun berjalan.
c. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir (a) dan (b) di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai belanja operasional.

   Adapun batas materialitas biaya renovasi yang memenuhi butir (a) dan (b) di atas adalah Rp.20.000.000,00.

   Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Pengakuan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian didahului dengan pengakuan belanja modal.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika.

a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
b. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, Peraturan Bupati ini memberikan pedoman sebagai berikut.

a. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
b. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
c. Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun aset tetap sersebut sudah dimanfaatkan oleh satker/SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
d. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
e. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeur*) aset tersebut hilang, maka penanggungjawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeur* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat di hapusbukukan.
f. Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.
g. Khusus untuk konstruksi Jalan, Irigasi dan Jaringan, apabila BAST sudah ada namun pekerjaan belum selesai, dan telah bisa digunakan/ dimanfaatkan namun karena keterbatasan waktu dan dana, pekerjaan tidak dilanjutkan akan diakui sebagai Aset Tetap Definitif.

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam Neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan

Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari Neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan keuangan.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

1. **Tanah**

   Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat,biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut.

   Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

   Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

   Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

   Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh dan tidak disusutkan.

2. **Peralatan dan Mesin**

   Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya peolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

   Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah sebesar Rp1.000.000,00 Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp1.000.000,00 maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun dicatat sebagai aset ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan BMD.

   Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, pajak honor tim,biaya perjalanan dinas. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (*donasi*) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Nilai satuan minimum perolehan gedung dan bangunan adalah Rp20.000.000,00. artinya, jika nilai perolehan gedung dan bangunan kurang dari Rp20.000.000,00 maka gedung dan bangunan tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan dalam Laporan BMD dan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan atas gedung dan bangunan diatur dalam Peraturan Bupati.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi,dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (*donasi*) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tidak ada kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan atas jalan, irigasi, dan jaringan diatur dalam Peraturan Bupati.

5. Aset Tetap Lainnya

Khusus hewan dan tumbuhan memiliki batasan kapitalisasi sebesar Rp1.000.000,00. Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya (ATR) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolalehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan bangunan. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi: (1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; (2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan (3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya penjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya
konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara karena kondisi *force majeur*, maka biaya pinjaman tidak dikapitalisasi sebagai aset, tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan, dan apabila disebabkan oleh hal-hal yang tidak bersifat *force majeur*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi sebagai aset.

Penyajian

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati

Hal-Hal Khusus Tentang Aset Tetap

1. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap

Setelah aset diperoleh, Pemerintah daerah masih melakukan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan aset tersebut. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat berupa biaya pemeliharaan ataupun biaya rehabilitasi atau renovasi. Pengeluaran yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun (memperpanjang manfaat aset tersebut dari yang direncanakan semula atau peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja) disebut dengan pengeluaran modal (*capital expenditure*) seperti belanja rehabilitasi dan lain sejenisnya. Sedangkan pengeluaran yang memberikan manfaat kurang dari satu tahun (termasuk pengeluaran untuk mempertahankan kondisi aset tetap) disebut dengan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*) seperti belanja pemeliharan.

Pembedaan antara *capital expenditure* atau *revenue expenditure* selain dari menambah manfaat atau tidak, juga dapat dilihat dari besarnya jumlah pengeluaran yang disebut dengan *capitalization threshold* (nilai satuan minimum kapitalisasi aset) yang dapat diklasifikasi sebagai aset tetap. Kriteria suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) setelah perolehan pada aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 dan untuk gedung dan bangunan adalah Rp20.000.000,00.

Pengeluaran setelah perolehan awal dapat diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) atau sebagai pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kapitalisasi setelah perolehan awal aset tetap dilakukan terhadap biaya-biaya lain yang dikeluarkan setelah pengadaan awal yang dapat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kerja. Sebaliknya, pengeluaran-pengeluaran yang tidak memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja diperlukan sebagai biaya (*expense*).

Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan, berupa pengembangan (*peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut*) dan penggantian utama (*memperbaharui bagian aset tetap*).

Pengeluaran setelah perolehan awal atas aset tetap yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki resiko penurunan nilai dan/atau kuantitas yang mengakibatkan ketidak pastian perolehan potensi ekonomi di masa depan, seperti pembangunan tanggul lumpur, tanggul pemecah gelombang, tanggul penahan lahar dan lain sejenisnya tidak dikapitalisasi, melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan biasa (*expense*).
Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhauld* dan *renovasi* berpedoman pada Peraturan Bupati.

Pertukaran Aset Tetap

Pertukaran atau tukar menukar adalah pengalihan aset tetap dari suatu entitas kepada entitas lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lannya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan denganjumlah setiap kas atau kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Ada bebarapa alasan yang menyebabkan pemerintah daerah perlu melakukan pertukaran, yaitu.

- Adanya aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang lokasinya tidak sesuai dengan tata ruang/tata kota;
- Adanya aset tetap yang tidak dimanfaatkan secara optimal;
- Upaya penyatuan aset tetap yang lokasinya terpencar;
- Pelaksanaan rencana strategis pemerintah;
- Adanya aset tetap selain tanah dan/atau bangunan yang sudah usang;
- Tidak tersedia dananya untuk pengadaan baru.

Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepenguasaan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut, pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) dan SK Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeliminasi aset tersebut dari Neraca maupun dari daftar barang dan membukukan aset tetap pengganti.

Biaya dari pos pertukaran aset diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, dimana proses berada pada Bagian Aset dan pencatatan di PPKD.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas setelah mendapatkan persetujuan penghapusan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pelepasan aset tetap dilingkungan pemerintah daerah disebut sebagai pemindah tanganan, dan dilakukan dengan cara.

a. Dijual;
b. Dipertukarkan;
c. Dihibahkan; atau
d. Dijadikan penyertaan modal daerah.

Renovasi Aset Tetap

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu prosuksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan dan ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan dan memenuhi kriteria kapitalisasi aset.

Namun demikian, dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker atau SKPD, maka renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya.

Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi umumnya adalah belanja modal aset terkait.

Biaya perawatan sehari-hari untuk mempertahankan suatu aset tetap dalam kondisi normalnya, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk pengecatan gedung, suku cadang dan lain sejenisnya, merupakan pengeluaran yang subtansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya signifikan.

Berdasarkan obyeknya, renovasi aset tetap di lingkungan SKPD dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu.

a. *Renovasi aset tetap milik sendiri*, merupakan perbaikan aset tetap dilingkungan SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi aset.
b. *Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan*, mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entits pelaporan.

   Pada SKPD yang melakukan renovasi tidak mencatat sebagai penambah nilai pelaporan aset tetap terkait dan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum di serah terimakan pekerjaannya, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Apabila akan diserahkan pada SKPD pemilik sesuai dokumen penyerahan yang telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca SKPD yang melakukan renovasi dan SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan, maka SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi.

c. *Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan* yang meliputi renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya dan renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan, dan lain-lain).
Sama halnya dengan huruf b diatas dan apabila pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini diserahkan pada pemilik sesuai Berita Acara Penyerahan/dokumen yang dipersamakan telah diterbitkan, maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca SKPD dan pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap

a. Reklasifikasi Aset Tetap
Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, hal ini yang disebut sebagai reklasifikasi aset.
Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode palaporan.
b. Koreksi Aset Tetap
Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tegantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

Aset Tetap Di Luar Negeri

Kebijakan umum pemerintah menegaskan bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri yang merupakan salah satu komponen utama dalam memperjuangkan NKRI. Begitu juga halnya dengan hubungan adat dan kebudayaan.

Interaksi yang diciptakan pemerintah daerah dengan negara-negara tetangga dan negara-negara sahabat harus bersifat kondusif agar tetap dapat memajukan sikap saling pengertian dan menghormati di antara masyarakat bangsa-bangsa. Untuk melaksanakan kegiatan di luar negeri tersebut tentunya diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, antara lain wisma, dan aset tetap lainnya.
Pada prinsipnya pengakuan Aset Tetap di luar negeri sama dengan pengakuan aset tetap di dalam negeri, kecuali untuk tanah diatur khusus, yaitu*"pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-udangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengidikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen".*

Penguasaan atas tanah dianggap permanen apabila hak atas tanah tersebut merupakan hak yang kuat diantara hak-hak atas tanah yang ada di neraca tersebut dengan tanpa batas waktu.
Apabila pembelian aset tetap dilakukan secara angsuran, maka aset tetap diakui ketika aset tetap yang dibeli telah diserahkan kepada pembeli dan perjanjian utang ditandantangani oleh pihak penjual yang sekalihus bertindak selaku kreditur dan

pembeli yang juga menjadi debitur.

Pengakuan Aset Tetap Luar Negeri diukur dengan nilai perolehan atau apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
Selain itu, karena pembelian aset tetap diluar negeri umumnya menggunakan mata uang asing, maka harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Penyusutan
Penyusutan adalah alokasi yang sistemasis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
Metode penyusutan diatur dalam Peraturan Bupati.

Perolehan secara Gabungan
Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Perolehan Aset Tetap dari Donasi
Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

Aset Bersejarah
Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Pengungkapan
Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut.
1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap.

3. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan.
    a. Penambahan aset (pembelian, hibah/donasi, pertukaran, reklamasi dan lain-lain);
    b. Pengurangan aset (penjualan, penghapusan, reklamasi dan lain-lain);
    c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
    d. Mutasi aset tetap lainnya.
4. Informasi penyusutan, meliputi.
    a. Nilai penyusutan;
    b. Metode penyusutan yang digunakan;
    c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
    d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
5. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan.
    a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
    b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan asset tetap;
    c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
    d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
6. Untuk KDP diungkapkan.
    a. Rincian kontrak KDP berikut tingkat penyelesaiannya dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca.
    b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaan;
    c. Jumlah biaya yang telah diberikan sampai dengan tanggal neraca;
    d. Uang Muka Kerja yang telah diberikan sampai dengan tanggal neraca;
    e. Jumlah retensi (yaitu % dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak).
7. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

10.Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

a. Definisi dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

a.2 Klasifikasi

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

b. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika.

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

c. Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi.

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
3. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi.

1. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
2. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
3. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
4. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
5. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat distribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi.

1. Asuransi;
2. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
3. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi.

1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
2. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
3. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeur* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeur* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeur*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman.

Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi

hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

d. Penyajian

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap.

11.Akuntansi Dana Cadangan

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Mengacu pada PSAP 01 Paragraf 8, dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup.

1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
4) Sumber dana cadangan; dan
5) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

a.2 Klasifikasi

Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya.

b. Pengakuan

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

c. Pengukuran

1. Pembentukan Dana Cadangan

   Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

3. Pencairan Dana Cadangan

   Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

d. Penyajian di Laporan Keuangan

Dana cadangan disajikan sebagai bagian dari aset.

e. Pengungkapan

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
2. Tujuan pembentukan dana cadangan;
3. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
4. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
5. Sumber dana cadangan; dan
6. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

12. Kebijakan Aset Lainnya

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Mengacu pada Buletin Teknis SAP 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

a.2 Klasifikasi

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	Goodwill
	Lisensi dan Frenchise
	Hak Cipta
	Paten
	Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD.
Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi.

a. Tagihan Jangka Panjang;
b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
c. Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi.

a. Aset Tak Berwujud; dan
b. Aset lain-lain.

b. Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut.

1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

c. Bangun Guna Serah-BGS (*Build, Operate, Transfer*-BOT)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. Bangun Serah Guna-BSG (*Build, Transfer, Operate*-BTO)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud (ATB) menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas.

a. *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b. Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

c. Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

d. *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

e. Lisensi
   Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
f. *Hasil* kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
   Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
g. Aset Tak Berwujud Lainnya
   Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
h. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
   Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan (*intangible asset-work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika.
a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

4. Aset Lain-Lain
   Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

c. Pengukuran

1. Tagihan Jangka Panjang
   Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
   Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

a. Sewa
   Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
   Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
c. Bangun Guna Serah-BGS (*Build*, *Operate*, *Transfer*-BOT)
   BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
d. Bangun Serah Guna-BSG (*Build*, *Transfer*, *Operate*-BTO)
   BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

4. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari.

a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah.
   1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
   2) biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
   3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah.

a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

5. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

d. Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dapat dikukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

e. Penyajian

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset.

f. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut.

a. besaran dan rincian aset lainnya;
b. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT, dan BTO);
d. informasi lainnya yang penting.

13.Kebijakan Akuntansi Kewajiban

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 09 tentang Kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat,

alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

a.2. Klasifikasi

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika.

1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut.

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
	Utang Bunga
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
	Pendapatan Diterima Dimuka
	Utang Belanja
	Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang	Utang Dalam Negeri
	Utang Jangka Panjang Lainnya

b. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari.

1. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)
   Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.
2. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)
   Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)
   Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.
4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)
   Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misalnya pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

c. Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

1. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga
   Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
2. Pengukuran Utang Transfer
   Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Pengukuran Utang Bunga
   Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
4. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
   Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
5. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
   Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya
   Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contohnya biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran dimuka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu.

1. Utang yang tidak diperjualbelikan
   Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.
2. Utang yang diperjualbelikan
   Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

d. Penyajian

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah disajikan dalam neraca di sisi pasiva.

14.Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah

a. Definisi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan BLUD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode maupun antar BLUD.

b. Karakteristik dan Prinsip BLUD

BLUD mempunyai karakteristik sebagai berikut:

a. Pendanaan BLUD merupakan bagian dari APBD;
b. BLUD dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
c. Pemimpin BLUD adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
d. BLUD membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya dan secara tidak langsung kepda wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
e. Mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
f. Memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
g. Mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya;
h. Mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah
i. Laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.

Selaku penerima APBD yang menyelenggarakan akuntansi, laporan keuangan BLUD dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya.

c. Pengakuan Akun Laporan Keuangan

1) Pendapatan- LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh BUD.
2) Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh BUD.
3) Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan BUD.
4) Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan BUD.
5) Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:
   - saat timbulnya hak atas pendapatan; dan
   - Pendapatan direalisasi.
6) Pendapatan – LO pada BLUD yang diakui pada saat pendapatan direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
7) Pendapatan – LO pada BLUD diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
8) Beban pada BLUD diakui pada saat:

- Timbulnya kewajiban pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas.
- terjadinya konsumsi aset pada saat terjadinya peralihan hak pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/ atau yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional BLUD.
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada saat penurunan aset berhubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

d. Penggabungan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ke Dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan

1) Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya.
2) Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran BLUD dikonsolidasikan ke dalam Laporan Realisasi Anggaran entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya.
3) Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas BUD
4) Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada laporan Kas BUD adalah pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah disahkan oleh BUD.
5) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahinya.
6) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BUD dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

7) Terhadap konsolidasi Laporan Keuangan BLUD kedalam laporan keuangan entitas yang membawahinya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik.
8) Akun-akun timbal balik meliputi pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan.
9) Dikecualikan terhadap akun-akun timbal balik adalah akun –akun pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

V.A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021 adalah tahun kedua setelah adanya wabah *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19) di seluruh dunia termasuk Indonesia. Perkembangannya yang cepat meluas telah berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melakukan penyesuaian pendapatan dan belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.1.1
Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah pada APBD 2021

Uraian	JUMLAH (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	
	APBD Murni 2021	Pergeseran I	APBD-P 2021		
	PERDA No. 3 Tahun 2020	PERBUP No. 2 Tahun 2021	PERDA No. 3 Tahun 2021	(Rp)	%
	30/12/2020	09/03/2021	14/10/2021		
1	2	3	4	5=4-2	6
PENDAPATAN	950.959.985.306,00	935.051.684.306,00	980.426.098.722,00	29.466.113.416,00	3,10
BELANJA	1.038.476.229.202,00	979.542.288.585,00	988.760.523.928,00	(49.715.705.274,00)	(4,79)
SURPLUS/ (DEFISIT)	(87.516.243.896,00)	(44.490.604.279,00)	(8.334.425.206,00)	79.181.818.690,00	(90,48)
PEMBIAYAAN	87.516.243.896,00	44.490.604.279,00	8.334.425.206,00	(79.181.818.690,00)	(90,48)
SILPA	-	-	-	-	

1. APBD Awal Tahun 2021

   a. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021, dengan penetapan tanggal 30 Desember 2020;

b. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021, dengan penetapan tanggal 30 Desember 2020;

2. Pergeseran APBD Tahun 2021

Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021, dengan penetapan tanggal 9 Maret 2021;

3. APBD Perubahan Tahun 2021

a. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021, dengan penetapan tanggal 14 Oktober 2021;

b. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan penetapan tanggal 14 Oktober 2021.

Struktur APBD Tahun Anggaran 2021 mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara sistem aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan keuangan Kabupaten Dharmasraya menggunakan Aplikasi SIMDA dari BPKP yang penganggarannya disandingkan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga penyajian Bagan Akun Standar (BAS) terdapat perbedaan penyajian antara Tahun 2021 dan 2020. Tahun 2021 mengacu kepada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Akan tetapi penyajian *onface* Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan 2020 tetap mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.A.1. Pendapatan Daerah	**978.920.717.101,87**	**990.191.146.482,12**

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp980.426.098.722,00 dengan realisasi sebesar Rp978.920.717.101,87 atau 99,85% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp990.191.146.482,12 maka terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp11.270.429.380,25 atau 1,14%. Secara umum penurunan Tahun 2021 terdapat pada pendapatan transfer sebesar Rp33.769.149.039,00 dibandingkan Tahun 2020 atau minus 3,87%.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Realisasi pendapatan daerah Tahun 2021 dan 2020 dapat diuraikan antara lain sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2021		%	Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Asli Daerah	84.352.675.707,00	82.829.461.520,87	98,19	82.877.841.653,12
Pendapatan Transfer	838.634.243.015,00	838.657.002.069,00	100,00	872.426.151.108,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	57.439.180.000,00	57.434.253.512,00	99,99	34.887.153.721,00
JUMLAH	**980.426.098.722,00**	**978.920.717.101,87**	**99,85**	**990.191.146.482,12**

Selanjutnya anggaran dan realisasi akun-akun Pendapatan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.A.1.a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	**82.829.461.520,87**	**82.877.841.653,12**

PAD – terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah – Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp84.352.675.707,00 dan realisasinya sebesar Rp82.829.461.520,87 atau sebesar 98,19%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp82.877.841.653,12, maka terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp48.380.132,25 atau -0,06%.

Dalam upaya optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 oleh Perangkat Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/252/KPTS-BUP/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/63/KPTS-BUP/2021 tentang Penetapan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021.

Perbandingan antara anggaran dengan realisasi masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.A.1.a.1. Pendapatan Pajak Daerah	**20.495.633.388,25**	**17.751.808.580,45**

Berpedoman kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2014.

Berdasarkan penetapatan target penerimaan dibebankan kepada Badan Keuangan Daerah selaku pemungut Pajak Daerah. Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp20.381.633.896,00 dan realisasinya sebesar Rp20.495.633.388,25 atau sebesar 100,56%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp17.751.808.580,45, maka terdapat **kenaikan** pendapatan sebesar Rp2.743.824.807,80 atau 15,46%. Adapun anggaran dan realisasi Pajak Daerah Tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel 5.1.2
Realisasi Pajak Daerah Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pajak Hotel	100.000.000,00	113.415.750,00	113,42%	75.169.750,00
2	Pajak Restoran	1.100.000.000,00	1.322.388.104,00	120,22%	1.364.845.743,45
3	Pajak Reklame	225.000.000,00	281.958.792,00	125,32%	198.347.740,00
4	Pajak Penerangan Jalan	11.250.000.000,00	11.976.313.351,00	106,46%	11.338.084.342,00
5	Pajak Air Tanah	10.000.000,00	13.959.165,00	139,59%	6.898.303,00
6	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	26.500.000,00	265,00%	2.500.000,00
7	PBB Perdesaan dan Perkotaan	4.466.633.896,00	2.564.106.809,00	57,41%	2.162.234.785,00
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3.000.000.000,00	3.917.362.175,00	130,58%	2.368.255.340,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	220.000.000,00	279.629.242,25	127,10%	235.472.577,00
JUMLAH		**20.381.633.896,00**	**20.495.633.388,25**	**100,56%**	**17.751.808.580,45**

Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021 berasal dari penerimaan piutang pajak tahun-tahun sebelumnya dan penerimaan pajak Tahun 2021, dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.1.3
Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021

No	Uraian						2021	Jumlah (Rp)
		1996 s.d 2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	4	5	6		7	8	9=3+4+5+6+7+8
1	Pajak Hotel					2.800.000	110.615.750,00	113.415.750,00

No	Uraian						2021	Jumlah (Rp)
		1996 s.d 2016	2017	2018	2019	2020		
2	Pajak Restoran						1.322.388.104,00	1.322.388.104,00
3	Pajak Reklame						281.958.792,00	281.958.792,00
4	Pajak Penerangan Jalan							
a	PLN					979.410.413	10.510.089.531,00	11.489.499.944,00
b	Non PLN					41.557.677	445.255.730,00	486.813.407,00
5	Pajak Air Tanah						13.959.165,00	13.959.165,00
6	Pajak Sarang Burung Walet						26.500.000,00	26.500.000,00
7	PBB Perdesaan dan Perkotaan	50.803.500	36.083.711	69.093.760	80.184.569	164.068.094	2.163.873.175,00	2.564.106.809,00
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan						3.917.362.175,00	3.917.362.175,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan						279.629.242,25	279.629.242,25
JUMLAH		**50.803.500**	**36.083.711**	**69.093.760**	**80.184.569**	**1.187.836.184**	**19.071.631.664,25**	**20.495.633.388,25**

Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021 berasal dari penerimaan Tahun 2021 sebesar Rp19.071.631.664,25 dan piutang tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp1.424.001.724,00.

Berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021, dari **sembilan** obyek pajak daerah terdapat **delapan** obyek pajak mengalami **kenaikan** penerimaan, dan **satu** obyek pajak mengalami **penurunan** dibandingkan dengan Tahun 2020 serta **dua** obyek pajak tidak ada target dan penerimaan pada Tahun 2021 yaitu Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Penerimaan pajak dapat uraian sebagai berikut.

a) Pajak Hotel

Pajak Hotel Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp113.415.750,00 atau 113,42% dari target ditetapkan. Dibandingkan Tahun 2020, penerimaan pajak hotel Tahun 2021 mengalami **kenaikan** penerimaan sebesar Rp38.246.000,00 atau 50,88%. Dibandingkan Tahun 2020 mobilisasi keluar dan masuk penduduk di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 pada masa pemulihan menghadapi pandemic Covid-19 sudah mulai berjalan normal kembali.

b) Pajak Restoran

Pajak Restoran Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp1.100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.322.388.104,00 atau 120,22% dari target ditetapkan. Dibandingkan Tahun 2020, penerimaan pajak restoran mengalami sedikit **penurunan** penerimaan sebesar Rp42.457.639,45 atau -3,11%. Pajak Restoran menurun penerimaannya pada Tahun 2021 disebabkan masih belum normalnya aktivitas mobilisasi masyarakat setelah Pandemi Covid-19. Salah satu upaya untuk meningkatkan target pajak restoran, pada bulan oktober 2020 diperkenalkan

aplikasi epanda untuk pelaporan pembayaran pajak restoran. Aplikasi ini digunakan oleh Bendahara SKPD, Puskesmas dan Sekolah untuk melaporkan pembayaran pajak restoran atas kegiatan pembelian makan minum pada instansi masing-masing yang berasal dari rumah makan/ restoran. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan kedepannya pelaporan pajak restoran bisa lebih akurat dan konsisten.

c) Pajak Reklame

Pajak Reklame Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp225.000.000,00 terealisasi sebesar Rp281.958.792,00 atau 125,32% mengalami **kenaikan** penerimaan dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp83.611.052,00 atau sebesar 42,15%. Pajak reklame meningkat penerimaannya karena adanya konsistensi penagihan kepada wajib pajak yang memasang reklame disepanjang jalan utama Kabupaten Dharmasraya.

d) Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp 11.250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp11.976.313.351,00 atau 106,46% mengalami **kenaikan** penerimaan dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp638.229.009,00 atau 5,63%. Selama Tahun 2021 terdapat penerimaan Piutang Tahun 2021 sebesar Rp1.020.968.090,00 yang terdiri dari piutang PPJ PLN sebesar Rp979.410.413,00 dan piutang PPJ Non PLN sebesar Rp41.557.677,00. Kenaikan penerimaan PPJ disebabkan karena adanya pemasangan listrik baru dan pelanggan baru.

e) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp13.959.165,00 atau 139,59%. Penerimaan pajak air tanah Tahun 2021 mengalami **kenaikan** penerimaan sebesar Rp7.060.862,00 atau 102,36% dibandingkan Tahun 2020, disebabkan karena produksi air minum kemasan yang ada di Dharmasraya telah beroperasi normal kembali.

f) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp26.500.000,00 atau 265%. Tahun 2021 mengalami **kenaikan** penerimaan dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp24.000.000,00 atau 960%.

g) PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp2.564.106.809,00 atau 58,33 mengalami **kenaikan** penerimaan dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp401.872.024,00 atau 18,59%. Penerimaan PBB-P2 Tahun 2021 sebesar Rp2.564.106.809,00 terdiri dari penerimaan **Pokok Piutang** sebesar Rp2.558.441.673,00, penerimaan pembayaran kurang bayar PBB-P2 Tahun 2021 sebesar Rp1.957.471,00 dan pembayaran PBB tanpa NOP dari Profesional Telekomunikasi Indonesia sebesar Rp3.707.665,00 sampai saat laporan keuangan ini disusun belum ada balasan konfirmasi dari pihak perusahaan terkait pembayaran PBB tanpa NOP.

Rincian penerimaan PBB-P2 Tahun 2021 terdiri dari.

Tahun	PBB-P2		Penerimaan PBB-P2
	Pokok	Lain-Lain	
2021	2.158.208.039,00	5.665.136,00	2.163.873.175,00
2020	164.068.094,00		164.068.094,00
2019	80.184.569,00		80.184.569,00
2018	69.093.760,00		69.093.760,00
2017	36.083.711,00		36.083.711,00
2016	27.201.300,00		27.201.300,00
2015	11.801.100,00		11.801.100,00
2014	11.801.100,00		11.801.100,00
1996-2013			
Jumlah	**2.558.441.673,00**	**5.665.136,00**	**2.564.106.809,00**

h) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.917.362.175,00 atau 130,58%. Mengalami **kenaikan** penerimaan dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp1.549.106.835,00 atau 65,41%. Meningkatnya penerimaan BPHTB selama Tahun 2021 disebabkan lancarnya pengurusan bea balik nama sertifikat pada masyarakat.

i) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp220.000.000,00 terealisasi sebesar Rp279.629.242,25 atau 127,1%. Mengalami **kenaikan** penerimaan dibanding Tahun 2020 sebesar Rp 44.156.665,25 atau 18,75%.

j) Pajak Hiburan dan Pajak Parkir

Pajak Hiburan Tahun 2021 tidak dianggarkan dan tidak terealisasi karena selama Tahun 2021 tidak dilakukan kegiatan hiburan yang mengumpulkan orang banyak. Hal ini disebabkan karena dampak pandemi covid 19 mengakibatkan tidak adanya kegiatan hiburan yang menjadi event tahunan di Kabupaten Dharmasraya seperti Selaju Sampan Pulai, event motor cross dan lainnya.

Pajak Parkir Tahun 2021 tidak dianggarkan dan tidak terealisasi. ini disebabkan karena kebijakan yang tidak memperbolehkan lagi pemungutan pajak parkir di tepi jalan umum. Pemungutan pajak parkir yang biasa dilaksanakan kepada acara hiburan masyarakat juga tidak ada akibat dampak covid 19 yang membatasi atau pelarangan kerumunan di masyarakat.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.A.1.a.2. Pendapatan Retribusi Daerah	**2.411.365.382,00**	**1.861.712.711,00**

Merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari Retribusi Daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp3.161.472.400,00 dengan realisasi sebesar Rp2.411.365.382,00 atau 76,27%. Retribusi Daerah Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp549.652.671,00 atau sebesar 22,79%.

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah yang dipungut serta yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1.4
Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
A	**Retribusi Jasa Umum**	**1.088.064.000,00**	**1.030.469.700,00**	**94,71%**	**946.526.000,00**
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	175.000.000,00	179.266.100,00	**102,44%**	139.345.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	100.000.000,00	129.612.000,00	**129,61%**	107.550.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	109.804.000,00	162.721.000,00	**148,19%**	79.242.000,00
4	Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor	320.000.000,00	261.618.000,00	**81,76%**	324.109.000,00
5	Retribusi Pelayan Tera / Tera Ulang	38.260.000,00	58.055.500,00	**151,74%**	31.955.000,00
6	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	315.000.000,00	199.897.100,00	**63,46%**	231.325.000,00
7	Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus	30.000.000,00	39.300.000,00	**131,00%**	33.000.000,00
B	**Retribusi Jasa Usaha**	**1.846.808.400,00**	**1.191.247.332,00**	**64,50%**	**734.881.711,00**
1	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	960.808.400,00	581.939.737,00	**60,57%**	592.180.516,00
2	Retribusi Tempat Khusus Parkir	32.500.000,00	18.622.495,00	**57,30%**	33.829.195,00

No	Uraian	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
3	Retribusi Rumah Potong Hewan	3.500.000,00	3.520.000,00	**100,57%**	4.160.000,00
4	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	850.000.000,00	587.165.100,00	**69,08%**	104.712.000,00
C	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**226.600.000,00**	**189.648.350,00**	**83,69%**	**180.305.000,00**
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	226.600.000,00	189.648.350,00	**83,69%**	180.305.000,00
JUMLAH		**3.161.472.400,00**	**2.411.365.382,00**	**76,27%**	**1.861.712.711,00**

Berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2021, dari **12** obyek retribusi daerah terdapat **tujuh** obyek retribusi mengalami **kenaikan** penerimaan dan **lima** obyek retribusi mengalami **penurunan** dibandingkan dengan Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut.

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Dari target yang ditetapkan sebesar Rp175.000.000,00 terealisasi sebesar Rp179.266.100,00 atau sebesar 102,44%. Target retribusi ini di berikan pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). Pada Penerimaan tahun ini terdapat **kenaikan** penerimaan dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp39.921.100,00 atau 22,27%. Meningkatnya pendapatan Tahun 2021 karena Labkesda sudah bekerjasama dengan BPJS terkait pemeriksaan layanan kesehatan.

b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ini diberikan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp129.612.000,00 atau sebesar 129,61%. Adanya **kenaikan** penerimaan dibanding tahun sebelumnya sebesar 17,02%. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya area pelayanan persampahan/kebersihan di sektor perumahan.

c) Retribusi Pelayanan Pasar.

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasaraya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Retribusi Pelayanan Pasar ditargetkan sebesar Rp109.804.000,00 terdapat pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebesar Rp101.804.000,00 dan Dinas Pertanian sebesar Rp8.000.000,00. Realisasi dari Dinas Kumperdag sebesar Rp154.471.000,00 atau 151,73% dan dari Dinas Pertanian terealiasi sebesar Rp8.250.000,00 atau 103,13%.

Apabila dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya terjadi **kenaikan** pendapatan sebesar Rp83.479.000,00 atau 53,3%. Meningkatnya penerimaan retribusi pelayanan pasar Tahun 2021 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan disebabkan karena adanya penerimaan piutang Tahun 2019 sebesar Rp5.300.000,00, piutang Tahun 2020 sebesar Rp47.367.000,00 dan penerimaan Tahun 2021 sebesar Rp101.804.000,00. Optimalisasi pemungutan dilakukan melalui koordinasi dengan Wali Nagari yang memiliki pasar diwilayahnya.

d) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasaraya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Dari Target retribusi pada Dinas Perhubungan sebesar Rp320.000.000,00 terealisasi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2021 sebesar Rp261.618.000,00 atau 81,76% mengalami **penurunan** dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp62.491.000,00. Hal ini disebabkan masih adanya pengaruh pandemi Covid-19 menyebabkan terbatasnya perekonomian masyarakat dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk pengujian kendaraan tepat waktu.

e) Retribusi Tera/ Tera ulang

Pendapatan Retribusi Tera/ Tera Ulang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasaraya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Retribusi Tera/ Tera Ulang.

Dari Target retribusi yang diberikan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sebesar Rp38.260.000,00 terealisasi Penerimaan Retribusi Retribusi Tera/ Tera Ulang Tahun 2021 sebesar Rp58.055.500,00 atau 151,74%.

f) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pendapatan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasaraya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Target di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp30.000.000,00 terealisasi sebesar Rp39.300.000,00 dengan persentase capaian penerimaan Retribusi Penyedotan Kakus Tahun 2021 sebesar 131%. Terdapat **kenaikan** penerimaan retribusi dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp6.300.000,00 atau 16,03% disebabkan karena semakin meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pelayanan penyedotan kakus.

g) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Tekomunikasi

Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Tekomunikasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasaraya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Tekomunikasi.

Dari Target retribusi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp315.000.000,00, terealisasi capaian target Penerimaan Tahun 2021 sebesar Rp199.897.100,00 atau 63,46% mengalami **penurunan** dibandingkan tahun 2020 karena belum optimalnya pencapaian penerimaan retribusi karena SKRD yang diterbitkan pada tahun 2021 tidak sepenuhnya dilakukan penyetoran oleh pihak vendor.

h) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dipungut pada Tahun 2021 berupa Pemakaian Rumah Dinas, Pemakaian Gedung Auditorium dan Gedung Pertemuan di Kecamatan, Sewa ATM, Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), dan Sewa Alat Berat. Target Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2021 sebesar Rp960.808.400,00 dengan realisasi sebesar Rp579.429.337,00 atau 60,31% terdapat pada pada 15 SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Dinas Pendidikan	45.750.000,00	76.815.000,00	167,90
2	Dinas Kesehatan	79.680.000,00	65.959.000,00	82,78
3	RSUD Sungai Dareh	10.000.000,00	31.789.303,00	317,89
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	600.000.000,00	134.740.000,00	22,46
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	185.278.400,00	231.904.400,00	125,17
6	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	13.980.000,00	16.391.634,00	117,25
7	Sekretariat Daerah	10.000.000,00	11.500.000,00	115,00
8	Kecamatan Pulau Punjung	3.000.000,00	4.250.000,00	141,67
9	Kecamatan Sitiung	1.460.000,00	1.500.000,00	102,74
10	Kecamatan Koto Baru	1.500.000,00	2.100.000,00	140,00
11	Kecamatan Sungai Rumbai	3.500.000,00	1.730.000,00	49,43
12	Kecamatan Sembilan Koto	1.750.000,00	250.000,00	14,29
13	Kecamatan Timpeh	1.660.000,00	250.000,00	15,06
14	Kecamatan Koto Besar	2.000.000,00	250.000,00	12,50
15	Kecamatan Tiumang	1.250.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	**960.808.400,00**	**579.429.337,00**	60,31

Penerimaan Tahun 2020 sebesar Rp579.429.337,00 terjadi **penurunan** realisasi sebesar Rp12.751.179,00 atau -2,2% dibandingkan tahun lalu. Salah satunya disebabkan karena alat berat yang ada di UPT Peralatan dan Kelengkapan pada Dinas Pekerjaan Umum banyak dalam keadaan rusak berat sehingga tidak optimal beroperasi dan pemakaian oleh masyarakat berkurang akibat dari dampak ekonomi covid 19.

Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2021 sebesar Rp579.429.337,00 berasal dari :

1) Penerimaan Retribusi Tahun 2021 sebesar Rp565.825.337,00
2) Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2020 sebesar Rp1.825.000,00 dari Rusunawa Dinas Perkimtan
3) Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2019 sebesar Rp253.000,00 dari Pemakaian Rumah Dinas pada Dinas Pendidikan
4) Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2018 sebesar Rp7.354.000,00 terdiri dari Pemakaian Rumah Dinas pada Dinas Pendidikan sebesar Rp6.754.000,00 dan Pemakaian Kendaraan Dinas pada Kecamatan Koto Baru sebesar Rp600.000,00. Terkait pemakaian kendaraan dinas tidak dilakukan pemungutan retribusi terhitung Oktober 2018.
5) Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2017 sebesar Rp4.172.000 dari Pemakaian Rumah Dinas pada Dinas Pendidikan.

i) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun 2021 dengan target sebesar Rp32.500.000,00 terealisasi sebesar Rp21.132.895,00 atau 65,02%. Terdapat pada RSUD Sungai Dareh target sebesar Rp2.500.000,00 terealisasi sebesar Rp2.510.400,00 atau 100,42%, Dinas Perhubungan target sebesar Rp30.000.000,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp18.622.495,00 atau 62,07%. Secara keseluruhan terjadi **penurunan** sebesar Rp12.696.300,00 atau -60,08% dari tahun sebelumnya, karena belum maksimalnya pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan RSUD Sungai Dareh.

j) Retribusi Rumah Potong Hewan

Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

Target retribusi pada Dinas Pertanian sebesar Rp3.500.000,00 Pada Tahun 2021 penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan terealisasi sebesar Rp3.520.000,00 atau 100,57%, mengalami **penurunan** dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp640.000,00 atau -18,18%.

k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Tahun 2021 sebesar Rp587.165.100,00, yaitu sebesar 69,08%. Penerimaan Tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020 mengalami **kenaikan** sebesar Rp482.453.100,00 atau 82,17%. Hal ini disebabkan karena pemindahan inner pendapatan atas Pengelolaan Air Minum berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit Pelaksana Teknis Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM) dari Lain-Lain PAD Yang Sah menjadi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Target retribusi Persentase Penjualan Produksi Usaha Daerah pada tahun 2021 adalah sebesar Rp850.000.000,00. Target dan realisasi retribusi tersebut terdapat pada :

1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp700.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp431.650.000,00 atau 59,81%. Terdiri dari penerimaan Tahun 2021 sebesar Rp356.167.500,00 dan penerimaan piutang sebesar Rp75.482.500,00 terdiri dari Tahun 2020 sebesar Rp72.376.700,00, Tahun 2019 sebesar Rp2.594.700,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp511.100,00.

2) Dinas Pangan dan Perikanan target sebesar Rp105.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp105.160.100,00 atau 100,15% adalah berupa penjualan bibit ikan.

3) Dinas Pertanian target sebesar Rp45.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp50.355.000,00 atau 111,9% adalah berupa penjualan anak ayam, telur, dan kambing persediaan.

l) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2011 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Penerimaan Retribusi IMB tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020 mengalami **kenaikan** sebesar Rp9.343.350,00 atau 4,93%, dimana Target Retribusi ini pada tahun 2021 sebesar Rp226.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	200.000.000,00	173.699.600,00
2	Kecamatan Pulau Punjung	3.000.000,00	3.406.250,00
3	Kecamatan Sitiung	5.000.000,00	3.855.000,00
4	Kecamatan Koto Baru	2.100.000,00	1.125.000,00
5	Kecamatan Sungai Rumbai	5.000.000,00	3.550.000,00
6	Kecamatan Sembilan Koto	750.000,00	0,00
7	Kecamatan Timpeh	4.500.000,00	2.512.500,00
8	Kecamatan Koto Salak	1.000.000,00	0,00
9	Kecamatan Asam Jujuhan	1.000.000,00	500.000,00
10	Kecamatan Koto Besar	1.500.000,00	500.000,00
11	Kecamatan Padang Laweh	1.500.000,00	500.000,00
12	Kecamatan Tiumang	1.250.000,00	0,00
	Jumlah	**226.600.000,00**	**189.648.350,00**

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, salah satunya meniadakan pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejak 2 Agustus 2021, berganti ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Secara aturan, retribusi PBG di Kabupaten Dharmasraya belum dipungut karena Ranperda terkait PBG masih dalam dalam proses penyusunan Naskah Akademik.

		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.A.1.a.3.	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**3.524.570.411,00**	**4.063.752.034,00**

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel 5.1.5
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Deviden Bank Nagari Tahun 2020	3.524.570.411,00	3.515.054.721,00	100	4.043.805.181,00
2	Deviden BPR Pulau Punjung Tahun 2020		9.515.690,00	0,00	19.946.853,00
	Jumlah	3.524.570.411,00	3.524.570.411,00	100	4.063.752.034,00

Pada akhir Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memiliki investasi permanen penyertaan modal sebesar Rp27.452.000.000,00 terdiri dari penyertaan modal pada PT BPD Sumatera Barat/Bank Nagari sebesar Rp25.852.000.000,00, PT. Balairung Citra Jaya sebesar Rp1.500.000.000,00 dan PT. BPR Pulau Punjung sebesar Rp100.000.000,00.

Dari penyertaan modal tersebut, penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan penerimaan sebesar Rp3.524.570.411,00 dengan realisasi sebesar Rp3.524.570.411,00 atau 100% yang berasal dari penerimaan deviden Bank Nagari Tahun 2020 sebesar Rp3.515.054.721,00, dan penerimaan deviden PT BPR Pulau Punjung Tahun 2020 sebesar Rp9.515.690,00. Jika dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2020 sebesar Rp4.063.752.034,00 penerimaan untuk Tahun 2021 mengalami **penurunan** sebesar Rp539.181.623,00 atau -13,27%.

		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.A.1.a.4.	**Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	**56.397.892.339,62**	**59.200.568.327,67**

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp57.284.999.000,00 dengan realisasi Rp56.397.892.339,62 atau 98,45%. Terdapat penurunan pendapatan dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp2.802.675.988,05 atau -4,73% dari penerimaan Tahun 2020.

Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel 5.1.6
Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan	124.950.000,00	495.864.100,00	396,85%	73.050.000,00
2	Penerimaan Jasa Giro	1.220.000.000,00	1.284.039.855,00	105,25%	1.064.703.252,00
3	Pendapatan BLUD	43.726.063.000,00	43.221.909.781,67	98,85%	48.517.856.348,00
4	Dana Kapitasi	7.153.986.000,00	6.908.885.200,00	96,57%	6.956.787.526,00
5	Tuntutan Ganti kerugian Daerah	400.000.000,00	486.674.700,67	121,67%	255.291.060,86
6	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	160.000.000,00	209.701.248,16	131,06%	122.754.673,81
7	Pendapatan Dari Pengembalian	2.500.000.000,00	2.560.115.416,00	102,40%	144.660.032,00
8	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.000.000.000,00	1.230.702.038,12	61,54%	1.423.926.635,00
9	Pengelolaan Air Minum	0,00	0,00	0,00%	641.538.800,00
JUMLAH		**57.284.999.000,00**	**56.397.892.339,62**	**98,45%**	**59.200.568.327,67**

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2021 terdiri dari delapan obyek penerimaan. Adapun perbedaan dengan Tahun 2020 yaitu berkurangnya satu obyek penerimaan atas Pengelolaan Air Minum (SPAM) pindah ke Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, sedangkan Penerimaan Bunga Deposito nama rekeningnya menjadi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain yang masih tergabung pada Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah. Berdasarkan realisasi penerimaan dari **delapan** obyek penerimaan terdapat **lima** obyek penerimaan mengalami **kenaikan** penerimaan dan **tiga** obyek penerimaan mengalami **penurunan** dibandingkan dengan Tahun 2020, dengan uraian sebagai berikut.

1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp124.950.000,00 terealisasi sebesar Rp495.864.100,00 atau 396,85%. Terdiri dari penerimaan atas penjualan kendaraan dinas operasional yang dilakukan dengan pelelangan umum sebanyak dua kali melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pada tanggal 22 April 2021 dengan realisasi sebesar Rp114.250.000,00 dan tanggal 28 Oktober 2021 sebesar Rp240.617.100,00, penjualan atas sisa bongkaran atap sekolah lama pada kegiatan DAK pada Dinas Pendidikan sebesar Rp8.425.000,00, penerimaan atas hasil pengelolaan kebun karet milik pemda sebesar Rp21.704.000,00 dan Penjualan Aset Lancar atas persediaan batu pecah yang ada pada Dinas PUPR sebesar Rp110.868.000,00.

Penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan pada Tahun 2021 mengalami **kenaikan** dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp422.814.100,00 atau 578,8%. Disebabkan karena pelelangan umum melalui (KPKNL) yang tertunda tahun 2020 telah dilaksanakan tahun 2021 dan penjualan beberapa aset daerah yang menambah ke Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2021.

2. Penerimaan Jasa Giro

Penerimaan Jasa Giro Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp1.220.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.284.039.855,00 atau 105,25%. Jasa Giro terdiri dari Jasa Giro pada Kas Daerah terealisasi sebesar Rp 1.210.144.144,00 dan Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebesar Rp73.895.711,00. Terjadi **kenaikan** penerimaan sebesar Rp219.336.603,00 atau 5,83% dibandingkan penerimaan Tahun 2020 sebesar Rp1.064.703.252,00. Hal ini disebabkan karena perputaran uang keluar digiro SKPD tidak terlalu tinggi sehingga dana yang mengendap di Kas Daerah memberikan dampak kenaikan penerimaan jasa giro Tahun 2021.

3. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kabupaten Dharmasraya Pada Tahun 2021 memiliki 16 unit Badan Layanan Umum Daerah yang bergerak pada bidang kesehatan yaitu 2 unit Badan Layanan Umum RSUD Sungai Dareh dan RSUD Sungai Rumbai dan 14 unit Badan Layanan Umum UPT Puskesmas, uraian sejarah singkat mengenai pembentukan BLUD di Kabupaten Dharmasraya dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Badan Layanan Umum RSUD Sungai Dareh

BLUD RSUD Sungai Dareh ditetapkan dengan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/460/KPTS-BUP/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penetapan RSUD Sungai Dareh untuk melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh di Kabupaten Dharmasraya. Pelaksanaan unit BLUD RSUD Sungai Dareh mulai berjalan pada 1 Januari 2015.

2. Badan Layanan Umum UPT Puskesmas dan RSUD Sungai Rumbai

Tahun 2017 Kabupaten Dharmasraya memiliki UPT Puskesmas Kabupaten Dharmasraya *(holding)* pada Dinas Kesehatan. UPT Puskesmas membawahi 13 Puskesmas sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 189.1/463/KPTS-BUP/2014 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas untuk Melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh di Kabupaten Dharmasraya.

Adanya penetapan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, telah terjadi Perubahan Struktur Organisasi UPT Puskesmas melalui Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/147/KPTS-BUP/2018 tentang Pencabutan atas Keputusan Dharmasraya Nomor 189.1/463/KPTS-BUP/2014 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas untuk Melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh di Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 18 April 2018.

Pencabutan keputusan tersebut diiringi dengan pembentukan UPT Puskesmas sebanyak 13 Puskesmas sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap dengan uraian sebagai berikut.

1. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/148/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Silago
2. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/149/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Koto Baru.
3. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/150/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Dareh
4. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/151/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Koto Besar
5. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/152/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Padang Laweh
6. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/153/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sialang
7. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/154/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Gunung Medan
8. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/155/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sitiung I.
9. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/156/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sitiung II
10. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/157/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Timpeh dan Beringin Sakti.
11. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/158/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Tiumang
12. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/159/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Rumbai
13. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/160/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Limau

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pada akhir Tahun 2019 Kabupaten Dharmasraya telah menambah 2 unit BLUD yaitu UPT RSUD Sungai Rumbai dan UPT Puskesmas Beringin Sakti yang mulai berjalan pada tanggal 2 Januari 2020, dengan dasar penetapan sebagai berikut.

a. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/462/KPTS-BUP/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Penetapan UPT RSUD Sungai Rumbai sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
b. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/476/KPTS-BUP/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Penetapan UPT RSUD Beringi Sakti sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang tidak membagi BLUD dalam status “Bertahap” atau “Penuh, maka Keputusan Bupati Tahun 2018 tentang penetapan UPT Puskesmas sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Bertahap dicabut, digantikan dengan Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan uraian sebagai berikut.

1. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/463/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Rumbai sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
2. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/464/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sitiung I sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
3. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/465/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sitiung II sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
4. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/466/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sialang sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/467/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Dareh sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya SK Nomor 188.45/468/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Silago sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/469/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Timpeh sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/470/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Padang Laweh sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/471/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Tiumang sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/472/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Koto Baru sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/473/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Koto Besar sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/474/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Limau sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

13. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/475/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Limau sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pendapatan Jasa Layanan BLUD selama Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp43.726.063.000,00 terealisasi sebesar Rp43.221.909.781,67 atau 98,85%. Mengalami **penurunan** sebesar Rp5.295.946.566,33 atau -10,92% dibandingkan penerimaan Tahun 2020 sebesar Rp48.517.856.348,00

Data Pendapatan Jasa Layanan BLUD dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1. 7
Pendapatan Jasa Layanan BLUD Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
I	**Jasa Layanan BLUD**	**43.726.063.000,00**	**43.216.079.781,67**	**98,83%**	**40.938.653.558,00**
1	BLUD RSUD Sungai Dareh	40.000.000.000,00	40.344.182.650,67	100,86%	45.461.444.814,00
2	BLUD RSUD Sungai Rumbai	800.000.000,00	555.941.071,00	69,49%	499.919.454,00
3	BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	330.000.000,00	256.987.000,00	77,87%	264.479.000,00
4	BLUD Puskesmas Sungai Limau	220.640.000,00	139.363.000,00	63,16%	167.179.000,00
5	BLUD Puskesmas Sitiung II	104.692.500,00	140.544.000,00	134,24%	130.039.000,00
6	BLUD Puskesmas Padang Laweh	231.000.000,00	137.888.000,00	59,69%	136.234.000,00
7	BLUD Puskesmas Sungai Dareh	167.232.000,00	84.847.000,00	50,74%	159.494.000,00
8	BLUD Puskesmas Silago	245.570.400,00	266.863.000,00	108,67%	193.781.500,00
9	BLUD Puskesmas Gunung Medan	121.000.000,00	73.330.200,00	60,60%	64.097.000,00
10	BLUD Puskesmas Sitiung I	495.955.100,00	270.991.000,00	54,64%	405.088.600,00
11	BLUD Puskesmas Koto Baru	478.178.000,00	556.740.500,00	116,43%	565.120.000,00
12	BLUD Puskesmas Timpeh	196.380.000,00	155.037.000,00	78,95%	179.044.000,00
13	BLUD Puskesmas Sialang	75.500.000,00	27.168.000,00	35,98%	37.444.000,00
14	BLUD Puskesmas Tiumang	76.335.000,00	64.907.100,00	85,03%	78.984.600,00
15	BLUD Puskesmas Koto Besar	140.080.000,00	114.465.260,00	81,71%	137.466.380,00
16	BLUD Puskesmas Beringin Sakti	43.500.000,00	32.655.000,00	75,07%	38.041.000,00
	JUMLAH	**43.726.063.000,00**	**43.221.909.781,67**	**98,85%**	**48.517.856.348,00**

Uraian realisasi Pendapatan dan Belanja BLUD Puskesmas dapat dijelaskan di **Lampiran 1** pada Laporan Keuangan ini.

4. Pendapatan Kapitasi Puskesmas

Penganggaran Pendapatan Kapitasi Puskesmas pada Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, diangkarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD sedangkan rencana belanja Kapitasi dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas Kesehatan.

Anggaran Pendapatan Kapitasi Puskesmas dianggarkan pada DPA Badan Keuangan Daerah sebesar Rp7.153.986.000,00 terealisasi sebesar Rp6.908.885.200,00 atau 96,57% mengalami penurunan sebesar Rp55.154.576,00 atau -0,79% dibandingkan Tahun 2020.

Realisasi Pendapatan Kapitasi Puskesmas pada Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.8

Pendapatan Kapitasi Puskesmas Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
II	**Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP**	**7.153.986.000,00**	**6.908.885.200,00**	96,57%	**6.964.039.776,00**
1	BLUD Puskesmas Sungai Rumbai		544.526.700,00		555.029.850,00
2	BLUD Puskesmas Sungai Limau		271.457.500,00		272.472.000,00
3	BLUD Puskesmas Sitiung II		612.832.500,00		625.476.600,00
4	BLUD Puskesmas Padang Laweh		214.387.000,00		218.613.000,00
5	BLUD Puskesmas Sungai Dareh		1.135.577.700,00		1.119.651.000,00
6	BLUD Puskesmas Silago		486.156.300,00		458.918.450,00
7	BLUD Puskesmas Gunung Medan		451.726.800,00		474.994.200,00
8	BLUD Puskesmas Sitiung I		618.071.700,00		624.805.500,00
9	BLUD Puskesmas Koto Baru		844.845.000,00		884.551.200,00
10	BLUD Puskesmas Timpeh		342.786.300,00		346.994.523,00
11	BLUD Puskesmas Sialang		365.627.700,00		363.629.700,00
12	BLUD Puskesmas Tiumang		225.421.300,00		260.792.000,00
13	BLUD Puskesmas Koto Besar		623.348.700,00		597.443.700,00
14	BLUD Puskesmas Beringin Sakti		172.120.000,00		153.415.803,00
JUMLAH		**7.153.986.000,00**	**6.908.885.200,00**	**96,57%**	**6.956.787.526,00**

5. Penerimaan Kerugian Daerah

Penerimaan Kerugian Daerah berasal dari pengembalian ke Kas Daerah atas temuan pemeriksaan BPK dan APIP yang telah dilakukan penetapan keputusan kerugian daerahnya berupa Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM) maupun Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Penerimaan Kerugian Daerah yang masuk ke kasda Tahun 2021 adalah sebesar Rp486.674.700,67. Terdiri dari penerimaan TGR atas penetapan SKP2KS Tahun 2021 sebesar Rp403.663.043,79, piutang TGR tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp83.008.706,32 dan pembulatan penyetoran piutang ke kas daerah sebesar Rp2.950,56.

Pejabat Penyelesaian Kerugian daerah (PPKD) telah menetapkan SKP2KS selama Tahun 2021 sebanyak 2 SKP2KS dari lima temuan LHP BPK atas Belanja Daerah Tahun 2019 dan 2020. Penerbitan Surat Keterangan Pelunasan (SKL) atas pembebanan kerugian daerah pada Tahun 2021 sebanyak 27 SKL.

Rincian lebih lanjut terkait penerimaan kerugian daerah dan piutang TGR per 31 Desember 2021 dapat dilihat di **Lampiran 14** pada Laporan Keuangan ini.

6. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penerimaan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan berupa penerimaan dari penyedia barang/jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Penerimaan denda keterlambatan Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp160.000.000,00 terealisasi sebesar Rp209.701.248,16 atau 131,06%. Mengalami **kenaikan** sebesar Rp86.946.574,35 dibandingkan penerimaan tahun 2020 sebesar Rp122.754.673,81 atau 70,73%. Bertambahnya penerimaan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan disebabkan beberapa kegiatan pengadaan barang jasa mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak.

7. Pendapatan Dari Pengembalian

Penerimaan Pendapatan dari Pengembalian terdiri dari Pendapatan dari Pengembalian LHP dan Pendapatan dari Pengembalian Belanja. Pendapatan dari Pengembalian LHP yaitu Pengembalian Temuan pada saat NHP/LHP APIP yang tidak tercantum dalam kerugian daerah karena penyetorannya pada saat NHP atau LHP terbit sehingga tidak ditetapkan dalam Buku Pemantauan Kerugian Daerah dari BPK RI sedangkan Pendapatan dari Pengembalian Belanja berupa pengembalian belanja pada tahun berikutnya atas belanja pegawai.

Penerimaan Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.560.115.416,00 atau 102,4%. Penerimaannya terbesar berasal dari pengembalian sisa Dana Hibah Pilkada Tahun 2020 yang disetor lewat tahun dari Bawaslu Dharmasraya sebesar Rp518.587.670,00 dan KPU Dharmasraya sebesar Rp1.877.988.004,00 sedangkan sisanya sebesar Rp163.539.742,00 adalah berupa pengembalian dari Gaji, Temuan NHP dan Perjalanan Dinas.

8. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain terdiri dari penerimaan penutupan rekening yang tidak aktif , penerimaan bunga deposito berasal dari penempatan deposito selama Tahun 2021 dan penerimaan piutang bunga deposito Tahun 2020, dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.9

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun 2021

NO	Nomor Rekening	Nomor Seri Bilyet	Nilai Deposito	Bank Penempatan	Jangka Waktu	Suku bunga	tanggal pembuatan	Tanggal Pencairan	Total Penerimaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	**Bunga Deposito**								
1	14030301011322	143784	5.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	7%	19/01/21	03/05/21	101.111.109,00
2	14030301011311	143783	5.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	7%	19/01/21	03/05/21	101.111.109,00
3	14030301011300	143782	5.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	7%	19/01/21	03/05/21	101.111.109,00
4	14030301011436	126778	5.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	7%	13/04/21	31/12/21	250.268.816,00
5	14030301011425	126778	5.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	7%	13/04/21	03/05/21	19.444.440,00
6	14030301011440	126780	5.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	7%	13/04/21	31/12/21	250.268.816,00
7	14030301011532	126789	5.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	7%	05/05/21	30/06/21	53.472.217,00
8	14030301012136	153079	5.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	7%	06/10/21	31/12/21	81.854.834,00
9	14030301012151	153080	5.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	7%	06/10/21	31/12/21	81.854.834,00
10	14030301012140	153082	5.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	7%	06/10/21	31/12/21	81.854.834,00
II	**Penutupan Rekening SKPD/ Sekolah yang tidak aktif**								57.084.530,12
III	**Penerimaan Piutang Deposito 2020**								10.080.630,00
IV	**Penerimaan Denda PBBP2**								41.184.760,00
	JUMLAH								**1.230.702.038,12**

Target Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan penerimaan sebesar Rp1.230.702.038,12 atau 61,54%. Terdapat **penurunan** pendapatan dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp193.224.596,88 atau -13,57% dari penerimaan Tahun 2020 sebesar Rp1.423.926.635,00. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun 2021 terdiri dari penerimaan Tahun 2021 sebesar Rp1.179.436.648,12, penerimaan piutang bunga deposito tahun 2020 sebesar Rp10.080.630,00 dan penerimaan Denda PBBP2 sebesar Rp41.184.760,00.

		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.A.1.b.	**Pendapatan Transfer**	**838.657.002.069,00**	**872.426.151.108,00**

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang diperoleh suatu entitas pelaporan dari entitas pelaporan lainnya yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Pendapatan Transfer Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp838.634.243.015,00 dengan realisasi Rp838.657.002.069,00 atau sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp872.426.151.108,00, Pendapatan Transfer Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp33.769.149.039,00 atau -3,87%.

Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen Pendapatan Transfer dapat diuraikan sebagai berikut.

		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.A.1.b.1.	**Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan**	**713.844.105.329,00**	**731.498.444.225,00**

Penganggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2021 dianggarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Dengan adanya penyesuaian belanja Negara dalam hal realisasi penerimaan Negara tidak sesuai dengan target dan/atau adanya perkiraan pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2021, maka dilakukanlah perubahan rincian anggaran Tranfer ke Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan Dampaknya.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan dianggarkan pada APBD Awal Tahun 2021 sebesar Rp721.777.491.000,00. Dengan adanya penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan Dampaknya menjadi sebesar Rp707.287.175.461,00 dengan realisasi sebesar Rp713.844.105.329,00 atau 100,93%.

Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp731.498.444.225,00, Pendapatan Transfer Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp17.654.338.896,00 atau -2,41% disebabkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi COVID-19 dilakukan penyesuaian penerimaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

Tabel 5.1.10

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Bagi Hasil Pajak	14.991.916.235,00	30.199.842.269,00	201,44	12.973.433.646,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3.228.436.226,00	3.462.713.300,00	107,26	2.174.079.602,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	472.416.143.000,00	472.416.143.000,00	100,00	478.355.774.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	216.650.680.000,00	207.765.406.760,00	95,90	237.995.156.977,00
JUMLAH		**707.287.175.461,00**	**713.844.105.329,00**	**100,93**	**731.498.444.225,00**

Rincian Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 2** pada Laporan Keuangan ini.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.A.1.b.1.a Bagi Hasil Pajak	**30.199.842.269,00**	**12.973.433.646,00**

Pada Tahun Anggaran 2021 penerimaan Bagi Hasil Pajak dianggarkan Rp14.991.916.235,00 dengan realisasi sebesar Rp30.199.842.269,00 atau sebesar 201,44%. Penerimaan Bagi Hasil Pajak mengalami kenaikan sebesar Rp17.226.408.623,00 atau 132,78% dibandingkan penerimaan Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 sebesar Rp12.973.433.646,00. Penerimaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.11
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
	Bagi Hasil Pajak				
1	**Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan**	**5.908.382.131,00**	**5.912.817.200,00**	100,08	**6.823.371.615,00**
a	DBH PPh Pasal 21	5.908.382.131,00	5.743.226.800,00	97,20	6.403.344.495,00
b	DBH PPh Pasall 25/29 OP	-	169.590.400,00	-	420.027.120,00
2	**Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan**	**9.025.863.907,00**	**24.222.822.758,00**	268,37	**6.070.340.967,00**
a	- DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota		17.613.459.614,00	-	3.246.940.987,00
b	- DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota		716.684.205,00	-	111.908.046,00
c	- DBH PBB Bagi Rata		5.892.678.939,00	-	2.711.491.934,00
3	**Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau**	**57.670.197,00**	**64.202.311,00**	111,33	**79.721.064,00**
a	DBH Cukai untuk Prov/Kab/Kota	57.670.197,00	64.202.311,00	111,33	79.721.064,00
JUMLAH		**14.991.916.235,00**	**30.199.842.269,00**	**201,44**	**12.973.433.646,00**

Tingginya nilai realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Tahun 2021 dibandingkan anggaran, disebabkan adanya penerimaan kurang bayar tahun-tahun sebelumnya dan penerimaan Tahun 2021. Penerimaan bruto Dana Bagi Hasil Pajak pada penyaluran transfer ke daerah dan dana Tahun 2021 dari data Simtrada Kementerian Keuangan sebesar Rp31.032.175.227,00, terdapat pemotongan sebesar Rp832.332.958,00 yang terdiri Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan sebesar Rp556.261.976,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp276.070.982,00 sehingga penerimaan menjadi sebesar Rp30.199.842.269,00. Penerimaan kurang bayar yang masuk ke RKUD Tahun 2021 berasal dari Penetapan Transfer Pemerintah

Pusat Dana Perimbangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Pada Hasil Tahun 2021. Uraian Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.1.12
Kurang Bayar DBH Pajak Tahun 2019 - 2020 dan penerimaan di RKUD Tahun 2021

No	Uraian	Penerimaan DBH Pajak Penghasilan Tahun 2021			Jumlah
		Kurang Bayar 2019	Kurang Bayar 2020	2021	
1	**Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan**	**-**	**1.061.128.200,00**	**4.851.689.000,00**	**5.912.817.200,00**
a	- DBH PPh Pasal 21	-	1.028.466.800,00	4.714.760.000,00	5.743.226.800,00
b	- DBH PPh Pasal 25/29 OP	-	32.661.400,00	136.929.000,00	169.590.400,00
2	**Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan**	**6.257.802.856,00**	**8.649.645.902,00**	**9.315.374.000,00**	**24.222.822.758,00**
a	- DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota	4.890.692.668,00	6.561.271.946,00	6.161.495.000,00	17.613.459.614,00
b	- DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota	213.456.571,00	263.023.634,00	240.204.000,00	716.684.205,00
c	- DBH PBB Bagi Rata	1.153.653.617,00	1.825.350.322,00	2.913.675.000,00	5.892.678.939,00
3	**Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau**	**7.773.483,00**	**8.947.653,00**	**47.481.175,00**	**64.202.311,00**
a	DBH Cukai untuk Prov/Kab/Kota	7.773.483,00	8.947.653,00	47.481.175,00	64.202.311,00
	Jumlah	**6.265.576.339,00**	**9.719.721.755,00**	**14.214.544.175,00**	**30.199.842.269,00**

		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.A.1.b.1.b	**Bagi Hasil Sumber Daya Alam**	**3.462.713.300,00**	**2.174.079.602,00**

Pada Tahun Anggaran 2021 penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam dianggarkan sebesar Rp3.228.436.226,00 dengan realisasi sebesar Rp3.462.713.300,00 atau 107,26%. Penerimaan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.288.633.698,00 atau 59,27% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp2.174.079.602,00. Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.13
Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
B	**Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam**				
a	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi	-	516.000,00	0,00	13.494.000,00
b	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	817.738.706,00	923.209.025,00	112,90	783.746.950,00
c	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi	488.108.098,00	681.801.615,00	139,68	392.434.650,00
d	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	477.389.422,00	499.567.510,00	104,65	196.127.713,00
e	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	1.445.200.000,00	1.357.619.150,00	93,94	788.276.289,00
JUMLAH		**3.228.436.226,00**	**3.462.713.300,00**	**107,26**	**2.174.079.602,00**

Penerimaan bruto Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam pada penyaluran transfer ke daerah dan dana Tahun 2021 dari data Simtrada Kementerian Keuangan sebesar Rp3.779.594.300,00, terdapat pemotongan pada Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan sebesar Rp316.881.000,00 sehingga penerimaan menjadi sebesar Rp3.462.713.300,00. Penerimaan kurang bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Pada Hasil Tahun 2021. Uraian penerimaan kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2019 – 2020 dan penerimaan Tahun 2021 pada RKUD sebagai berikut.

Tabel 5.1.14

Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2019 - 2020 diterima RKUD Tahun 2021

No	Uraian	Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam			Jumlah
		Kurang Bayar 2019	Kurang Bayar 2020	2021	
1	**Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi**	**-**	**516.000,00**	**-**	**516.000,00**
a	- DBH SDA Minyak Bumi 15%	-	500.200,00	-	500.200,00
b	- DBH SDA Minyak Bumi 0.5%	-	15.800,00	-	15.800,00
2	**Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara**	**-**	**75.536.025,00**	**847.673.000,00**	**923.209.025,00**

No	Uraian	Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam			Jumlah
		Kurang Bayar 2019	Kurang Bayar 2020	2021	
a	- DBH SDA Minerba - Iuran Tetap	-	15.041.525,00	57.322.000,00	72.363.525,00
b	- DBH SDA Minerba - Royalti	-	60.494.500,00	790.351.000,00	850.845.500,00
3	**Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi**	**10.512.833,00**	**236.271.782,00**	**435.017.000,00**	**681.801.615,00**
a	- DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap	10.512.833,00	38.996.705,00	50.557.000,00	100.066.538,00
b	- DBH SDA Panas Bumi - Iuran Produksi	-	197.275.077,00	384.460.000,00	581.735.077,00
4	**Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan**	**6.677.835,00**	**67.555.625,00**	**425.334.050,00**	**499.567.510,00**
a	- DBH SDA Kehutanan - PSDH	6.677.835,00	67.555.625,00	425.334.050,00	499.567.510,00
5	**Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan**	**229.300.150,00**		**1.128.319.000,00**	**1.357.619.150,00**
a	- DBH SDA Perikanan	229.300.150,00		1.128.319.000,00	1.357.619.150,00
	Jumlah	**246.490.818,00**	**379.879.432,00**	**2.836.343.050,00**	**3.462.713.300,00**

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.A.1.b.1.c. Dana Alokasi Umum	**472.416.143.000,00**	**478.355.774.000,00**

Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 sebelum perubahan ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp488.046.996.000,00. Dengan adanya penyesuaian belanja Negara dalam hal realisasi penerimaan Negara tidak sesuai dengan target dan/atau adanya perkiraan pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2021, maka dilakukanlah perubahan rincian anggaran DAU yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan Dampaknya, sehingga DAU Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 dianggarkan menjadi sebesar Rp472.416.143.000,00 teralisasi 100%.

Penerimaan DAU Tahun 2021 sebesar Rp478.355.774.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.939.631.000,00 atau -1,24% dibandingkan penerimaan DAU Tahun 2020 sebesar RpRp478.355.774.000,00.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
V.A.1.b.1.d Dana Alokasi Khusus	**207.765.406.760,00**	**237.995.156.977,00**

Pada Tahun Anggaran 2021 penerimaan Dana Alokasi Khusus direncanakan Rp216.650.680.000,00 dan terealisasi Rp207.765.406.760,00 atau sebesar 97,72%. Penerimaan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp30.229.750.217,00 atau -12,7% dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus Tahun 2020 sebesar Rp237.995.156.977,00.

Tabel 5.1.15
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	126.653.830.000,00	121.883.946.598,00	96,23%	148.941.713.152,00
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	89.996.850.000,00	85.881.460.162,00	95,43%	89.053.443.825,00
JUMLAH		**216.650.680.000,00**	**207.765.406.760,00**	95,90%	**237.995.156.977,00**

1) DAK Fisik Reguler

Penerimaan DAK Fisik Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.16
Realisasi DAK Fisik Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	28.517.453.000,00	27.591.845.085,00	96,75	29.480.649.704,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	10.193.060.000,00	9.772.440.883,00	95,87	10.987.097.819,00
3	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	9.635.455.000,00	8.861.255.581,00	91,97	15.965.533.278,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	37.982.706.000,00	36.349.073.516,00	95,70	45.733.309.968,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	1.145.942.000,00	1.130.952.000,00	98,69	862.284.300,00
6	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.129.685.000,00	1.127.612.970,00	99,82	1.332.592.944,00
7	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	500.000.000,00	482.906.600,00	96,58	-

No	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2.212.563.000,00	2.153.958.065,00	97,35	1.464.565.475,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	4.407.796.000,00	3.917.991.998,00	88,89	1.688.405.477,00
10	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	3.040.467.000,00	3.038.367.000,00	99,93	2.185.842.499,00
11	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	1.252.000.000,00	1.249.168.900,00	99,77	1.035.732.655,00
12	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	16.512.715.000,00	16.510.920.000,00	99,99	27.139.079.998,00
13	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	5.387.463.000,00	5.387.463.000,00	100,00	705.488.000,00
14	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	2.105.225.000,00	2.105.225.000,00	100,00	1.320.000.000,00
15	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	2.631.300.000,00	2.204.766.000,00	83,79	1.055.306.800,00
16	DAK Bidang Pasar				3.284.588.922,00
17	DAK Bidang Pendidikan SKB				690.312.560,00
18	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman				1.734.215.000,00
19	DAK Bidang Sosial				98.289.000,00
20	DAK Bidang Pariwisata				2.024.964.353,00
21	DAK Bidang Lingkungan Hidup				93.556.000,00
22	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Penguatan Intervensi Stunting				59.898.400,00
JUMLAH		**126.653.830.000,00**	**121.883.946.598,00**	**96,23**	**148.941.713.152,00**

Penerimaan DAK Fisik Tahun 2021 tidak terealisasi 100% disebabkan pencairan dana berdasarkan nilai kontrak kegiatan.

2) DAK Non Fisik

Penerimaan DAK Non Fisik Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.17
Realisasi DAK Non Fisik Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.609.800.000,00	4.530.000.000,00	98,27%	4.513.800.000,00
2	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	916.000.000,00	857.500.000,00	93,61%	582.624.800,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	60.448.236.000,00	60.448.236.000,00	100,00%	56.216.957.000,00
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	3.298.565.000,00	989.569.000,00	30,00%	5.707.230.000,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	381.000.000,00	381.000.000,00	100,00%	225.900.000,00
5	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	13.032.239.000,00	11.945.633.492,00	91,66%	2.556.288.540,00
6	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.022.096.000,00	993.632.009,00	97,22%	862.653.506,00
7	DAK Non Fisik-PK2UKM	993.054.000,00	926.745.650,00	93,32%	398.606.168,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	505.783.000,00	447.302.000,00	88,44%	0,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	912.713.000,00	697.578.000,00	76,43%	0,00
10	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	326.122.000,00	326.122.000,00	100,00%	0,00
11	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	1.075.195.000,00	915.517.650,00	85,15%	0,00
12	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.476.047.000,00	2.422.624.361,00	97,84%	0,00
13	BOK dan KB - Bantuan Operasional Kesehatan	0,00	0,00		13.100.166.008,00
14	BOK Tambahan	0,00	0,00		2.250.000.000,00
15	BOK Gelombang V	0,00	0,00		2.639.217.803,00
JUMLAH		**89.996.850.000,00**	**85.881.460.162,00**	**95,43%**	**89.053.443.825,00**

Penerimaan bruto DAK Non Fisik Tahun 2021 pada penyaluran transfer ke daerah dan dana Tahun 2021 dari Kementerian Keuangan sebesar Rp87.687.854.000,00 terdapat pemotongan sebesar Rp1.806.393.838,00 dengan penerimaan bersih sebesar Rp85.881.460.162,00. Pemotongan dilakukan berdasarkan sisa DAK yang dialokasikan Tahun 2020 tidak terealisasi dan dikompensasikan terhadap penyaluran DAK Non Fisik Tahun 2021. Pemotongan terdapat pada :

1. Dana Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp 1.519.898.858,00
2. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana sebesar Rp53.422.639,00
3. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar Rp28.463.991,00
4. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM sebesar Rp66.308.350,00
5. BOP PAUD sebesar Rp79.800.000,00
6. BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp58.500.000,00

V.A.1.b.2.Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Dana Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya pada Tahun 2021 terdiri dari.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.A.1.b.2.a. Dana Penyesuaian	**73.540.405.000,00**	**99.826.676.000,00**

Pada Tahun Anggaran 2021 penerimaan Dana Penyesuaian dianggarkan sebesar Rp73.540.405.000,00 terealisasi 100%. Penerimaan tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan Dana Penyesuaian Tahun 2020 sebesar Rp26.286.271.000,00 atau -26,33%. Penerimaan Dana Penyesuaian dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.18
Realisasi Dana Penyesuaian Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
A.	**Dana Penyesuaian**				
1	Dana Desa	56.540.066.000,00	56.540.066.000,00	100%	53.272.650.000,00
2	Dana Insentif Daerah	17.000.339.000,00	17.000.339.000,00	100%	46.554.026.000,00
JUMLAH		**73.540.405.000,00**	**73.540.405.000,00**	**100%**	**99.826.676.000,00**

Penerimaan Transfer Dana Desa pada Tahun 2021 sebesar Rp56.540.066.000,00 tidak melalui RKUD, tetapi ditransfer dari KPPN ke Rekening Kas Desa. Sumber pencatatan Dana Desa di Laporan Realisasi Anggaran adalah Data dari Simtrada Kementerian Keuangan dan Laporan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

V.A.1.b.3. Transfer Pemerintah Provinsi

Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2021 terdiri dari.

		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.A.1.b.3.a.	**Pendapatan Bagi Hasil Pajak**	**51.272.491.740,00**	**41.101.030.883,00**

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp57.806.662.554,00 dengan realisasi sebesar Rp51.272.491.740,00 atau sebesar 88,7%. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun 2020 sebesar Rp41.101.030.883,00 terjadi kenaikan penerimaan sebesar Rp10.171.460.857,00 atau sebesar 24,75%.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2021 sebesar Rp51.272.491.740,00 berasal dari penerimaan Tahun 2021 sebesar Rp42.304.772.471,00 dan penerimaan piutang kurang salur Tahun 2020 sebesar Rp8.967.719.269,00. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.19
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2021 dan 2020

No	Jenis Bagi Hasil	Anggaran	Penerimaan Tahun 2021		2021	%	2020
			2021	Piutang 2020			
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	15.164.158.731,00	8.789.829.947,00	4.704.676.479,00	13.494.506.426,00	88,99	6.759.064.111,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	5.327.001.960,00	4.142.608.449,00	774.255.747,00	4.916.864.196,00	92,30	4.031.199.287,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	23.673.374.590,00	16.951.249.331,00	3.468.666.824,00	20.419.916.155,00	86,26	16.556.271.413,00
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	127.505.591,00	98.758.158,00	20.120.219,00	118.878.377,00	93,23	99.225.065,00
5	Pajak Rokok	13.514.621.682,00	12.322.326.586,00	0,00	12.322.326.586,00	91,18	13.655.271.007,00
	Jumlah	**57.806.662.554,00**	**42.304.772.471,00**	**8.967.719.269,00**	**51.272.491.740,00**	**88,70**	**41.101.030.883,00**

		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.A.1.c.	**Lain-Lain Pendapatan yang Sah**	**57.434.253.512,00**	**34.887.153.721,00**

Rencana penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah berasal dari Pendapatan hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dan Pendapatan Lainnya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp57.439.180.000,00 dengan realisasi sebesar Rp57.434.253.512,00 atau 99,99%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp 34.887.153.721,00, Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp22.547.099.791,00 atau 64,63%.

Tahun 2021 Pemkab Dharmasraya kembali memperoleh hibah dari Kementerian Keuangan terkait dengan Program Kementerian PUPR berupa program hibah Air Minum Perdesaan (AMD) dan Hibah Sanitasi untuk pembangunan jamban dan tangki septik bagi penduduk yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Tahun 2021 sebesar Rp2.050.000.000,00 terealisasi penerimaannya 100%. Dana Hibah ini merupakan insentif atas biaya investasi yang telah dikeluarkan oleh Pemda untuk pembangunan tangki septik yang meliputi perencanaan, pembangunan dan pengawasan sampai terbangunnya tangki septik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaat. Pendapatan hibah tersebut baru diperoleh apabila Pemda telah menyelesaikan pembangunan tangki septik dimaksud.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-48/MK.7/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penetapan Pemberian Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2021, Kabupaten Dharmasraya memperoleh penerimaan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebesar Rp24.000.000.000,00 yang terdiri dari Rehabilitasi Jalan Ruas Pinang Makmur – Marga Makmur Kecamatan Timpeh sebesar Rp6.000.000.000,00, Rehabilitasi Jalan Ruas Simp Tabek – Panyubarangan sebesar Rp6.000.000.000,00 dan Rekonstruksi Tebing Pengamanan Sungai Batang Siat Kecamatan Koto Besar sebesar Rp12.000.000.000,00.

Pendapatan hibah dari pihak ketiga Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp498.313.512,00 dengan persentase 99,66%. Mengalami kenaikan penerimaan sebesar Rp81.989.791,00 atau 19,69% dibandingkan Tahun 2020. Pemberi hibah adalah perusahaan konstruksi yang melaksanakan pekerjaan di Kabupaten Dharmasraya, sedangkan perusahaan sektor perkebunan tidak memberikan kontribusi hibahnya pada tahun 2021 ini. Hal ini disebabkan tidak adanya penekanan kewajiban mengikat terhadap pemberian hibah oleh pihak ketiga.

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan berupa Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2021 dianggarkan Rp30.889.180.000,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp30.885.940.000,00 atau 99,99%. Penerima Hibah Dana BOS yang tercatat di Laporan Keuangan Pemda adalah Sekolah Negeri – tidak termasuk sekolah swasta – yang terdiri atas 147 Sekolah Dasar Negeri dan 33 Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Penerimaan Lain - Lain Pendapatan yang Sah dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.20
Penerimaan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
I	**Pendapatan Hibah**				
1	Pendapatan hibah dari Pemerintah	26.050.000.000,00	26.050.000.000,00	100,00	2.050.000.000,00
2	Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri	500.000.000,00	498.313.512,00	99,66	416.323.721,00
II	**Pendapatan Lainnya**				
1	Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	30.889.180.000,00	30.885.940.000,00	99,99	32.420.830.000,00
JUMLAH		**57.439.180.000,00**	**57.434.253.512,00**	99,99	**34.887.153.721,00**

Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 3** pada Laporan Keuangan ini.

V.A.2. BELANJA DAERAH

Pada Tahun Anggaran 2021 anggaran belanja dan transfer direncanakan Rp988.760.523.928,00 dengan realisasi Rp917.048.156.325,65 atau sebesar 92,75%.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021 dan 2020 terdiri dari :

Uraian	Tahun 2021		%	Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Operasi	670.900.234.079,00	638.706.924.536,16	95,20	659.029.846.282,68
Belanja Modal	204.564.572.964,00	166.252.751.216,49	81,27	194.525.452.178,27
Belanja Tak Terduga	200.000.000,00	164.439.330,00	82,22	24.924.272.319,00
Belanja Transfer	113.095.716.885,00	111.924.041.243,00	98,96	107.270.602.109,00
JUMLAH	**988.760.523.928,00**	**917.048.156.325,65**	**92,75**	**985.750.172.888,95**

Adapun penjelasan Anggaran dan Realisasi pos-pos Belanja Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.A.2.a. Belanja Operasi	**638.706.924.536,16**	**659.029.846.282,68**

Belanja Operasi TA 2021 direncanakan Rp 670.900.234.079,00 dengan realisasi sebesar Rp638.706.924.536,16 atau sebesar 95,20%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp659.029.846.282,68 terjadi penurunan sebesar Rp20.322.921.746,52 atau -3,08%.

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 terdiri dari.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.A.2.a.1. Belanja Pegawai	**380.289.821.307,81**	**418.043.145.643,00**

Belanja Pegawai Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp392.156.278.668,00 dengan realisasi Rp380.289.821.307,81 atau 96,97%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp418.043.145.643,00 terjadi penurunan sebesar Rp37.817.325.404,19 atau -9,05%. Karena adanya perubahan Struktur APBD pada Tahun 2021, tidak lagi menggunakan Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Pegawai pada Belanja Langsung (BL), seperti pada Tahun 2020. Belanja Honorarium Non PNS pada Tahun 2021 dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa, sedangkan Tahun 2020 berada di Belanja Pegawai pada Belanja Langsung (BL).

Belanja Pegawai Tahun 2021 dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 5.1.21

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
A	**Belanja Pegawai**	**392.156.278.668,00**	**380.289.821.307,81**	**96,97**	**418.522.131.059,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	244.914.425.202,00	241.475.377.325,00	98,60	227.579.532.808,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	46.914.381.915,00	45.783.786.049,00	97,59	59.461.125.280,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	68.985.381.686,00	63.034.119.555,00	91,37	120.147.276.682,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.706.420.042,00	12.273.970.318,00	96,60	10.070.725.008,00

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	521.064.544,00	478.985.416,00	91,92	478.985.416,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	511.600.000,00	490.716.000,00	95,92	523.065.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	17.603.005.279,00	16.752.866.644,81	95,17	261.420.865,00
JUMLAH		**392.156.278.668,00**	**380.289.821.307,81**	**96,97**	**418.522.131.059,00**

Adapun rincian belanja pegawai Tahun 2021 dan 2020 dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1.22

Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**	**244.914.425.202,00**	**241.475.377.325,00**	**98,60**	**227.579.532.808,00**
a	Belanja Gaji Pokok ASN	175.701.746.426,00	174.169.160.438,00	99,13	172.503.862.878,00
b	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	17.808.750.012,00	17.573.585.192,00	98,68	17.326.836.249,00
c	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.041.258.682,00	4.807.241.072,00	95,36	5.384.140.950,00
d	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	12.966.755.230,00	12.826.244.456,00	98,92	12.341.041.330,00
e	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.024.432.608,00	1.943.154.000,00	95,99	1.953.394.000,00
f	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.112.590.684,00	10.806.222.624,00	97,24	9.192.777.540,00
g	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	192.810.448,00	172.397.940,00	89,41	156.732.502,00
h	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.616.154,00	2.438.866,00	93,22	2.452.774,00
i	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	17.877.798.685,00	17.190.650.575,00	96,16	7.299.692.356,00
j	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	405.495.764,00	356.415.164,00	87,90	354.650.560,00
k	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.162.669.300,00	1.069.344.218,00	91,97	1.063.951.669,00
l	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	617.501.209,00	558.522.780,00	90,45	0,00
JUMLAH		**244.914.425.202,00**	**241.475.377.325,00**	**98,60**	**227.579.532.808,00**

Tabel 5.1.23

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
2	**Belanja Tambahan Penghasilan**	**115.899.763.601,00**	**108.817.905.604,00**	**93,89**	**179.869.822.827,00**
1)	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**	**46.914.381.915,00**	**45.783.786.049,00**	**97,59**	**59.461.125.280,00**
a	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	46.914.381.915,00	45.783.786.049,00	97,59	59.461.125.280,00
2)	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**68.985.381.686,00**	**63.034.119.555,00**	**91,37**	**120.147.276.682,00**
a	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	832.518.761,00	609.187.066,00	73,17	894.665.893,00
b	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	101.167.117,00	38.534.349,00	38,09	182.501.809,00
c	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	59.368.707.180,00	55.703.865.340,00	93,83	71.207.271.280,00
d	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	3.436.898.628,00	2.304.382.800,00	67,05	3.621.241.700,00
e	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	600.000.000,00	552.750.000,00	92,13	453.750.000,00
f	Belanja Honorarium PNS	4.646.090.000,00	3.825.400.000,00	82,34	6.981.205.000,00
g	Belanja Honorarium Non PNS	0,00	0,00	-	35.735.690.000,00
h	Uang Lembur	0,00	0,00	-	1.070.951.000,00
3)	**Belanja Pegawai BLUD**	**17.603.005.279,00**	**16.752.866.644,81**	**95,17**	**261.420.865,00**
JUMLAH		**133.502.768.880,00**	**125.570.772.248,81**	**94,06**	**179.869.822.827,00**

Tabel 5.1.24

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dan KDH/WKDH Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
3	**Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dan KDH/WKDH**	**13.739.084.586,00**	**13.243.671.734,00**	**96,39**	**11.072.775.424,00**

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1)	**Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD**	**12.706.420.042,00**	**12.273.970.318,00**	**96,60**	**10.070.725.008,00**
a	Belanja Uang Representasi DPRD	683.786.012,00	670.110.000,00	98,00	575.820.000,00
b	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	71.569.008,00	69.182.400,00	96,67	59.068.800,00
c	Belanja Tunjangan Beras DPRD	74.592.000,00	72.057.900,00	96,60	79.082.640,00
d	Belanja Uang Paket DPRD	58.781.004,00	57.414.000,00	97,67	57.582.000,00
e	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	988.690.010,00	971.659.500,00	98,28	834.939.000,00
f	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	99.034.008,00	97.394.325,00	98,34	97.013.700,00
g	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	41.118.000,00	29.551.725,00	71,87	35.078.400,00
h	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.292.000.000,00	2.261.700.000,00	98,68	2.268.000.000,00
i	Belanja Tunjangan Reses DPRD	600.000.000,00	548.100.000,00	91,35	560.700.000,00
j	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	350.000,00	240.468,00	68,71	240.468,00
k	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.486.500.000,00	3.281.200.000,00	94,11	0,00
l	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.260.000.000,00	4.212.000.000,00	98,87	3.726.000.000,00
m	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	50.000.000,00	3.360.000,00	6,72	0,00
n	Tunjangan Perumahan	0,00	0,00	-	1.777.200.000,00
2)	**Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**	**521.064.544,00**	**478.985.416,00**	**91,92**	**478.985.416,00**
3)	**Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**	**511.600.000,00**	**490.716.000,00**	**95,92**	**523.065.000,00**
a	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	111.600.000,00	90.720.000,00	81,29	110.880.000,00
b	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	399.996.000,00	100,00	412.185.000,00
JUMLAH		**13.739.084.586,00**	**13.243.671.734,00**	**96,39**	**11.072.775.424,00**

		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.A.2.a.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**246.612.992.141,35**	**185.947.730.070,85**

Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja pembelian barang maupun jasa yang digunakan untuk memperlancar operasional seluruh kegiatan yang akhirnya dapat mempelancar tugas-tugas pemerintahan.

Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp266.795.934.531,00 terealisasi sebesar Rp246.612.992.141,35 atau 92,44%. Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp60.665.262.070,50 atau 32,62%. Meningkatnya Realisasi Belanja Barang Tahun 2021 disebabkan karena tidak adanya konversi Barang dan Jasa ke Hibah seperti pada Tahun 2020.

Terdapat perbedaan pelaporan terhadap Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020, karena Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 adanya konversi belanja barang jasa menjadi hibah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 21 menyatakan bahwa realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Tahun 2021 struktur APBD telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Barang dan Jasa dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.1.25
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian 2021	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Barang Pakai Habis	58.540.000.710,00	53.777.751.874,83	91,86	8.869.774.977,00
2	Belanja Jasa Kantor	72.591.787.754,00	62.299.085.139,00	85,82	26.147.164.617,00
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.065.916.200,00	10.657.347.927,00	96,31	8.627.202.865,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.314.888.000,00	1.249.063.000,00	94,99	1.368.117.000,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.173.773.000,00	1.123.640.000,00	95,73	552.871.000,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	28.000.000,00	25.200.000,00	90,00	
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.893.591.400,00	2.421.756.520,00	83,69	492.205.000,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	161.000.000,00	135.930.000,00	84,43	0,00

No	Uraian 2021	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
9	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.272.547.202,00	3.148.394.482,00	96,21	661.536.162,00
10	Belanja Pemeliharaan Tanah	202.181.300,00	200.243.000,00	99,04	0,00
11	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.792.335.200,00	5.380.525.167,00	92,89	0,00
12	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	835.678.800,00	831.851.102,00	99,54	0,00
13	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.004.350.000,00	2.993.930.000,00	99,65	0,00
14	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	47.559.376.300,00	45.812.331.501,00	96,33	34.639.538.502,00
15	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	407.500.000,00	407.500.000,00	100,00	0,00
16	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	343.000.000,00	342.500.000,00	99,85	0,00
17	Belanja Barang dan Jasa BOS	25.557.906.597,00	25.409.016.269,00	99,42	24.301.756.042,00
18	Belanja Barang dan Jasa BLUD	32.052.102.068,00	30.396.926.159,52	94,84	52.555.959.059,85
19	Belanja Barang dan Jasa BOS Daerah	0,00	0,00	0,00	782.000.000,00
20	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	8.937.832.304,00
21	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	4.351.360.808,00
22	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	3.673.616.891,00
23	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	127.350.000,00
24	Belanja Sewa Alat Berat	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00
25	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	7.524.968.640,00
26	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	0,00	466.195.000,00
27	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	60.348.500,00
28	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	0,00	0,00	166.035.500,00
29	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	1.636.947.203,00
Jumlah		**266.795.934.531,00**	**246.612.992.141,35**	**92,44**	**185.947.730.070,85**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa masing-masing SKPD Tahun 2021 dengan realisasi sebesar Rp246.612.992.141,35 dapat dilihat pada **Lampiran 4a** Laporan Keuangan ini.

a. Belanja Bahan Pakai Habis sebesar Rp53.777.751.874,83 terdiri dari.

Tabel 5.1.26
Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	200.000.000,00	184.077.000,00	92,04	0,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	473.426.000,00	427.702.725,00	-	0,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.349.517.737,00	3.906.922.408,00	89,82	3.065.023.001,00
4	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	299.997.000,00	296.666.000,00	98,89	0,00
5	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	24.862.000,00	24.082.000,00	96,86	0,00
6	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	300.710.100,00	299.930.100,00	99,74	0,00
7	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.132.095.000,00	673.261.750,00	59,47	0,00
8	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	166.950.000,00	166.004.500,00	99,43	0,00
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	2.202.255.110,00	1.432.141.060,00	65,03	0,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	228.130.050,00	224.588.273,00	0,00	0,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	194.973.500,00	193.738.500,00	99,37	0,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	2.100.000,00	1.930.500,00	0,00	0,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.064.986.975,00	2.964.737.969,00	96,73	2.600.648.068,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	569.257.500,00	543.346.001,00	95,45	0,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.189.750.700,00	1.159.038.000,00	97,42	0,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	204.721.000,00	202.963.000,00	99,14	261.733.000,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	-	0,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	991.562.000,00	947.334.108,00	95,54	0,00

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	550.517.815,00	548.177.301,00	99,57	599.758.942,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	428.732.026,00	425.427.607,00	99,23	418.273.404,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	130.690.500,00	129.493.200,00	99,08	0,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	44.800.000,00	44.800.000,00	100,00	0,00
24	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.627.601.269,00	4.488.889.574,00	79,77	0,00
25	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	-	0,00
26	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	26.568.235.428,00	26.232.219.048,83	98,74	0,00
27	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.258.443.000,00	3.901.098.250,00	91,61	0,00
28	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.888.088.000,00	3.414.253.000,00	87,81	0,00
29	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	46.216.000,00	43.913.000,00	95,02	0,00
30	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	536.342.000,00	55.615.000,00	10,37	0,00
31	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	105.040.000,00	104.502.000,00	99,49	0,00
32	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	57.500.000,00	57.500.000,00	100,00	0,00
33	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	676.500.000,00	674.400.000,00	99,69	0,00
34	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	23.000.000,00	6.000.000,00	26,09	0,00
35	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	0,00	-	0,00
36	Belanja Pengisian Tabung Gas,Galon Air	0,00	0,00	-	41.109.000,00
37	Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai	0,00	0,00	-	1.575.271.062,00
38	Belanja Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	-	166.070.500,00
39	Belanja Peralatan Persampahan*)	0,00	0,00	-	6.988.000,00
40	Belanja Sarana dan Prasarana Perhubungan	0,00	0,00	-	134.900.000,00
JUMLAH		**58.540.000.710,00**	**53.777.751.874,83**	**91,86**	**8.869.774.977,00**

Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dengan realisasi sebesar Rp26.232.219.048,83 dapat dilihat pada **Lampiran 4b** Laporan Keuangan ini

b. Belanja Jasa Kantor sebesar Rp62.299.085.139,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.27
Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	949.350.000,00	513.350.000,00	54,07	2.627.240.661,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.682.840.000,00	1.631.960.000,00	96,98	0,00
3	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	125.800.000,00	125.800.000,00	100,00	0,00
4	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	81.500.000,00	81.500.000,00	100,00	0,00
5	Honorarium Rohaniwan	1.121.550.000,00	1.120.100.000,00	99,87	0,00
7	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	21.800.000,00	15.800.000,00	72,48	0,00
8	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	662.600.000,00	635.400.000,00	95,89	0,00
9	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	4.574.650.000,00	4.352.150.000,00	95,14	0,00
10	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	5.819.118.454,00	4.914.101.403,00	84,45	528.025.000,00
11	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	30.924.000,00	30.924.000,00	100,00	27.648.000,00
12	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.712.000.000,00	5.570.840.000,00	97,53	0,00
14	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	96.800.000,00	96.800.000,00	100,00	0,00
15	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	784.650.000,00	783.400.000,00	99,84	0,00
16	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	1.500.000,00	1.200.000,00	80,00	0,00
17	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	26.000.000,00	25.975.000,00	99,90	767.085.000,00
18	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.569.750.000,00	12.172.530.000,00	96,84	0,00
19	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	0,00	0,00	-	0,00
20	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	972.800.000,00	885.273.000,00	91,00	0,00
21	Belanja Jasa Tenaga Ahli	331.440.000,00	321.364.000,00	96,96	0,00
22	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.988.200.000,00	3.598.192.777,00	90,22	0,00

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
23	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.754.530.000,00	2.640.470.000,00	95,86	0,00
24	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.106.940.000,00	2.056.970.000,00	97,63	0,00
25	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	16.500.000,00	13.750.000,00	83,33	0,00
26	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	24.240.000,00	23.260.000,00	95,96	0,00
27	Belanja Jasa Tata Rias	200.500.000,00	180.736.825,00	90,14	0,00
28	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	110.000.000,00	110.000.000,00	100,00	865.400.000,00
29	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	0,00	-	0,00
30	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	133.280.000,00	128.180.000,00	96,17	0,00
31	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00	0,00
32	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	16.500.000,00	13.750.000,00	83,33	0,00
33	Belanja Jasa Kalibrasi	214.560.000,00	212.746.000,00	99,15	0,00
34	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	23.868.000,00	18.512.280,00	77,56	0,00
35	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	195.000.000,00	58.435.060,00	29,97	0,00
36	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.331.504.000,00	1.321.382.000,00	99,24	0,00
37	Belanja Tagihan Telepon	517.963.750,00	469.089.870,00	90,56	655.872.198,00
38	Belanja Tagihan Air	54.909.266,00	40.766.600,00	74,24	35.760.800,00
39	Belanja Tagihan Listrik	3.231.938.384,00	2.968.290.734,00	91,84	9.893.656.968,00
40	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	240.550.000,00	219.870.000,00	91,40	224.415.000,00
41	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.032.516.000,00	923.075.316,00	89,40	1.217.616.511,00
42	Belanja Paket/Pengiriman	5.081.900,00	1.832.650,00	36,06	6.680.040,00
43	Belanja Penambahan Daya	6.350.000,00	6.350.000,00	100,00	0,00
44	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	413.551.000,00	275.001.550,00	66,50	0,00
45	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	5.130.500.000,00	4.966.194.346,00	96,80	0,00
46	Belanja Pengolahan Air Limbah	0,00	0,00	-	0,00

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
47	Belanja Lembur	785.848.000,00	781.083.000,00	99,39	0,00
48	Belanja Medical Check Up	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
49	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	14.364.385.000,00	7.865.178.728,00	54,75	1.344.344.250,00
50	Belanja Sertifikasi	0,00	0,00	0,00	13.172.240,00
51	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	0,00	0,00	0,00	18.900.000,00
52	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00	2.168.945.400,00
53	Belanja Jasa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	294.900.000,00
54	Belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor dan rumah tangga	0,00	0,00	0,00	269.822.500,00
56	Belanja Jasa Upah Kerja	0,00	0,00	0,00	543.710.000,00
57	Belanja jasa penyelenggaraan mayat dan orang terlantar	0,00	0,00	0,00	17.700.000,00
58	Belanja jasa pembuatan dan pemeliharaan Website/Aplikasi atau Peta	0,00	0,00	0,00	163.855.000,00
59	Belanja Kontribusi	0,00	0,00	0,00	70.061.000,00
60	Belanja Jasa Konsultan	0,00	0,00	0,00	98.400.000,00
61	Belanja Uang Saku	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
62	Belanja Insentif	0,00	0,00	0,00	4.289.454.049,00
JUMLAH		**72.591.787.754,00**	**62.299.085.139,00**	85,82	**26.147.164.617,00**

c. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp10.657.347.927,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.28
Realisasi Belanja Premi Asuransi Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	404.000.000,00	344.922.240,00	85,38	0,00
2	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PB	930.625.000,00	638.812.075,00	68,64	0,00
3	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	8.969.083.200,00	8.969.083.200,00	100,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
4	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	404.208.000,00	355.546.400,00	87,96	0,00
5	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	358.000.000,00	348.984.012,00	97,48	352.530.665,00
6	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	0,00	0,00	-	8.274.672.200,00
JUMLAH		**11.065.916.200,00**	10.657.347.927,00	96,31	**8.627.202.865,00**

d. Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Tahun Rp1.249.06.000,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.29
Realisasi Belanja Sewa Peralatan Mesin Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Sewa Alat Pengangkat	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	144.000.000,00	143.500.000,00	99,65	0,00
3	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	27.750.000,00	27.750.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	426.238.000,00	374.788.000,00	87,93	120.000.000,00
5	Belanja Sewa Mebel	578.000.000,00	567.650.000,00	98,21	85.950.000,00
6	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	70.500.000,00	70.275.000,00	99,68	0,00
7	Belanja Sewa Komputer Jaringan	60.000.000,00	56.700.000,00	94,50	0,00
8	Belanja Sewa Tenda	0,00	0,00	-	981.067.000,00
9	Belanja Sewa Sound system dan perlengkapannya	0,00	0,00	-	181.100.000,00
JUMLAH		**1.314.888.000,00**	**1.249.063.000,00**	**94,99**	**1.368.117.000,00**

e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp 1.123.640.000,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.30
Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.030.973.000,00	1.009.050.000,00	-	316.225.000,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	30.000.000,00	29.840.000,00	99,47	210.186.000,00
3	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	112.800.000,00	84.750.000,00	75,13	0,00
4	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	-	26.460.000,00
JUMLAH		**1.173.773.000,00**	**1.123.640.000,00**	95,73	**552.871.000,00**

f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 25.200.000,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.31
RealisasiBelanja Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	28.000.000,00	25.200.000,00	-	0,00
JUMLAH		**28.000.000,00**	**25.200.000,00**	90,00	**-**

g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp2.421.756.520,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.32
Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	14.730.000,00	14.510.000,00	98,51	0,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	355.000.000,00	272.582.200,00	76,78	450.265.000,00

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	85.864.000,00	85.650.000,00	99,75	0,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.474.623.000,00	1.172.000.000,00	79,48	0,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	294.820.000,00	288.813.000,00	97,96	41.940.000,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	613.398.000,00	571.433.800,00	93,16	0,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	55.156.400,00	16.767.520,00	30,40	0,00
JUMLAH		**2.893.591.400,00**	**2.421.756.520,00**	**83,69**	**492.205.000,00**

h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp135.930.000,00 terdiri dari

Tabel 5.1.33
Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	0,00	0,00	-	0,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	61.000.000,00	61.000.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000,00	74.930.000,00	74,93	0,00
JUMLAH		**161.000.000,00**	**135.930.000,00**	84,43	**0,00**

i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp 3.148.394.482,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.34
Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	752.208.800,00	743.208.300,00	98,80	66.716.710,00
2	Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	24.800.000,00
3	Belanja Bimbingan Teknis	2.520.338.402,00	2.405.186.182,00	95,43	563.619.452,00
4	Belanja Kontribusi*)	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00
JUMLAH		**3.272.547.202,00**	**3.148.394.482,00**	**96,21**	**661.536.162,00**

j. Belanja Pemeliharaan Tanah sebesar Rp 200.243.000,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.35
Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Bangunan Bersejarah	7.181.300,00	6.900.000,00	96,08	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Taman	195.000.000,00	193.343.000,00	99,15	0,00
JUMLAH		**202.181.300,00**	**200.243.000,00**	**99,04**	**-**

k. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 5.380.525.167,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.36
Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	997.500.000,00	776.262.040,00	77,82	0,00

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	108.900.000,00	108.800.000,00	99,91	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.718.387.400,00	1.663.836.913,00	96,83	0,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	986.720.000,00	958.444.164,00	97,13	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	423.600.000,00	398.409.350,00	94,05	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	10.000.000,00	9.915.000,00	99,15	0,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	240.000.000,00	181.465.980,00	75,61	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	119.500.000,00	118.193.000,00	98,91	0,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	60.030.000,00	57.005.000,00	94,96	0,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	19.712.800,00	19.706.620,00	99,97	0,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	46.500.000,00	45.140.000,00	97,08	0,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	0,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	300.700.000,00	289.616.100,00	96,31	0,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
15	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	14.875.000,00	11.945.000,00	80,30	0,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	365.000.000,00	364.950.000,00	99,99	0,00
18	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	5.000.000,00	4.992.000,00	99,84	0,00
19	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	12.000.000,00	11.775.000,00	98,13	0,00
20	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	265.910.000,00	262.069.000,00	98,56	0,00
21	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	0,00
22	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00
JUMLAH		**5.792.335.200,00**	**5.380.525.167,00**	**92,89**	**-**

l. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp831.851.102,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.37
Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	755.678.800,00	752.014.102,00	99,52	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	80.000.000,00	79.837.000,00	99,80	0,00
JUMLAH		**835.678.800,00**	**831.851.102,00**	**99,54**	**-**

m. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp2.993.930.000,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.38
Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan Penyeberangan	1.325.000.000,00	1.324.680.000,00	99,98	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	15.000.000,00	4.950.000,00	33,00	0,00
4	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	164.350.000,00	164.300.000,00	99,97	0,00
JUMLAH		**3.004.350.000,00**	**2.993.930.000,00**	**99,65**	**-**

n. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp45.812.331.501,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.39
Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.513.066.300,00	32.664.925.303,00	84,07	25.740.803.052,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.666.910.000,00	12.787.825.250,00	84,07	8.898.735.450,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	222.000.000,00	220.420.000,00	84,07	0,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	157.400.000,00	139.160.948,00	84,07	0,00
JUMLAH		**47.559.376.300,00**	**45.812.331.501,00**	**94,97**	**34.639.538.502,00**

o. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp407.500.000,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.40
Realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/MasyarakatTahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	385.000.000,00	385.000.000,00	100,00	0,00
JUMLAH		**407.500.000,00**	**407.500.000,00**	**100,00**	**0,00**

p. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp342.500.000,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.41
Realisasi Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/MasyarakatTahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	343.000.000,00	342.500.000,00	94,97	0,00
JUMLAH		**343.000.000,00**	**342.500.000,00**	**94,97**	**0,00**

q. Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp25.409.016.269,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.42
Realisasi Belanja Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS pada 147 Satuan Pendidikan Negeri SDN	17.693.634.541,00	17.585.983.569,00	99,39	17.048.427.093,00

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
2	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS pada 33 Satuan Pendidikan Negeri SMPN	7.864.272.056,00	7.823.032.700,00	99,48	7.253.328.949,00
JUMLAH		**25.557.906.597,00**	**25.409.016.269,00**	**99,42**	**24.301.756.042,00**

Sekolah Penerima Dana BOS Reguler Tahun 2021 untuk Kabupaten Dharmasraya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 /P/2021 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Anggaran 2020/2021.

Kabupaten Dharmasraya kembali menerima Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 210/P/2021 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Tahun Anggaran 2021. Terdapat enam Sekolah Dasar Negeri dan satu Sekolah Menegah Pertama Negeri menerima Afirmasi masing-masing sebesar Rp40.000.000,00 dan Kinerja diterima oleh satu Sekolah Dasar Negeri dan satu Sekolah Menegah Pertama Negeri, masing-masing menerima sebesar Rp60.000.000,00.

Anggaran Pendapatan dan Belanja BOS Tahun 2021 dibandingkan dengan realisasinya dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.43
Realisasi Belanja Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Saldo Awal	641.262.935,00	639.921.020,00	99,79	2.695.211.372,00
2	Pendapatan BOS	30.889.180.000,00	30.885.940.000,00	99,99	32.420.830.000,00
	Pendapatan BOS Reguler	30.489.180.000,00	30.485.940.000,00	99,99	30.860.830.000,00
	Pendapatan BOS Afirmasi	280.000.000,00	280.000.000,00	100,00	780.000.000,00
	Pendapatan BOS Kinerja	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	780.000.000,00
3	Pendapatan Jasa Giro	0	0		0
4	**Total Penerimaan**	31.530.442.935,00	31.525.861.020,00	99,99	35.116.041.372,00
5	Belanja				
6	Belanja Barang dan Jasa BOS Reguler	25.557.906.597,00	25.409.016.269,00	99,42	24.301.756.042,00
7	Belanja Modal Dana BOS	5.972.536.338,00	5.962.359.888,00	99,83	10.174.364.310,00
	Belanja Modal BOS Reguler	5.572.536.338,00	5.562.359.888,00	99,82	6.783.266.390,00
	Belanja Modal BOS Afirmasi	280.000.000,00	280.000.000,00	100,00	2.352.184.980,00

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
	Belanja Modal BOS Kinerja	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	1.038.912.940,00
8	**Total Belanja**	31.530.442.935,00	31.371.376.157,00	99,50	34.476.120.352,00
9	**Surplus / Defisit**	**0**	**154.484.863,00**		**639.921.020,00**

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 realisasi pendapatan BOS sebesar Rp31.525.861.020,00 berasal dari saldo awal BOS sebesar Rp639.921.020,00, penerimaan BOS Tahun 2021 atas satuan pendidikan sebanyak 147 SD Negeri dan 33 SMP Negeri sebesar Rp30.885.940.000,00. Belanja BOS Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp31.371.376.157,00 terdiri dari belanja barang dan jasa BOS sebesar Rp25.409.016.269,00 dan belanja modal BOS sebesar Rp5.962.359.888,00. Saldo akhir dana BOS Tahun 2021 sebesar Rp154.484.863,00 terdiri atas kas tunai sebesar Rp113.194.615,00 dan kas dibank sebesar Rp41.790.715,00.

Realisasi Pendapatan dan Belanja BOS Tahun 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 3** pada Laporan Keuangan ini.

r. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp30.396.926.159,52 terdiri dari.

Tabel 5.1.44
Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
I	BLUD RSUD	**25.644.347.414,00**	**24.722.656.226,00**	96,41	**43.600.327.783,00**
	BLUD RSUD Sungai Dareh	25.195.707.414,00	24.355.495.573,00	96,67	43.384.802.194,00
	RSUD Sungai Rumbai	448.640.000,00	367.160.653,00	81,84	**215.525.589,00**
II	BLUD Puskesmas	**6.407.754.754,00**	**5.674.269.933,52**	88,55	**8.955.631.276,85**
1	BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	399.741.591,00	361.366.960,00	90,40	823.043.639,00
2	BLUD Puskesmas Sungai Limau	393.755.140,00	293.270.328,00	74,48	444.846.924,30
3	BLUD Puskesmas Sitiung II	696.549.950,00	696.259.750,00	99,96	689.279.500,00
4	BLUD Puskesmas Padang Laweh	289.300.578,00	216.054.838,00	74,68	356.435.422,00
5	BLUD Puskesmas Sungai Dareh	596.144.561,00	576.330.145,00	96,68	1.170.088.078,00
6	BLUD Puskesmas Silago	349.427.154,00	349.355.670,00	99,98	623.191.858,00
7	BLUD Puskesmas Gunung Medan	567.509.426,00	481.113.761,00	84,78	508.467.079,18
8	BLUD Puskesmas Sitiung I	775.535.652,00	536.623.317,00	69,19	922.264.862,00
9	BLUD Puskesmas Koto Baru	900.025.950,00	787.476.068,00	87,49	1.309.583.744,00
10	BLUD Puskesmas Timpeh	383.429.216,00	379.352.851,00	98,94	525.810.794,00

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
11	BLUD Puskesmas Sialang	213.674.665,00	207.595.710,00	97,16	360.131.650,00
12	BLUD Puskesmas Tiumang	282.129.858,00	230.651.543,00	81,75	360.190.830,00
13	BLUD Puskesmas Koto Besar	468.138.949,00	466.476.692,51	99,64	694.084.966,93
14	Puskesmas Beringin Sakti	92.392.064,00	92.342.300,01	99,95	168.211.929,44
JUMLAH		**32.052.102.168,00**	**30.396.926.159,52**	**98,80**	**52.555.959.059,85**

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp32.052.102.068,00 terealisasi sebesar Rp30.396.926.159,52 atau 94,84%. Realisasi Pendapatan dan Belanja BLUD Tahun 2021 dapat dilihat di **Lampiran 1** pada Laporan Keuangan ini.

Berikut ini uraian realisasi belanja barang dan jasa pada tahun 2020 yang klasifikasinya tidak sama dengan klasifikasi belanja pada tahun 2021 disebabkan mengalami perubahan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

s. Belanja Barang dan Jasa tahun 2020 sebesar Rp27.731.604.846,00 tidak terdapat nomenklatur rekeningnya pada tahun 2021 terdiri dari.

Tabel 5.1.45
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Barang dan Jasa BOS Daerah	0	0	0	782.000.000,00
2	Belanja Bahan/Material	0	0	0	8.937.832.304,00
3	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0	0	0	4.351.360.808,00
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	3.673.616.891,00
5	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	127.350.000,00
6	Belanja Sewa Alat Berat	0	0	0	4.950.000,00
7	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	7.524.968.640,00
8	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0	0	0	466.195.000,00
9	Belanja Pakaian Kerja	0	0	0	60.348.500,00
10	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	166.035.500,00
11	Belanja Pemeliharaan	0	0	0	1.636.947.203,00
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.731.604.846,00**

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.A.2.a.3. Hibah	**11.804.111.087,00**	**54.874.970.568,83**

Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp11.948.020.880,00 dengan realisasi Rp11.804.111.087,00 atau 98,80%. Belanja Hibah Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp43.070.859.481,83 atau -78,49% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp54.874.970.568,83.

Terdapat perbedaan pelaporan terhadap belanja Hibah Tahun 2021 dan 2020, karena Belanja Hibah Tahun 2020 adanya konversi belanja barang jasa menjadi hibah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 21 menyatakan bahwa realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Tahun 2021 struktur APBDnya telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 5.1.46
Realisasi Belanja Hibah Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	11.149.630.000,00	11.042.548.467,00	99,04	38.795.439.174,00
	a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.200.800.000,00	6.134.550.000,00	98,93	30.955.000.000,00
	Belanja Hibah Uang	675.000.000,00	675.000.000,00	100,00	30.955.000.000,00
	Belanja Hibah Barang	5.525.800.000,00	5.459.550.000,00	98,80	0,00
	b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	350.000.000,00	349.795.417,00	99,94	5.840.439.174,00
	Belanja Hibah Uang	350.000.000,00	349.795.417,00	99,94	5.840.439.174,00
	c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.598.830.000,00	4.558.203.050,00	99,12	2.000.000.000,00
	Belanja Hibah Uang	1.840.000.000,00	1.819.732.000,00	98,90	2.000.000.000,00

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
	Belanja Hibah Barang	2.758.830.000,00	2.738.471.050,00	99,26	0,00
2	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	798.390.880,00	761.562.620,00	95,39	0,00
	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	798.390.880,00	761.562.620,00	95,39	0,00
3	Konversi Belanja Barang dan Jasa menjadi Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	15.558.052.170,58
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	14.495.282.737,00
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	1.062.769.433,58
4	Konversi Belanja Modal menjadi Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	521.479.224,25
JUMLAH		**11.948.020.880,00**	**11.804.111.087,00**	**98,80**	**54.874.970.568,83**

Rincian Belanja Hibah Tahun 2021 selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 5** pada Laporan Keuangan ini.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.A.2.a.4. Bantuan Sosial	**0,00**	**164.000.000,00**

Tidak ada penganggaran terkait Belanja Bantuan Bantuan Sosial Tahun 2021

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.A.2.b. Belanja Modal	**166.252.751.216,49**	**194.525.452.178,27**

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun. Belanja Modal Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp204.564.572.964,00 dengan realisasi sebesar Rp166.252.751.216,49 atau 81,27%.

Realisasi Belanja Modal terinci pada akun-akun aset berikut ini.

Tabel 5.1.47
Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dan Tahun 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.037.876.152,00	51.541.549.729,92	93,65	64.751.373.002,50
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.190.939.423,00	85.986.356.136,57	90,33	94.052.704.714,97
4	Belanja Modal Jalan Irigasi. dan Jaringan	47.643.071.051,00	22.155.213.262,00	46,50	34.663.993.010,80
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.692.686.338,00	6.569.632.088,00	98,16	1.057.381.450,00
JUMLAH		**204.564.572.964,00**	**166.252.751.216,49**	**81,27**	**194.525.452.178,27**

		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.A.2.b.1	**Belanja Tanah**	**0,00**	**0,00**

Tidak terdapat Belanja Modal Tanah pada Tahun 2021 dan Tahun 2020.

		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.A.2.b.2	**Belanja Peralatan dan Mesin**	**51.541.549.729,92**	**64.751.373.002,50**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp55.037.876.152,00 dengan realisasi sebesar Rp51.541.549.729,92 atau 93,65%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2020 terjadi penurunan sebesar Rp13.209.823.272,58 atau -20,4%.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat diuraikan berikut ini.

Tabel 5.1.48
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Modal Alat Besar	519.069.916,00	448.696.500,00	86,44	-
2	Belanja Modal Alat Angkutan	4.743.710.000,00	4.718.363.000,00	99,47	5.558.801.000,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	15.600.125,00	9.761.900,00	62,58	560.310.000,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	5.980.000,00	5.750.000,00	96,15	101.040.000,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.595.670.495,00	5.103.236.709,00	91,20	2.749.688.250,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	562.512.500,00	528.387.450,00	93,93	235.250.000,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	29.555.784.420,00	26.970.791.174,92	91,25	22.514.268.841,50
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	11.702.694.950,00	11.549.997.972,00	98,70	27.802.500,00
9	Belanja Modal Komputer	2.239.103.498,00	2.119.778.524,00	94,67	1.494.272.800,00
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	15.000.000,00	7.665.900,00	51,11	-
11	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	35.000.000,00	34.900.000,00	99,71	-
12	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	4.350.600,00	3.097.600,00	71,20	2.750.000,00
13	Belanja Modal Rambu-Rambu	43.399.648,00	41.123.000,00	94,75	-
14	Belanja Modal Alat Peraga/Praktek Sekolah	-	0,00	0,00	19.629.218.552,25
15	Belanja Modal BLUD	-	0,00	0,00	2.225.085.973,00
16	Belanja Modal BOS	-	0,00	0,00	9.652.885.085,75
JUMLAH		**55.037.876.152,00**	**51.541.549.729,92**	**93,65**	**64.751.373.002,50**

		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.A.2.b.3	**Belanja Gedung dan Bangunan**	**85.986.356.136,57**	**94.052.704.714,97**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp95.190.939.423,00 dengan realisasi sebesar Rp85.986.356.136,57 atau 90,33%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2020 terjadi penurunan sebesar Rp8.066.348.578,40 atau -8,58%.

Tabel 5.1.49
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	95.185.939.423,00	85.981.423.636,57	90,33	94.052.704.714,97
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/ Pasti	5.000.000,00	4.932.500,00	98,65	-
JUMLAH		**95.190.939.423,00**	**85.986.356.136,57**	**90,33**	**94.052.704.714,97**

		Tahun 2021 (Rp)	**Tahun 2020 (Rp)**
V.A.2.b.4	**Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**22.155.213.262,00**	**34.663.993.010,80**

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp47.643.071.051,00 dengan realisasi sebesar Rp22.155.213.262,00 atau 46,5%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2020 terjadi penurunan sebesar Rp12.508.779.748,80 atau -36,09%.

Tabel 5.1.50
Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	42.329.355.051,00	18.031.012.662,00	42,60	32.170.966.883,83
2	Belanja Modal Bangunan Air	3.389.884.000,00	2.713.857.700,00	80,06	1.258.398.922,32
3	Belanja Modal Instalasi	1.574.332.000,00	1.062.842.900,00	67,51	764.740.404,65
4	Belanja Modal Jaringan	349.500.000,00	347.500.000,00	99,43	469.886.800,00
JUMLAH		**47.643.071.051,00**	**22.155.213.262,00**	**46,50**	**34.663.993.010,80**

Rendahnya realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2021 disebabkan karena adanya belanja rehabilitasi jalan yang berasal dari Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2021 belum terealisasi belanjanya karena dana tersebut baru masuk pada tanggal 22 November 2021 sebesar Rp24.000.000.000,00 dan direncanakan akan dilaksanakan kegiatannya pada Tahun 2022.

		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.A.2.b.5	**Belanja Aset Tetap Lainnya**	**6.569.632.088,00**	**1.057.381.450,00**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp6.692.686.338,00 dengan realisasi sebesar Rp6.569.632.088,00 atau 98,16%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar Rp5.512.250.638,00 atau 521,31%.

Tabel 5.1.51

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	327.000.000,00	324.718.600,00	99,30	
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	8.300.000,00	400.000,00	4,82	
3	Belanja Modal Biota Perairan	77.250.000,00	77.250.000,00	100,00	
4	Belanja Modal Tanaman	8.500.000,00	3.500.000,00	41,18	
5	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	50.100.000,00	22.550.000,00	45,01	997.481.450,00
6	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	249.000.000,00	178.853.600,00	71,83	
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.972.536.338,00	5.962.359.888,00	99,83	
8	Belanja Modal Pengadaan Hewan	-	0,00	0,00	59.900.000,00
JUMLAH		**6.692.686.338,00**	**6.569.632.088,00**	98,16	**1.057.381.450,00**

Rincian Belanja Modal masing-masing SKPD Tahun 2021 terdapat pada **Lampiran 6** pada Laporan Keuangan ini.

		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.A.2.c.	**Belanja Tak Terduga**	**164.439.330,00**	**24.924.272.319,00**

Belanja Tak Terduga dianggarkan Rp200.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp164.439.330,00 atau sebesar 82,22%.

Penganggaran Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2021 yang dianggarkan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Rincian Belanja Tak Terduga dapat dilihat di **Lampiran 7** pada Laporan Keuangan ini.

Laporan Penggunaan APBD Tahun 2021 untuk Penanganan Covid-19

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Dalam perturan tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah.

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Angggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian penggunaan *(refocusing)* anggaran TKDD sebagai berikut :

a. Dalam rangka penyediaan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan COVID-19 dan belanja prioritas lainnya, pemerintah daerah melakukan realokasi dan refocusing DAU dan/atau DBH Tahun 2021 paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) yang digunakan untuk :
   1) Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 antara lain:
      a) dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19
      b) pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi COVID-19
      c) distribusi, pengamanan, dan penyediaan tempat penyimpanan vaksin COVID-19
      d) insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi COVID19.
   2) Mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 melalui penyediaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelurahan dan digunakan antara lain untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan.

3) Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19

4) Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah.

b. Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, penggunaan DID. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari DID TA 2021 yang diterima pemerintah daerah untuk bidang kesehatan termasuk untuk penanganan pandemi COVID-19, sarana prasarana kesehatan, dan digitalisasi pelayanan kesehatan; dan digunakan untuk perlindungan sosial.

Pemerintah Daerah juga menyampaikan laporan alokasi dan penggunaan APBD untuk penanganan COVID-19 kepada Menteri Dalam Negeri.

Kabupaten Dharmasraya telah menganggarkan penanganan COVID-19 pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp50.154.833.620,00 dengan realisasi sebesar Rp39.274.865.105,00 atau 78,31% yang berasal dari Belanja Program/ Kegiatan di beberapa SKPD.

Laporan Penggunaan APBD Tahun 2021 Untuk Penanganan Covid-19 terdapat pada **Lampiran 8** di Laporan Keuangan ini.

		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020(Rp)
V.A.3	**Transfer/ Bagi Hasil ke Desa**	**111.924.041.243,00**	**107.270.602.109,00**

Belanja Transfer /Bagi Hasil ke Desa Tahun Anggaran 2021 berupa Transfer Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya.

Realisasi Transfer dianggarkan sebesar Rp113.095.716.885,00 dan terealisasi sebesar Rp111.924.041.243,00 atau 98,96% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.52
Realisasi Transfer Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
I.	**Transfer/ Bagi Hasil ke Desa**				
1	Bagi Hasil Pajak	2.646.367.375,00	1.658.321.536,00	62,66	829.546.015,00
2	Bagi Hasil Retribusi	386.486.510,00	202.856.707,00	52,49	103.473.040,00
II.	**Transfer Bantuan Keuangan**				

No	Uraian	Tahun 2021			Realiasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Bantuan Keuangan ke Desa	110.062.863.000,00	110.062.863.000,00	100,00	105.472.649.600,00
2	Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	864.933.454,00
JUMLAH		**113.095.716.885,00**	**111.924.041.243,00**	**98,96**	**107.270.602.109,00**

Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 berupa Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintahan Desa/Nagari dianggarkan Rp2.646.367.375,00 dan terealisasi sebesar Rp1.658.321.536,00 atau 62,66%.

Bagi Hasil Retribusi Tahun 2021 berupa Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintahan Desa/Nagari dianggarkan Rp386.486.510,00 terealisasi sebesar Rp202.856.707,00 atau 52,49%. Uraian selengkapnya mengenai Transfer Bagi Hasil Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 9** dan Transfer Bagi Hasil Retribusi pada **Lampiran 10** di Laporan Keuangan ini.

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp110.062.863.000,00 dan terealisasi sebesar Rp110.062.863.000,00 atau 100% yang diperuntukkan untuk 52 nagari. Dana Bantuan Keuangan ke Desa bersumber dari dana transfer APBN sebesar Rp 56.540.066.000,00 dengan realisasi 100%. Dana Desa yang bersumber dari dana APBD atau Alokasi Dana Desa (ADD) dianggarkan sebesar Rp53.522.797.000,00 dan terealisasi 100%.

Penyaluran Dana Desa dari APBN dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke Rekening Kas Desa (RKD) tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dicatat di Laporan Realisasi Anggaran sebesar penyaluran ke Desa berdasarkan Laporan pada Aplikasi Simtrada dan OMSPAN Kementerian Keuangan. Rincian Dana Bantuan Keuangan ke Desa bersumber dari dana transfer APBN dapat dilihat pada **Lampiran 11** dan Dana Desa yang bersumber dari dana APBD atau Alokasi Dana Desa (ADD) pada **Lampiran 12** di Laporan Keuangan ini.

Realisasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari Tahun 2021 dapat dilihat di **Lampiran 13** pada Laporan Keuangan ini.

Belanja untuk Partai Politik pada Tahun 2021 dianggarkan pada Belanja Hibah, sehingga tidak ada realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya pada Tahun 2021. Realisasi Belanja Partai Politik Tahun 2021 dapat dilihat di **Lampiran 5** pada Laporan Keuangan ini.

		Tahun 2021 (Rp)	**Tahun 2020 (Rp)**
V.A.4	**Surplus/(Defisit)**	**61.872.560.776,22**	**4.440.973.593,17**

Jumlah Surplus/(Defisit) LRA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Surplus sebesar Rp61.872.560.776,22 sedangkan pada Tahun 2020 Surplus sebesar Rp4.440.973.593,17.

V.A.5 Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Rencana dan realisasi pembiayaan daerah Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.A.5.a. Penerimaan Pembiayaan	**8.334.425.206,49**	**3.893.451.613,32**

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 dianggarkan Rp 8.334.425.206,00 terealisasi sebesar Rp 8.334.425.206,49 atau 100%.

V.A.5.a.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 ini merupakan penerimaan SiLPA Tahun 2020. Secara rinci nilai penerimaan SiLPA Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a.	Kas di Kas Daerah	Rp	6.154.888.601,54
b.	Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Sungai Dareh	Rp	793.861.071,00
c.	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas dan RSUD Sungai Rumbai	Rp	732.706.761,95
d.	Saldo Akhir Dana BOS	Rp	639.921.020,00
e.	Piutang atas Pembatalan Kontrak Kerja Tahun 2017 No.02.BA-PPP/AIR/DPU-PR/X-2017	Rp	13.050.752,00
f.	SP2D No.5711/LS/2016 kekurangan debet oleh Bank Nagari (telah disetor ke CV. Mulla Karya tgl 26/04/2021)	Rp	(3.000,00)
	Jumlah	**Rp**	**8.334.425.206,49**

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.A.5.b. Pengeluaran Pembiayaan	**0,00**	**0,00**

Terdapat realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2021 sebesar Rp0,00

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.A.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	**70.206.985.982,71**	**8.334.425.206,49**

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021 sebesar Rp70.206.985.982,71 sedangkan SiLPA Tahun 2020 sebesar Rp8.334.425.206,49. Bila dibandingkan SiLPA Tahun 2021 dengan Tahun 2020 terjadi kenaikan SiLPA sebesar Rp61.872.560.776,22 atau 742,37 %.

Secara rinci Nilai SiLPA Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

a.	Kas di Kas Daerah	Rp	66.539.152.597,42
b.	Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Sungai Dareh	Rp	2.799.551.440,67
c.	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas dan RSUD Sungai Rumbai	Rp	700.746.329,62
d.	Saldo Akhir Dana BOS	Rp	154.484.863,00
e.	Piutang atas Pembatalan Kontrak Kerja Tahun 2017 No.02.BA-PPP/AIR/DPU-PR/X-2017	Rp	13.050.752,00
	Jumlah	**Rp**	**70.206.985.982,71**

Uraian Perhitungan SiLPA Tahun 2021 sebagai berikut:

Surplus/Defisit LRA	Rp	61.872.560.776,22
Pembiayaan Netto	Rp	8.334.425.206,49
SiLPA LRA Sebelum Koreksi	Rp	70.206.985.982,71
Koreksi SiLPA	Rp	0,00
SiLPA LRA Setelah Koreksi	**Rp**	**70.206.985.982,71**

V.B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) menggambarkan perubahan atas Saldo Anggaran Lebih dimana pada akhir Tahun 2020 terdapat Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp8.334.425.206,49 dan terjadi kenaikan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2021 sebesar Rp61.872.560.776,22 sehingga Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2021 menjadi Rp70.206.985.982,71

Rincian perhitungan LPSAL sebagai berikut.

Surplus/ (Defisit LRA)	Rp	61.872.560.776,22
Pembiayan Netto	Rp	8.334.425.206,49
SiLPA LRA sebelum koreksi	**Rp**	**70.206.985.982,71**
Koreksi Silpa:	Rp	0,00
Jumlah Koreksi	**Rp**	**0,00**
SiLPA LRA setelah koreksi	**Rp**	**70.206.985.982,71**

V.C. NERACA

V.C.1. ASET

Neraca Kabupaten Dharmasraya merupakan Neraca yang keenam belas kali disusun dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Neraca Kabupaten Dharmasraya mengambarkan posisi keuangan Kabupaten Dharmasraya mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2020.

Neraca Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2021 memiliki Aset sebesar Rp2.506.115.489.910,43, Kewajiban sebesar Rp18.045.680.349,38 dan Ekuitas sebesar Rp2.488.069.809.561,05.

Total Aset Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.506.115.489.910,43 naik sebesar Rp123.665.641.576,34 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.382.449.848.334,09 atau 5,19%. Aset terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.C.1.a. Aset Lancar	**145.872.214.439,45**	**69.754.426.351,07**

Aset Lancar adalah kas dan setara kas, serta sumber daya lainnya yang diharapkan dapat segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar adalah aset dalam bentuk Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Setara Kas, Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-Lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, Belanja Dibayar Dimuka dan Persediaan. Jumlah keseluruhan Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp145.872.214.439,45 mengalami kenaikan sebesar Rp76.117.788.088,38 atau 109,12% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp69.754.426.351,07. Adapun rincian Aset Lancar pada Tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.2.1
Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020

Aset Lancar		Tahun 2021	Tahun 2020
a.	Kas di Kas Daerah	66.539.152.597,42	6.154.888.601,54
b.	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
c.	Kas di Bendahara Penerimaan	-	991.000,00

Aset Lancar		Tahun 2021	Tahun 2020
d.	Kas di BLUD	3.500.297.770,29	1.526.712.732,95
e.	Kas di BOS	154.484.863,00	-
f.	Kas Lainnya	312.184.107,27	-
g.	Setara Kas	-	645.579.320,00
h.	Investasi Jangka Pendek	-	-
i.	Piutang Pajak	36.232.224.028,00	34.309.133.716,00
j.	Penyisihan Piutang Pajak	(26.498.466.733,38)	(24.365.360.319,38)
k.	Piutang Retribusi	767.327.811,00	242.685.161,00
l.	Penyisihan Piutang Retribusi	(486.855.897,00)	(100.954.575,00)
m.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.284.830,00	3.524.570.411,00
n.	Penyisihan Piutang pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	(51.424,15)	(17.622.852,05)
o.	Piutang Lain - lain PAD yang Sah	18.281.799.828,37	5.821.956.799,88
p.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	(2.215.645.745,10)	(923.326.882,67)
q.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	6.505.389.322,00
r.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	9.630.356.468,00	8.967.719.269,00
s.	Belanja Dibayar Dimuka	1.558.223.934,04	231.012.527,83
t.	Piutang Lainnya	13.050.752,00	13.050.752,00
u.	Penyisihan Piutang Lainnya	(13.050.752,00)	(1.305.075,20)
v.	Persediaan	38.086.898.001,69	27.219.306.442,17
	Jumlah	**145.872.214.439,45**	**69.754.426.351,07**

Saldo masing-masing Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.C.1.a.1 Kas di Kas Daerah	**66.539.152.597,42**	**6.154.888.601,54**

Kas di Kas Daerah merupakan rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Dharmasraya adalah Bank Nagari Cabang Pulau Punjung. Penunjukan Bank Nagari sebagai bank umum untuk menyimpan uang daerah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/1/KPTS-BUP/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pulau Punjung sebagai Kas Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan rekening nomor 1403.0101.00075-4, serta diperkuat dengan Perjanjian Kerjasama antara Bendahara Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pulau Punjung Nomor 900/796/BKD-2021 dan Nomor PKS/03/PL/2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pelayanan Perbankan dan Pelaksanaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Untuk mempermudah penerimaan pendapatan, pada tahun 2020 Bendahara Umum Daerah membuka rekening kas daerah pada BRI Kantor Cabang Dharmasraya dengan Perjanjian Kerjasama antara Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tentang Pengelolaan Keuangan Nomor 900/733/BKD-2020 tanggal 1 September 2020 dengan nomor rekening 0616.01-000699-30-5.

Saldo akhir Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 berdasarkan rekening koran Bank Nagari Cabang Pulau Punjung adalah Rp66.539.152.597,42, sedangkan saldo rekening koran pada BRI Kantor Cabang Dharmasraya adalah Rp0,00.

Secara rinci perbandingan nilai Kas di Kas Daerah pada Neraca dan di LRA pertanggal 31 Desember 2021 dapat uraian sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah di Neraca	Rp	66.539.152.597,42
Piutang atas Pembatalan Kontrak Kerja Tahun 2017 No.02.BA-PPP/ AIR/DPU-PR/X-2017	Rp	13.050.752,00
LRA	Rp	66.552.203.349,42

Perbedaan nilai Kas di Kas pada Neraca dan di LRA Tahun 2021 sebesar Rp13.050.752,00 telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah pada tanggal 25 Februari 2022 sebesar Rp13.050.752,00 oleh CV. Lubuk karya. Penjelasan lebih lanjut mengenai Piutang atas Pembatalan Kontrak Kerja Tahun 2017 No.02.BA-PPP/AIR/DPU-PR/X-2017 terdapat pada akun Piutang Lainnya di Neraca.

Kas di Kas Daerah merupakan SiLPA Tahun 2021 termasuk di dalamnya sisa dana terikat yang peruntukannya telah ditentukan seperti DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Hibah Rekonstruksi, pendapatan dan lain-lain yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.2.2

Rincian Kas Di Kas Daerah Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah
1	DAK Fisik	2.935.393.378,90
2	DAK Non Fisik	7.815.226.802,00
3	Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi di BPBD	24.000.000.000,00
4	Pendapatan	31.788.532.416,52
	Jumlah	**66.539.152.597,42**

Rincian mengenai realisasi DAK Fisik Tahun 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 15** dan DAK Non Fisik pada **Lampiran 16** di Laporan Keuangan ini.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.C.1.a.2 Kas di Bendahara Pengeluaran	**0,00**	**0,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan Saldo di Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum disetor kembali ke Kas Daerah pada akhir periode pembukuan. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0,00.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 200 (Rp)
V.C.1.a.3 Kas di Bendahara Penerimaan	**0,00**	**991.000,00**

Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2021 dan 2020 terdiri dari.

Tabel 5.2.3
Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2021 dan 2020

No	OPD/Uraian	2021	2020
1	Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan	0,00	991.000,00
	Jumlah	**0,00**	**991.000,00**

Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2020 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp991.000,00 adalah pungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor tanggal 30 Desember 2020, telah disetor ke kas daerah tanggal 2 Januari 2021 sebesar Rp991.000,00.

		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.C.1.a.4	**Kas di Kas BLUD**	**3.500.297.770,29**	**1.526.712.732,95**

Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2021 memiliki 16 unit Badan Layanan Umum Daerah yang bergerak pada bidang kesehatan yaitu 14 unit Badan Layanan Umum UPT Puskesmas dan 2 unit Badan Layanan Umum RSUD yaitu RSUD Sungai Dareh dan RSUD Sungai Rumbai.

Badan Layanan Umum Daerah RSUD Sungai Dareh ditetapkan dengan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/460/KPTS-BUP/2014 tentang Penetapan RSUD Sungai Dareh untuk melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh di Kabupaten Dharmasraya.

Badan Layanan Umum Daerah RSUD Sungai Rumbai ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/462/KPTS-BUP/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Penetapan UPT RSUD Sungai Rumbai sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) UPT Puskesmas ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya dengan uraian sebagai berikut.

1. SK Nomor 188.45/463/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Rumbai sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
2. SK Nomor 188.45/464/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sitiung I sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
3. SK Nomor 188.45/465/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sitiung II sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
4. SK Nomor 188.45/466/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sialang sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
5. SK Nomor 188.45/467/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Dareh sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. SK Nomor 188.45/468/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Silago sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. SK Nomor 188.45/469/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Timpeh sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

8. SK Nomor 188.45/470/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Padang Laweh sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. SK Nomor 188.45/471/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Tiumang sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. SK Nomor 188.45/472/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Koto Baru sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. SK Nomor 188.45/473/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Koto Besar sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. SK Nomor 188.45/474/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Limau sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. SK Nomor 188.45/475/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Limau sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
14. SK Nomor 188.45/476/KPTS-BUP/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Penetapan UPT RSUD Beringi Sakti sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Adapun rincian saldo yang ada direkening BLUD per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.2.4
Saldo Kas di BLUD Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Kas di BLUD Tahun 2021			Jumlah	2020
		Kas Di Bank	Kas di Bendahara Penerimaan	Kas di Bendahara Pengeluaran		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7
1	RSUD Sungai Dareh	2.799.533.673,67	17.767,00		2.799.551.440,67	793.861.071,00
2	RSUD Sungai Rumbai				0,00	102.400,00
3	Puskesmas Sungai Rumbai	5.073.003,00			5.073.003,00	3.372.729,00
4	Puskesmas Sungai Limau	812.867,70	185.000,00		997.867,70	2.667.639,70
5	Puskesmas Sitiung II	59.746.200,00			59.746.200,00	58.029.450,00
6	Puskesmas Padang Laweh	2.929.196,00			2.929.196,00	2.300.578,00

No	Uraian	Kas di BLUD Tahun 2021			Jumlah	2020
		Kas Di Bank	Kas di Bendahara Penerimaan	Kas di Bendahara Pengeluaran		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7
7	Puskesmas Sungai Dareh	253.014,00			253.014,00	1.193.642,00
8	Puskesmas Silago	7.689.287,00			7.689.287,00	5.084.754,00
9	Puskesmas Gunung Medan	2.665,00			2.665,00	9.426,00
10	Puskesmas Sitiung I	176.858.624,62			176.858.624,62	216.932.351,62
11	Puskesmas Koto Baru	362.454.241,00			362.454.241,00	321.977.230,00
12	Puskesmas Timpeh	2.900.236,00			2.900.236,00	14.039.216,00
13	Puskesmas Sialang	11.101.103,00			11.101.103,00	76.360.665,00
14	Puskesmas Tiumang	8.753.825,00			8.753.825,00	2.601.058,00
15	Puskesmas Koto Besar	13.643.885,38		43.788.054,03	57.431.939,41	24.763.849,07
16	Puskesmas Beringin Sakti	4.555.127,89			4.555.127,89	3.416.673,56
JUMLAH		**3.456.306.949,26**	**202.767,00**	**43.788.054,03**	**3.500.297.770,29**	**1.526.712.732,95**

Saldo di BLUD Tahun 2021 sebesar Rp3.500.297.770,29 terdiri atas Saldo Kas di Bank sebesar Rp3.456.306.949,26, saldo Kas di Bendahara Penerimaan BLUD sebesar Rp202.767,00, dan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD sebesar Rp43.788.054,03.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.C.1.a.5 Kas di BOS	**154.484.863,00**	**0,00**

Kas di BOS adalah saldo Kas Dana BOS di sekolah negeri pada saat tanggal neraca. Sekolah negeri pengelola Dana BOS Tahun 2021 terdiri dari 147 SD Negeri dan 33 SMP Negeri. Saldo Kas di BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp154.484.863,00 terdiri dari kas dibank sebesar Rp41.290.248,00, kas tunai di bendahara pengeluaran sebesar Rp113.194.615,00.

Nilai saldo kas di BOS Tahun 2020 sebesar Rp0,00 karena nilai tersebut masih tercatat pada akun Setara Kas, di reklas pencatatannya pada tahun 2021 menjadi Kas di BOS.

Rincian Dana BOS Tahun 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 3b** Laporan Keuangan ini.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.C.1.a.6 Kas Lainnya	**312.184.107,27**	**0,00**

Kas Lainnya adalah berupa berupa pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK yang dilakukan oleh Kuasa BUD ataupun Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Negara/ Kas Daerah atau pihak terkait.

Kas Lainnya sebesar Rp312.184.107,27 terdiri dari Pajak Negara Tahun 2021 yang belum disetor oleh Bendahara BOS Rp273.683.863,27, Pajak Restoran Tahun 2021 yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp37.933.707,00 dan Pendapatan Jasa Giro Dana BOS yang belum disetor ke kas daerah Tahun 2021 sebesar Rp566.537,00

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.C.1.a.7 Setara Kas	**0,00**	**645.579.320,00**

Akun ini menampung kas selain sisa Uang Muka Kerja (Uang Persediaan/UP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang merupakan pemotongan/pungutan PPN dan PPh yang timbul atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal yang belum disetor ke Kas Negara dan saldo Kas Dana BOS serta rekening operasional lainnya di sekolah negeri pada saat tanggal neraca.

Nilai saldo Setara Kas Tahun 2021 sebesar Rp0,00 karena nilai untuk saldo Dana BOS di reklas pencatatannya pada tahun 2021 menjadi Kas di BOS.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.C.1.a.8 Piutang Pajak	**36.232.224.028,00**	**34.309.133.716,00**

Piutang Pajak terdiri dari Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Piutang Pajak Hotel, dan Piutang Pajak Restoran. Piutang Pajak Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2021	2020
1	PBB-P2	35.163.427.868,00	33.285.365.626,00
2	Pajak Penerangan Jalan	1.067.255.885,00	1.020.968.090,00
3	Pajak Restoran	1.540.275,00	0,00
3	Pajak Hotel	0,00	2.800.000,00
		36.232.224.028,00	**34.309.133.716,00**

1. Piutang PBB-P2

Piutang PBB-P2 sebagian besar merupakan piutang sewaktu pelimpahan dari Pemerintah Pusat (KPP Pratama Solok) kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2, dan Aset Sitaan Nomor BA-47/WPJ.27/KP.06/2014 pada tanggal 27 Februari 2014.

Penagihan Piutang PBB-P2 masih bersifat pasif dengan pola penagihan piutang dilakukan apabila ada yang mengurus BPHTB untuk diminta membayar seluruh tagihan PBB yang ada pada daftar piutang dan aplikasi SIMPBB.

Banyaknya nilai piutang PBB-P2 yang belum tertagih tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti belum optimalnya melakukan verifikasi dan validasi data piutang ke lapangan semenjak pengalihan PBB-P2 ke Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Verifikasi dan validasi data piutang dimaksud agar data-data piutang PBB-P2 tersebut diyakini kebenarannya dan objek pajaknya memang ada.

Surat Penetapan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp4.436.503.915,00 dengan penerimaan pokok PBB-P2 Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.158.208.039,00. Nilai piutang yang timbul atas penerbitan dan penerimaan PBB-P2 Tahun 2021 per-31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.278.295.876,00.

Nilai piutang PBB-P2 dari Tahun 1996 sampai dengan 2020 per 31 Desember 2020 sebesar Rp33.285.365.626,00 ditambah dengan SKP Tahun 2021 sebesar Rp4.436.503.915,00 dikurangi penerimaan Pokok PBB P2 sebesar Rp2.558.441.673,00, maka saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp35.163.427.868,00. Piutang PBB-P2 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.2.5
Piutang PBB-P2 Tahun 2021 dan 2020

No	Tahun Pajak	Piutang Per 31 Desember 2020	Ketetapan Tahun 2021	Penerimaan Pokok PBB P2	Penerimaan Belum Ada NOP	Penerimaan LRA 2021	Piutang PBB Per 31 Desember 2021
1	2	3	4	5	6	7=5+6	9=3+4-5
1	2021	-	4.436.503.915	2.158.208.039,00	5.665.136,00	2.163.873.175,00	2.278.295.876,00
2	2020	2.506.790.426		164.068.094,00	-	164.068.094,00	2.342.722.332
3	2019	2.187.267.538,00		80.184.569,00	-	80.184.569,00	2.107.082.969,00
4	2018	2.347.175.339,00		69.093.760,00	-	69.093.760,00	2.278.081.579,00
5	2017	2.029.189.702,00		36.083.711,00	-	36.083.711,00	1.993.105.991,00
6	2016	2.238.832.001,00		27.201.300,00	-	27.201.300,00	2.211.630.701,00
7	2015	2.309.456.736,00		11.801.100,00	-	11.801.100,00	2.297.655.636,00
8	2014	2.799.125.593,00		11.801.100,00	-	11.801.100,00	2.787.324.493,00

No	Tahun Pajak	Piutang Per 31 Desember 2020	Ketetapan Tahun 2021	Penerimaan Pokok PBB P2	Penerimaan Belum Ada NOP	Penerimaan LRA 2021	Piutang PBB Per 31 Desember 2021
1	2	3	4	5	6	7=5+6	9=3+4-5
9	1996 s.d. 2013	16.867.528.291,00		-	-	-	16.867.528.291,00
	Jumlah	**33.285.365.626,00**	**4.436.503.915**	**2.558.441.673,00**	**5.665.136,00**	**2.564.106.809,00**	**35.163.427.868,00**

Penerimaan PBB-P2 Tahun 2021 sebesar Rp2.564.106.809,00 terdiri dari penerimaan **Pokok Piutang** sebesar Rp2.558.441.673,00 dan penerimaan pembayaran kurang bayar PBB-P2 Tahun 2021 sebesar Rp1.957.471,00 dan pembayaran PBB tanpa NOP dari Profesional Telekomunikasi Indonesia sebesar Rp3.707.665,00 sampai saat laporan keuangan ini disusun belum ada balasan konfirmasi dari pihak perusahaan terkait pembayaran PBB tanpa NOP.

2. Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Piutang PPJ per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.067.255.885,00 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.2.6
Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Tahun 2021 dan 2020

No	Piutang 2021			Piutang 2020		
	Perusahaan	Nilai	Tgl Setor	Perusahaan	Nilai	Tgl Setor
1	2	3	4	5	6	7
1	PT PLN (Persero)	1.019.037.641,00	13/01/2022	PT PLN (Persero)	979.410.413,00	01/15/21
2	PT SMP	6.750.544,00	05/01/2022	PT Incasi Raya	4.172.954,00	02/02/2021
3	PT AWB	6.871.500,00	05/01/2022	PT Incasi Raya	5.926.805,00	01/08/2021
4	PT Incasi Raya Pangian	7.370.641,00	11/01/2022	PT Incasi Raya	5.315.740,00	02/02/2021
5	PT DSL	6.816.863,00	21/01/2022	PT SAK	6.668.458,00	01/22/21
6	PT SAK	6.778.289,00	26/01/2022	PT SMP	6.325.127,00	01/11/2021
7	PT DSL	7.516.884,00	26/01/2022	PT. DL	9.084.351,00	01/20/21
8	PT AWB	6.113.523,00	27/01/2022	PT AWB	4.064.242,00	02/22/21
	Jumlah	**1.067.255.885,00**		**Jumlah**	**1.020.968.090,00**	

Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.067.255.885,00 terdiri dari Piutang PPJ PLN bulan Desember 2021 sebesar Rp1.019.037.641,00 yang telah diterima di Kas Daerah tanggal 13 Januari 2022 dan Piutang PPJ Non PLN sebesar Rp48.218.244,00 yang telah diterima penerimaannya pada Tahun 2022.

3. Piutang Pajak Hotel

Piutang Pajak Hotel Tahun 2021 sebesar Rp0,00. Piutang Pajak Hotel Tahun 2020 sebesar Rp2.800.000,00 merupakan piutang pajak Hotel Jakarta Indah penagihan Bulan Desember 2020 yang telah disetor ke kas daerah tanggal 6 Januari 2021 sebesar Rp2.800.000,00.

4. Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Restoran Tahun 2021 sebesar Rp1.540.275,00 terdiri dari penagihan Bulan Desember 2021 pada Restoran Pempek Dovin sebesar Rp100.000,00 dan Restoran Dbesto sebesar Rp1.440.275,00.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	**(26.498.466.733,38)**	**(24.365.360.319,38)**

Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp26.498.466.733,38 terdiri dari.

	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	2021	2020
1	Penyisihan Piutang PBB-P2	26.493.122.752,58	24.360.241.478,93
2	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	5.336.279,42	5.104.840,45
3	Penyisihan Piutang Restoran	7.701,38	
4	Penyisihan Piutang Pajak Hotel		14.000,00
	Jumlah	**26.498.466.733,38**	**24.365.360.319,38**

Penyisihan Piutang PBB-P2 sampai Tahun 2021 sebesar Rp26.493.122.752,58 dengan rincian dan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.2.7
Penyisihan Piutang PBB-P2 Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Umur (Th)	Kualitas	% Cad.	Jumlah Penyisihan
1	Tahun Pajak 2021	2.278.295.876	< 1	Lancar	0,5	11.391.479,38
2	Tahun Pajak 2020	2.342.722.332	1 s.d 2	Kurang Lancar	10	234.272.233,20
3	Tahun Pajak 2019	2.107.082.969,00	2 s.d 5	Diragukan	50	1.053.541.484,50

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Umur (Th)	Kualitas	% Cad.	Jumlah Penyisihan
4	Tahun Pajak 2018	2.278.081.579,00	2 s.d 5	Diragukan	50	1.139.040.789,50
5	Tahun Pajak 2017	1.993.105.991,00	2 s.d 5	Diragukan	50	996.552.995,50
6	Tahun Pajak 2016	2.211.630.701,00	2 s.d 5	Diragukan	50	1.105.815.350,50
7	Tahun Pajak 2015	2.297.655.636,00	> 5	Macet	100	2.297.655.636,00
8	Tahun Pajak 2014	2.787.324.493,00	> 5	Macet	100	2.787.324.493,00
9	Pajak 1996 s.d 2013	16.867.528.291,00	> 5	Macet	100	16.867.528.291,00
	Jumlah	**35.163.427.868,00**				**26.493.122.752,58**

Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2021 sebesar Rp5.336.279,43 dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.2.8
Penyisihan Piutang PPJ PLN dan Non PLN Tahun 2021

No	Jenis	Uraian	Jumlah (Rp)	Umur (Th)	Kualitas	% Penyisihan	Jumlah Penyisihan
1	PLN	Tahun 2021	1.019.037.641,00	< 1	Lancar	0,5	5.095.188,20
2	Non PLN	Tahun 2021	48.218.244,00	< 1	Lancar	0,5	241.091,22
		Jumlah	**1.067.255.885,00**				**5.336.279,42**

Penyisihan Piutang Pajak Restoran Tahun 2021 adalah sebesar Rp7.701,38 dari perhitungan (0,5% x Rp1.540.275,00.)

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.C.1.a.9 Piutang Retribusi	**767.327.811,00**	**242.685.161,00**

Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 sebesar Rp767.327.811,00 terdiri dari.

Uraian	2021	2020
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	2.300.000,00	54.967.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	240.299.261,00	121.046.361,00

Uraian	2021	2020
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	53.067.000,00	66.671.800,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	471.661.550,00	0,00
Jumlah	**767.327.811,00**	**242.685.161,00**

a. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar dikelola oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan. Retribusi bersumber dari MoU Pengurus pasar yang diketahui Wali Nagari dan Dinas terkait untuk memungut retribusi pelayanan pasar. Adapun Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2021 dan 2020 dapat diuaraikan sebagai berikut.

Tabel 5.2.9
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Piutang 2020	Target 2021	Penerimaan 2021	Piutang 2021
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Pasar Sitiung	-	6.000.000,00	6.000.000,00	-
2	Pasar Koto Agung	-	6.000.000,00	6.000.000,00	-
3	Pasar Lawai	-	1.500.000,00	1.500.000,00	-
4	Pasar Pulau Punjung	12.450.000,00	9.000.000,00	19.150.000,00	2.300.000,00
5	Pasar Sikabau	3.400.000,00	5.400.000,00	8.800.000,00	-
6	Pasar Sopan Jaya	1.000.000,00	7.020.000,00	8.020.000,00	-
7	Pasar Pinang Makmur	-	4.500.000,00	4.500.000,00	-
8	Pasar Marga Makmur	-	2.520.000,00	2.520.000,00	-
9	Pasar Trimulya	4.200.000,00	4.200.000,00	8.400.000,00	-
10	Pasar Beringin Sakti	-	3.504.000,00	3.504.000,00	-
11	Pasar Lagan Jaya	2.600.000,00	2.600.000,00	5.200.000,00	-
12	Pasar Abai Siat	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	-
13	Pasar Mayang Taurai	-	3.600.000,00	3.600.000,00	-
14	Pasar Lubuk Karya	2.400.000,00	2.400.000,00	4.800.000,00	-
15	Pasar Koto Laweh	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	-
16	Pasar Koto Ranah	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	-
17	Pasar Sungai Limau	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	-
18	Pasar Tanjung Alam	540.000,00	540.000,00	1.080.000,00	-
19	Pasar Silago	2.520.000,00	2.520.000,00	5.040.000,00	-
20	Pasar Ampang Kuranji Silago	1.020.000,00	1.020.000,00	2.040.000,00	-
21	Pasar Lubuk Karak	2.100.000,00	2.100.000,00	4.200.000,00	-
22	Pasar Sungai Rumbai	-	7.200.000,00	7.200.000,00	-
23	Pasar Sialang Gaung	6.100.000,00	6.600.000,00	12.700.000,00	-
24	Pasar Ampang Kuranji Kec Koto Baru	177.000,00	1.020.000,00	1.197.000,00	-
25	Pasar Koto Baru	3.440.000,00	5.040.000,00	8.480.000,00	-

No	Uraian	Piutang 2020	Target 2021	Penerimaan 2021	Piutang 2021
1	2	3	4	5	6=3+4-5
26	Pasar Alahan Nan Tigo	1.020.000,00	1.020.000,00	2.040.000,00	-
27	Pasar Ampalu	3.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	-
	JUMLAH	**54.967.000,00**	**101.804.000,00**	**154.471.000,00**	**2.300.000,00**

Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2021 adalah sebesar Rp154.471.000,00 terdiri dari penerimaan Tahun 2021 sebesar Rp 99.504.000,00, penerimaan piutang Tahun 2020 sebesar Rp 49.667.000 dan penerimaan piutang Tahun 2019 sebesar Rp5.300.000,00.

Nilai Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.300.000,00 yang berasal dari piutang pasar Pulau Punjung.

b. Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2021 sebesar Rp240.299.261,00. Rincian Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.2.10
Daftar Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2021 dan 2020

No	Perusahaan	Piutang 2021	Piutang 2020
A	**Tahun 2021**		
1	PT. CMI	13.750.000,00	-
2	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	6.050.000,00	-
3	PT. Telkomsel	77.550.000,00	-
4	PT. Indosat	20.075.000,00	-
5	PT. Era Bangun Towerindo	2.900,00	-
6	Tower Bersama Group	39.600.000,00	-
7	PT. Excellindo Pratama (XI)	11.275.000,00	-
B	**Tahun 2020**		
1	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	6.050.000,00	6.050.000,00
2	PT. Indosat	20.075.000,00	20.075.000,00
3	Excelindo	11.275.000,00	11.275.000,00
4	Protelindo	0,00	49.050.000,00
5	Era Bangun Towerindo	4.500.000,00	4.500.000,00
C	**Tahun 2019**		
1	PT. Solusi Tunas Pratama	2.750.000,00	2.750.000,00

No	Perusahaan	Piutang 2021	Piutang 2020
D	**Tahun 2017**		
1	PT. Telkomsel	5.500.000,00	5.500.000,00
2	PT. Tower Bersama	550.000,00	550.000,00
E	**Tahun 2015**		
1	PT. Tower Bersama	8.995.321,00	8.995.321,00
2	PT. Indosat	12.301.040,00	12.301.040,00
	Jumlah	**240.299.261,00**	**121.046.361,00**

Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2021 sebesar Rp240.299.261,00 terdiri dari piutang tahun 2021 sebesar Rp 168.302.900,00 dan piutang tahun 2020 sebesar Rp71.996.361,00.

Tidak adanya perkembangan penerimaan piutang pada tahun sebelumnya dan tidak maksimalnya penerimaan retribusi pada Tahun 2021 karena terbatasnya ruang gerak untuk melakukan penagihan retribusi disebabkan adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2021.

c. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2021 sebesar Rp66.671.800,00 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.2.11
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Piutang 2021	Piutang 2020
1	**Dinas Pendidikan**	**53.067.000,00**	**64.246.000,00**
	Rumah Dinas	53.067.000,00	64.246.000,00
2	**Dinas Perkimtan**		**1.825.800,00**
	Sewa Rusunawa		1.825.800,00
3	**Kecamatan Koto Baru**		**600.000,00**
	Kendaraan Dinas		600.000,00
Jumlah		**53.067.000,00**	**66.671.800,00**

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2021 sebesar Rp53.067.000,00 merupakan Retribusi pemakaian rumah dinas di Dinas Pendidikan.

Rincian piutang pemakaian kekayaan daerah atas rumah dinas pada Dinas Pendidikan terdapat pada **Lampiran 17**.

d. Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan pemindahan dari Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Piutang Air Minum UPT SPAM pada Dinas PUPR per 31 Desember 2021 sebesar Rp 471.661.550,00 berasal dari piutang Tahun 2021 sebesar Rp160.752.400,00 dan piutang-piutang tahun sebelumnya sebesar Rp310.909.150,00. Piutang dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.2.12
Piutang Air Minum UPT SPAM Tahun 2021

Tahun Tunggakan	Nilai Piutang per 31 Desember 2020	Piutang tertagih di tahun 2021	Nilai Piutang per 31 Desember 2021
Tahun 2012	13.130.300,00	-	13.130.300,00
Tahun 2013	2.667.800,00	-	2.667.800,00
Tahun 2014	22.578.050,00	-	22.578.050,00
Tahun 2015	10.933.900,00	-	10.933.900,00
Tahun 2016	3.523.500,00	-	3.523.500,00
Tahun 2017	32.487.600,00	-	32.487.600,00
Tahun 2018	35.939.600,00	511.100,00	35.428.500,00
Tahun 2019	81.711.200,00	2.594.700,00	79.116.500,00
Tahun 2020	183.419.700,00	72.376.700,00	111.043.000,00
Jan- Nov 2021			131.136.100,00
Desember 2021			29.616.300,00
Jumlah	**386.391.650,00**	**75.482.500,00**	**471.661.550,00**

	Tahun 2021 (Rp)	**Tahun 2020 (Rp)**
Penyisihan Piutang Retribusi	**(486.855.897,00)**	**(100.954.575,00)**

Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2021 merupakan Penyisihan atas Piutang Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Penyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika, PenyPiutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pendidikan, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Piutang SPAM pada Dinas PUPR dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.2.13
Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2021

Jenis Retribusi	Saldo Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Retribusi Pelayanan Pasar				
Tahun 2021	2.300.000,00	Lancar	0,50%	11.500,00
Jumlah	**2.300.000,00**			**11.500,00**
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi				
Tahun 2015	21.296.361,00	Macet	100%	21.296.361,00
Tahun 2017	6.050.000,00	Macet	100%	6.050.000,00
Tahun 2019	2.750.000,00	Macet	100%	2.750.000,00
Tahun 2020	41.900.000,00	Macet	100%	41.900.000,00
Tahun 2021	168.302.900,00	Lancar	0,5%	841.514,50
Jumlah	**240.299.261,00**			**72.837.875,50**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
Tahun 2017	11.698.000,00	Macet	100%	11.698.000,00
Tahun 2018	27.198.000,00	Macet	100%	27.198.000,00
Tahun 2019	14.171.000,00	Macet	100%	14.171.000,00
Jumlah	**53.067.000,00**			**53.067.000,00**
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah				
Tahun 2012	13.130.300,00	Macet	100%	13.130.300,00
Tahun 2013	2.667.800,00	Macet	100%	2.667.800,00
Tahun 2014	22.578.050,00	Macet	100%	22.578.050,00
Tahun 2015	10.933.900,00	Macet	100%	10.933.900,00
Tahun 2016	3.523.500,00	Macet	100%	3.523.500,00
Tahun 2017	32.487.600,00	Macet	100%	32.487.600,00
Tahun 2018	35.428.500,00	Macet	100%	35.428.500,00
Tahun 2019	79.116.500,00	Macet	100%	79.116.500,00
Tahun 2020	111.043.000,00	Macet	100%	111.043.000,00

Jenis Retribusi	Saldo Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Jan-Agust 2021	91.921.700,00	Diragukan	50,00%	45.960.850,00
Sept-Nov 2021	39.214.400,00	Kurang Lancar	10,00%	3.921.440,00
Desember 2021	29.616.300,00	Lancar	0,50%	148.081,50
Jumlah	**471.661.550,00**			**360.939.521,50**
Total	**767.327.811,00**			**486.855.897,00**

		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.C.1.a.10	**Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**10.284.830,00**	**3.524.570.411,00**

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah piutang deviden yang akan diterima dari penempatan modal pada Bank Nagari, PT. Balairung Citrajaya dan PT.BPR Pulau Punjung.

Nilai Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.284.830,00 atas piutang deviden PT. BPR Pulau Punjung Tahun 2021, sedangkan informasi terkait pembayaran deviden pada Tahun 2021 dari Bank Nagari dan PT. Balairung Citrajaya belum ada saat laporan keuangan ini disusun.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**51.424,15**	**17.622.852,06**

Nilai Penyisihan Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp51.424,15 (Rp10.284.830,00 x 0.05%) atas piutang deviden PT. BPR Pulau Punjung Tahun 2021.

		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.C.1.a.11	**Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**	**18.281.799.828,37**	**5.821.956.799,88**

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 sebesar Rp18.281.799.828,37 yang terdiri dari:

Tabel 5.2.14
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Piutang BLUD	13.310.387.523,00	388.006.830,00
	- BLUD Puskesmas	1.248.862.100,00	353.569.200,00
	- BLUD RSUD Sungai Dareh	12.061.525.423,00	34.437.630,00
2	Piutang Dana Bergulir	554.897.679,00	554.897.679,00
3	Piutang Air Minum UPT SPAM	0,00	386.391.650,00
4	Piutang Bunga Deposito	0,00	10.080.637,00
5	Piutang TGR	4.410.484.635,37	4.477.450.012,88
6	Piutang Pengembalian Belanja	5.129.991,00	5.129.991,00
7	Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah	900.000,00	0,00
	Jumlah	**18.281.799.828,37**	**5.821.956.799,88**

a. Piutang BLUD

Piutang BLUD pada per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.310.387.523,00 terdiri dari piutang BLUD Puskesmas sebesar Rp1.248.862.100,00 dan Piutang BLUD RSUD Sungai Dareh sebesar Rp12.061.525.423,00.

Piutang BLUD Puskesmas sebesar Rp1.248.862.100,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.2.15

Piutang BLUD Puskesmas Tahun 2021

No	Unit Kerja	Piutang 2018 dan 2019	Piutang 2021	Jumlah Piutang (Rp)	Total Penerimaan Piutang	Sisa Piutang 2021 yang belum diterima	Tanggal Pembayaran oleh BPJS
1	2	3	4	5	6	7=5-6	9
1	RSUD Sungai Rumbai	-	1.167.661.000,00	1.167.661.000,00	0,00	1.167.661.000,00	
2	Sungai Rumbai	-	3.883.100,00	3.883.100,00	3.883.100,00	0,00	- 188.100 tgl 17 Januari 2022 - 3.695.000 tgl 24 Januari 2022
3	Koto Besar	-	114.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00	- 114.000 tgl 17 Januari 2022
4	Sungai Limau	-	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	- 55.000 tgl 15 Januari 2022
5	Koto Baru	-	29.467.800,00	29.467.800,00	29.295.000,00	172.800,00	- 15.480.000 tgl 3 Januari 2022 - 13.815.000 tgl 24 Januari 2022
6	Tiumang	-	866.000,00	866.000,00	66.000,00	800.000,00	- 66.000 tgl 17 Januari 2022
7	Padang Laweh	-	5.848.000,00	5.848.000,00	0,00	5.848.000,00	
8	Sitiung I	-	13.352.400,00	13.352.400,00	182.400,00	13.170.000,00	- 182.400 tgl 17 Januari 2022
9	Timpeh	-	7.990.200,00	7.990.200,00	7.920.000,00	70.200,00	- 7.920.000 tgl 24 Januari 2022
10	Gunung Medan	-	4.467.300,00	4.467.300,00	2.917.000,00	1.550.300,00	- 1.390.000 tgl 3 Januari 2022 - 325.000 tgl 18 Januari 2022 - 1.202.000 tgl 1.202.000
11	Sitiung II	-	102.600,00	102.600,00	0,00	102.600,00	
12	Beringin Sakti	-	1.914.000,00	1.914.000,00	1.884.000,00	30.000,00	- 1.884.000 tgl 24 Januari 2022
13	Silago	-	8.675.600,00	8.675.600,00	8.675.600,00	0,00	- 45.600 tgl 15 Januari 2022 - 8.630.000 tgl 24 Januari 2022
14	Sungai Dareh	-	742.900,00	742.900,00	742.900,00	0,00	- 475.000 tgl 24 Januari 2022 - 267.000 tgl 17 Januari 2022
15	Sialang	3.625.000,00	97.200,00	3.722.200,00	0,00	3.722.200,00	
		3.625.000,00	**1.245.237.100,00**	**1.248.862.100,00**	**55.735.000,00**	**1.193.127.100,00**	

Piutang BLUD Puskesmas sebesar Rp1.248.862.100,00 telah diterima sebagian piutangnya pada saat penyusunan LKPD 2021 sebesar Rp55.735.000,00 sehingga masih ada sisa piutang yang belum diterima sebesar Rp1.193.127.100,00.

Piutang BLUD RSUD Sungai Dareh Tahun 2021 sebesar Rp12.061.525.423,00 terdiri dari:

Tabel 5.2.16
Piutang BLUD RSUD Sungai Dareh Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah
1	Piutang Klaim suku anak dalam bulan Des 2019	5.784.900,00
1	Klaim JKN Pending Bulan September 2021	90.743.600,00
2	Klaim Obat Kronis Bulan November 2021	114.428.223,00
3	Klaim Jasa Raharja Bulan Desember II 2021	1.030.700,00
4	Klaim BPJSTK Bulan Maret 2021	4.970.500,00
5	Klaim BPJSTK Bulan Juli 2021	130.700,00
6	Klaim BPJSTK Bulan Oktober 2021	184.300,00
7	Klaim BPJSTK Bulan Desember 2021	16.188.800,00
8	Klain JKN Covid 19 Tahun 2021	11.828.063.700,00
JUMLAH		**12.061.525.423,00**

Piutang BLUD RSUD Sungai Dareh sebesar Rp12.061.525.423,00 belum diterima per 31 Desember 2021 dan masih terdapat piutang tahun 2019 sebesar Rp5.784.900,00 yang masih belum dibayarkan.

Selain piutang BLUD diatas terdapat piutang Klaim Covid-19 (Klaim *Dispute*) sebesar Rp2.516.343.900,00. Klaim *Dispute* merupakan ketidaksepakatan berita acara pengajuan klaim dikarenakan adanya perbaikan terhadap kelengkapan syarat yang harus dipersyaratkan. Terdiri dari Klaim Dispute RSUD Sungai Dareh sebesar Rp1.348.682.900,00 dan RSUD Sungai Rumbai sebesar Rp1.167.661.000,00. Piutang tersebut dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.2.17
Piutang Klaim Dispute Tahun 2021

No	Nomor Klaim *Dispute*	Jumlah
I	**RSUD Sungai Rumbai**	**1.167.661.000,00**
1	1479/BA/II-06/1221-HVCVDJULI	138.838.000,00
2	1479/BA/II-06/1221-HVCVDAGUST	392.854.000,00
3	1479/BA/II-06/1221-HVCVDJUNI	635.969.000,00
II	**RSUD Sungai Dareh**	**1.348.682.900,00**
1	22011100033	90.804.000,00
2	22011700130	526.750.900,00
3	22020200028	585.685.000,00
4	22020700051	93.569.000,00
5	2202150019	28.054.000,00
5	22021800032	23.820.000,00
Total		**2.516.343.900,00**

b. Piutang Dana Bergulir

Dana Bergulir pada Kabupaten Dharmasraya merupakan Dana Bergulir yang dikelola oleh Dinas Koperindag Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2010 dengan Berita Acara Serah Terima Asset Tahap Kedua dari Pemerintah Kabupaten Sijunjung kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Nomor 900/898/B.A/2010 tanggal 27 Desember 2010 berupa Kredit Penguatan Modal/Dana Bergulir UMKM (Pokok + Bunga + Denda) sebesar Rp834.993.485,00. Berdasarkan BAST tersebut, penyerahan kredit penguatan modal ke masyarakat direalisasikan pada Tahun 2002 dan 2004 oleh Dinas Koperindag Kabupaten Sijunjung.

Tidak dilakukannya penagihan atas Piutang Dana Bergulir disebabkan besarnya biaya operasional yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan serta tidak adanya piutang yang dapat ditagih dari debitur. Hal lain tidak bisanya dilakukan penagihan disebabkan alamat yang tidak ditemukan, pindah alamat, meninggal dunia, dan tidak mampu.

Hingga saat ini nilai Piutang Dana Bergulir Tahun 2021 adalah sebesar Rp554.897.679,00 tidak ada perubahan nilai piutang dari Tahun 2019. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Dharmasraya berupaya untuk melakukan penyelesaian piutang melalui konsultasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Padang terkait penyelesaian piutang, dan disarankan untuk melengkapi dokumen yang sesuai ketentuan terkait penghapusan piutang Negara/Daerah.

Adapun rincian Piutang Dana Bergulir Tahun 2021 dan 2020 terdapat di **Lampiran 18** pada Laporan Keuangan ini.

c. Piutang Air Minum UPT SPAM

Piutang Air Minum UPT SPAM per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 karena nilai piutang telah direklas ke Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

d. Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Piutang Bunga Deposito / Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain pada Tahun 2021 sebesar Rp0,00.

e. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) pada Neraca per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp 4.477.450.012,88. Penambahan nilai piutang selama Tahun 2021 sebesar Rp419.706.372,60. Pengurangan piutang sebesar Rp486.671.750,11 terdiri dari penyetoran penetapan SKP2KS sebelum Tahun 2021 sebesar Rp83.008.706,32 dan penyetoran penetapan SKP2KS Tahun 2021 sebesar Rp403.663.043,79 sehingga nilai Piutang TGR Per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp4.410.484.635,37. Dapat dijelaskan pada perhitungan sebagai berikut.

Piutang Tahun 2020	Rp	4.477.450.013,88
Penambahan Piutang 2020	Rp	419.706.373,60
Pengurangan Piutang		
Penyetoran penetapan SKP2KS sebelum Tahun 2021	Rp	(83.008.706,32)
Penyetoran penetapan SKP2KS Tahun 2021	Rp	(403.663.043,79)
Nilai Piutang Per 31 Desember 2021	Rp	4.410.484.635,37

Adapun rincian mengenai Piutang TGR Tahun 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 15** pada laporan keuangan ini.

f. Piutang Pengembalian Belanja

Piutang Pengembalian Belanja Tahun 2021 adalah piutang belanja bantuan kepada partai politik Tahun 2019 sebesar Rp5.129.991,00.

Piutang tersebut timbul sehubungan dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Dharmasraya serta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 09.I/LHP/XVIII.PDG/03/2020 atas Pertanggunjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan, terdapat kelebihan pembayaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik periode Agustus 2019 pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.129.991,00.

g. Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah

Piutang hasil penjualan aset daerah pada Tahun 2021 bernilai sebesar Rp900.000,00. Nilai piutang tersebut adalah merupakan penjualan Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan atas penjualan bongkaran atap gedung sekolah SDN 04 Sungai Rumbai pada pada Tahun 2021 yang telah disetor ke kas daerah pada tanggal 20 Januari 2022 sebesar Rp900.000,00.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	**(2.215.645.745,10)**	**(923.326.882,67)**

Penyisihan Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp2.215.645.745,10 per 31 Desember 2021 terdiri dari:

Tabel 5.2.18
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	2021	2020
a.	Penyisihan Piutang BLUD	1.216.003.727,80	9.172.900,50
b.	Penyisihan Piutang Dana Bergulir	554.897.679,00	462.518.051,08
c.	Penyisihan Piutang Air Minum UPT SPAM	0,00	34.099.561,50
d.	Penyisihan Piutang Bunga Deposito	0,00	50.403,18
e.	Penyisihan Piutang TGR	439.524.347,30	417.460.316,46
f.	Piutang Pengembalian Belanja	5.129.991,00	25.649,95
g	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset daerah yang dipisahkan	90.000,00	0,00
Jumlah		**2.215.645.745,10**	**923.326.882,67**

a) Penyisihan Piutang BLUD

Penyisihan Piutang BLUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.216.003.727,80 terdapat pada penyisihan piutang BLUD Puskesmas sebesar Rp9.851.185,50 dan penyisihan piutang BLUD RSUD Sungai Dareh sebesar Rp1.206.152.542,50 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.19
Penyisihan Piutang BLUD Tahun 2021

No.	Jenis Retribusi	Saldo Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	**Jasa Layanan BLUD Puskesmas**				
	Tahun 2018	2.125.000,00	Macet	100%	2.125.000,00
	Tahun 2019	1.500.000,00	Macet	100%	1.500.000,00
	Desember 2021	1.245.237.100,00	Lancar	0,50%	6.226.185,50
	Jumlah	**1.248.862.100,00**			**9.851.185,50**
2	**Jasa Layanan BLUD RSUD Sungai Dareh**				
	Tahun 2019	5.784.900,00	Kurang lancar	10,00%	578.490,00
	Tahun 2021	12.055.740.523,00	Kurang lancar	10,00%	1.205.574.052,30
	Jumlah	**12.061.525.423,00**			**1.206.152.542,30**
	Total 1 + 2	**13.310.387.523,00**			**1.216.003.727,80**

b) Penyisihan Piutang Dana Bergulir

Penyisihan Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2021 sebesar Rp554.897.679,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.20
Penyisihan Piutang Dana Bergulir Tahun 2021

No	Uraian	Kualitas Piutang	Nilai Piutang	(%) Penyisihan	Jumlah Penyisihan Piutang
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Kec. Pulau Punjung	Macet	122.349.281,00	100%	122.349.281,00
2	Kec. Sitiung	Macet	42.186.005,00	100%	42.186.005,00
3	Kec. Koto Baru	Macet	339.304.897,00	100%	339.304.897,00
4	Kec. Sungai Rumbai	Macet	51.057.496,00	100%	51.057.496,00
	Jumlah		**554.897.679,00**		**554.897.679,00**

c) Penyisihan Piutang TGR sebesar Rp 439.524.347,30 diperoleh dari perhitungan :

Tabel 5.2.21

Penyisihan Piutang Dana Bergulir Tahun 2021

No	Uraian	Nilai Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Piutang TGR 2021	16.043.328,81	lancar	0,5%	80.216,64
2	Piutang TGR 2020	4.394.441.306,56	kurang lancar	10%	439.444.130,66
	Jumlah	**4.410.484.635,37**			**439.524.347,30**

d) Penyisihan Piutang Pengembalian Belanja sebesar Rp5.129.991,00 dari perhitungan (100%xRp5.129.991,00).

		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.C.1.a.12	**Piutang Transfer Pemerintah Pusat**	**0,00**	**6.505.389.322,00**

Nilai Piutang Transfer Pemerintah Pusat Pada Tahun 2021 adalah Rp0,00, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2021. Adapun nilai piutang transfer tahun 2020 sebesar Rp6.505.389.322,00 telah diterima di Kas Daerah selama Tahun 2021.

		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.C.1.a.13	**Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**	**9.630.356.468,00**	**8.967.719.269,00**

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya adalah berupa Dana Bagi Hasil Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2021 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/007/Pjk-Bapenda/2022 tanggal 26 Januari 2022 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/ Kota Se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan Keputusan tersebut, Kabupaten Dharmasraya memiliki alokasi definitif Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp51.935.128.939,00 dengan penerimaan pajak tahun 2021 yang telah masuk ke kas daerah sebesar Rp51.272.491.740,00. Kekurangan salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2021 sebesar Rp9.630.356.468,00 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.2.22
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2021 dan 2020

No	Jenis Bagi Hasil	Definitif 2021	Penerimaan Tahun 2021		Penerimaan LRA 2021	Piutang DBH 2021
			Salur 2021	Piutang 2020		
1	2	3	4	5	6	7=3-4
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	11.061.924.195,00	8.789.829.947,00	4.704.676.479,00	13.494.506.426,00	2.272.094.248,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.122.130.075,00	4.142.608.449,00	774.255.747,00	4.916.864.196,00	1.979.521.626,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	22.319.383.208,00	16.951.249.331,00	3.468.666.824,00	20.419.916.155,00	5.368.133.877,00
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	109.364.875,00	98.758.158,00	20.120.219,00	118.878.377,00	10.606.717,00
5	Pajak Rokok	12.322.326.586,00	12.322.326.586,00	0,00	12.322.326.586,00	0,00
	Jumlah	**51.935.128.939,00**	**42.304.772.471,00**	**8.967.719.269,00**	**51.272.491.740,00**	**9.630.356.468,00**

Penerimaan Dana Bagi hasil Provinsi yang telah diterima di Kas Daerah selama Tahun 2021 adalah sebesar sebesar Rp51.272.491.740,00 berasal dari penerimaan tahun 2021 sebesar Rp42.304.772.471,00 dan penerimaan piutang kurang salur Tahun 2020 sebesar Rp8.967.719.269,00. Piutang kurang salur Dana Bagi Hasil Provinsi Tahun 2021 adalah sebesar Rp9.630.356.468,00.

			Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.C.1.a.14	**Piutang Lainnya**	**Pendapatan**	**13.050.752,00**	**13.050.752,00**

Berdasarkan Berita Acara Pembatalan Pelaksanaan Pekerjaan No.02.BA-PPP/AIR/DPU-PR/X-2017 tanggal 31 Oktober 2017 atas Pekerjaan Turap/Penahan Tebing Ampang Kuranji dengan Nomor Kontrak 610.2/21-PU-PR/PPk-AIR/PJI-PTAK/APBD/VIII-2017 tanggal 10 Agustus 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp398.773.000,00 telah disetor ke rekening kontraktor sebanyak uang muka 30% yaitu sebesar Rp119.631.900,00 (termasuk PPN dan PPh), pihak kontraktor atas nama CV.Artha Mandiri bersedia mengembalikan uang muka pelaksanaan pekerjaan dengan SPP No.931.DPU-PR/2017 tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp106.581.148,00 diluar PPN dan PPh sebesar Rp13.050.752,00.

CV. Artha Mandiri telah mengembalikan uang muka sebesar Rp106.581.148,00 ke Kas Daerah dengan dua kali penyetotan yaitu tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp90.000.000,00 dan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp16.581.148,00. Masih terdapat sisa piutang sebesar Rp13.050.752,00 yang merupakan kompensasi pajak untuk penggantian pembayaran pajak yang telah terlanjur disetor ke Kas Negara untuk dikompensasi dengan penyetoran ke Kas Daerah oleh CV Artha Mandiri.

Pada Bulan Desember 2018, sesuai pernyataan dari Direktur CV. Lubuk Karya yang menyatakan bahwa menyetujui untuk mengalihkan kompensasi pembayaran pajak negara sebesar Rp13.050.752,00 dari CV. Artha mandiri ke CV. Lubuk Karya Disebabkan karena adanya kegiatan kontrak pembangunan gedung kantor dengan nomor kontrak 640/020/036-PL/PGK-APBD/CK-DPUPR/2018 dilaksanakan oleh CV. Lubuk Karya dan penyetoran PPN yang seharusnya disetorkan ke Kas Negara dilakukan kompensasi untuk disetorkan ke kas daerah. Setelah uang pembayaran kegiatan 100% masuk ke rekening CV. Lubuk Karya pada tanggal 29 Desember 2018, Direktur Lubuk Karya belum menyetorkan kompensasi pajak ke daerah sebesar Rp13.050.752,00 sampai saat ini. Terhadap piutang ini telah dilakukan beberapa kali penagihan, terakhir pada tanggal 30 November 2020.

Pada saat Laporan Keuangan ini disusun, pihak CV. Lubuk Karya telah melakukan penyetoran kompensasi pembayaran pajak negara sebesar Rp13.050.752,00 ke Kas Daerah pada tanggal 25 Februari 2022.

Penyisihan Piutang Lainnya Tahun 2021 sebesar Rp13.050.752,00 (13.050.752,00 x 100%).

		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.C.1.a.15	**Belanja Dibayar Dimuka**	**1.558.223.934,04**	**231.012.527,83**

Belanja Dibayar Dimuka pada Tahun 2021 dan 2020 terdiri dari.

		2021	2020
a)	Belanja Jasa Dibayar Dimuka	223.112.084,04	218.683.760,71
b)	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Dibayar Dimuka	1.335.111.850,00	0
	Jumlah	**1.558.223.934,04**	**218.683.760,71**

a) Belanja Jasa Dibayar Dimuka sebesar Rp223.112.084,04

Beban Jasa Dibayar Dimuka pada Tahun 2021 sebesar Rp223.112.084,04 merupakan pembayaran premi asuransi kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah sebesar Rp138.298.412,39 dan Sekretariat DPRD sebesar Rp84.813.671,65.

Tabel 5.2.23
Belanja Jasa Dibayar Dimuka Tahun 2021

No	SKPD	Nilai Kontrak	TMT Kontrak	No. Plat Kendaraan/ Aset	Asuransi dibayar dimuka	Beban Asuransi
1	2	3	4	5	6	7=3-6
1	**Sekretariat Daerah**					
		8.077.500,00	15 Februari 2021 s.d 15 Februari 2022	BA 1567 V	1.017.986,30	7.059.513,70
		28.739.770,00	02 April 2021 s.d 02 April 2022	BA 8010 V, BA 10 V	7.243.996,82	21.495.773,18
		13.511.425,00	26 Agustus 2021 s/d 26 Agustus 2022	BA 1552 V, BA 8012 V	8.810.189,45	4.701.235,55
		6.711.017,00	28 Februari 2021 s/d 15 Februari 2022	BA 1706 VG	877.007,90	5.834.009,10
		6.742.000,00	31 Januari 2021 s/d 31 Januari 2022	BA 1038 V	572.608,22	6.169.391,78
		128.206.650,00	07 Desember 2021 s/d 07 Desember 2022	21 KENDARAAN	119.776.623,70	8.430.026,30
	Jumlah	**191.988.362,00**			**138.298.412,39**	**53.689.949,61**
2	**Sekretariat Dewan**					
		5.994.300,00	01 April 2021 s.d 01 April 2022	BA 7002 V	1.494.469,32	4.499.830,68
		6.283.300,00	01 April 2021 s.d 01 April 2022	BA 7003 V	1.566.521,37	4.716.778,63
		6.283.300,00	01 April 2021 s.d 01 April 2022	BA 7004 V	1.566.521,37	4.716.778,63
		11.183.000,00	01 April 2021 s.d 01 April 2022	BA 3 V	2.788.090,41	8.394.909,59
		10.377.500,00	01 April 2021 s.d 01 April 2022	BA 8 V	2.587.267,12	7.790.232,88
		10.506.250,00	01 April 2021 s.d 01 April 2022	BA 9 V	2.619.366,44	7.886.883,56
		6.742.000,00	01 April 2021 s.d 01 April 2022	BA 1864 VH	1.680.882,19	5.061.117,81
		8.060.000,00	01 April 2021 s.d 01 April 2022	BA 13 V	2.009.479,45	6.050.520,55
		6.227.750,00	01 April 2021 s.d 01 April 2022	BA 1740 VA	1.552.671,92	4.675.078,08

No	SKPD	Nilai Kontrak	TMT Kontrak	No. Plat Kendaraan/ Aset	Asuransi dibayar dimuka	Beban Asuransi
1	2	3	4	5	6	7=3-6
		6.276.250,00	01 April 2021 s.d 01 April 2022	BA 1774 VA	1.564.763,70	4.711.486,30
		74.812.000,00	15 November 2021 s.d 15 November 2022	Gedung DPRD	65.383.638,36	9.428.361,64
	Jumlah	**152.745.650,00**			**84.813.671,65**	**67.931.978,35**
	Total	**344.734.012,00**			**223.112.084,04**	**121.621.927,96**

b) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Dibayar Dimuka sebesar Rp1.335.111.850,00

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Dibayar Dimuka merupakan hasil rekonsiliasi antara KPPN Sijunjung, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dan BPJS Kesehatan yang terdapat kelebihan bayar iuran 1% dan 4 % atas Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.24
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Tahun 2021

No	Uraian	Keterangan	Jumlah
1	Kelebihan bayar TPP	Iuran 1 %	207.710.735,00
2	Kelebihan bayar Gaji Induk/TPP/TPG	Iuran 4 %	1.127.401.115,00
		Jumlah	**1.335.111.850,00**

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.C.1.a.16 Persediaan	**38.086.898.001,69**	**27.219.306.442,17**

Akun persediaan digunakan untuk mencatat barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan/atau dijual /diserahkan/digunakan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut.

Tabel 5.2.25
Persediaan Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Persediaan Bahan habis pakai		**32.935.792.576,69**	**13.940.041.709,47**
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.861.619.447,00	-
2	Bahan Kimia	111.963.419,00	55.681.900,00
3	Bahan Bakar dan Pelumas	58.260.190,60	-
4	Bahan/Bibit Tanaman	141.437.500,00	-
5	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	-	77.834.000,00
6	Bahan Lainnya	353.913.915,00	5.292.518.806,28
7	Suku Cadang Alat Kedokteran	3.829.289.361,60	2.855.800.076,08
8	Suku Cadang Alat Laboratorium	193.477.868,42	263.906.295,53
9	Alat Tulis Kantor	109.123.836,00	50.617.167,00
10	Kertas dan Cover	4.031.654,41	
11	Bahan Cetak	172.872.400,00	137.573.250,00
12	Benda Pos	1.020.000,00	801.000,00
13	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	-
14	Bahan Komputer	911.000,00	-
15	Perabot Kantor	48.364.850,00	17.653.100,00
16	Alat Listrik	2.351.000,00	1.176.000,00
17	Obatan-Obat	4.368.904.654,83	5.186.480.114,58
18	Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	18.653.213.979,83	-
19	Material makanan	25.037.500,00	-
Persediaan lainnya		***5.151.105.425,00***	***13.279.264.732,70***
1	Persediaan barang yg berasal Belanja Modal yang akan diberikan pada masyarakat/ pihak ketiga	1.762.731.600,00	1.762.731.600,00
2	Persediaan barang yg berasal Belanja Modal	783.098.550,00	308.888.550,00
3	Pers. Brg yg akan diberikan kepada masyarakat	752.416.805,00	7.367.115.240,00

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
4	Pers. Brg yg akan diberikan pd pihak ke- 3	353.838.000,00	353.838.000,00
5	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.153.895.000,00	-
6	Persediaan Sumbangan dari Pihak ketiga	345.125.470,00	3.117.400.319,00
	Persediaan Dana BTT	-	97.825.273,70
	Persediaan Dana KLB	-	271.465.750,00
Jumlah		**38.086.898.001,69**	**27.219.306.442,17**

Dengan rincian persediaan per SKPD Tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 5.2.26
Persediaan per SKPD Tahun 2021

No	SKPD	Persediaan Habis Pakai	Persediaan lainnya	Total Persediaan
1	2	3	4	5=3+4
1	Dinas Pendidikan	2.306.000,00	-	2.306.000,00
2	Dinas Kesehatan	3.639.762.116,06	-	3.639.762.116,06
3	BLUD Puskesmas	2.798.820.627,03	90.498.700,00	2.889.319.327,03
4	RSUD Sungai Dareh	405.692.485,00	-	405.692.485,00
5	BLUD RSUD Sungai Dareh	1.957.364.971,76	6.250.000,00	1.963.614.971,76
6	Dinas PUPR	21.687.210.309,52	4.103.403.150,00	25.790.613.459,52
7	Dinas Perkimtan	1.950.907.270,32	-	1.950.907.270,32
8	Dinas Satpol Pp & Damkar	425.000,00	-	425.000,00
9	BPBD	516.000,00	124.345.500,00	124.861.500,00
10	DINSOSP3APPKB	32.338.000,00	702.576.805,00	734.914.805,00
11	Dinas Pangan dan Perikanan	94.900.000,00	-	94.900.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	17.764.619,00	-	17.764.619,00
13	Disdukcapil	180.477.900,00	-	180.477.900,00
14	Dinas PMD	234.200,00	-	234.200,00

No	SKPD	Persediaan Habis Pakai	Persediaan lainnya	Total Persediaan
1	2	3	4	5=3+4
15	Dinas Perhubungan	30.800.000,00	-	30.800.000,00
16	Dinas Kominfo	-	-	-
17	Diskumperdag	154.000,00	-	154.000,00
18	Dinas PMPTSP	4.137.400,00	-	4.137.400,00
19	Dinas Budparpora	1.163.810,00	-	1.163.810,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	350.000,00	-	350.000,00
21	Dinas Pertanian	91.728.500,00	-	91.728.500,00
22	Dinas Transnaker	598.950,00	-	598.950,00
23	Sekretariat Daerah	796.060,00	-	796.060,00
24	Sekretariat DPRD	345.808,00	-	345.808,00
25	Bappeda	1.108.000,00	-	1.108.000,00
26	BKD	32.066.350,00	124.031.270,00	156.097.620,00
27	BKPSDM	-	-	-
28	Inspektorat	794.000,00	-	794.000,00
29	Kecamatan Pulau Punjung	100.000,00	-	100.000,00
30	Kecamatan Sitiung	135.000,00	-	135.000,00
31	Kecamatan Koto Baru	436.800,00	-	436.800,00
32	Kecamatan Sungai Rumbai	933.000,00	-	933.000,00
33	Kecamatan IX Koto	265.000,00	-	265.000,00
34	Kecamatan Timpeh	144.000,00	-	144.000,00
35	Kecamatan Koto Salak	158.000,00	-	158.000,00
36	Kecamatan Asam Jujuhan	186.400,00	-	186.400,00
37	Kecamatan Koto Besar	572.000,00	-	572.000,00
38	Kecamatan Padang Laweh	100.000,00	-	100.000,00
39	Kecamatan Tiumang	-	-	-

No	SKPD	Persediaan Habis Pakai	Persediaan lainnya	Total Persediaan
1	2	3	4	5=3+4
40	Kesbangpol	-	-	-
	JUMLAH	**32.935.792.576,69**	**5.151.105.425,00**	**38.086.898.001,69**

Nilai Persediaan Tahun 2021 sebesar Rp38.086.898.001,69 mengalami kenaikan sebesar Rp10.867.591.559,52 atau 39,93% dibandingkan Persediaan Tahun 2020 sebesar Rp27.219.306.442,17. Kenaikan ini terjadi pada persediaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat karena adanya barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp18.653.213.979,83.

Sementara itu, berdasarkan dari hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) persediaan obat-obatan dan bahan makanan terdapat beberapa item yang sudah kadaluarsa sebesar Rp299.741.190,33 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.2.26.a
Persediaan Kadaluarsa Tahun 2021

No	SKPD	Uraian			
		Obat	Bahan Labor	Habis Pakai	Bahan Makanan
1	Dinas Kesehatan	237.495.044,00	-	-	-
2	BLUD Puskesmas	62.246.146,33	-	-	-
Jumlah		**299.741.190,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Adapun penjelasan lebih terinci terkait Persediaan per SKPD Tahun 2021 dapat di lihat pada **Lampiran 19** Laporan Keuangan ini.

		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.C.1.b.1.	**Investasi Jangka Panjang**	**27.452.000.000,00**	**27.452.000.000,00**

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari dua belas bulan. Investasi Jangka Panjang yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp27.452.000.000,00 merupakan Investasi Permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Sumatera Barat (Bank Nagari), PT Balairung Citrajaya Sumbar, dan BPR Pulau Punjung. Adapun perkembangan penyertaan modal pada ketiga *investee* tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Penyertaan Modal Pemerintah pada Bank Nagari

Saldo Per 31 Desember 2020	Rp	25.852.000.000,00
Penambahan selama Tahun 2021	Rp	0,00
Saldo Per 31 Desember 2021	Rp	25.852.000.000,00

Penyertaan Modal Pemerintah pada Bank Nagari tersebut terdiri dari.

a) Tahun 2007 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.000013 dengan nilai nominal Rp1.000.000.000,00;
b) Tahun 2009 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.000033 dengan nilai nominal Rp322.000.000,00;
c) Tahun 2010 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.000052 dengan nilai nominal Rp9.678.000.000,00;
d) Tahun 2012 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.000088 dengan nilai nominal Rp3.200.000.000,00 dan Surat Kolektif Saham Nomor A.000102 dengan nilai nominal Rp36.000.000,00;
e) Tahun 2013 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.000118 dengan nilai nominal Rp5.369.000.000,00 dan Surat Kolektif Saham Nomor A.000131 dengan nilai nominal Rp31.000.000,00.
f) Tahun 2017 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.1427724-1431444 dengan nilai nominal Rp3.716.000.000,00.
g) Tahun 2019 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.000232 dengan nilai nominal Rp2.500.000.000,00

Sampai dengan 31 Desember 2021 Investasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada Bank Nagari sebesar Rp25.852.000.000,00 dengan persentase kepemilikan sebesar 1,48%, dengan penerimaan deviden pada tahun 2021 adalah sebesar Rp0,00 sehingga pendapatannya tidak mempengaruhi kepemilikan investasi.

2) Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Balairung Citrajaya Sumbar

Saldo Per 31 Desember 2020	Rp	1.500.000.000,00
Penambahan selama Tahun 2021	Rp	0,00
Saldo Per 31 Desember 2021	Rp	1.500.000.000,00

Investasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada PT Balairung Citra Jaya Sumatera Barat di Jakarta senilai Rp1.500.000.000,00 dengan jumlah modal disetor keseluruhan sebesar Rp164.025.990.000,00 sehingga kepemilikan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebesar 0,91% . Pada tahun 2008 bersama-sama Pemerintah Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menanamkan investasi pada pembangunan Balairung Sumatera Barat. Investasi ini didasarkan pada Addendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah

Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat nomor 030-424.1-2007.

PT Balairung Citrajaya Sumbar merupakan BUMD Pemerintah Provinsi Sumater Barat yang bergerak pada bidang usaha hotel. Restoran, dan fasilitas pendukung lainnya. Penyertaan modal pada PT Balairung Citrajaya Sumbar sesuai dengan Surat Saham Gabungan Nomor 012 dengan nilai nominal Rp1.500.000.000,00.

Jumlah lembar saham sebanyak 600.900 lembar terdiri dari :

a. Saham seri A sebanyak : 900 lembar/ no.seri 55.296 s.d. 56.195
b. Saham seri B sebanyak 600.000 lembar/ no.seri 36.864.299 s.d. 464.298

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya belum memperoleh bagi hasil dari penyertaan modal pada Balairung, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menggunakan metode biaya karena kepemilikan hanya sebesar 0,91% dari ekuitas Balairung sehingga pendapatannya tidak mempengaruhi kepemilikan investasi.

3) Penyertaan Modal Pemerintah pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pulau Punjung

Saldo Per 31 Desember 2020	Rp	100.000.000,00
Penambahan selama Tahun 2021	Rp	0,00
Saldo Per 31 Desember 2021	Rp	100.000.000,00

Penyertaan Modal Pemerintah pada BPR Pulau Punjung pada Tahun 2012 sesuai dengan Surat Saham Biasa Nomor Seri B 0542 dengan nilai nominal Rp100.000.000,00.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya belum memperoleh bagi hasil dari penyertaan modal pada BPR Pulau Punjung. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menggunakan metode biaya karena kepemilikan hanya sebesar 1,92% dari ekuitas PT BPR Pulau Punjung sehingga pendapatannya tidak mempengaruhi kepemilikan investasi.

V.C.1.c. ASET TETAP

Aset Tetap Adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Dalam rangka penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016 tentang kodefikasi dan penggolongan Barang Milik Daerah dan lebih detail daiatur dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud, kebijakan ini dimulai sejak pelaporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2019, pelaporan tahun ini merupakan tahun kedua Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menerapkannya.

Nilai Aset tetap yang tidak berubah sebagai akibat implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a. Aset Tetap Tanah
b. Aset Tetap Jalan, iragasi dan jaringan
c. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset tetap yang berubah sebagai akibat implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a. KIB peralatan mesin dari 9 (sembilan) sub KIB menjadi 19 (sembilan belas) sub KIB
b. KIB Bangunan gedung dari 2 (dua) sub KIB menjadi 4 (empat) sub KIB
c. KIB Aset Tetap Lainnya dari 4 (empat) sub KIB menjadi 6 (enam) sub KIB
d. Aset tetap rambu-rambu yang semula dicatat pada KIB Bangunan Gedung (sub KIB monumen) pindah ke KIB peralatan mesin sub KIB rambu-rambu
e. Aset tetap peralatan olahraga yang semula di catat pada KIB Aset Tetap Lainnya pindah ke KIB Peralatan Mesin sub KIB peralatan olahraga
f. Saldo aset lain-lain berubah mengikut pada perpindahan aset rambu-rambu dan alat olahraga

Rekapitulasi Saldo Aset Tetap 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020(Audited)	Tren
	Rp.	Rp.	%
ASET TETAP	3.328.997.992.524,58	3.112.087.081.289,71	106,97%

a.	**Tanah**	667.421.012.047,00	649.170.781.447,00	102,81%
b.	**Peralatan dan Mesin**	365.830.496.579,36	310.784.964.569,44	117,71%
c.	**Gedung dan Bangunan**	828.611.661.247,80	665.269.927.412,85	124,55%
d.	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**	1.347.104.392.370,42	1.268.023.945.040,42	106,24%
e.	**Aset Tetap Lainya**	108.279.890.823,00	105.717.574.583,00	102,42%
f.	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	11.750.539.457,00	113.119.888.237,00	10,39%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(1.055.277.207.905,60)	(901.217.948.545,60)	117,09%
Nilai Buku Aset Tetap		2.273.720.784.618,98	2.210.869.132.744,11	102,84%

Dari tabel diatas jika dibandingkan nilai Aset Tetap audited 2020 dengan 31 Desember 2021 terjadi kenaikan sebesar Rp62.851.651.874,87 atau sebesar 102,84%

Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2021 dapat dlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.27
Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Berdasarkan Jenis Aset Tetap

KIB/Sub KIB	Saldo Aset Tetap 2020 (Audited)	Jumlah Penambahan Aset 2021	Jumlah Pengurangan Aset 2021	Saldo Aset 2021
ASET TETAP	**3.112.087.081.289,71**	**345.571.947.580,47**	**128.661.036.345,60**	**3.328.997.992.524,58**
Tanah	**649.170.781.447,00**	**18.612.144.100,00**	**361.913.500,00**	**667.421.012.047,00**
Tanah	649.170.781.447,00	18.612.144.100,00	361.913.500,00	667.421.012.047,00
Peralatan dan Mesin	**310.784.964.569,44**	**60.324.332.645,92**	**5.278.800.636,00**	**365.830.496.579,36**
Alat Besar	27.923.157.225,00	23.049.700,00	399.088.100,00	27.547.118.825,00
Alat Angkutan	71.285.166.624,00	7.661.352.600,00	2.412.464.600,00	76.534.054.624,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.333.229.755,00	14.254.100,00	-	8.347.483.855,00
Alat Pertanian	1.927.631.646,00	332.380.493,00	326.828.000,00	1.933.184.139,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	55.109.843.647,50	10.169.599.707,85	538.349.900,00	64.741.093.455,35
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	18.885.503.837,00	2.888.262.578,00	47.302.500,00	21.726.463.915,00
Alat Kedokteran Dan Kesehatan	57.693.983.235,74	26.158.176.132,76	370.361.000,00	83.481.798.368,50
Alat Laboratorium	26.830.593.202,20	2.473.450.898,16	961.259.000,00	28.342.785.100,36
Alat Persenjataan	135.980.340,00	-	-	135.980.340,00

KIB/Sub KIB	Saldo Aset Tetap 2020 (Audited)	Jumlah Penambahan Aset 2021	Jumlah Pengurangan Aset 2021	Saldo Aset 2021
Komputer	39.792.402.133,00	10.469.830.186,15	223.147.536,00	50.039.084.783,15
Alat Eksplorasi	-	-	-	-
Alat Pengeboran	-	-	-	-
Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	-	34.900.000,00	-	34.900.000,00
Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-
Alat Keselamatan Kerja	636.074.462,00	68.826.250,00	-	704.900.712,00
Alat Peraga	-	-	-	-
Peralatan Proses/Produksi	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
Rambu - Rambu	1.722.751.150,00	-	-	1.722.751.150,00
Peralatan Olah Raga	496.647.312,00	30.250.000,00	-	526.897.312,00
Gedung dan Bangunan	**665.269.927.412,85**	**177.253.251.929,55**	**13.911.518.094,60**	**828.611.661.247,80**
Bangunan Gedung	633.564.375.405,83	175.764.958.875,65	13.180.378.046,70	796.148.956.234,78
Monumen	6.442.214.368,00	-	-	**6.442.214.368,00**
Bangunan Menara	3.102.481.906,00	-	-	3.102.481.906,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	22.160.855.733,02	1.488.293.053,90	731.140.047,90	**22.918.008.739,02**
Jalan, Irigasi dan Jaringan	**1.268.023.945.040,42**	**79.091.067.330,00**	**10.620.000,00**	**1.347.104.392.370,42**
Jalan Dan Jembatan	1.030.757.727.509,83	47.267.625.100,00	-	1.078.025.352.609,83
Bangunan Air	175.072.306.383,66	20.225.747.891,00	10.620.000,00	195.287.434.274,66
Instalasi	30.801.227.625,00	7.807.099.354,00	-	38.608.326.979,00
Jaringan	31.392.683.521,93	3.790.594.985,00	-	35.183.278.506,93
Aset Tetap Lainya	**105.717.574.583,00**	**2.666.091.240,00**	**103.775.000,00**	**108.279.890.823,00**
Bahan Perpustakaan	34.373.285.309,00	2.389.791.240,00	-	36.763.076.549,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	2.719.874.878,00	-	-	2.719.874.878,00
Hewan	188.036.000,00	-	64.290.000,00	123.746.000,00
Biota Perairan	-	77.250.000,00	35.250.000,00	42.000.000,00
Tanaman	65.552.000,00			65.552.000,00

KIB/Sub KIB	Saldo Aset Tetap 2020 (Audited)	Jumlah Penambahan Aset 2021	Jumlah Pengurangan Aset 2021	Saldo Aset 2021
Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	-
Aset Tetap Dalam Renovasi	68.370.826.396,00	199.050.000,00	4.235.000,00	68.565.641.396,00
KDP	**113.119.888.237,00**	**7.625.060.335,00**	**108.994.409.115,00**	**11.750.539.457,00**
Konstruksi Dalam Pengerjaan	113.119.888.237,00	7.625.060.335,00	**108.994.409.115,00**	11.750.539.457,00
Penyusutan Aset Tetap	(901.217.948.545,60)	(158.005.315.092,86)	(3.946.055.732,86)	(1.055.277.207.905,60)
Nilai Buku	**2.210.869.132.744,11**	**187.566.632.487,61**	**124.714.980.612,74**	**2.273.720.784.618,98**

Rekapitulasi Saldo Aset Tetap 2021 dengan rician sebagai berikut :

1. Berdasarkan jenis Aset Tetap dapat dilihat pada Lampiran 20
2. Berdasarkan Saldo Aset Tetap 2020 Audited dapat dilihat pada lampiran 21
3. Berdasarkan Jumlah Penambahan Aset Tetap 2021 dapat dilihat pada Lampiran 22
4. Berdasarkan Jumlah Penambahan Aset Tetap 2021 dapat dilihat pada Lampiran 23
5. Berdasarkan Jumlah Penambahan Aset Tetap 2021 dapat dilihat pada Lampiran 24

   Laporan Keuangan ini

Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap pada tahun 2021 disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

Tabel 5.2.28
Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Berdasarkan Perolehan

Saldo Aset Tetap 31 Desember 2020 (Audited)		3.112.087.081.289,71
Penambahan 2021		345.571.947.580,47
1	Penambahan Belanja Modal Menjadi Aset	131.558.216.550,87
2	Penambahan Belanja Modal Bos Reguler Menjadi Aset	4.478.231.153,00
3	Penambahan Belanja Modal BOS Afirmasi Menjadi Aset	277.959.500,00
4	Penambahan Belanja Modal BOS Kinerja Menjadi Aset	119.500.500,00
5	Penambahan Belanja Modal BLUD Menjadi Aset	924.660.490,00
6	Penambahan Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset	850.155.800,00
7	Penambahan Barang dan Jasa BLUD Menjadi Aset	172.964.000,00

Saldo Aset Tetap 31 Desember 2020 (Audited)		**3.112.087.081.289,71**
8	Penambahan Honor Pokja Menjadi Aset	177.570.000,00
9	Penambahan Hibah Pusat Menjadi Aset	58.481.051.788,00
10	Penambahan Hibah Provinsi Menjadi Aset	398.264.659,00
11	Penambahan Hibah Pihak Ketiga / Masyarakat Menjadi Aset	28.710.000,00
12	Penambahan Penilaian Kurang Catat Menjadi Aset	18.056.287.600,00
13	Penambahan Penilaian Hibah Provinsi Menjadi Aset	-
14	Penambahan Penilaian Hibah Pihak Ketiga / Masyarakat Menjadi Aset	810.750.000,00
15	Penambahan BOSDA/BOP PAUD Menjadi Aset	41.250.000,00
16	Penambahan Kurang Catat Menjadi Aset	128.709.484,00
17	Penambahan Mutasi Antar OPD	15.788.597.387,60
18	Penambahan Mutasi Honor Pokja	173.010.000,00
19	Penambahan reklas aset tetap/lainnya/ekstrakompatibel	326.828.000,00
20	Penambahan Reklas sesama Aset Tetap/lainnya/ektrakompatibel	107.888.027.968,00
21	Retensi	4.891.202.700,00
22	Penambahan Koreksi	-
Pengurangan 2021		128.661.036.345,60
1	Pengurangan Reklas Sesama Aset Tetap/lainnya/Ekstrakompatibel	107.888.027.968,00
2	Pengurangan Mutasi Antar OPD	15.788.597.387,60
3	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	173.010.000,00
4	Pengurangan Koreksi	258.641.604,00
5	Penghapusan	727.966.000,00
6	Pengurangan ReklasTetap/Lainnya/ Ekstrakompabel	3.824.793.386,00
Saldo Aset Tetap 31 Desember 2021		**3.328.997.992.524,58**

Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Aset Tetap pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.29

Penambahan Dan Pengurangan Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2020 (Audited)		**901.217.948.545,60**
Penambahan Penyusutan 2021		158.005.315.092,86
1	Penambahan Penyusutan Mutasi Antar OPD	1.241.281.457,86
2	Penambahan Penyusutan Reklas	14.122.425,00
3	Penambahan Penyusutan Koreksi	291.434.749,00
4	Penyusutan Semester I	80.759.233.175,00
5	Penyusutan Semester II	75.699.243.286,00
Pengurangan Penyusutan 2021		3.946.055.732,86
1	Pengurangan Penyusutan Mutasi Antar OPD	1.241.281.457,86
2	Pengurangan Penyusutan Reklas	1.749.663.526,00
3	Pengurangan Penyusutan Penghapusan	663.676.000,00
4	Pengurangan Penyusutan Koreksi	291.434.749,00
Akumulasi PenyusutanAset Tetap 31 Desember 2021		1.055.277.207.905,60
Nilai Buku Aset Tetap 31 Desember 2021		**2.273.720.784.618,98**

Rekapitulasi Saldo Aset Tetap 2021 dengan rician sebagai berikut

1. Berdasarkan Akumulasi Penyusutan 2020 (Audited) dapat dilihat pada Lampiran 25
2. Berdasarkan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2021 dapat dilihat pada lampiran 26
3. Berdasarkan Nilai Buku 2021 dapat dilihat pada lampiran 27

Rincian Aset Tetap menurut Jenis dan Perangkat Daerah dapat diikhtisarkan sebagai berikut **:**

V.C.1.c.1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, termasuk yang dipakai/ dikelola entitas lainnya dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk pertanian perkebunan, gedung, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Atas nilai tanah diungkapkan beberapa hal berikut :

1. Tanah diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria berikut :
   - mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan,
   - biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal,
   - tidak dimaksudkan untuk dijual, dan
   - diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

   Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah daerah.
2. Tanah tidak mempunyai nilai kapitalisasi minimum.
3. Tanah dicatat sebesar nilai perolehan berupa :
   - Harga fisik tanah
   - Biaya lainnya dalam rangka memperoleh aset tanah tersebut (Biaya Perencanaan, Perijinan, *Aprraisal, sertifikat,* Ukur dan lain-lain)

Pada saat ini tanah yang tercatat sebagai aset tetap tanah sejumlah 718 persil tanah, yang sudah bersertifikat sebanyak 210 sertifikat. Adapun rincian tanah yang sudah bersertifikat tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.30

Daftar Tanah Bersertifikat

No	Peruntukan Pada Sertifikat	Lokasi	No	Luas (M2)	Tanggal Sertfikat
1	SD 04 Gunung Medan	Nagari Gunung Medan	4	8.124	13 Maret 2019
2	Fasilitas Umum	Nagari Sungai Duo	186	25.810	26 Desember 2018
3	Fasilitas Umum	Nagari Kurnia Koto Salak	2	15.880	26 Desember 2018
4	Fasilitas Umum	Nagari Kurnia Koto Salak	1	8.338	26 Desember 2018
5	Pembangunan SMKN 2 Kurnia Koto Salak	Nagari Kurnia Koto Salak	3	20.180	15 Februari 2018
6	TKN 01 Pulau Punjung	Nagari IV Koto Pulau Punjung	4	989	26 Desember 2018
7	SDN 11 Pulau Punjung	Nagari IV Koto Pulau Punjung	3	8.820	11 Desember 2018
8	Pembangunan Pasar Ternak Pulau Punjung	Nagari Gunung Medan	3	30.000	25 Februari 2018
9	Pembangunan Puskesmas Gunung Medan	Nagari Gunung Medan	2	3.800	25 Februari 2018
10	SDN 01 Pulau Punjung	Nagari IV Koto Pulau Punjung	5	2.144	25 February 2019
11	Pembangunan SMPN 08 Tebing Tinggi	Nagari Tebing Tinggi	2	8.357	25 Februari 2018
12	Pembangunan Fasilitas Umum	Nagari Sikabau	1	20.611	08 Oktober 2015

No	Peruntukan Pada Sertifikat	Lokasi	No	Luas (M2)	Tanggal Sertfikat
13	Pembangunan Rusunawa	Nagari Sungai Kambut	8	1.957	26 Desember 2018
14	Pembangunan Rusunawa	Nagari Sungai Kambut	7	9.479	26 Desember 2018
15	Pembangunan Rusunawa	Nagari Sungai Kambut	6	9.654	26 Desember 2018
16	SD 34 Lubuk Karak	Lubuk Karya	1	12.435	08 Maret 2018
17	SDN 07 Timpeh	Nagari Timpeh	6	6.290	22 April 2003
18	SDN 01 Koto Salak	Koto Salak	216	2.110	15 April 2004
19	SDN 01 Koto Baru	Koto Baru	1	2.670	15 April 2004
20	SDN 3 Koto Baru	Sialang Gaung	64	1.314	15 April 2004
21	Rumah Dinas Staf Koto Baru	Seberang Piruko	7	2.265	04 Agustus 2001
22	Kantor Camat Koto Baru	Seberang Piruko	4	1.445	07 Juni 2001
23	Rumah Dinas Camat Koto Baru	Seberang Piruko	5	1.560	07 Juni 2001
24	Perumahan Ampalu Koto Salak	Ampalu	1	1.400	07 Juni 2001
25	SDN 07 Koto Baru	Koto Baru	2	4.430	15 April 2004
26	Rumah Dinas Kesehatan Koto Baru	Seberang Piruko	10	2.310	04 Agustus 2001
27	Gedung UDKP Koto Baru	Seberang Piruko	6	1.435	07 Juni 2001
28	Kantor Camat Koto Baru	Seberang Piruko	8	3.290	04 Agustus 2001
29	Kantor Kepala Desa Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	5	1.355	07 Juni 2001
30	SDN 07 Banai	Nagari Banai	1	2.942	11 September 2014
31	SDN 16 Sikabau	Nagari Sikabau	6	13.070	22 April 2016
32	Fasilitas Umum Taratak Tinggi (Tanah Mesjid Syuhada)	Nagari Taratak Tinggi	2	6.043	18 Januari 2017
33	Fasilitas Umum Taratak Tinggi (Tanah Lapangan Bola Kaki)	Nagari Taratak Tinggi	3	35.000	18 Januari 2017
34	SDN 05 Sialang Gaung	Sitiung	128	2.045	08 Maret 2003
35	SDN 01 Sitiung	Sitiung	126	3.840	08 Maret 2003
36	SDN 13 Sitiung	Sitiung	127	3.880	08 Maret 2003
37	SDN 04 Timpeh	Timpeh	1	5.420	08 Maret 2003
38	SDN 08 Timpeh	Timpeh	2	21.590	08 Maret 2003
39	SDN 35 Seberang Piruko	Mayang Taurai	2	17.815	04 Agustus 2001
40	SDN 08 Sitiung	Sitiung	123	4.420	08 Maret 2003-
41	SMPN 1 Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	4	22.000	19 Januari 1994
42	SDN 09 Koto Besar	Mayang Taurai	5	4.550	08 Maret 2003
43	SDN 11 Koto Besar	Koto Besar	2	3.250	08 Maret 2003
44	SMPN 2 Koto Besar	Mayang Taurai	1	14.750	29 Maret 1999
45	SMPN 1 Timpeh	Pinang Makmur	1	20.960	29 Maret 1999
46	SMPN 1 Tiumang	Lagan Jaya	1	28.670	29 Maret 1999
47	Puskesmas Koto Baru	Seberang Piruko	9	4.300	04 Agustus 2001

No	Peruntukan Pada Sertifikat	Lokasi	No	Luas (M2)	Tanggal Sertfikat
48	Puskesmas Pembantu Kodrat Sungai Rumbai	Kodrat	3	845	11 Maret 2003
49	SDN 1 Sungai Rumbai	Kurnia	2	8.350	08 Maret 2003
50	SDN 04 Koto Besar	Koto Besar	3	2.550	08 Maret 2003
51	SDN 13 Koto Besar	Mayang Taurai	4	5.250	08 Maret 2003
52	SDN 05 Koto Besar	Bukit Gading	1	2.740	08 Maret 2003
53	SDN 05 Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	7	3.870	08 Maret 2003
54	SDN 02 Koto Besar	Koto Besar	1	2.570	08 Maret 2003
55	SDN 03 Sungai Rumbai	Cahaya Murni	2	1.850	11 Maret 2003
56	SDN 01 Koto Besar	Koto Besar	4	1.490	11 Maret 2003
57	SDN 01 Asam Jujuhan	Sungai Limau	1	3.120	08 Maret 2003
58	SDN 08 Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	8	3.980	08 Maret 2003
59	SDN 07 Koto Besar	Lubuk Karya	2	12.650	08 Maret 2003
60	Gedung Kantor Arsip	Nagari Koto Padang	1	78.335	21 Agustus 2014
61	SDN 02 Sitiung	Siguntur	2	2.580	08 Maret 2003
62	SDN 11 Timpeh	Timpeh	3	7.180	08 March 2003
63	SDN 03 Timpeh	Timpeh	4	8.190	22 April 2003
64	SDN 03 Abai Siat	Abai Siat	1	8.011	28 Februari 2017
65	SMPN 2 Sitiung	Nagari Sitiung	25	10.000	28 Februari 2017
66	Sport Center	Koto Padang	2	2.412.000	16 Januari 2015
67	Fasilitas Umum Nagari Taratak Tinggi	Taratak Tinggi	4	13.850	18 Januari 2017
68	SMPN 1 Sitiung	Koto Agung	8	17.175	16 Oktober 1995
69	SMPN 3 Koto Salak	Nagari Simalidu	28	7.765	20 Februari 2014
70	Puskesmas Sungai Dareh	Sungai Dareh	9	2.540	04 Agustus 2001
71	Rumah Dinas Guru Sungai Dareh	Sungai Dareh		478	07 Juni 2001
72	SDN 04 Sungai Rumbai	Kodrat	2	14.405	08 Maret 2003
73	SDN 45 Kurnia	Kurnia	1	5.070	08 Maret 2003
74	SDN 12 Koto Besar	Bukit Gading	2	8.040	08 Maret 2003
75	SDN 47 Cahaya Murni	Cahaya Murni	1	2.870	08 Maret 2003
76	SDN 30 Siguntur	Kodrat	1	10.930	08 Maret 2003
77	Kantor Camat Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	4	5.105	17 Juli 2001
78	SDN 2 Wanotiung	Tarantang	2	22.250	23 Juni 1998
79	SMPN 2 Koto Baru	Seberang Piruko	2	21.871	12 Maret 1997
80	SMPN 4 Wonotiung	Tanjung Harapan	1	16.050	6 Juli 1994
81	Rumah Dinas Kesehatan	Sungai Dareh	12	1.680	07 Juni 2001
82	Kantor Camat Pulau Punjung	Sungai Dareh	14	4.015	17 Juli 2001

No	Peruntukan Pada Sertifikat	Lokasi	No	Luas (M2)	Tanggal Sertfikat
83	Rumah Dinas Camat Pulau Punjung	Sungai Dareh	15	5.345	17 Juli 2001
84	Kantor Dinas Kesehatan	Sungai Dareh	18	2.385	04 Agustus 2001
85	Fasilitas Umum Pasar Koto Ranah	Nagari Koto Ranah	3	35.000	18 September 2015
86	SDN 18 Sitiung	Sitiung	124	3.070	8 Maret 2003
87	SDN 02 Sitiung	Siguntur	1	2.470	08 Maret 2003
88	Gedung Pertemuan Umum	Sungai Dareh	16	2.170	17 Juli 2001
89	SMPN 1 Pulau Punjung	Sungai Kambut	2	5.540	28 Agustus 1995
90	SMPN 3 Koto Baru	Ampang Kuranji	1	12.000	16 Desember 1997
91	SMPN 1 Koto Besar	Abai Siat	1	18.160	24 Juni 1998
92	UPTD Koto Baru	Seberang Piruko	3	2.540	29 Maret 1999
93	SMPN 1 IX Koto	Silago Ampang Kuranji	1	15.630	29 Maret 1999
94	SDN 03 Sitiung	Jorong Siluluk	3	1.100	11 Maret 2003
95	SMPN 2 Pulau Punjung	Sikabau	1	11.655	30 Desember 1987
96	Lahan Perkebunan (Simpang Blok A Sitiung)	Sitiung	1	15.350	04 Agustus 2001
97	Kantor Desa Bukit Tujuh	Bukit Tujuh	1	6.000	04 Agustus 2001
98	Rumah Dinas Guru SD	Ranah Palabi	1	27.200	04 Agustus 2001
99	Tanah Kas Desa Ranah Palabi	Ranah Palabi	2	226.000	04 Agustus 2001
100	SDN 06 Koto Baru	Ampang Kuranji	1	2.230	15 April 2004
101	SDN 10 Koto Baru	Sialang Gaung	65	2.190	15 April 2004
102	SDN 02 Koto Baru	Ampang Kuranji	2	2.520	15 April 2004
103	SDN 16 Silago (Tiumang)	Tiumang	75	6.560	15 April 2004
104	SDN 02 Tiumang	Tiumang	77	3.970	15 April 2004
105	SDN 24 Padang Tengah	Sitiung	122	2.080	08 Maret 2003
106	Kantor Kepala Desa Pinang Makmur	Pinang Makmur	2	3.965	04 Agustus 2001
107	SDN 11 Sitiung	Sitiung	125	7.140	08 Maret 2003
108	SDN 06 Timpeh	Jorong Marga Makmur	5	4.150	22 April 2003
109	SDN 04 Tiumang	Tiumang	76	12.250	15 April 2004
110	RTH	Sungai Kambut	4	12.810	16 Desember 2016
111	Sisa Broodstock Center	Sungai Dareh	11	48.217	07 Januari 2019
112	Sisa Broodstock Center	Sungai Dareh	10	22.943	07 Januari 2019
113	Pembangunan SMAN 1 Timpeh (Kebun Sawit)	Nagari Panyubarangan	13	20.685	20 Februari 2014
114	Kantor Wali Nagari Koto Ranah	Koto Ranah	5	11.627	25 April 2019
115	SMPN 3 Nagari Koto Besar	Nagari Koto Tinggi	20	5.931	25 April 2019
116	Lapangan Bola Kaki Koto Ranah	Nagari Koto Ranah	4	21.966	25 April 2019
117	Embung Nagari Kurnia Selatan	Nagari Kurnia Selatan	2	15.000	25 APRIL 2019

No	Peruntukan Pada Sertifikat	Lokasi	No	Luas (M2)	Tanggal Sertfikat
118	Embung Nagari Koto Ranah	Nagari Koto Ranah	7	22.702	13 May 2019
119	Embung Nagari Koto Ranah	Nagari Koto Ranah	6	12.587	13 May 2019
120	Kolam Ikan Nagari Koto Ranah	Nagari Koto Ranah	9	16.380	17 June 2019
121	Embung Nagari Kurnia Selatan	Kurnia Selatan	3	15.710	27 May 2019
122	Kolam Renang Nagari Koto Ranah	Koto Ranah	8	8.399	27 May 2019
123	Puskesmas Sitiung II	Nagari Padukuan	129	4.184	07 August 2019
124	SDN 02 Pulau Punjung	Nagari Gunung Selasih	1	2.152	08 August 2019
125	Bangunan Instansi Sarana Air Bersih	Nagari Koto Baru	4	2.000	30 August 2019
126	Dinas Perhubungan	Nagari Gunung Medan	6	12.490	05 September 2019
127	RSUD Sungai Dareh (Lama)	Nagari IV Koto	6	36.500	03 October 2019
128	SDN 09 Sitiung	Nagari Sungai Duo	187	4.294	16 October 2019
129	SDN 04 Pulau Punjung	Nagari Sikabau	10	1.821	16 October 2019
130	SDN 10 Pulau Punjung	Nagari Sikabau	11	2.617	16 October 2019
131	SDN 03 Sitiung	Nagari Siguntur	4	1.929	16 October 2019
132	Fasilitas Umum	Nagari Taratak Tinggi	5	4.749	17 February 2020
133	SD Inpres Pulau Punjung	Sungai Kambut	1	5.045	14 October 1993
134	SDN 15 Pulau Punjung	Gunung Selasih	2	4.181	17 February 2020
135	SDN 17 Sitiung	Sitiung	26	3.754	17 February 2020
136	SDN 10 Sitiung	Gunung Medan	9	7.186	17 February 2020
137	SDN 06 Koto Salak	Nagari Koto Salak	207	3,933	08 April 2020
138	SDN 09 Koto Salak	Nagari Koto Salak	208	11,997	16 April 2020
139	SDN 04 Koto Salak	Nagari Padukuan	130	13080	30 April 2020
140	Kantor Camat Timpeh	Nagari Tabek	2	23.600	13 August 2020
141	SDN 05 IX Koto	Nagari Silago	2	1.575	07 August 2020
142	SMPN 2 Sungai Rumbai	Kurnia Koto Salak	1	16.660	16 November 2005
143	Departemen Pertanian RI Jakarta	Sungai Derah	8	4.431	18 November 1997
144	Pem Provinsi Daerah Tingkat I Sumbar	Sungai Dareh	7	11.257	12 March 1997
145	SMPN 06 Pulau Punjung	Sungai Kambut	14	8.484	17 November 2020
146	Fasum Bukit Tujuh Ranah Palabi	Ranah Palabi	21	33.040	07 August 2020
147	SMPN 03 Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	5	13.550	06 October 2020
148	SDN 08 Koto Salak	Nagari Ampalu	1	2.647	17 November 2020
149	SDN 07 Sitiung	Nagari Sitiung	28	7.995	19 November 2020
150	SDN 07 Sitiung	Nagari Sitiung	29	2.078	19 November 2020
151	SDN 12 Pulau Punjung	Nagari Gunung Selasih	3	2.205	17 November 2020
152	Pasar Nagari Sungai Duo	Nagari Sungai Duo	188	3.439	07 August 2020

No	Peruntukan Pada Sertifikat	Lokasi	No	Luas (M2)	Tanggal Sertfikat
153	SMPN 3 Pulau Punjung	Nagari Sungai Dareh	12	19.250	17 November 2020
154	SDN 13 Pulau Punjung	Nagari IV Koto	7	3.657	19 November 2020
155	SDN 04 Padang Laweh	Nagari Sopan Jaya	2	9.867	25 August 2020
156	SDN 06 Sitiung	Nagari Sitiung	27	3.921	17 November 2020
157	SMPN 4 Timpeh	Nagari Taratak Tinggi	6	6.806	17 November 2020
158	SDN 02 Padang Laweh	Nagari Padang Laweh	19	2.625	23 December 2020
159	SDN 06 Timpeh	Nagari Taratak Tinggi	7	4.267	23 December 2020
160	SDN 04 IX Koto	Nagari Koto Nan IV Dibawah	2	1.905	23 December 2020
161	SDN 13 IX Koto	Nagari Koto Nan IV Dibawah	3	4.348	23 December 2020
162	SDN 09 Tiumang	Nagari Koto Beringin	1	14.450	23 December 2020
163	SDN 11 Tiumang	Nagari Tiumang	2	7.801	23 December 2020
164	TK Pembina Koto Agung	Nagari Sungai Duo	189	2.555	23 December 2020
165	SDN 12 Tiumang	Nagari Sungai Langkok	6	11.280	13 January 2021
166	SDN 12 Koto Salak	Nagari Pulau Mainan	2	3.805	13 January 2021
167	SDN 14 Pulau Punjung	Nagari Tebing Tinggi	4	3.307	13 January 2021
168	SDN 05 Koto Salak	Nagari Koto Salak	209	4.974	13 January 2021
169	SDN 05 Pulau Punjung	Nagari Tebing Tinggi	3	2.249	13 January 2021
170	SDN 1 Tiumang	Nagari Tiumang	3	9.156,00	09 February 2021
171	RSUD Sungai Rumbai	Nagari Sungai Rumbai Timur	2	20.000	09 February 2021
172	SDN 02 Sitiung	Nagari Siguntur	5	2.620,00	09 February 2021
173	SDN 16 Sitiung	Nagari Sitiung	30	3.889,00	09 February 2021
174	SDN 14 Sitiung	Nagari Siguntur	6	3.661,00	09 February 2021
175	SDN 05 Sitiung	Nagari Siguntur	7	3.539,00	08 September 2021
176	SDN 09 Pulau Punjung	Sungai Dareh	18	3.361	15 December 2021
177	SDN 02 Sungai Rumbai	Nagari Kurnia Selatan	4	8.828	31 December 2021
178	SDN 22 Pulau Punjung	Nagari Sungai Kambut	15	7.242	31 December 2021
179	SDN 02 Timpeh	Nagari Panyubarangan	14	22.810	07 January 2022
180	Fasilitas Umum Nagari Sipangkur	Nagari Sipangkur	3	1.608	31 December 2021
181	SDN 11 Koto Baru	Nagari Koto Baru	6	4.154	31 December 2021
182	SDN 03 Koto Salak	Nagari Simalidu	29	3.358	31 December 2021
183	TKN 01 Tiumang	Nagari Tiumang	5	964	07 January 2022
184	SDN 10 Tiumang	Nagari Sipangkur	5	7.068	07 January 2022
185	SDN 11 Sembilan Koto	Nagari Koto Nan IV Dibawuh	4	2.982	31 December 2021
186	SDN 14 Sembilan Koto	Nagari Banai	2	2.308	05 January 2022
187	Rumah Dinas SDN 17 Sitiung	Nagari Sitiung	35	603	31 December 2021
188	Lapangan Olahraga	Nagari Sitiung	36	24.130	31 December 2021

No	Peruntukan Pada Sertifikat	Lokasi	No	Luas (M2)	Tanggal Sertfikat
189	Rumah Dinas SDN 17 Sitiung	Nagari Sitiung	34	609	31 December 2021
190	Rumah Dinas SDN 08 Koto Baru	Nagari Sialang Gaung	235	16.466	31 December 2021
191	TPU Piruko Selatan	Nagari Sitiung	39	10.795	31 December 2021
192	SDN 05 Timpeh	Nagari Taratak Tinggi	9	7.994	31 December 2021
193	Fasilitas Umum Piruko Selatan	Nagari Sitiung	33	10.067	31 December 2021
194	SDN 06 Tiumang	Nagari Tiumang	4	9.829	31 December 2021
195	SDN 01 Padang Laweh	Nagari Batu Rijal	64	7.033	31 December 2021
196	SMPN 03 Timpeh	Nagari Taratak Tinggi	10	9.696	31 December 2021
197	SDN 07 Sungai Rumbai	Nagari Kurnia Selatan	5	6.468	05 January 2022
198	TK Negeri Pembina Timpeh	Nagari Ranah Palabi	22	5.308	31 December 2021
199	SDN 03 Asam Jujuhan	Nagari Alahan Nan Tigo	4	2.485	31 December 2021
200	Fasilitas Umum Piruko Selatan II	Nagari Sitiung	40	2.580	07 January 2022
201	Gedung Pemuda Piruko Selatan	Nagari Sitiung	38	1.459	31 December 2021
202	SDN 05 Padang Laweh	Nagari Muaro Sopan	3	6.852	31 December 2021
203	Rumah Dinas SDN 17 Sitiung	Nagari Sitiung	37	593	31 December 2021
204	SMPN 02 Timpeh	Nagari Ranah Palabi	23	23.200	31 December 2021
205	SDN 02 Koto Salak	Nagari Pulau Mainan	3	7.116	06 January 2022
206	SDN 15 Sembilan Koto	Nagari Binai	3	3.267	06 January 2022
207	Pustu Lagan Jaya I	Nagari Sipangkur	4	910	06 January 2022
208	SDN 09 Sembilan Koto	Nagari Koto Nan IV Dibawah	5	2.292	31 December 2021
209	SMPN 01 Padang Laweh	Nagari Sopan Jaya	3	8.528	31 December 2021
210	SDN 16 Koto Baru	Nagari Koto Padang	9	14.474	31 December 2021

Adapun saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 (audited) sebagai berikut :

	31 Desember 2021	31 Desember 2020 (Audited)	Tren
	Rp.	Rp.	%
Tanah	667.421.012.047,00	649.170.781.447,00	102,81%
Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	
Nilai Buku	667.421.012.047,00	649.170.781.447,00	102,81%

Pada tahun 2021 tidak ada dianggarkan belanja modal pengadaan tanah, adapun penambahan aset tetap tanah selama tahun 2021 berasal dari penilaian aset tetap tanah yang belum tercatat pada beberapa SKPD sebesar Rp18.612.144.100,00 dan kapitasliasi belanja barang dan jasa pada Sekretariat DPRD sebesar Rp193.943.000,00

Adapun Rincian Penambahan dan pengurangan nilai tanah tahun 2021 per OPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2.31
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah Per OPD

No.	Nama SKPD Baru	Saldo 31 Desember 2020 (Audited)	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2021
1	Sekretariat DPRD	3.714.125.740,00	193.943.000,00	-	3.908.068.740,00
2	Sekretariat Daerah	410.927.307.725,00	17.675.593.530.00	236.913.500,00	428.365.987.755,00
3	Kec. Pulau Punjung	987.500.000,00	-	-	987.500.000,00
4	Kec. Sitiung	1.000.000.000,00	-	-	1.000.000.000,00
5	Kec. Koto Baru	1.488.000.000,00	-	-	1.488.000.000,00
6	Kec. Sungai Rumbai	1.120.000.000,00	-	-	1.120.000.000,00
7	Kec. IX Koto	17.875.000,00	-	-	17.875.000,00
8	Kec. Timpeh	400.000.000,00	-	-	400.000.000,00
9	Kec. Padang Laweh	20.020.000,00	-	-	20.020.000,00
10	Kec Tiumang	75.000.000,00	-	-	75.000.000,00
11	Kec Koto Besar	461.087.771,00	-	-	461.087.771,00
12	Kec Koto Salak	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00
13	Kec. Asam Jujuhan	71.500.000,00	-	-	71.500.000,00
14	Dinas PUPR	162.034.716.389,00	-	-	162.034.716.389,00
15	Dinas PERKIMTAN	1.299.185.160,00	-	125.000.000,00	1.174.185.160,00
16	Dinas Perhubungan	5.961.400.000,00	-	-	5.961.400.000,00
17	Dinas Kesehatan	2.839.972.100,00	412.298.930,00	-	3.252.271.030,00
18	RSUD	10.683.462.500,00	-	-	10.683.462.500,00
19	Dinas Pendidikan	24.557.304.334,00	205.308.640,00	-	24.762.612.974,00
20	Dinas BUDPARPORA	1.115.335.010,00	-	-	1.115.335.010,00
21	Dinas TRANSNAKER	2.121.000.000,00	-	-	2.121.000.000,00
22	DSP3KB	-	-	-	-
23	DISDUKCAPIL	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
24	Dinas PMD	-	-	-	-
25	Dinas Pertanian	11.564.778.836,00	-	-	11.564.778.836,00
26	Dinas Pangan dan Perikanan	1.281.870.882,00	-	-	1.281.870.882,00
27	Dinas KUMPERDAG	1.176.340.000,00	125.000.000,00	-	1.301.340.000,00
28	BKD	-	-	-	-
29	DPMPTSP	-	-	-	-
30	Inspektorat Kabupaten	-	-	-	-
31	BAPPPEDA	-	-	-	-
32	DLH	4.028.000.000,00	-	-	4.028.000.000,00

No.	Nama SKPD Baru	Saldo 31 Desember 2020 (Audited)	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2021
33	Kantor KESBANGPOL	-	-	-	-
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	-	-	-	-
35	BPBD	-	-	-	-
36	BKPSDM	-	-	-	-
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-
38	Dinas KOMINFO	-	-	-	-
Jumlah		**649.170.781.447,00**	**18.612.144.100,00**	**361.913.500.,00**	**667.421.012.047,00**

Rincian penambahan dan pengurangan aset tetap tanah tahun 2021 berdasarkan asal kelompok adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.32
Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Tanah Perkelompok

Saldo Aset Tetap Tanah 31 Desember 2020 (Audited)		**649.170.781.447,00**
Penambahan Aset Tetap Tanah 2021		18.612.144.100
1	Penambahan Belanja Barang dan Jasa Menjadi Aset	193.943.000,00
2	Penambahan Penilaian Kurang Catat Menjadi Aset	18.056.287.600,00
3	Penambahan Mutasi Antar OPD	361.913.500,00
Pengurangan Aset Tetap Tanah 2021		361.913.500,00
1	Pengurangan Mutasi antar OPD	361.913.500,00
Saldo Aset Tetap Tanah 31 Desember 2021		667.421.012.047

Rincian penambahan aset tetap tanah sebesar Rp18.612.235.100,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.33
Rincian Penambahan Aset Tetap Tanah Per OPD

Saldo Aset Tetap Tanah 31 Desember 2020 (Audited)		**649.170.781.447,00**
Penambahan Aset Tetap Tanah 2021		**18.612.144.100,00**
1	Penambahan Belanja Barang dan Jasa Menjadi Aset	193.943.000,00
	- Sekretariat DPRD	193.943.000,00
2	Penambahan Penilaian Kurang Catat Menjadi Aset	18.056.287.600,00
	- Sekretaris Daerah	17.675.593.530,00

Saldo Aset Tetap Tanah 31 Desember 2020 (Audited)		**649.170.781.447,00**
	- Dinas Kesehatan	175.385.430,00
	- Dinas Pendidikan	205.308.640,00
3	Penambahan Mutasi Antar OPD	361.913.500,00
	- Dinas Kesehatan	236.913.500,00
	- Dinas Kumperdag	125.000.000,00

Penambahan aset tetap tanah yang berasal yang signifikan berasal dari aset tetap kurang catat senilai Rp18.056.287.600,00 terdapat pada Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.

Adapun secara keseluruhan selama tahun 2021 tidak ada pengurangan aset tetap tanah hanya pengurangan karena mutasi antar SKPD yang tidak mengurangi saldo aset tetap tanah secara keseluruhan..
Rincian pengurangan aset tetap tanah sebesar Rp361.913.500,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.34
Pengurangan Aset Tetap Tanah

Pengurangan Aset Tetap Tanah 2021		**361.913.500,00**
1	Pengurangan Mutasi antar OPD	361.913.500,00
	- Sekretariat Daerah	236.913.500,00
	- Dinas Perkimtan	125.000.000,00
Saldo Aset Tetap Tanah 31 Desember 2021		667.421.012.047,00

V.A.1.c.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, dan harus memenuhi batasan jumlah biaya kapitalisasi dari aset tetap yang telah ditetapkan yaitu ≥ Rp1.000.000,00. Jika Perolehan aset tetap peralatan dan mesin dibawah satuan minimum kapitalisasi maka aset tetap tersebut tidak dilaporkan sebagai aset tetap di neraca. Disajikan terpisah sebagai aset tetap ekstra comtable,

tidak dilakukan penyusutan, dan dihapuskan jika tidak lagi memberikan manfaat/ rusak. Aset Tetap Perlatan dan Mesin telah dilakukan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisadengan estimasi masa manfaat.

Perubahan sub KIB pada Peralatan Mesin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.35
Perubahan Sub KIB Peralatan Mesin Terkait Penerapan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016

No	Nama Sub KIB Peralatan Mesin Versi Permendagri 17 Tahun 2007	Nama Sub KIB Peralatan Mesin Versi Permendagri 108 Tahun 2016
1	Alat Besar	Alat Besar
2	Alat Angkut	Alat Angkut
3	Alat Bengkel	Alat Bengkel
4	Alat Pertanian	Alat Pertanian
5	Alat Kantor/RT	Alat Kantor/RT
6	Alat Studio	Alat Studio
7	Alat Kedokteran	Alat Kedokteran
8	Alat Laboratorium	Alat Laboratorium
9	Alat Persenjataan Keamanan	Alat Persenjataan
10		Komputer
11		Alat Eksplorasi
12		Alat Pengeboran
13		Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian
14		Alat bantu eksplorasi
15		Alat keselamatan kerja
16		Alat peraga
17		Peralatan proses/Produksi
18		Rambu-rambu
19		Peralatan Olahraga

Nilai Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 (Audited) adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2020 Audited dan 31 Desember 2021

	31 Desember 2021	31 Desember 2020(Audited)	Tren
	Rp	Rp	%
Peralatan dan Mesin	365.830.496.579,36	310.784.964.569,44	117,71%
Akumulasi Penyusutan	(223.157.499.047,60)	(188.807.900.427,60)	118,19%
Nilai Buku	142.672.997.531,76	121.977.064.141,84	116,97%

Jumlah peralatan dan Mesin pada 31 Desember 2021 jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020 (Audited) mengalami kenaikan sebesar Rp55.045.532.009,92.

Tabel 5.2.36
Rekapitulasi Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2020 Audited dan 31 Desember 2021 diurai Per Sub KIB

Peralatan dan Mesin	31 Desember 2021	31 Desember 2020 (Audited)	Tren
	Rp	Rp	%
Alat Besar	27.547.118.825,00	27.923.157.225,00	98,65%
Alat Angkutan	76.534.054.624,00	71.285.166.624,00	107,36%
Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.347.483.855,00	8.333.229.755,00	100,17%
Alat Pertanian	1.933.184.139,00	1.927.631.646,00	100,29%
Alat Kantor dan Rumah Tangga	64.741.093.455,35	55.109.843.647,50	117,48%

Peralatan dan Mesin	31 Desember 2021	31 Desember 2020 (Audited)	Tren
	Rp	Rp	%
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	21.726.463.915,00	18.885.503.837,00	115,04%
Alat Kedokteran Dan Kesehatan	83.481.798.368,50	57.693.983.235,74	144,70%
Alat Laboratorium	28.342.785.100,36	26.830.593.202,20	105,64%
Alat Persenjataan	135.980.340,00	135.980.340,00	100,00%
Komputer	50.039.084.783,15	39.792.402.133,00	125,75%
Alat Eksplorasi	-	-	
Alat Pengeboran	-	-	
Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	34.900.000,00	-	
Alat Bantu Eksplorasi	-	-	
Alat Keselamatan Kerja	704.900.712,00	636.074.462,00	110,82%
Alat Peraga	-	-	
Peralatan Proses/Produksi	12.000.000,00	12.000.000,00	
Rambu - Rambu	1.722.751.150,00	1.722.751.150,00	100,00%
Peralatan Olah Raga	526.897.312,00	496.647.312,00	106,09%
Akumulasi Penyusutan	**(223.157.499.047,60)**	**(188.807.900.427,60)**	**118,19%**
Nilai Buku	**142.672.997.531,76**	**121.977.064.141,84**	**116,97%**

Rincian penambahan dan pengurangan dan Nilai buku Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 (Audited) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.37
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Per 1 Desember Tahun 2021

No.	Nama OPD	SALDO 31 desember 2020 (Audited)	Penambahan Aset Tetap	Pengurangan Aset Tetap	Saldo 31 Aset Tetap Desember 2021	Akumulasi Penyusutan 31 desember 2020 (Audited)	Penambahan Penyusutan	Pengurangan Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 31 desember 2021	Nilai buku 2021
1	Sekretariat DPRD	12.414.369.129,00	592.028.999,00	188.781.900,00	12.817.616.228,00	9.093.508.649,00	1.194.859.135,00	188.781.900,00	10.099.585.884,00	2.718.030.344,00
2	Sekretariat Daerah	28.630.807.483,00	3.657.164.000,00	412.348.000,00	31.875.623.483,00	20.946.334.313,00	3.190.251.016,00	388.444.041,00	23.748.141.288,00	8.127.482.195,00
3	Kec. Pulau Punjung	632.607.825,00	-	54.900.000,00	577.707.825,00	547.714.191,00	39.238.106,00	54.900.000,00	532.052.297,00	45.655.528,00
4	Kec. Sitiung	520.499.765,00	-	32.200.000,00	488.299.765,00	271.861.639,00	53.292.826,00	32.200.000,00	292.954.465,00	195.345.300,00
5	Kec. Koto Baru	570.597.744,00	-	-	570.597.744,00	281.122.631,00	62.727.226,00	-	343.849.857,00	226.747.887,00
6	Kec. Sungai Rumbai	565.272.375,00	-	-	565.272.375,00	329.775.315,00	45.836.620,00	-	375.611.935,00	189.660.440,00
7	Kec. IX Koto	586.695.803,00	-	6.913.000,00	579.782.803,00	528.891.023,00	21.364.348,00	6.048.875,00	544.206.496,00	35.576.307,00
8	Kec. Timpeh	383.896.475,00	-	-	383.896.475,00	372.386.136,00	6.420.461,00	-	378.806.597,00	5.089.878,00
9	Kec. Padang Laweh	400.836.210,00	-	9.900.000,00	390.936.210,00	365.205.520,00	12.158.496,00	9.900.000,00	367.464.016,00	23.472.194,00
10	Kec Tiumang	441.232.425,00	-	-	441.232.425,00	391.421.091,00	22.936.500,00	-	414.357.591,00	26.874.834,00
11	Kec Koto Besar	481.956.531,00	-	-	481.956.531,00	249.049.566,00	48.175.599,00	-	297.225.165,00	184.731.366,00
12	Kec Koto Salak	533.237.125,00	-	15.950.000,00	517.287.125,00	482.330.079,00	18.741.831,00	15.950.000,00	485.121.910,00	32.165.215,00
13	Kec. Asam Jujuhan	572.903.625,00	2.000.000,00	13.150.000,00	561.753.625,00	557.057.047,00	7.997.412,00	13.150.000,00	551.904.459,00	9.849.166,00

No.	Nama OPD	SALDO 31 desember 2020 (Audited)	Penambahan Aset Tetap	Pengurangan Aset Tetap	Saldo 31 Aset Tetap Desember 2021	Akumulasi Penyusutan 31 desember 2020 (Audited)	Penambahan Penyusutan	Pengurangan Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 31 desember 2021	Nilai buku 2021
14	Dinas PUPR	32.947.581.788,00	2.187.471.600,00	-	35.135.053.388,00	27.048.343.487,00	1.374.905.831,00	-	28.423.249.318,00	6.711.804.070,00
15	Dinas PERKIMTAN	1.214.543.700,00	26.575.000,00	13.487.500,00	1.227.631.200,00	871.696.435,00	119.622.109,00	5.869.531,00	985.449.013,00	242.182.187,00
16	Dinas Perhubungan	5.053.804.376,00	32.009.500,00	25.268.000,00	5.060.545.876,00	3.522.897.760,00	488.313.501,00	25.268.000,00	3.985.943.261,00	1.074.602.615,00
17	Dinas Kesehatan	62.209.693.405,14	10.616.331.251,00	2.035.643.800,00	70.790.380.856,14	30.475.850.560,00	9.895.794.569,00	1.155.208.567,00	39.216.436.562,00	31.573.944.294,14
18	RSUD	45.263.028.036,60	25.550.405.776,92	450.130.200,00	70.363.303.613,52	24.033.702.910,60	7.410.579.551,00	445.294.366,00	30.998.988.095,60	39.364.315.517,92
19	Dinas Pendidikan	48.725.803.644,00	14.437.773.211,00	-	63.163.576.855,00	22.848.471.753,50	8.037.841.107,00	-	30.886.312.860,50	32.277.263.994,50
20	Dinas BUDPARPORA	1.298.547.001,00	13.300.000,00	-	1.311.847.001,00	941.490.895,00	144.558.322,00	-	1.086.049.217,00	225.797.784,00
21	Dinas TRANSNAKER	823.213.642,00	8.000.000,00	78.600.000,00	752.613.642,00	730.529.556,00	19.827.420,00	30.675.000,00	719.681.976,00	32.931.666,00
22	DSP3KB	3.606.360.830,00	537.270.000,00	-	4.143.630.830,00	2.369.503.247,00	384.942.904,00	-	2.754.446.151,00	1.389.184.679,00
23	DISDUKCAPIL	3.077.861.942,00	268.311.100,00	-	3.346.173.042,00	1.757.214.416,00	465.318.301,00	-	2.222.532.717,00	1.123.640.325,00
24	Dinas PMD	1.106.869.800,00	6.923.500,00	-	1.113.793.300,00	1.013.352.800,00	54.333.833,00	-	1.067.686.633,00	46.106.667,00
25	Dinas Pertanian	7.635.693.691,00	619.772.000,00	326.828.000,00	7.928.637.691,00	6.067.573.429,00	803.434.602,00	291.434.749,00	6.579.573.282,00	1.349.064.409,00
26	Dinas Pangan dan Perikanan	4.970.135.447,50	6.825.000,00	-	4.976.960.447,50	4.766.377.666,50	166.162.693,00	-	4.932.540.359,50	44.420.088,00
27	Dinas KUMPERDAG	15.196.142.589,20	17.580.000,00	-	15.213.722.589,20	4.087.853.953,00	1.724.566.563,00	-	5.812.420.516,00	9.401.302.073,20
28	BKD	5.112.046.010,00	98.533.500,00	135.760.000,00	5.074.819.510,00	3.666.902.479,00	496.667.606,00	133.660.000,00	4.029.910.085,00	1.044.909.425,00
29	DPMPTSP	1.197.265.091,00	118.711.000,00	-	1.315.976.091,00	1.095.479.355,00	78.767.258,00	-	1.174.246.613,00	141.729.478,00
30	Inspektorat Kabupaten	1.343.790.781,00	189.174.196,00	6.150.000,00	1.526.814.977,00	1.297.428.352,00	70.406.344,00	6.150.000,00	1.361.684.696,00	165.130.281,00
31	BAPPPEDA	1.717.874.942,00	19.650.000,00	90.000.000,00	1.647.524.942,00	1.399.743.245,00	182.852.237,00	90.000.000,00	1.492.595.482,00	154.929.460,00

No.	Nama OPD	SALDO 31 desember 2020 (Audited)	Penambahan Aset Tetap	Pengurangan Aset Tetap	Saldo 31 Aset Tetap Desember 2021	Akumulasi Penyusutan 31 desember 2020 (Audited)	Penambahan Penyusutan	Pengurangan Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 31 desember 2021	Nilai buku 2021
32	DLH	6.462.335.587,00	106.211.362,00	1.377.750.236,00	5.190.796.713,00	4.878.165.120,00	340.251.133,00	992.125.388,00	4.226.290.865,00	964.505.848,00
33	Kantor KESBANGPOL	259.182.000,00	4.076.000,00	5.040.000,00	258.218.000,00	248.744.500,00	7.301.000,00	5.040.000,00	251.005.500,00	7.212.500,00
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	6.496.350.096,00	43.160.000,00	-	6.539.510.096,00	5.113.466.708,00	484.294.046,00	-	5.597.760.754,00	941.749.342,00
35	BPBD	2.346.142.350,00	26.735.000,00	-	2.372.877.350,00	2.127.555.225,00	76.530.475,00	-	2.204.085.700,00	168.791.650,00
36	BKPSDM	1.089.034.131,00	81.836.000,00	-	1.170.870.131,00	1.037.622.207,00	23.855.591,00	-	1.061.477.798,00	109.392.333,00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.046.693.205,00	562.255.500,00	-	2.608.948.705,00	1.471.596.752,00	228.800.123,00	-	1.700.396.875,00	908.551.830,00
38	Dinas KOMINFO	2.850.057.969,00	494.249.150,00	-	3.344.307.119,00	1.519.680.416,00	435.772.342,00	-	1.955.452.758,00	1.388.854.361,00
Jumlah		**310.784.964.569,44**	**60.324.332.645,92**	**5.278.800.636,00**	**365.830.496.579,36**	**188.807.900.427,60**	**38.239.699.037,00**	**3.890.100.417,00**	**223.157.499.047,60**	**142.672.997.531,76**

Pada tahun 2021 realisasi anggaran belanja modal peralatan dan mesin adalah sebesar Rp50.754.827.489,92 adapun yang dikapitalisasi menjadi aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp47.387.849.983,92 dan dikapitalisasi menjadi bangunan dan gedung sebesar Rp733.072.238,00. Sisanya sebesar Rp2.633.905.268,00 tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap peralatan dan mesin karena tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut :

1. Aset Ekstrakomptabel Rp2.154.558.668,00
2. Pembayaran hutang tahun 2020 Rp122.700.000,00
3. Belanja yang akan diserahkan kepada masyarakat Rp120.741.200,00
4. Merupakan barang pakai habis Rp235.905.400,00

Adapun penambahan dan pengurangan nilai aset tetap peralatan mesin tahun 2021 berdasarkan perolehan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.38
Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin 31 Desember 2020 (Audited)		310.784.964.569,44
Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2021		60.324.332.645,92
1	Penambahan Belanja Modal Menjadi Aset	50.525.764.083,92
2	Penambahan Belanja Modal Bos Reguler Menjadi Aset	2.272.012.113,00
3	Penambahan Belanja Modal BOS Afirmasi Menjadi Aset	277.959.500,00
4	Penambahan Belanja Modal BOS Kinerja Menjadi Aset	119.500.500,00
5	Penambahan Belanja Modal BLUD Menjadi Aset	689.309.990,00
6	Penambahan Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset	18.240.000,00
7	Penambahan Barang dan Jasa BLUD Menjadi Aset	57.450.000,00
8	Penambahan Honor Pokja Menjadi Aset	17.400.000,00
9	Penambahan Hibah Pusat Menjadi Aset	2.642.570.000,00
10	Penambahan Hibah Provinsi Menjadi Aset	398.264.659,00
11	Penambahan Hibah Pihak Ketiga / Masyarakat Menjadi Aset	28.710.000,00
12	Penambahan Penilaian Hibah Pihak Ketiga / Masyarakat Menjadi Aset	787.750.000,00
13	Penambahan BOSDA/BOP PAUD Menjadi Aset	41.250.000,00
14	Penambahan Kurang Catat Menjadi Aset	26.500.000,00
15	Penambahan Mutasi Antar OPD	2.071.166.800,00
16	Penambahan Mutasi Honor Pokja	12.840.000,00
17	Penambahan reklas aset tetap/lainnya/ekstrakompatibel	326.828.000,00
18	Penambahan Reklas sesama Aset Tetap/lainnya/ektrakompatibel	10.817.000,00
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2021		5.278.800.636
1	Pengurangan Reklas Sesama Aset Tetap/lainnya/Ekstrakompatibel	10.817.000,00
2	Pengurangan Mutasi Antar OPD	2.071.166.800,00

3	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	12.840.000,00
4	Penghapusan	663.676.000,00
5	Pengurangan ReklasTetap/Lainnya/ Ekstrakompabel	2.520.300.836,00
Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin 31 Desember 2021		365.830.496.579,36

Rincian penambahan aset tetap peralatan mesin berdasarkan perolehan per OPD sebesar Rp60.324.332.645,92, dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.39
Uraian Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin 2021

Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin 2021			Jumlah
Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin 31 Desember 2020 (Audited)			310.784.964.569,44
Penambahan Peralatan dan Mesin 2021			60.324.332.645,92
1	Penambahan Belanja Modal Menjadi Aset		50.525.764.083,92
	Alat Angkutan		4.564.363.000,00
	1	Sekretariat Daerah	2.706.550.000,00
	2	Dinas Kesehatan	996.699.000,00
	3	RSUD	842.699.000,00
	4	DLH	18.415.000,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur		14.254.100,00
	1	Dinas PUPR	8.200.600,00
	2	Dinas Perhubungan	6.053.500,00
	Alat Pertanian		266.877.493,00
	1	Dinas PUPR	9.385.800,00
	2	Dinas Pendidikan	219.741.693,00
	3	Dinas Pertanian	4.000.000,00
	4	Inspektorat Kabupaten	33.750.000,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		8.670.016.674,85
	1	Sekretariat DPRD	531.963.999,00
	2	Sekretariat Daerah	588.356.000,00
	3	Dinas PUPR	448.685.900,00
	4	Dinas PERKIMTAN	26.575.000,00
	5	Dinas Perhubungan	8.500.000,00
	6	Dinas Kesehatan	898.461.774,00
	7	RSUD	967.878.480,00
	8	Dinas Pendidikan	4.260.163.683,85

Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin 2021			Jumlah
	9	Dinas TRANSNAKER	8.000.000,00
	10	DSP3KB	79.000.000,00
	11	Dinas Pertanian	91.782.130,00
	12	Dinas KUMPERDAG	17.580.000,00
	13	BKD	26.650.000,00
	14	DPMPTSP	17.942.000,00
	15	Inspektorat Kabupaten	138.231.196,00
	16	DLH	67.796.362,00
	17	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	29.460.000,00
	18	BPBD	8.735.000,00
	19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	249.582.000,00
	20	Dinas KOMINFO	204.673.150,00
	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar		2.749.663.488,00
	1	Sekretariat Daerah	68.078.000,00
	2	Dinas PUPR	1.327.892.300,00
	3	Dinas Perhubungan	5.575.000,00
	4	Dinas Kesehatan	898.756.600,00
	5	RSUD	8.800.000,00
	6	Dinas Pendidikan	47.587.088,00
	7	Dinas BUDPARPORA	300.000,00
	8	DSP3KB	122.760.000,00
	9	DISDUKCAPIL	9.992.000,00
	10	Dinas Pertanian	37.818.000,00
	11	DPMPTSP	19.987.000,00
	12	DLH	20.000.000,00
	13	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	3.800.000,00
	14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.500.000,00
	15	Dinas KOMINFO	163.817.500,00
	Alat Kedokteran Dan Kesehatan		24.531.087.473,76
	1	Dinas Kesehatan	3.260.914.449,00
	2	RSUD	21.270.173.024,76
	Alat Laboratorium		1.730.073.898,16
	1	Dinas PUPR	228.604.800,00
	2	Dinas Kesehatan	391.808.688,00
	3	RSUD	777.182.363,16
	4	Dinas Pendidikan	332.478.047,00
	Komputer		7.935.031.706,15

Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin 2021			Jumlah
	1	Sekretariat DPRD	56.075.000,00
	2	Sekretariat Daerah	213.075.000,00
	3	Dinas PUPR	164.702.200,00
	4	Dinas Kesehatan	85.570.200,00
	5	Dinas Pendidikan	6.112.803.336,15
	6	Dinas BUDPARPORA	4.000.000,00
	7	DSP3KB	332.750.000,00
	8	DISDUKCAPIL	168.319.100,00
	9	Dinas Pertanian	159.343.870,00
	10	Dinas Pangan dan Perikanan	6.825.000,00
	11	BKD	54.500.000,00
	12	DPMPTSP	59.457.000,00
	13	Inspektorat Kabupaten	17.193.000,00
	14	BAPPPEDA	9.850.000,00
	15	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	9.900.000,00
	16	BPBD	18.000.000,00
	17	BKPSDM	81.836.000,00
	18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	255.073.500,00
	19	Dinas KOMINFO	125.758.500,00
	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian		34.900.000,00
	1	Sekretariat Daerah	34.900.000,00
	Alat Keselamatan Kerja		29.496.250,00
	1	Dinas Pendidikan	29.496.250,00
2	Penambahan Belanja Modal Bos Reguler Menjadi Aset		2.272.012.113,00
	Alat Besar		23.049.700,00
	1	Dinas Kesehatan	23.049.700,00
	Alat Pertanian		63.753.000,00
	1	Dinas Pendidikan	63.753.000,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		839.988.683,00
	1	Dinas Pendidikan	839.988.683,00
	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar		100.952.500,00
	1	Dinas Pendidikan	100.952.500,00
	Alat Laboratorium		47.920.000,00
	1	Dinas Pendidikan	47.920.000,00
	Komputer		1.145.548.230,00
	1	Dinas Pendidikan	1.145.548.230,00

Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin 2021			Jumlah
	Alat Keselamatan Kerja		26.050.000,00
	1	Dinas Pendidikan	26.050.000,00
	Peralatan Olah Raga		24.750.000,00
	1	Dinas Pendidikan	24.750.000,00
3	Penambahan Belanja Modal BOS Afirmasi Menjadi Aset		277.959.500,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		16.800.000,00
	1	Dinas Pendidikan	16.800.000,00
	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar		20.837.500,00
	1	Dinas Pendidikan	20.837.500,00
	Alat Laboratorium		2.930.000,00
	1	Dinas Pendidikan	2.930.000,00
	Komputer		224.112.000,00
	1	Dinas Pendidikan	224.112.000,00
	Alat Keselamatan Kerja		13.280.000,00
	1	Dinas Pendidikan	13.280.000,00
4	Penambahan Belanja Modal BOS Kinerja Menjadi Aset		119.500.500,00
	Komputer		119.500.500,00
	1	Dinas Pendidikan	119.500.500,00
5	Penambahan Belanja Modal BLUD Menjadi Aset		689.309.990,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		339.302.150,00
	1	Dinas Kesehatan	137.755.900,00
	2	RSUD	201.546.250,00
	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar		13.309.090,00
	2	RSUD	13.309.090,00
	Alat Kedokteran Dan Kesehatan		30.301.000,00
	1	Dinas Kesehatan	9.291.000,00
	2	RSUD	21.010.000,00
	Alat Laboratorium		1.320.000,00
	1	RSUD	1.320.000,00
	Komputer		305.077.750,00
	1	Dinas Kesehatan	91.505.750,00
	2	RSUD	213.572.000,00
6	Penambahan Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset		18.240.000,00
	Alat Pertanian		1.750.000,00
	1	Dinas Pendidikan	1.750.000,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		5.490.000,00

Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin 2021			Jumlah
	1	Sekretariat DPRD	3.990.000,00
	2	Dinas Pendidikan	1.500.000,00
	Komputer		11.000.000,00
	1	Dinas Pendidikan	11.000.000,00
7	Penambahan Barang dan Jasa BLUD Menjadi Aset		57.450.000,00
	Alat Angkutan		1.500.000,00
	1	RSUD	1.500.000,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		4.350.000,00
	1	RSUD	4.350.000,00
	Alat Kedokteran Dan Kesehatan		46.875.000,00
	1	RSUD	46.875.000,00
	Alat Laboratorium		3.675.000,00
	1	RSUD	3.675.000,00
	Komputer		1.050.000,00
	1	RSUD	1.050.000,00
8	Penambahan Honor Pokja Menjadi Aset		17.400.000,00
	Alat Angkutan		10.080.000,00
	1	Sekretariat Daerah	10.080.000,00
	Alat Laboratorium		2.280.000,00
	1	Sekretariat Daerah	2.280.000,00
	Komputer		5.040.000,00
	1	Sekretariat Daerah	5.040.000,00
9	Penambahan Hibah Pusat Menjadi Aset		2.642.570.000,00
	Alat Angkuta		1.942.450.000,00
	1	Dinas Kesehatan	1.942.450.000,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		32.200.000,00
	1	Dinas Pendidikan	32.200.000,00
	Komputer		667.920.000,00
	1	Dinas Pendidikan	618.100.000,00
	2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	49.820.000,00
10	Penambahan Hibah Provinsi Menjadi Aset		398.264.659,00
	Alat Kedokteran Dan Kesehatan		398.264.659,00
	1	RSUD	398.264.659,00
11	Penambahan Hibah Pihak Ketiga / Masyarakat Menjadi Aset		28.710.000,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		22.550.000,00
	1	Dinas Pendidikan	22.550.000,00

Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin 2021			Jumlah
	Komputer		6.160.000,00
	1	Dinas Pendidikan	6.160.000,00
12	Penambahan Penilaian Hibah Pihak Ketiga / Masyarakat Menjadi Aset		787.750.000,00
	Alat Kedokteran Dan Kesehatan		787.750.000,00
	1	RSUD	787.750.000,00
13	Penambahan BOSDA/BOP PAUD Menjadi Aset		41.250.000,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		12.850.000,00
	1	Dinas Pendidikan	12.850.000,00
	Komputer		28.400.000,00
	1	Dinas Pendidikan	28.400.000,00
14	Penambahan Kurang Catat Menjadi Aset		26.500.000,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		15.000.000,00
	1	Kec. Asam Jujuhan	2.000.000,00
	2	Dinas Pendidikan	13.000.000,00
	Komputer		6.000.000,00
	1	Dinas Pendidikan	6.000.000,00
	Peralatan Olah Raga		5.500.000,00
	1	Dinas Pendidikan	5.500.000,00
15	Penambahan Mutasi Antar OPD		2.071.166.800,00
	Alat Angkutan		1.137.439.600,00
	1	Sekretariat Daerah	13.050.000,00
	2	Dinas Kesehatan	1.001.809.600,00
	3	DISDUKCAPIL	90.000.000,00
	4	BKD	13.320.000,00
	5	DPMPTSP	12.960.000,00
	6	BAPPPEDA	6.300.000,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		211.052.200,00
	1	Sekretariat Daerah	5.805.000,00
	2	Dinas Perhubungan	11.881.000,00
	3	Dinas Kesehatan	162.917.200,00
	4	Dinas Pendidikan	7.021.000,00
	5	Dinas PMD	6.923.500,00
	6	BKD	4.063.500,00
	7	DPMPTSP	8.365.000,00
	8	Kantor KESBANGPOL	4.076.000,00

Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin 2021			Jumlah
	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar		3.500.000,00
	1	BAPPPEDA	3.500.000,00
	Alat Kedokteran Dan Kesehatan		353.081.000,00
	1	Dinas Kesehatan	353.081.000,00
	Alat Laboratorium		356.144.000,00
	1	Dinas Kesehatan	356.144.000,00
	Komputer		9.950.000,00
	1	Sekretariat Daerah	9.950.000,00
16	Penambahan Mutasi Honor Pokja		12.840.000,00
	Alat Angkutan		5.520.000,00
	1	Dinas Kesehatan	2.760.000,00
	2	RSUD	2.760.000,00
	Alat Laboratorium		2.280.000,00
	1	Dinas Kesehatan	2.280.000,00
	Komputer		5.040.000,00
	1	DSP3KB	2.760.000,00
	2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.280.000,00
17	Penambahan reklas aset tetap/lainnya/ ekstrakompatibel		326.828.000,00
	Alat Laboratorium		326.828.000,00
	1	Dinas Pertanian	326.828.000,00
18	Penambahan Reklas sesama Aset Tetap/lainnya/ektrakompatibel		10.817.000,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		10.817.000,00
	1	Dinas Kesehatan	10.817.000,00
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2021			**5.278.800.636,00**
1	Pengurangan Reklas Sesama Aset Tetap/lainnya/Ekstrakompatibel		10.817.000,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		10.817.000,00
	1	Dinas Kesehatan	10.817.000,00
2	Pengurangan Mutasi Antar OPD		2.071.166.800,00
	Alat Angkutan		1.137.439.600,00
	1	Sekretariat DPRzD	13.320.000,00
	2	Dinas Kesehatan	1.001.809.600,00
	3	BKD	122.310.000,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		211.052.200,00
	1	Sekretariat DPRD	48.135.000,00
	2	Dinas Kesehatan	162.917.200,00

Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin 2021			Jumlah
	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar		3.500.000,00
	1	BKD	3.500.000,00
	Alat Kedokteran Dan Kesehatan		353.081.000,00
	1	Dinas Kesehatan	353.081.000,00
	Alat Laboratorium		356.144.000,00
	1	Dinas Kesehatan	356.144.000,00
	Komputer		9.950.000,00
	1	BKD	9.950.000,00
3	Pengurangan Mutasi Honor Pokja		12.840.000,00
	Alat Angkutan		5.520.000,00
	1	Sekretariat Daerah	5.520.000,00
	Alat Laboratorium		2.280.000,00
	1	Sekretariat Daerah	2.280.000,00
	Komputer		5.040.000,00
	1	Kec. Sitiung	5.040.000,00
4	Penghapusan		663.676.000,00
	Alat Angkutan		663.676.000,00
	1	Sekretariat Daerah	362.133.000,00
	2	Kec. Pulau Punjung	6.300.000,00
	3	Kec Koto Salak	15.950.000,00
	4	Kec. Asam Jujuhan	13.150.000,00
	5	Dinas Perhubungan	25.268.000,00
	6	Dinas Kesehatan	150.875.000,00
	7	BAPPPEDA	90.000.000,00
5	Pengurangan Reklas Tetap/Lainnya/ Ekstrakompabel		2.520.300.836,00
	Alat Besar		399.088.100,00
	1	DLH	399.088.100,00
	Alat Angkutan		605.829.000,00
	1	Kec. Pulau Punjung	30.300.000,00
	2	Kec. Sitiung	28.600.000,00
	3	RSUD	234.000.000,00
	4	Dinas TRANSNAKER	4.600.000,00
	5	DLH	308.329.000,00
	Alat Pertanian		326.828.000,00
	1	Dinas Pertanian	326.828.000,00

Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin 2021			Jumlah
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		316.480.700,00
	1	Sekretariat DPRD	118.490.500,00
	2	Sekretariat Daerah	19.850.000,00
	3	Kec. Sitiung	3.600.000,00
	4	Dinas PERKIMTAN	1.500.000,00
	5	RSUD	168.000.200,00
	6	Kantor KESBANGPOL	5.040.000,00
	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar		43.802.500,00
	1	RSUD	5.950.000,00
	2	Dinas TRANSNAKER	31.000.000,00
	3	DLH	6.852.500,00
	Alat Kedokteran Dan Kesehatan		17.280.000,00
	1	RSUD	17.280.000,00
	Alat Laboratorium		602.835.000,00
	1	DLH	602.835.000,00
	Komputer		208.157.536,00
	1	Sekretariat DPRD	8.836.400,00
	2	Sekretariat Daerah	17.525.000,00
	3	Kec. Pulau Punjung	18.300.000,00
	4	Kec. IX Koto	6.913.000,00
	5	Kec. Padang Laweh	9.900.000,00
	6	Dinas PERKIMTAN	11.987.500,00
	1	RSUD	24.900.000,00
	2	Dinas TRANSNAKER	43.000.000,00
	3	Inspektorat Kabupaten	6.150.000,00
	4	DLH	60.645.636,00
Saldo Aset Tetap Peralatan Mesin 2021			**365.830.496.579,36**

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp60.324.332.645,92 sebesar 83,8% berasal dari belanja modal dan 5,1 % berasal dari Hibah pusat, Hibah Pemerintah Provinsi dan Hibah dari Pihak Ketiga dengan rician sebagai berikut:

1. Penambahan Hibah Pemerintah pusat :
   a. Hibah dari Kementerian kesehatan berupa 5 unit alat angkut mobil ambulans (puskesmas keliling) senilai Rp1.942.450.000,00 pada Dinas kesehatan .

b. Hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa alat rumah tangga senilai Rp32.200.000,00 dan 87 unit komputer serta 14 unit perlengkapannya senilai Rp618.100.000,00
c. Hibah dari berupa komputer senilai Rp49.820.000,00 pada Dinas Pertustakaan dan Kearsipan.

2. Penambahan Hibah Pemerintah Provinsi berupa alat kedokteran dan kesehatan pada RSUD senilai Rp398.264.659,00
3. Penambahan Hibah dari pihak ketiga (kenang-kenangan walimurid) berupa alat kantor sebesar Rp22.550.000,00 dan komputer sebesar Rp6.160.000,00 pada Dinas Pendidikan.

Pengurangan aset tetap perlatan dan mesin senilai Rp5.278.800.636,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Terjadi karena adanya inventarisasi Aset Tetap yang tidak memenuhi syarat sebagai fungsi aset tetap telah direklas ke aset lainnya karena kondisi rusak berat dan karena dipinjam pakaikan ke pihak lain sebesar Rp2.520.300.836,00
2. Pengurangan Aset Tetap terjadi karena pemindahtanganan dalam bentuk penjualan/ lelang kendaraan bermotor sebesar Rp663.676.000,00

Tabel 5.2.40

Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2021

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin 31 Desember 2020 (Audited)		**188.807.900.427,60**
Penambahan Penyusutan Aset Teap Peralatan dan Mesin 2021		38.239.699.037,00
1	Penambahan Penyusutan Mutasi Antar OPD	1.196.924.600,00
2	Penamban Penyusutan Reklas	2.523.967,00
3	Penambahan Penyusutan Koreksi	291.434.749,00
4	Penyusutan Semester I	17.747.378.629,00
5	Penyusutan Semester II	19.001.437.092,00
Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2021		3.890.100.417
1	Pengurangan Penyusutan Mutasi Antar OPD	1.196.924.600,00
2	Pengurangan Penyusutan Reklas	1.738.065.068,00
3	Pengurangan Penyusutan Penghapusan	663.676.000,00
4	Pengurangan Penyusutan Koreksi	291.434.749,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 31 Desember 2021		223.157.499.047,60
Nilai Buku Peralatan dan Mesin 31 Desember 2021		142.672.997.531,76

Tabel 5.2.41

Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2021

Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin			Jumlah
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin 31 Desember 2020			**188.807.900.427,60**
Penambahan Penyusutan Peralatan dan Mesin 2021			**38.239.699.037,00**
1	Penambahan Penyusutan Mutasi Antar OPD		**1.196.924.600,00**
	Alat Angkutan		**1.137.439.600,00**
	1	Sekretariat Daerah	13.050.000,00
	2	Dinas Kesehatan	1.001.809.600,00
	3	DISDUKCAPIL	90.000.000,00
	4	BKD	13.320.000,00
	5	DPMPTSP	12.960.000,00
	6	BAPPPEDA	6.300.000,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		48.135.000,00
	1	Sekretariat Daerah	5.805.000,00
	2	Dinas Perhubungan	11.881.000,00
	3	Dinas Pendidikan	7.021.000,00
	4	Dinas PMD	6.923.500,00
	5	BKD	4.063.500,00
	6	DPMPTSP	8.365.000,00
	7	Kantor KESBANGPOL	4.076.000,00
	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar		1.400.000,00
	1	BAPPPEDA	1.400.000,00
	Komputer		9.950.000,00
	1	Sekretariat Daerah	9.950.000,00
2	Penambahan Penyusutan Reklas		2.523.967,00
	Alat Kedokteran Dan Kesehatan		2.523.967,00
	1	Dinas Kesehatan	2.523.967,00
3	Penambahan Penyusutan Koreksi		291.434.749,00
	Alat Laboratorium		291.434.749,00
	1	Dinas Pertanian	291.434.749,00
4	Penyusutan Semester I		17.747.378.629,00
	Alat Besar		554.102.328,00
	1	Sekretariat DPRD	2.089.286,00
	2	Sekretariat Daerah	1.427.001,00
	3	Kec. Padang Laweh	135.715,00
	4	Kec. Asam Jujuhan	357.143,00
	5	Dinas PUPR	345.570.836,00
	6	Dinas Kesehatan	1.047.711,00
	7	RSUD	4.062.298,00

Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin			Jumlah
	8	Dinas Pendidikan	3.754.665,00
	9	Dinas BUDPARPORA	107.143,00
	10	Dinas Pangan dan Perikanan	69.138.928,00
	11	Dinas KUMPERDAG	82.125.703,00
	12	Inspektorat Kabupaten	957.857,00
	13	DLH	40.851.667,00
	14	BPBD	2.476.375,00
	Alat Angkutan		2.586.029.796,00
	1	Sekretariat DPRD	139.689.150,00
	2	Sekretariat Daerah	545.376.700,00
	3	Kec. Pulau Punjung	12.090.271,00
	4	Kec. Sitiung	19.817.597,00
	5	Kec. Koto Baru	20.133.445,00
	6	Kec. Sungai Rumbai	18.792.473,00
	7	Kec. IX Koto	4.956.833,00
	8	Kec. Timpeh	1.006.823,00
	9	Kec. Padang Laweh	2.427.819,00
	10	Kec Koto Besar	18.641.704,00
	11	Kec Koto Salak	1.647.657,00
	12	Dinas PUPR	185.165.379,00
	13	Dinas PERKIMTAN	10.574.909,00
	14	Dinas Perhubungan	54.922.843,00
	15	Dinas Kesehatan	507.756.042,00
	16	RSUD	156.019.285,00
	17	Dinas Pendidikan	63.217.453,00
	18	Dinas BUDPARPORA	23.345.300,00
	19	DSP3KB	114.416.252,00
	20	DISDUKCAPIL	88.195.653,00
	21	Dinas Pertanian	85.731.316,00
	22	Dinas Pangan dan Perikanan	15.123.621,00
	23	Dinas KUMPERDAG	61.396.877,00
	24	BKD	41.988.421,00
	25	DPMPTSP	1.167.752,00
	26	BAPPPEDA	23.325.048,00
	27	DLH	79.967.044,00
	28	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	217.745.654,00
	29	BPBD	21.043.985,00
	30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	47.848.632,00
	31	Dinas KOMINFO	2.497.858,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur		467.501.473,00
	1	Sekretariat Daerah	746.500,00

Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin			Jumlah
	2	Dinas PUPR	14.885.279,00
	3	Dinas Perhubungan	56.567.000,00
	4	Dinas Kesehatan	198.000,00
	5	RSUD	348.750,00
	6	Dinas Pendidikan	36.083.749,00
	7	DISDUKCAPIL	874.500,00
	8	Dinas Pertanian	12.395.856,00
	9	Dinas KUMPERDAG	334.658.239,00
	10	BKD	4.088.500,00
	11	DPMPTSP	1.446.500,00
	12	BAPPPEDA	1.010.000,00
	13	DLH	2.192.600,00
	14	BPBD	1.312.500,00
	15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50.000,00
	16	Dinas KOMINFO	643.500,00
	Alat Pertanian		70.817.518,00
	1	Dinas PERKIMTAN	4.276.250,00
	2	Dinas Pendidikan	51.233.768,00
	3	Inspektorat Kabupaten	2.812.500,00
	4	DLH	12.495.000,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		3.744.541.306,00
	1	Sekretariat DPRD	399.713.898,00
	2	Sekretariat Daerah	733.365.826,00
	3	Kec. Pulau Punjung	4.094.061,00
	4	Kec. Sitiung	2.241.667,00
	5	Kec. Koto Baru	5.743.330,00
	6	Kec. Sungai Rumbai	2.105.000,00
	7	Kec. IX Koto	2.975.580,00
	8	Kec. Timpeh	300.000,00
	9	Kec. Padang Laweh	1.370.000,00
	10	Kec Tiumang	4.792.000,00
	11	Kec Koto Besar	1.360.000,00
	12	Kec Koto Salak	5.300.000,00
	13	Kec. Asam Jujuhan	1.291.668,00
	14	Dinas PUPR	38.265.923,00
	15	Dinas PERKIMTAN	19.465.316,00
	16	Dinas Perhubungan	11.698.550,00
	17	Dinas Kesehatan	609.509.123,00
	18	RSUD	604.223.228,00
	19	Dinas Pendidikan	820.813.351,00
	20	Dinas BUDPARPORA	24.447.450,00

Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin			Jumlah
	21	Dinas TRANSNAKER	5.174.167,00
	22	DSP3KB	3.197.052,00
	23	DISDUKCAPIL	12.009.941,00
	24	Dinas PMD	11.591.000,00
	25	Dinas Pertanian	117.060.776,00
	26	Dinas Pangan dan Perikanan	1.118.100,00
	27	Dinas KUMPERDAG	16.934.072,00
	28	BKD	73.056.107,00
	29	DPMPTSP	8.131.300,00
	30	Inspektorat Kabupaten	28.835.721,00
	31	BAPPPEDA	24.598.644,00
	32	DLH	34.990.814,00
	33	Kantor KESBANGPOL	1.300.000,00
	34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	15.602.942,00
	35	BPBD	8.035.950,00
	36	BKPSDM	9.091.090,00
	37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	29.809.102,00
	38	Dinas KOMINFO	50.928.557,00
	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar		1.032.709.899,00
	1	Sekretariat DPRD	79.078.674,00
	2	Sekretariat Daerah	116.884.283,00
	3	Kec. Sitiung	1.749.500,00
	4	Kec. Koto Baru	140.000,00
	5	Kec. Sungai Rumbai	698.963,00
	6	Kec. IX Koto	713.600,00
	7	Kec. Timpeh	661.843,00
	8	Kec. Padang Laweh	975.000,00
	9	Kec Tiumang	2.095.000,00
	10	Kec Koto Salak	496.175,00
	11	Kec. Asam Jujuhan	920.000,00
	12	Dinas PUPR	22.714.531,00
	13	Dinas PERKIMTAN	2.778.850,00
	14	Dinas Perhubungan	4.510.000,00
	15	Dinas Kesehatan	67.406.003,00
	16	RSUD	136.744.550,00
	17	Dinas Pendidikan	359.735.828,00
	18	Dinas BUDPARPORA	4.442.723,00
	19	Dinas TRANSNAKER	300.000,00
	20	DSP3KB	12.309.000,00
	21	DISDUKCAPIL	17.701.700,00
	22	Dinas PMD	1.580.000,00

Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin			Jumlah
	23	Dinas Pertanian	11.764.200,00
	24	Dinas KUMPERDAG	83.699.414,00
	25	BKD	27.593.552,00
	26	DPMPTSP	2.488.833,00
	27	Inspektorat Kabupaten	2.029.820,00
	28	BAPPPEDA	4.187.258,00
	29	DLH	3.852.750,00
	30	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	699.000,00
	31	BPBD	2.056.100,00
	32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	998.959,00
	33	Dinas KOMINFO	58.703.790,00
	Alat Kedokteran Dan Kesehatan		4.460.319.925,00
	1	Sekretariat Daerah	5.998.500,00
	2	Dinas Kesehatan	2.605.299.919,00
	3	RSUD	1.842.573.227,00
	4	Dinas Pendidikan	5.688.360,00
	5	Dinas Pertanian	495.000,00
	6	Dinas KUMPERDAG	264.919,00
	Alat Laboratorium		1.350.297.510,00
	1	Kec. IX Koto	124.044,00
	2	Kec Koto Salak	60.000,00
	3	Dinas PUPR	8.412.552,00
	4	Dinas Kesehatan	355.930.212,00
	5	RSUD	266.785.923,00
	6	Dinas Pendidikan	431.641.298,00
	7	Dinas TRANSNAKER	562.500,00
	8	DISDUKCAPIL	222.500,00
	9	Dinas Pertanian	5.009.866,00
	10	Dinas KUMPERDAG	270.772.767,00
	11	BKD	250.000,00
	12	DPMPTSP	80.000,00
	13	DLH	10.445.848,00
	Alat Persenjataan		15.983.333,00
	1	Dinas Kesehatan	13.016.666,00
	2	Dinas Pendidikan	1.116.667,00
	3	Dinas Pertanian	350.000,00
	4	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	1.500.000,00
	Komputer		3.355.277.368,00
	1	Sekretariat DPRD	20.667.562,00
	2	Sekretariat Daerah	107.203.896,00

Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin			Jumlah
	3	Kec. Pulau Punjung	1.416.667,00
	4	Kec. Sitiung	3.406.250,00
	5	Kec. Koto Baru	5.482.671,00
	6	Kec. Sungai Rumbai	1.621.875,00
	7	Kec. IX Koto	2.384.706,00
	8	Kec. Timpeh	2.076.604,00
	9	Kec. Padang Laweh	2.000.000,00
	10	Kec Tiumang	5.175.000,00
	11	Kec Koto Besar	4.818.750,00
	12	Kec Koto Salak	1.900.000,00
	13	Kec. Asam Jujuhan	1.870.875,00
	14	Dinas PUPR	66.249.797,00
	15	Dinas PERKIMTAN	22.834.066,00
	16	Dinas Perhubungan	27.959.260,00
	17	Dinas Kesehatan	259.484.749,00
	18	RSUD	160.520.241,00
	19	Dinas Pendidikan	2.164.541.489,00
	20	Dinas BUDPARPORA	20.386.461,00
	21	Dinas TRANSNAKER	7.620.753,00
	22	DSP3KB	41.241.010,00
	23	DISDUKCAPIL	65.988.985,00
	24	Dinas PMD	10.765.000,00
	25	Dinas Pertanian	31.222.935,00
	26	Dinas Pangan dan Perikanan	3.629.896,00
	27	Dinas KUMPERDAG	12.416.800,00
	28	BKD	103.159.643,00
	29	DPMPTSP	15.003.397,00
	30	Inspektorat Kabupaten	6.229.000,00
	31	BAPPPEDA	40.876.004,00
	32	DLH	3.400.353,00
	33	Kantor KESBANGPOL	312.500,00
	34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	9.461.126,00
	35	BPBD	3.162.500,00
	36	BKPSDM	2.135.418,00
	37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18.229.697,00
	38	Dinas KOMINFO	98.421.432,00
	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian		1.454.167,00
	1	Sekretariat Daerah	1.454.167,00
	Alat Keselamatan Kerja		9.117.013,00
	1	Dinas Pendidikan	9.117.013,00
	Peralatan Proses/Produksi		750.000,00

Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin			Jumlah
	1	Dinas Pendidikan	750.000,00
	Rambu - Rambu		83.069.890,00
	1	Dinas Perhubungan	83.069.890,00
	Peralatan Olah Raga		15.407.103,00
	1	Dinas Pendidikan	15.407.103,00
5	Penyusutan Semester II		19.001.437.092,00
	Alat Besar		522.704.173,00
	1	Sekretariat DPRD	2.089.286,00
	2	Sekretariat Daerah	1.427.000,00
	3	Kec. Padang Laweh	90.476,00
	4	Kec. Asam Jujuhan	357.143,00
	5	Dinas PUPR	345.570.839,00
	6	Dinas Kesehatan	1.001.878,00
	7	RSUD	4.062.298,00
	8	Dinas Pendidikan	3.937.691,00
	9	Dinas BUDPARPORA	107.143,00
	10	Dinas Pangan dan Perikanan	58.175.596,00
	11	Dinas KUMPERDAG	82.125.700,00
	12	Inspektorat Kabupaten	798.215,00
	13	DLH	20.897.262,00
	14	BPBD	2.063.646,00
	Alat Angkutan		2.765.392.978,00
	1	Sekretariat DPRD	139.689.148,00
	2	Sekretariat Daerah	691.061.089,00
	3	Kec. Pulau Punjung	16.926.379,00
	4	Kec. Sitiung	19.603.312,00
	5	Kec. Koto Baru	20.133.446,00
	6	Kec. Sungai Rumbai	18.792.473,00
	7	Kec. IX Koto	4.111.654,00
	8	Kec. Timpeh	503.412,00
	9	Kec. Padang Laweh	2.427.819,00
	10	Kec Koto Besar	17.936.395,00
	11	Kec Koto Salak	1.647.658,00
	12	Dinas PUPR	182.708.754,00
	13	Dinas PERKIMTAN	10.574.906,00
	14	Dinas Perhubungan	54.922.843,00
	15	Dinas Kesehatan	536.414.743,00
	16	RSUD	182.989.488,00
	17	Dinas Pendidikan	63.217.428,00
	18	Dinas BUDPARPORA	23.345.301,00

Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin			Jumlah
	19	DSP3KB	110.179.912,00
	20	DISDUKCAPIL	88.195.654,00
	21	Dinas Pertanian	83.860.886,00
	22	Dinas Pangan dan Perikanan	14.928.135,00
	23	Dinas KUMPERDAG	61.396.876,00
	24	BKD	41.988.421,00
	25	DPMPTSP	1.167.751,00
	26	BAPPPEDA	23.325.047,00
	27	DLH	64.383.368,00
	28	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	217.745.655,00
	29	BPBD	20.868.535,00
	30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	47.848.633,00
	31	Dinas KOMINFO	2.497.857,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur		459.465.588,00
	1	Sekretariat Daerah	622.083,00
	2	Dinas PUPR	13.636.350,00
	3	Dinas Perhubungan	56.825.617,00
	4	RSUD	348.750,00
	5	Dinas Pendidikan	31.529.589,00
	6	DISDUKCAPIL	874.500,00
	7	Dinas Pertanian	10.395.200,00
	8	Dinas KUMPERDAG	334.658.232,00
	9	BKD	4.088.500,00
	10	DPMPTSP	1.446.500,00
	11	BAPPPEDA	841.667,00
	12	DLH	2.192.600,00
	13	BPBD	1.312.500,00
	14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50.000,00
	15	Dinas KOMINFO	643.500,00
	Alat Pertanian		75.243.208,00
	1	Dinas PUPR	195.536,00
	2	Dinas PERKIMTAN	4.276.250,00
	3	Dinas Pendidikan	53.891.005,00
	4	Dinas Pertanian	166.667,00
	5	Inspektorat Kabupaten	4.218.750,00
	6	DLH	12.495.000,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		3.675.434.837,00
	1	Sekretariat DPRD	313.646.973,00
	2	Sekretariat Daerah	719.011.474,00
	3	Kec. Pulau Punjung	3.585.728,00
	4	Kec. Sitiung	2.100.000,00

Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin			Jumlah
	5	Kec. Koto Baru	5.611.664,00
	6	Kec. Sungai Rumbai	1.571.666,00
	7	Kec. IX Koto	2.875.580,00
	8	Kec. Timpeh	300.000,00
	9	Kec. Padang Laweh	506.667,00
	10	Kec Tiumang	4.792.000,00
	11	Kec Koto Besar	600.000,00
	12	Kec Koto Salak	5.234.166,00
	13	Kec. Asam Jujuhan	1.033.333,00
	14	Dinas PUPR	45.441.206,00
	15	Dinas PERKIMTAN	21.078.650,00
	16	Dinas Perhubungan	12.123.550,00
	17	Dinas Kesehatan	524.896.100,00
	18	RSUD	639.344.885,00
	19	Dinas Pendidikan	892.570.654,00
	20	Dinas BUDPARPORA	23.947.450,00
	21	Dinas TRANSNAKER	5.307.500,00
	22	DSP3KB	12.442.053,00
	23	DISDUKCAPIL	10.602.500,00
	24	Dinas PMD	11.483.500,00
	25	Dinas Pertanian	104.331.918,00
	26	Dinas Pangan dan Perikanan	1.028.417,00
	27	Dinas KUMPERDAG	17.650.556,00
	28	BKD	65.835.614,00
	29	DPMPTSP	7.776.034,00
	30	Inspektorat Kabupaten	19.708.690,00
	31	BAPPPEDA	21.456.143,00
	32	DLH	35.774.916,00
	33	Kantor KESBANGPOL	1.300.000,00
	34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	10.162.086,00
	35	BPBD	8.472.700,00
	36	BKPSDM	8.788.750,00
	37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	37.003.203,00
	38	Dinas KOMINFO	76.038.511,00
	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar		1.113.357.870,00
	1	Sekretariat DPRD	75.973.950,00
	2	Sekretariat Daerah	117.749.172,00
	3	Kec. Sitiung	1.749.500,00
	4	Kec. Sungai Rumbai	632.295,00
	5	Kec. IX Koto	713.600,00
	6	Kec. Timpeh	661.842,00

Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin			Jumlah
	7	Kec. Padang Laweh	225.000,00
	8	Kec Tiumang	2.095.000,00
	9	Kec Koto Salak	496.175,00
	10	Kec. Asam Jujuhan	920.000,00
	11	Dinas PUPR	38.994.814,00
	12	Dinas PERKIMTAN	2.778.850,00
	13	Dinas Perhubungan	4.695.833,00
	14	Dinas Kesehatan	141.532.749,00
	15	RSUD	136.784.550,00
	16	Dinas Pendidikan	352.830.878,00
	17	Dinas BUDPARPORA	5.217.724,00
	18	Dinas TRANSNAKER	300.000,00
	19	DSP3KB	18.447.000,00
	20	DISDUKCAPIL	17.868.233,00
	21	Dinas PMD	1.580.000,00
	22	Dinas Pertanian	6.977.890,00
	23	Dinas KUMPERDAG	83.699.413,00
	24	BKD	18.950.188,00
	25	DPMPTSP	2.545.400,00
	26	Inspektorat Kabupaten	1.000.000,00
	27	BAPPPEDA	3.364.758,00
	28	DLH	4.012.375,00
	29	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	513.333,00
	30	BPBD	1.813.184,00
	31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.548.959,00
	32	Dinas KOMINFO	66.685.205,00
	Alat Kedokteran Dan Kesehatan		5.554.066.711,00
	1	Sekretariat Daerah	5.498.750,00
	2	Dinas Kesehatan	2.710.546.535,00
	3	RSUD	2.832.400.648,00
	4	Dinas Pendidikan	4.943.360,00
	5	Dinas Pertanian	412.500,00
	6	Dinas KUMPERDAG	264.918,00
	Alat Laboratorium		1.367.985.947,00
	1	Kec. IX Koto	124.044,00
	2	Kec Koto Salak	60.000,00
	3	Dinas PUPR	10.793.867,00
	4	Dinas Kesehatan	361.493.837,00
	5	RSUD	285.429.592,00
	6	Dinas Pendidikan	422.741.123,00
	7	Dinas TRANSNAKER	562.500,00

Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin			Jumlah
	8	DISDUKCAPIL	222.500,00
	9	Dinas Pertanian	5.009.864,00
	10	Dinas KUMPERDAG	270.772.772,00
	11	BKD	250.000,00
	12	DPMPTSP	80.000,00
	13	DLH	10.445.848,00
	Alat Persenjataan		15.825.001,00
	1	Dinas Kesehatan	13.016.668,00
	2	Dinas Pendidikan	958.333,00
	3	Dinas Pertanian	350.000,00
	4	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	1.500.000,00
	Komputer		3.343.313.992,00
	1	Sekretariat DPRD	22.221.208,00
	2	Sekretariat Daerah	111.874.575,00
	3	Kec. Pulau Punjung	1.125.000,00
	4	Kec. Sitiung	2.625.000,00
	5	Kec. Koto Baru	5.482.670,00
	6	Kec. Sungai Rumbai	1.621.875,00
	7	Kec. IX Koto	2.384.707,00
	8	Kec. Timpeh	909.937,00
	9	Kec. Padang Laweh	2.000.000,00
	10	Kec Tiumang	3.987.500,00
	11	Kec Koto Besar	4.818.750,00
	12	Kec Koto Salak	1.900.000,00
	13	Kec. Asam Jujuhan	1.247.250,00
	14	Dinas PUPR	56.300.168,00
	15	Dinas PERKIMTAN	20.984.062,00
	16	Dinas Perhubungan	27.959.254,00
	17	Dinas Kesehatan	182.910.067,00
	18	RSUD	157.941.838,00
	19	Dinas Pendidikan	2.215.375.376,00
	20	Dinas BUDPARPORA	19.211.627,00
	21	DSP3KB	72.710.625,00
	22	DISDUKCAPIL	72.561.635,00
	23	Dinas PMD	10.410.833,00
	24	Dinas Pertanian	36.464.979,00
	25	Dinas Pangan dan Perikanan	3.020.000,00
	26	Dinas KUMPERDAG	11.729.305,00
	27	BKD	98.035.160,00
	28	DPMPTSP	16.108.791,00
	29	Inspektorat Kabupaten	3.815.791,00

Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin			Jumlah
	30	BAPPPEDA	32.167.668,00
	31	DLH	1.853.688,00
	32	Kantor KESBANGPOL	312.500,00
	33	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	9.364.250,00
	34	BPBD	3.912.500,00
	35	BKPSDM	3.840.333,00
	36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	45.412.938,00
	37	Dinas KOMINFO	78.712.132,00
	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian		1.745.000,00
	1	Sekretariat Daerah	1.745.000,00
	Alat Keselamatan Kerja		9.456.813,00
	1	Dinas Pendidikan	9.456.813,00
	Peralatan Proses/Produksi		750.000,00
	1	Dinas Pendidikan	750.000,00
	Rambu - Rambu		81.177.861,00
	1	Dinas Perhubungan	81.177.861,00
	Peralatan Olah Raga		15.517.113,00
	1	Dinas Pendidikan	15.517.113,00

V.A.1.c.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monument/bangunan bersejarah, gudang dan gedung museum Gedung dan Bangunan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, merupakan objek pemeliharaan dan harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) dari aset tetap yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp20.000.000,00.

Aset Tetap Gedung dan Bangunan telah dilakukan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu dan dihitung dengan pendekatan bulanan disajikan semesteran.

Adapun saldo per tanggal 31 Desember 2021 dan Saldo 31 Desember 2020 (Audited) adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2021	31 Desember 2020 (Audited)	Tren
	Rp.	Rp.	%
Gedung dan Bangunan	828.611.661.247,80	665.269.927.412,85	124,55%
Akumulasi Penyusutan	(104.370.108.762,00)	(88.623.036.573,00)	117,77%
Nilai Buku	724.241.552.485,80	576.646.890.839,85	125,60%

Nilai Gedung dan Bangunan apabila dibandingkan dengan Audited 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp147.594.661.645,95 atau sebesar 125,60%
.

Adapun Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan sub KIB adalah sebagi berikut :

	31 Desember 2021	31 Desember 2020 (Audited)	Tren
	Rp.	Rp.	%
Bangunan Gedung	796.148.956.234,78	633.564.375.405,83	125,66%
Monumen	6.442.214.368,00	6.442.214.368,00	100,00%
Bangunan Menara	3.102.481.906,00	3.102.481.906,00	0,00%
Tugu Titik Kontrol/Pasti	22.918.008.739,02	22.160.855.733,02	0,00%
Akumulasi Penyusutan	(104.370.108.762,00)	(88.623.036.573,00)	117,77%
Nilai Buku	724.241.552.485,80	576.646.890.839,85	125,60%

Adapun penambahan dan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.42
Penambahan, Pengurangan dan Koreksi Penambahan/Pengurangan Gedung dan Bangunan

No.	Nama OPD	SALDO 31 Desember 2020 (Audited)	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2021	Akumulasi Penyusutan 2020 (Audited)	Penambahan Penyusutan 2021	Pengurangan Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan Aset 2021	Nilai Buku Aset 2021
1	Sekretariat DPRD	41.247.491.530,00	49.800.000,00	-	41.297.291.530,00	5.573.049.252,00	828.709.985,00	-	6.401.759.237,00	34.895.532.293,00
2	Sekretariat Daerah	40.313.559.947,00	462.379.200,00	132.510.000,00	40.643.429.147,00	4.851.817.543,00	887.577.676,00	-	5.739.395.219,00	34.904.033.928,00
3	Kec. Pulau Punjung	971.999.720,00	-	-	971.999.720,00	279.737.764,00	19.776.286,00	-	299.514.050,00	672.485.670,00
4	Kec. Sitiung	506.918.100,00	-	-	506.918.100,00	136.154.022,00	10.172.737,00	-	146.326.759,00	360.591.341,00
5	Kec. Koto Baru	1.247.767.942,00	-	-	1.247.767.942,00	234.753.806,00	24.955.359,00	-	259.709.165,00	988.058.777,00
6	Kec. Sungai Rumbai	1.391.380.178,00	-	-	1.391.380.178,00	400.281.897,00	31.351.145,00	-	431.633.042,00	959.747.136,00

No.	Nama OPD	SALDO 31 Desember 2020 (Audited)	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2021	Akumulasi Penyusutan 2020 (Audited)	Penambahan Penyusutan 2021	Pengurangan Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan Aset 2021	Nilai Buku Aset 2021
7	Kec. IX Koto	89.790.000,00	-	-	89.790.000,00	3.741.250,00	1.795.800,00	-	5.537.050,00	84.252.950,00
8	Kec. Timpeh	2.046.610.796,00	-	-	2.046.610.796,00	311.598.564,00	40.932.216,00	-	352.530.780,00	1.694.080.016,00
9	Kec. Padang Laweh	1.421.972.473,00	-	-	1.421.972.473,00	222.913.046,00	28.439.450,00	-	251.352.496,00	1.170.619.977,00
10	Kec Tiumang	2.417.904.859,00	-	-	2.417.904.859,00	230.306.836,00	48.695.235,00	-	279.002.071,00	2.138.902.788,00
11	Kec Koto Besar	2.187.494.750,00	-	-	2.187.494.750,00	390.683.697,00	44.404.200,00	-	435.087.897,00	1.752.406.853,00
12	Kec Koto Salak	1.972.819.099,00	-	-	1.972.819.099,00	253.955.461,00	39.556.632,00	-	293.512.093,00	1.679.307.006,00
13	Kec. Asam Jujuhan	2.840.508.500,00	-	-	2.840.508.500,00	431.960.109,00	57.152.350,00	-	489.112.459,00	2.351.396.041,00
14	Dinas PUPR	20.583.186.976,00	104.092.970.710,00	56.891.000,00	124.619.266.686,00	1.704.733.325,00	1.917.466.474,00	-	3.622.199.799,00	120.997.066.887,00
15	Dinas PERKIMTAN	349.919.250,00	6.330.845.000,00	-	6.680.764.250,00	19.742.888,00	397.400.505,00	-	417.143.393,00	6.263.620.857,00
16	Dinas Perhubungan	3.505.815.491,00	-	-	3.505.815.491,00	496.141.219,00	71.378.148,00	-	567.519.367,00	2.938.296.124,00
17	Dinas Kesehatan	67.881.083.880,75	37.095.267.584,34	13.722.117.094,60	91.254.234.370,49	8.512.826.308,00	1.504.234.158,86	55.955.315,86	9.961.105.151,00	81.293.129.219,49
18	RSUD	12.661.713.892,00	777.157.026,00	-	13.438.870.918,00	4.600.183.744,00	300.739.542,00	-	4.900.923.286,00	8.537.947.632,00
19	Dinas Pendidikan	262.649.871.239,28	26.828.434.809,21	-	289.478.306.048,49	36.206.267.397,00	5.464.513.263,00	-	41.670.780.660,00	247.807.525.388,49
20	Dinas BUDPARPORA	103.150.354.741,85	-	-	103.150.354.741,85	11.840.609.806,00	2.063.151.095,00	-	13.903.760.901,00	89.246.593.840,85
21	Dinas TRANSNAKER	3.359.217.439,00	-	-	3.359.217.439,00	1.044.654.514,00	67.184.351,00	-	1.111.838.865,00	2.247.378.574,00
22	DSP3KB	2.368.869.768,00	490.090.000,00	-	2.858.959.768,00	311.608.644,00	52.156.322,00	-	363.764.966,00	2.495.194.802,00
23	DISDUKCAPIL	910.851.680,00	54.940.600,00	-	965.792.280,00	465.782.593,00	38.510.725,00	-	504.293.318,00	461.498.962,00
24	Dinas PMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Pertanian	17.479.426.181,30	888.750.000,00	-	18.368.176.181,30	2.798.379.016,00	421.420.376,00	-	3.219.799.392,00	15.148.376.789,30
26	Dinas Pangan dan Perikanan	8.776.059.647,00	182.617.000,00	-	8.958.676.647,00	2.205.298.051,00	181.450.031,00	-	2.386.748.082,00	6.571.928.565,00
27	Dinas KUMPERDAG	50.616.685.035,67	-	-	50.616.685.035,67	3.483.189.125,00	1.012.333.685,00	-	4.495.522.810,00	46.121.162.225,67
28	BKD	5.594.474.000,00	-	-	5.594.474.000,00	554.332.886,00	112.248.904,00	-	666.581.790,00	4.927.892.210,00
29	DPMPTSP	810.939.000,00	-	-	810.939.000,00	142.864.074,00	16.576.230,00	-	159.440.304,00	651.498.696,00
30	Inspektorat Kabupaten	1.535.427.000,00	-	-	1.535.427.000,00	156.101.745,00	30.708.540,00	-	186.810.285,00	1.348.616.715,00
31	BAPPPEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	DLH	2.135.752.292,00	-	-	2.135.752.292,00	413.938.311,00	43.154.844,00	-	457.093.155,00	1.678.659.137,00
33	Kantor KESBANGPOL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Nama OPD	SALDO 31 Desember 2020 (Audited)	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2021	Akumulasi Penyusutan 2020 (Audited)	Penambahan Penyusutan 2021	Pengurangan Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan Aset 2021	Nilai Buku Aset 2021
35	BPBD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	BKPSDM	937.677.005,00	-	-	937.677.005,00	213.632.205,00	18.753.540,00	-	232.385.745,00	705.291.260,00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.306.385.000,00	-	-	1.306.385.000,00	131.797.475,00	26.127.700,00	-	157.925.175,00	1.148.459.825,00
38	Dinas KOMINFO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		**665.269.927.412,85**	**177.253.251.929,55**	**13.911.518.094,60**	**828.611.661.247,80**	**88.623.036.573,00**	**15.803.027.504,86**	**55.955.315,86**	**104.370.108.762,00**	**724.241.552.485,80**

Pada tahun 2021 realisasi anggaran belanja modal gedung dan bangunan adalah sebesar Rp85.986.356.136,57, adapun yang dikapitalisasi menjadi aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp52.850.826.108,95, dikapitalisasi menjadi peralatan dan mesin sebesar Rp2.226.315.100,00, dikapitalisasi menjadi aset tetap jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp798.668.600,00 dan dikapitalisasi menjadi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp6.682.836.658,00. Sisanya sebesar Rp23.427.709.669,62 tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap gedung dan bangunan karena tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

1. Aset Ekstrakomptabel gedung dan bangunan sebesar Rp438.372.670,62
2. Pembayaran hutang tahun 2020 Rp22.645.347.999,00
3. Belanja yang akan diserahkan Rp109.615.000,00
4. Belanja Operasional Rp234.374.000,00

Adapun Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan perolehan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.43
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah
Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan 31 Desember 2020 (Audited)		665.269.927.412,85
Penambahan Gedung dan Bangunan 2021		177.253.251.929,55
1	Penambahan Belanja Modal Menjadi Aset	53.631.644.346,95
2	Penambahan Belanja Modal Bos Reguler Menjadi Aset	98.300.000,00
3	Penambahan Belanja Modal BLUD Menjadi Aset	37.350.500,00
4	Penambahan Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset	288.259.600,00
5	Penambahan Barang dan Jasa BLUD Menjadi Aset	114.464.000,00
6	Penambahan Honor Pokja Menjadi Aset	132.510.000,00
7	Penambahan Hibah Pusat Menjadi Aset	15.658.608.000,00
8	Penambahan Kurang Catat Menjadi Aset	102.209.484,00
9	Penambahan Mutasi Antar OPD	13.315.850.207,60
10	Penambahan Mutasi Honor Pokja	124.590.000,00
11	Penambahan Reklas sesama Aset Tetap/lainnya/ektrakompatibel	88.858.263.091,00

No	Uraian	Jumlah
12	Retensi	4.891.202.700,00
Pengurangan Gedung dan Bangunan 2021		13.911.518.094,60
1	Pengurangan Reklas Sesama Aset Tetap/lainnya/Ekstrakompatibel	224.486.283,00
2	Pengurangan Mutasi Antar OPD	13.315.850.207,60
3	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	132.510.000,00
	Pengurangan Koreksi	238.671.604,00
Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan 31 Desember 2021		828.611.661.247,80

Rincian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2021 versi Permendagri 17 Tahun 2007 berdasarkan perolehan dan OPD sebesar Rp177.253.251.929,55 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.44
Uraian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2021

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan		Jumlah
Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan 31 Desember 2020 (Audited)		**665.269.927.412,85**
Penambahan Gedung dan Bangunan 2021		**177.253.251.929,55**
1	**Penambahan Belanja Modal Menjadi Aset**	**53.631.644.346,95**
	Bangunan Gedung	53.101.983.623,95
	1 Sekretariat DPRD	49.800.000,00
	2 Sekretariat Daerah	272.978.200,00
	3 Dinas PUPR	11.594.597.432,00
	4 Dinas Kesehatan	13.441.804.640,74
	5 RSUD	659.633.026,00
	6 Dinas Pendidikan	25.556.413.325,21
	7 DSP3KB	490.090.000,00
	8 Dinas Pertanian	854.050.000,00
	9 Dinas Pangan dan Perikanan	182.617.000,00
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	529.660.723,00
	1 Dinas Kesehatan	529.660.723,00
2	**Penambahan Belanja Modal Bos Reguler Menjadi Aset**	**98.300.000,00**

	Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Jumlah
	Bangunan Gedung	98.300.000,00
	1 Dinas Pendidikan	98.300.000,00
3	**Penambahan Belanja Modal BLUD Menjadi Aset**	37.350.500,00
	Penambahan Belanja Modal BLUD Menjadi Aset	37.350.500,00
	1 Dinas Kesehatan	37.350.500,00
4	**Penambahan Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset**	**288.259.600,00**
	Bangunan Gedung	286.609.600,00
	1 Dinas Kesehatan	196.969.000,00
	2 DISDUKCAPIL	54.940.600,00
	3 Dinas Pertanian	34.700.000,00
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.650.000,00
	1 Dinas Kesehatan	1.650.000,00
5	**Penambahan Barang dan Jasa BLUD Menjadi Aset**	**114.464.000,00**
	Bangunan Gedung	114.464.000,00
	1 RSUD	114.464.000,00
6	**Penambahan Honor Pokja Menjadi Aset**	**131.154.000,00**
	Bangunan Gedung	131.154.000,00
	1 Sekretariat Daerah	131.154.000,00
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.356.000,00
	1 Sekretariat Daerah	1.356.000,00
7	**Penambahan Hibah Pusat Menjadi Aset**	**15.658.608.000,00**
	Bangunan Gedung	15.658.608.000,00
	1 Dinas PUPR	5.003.368.000,00
	2 Dinas PERKIMTAN	6.290.945.000,00
	3 Dinas Kesehatan	4.364.295.000,00
8	**Penambahan Kurang Catat Menjadi Aset**	**102.209.484,00**
	Bangunan Gedung	102.209.484,00
	1 Dinas Pendidikan	102.209.484,00

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan		Jumlah
9	**Penambahan Mutasi Antar OPD**	**13.315.850.207,60**
	Bangunan Gedung	12.586.066.159,70
	1 Sekretariat Daerah	56.891.000,00
	2 Dinas Kesehatan	12.529.175.159,70
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	729.784.047,90
	1 Dinas Kesehatan	729.784.047,90
10	**Penambahan Mutasi Honor Pokja**	**124.590.000,00**
	Bangunan Gedung	123.234.000,00
	1 Dinas Kesehatan	27.174.000,00
	2 RSUD	3.060.000,00
	3 Dinas Pendidikan	93.000.000,00
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.356.000,00
	1 Dinas Kesehatan	1.356.000,00
11	**Penambahan Reklas sesama Aset Tetap/lainnya/ektrakompatibel**	**88.858.263.091,00**
	Bangunan Gedung	88.633.776.808,00
	1 Dinas PUPR	82.603.802.578,00
	2 Dinas PERKIMTAN	39.900.000,00
	3 Dinas Kesehatan	5.011.562.230,00
	4 Dinas Pendidikan	978.512.000,00
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	224.486.283,00
	1 Dinas Kesehatan	224.486.283,00
12	Retensi	4.891.202.700,00
	Bangunan Gedung	4.891.202.700,00
	1 Dinas PUPR	4.891.202.700,00

Penambahan hibah Pusat menjadi Aset Sebesar Rp15.658.608.000,00 terdiri dari :

1. Penambahan saldo Gedung dari Hibah pusat menjadi aset pada Dinas PUPR melalui Naskah hibah Barang milik Negara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dengan Bupati Dharmasraya Nomor 424.1/BA/DC/2020 Penataan Bangunan dan Lingkungan senilai Rp5.003.368.000,00.

2. Penambahan saldo Gedung dari Hibah pusat menjadi aset pada Dinas PERKIMTAN melalui Naskah hibah Barang milik Negara Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Bupati Dharmasraya Nomor 220/PKS/DR/2020 Rumah Khusus senilai Rp6.290.945.000,00.
3. Penambahan saldo Gedung dari Hibah pusat menjadi aset pada Dinas KESEHATAN melalui Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Daerah antara Kementrian Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya yang berasal dari Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembentuan (DK/TP-04) Nomor : KN.02.07/I.3/5425/2021 Bangunan Klinik / Puskesmas senilai Rp4.364.295.000,00.

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa Retensi pada Dinas PUPR adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayarkan atau ditahan hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak berupa kewajiban pemeliharaan pada Pembangunan Mesjid Agung Dharmasraya senilai Rp4.891.202.700,00.

Tabel 5.2.45
Uraian Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Pengurangan Gedung dan Bangunan		Jumlah
Pengurangan Gedung dan Bangunan 2021		**13.911.518.094,60**
1	**Pengurangan Reklas Sesama Aset Tetap/lainnya/Ekstrakompatibel**	**224.486.283,00**
	Bangunan Gedung	224.486.283,00
	1 Dinas Kesehatan	224.486.283,00
2	**Pengurangan Mutasi Antar OPD**	**13.315.850.207,60**
	Bangunan Gedung	12.586.066.159,70
	1 Dinas PUPR	56.891.000,00
	2 Dinas Kesehatan	12.529.175.159,70
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	729.784.047,90
	Dinas Kesehatan	729.784.047,90
3	**Pengurangan Mutasi Honor Pokja**	**132.510.000,00**
	Bangunan Gedung	131.154.000,00
	1 Sekretariat Daerah	131.154.000,00
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.356.000,00
	1 Sekretariat Daerah	1.356.000,00
4	**Pengurangan Koreksi**	**238.671.604,00**
	Bangunan Gedung	238.671.604,00
	1 Dinas Kesehatan	238.671.604,00
Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan 31 Desember 2021		**828.611.661.247,80**

Penambahan dan pengurangan Penyusutan Aset Tetap Gedung dan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.46
Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 31 Desember 2020		**88.623.036.573,00**
Penambahan Penyusutan Gedung dan Bangunan 2021		**15.803.027.504,86**
1	Penambahan Penyusutan Mutasi Antar OPD	44.356.857,86
2	Penambahan Penyusutan Reklas	11.598.458,00
3	Penyusutan Semester I	7.814.111.584,00
4	Penyusutan Semester II	7.932.960.605,00
Pengurangan Penyusutan Gedung dan Bangunan 2021		**55.955.315,86**
1	Pengurangan Penyusutan Mutasi Antar OPD	11.598.458,00
2	Pengurangan Penyusutan Reklas	44.356.857,86
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 31 Desember 2020 (Audited)		**104.370.108.762,00**
Nilai Buku Aset Tetap Gedung dan Bangunan 31 Desember 2021		**724.241.552.485,80**

Rincian Penambahan Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp15.803.027.504,86 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.47
Penambahan Penyusutan Tetap Gedung dan Bangunan

Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan			Jumlah
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 31 Desember 2020 (Audited)			**88.623.036.573,00**
Penambahan Penyusutan Gedung dan Bangunan 2021			**15.803.027.504,86**
1	Penambahan Penyusutan Mutasi Antar OPD		44.356.857,86
	Bangunan Gedung		36.691.271,96
	1	Dinas Kesehatan	36.691.271,96
	Tugu Titik Kontrol/Pasti		7.665.585,90
	1	Dinas Kesehatan	7.665.585,90
2	Penambahan Penyusutan Reklas		11.598.458,00
	Tugu Titik Kontrol/Pasti		11.598.458,00
	1	Dinas Kesehatan	11.598.458,00
3	Penyusutan Semester I		7.814.111.584,00
	Bangunan Gedung		7.485.833.236,00
	1	Sekretariat DPRD	409.749.366,00
	2	Sekretariat Daerah	408.791.325,00
	3	Kec. Pulau Punjung	9.888.143,00
	4	Kec. Sitiung	5.086.368,00
	5	Kec. Koto Baru	11.948.093,00
	6	Kec. Sungai Rumbai	15.455.883,00
	7	Kec. Timpeh	19.968.108,00
	8	Kec. Padang Laweh	12.053.207,00

Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan			Jumlah
	9	Kec Tiumang	23.903.106,00
	10	Kec Koto Besar	22.202.100,00
	11	Kec Koto Salak	19.778.316,00
	12	Kec. Asam Jujuhan	28.576.175,00
	13	Dinas PUPR	778.913.980,00
	14	Dinas PERKIMTAN	328.985.923,00
	15	Dinas Perhubungan	35.689.074,00
	16	Dinas Kesehatan	677.706.489,00
	17	RSUD	146.192.141,00
	18	Dinas Pendidikan	2.568.947.607,00
	19	Dinas BUDPARPORA	1.022.707.655,00
	20	Dinas TRANSNAKER	33.592.175,00
	21	DSP3KB	20.632.965,00
	22	DISDUKCAPIL	18.265.442,00
	23	Dinas Pertanian	183.824.739,00
	24	Dinas Pangan dan Perikanan	88.771.289,00
	25	Dinas KUMPERDAG	477.663.926,00
	26	BKD	56.124.452,00
	27	DPMPTSP	8.288.115,00
	28	Inspektorat Kabupaten	15.354.270,00
	29	DLH	17.318.405,00
	30	BKPSDM	6.390.549,00
	31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.063.850,00
	Monumen		64.422.145,00
	1	Sekretariat Daerah	398.670,00
	2	Dinas PUPR	1.581.160,00
	3	Dinas Kesehatan	627.210,00
	4	Dinas Pendidikan	61.815.105,00
	Bangunan Menara		38.781.023,00
	1	Dinas PUPR	38.781.023,00
	Tugu Titik Kontrol/Pasti		225.075.180,00
	1	Sekretariat DPRD	4.360.547,00
	2	Sekretariat Daerah	33.241.041,00
	3	Kec. Koto Baru	529.587,00
	4	Kec. Sungai Rumbai	219.690,00
	5	Kec. IX Koto	897.900,00
	6	Kec. Timpeh	498.000,00
	7	Kec. Padang Laweh	2.166.518,00
	8	Kec Tiumang	444.512,00
	9	Dinas PUPR	16.636.908,00
	10	Dinas PERKIMTAN	1.606.948,00
	11	Dinas Kesehatan	17.221.064,00
	12	RSUD	3.530.000,00
	13	Dinas Pendidikan	71.061.024,00

Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan			Jumlah
	14	Dinas BUDPARPORA	8.867.893,00
	15	DSP3KB	3.109.582,00
	16	Dinas Pertanian	23.182.322,00
	17	Dinas Pangan dan Perikanan	1.753.490,00
	18	Dinas KUMPERDAG	28.502.915,00
	19	DLH	4.259.018,00
	20	BKPSDM	2.986.221,00
4	Penyusutan Semester II		7.932.960.605,00
	Bangunan Gedung		7.603.794.485,00
	1	Sekretariat DPRD	410.239.524,00
	2	Sekretariat Daerah	411.506.929,00
	3	Kec. Koto Baru	9.888.143,00
	4	Kec. Sungai Rumbai	5.086.369,00
	5	Kec. IX Koto	11.948.092,00
	6	Kec. Timpeh	15.455.882,00
	7	Kec. Padang Laweh	19.968.108,00
	8	Kec Tiumang	12.053.207,00
	9	Dinas PUPR	23.903.106,00
	10	Dinas PERKIMTAN	22.202.100,00
	11	Dinas Kesehatan	19.778.316,00
	12	RSUD	28.576.175,00
	13	Dinas Pendidikan	1.024.554.313,00
	14	Dinas BUDPARPORA	65.200.687,00
	15	DSP3KB	35.689.074,00
	16	Dinas Pertanian	733.988.028,00
	17	Dinas Pangan dan Perikanan	147.487.401,00
	18	Dinas KUMPERDAG	2.629.813.399,00
	19	DLH	1.022.707.655,00
	20	BKPSDM	33.592.176,00
	21	DSP3KB	25.304.193,00
	22	DISDUKCAPIL	20.245.283,00
	23	Dinas Pertanian	191.230.994,00
	24	Dinas Pangan dan Perikanan	89.171.762,00
	25	Dinas KUMPERDAG	477.663.929,00
	26	BKD	56.124.452,00
	27	DPMPTSP	8.288.115,00
	28	Inspektorat Kabupaten	15.354.270,00
	29	DLH	17.318.404,00
	30	BKPSDM	6.390.549,00
	31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.063.850,00
	Monumen		64.422.145,00
	1	Sekretariat Daerah	398.670,00
	2	Dinas PUPR	1.581.160,00
	3	Dinas Kesehatan	627.210,00

Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan			Jumlah
	4	Dinas Pendidikan	61.815.105,00
	Bangunan Menara		38.781.023,00
	1	Dinas PUPR	38.781.023,00
	Tugu Titik Kontrol/Pasti		225.962.952,00
	1	Sekretariat DPRD	4.360.548,00
	2	Sekretariat Daerah	33.241.041,00
	3	Kec. Koto Baru	529.587,00
	4	Kec. Sungai Rumbai	219.690,00
	5	Kec. IX Koto	897.900,00
	6	Kec. Timpeh	498.000,00
	7	Kec. Padang Laweh	2.166.518,00
	8	Kec Tiumang	444.511,00
	9	Dinas PUPR	16.636.907,00
	10	Dinas PERKIMTAN	1.606.947,00
	11	Dinas Kesehatan	18.108.842,00
	12	RSUD	3.530.000,00
	13	Dinas Pendidikan	71.061.023,00
	14	Dinas BUDPARPORA	8.867.892,00
	15	DSP3KB	3.109.582,00
	16	Dinas Pertanian	23.182.321,00
	17	Dinas Pangan dan Perikanan	1.753.490,00
	18	Dinas KUMPERDAG	28.502.915,00
	19	DLH	4.259.017,00
	20	BKPSDM	2.986.221,00

Rincian Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp55.955.315,86 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.48
Uraian Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2021		**55.955.315,86**
Pengurangan Penyusutan Mutasi Antar OPD		**36.691.271,96**
Bangunan Gedung		36.691.271,96
1	Dinas Kesehatan	36.691.271,96
Tugu Titik Kontrol/Pasti		7.665.585,90
1	Dinas Kesehatan	7.665.585,90
Pengurangan Penyusutan Reklas		11.598.458,00
Bangunan Gedung		11.598.458,00
1	Dinas Kesehatan	11.598.458,00

Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2021	**55.955.315,86**
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 31 Desember 2021	**104.370.108.762,00**
Nilai Buku Aset Tetap Gedung dan Bangunan 31 Desember 2021	**724.241.552.485,80**

V.A.1.c.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Untuk dapat diakui sebagai Aset Jalan, Irigasi Dan Jaringan, maka jalan,irigasi dan jaringan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan dan merupakan objek pemeliharaan. Jalan, Irigasi dan jaringan tidak ada diatur mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi. berapapun nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dikapitalisasi dan disajikan berdasarkan nilai perolehan dan dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap tersebut. Metode penyusutannya garis lurus tidak ada nilai residu dan dihitung dengan pendekatan bulanan disajikan semesteran.

Nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 (Audited) adalah sebagai berikut :

	Saldo Aset Tetap 2021	Saldo Aset Tetap 2020 (Audited)	Tren
	Rp.	Rp.	%
Jalan Irigasi dan Jaringan	1.347.104.392.370,42	1.268.023.945.040,42	106,24%
Akumulasi Penyusutan	(727.648.250.096,00)	(623.685.661.545,00)	116,67%
Nilai Buku	619.456.142.274,42	644.338.283.495,42	96,14%

Adapun penambahan dan pengurangan saldo Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.49
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Per OPD

No.	Nama OPD	Saldo Aset Tetap 2020 (audited)	Jumlah Penambahan Aset 2021	Jumlah Pengurangan Aset 2021	Saldo Aset Tetap 2021
1	Sekretariat DPRD	5.852.155.166,00	124.084.900,00	-	5.976.240.066,00
2	Sekretariat Daerah	4.636.454.940,00	10.620.000,00	10.620.000,00	4.636.454.940,00
3	Kec. Pulau Punjung	7.700.000,00	-	-	7.700.000,00
4	Kec. Sitiung	9.100.000,00	-	-	9.100.000,00
5	Kec. Koto Baru	-	-	-	-

No.	Nama OPD	Saldo Aset Tetap 2020 (audited)	Jumlah Penambahan Aset 2021	Jumlah Pengurangan Aset 2021	Saldo Aset Tetap 2021
6	Kec. Sngai Rumbai	13.483.500,00	-	-	13.483.500,00
7	Kec. IX Koto	16.778.576,00		-	16.778.576,00
8	Kec. Timpeh	-		-	-
9	Kec. Padang Laweh	-	-	-	-
10	Kec Tiumang	700.000,00	-	-	700.000,00
11	Kec Koto Besar	18.400.000,00	-	-	18.400.000,00
12	Kec Koto Salak	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
13	Kec. Asam Jujuhan	-	-	-	-
14	Dinas PUPR	1.212.822.024.654,49	61.576.131.950,00	-	1.274.398.156.604,49
15	Dinas PERKIMTAN	4.582.763.620,00	17.207.730.480,00	-	21.790.494.100,00
16	Dinas Perhubungan	246.486.519,00	149.500.000,00	-	395.986.519,00
17	Dinas Kesehatan	2.680.079.287,00	-	-	2.680.079.287,00
18	RSUD	932.508.000,00	-	-	932.508.000,00
19	Dinas Pendidikan	1.736.456.488,00	23.000.000,00	-	1.759.456.488,00
20	Dinas BUDPARPORA	157.269.000,00	-	-	157.269.000,00
21	Dinas TRANSNAKER	461.741.500,00	-	-	461.741.500,00
22	DSP3KB	-	-	-	-
23	DISDUKCAPIL	34.853.500,00	-	-	34.853.500,00
24	Dinas PMD	26.390.000,00	-	-	26.390.000,00
25	Dinas Pertanian	1.345.100.007,00	-	-	1.345.100.007,00
26	Dinas Pangan dan Perikanan	3.569.008.975,00	-	-	3.569.008.975,00
27	Dinas KUMPERDAG	14.227.909.931,93	-	-	14.227.909.931,93
28	BKD	-	-	-	-
29	DPMPTSP	14.330.500,00	-	-	14.330.500,00
30	Inspektorat Kabupaten	-	-	-	-

No.	Nama OPD	Saldo Aset Tetap 2020 (audited)	Jumlah Penambahan Aset 2021	Jumlah Pengurangan Aset 2021	Saldo Aset Tetap 2021
31	BAPPPEDA	48.453.000,00	-	-	48.453.000,00
32	DLH	122.253.800,00	-	-	122.253.800,00
33	Kantor KESBANGPOL	-	-	-	-
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	11.717.000,00	-	-	11.717.000,00
35	BPBD	14.264.419.276,00	-	-	14.264.419.276,00
36	BKPSDM	6.995.000,00	-	-	6.995.000,00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	19.690.000,00	-	-	19.690.000,00
38	Dinas KOMINFO	157.222.800,00	-	-	157.222.800,00
Jumlah		**1.268.023.945.040,42**	**79.091.067.330,00**	**10.620.000,00**	**1.347.104.392.370,42**

Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.50
Penambahan Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Per OPD

No.	Nama OPD	Saldo Aset Tetap 2021	Akumulasi Penyusutan 2020 (Audited)	Penambahan Penyusutan 2021	Pengurangan Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan Aset 2021	Nilai Buku Aset Tetatap 2021
1	Sekretariat DPRD	5.976.240.066,00	1.320.719.861,00	193.936.057,00	-	1.514.655.918,00	4.461.584.148,00
2	Sekretariat Daerah	4.636.454.940,00	744.936.904,00	118.118.313,00	-	863.055.217,00	3.773.399.723,00
3	Kec. Pulau Punjung	7.700.000,00	1.556.042,00	192.500,00	-	1.748.542,00	5.951.458,00
4	Kec. Sitiung	9.100.000,00	2.008.542,00	227.500,00	-	2.236.042,00	6.863.958,00
5	Kec. Koto Baru	-	-	-	-	-	-
6	Kec. Sngai Rumbai	13.483.500,00	4.210.882,00	427.922,00	-	4.638.804,00	8.844.696,00

No.	Nama OPD	Saldo Aset Tetap 2021	Akumulasi Penyusutan 2020 (Audited)	Penambahan Penyusutan 2021	Pengurangan Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan Aset 2021	Nilai Buku Aset Tetatap 2021
7	Kec. IX Koto	16.778.576,00	3.464.590,00	419.464,00	-	3.884.054,00	12.894.522,00
8	Kec. Timpeh	-	-	-	-	-	-
9	Kec. Padang Laweh	-	-	-	-	-	-
10	Kec Tiumang	700.000,00	176.458,00	17.500,00	-	193.958,00	506.042,00
11	Kec Koto Besar	18.400.000,00	5.098.333,00	460.000,00	-	5.558.333,00	12.841.667,00
12	Kec Koto Salak	1.500.000,00	209.375,00	37.500,00	-	246.875,00	1.253.125,00
13	Kec. Asam Jujuhan	-	-	-	-	-	-
14	Dinas PUPR	1.274.398.156.604,49	615.710.281.933,00	87.546.407.918,00	-	703.256.689.851,00	571.141.466.753,49
15	Dinas PERKIMTAN	21.790.494.100,00	313.272.471,00	13.544.227.114,00	-	13.857.499.585,00	7.932.994.515,00
16	Dinas Perhubungan	395.986.519,00	107.637.600,00	23.295.959,00	-	130.933.559,00	265.052.960,00
17	Dinas Kesehatan	2.680.079.287,00	537.532.143,00	118.425.947,00	-	655.958.090,00	2.024.121.197,00
18	RSUD	932.508.000,00	143.700.986,00	38.038.186,00	-	181.739.172,00	750.768.828,00
19	Dinas Pendidikan	1.759.456.488,00	349.357.194,00	93.482.751,00	-	442.839.945,00	1.316.616.543,00
20	Dinas BUDPARPORA	157.269.000,00	5.656.937,00	5.135.634,00	-	10.792.571,00	146.476.429,00
21	Dinas TRANSNAKER	461.741.500,00	148.993.973,00	21.248.830,00	-	170.242.803,00	291.498.697,00
22	DSP3KB	-	-	-	-	-	-
23	DISDUKCAPIL	34.853.500,00	9.085.474,00	871.338,00	-	9.956.812,00	24.896.688,00
24	Dinas PMD	26.390.000,00	6.707.458,00	659.750,00	-	7.367.208,00	19.022.792,00
25	Dinas Pertanian	1.345.100.007,00	352.048.709,00	53.973.565,00	-	406.022.274,00	939.077.733,00

No.	Nama OPD	Saldo Aset Tetap 2021	Akumulasi Penyusutan 2020 (Audited)	Penambahan Penyusutan 2021	Pengurangan Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan Aset 2021	Nilai Buku Aset Tetatap 2021
26	Dinas Pangan dan Perikanan	3.569.008.975,00	876.723.070,00	90.656.160,00	-	967.379.230,00	2.601.629.745,00
27	Dinas KUMPERDAG	14.227.909.931,93	541.853.270,00	925.934.177,00	-	1.467.787.447,00	12.760.122.484,93
28	BKD	-	-	-	-	-	-
29	DPMPTSP	14.330.500,00	4.904.242,00	617.900,00	-	5.522.142,00	8.808.358,00
30	Inspektorat Kabupaten	-	-	-	-	-	-
31	BAPPPEDA	48.453.000,00	7.368.894,00	1.211.325,00	-	8.580.219,00	39.872.781,00
32	DLH	122.253.800,00	18.286.626,00	3.056.345,00	-	21.342.971,00	100.910.829,00
33	Kantor KESBANGPOL	-	-	-	-	-	-
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	11.717.000,00	3.115.762,00	361.934,00	-	3.477.696,00	8.239.304,00
35	BPBD	14.264.419.276,00	2.441.388.976,00	1.171.866.708,00	-	3.613.255.684,00	10.651.163.592,00
36	BKPSDM	6.995.000,00	1.204.500,00	152.400,00	-	1.356.900,00	5.638.100,00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	19.690.000,00	4.840.458,00	984.500,00	-	5.824.958,00	13.865.042,00
38	Dinas KOMINFO	157.222.800,00	19.319.882,00	8.143.354,00	-	27.463.236,00	129.759.564,00
Jumlah		**1.347.104.392.370,42**	**623.685.661.545,00**	**103.962.588.551,00**	**-**	**727.648.250.096,00**	**619.456.142.274,42**

Pada tahun 2021 realisasi anggaran belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebesar Rp22.037.066.862,00, adapun yang dikapitalisasi menjadi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp19.130.745.665,00, dikapitalisai menjadi peralatan dan mesin sebesar Rp891.612.000,00, dikapitalisasi menjadi aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp47.746.000,00, dikapitalisasi menjadi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp513.575.597,00 dikapitalisasi menjadi aset tak berwujud sebesar Rp.79.853.600,00. Sisanya sebesar Rp1.373.534.000,00 tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap karena tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran hutang tahun 2020 Rp603.270.000,00
2. Belanja persediaan Rp618.480.000,00
3. Belanja Operasional Rp151.784.000,00

Adapun Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.51
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Berdasarkan Perolehan

Saldo Aset Tetap 2020 (audited)		**1.268.023.945.040,42**
JumlahPenambahan Aset Tetap 2021		79.091.067.330,00
1	Penambahan Belanja Modal Menjadi Aset	19.929.414.265,00
2	Penambahan Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset	600.000,00
3	Penambahan Honor Pokja Menjadi Aset	10.620.000,00
4	Penambahan Hibah Pusat Menjadi Aset	40.147.285.188,00
5	Penambahan Penilaian Hibah Masyarakat Menjadi Aset	23.000.000,00
6	Penambahan Mutasi Honor Pokja	10.620.000,00
7	Penambahan Reklas sesama Aset Tetap/lainnya/ektrakompatibel	18.969.527.877,00
Jumlah Pengurangan Aset Tetap 2021		10.620.000,00
1	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	10.620.000,00
Saldo Aset Tetap 2021		**1.347.104.392.370,42**

Uraian Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp79.091.067.330,00 terdiri dari :

Tabel 5.2.52
Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Per OPD

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan			Jumlah
Saldo Aset Tetap 2020 (audited)			1.268.023.945.040,42
Jumlah Penambahan Aset Tetap 2021			79.091.067.330,00
1	Penambahan Belanja Modal Menjadi Aset		19.929.414.265,00
	Jalan Dan Jembatan		16.458.086.480,00
	1	Dinas PUPR	16.252.690.000,00
	2	Dinas PERKIMTAN	205.396.480,00
	Bangunan Air		2.623.074.285,00

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan			Jumlah
	1	Dinas PUPR	2.623.074.285,00
	Instalasi		599.753.500,00
	1	Sekretariat DPRD	123.484.900,00
	2	Dinas PUPR	476.268.600,00
	Jaringan		248.500.000,00
	1	Dinas PUPR	99.000.000,00
	2	Dinas Perhubungan	149.500.000,00
2	Penambahan Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset		600.000,00
	Instalasi		600.000,00
	1	Sekretariat DPRD	600.000,00
3	Penambahan Honor Pokja Menjadi Aset		10.620.000,00
	Bangunan Air		10.620.000,00
	1	Sekretariat Daerah	10.620.000,00
4	Penambahan Hibah Pusat Menjadi Aset		40.147.285.188,00
	Jalan Dan Jembatan		30.321.730.620,00
	1	Dinas PUPR	13.369.356.620,00
	2	Dinas PERKIMTAN	16.952.374.000,00
	Instalasi		7.015.958.821,00
	1	Dinas PUPR	7.015.958.821,00
	Jaringan		2.809.595.747,00
	1	Dinas PUPR	2.809.595.747,00
5	Penambahan Penilaian Hibah Masyarakat Menjadi Aset		23.000.000,00
	Bangunan Air		23.000.000,00
	1	Dinas Pendidikan	23.000.000,00
6	Penambahan Mutasi Honor Pokja		10.620.000,00
	Bangunan Air		10.620.000,00
	1	Dinas PUPR	10.620.000,00
7	Penambahan Reklas sesama Aset Tetap/lainnya/ektrakompatibel		18.969.527.877,00
	Jalan Dan Jembatan		487.808.000,00
	1	Dinas PUPR	437.848.000,00
	2	Dinas PERKIMTAN	49.960.000,00
	Bangunan Air		17.558.433.606,00
	1	Dinas PUPR	17.558.433.606,00
	Instalasi		190.787.033,00
	1	Dinas PUPR	190.787.033,00
	Jaringan		732.499.238,00
	1	Dinas PUPR	732.499.238,00
Jumlah Pengurangan Aset Tetap 2021			**10.620.000,00**
1	Pengurangan Mutasi Honor Pokja		10.620.000,00
	Bangunan Air		10.620.000,00
	1	Sekretariat Daerah	10.620.000,00
Saldo Aset Tetap 2021			**1.347.104.392.370,42**

Penambahan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah pusat menjadi aset pada Dinas PUPR terjadi karena Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Naskah Hibah Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat memperoleh hibah berupa Jembatan Gantung Pejalan Kaki senilai Rp13.369.356.620,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara (BMN) Nomor : PS.04.03/PJN.II/SB/820.1 senilai Rp3.902.690.933,00 berupa Jembatan Gantung Pejalan Kaki Lubuk Tumbulun
2. Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara (BMN) Nomor : PS.04.03/PJN.II/SB/820.2 senilai Rp3.923.033.933,00 berupa Jembatan Gantung Pejalan Kaki Lubuk Anturung
3. Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara (BMN) Nomor : PS.04.03/PJN.II/SB/820.3 senilai Rp5.543.631.754,00 berupa Jembatan Gantung Pejalan Kaki Tapian Napal

Penambahan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah pusat menjadi aset pada Dinas PERKIMTAN terjadi karena Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Naskah Hibah Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 424.1/BA/DC/2020 Pengembangan Kawasan Pemukiman senilai Rp16.952.374.000,00

Penambahan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah pusat menjadi aset pada Dinas PUPR terjadi karena Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Naskah Hibah Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 424.1/BA/DC/2020 Pengembangan Sistem Pengendalian Air Minum senilai Rp9.825.554.568,00

Adapun penambahan dan pengurangan penyusutan jalan, irigasi dan jaringan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.2.53
Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap 2021		**1.347.104.392.370,42**
Akumulasi Penyusutan 2020 (Audited)		623.685.661.545,00
Penambahan Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan 2021		103.962.588.551,00
1	Penyusutan Semester I	55.197.742.962,00
2	Penyusutan Semester II	48.764.845.589,00
Akumulasi Penyusutan Aset 2021		727.648.250.096,00
Nilai Buku Aset Tetap 2021		**619.456.142.274,42**

Uraian Penambahan Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp103.962.588.551,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.54
Uraian Penambahan Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan

Penambahan Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan			Jumlah
Saldo Aset Tetap 2021			1.347.104.392.370,42
Akumulasi Penyusutan 2020 (Audited)			623.685.661.545,00
Penambahan Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan 2021			103.962.588.551,00
1	Penyusutan Semester I		55.197.742.962,00
	Jalan Dan Jembatan		50.136.253.219,00
	1	Dinas PUPR	36.695.359.671,00
	2	Dinas PERKIMTAN	12.504.718.225,00
	3	RSUD	9.375.300,00
	4	Dinas Pendidikan	13.372.140,00
	5	Dinas TRANSNAKER	10.326.915,00
	6	Dinas Pertanian	14.751.500,00
	7	Dinas Pangan dan Perikanan	1.957.500,00
	8	Dinas KUMPERDAG	317.889.445,00
	9	BPBD	568.502.523,00
	Bangunan Air		2.283.103.714,00
	1	Sekretariat Daerah	437.000,00
	2	Dinas PUPR	2.106.820.882,00
	3	Dinas PERKIMTAN	12.826.591,00
	4	Dinas Perhubungan	9.113.938,00
	5	Dinas Kesehatan	197.750,00
	6	RSUD	8.179.793,00
	7	Dinas Pendidikan	20.281.700,00
	8	Dinas BUDPARPORA	2.567.817,00
	9	Dinas TRANSNAKER	100.000,00
	10	Dinas Pertanian	7.424.480,00
	11	Dinas Pangan dan Perikanan	39.667.032,00
	12	Dinas KUMPERDAG	57.872.933,00
	13	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	138.017,00
	14	BPBD	17.430.831,00
	15	BKPSDM	44.950,00
	Instalasi		1.802.169.698,00
	1	Sekretariat DPRD	67.390.743,00
	2	Sekretariat Daerah	3.410.626,00
	3	Kec. Pulau Punjung	96.250,00
	4	Kec. Sungai Rumbai	201.367,00
	5	Kec. IX Koto	209.732,00
	6	Kec Koto Besar	230.000,00

Penambahan Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan			Jumlah
	7	Kec Koto Salak	18.750,00
	8	Dinas PUPR	1.630.333.239,00
	9	Dinas Perhubungan	353.833,00
	10	Dinas Kesehatan	58.747.623,00
	11	RSUD	1.464.000,00
	12	Dinas Pendidikan	1.670.374,00
	13	Dinas TRANSNAKER	197.500,00
	14	Dinas PMD	329.875,00
	15	Dinas Pertanian	1.843.706,00
	16	Dinas Pangan dan Perikanan	1.263.941,00
	17	Dinas KUMPERDAG	33.912.222,00
	18	DPMPTSP	74.250,00
	19	Dinas KOMINFO	421.667,00
	Jaringan		976.216.331,00
	1	Sekretariat DPRD	29.448.032,00
	2	Sekretariat Daerah	55.211.531,00
	3	Kec. Sitiung	113.750,00
	4	Kec. Sungai Rumbai	12.594,00
	5	Kec Tiumang	8.750,00
	6	Dinas PUPR	810.271.293,00
	7	Dinas PERKIMTAN	1.149.098,00
	8	Dinas Perhubungan	2.491.667,00
	9	Dinas Kesehatan	267.600,00
	10	Dinas Pendidikan	11.321.328,00
	11	DISDUKCAPIL	435.669,00
	12	Dinas Pertanian	3.167.928,00
	13	Dinas Pangan dan Perikanan	2.439.607,00
	14	Dinas KUMPERDAG	53.292.489,00
	15	DPMPTSP	234.700,00
	16	BAPPPEDA	605.662,00
	17	DLH	1.528.173,00
	18	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	42.950,00
	19	BKPSDM	31.250,00
	20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	492.250,00
	21	Dinas KOMINFO	3.650.010,00
2	**Penyusutan Semester II**		**48.764.845.589,00**
	Jalan Dan Jembatan		45.301.120.042,00
	1	Dinas PUPR	43.353.788.874,00
	2	Dinas PERKIMTAN	1.011.557.512,00
	3	RSUD	9.375.300,00

Penambahan Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan			Jumlah
	4	Dinas Pendidikan	13.372.140,00
	5	Dinas TRANSNAKER	10.326.915,00
	6	Dinas Pertanian	14.349.833,00
	7	Dinas Pangan dan Perikanan	1.957.500,00
	8	Dinas KUMPERDAG	317.889.445,00
	9	BPBD	568.502.523,00
	Bangunan Air		2.318.536.698,00
	1	Sekretariat Daerah	437.000,00
	2	Dinas PUPR	2.142.062.200,00
	3	Dinas PERKIMTAN	12.826.591,00
	4	Dinas Perhubungan	9.113.938,00
	5	Dinas Kesehatan	197.750,00
	6	RSUD	8.179.793,00
	7	Dinas Pendidikan	20.473.367,00
	8	Dinas BUDPARPORA	2.567.817,00
	9	Dinas TRANSNAKER	100.000,00
	10	Dinas Pertanian	7.424.480,00
	11	Dinas Pangan dan Perikanan	39.667.032,00
	12	Dinas KUMPERDAG	57.872.932,00
	13	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	138.017,00
	14	BPBD	17.430.831,00
	15	BKPSDM	44.950,00
	Instalasi		635.084.867,00
	1	Sekretariat DPRD	67.649.250,00
	2	Sekretariat Daerah	3.410.626,00
	3	Kec. Pulau Punjung	96.250,00
	4	Kec. Sungai Rumbai	201.367,00
	5	Kec. IX Koto	209.732,00
	6	Kec Koto Besar	230.000,00
	7	Kec Koto Salak	18.750,00
	8	Dinas PUPR	462.989.900,00
	9	Dinas Perhubungan	353.833,00
	10	Dinas Kesehatan	58.747.624,00
	11	RSUD	1.464.000,00
	12	Dinas Pendidikan	1.670.374,00
	13	Dinas TRANSNAKER	197.500,00
	14	Dinas PMD	329.875,00
	15	Dinas Pertanian	1.843.706,00
	16	Dinas Pangan dan Perikanan	1.263.941,00
	17	Dinas KUMPERDAG	33.912.222,00

Penambahan Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan			Jumlah
	18	DPMPTSP	74.250,00
	19	Dinas KOMINFO	421.667,00
	Jaringan		510.103.982,00
	1	Sekretariat DPRD	29.448.032,00
	2	Sekretariat Daerah	55.211.530,00
	3	Kec. Sitiung	113.750,00
	4	Kec. Sungai Rumbai	12.594,00
	5	Kec Tiumang	8.750,00
	6	Dinas PUPR	344.781.859,00
	7	Dinas PERKIMTAN	1.149.097,00
	8	Dinas Perhubungan	1.868.750,00
	9	Dinas Kesehatan	267.600,00
	10	Dinas Pendidikan	11.321.328,00
	11	DISDUKCAPIL	435.669,00
	12	Dinas Pertanian	3.167.932,00
	13	Dinas Pangan dan Perikanan	2.439.607,00
	14	Dinas KUMPERDAG	53.292.489,00
	15	DPMPTSP	234.700,00
	16	BAPPPEDA	605.663,00
	17	DLH	1.528.172,00
	18	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	42.950,00
	19	BKPSDM	31.250,00
	20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	492.250,00
	21	Dinas KOMINFO	3.650.010,00
Akumulasi Penyusutan Aset 2021			**727.648.250.096,00**
Nilai Buku Aset Tetap JIJ 2021			**619.456.142.274,42**

V.C.1.c.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu

ruangan kantor yang bukan miliknya. Aset Tetap Renovasi dilakukan penyusutan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/ sewa

Adapun saldo Aset Tetap Lainnya kondisi 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 (Audited) adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2021	31 Desember 2020 (audited)	Tren
	Rp.	Rp.	%
Aset Tetap Lainya	108.279.890.823,00	105.717.574.583,00	102,42%
Akumulasi Penyusutan	-101.350.000,00	(101.350.000,00)	100,00%
Nilai Buku	108.178.540.823,00	105.616.224.583,00	102,43%

Apabila dibandingkan saldo audited 2020 dengan 31 Desember 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp2.562.316.240,00 Adapun penambahan dan pengurangan saldo Aset Tetap Lainnya per OPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.55
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya Per OPD

No.	Nama OPD	Saldo Aset Tetap 2020 (audited)	Penambahan Aset Tetap 2021	Pengurangan Aset Tetap 2021	Saldo Aset Tetap 2021
1	Sekretariat DPRD	43.091.000,00	-	-	43.091.000,00
2	Sekretariat Daerah	59.800.000,00	77.250.000,00	35.250.000,00	101.800.000,00
3	Kec. Pulau Punjung	-	-	-	-
4	Kec. Sitiung	-	-	-	-
5	Kec. Koto Baru	-	-	-	-
6	Kec. Sngai Rumbai	1.425.000,00	-	-	1.425.000,00
7	Kec. IX Koto	104.050.000,00	-	-	104.050.000,00
8	Kec. Timpeh	-	-	-	-
9	Kec. Padang Laweh	-	-	-	-
10	Kec Tiumang	-	-	-	-
11	Kec Koto Besar	-	-	-	-
12	Kec Koto Salak	-	-	-	-
13	Kec. Asam Jujuhan	-	-	-	-
14	Dinas PUPR	134.408.000,00	49.420.000,00	-	183.828.000,00

No.	Nama OPD	Saldo Aset Tetap 2020 (audited)	Penambahan Aset Tetap 2021	Pengurangan Aset Tetap 2021	Saldo Aset Tetap 2021
15	Dinas PERKIMTAN	10.660.000,00	-	-	10.660.000,00
16	Dinas Perhubungan	-	-	-	-
17	Dinas Kesehatan	5.735.000,00	-	4.235.000,00	1.500.000,00
18	RSUD	67.698.079.396,00	199.050.000,00	-	67.897.129.396,00
19	Dinas Pendidikan	35.597.585.374,00	2.110.051.040,00	-	37.707.636.414,00
20	Dinas BUDPARPORA	68.250.000,00	-	-	68.250.000,00
21	Dinas TRANSNAKER	-	-	-	-
22	DSP3KB	-	-	-	-
23	DISDUKCAPIL	1.774.000,00	-	-	1.774.000,00
24	Dinas PMD	288.520.000,00	-	-	288.520.000,00
25	Dinas Pertanian	491.943.000,00	-	64.290.000,00	427.653.000,00
26	Dinas Pangan dan Perikanan	12.114.000,00	-	-	12.114.000,00
27	Dinas KUMPERDAG	-	-	-	-
28	BKD	-	-	-	-
29	DPMPTSP	6.019.850,00	-	-	6.019.850,00
30	Inspektorat Kabupaten	6.131.710,00	-	-	6.131.710,00
31	BAPPPEDA	1.827.500,00	-	-	1.827.500,00
32	DLH	56.123.400,00	-	-	56.123.400,00
33	Kantor KESBANGPOL	36.500,00	-	-	36.500,00
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	-	-	-	-
35	BPBD	-	-	-	-
36	BKPSDM	-	-	-	-
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	873.735.228,00	230.320.200,00	-	1.104.055.428,00
38	Dinas KOMINFO	256.265.625,00	-	-	256.265.625,00
Jumlah		**105.717.574.583,00**	**2.666.091.240,00**	**103.775.000,00**	**108.279.890.823,00**

Rincian penambahan dan pengurangan penyusutan Aset Tetap Lainnya per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.56
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap Lainnya Per OPD

No.	Nama OPD	Saldo Aset Tetap 2021	Akumulasi Penyusutan 2020 (Audited)	Penambahan Penyusutan 2021	Pengurangan Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan Aset 2021	Nilai Buku Aset Tetap 2021
1	Sekretariat DPRD	43.091.000,00	-	-	-	-	43.091.000,00

No.	Nama OPD	Saldo Aset Tetap 2021	Akumulasi Penyusutan 2020 (Audited)	Penambahan Penyusutan 2021	Pengurangan Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan Aset 2021	Nilai Buku Aset Tetap 2021
2	Sekretariat Daerah	101.800.000,00	-	-	-	-	101.800.000,00
3	Kec. Pulau Punjung	-	-	-	-	-	-
4	Kec. Sitiung	-	-	-	-	-	-
5	Kec. Koto Baru	-	-	-	-	-	-
6	Kec. Sngai Rumbai	1.425.000,00	-	-	-	-	1.425.000,00
7	Kec. IX Koto	104.050.000,00	-	-	-	-	104.050.000,00
8	Kec. Timpeh	-	-	-	-	-	-
9	Kec. Padang Laweh	-	-	-	-	-	-
10	Kec Tiumang	-	-	-	-	-	-
11	Kec Koto Besar	-	-	-	-	-	-
12	Kec Koto Salak	-	-	-	-	-	-
13	Kec. Asam Jujuhan	-	-	-	-	-	-
14	Dinas PUPR	183.828.000,00	-	-	-	-	183.828.000,00
15	Dinas PERKIMTAN	10.660.000,00	-	-	-	-	10.660.000,00
16	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Kesehatan	1.500.000,00	-	-	-	-	1.500.000,00
18	RSUD	67.897.129.396,00	-	-	-	-	67.897.129.396,00
19	Dinas Pendidikan	37.707.636.414,00	-	-	-	-	37.707.636.414,00
20	Dinas BUDPARPORA	68.250.000,00	-	-	-	-	68.250.000,00
21	Dinas TRANSNAKER	-	-	-	-	-	-
22	DSP3KB	-	-	-	-	-	-
23	DISDUKCAPIL	1.774.000,00	-	-	-	-	1.774.000,00
24	Dinas PMD	288.520.000,00	-	-	-	-	288.520.000,00
25	Dinas Pertanian	427.653.000,00	101.350.000,00	-	-	101.350.000,00	326.303.000,00
26	Dinas Pangan dan Perikanan	12.114.000,00	-	-	-	-	12.114.000,00
27	Dinas KUMPERDAG	-	-	-	-	-	-
28	BKD	-	-	-	-	-	-
29	DPMPTSP	6.019.850,00	-	-	-	-	6.019.850,00
30	Inspektorat Kabupaten	6.131.710,00	-	-	-	-	6.131.710,00

No.	Nama OPD	Saldo Aset Tetap 2021	Akumulasi Penyusutan 2020 (Audited)	Penambahan Penyusutan 2021	Pengurangan Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan Aset 2021	Nilai Buku Aset Tetap 2021
31	BAPPPEDA	1.827.500,00	-	-	-	-	1.827.500,00
32	DLH	56.123.400,00	-	-	-	-	56.123.400,00
33	Kantor KESBANGPOL	36.500,00	-	-	-	-	36.500,00
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	-	-	-	-	-	-
35	BPBD	-	-	-	-	-	-
36	BKPSDM	-	-	-	-	-	-
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.104.055.428,00	-	-	-	-	1.104.055.428,00
38	Dinas KOMINFO	256.265.625,00	-	-	-	-	256.265.625,00
Jumlah		**108.279.890.823,00**	**101.350.000,00**	**-**	**-**	**101.350.000,00**	**108.178.540.823,00**

Pada tahun 2021 realisasi anggaran belanja Aset Tetap Lainnya adalah sebesar Rp504.868.600,00 adapun yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp274.981.600,00, dikapitalisasi menjadi peralatan dan mesin sebesar Rp19.987.000,00,dikapitalisasi menjadi aset tak berwujud sebesar Rp99.000.000,00. Sisanya sebesar Rp110.900.000,00 tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap lainnya karena tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap lainnya dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja yang akan diserahkan Rp7.000.000,00
2. Belanja barang pakai habis Rp103.900.000,00

Adapun penambahan dan pengurangan saldo Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.57
Penambahan Pengurangan Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Perolehan

Saldo Aset Tetap Lainnya 2020 (audited)		105.717.574.583,00
Jumlah Penambahan Aset Tetap Lainnya 2021		2.666.091.240,00
1	Penambahan Belanja Modal Menjadi Aset	274.981.600,00
2	Penambahan Belanja Modal Bos Reguler Menjadi Aset	2.107.919.040,00
3	Penambahan Belanja Modal BLUD Menjadi Aset	198.000.000,00
4	Penambahan Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset	2.132.000,00
5	Penambahan Barang dan Jasa BLUD Menjadi Aset	1.050.000,00
6	Penambahan Hibah Pusat Menjadi Aset	32.588.600,00
7	Penambahan Reklas sesama Aset Tetap/lainnya/ektrakompatibel	49.420.000,00

Saldo Aset Tetap Lainnya 2020 (audited)		**105.717.574.583,00**
Jumlah Pengurangan Aset Tetap Lainnya2021		103.775.000,00
1	Pengurangan Reklas Sesama Aset Tetap/lainnya/Ekstrakompatibel	4.235.000,00
2	Penghapusan	64.290.000,00
3	Pengurangan Reklas Aset Tetap/Lainnya/ Ekstrakompabel	35.250.000,00
Saldo Aset Tetap Lainnya 2021		**108.279.890.823,00**

Penambahan saldo Aset Tetap lainnya berdasarkan perolehan per OPD sebesar Rp2.666.091.240,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.58
Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya Per OPD

Aset Tetap Lainnya			Jumlah
Saldo Aset Tetap 2020 (audited)			**105.717.574.583,00**
Jumlah Penambahan Aset Tetap 2021			2.666.091.240,00
1	Penambahan Belanja Modal Menjadi Aset		274.981.600,00
	Bahan Perpustakaan		197.731.600,00
	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	197.731.600,00
	Biota Perairan		77.250.000,00
	1	Sekretariat Daerah	77.250.000,00
2	Penambahan Belanja Modal Bos Reguler Menjadi Aset		2.107.919.040,00
	Bahan Perpustakaan		2.107.919.040,00
	1	Dinas Pendidikan	2.107.919.040,00
3	Penambahan Belanja Modal BLUD Menjadi Aset		198.000.000,00
	Aset Tetap Dalam Renovasi		198.000.000,00
	1	RSUD	198.000.000,00
4	Penambahan Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset		2.132.000,00
	Bahan Perpustakaan		2.132.000,00
	1	Dinas Pendidikan	2.132.000,00
5	Penambahan Barang dan Jasa BLUD Menjadi Aset		1.050.000,00
	Aset Tetap Dalam Renovasi		1.050.000,00
	1	RSUD	1.050.000,00
6	Penambahan Hibah Pusat Menjadi Aset		32.588.600,00
	Bahan Perpustakaan		32.588.600,00
	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	32.588.600,00
7	Penambahan Reklas sesama Aset Tetap/lainnya/ektrakompatibel		49.420.000,00
	Bahan Perpustakaan		49.420.000,00
	1	Dinas PUPR	49.420.000,00
Jumlah Pengurangan Aset Tetap 2021			103.775.000,00
1	Pengurangan Reklas Sesama Aset Tetap/lainnya/Ekstrakompatibel		4.235.000,00
	Aset Tetap Dalam Renovasi		4.235.000,00

Aset Tetap Lainnya			Jumlah
	1	Dinas Kesehatan	4.235.000,00
2	Penghapusan		64.290.000,00
	Hewan		64.290.000,00
	1	Dinas Pertanian	64.290.000,00
3	Pengurangan Reklas Aset Tetap/Lainnya/ Ekstrakompabel		35.250.000,00
	Biota Perairan		35.250.000,00
	1	Sekretariat Daerah	35.250.000,00
Saldo Aset Tetap Lainnya 2021			**108.279.890.823,00**

Melalui Berita Acara Serah Terima terdapat penambahan Aset Tetap lainnya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp32.588.600,00 berupa Buku Siap Layan yang dihibahkan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ke Perpustakaan Kabupaten Dharmasraya dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 1418/4.1/d/PPK VIII/IV.2020 tanggal 20 April 2020, sebanyak 350 judul buku, 700 eksemplar.

Pengurangan saldo Aset Tetap lainnya berdasarkan perolehan sebesar Rp103.775.000,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.59
Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap 2021		**108.279.890.823,00**
Akumulasi Penyusutan 2020 (Audited)		101.350.000,00
Penambahan Penyusutan Aset Tetap Lainya 2021		-
1	Penyusutan Semester I	-
2	Penyusutan Semester II	-
Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Lainya 2021		-
Akumulasi Penyusutan Aset 2021		101.350.000,00
Nilai Buku Aset Tetap 2021		**108.178.540.823,00**

Rincian pengurangan saldo Aset Tetap lainnya berdasarkan masing-masing OPD sebesar Rp39.485.000,00,00 adalah sebagai berikut :

V.A.1.c.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan / atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai, nilai Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tidak berpengaruh terhadap implementasi Permendagri Nomor 108 Tahun 2016, adapun nilai KDP 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 (Audited) adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2021	31 Desember 2020 (audited)	Tren
	Rp.	Rp.	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.750.539.457,00	113.355.644.678,00	10,39%
Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	
Nilai Buku	11.750.539.457,00	113.355.644.678,00	10,39%

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2021 berkurang sebesar Rp101.369.348.780,00.

Penambahan dan pengurangan nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.60
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap KDP

No.	Nama OPD	Saldo Aset Tetap 2020 (audited)	Penambahan Aset Tetap 2021	Pengurangan Aset Tetap 2021	Saldo Aset Tetap 2021
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
2	Sekretariat Daerah	-	17.040.000,00	17.040.000,00	-
3	Kec. Pulau Punjung	-	-	-	-
4	Kec. Sitiung	-	-	-	-
5	Kec. Koto Baru	-	-	-	-
6	Kec. Sngai Rumbai	-	-	-	-
7	Kec. IX Koto	-	-	-	-
8	Kec. Timpeh	-	-	-	-
9	Kec. Padang Laweh	-	-	-	-
10	Kec Tiumang	-	-	-	-
11	Kec Koto Besar	-	-	-	-
12	Kec Koto Salak	-	-	-	-
13	Kec. Asam Jujuhan	-	-	-	-
14	Dinas PUPR	105.548.268.107,00	162.399.415,00	102.775.284.455,00	2.935.383.067,00
15	Dinas PERKIMTAN	366.648.550,00	-	127.128.550,00	239.520.000,00
16	Dinas Perhubungan	-	-	-	-
17	Dinas Kesehatan	5.007.327.230,00	7.077.404.738,00	5.046.994.110,00	7.037.737.858,00
18	RSUD	-	-	-	-
19	Dinas Pendidikan	978.512.000,00	-	978.512.000,00	-

No.	Nama OPD	Saldo Aset Tetap 2020 (audited)	Penambahan Aset Tetap 2021	Pengurangan Aset Tetap 2021	Saldo Aset Tetap 2021
20	Dinas BUDPARPORA	-	-	-	-
21	Dinas TRANSNAKER	-	-	-	-
22	DSP3KB	-	-	-	-
23	DISDUKCAPIL	-	-	-	-
24	Dinas PMD	-	-	-	-
25	Dinas Pertanian	-	-	-	-
26	Dinas Pangan dan Perikanan	-	-	-	-
27	Dinas KUMPERDAG	382.365.000,00	-	49.450.000,00	332.915.000,00
28	BKD	-	-	-	-
29	DPMPTSP	-	-	-	-
30	Inspektorat Kabupaten	-	-	-	-
31	BAPPPEDA	-	-	-	-
32	DLH	-	-	-	-
33	Kantor KESBANGPOL	-	-	-	-
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	-	-	-	-
35	BPBD	-	368.216.182,00	-	368.216.182,00
36	BKPSDM	-	-	-	-
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	836.767.350,00	-	-	836.767.350,00
38	Dinas KOMINFO	-	-	-	-
	Jumlah	**113.119.888.237,00**	**7.625.060.335,00**	**108.994.409.115,00**	**11.750.539.457,00**

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap KDP berdasarkan perolehan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.61
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap KDP Berdasarkan Perolehan

Saldo Aset Tetap 2020 (audited)		**113.119.888.237,00**
Jumlah Penambahan Aset Tetap 2021		**7.625.060.335,00**
1	Penambahan Belanja Modal Menjadi Aset	7.196.412.255,00
2	Penambahan Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset	346.981.200,00
3	Penambahan Honor Pokja Menjadi Aset	17.040.000,00

Saldo Aset Tetap 2020 (audited)		**113.119.888.237,00**
4	Penambahan Mutasi Antar OPD	39.666.880,00
5	Penambahan Mutasi Honor Pokja	24.960.000,00
Jumlah Pengurangan Aset Tetap 2021		**108.994.409.115,00**
1	Pengurangan Reklas Sesama Aset Tetap/lainnya/Ekstrakompatibel	107.648.489.685,00
2	Pengurangan Mutasi Antar OPD	39.666.880,00
3	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	17.040.000,00
4	Pengurangan Koreksi	19.970.000,00
5	Pengurangan Reklas Aset Tetap/Lainnya/ Ekstrakompabel	1.269.242.550,00
Saldo Aset Tetap KDP 2021		**11.750.539.457,00**

Penambahan nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp7.625.060.335,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.62
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap KDP Per OPD

Aset Tetap KDP			Jumlah
Saldo Aset Tetap 2020 (audited)			113.119.888.237,00
Jumlah Penambahan Aset Tetap 2021			7.625.060.335,00
1	Penambahan Belanja Modal Menjadi Aset		7.196.412.255,00
	1	Dinas PUPR	162.399.415,00
	2	Dinas Kesehatan	6.682.836.658,00
	3	BPBD	351.176.182,00
2	Penambahan Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset		346.981.200,00
	1	Dinas Kesehatan	346.981.200,00
3	Penambahan Honor Pokja Menjadi Aset		17.040.000,00
	1	Sekretariat Daerah	17.040.000,00
4	Penambahan Mutasi Antar OPD		39.666.880,00
	1	Dinas Kesehatan	39.666.880,00

Aset Tetap KDP			Jumlah
5	Penambahan Mutasi Honor Pokja		24.960.000,00
	1	Dinas Kesehatan	7.920.000,00
	2	BPBD	17.040.000,00
Jumlah Pengurangan Aset Tetap 2021			**108.994.409.115,00**
1	Pengurangan Reklas Sesama Aset Tetap/lainnya/Ekstrakompatibel		107.648.489.685,00
	1	Dinas PUPR	101.572.790.455,00
	2	Dinas PERKIMTAN	89.860.000,00
	3	Dinas Kesehatan	5.007.327.230,00
	4	Dinas Pendidikan	978.512.000,00
2	Pengurangan Mutasi Antar OPD		39.666.880,00
	1	Dinas Kesehatan	39.666.880,00
3	Pengurangan Mutasi Honor Pokja		17.040.000,00
	1	Sekretariat Daerah	17.040.000,00
4	Pengurangan Koreksi		19.970.000,00
	1	Dinas PUPR	19.970.000,00
5	Pengurangan Reklas Aset Tetap/Lainnya/ Ekstrakompabel		1.269.242.550,00
	1	Dinas PUPR	1.182.524.000,00
	2	Dinas PERKIMTAN	37.268.550,00
	3	Dinas KUMPERDAG	49.450.000,00
Saldo Aset Tetap 2021			**11.750.539.457,00**

Pada tahun 2021 penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp7.625.060.335,00 yang signifikan berasal dari pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai senilai Rp6.998.070,98. Adapun Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2021 sebesar Rp108.994.409.115,00, nilai pengurangan yang signifikan terjadi di Dinas PUPR merupakan kegiatan pembangunan Mesjid Agung Dharmasraya telah selesai pengerjaannya di Tahun 2021 dengan total perolehan sebesar Rp dan juga ada beberapa kegiatan perencanaan dan DED yang direklas ke aset lainnya karena usul penghapusan dan usul pemindahtanganan dalam hibah senilai Rp1.269.242.550,00

V.C.1.e ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah tuntutan ganti rugi, aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya nilai Aset Lainnya mengalami pengaruh atau perubahan terkait implementasi dari Permendagri Nomor 108 tahun 2016 khususnya pada Aset Lain-lain , adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 5.2.63
Rekapitulasi Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 (Audited)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020 (Audited)
	(Rp.)	(Rp.)
Tuntutan Ganti Rugi	293.258.963,00	293.258.963,00
Aset Tidak Berwujud	4.013.267.277,00	3.834.413.677,00
Akumulasi Penyusutan (Amortisasi)	(1.906.478.687,00)	(1.569.821.608,17)
Aset Lain-Lain	205.255.939.395,84	213.829.466.684,84
Penyusutan Aset Lain-lain	(148.585.496.096,84)	(142.013.028.477,75)
Kas yang Dibatasi Penggunaannya		
Jumlah	**59.070.490.852,00**	**74.374.289.238,92**

Tabel 5.2.64
Penambahan/ Pengurangan Aset Lainnya Tahun 2021

Saldo Aset Lainnya 31 Desember 2020 (Audited)		**217.663.880.361,84**
Penambahan 2021		**7.726.989.218,00**
1	Penambahan Belanja Modal Menjadi Aset	178.853.600,00
2	Penambahan Mutasi Antar OPD	109.929.000,00
3	Penambahan reklas aset tetap/lainnya/ekstrakompatibel	3.497.965.386,00
4	Penambahan Reklas sesama Aset Tetap/lainnya/ektrakompatibel	3.940.155.323,00
5	Penambahan Koreksi	85.909,00
Pengurangan 2021		**16.121.662.907,00**
1	Pengurangan Reklas Sesama Aset Tetap/lainnya/Ekstrakompatibel	3.940.155.323,00
2	Pengurangan Mutasi Antar OPD	109.929.000,00
3	Pengurangan Koreksi	85.909,00
4	Penghapusan	12.071.492.675,00

Saldo Aset Lainnya 31 Desember 2021	209.269.206.672,84

Tabel 5.2.65
Penambahan/Pengurangan Penyusutan Aset Lainnya 2021

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 2020 (Audited)		**143.582.850.085,92**
Penambahan Penyusutan 2021		**19.256.146.690,87**
1	Penambahan Penyusutan Mutasi Antar OPD	105.993.750,00
2	Penamban Penyusutan Reklas	4.927.927.398,92
3	Penambahan Penyusutan Koreksi	2.203.848.225,03
4	Penyusutan Semester I	5.907.946.729,62
5	Penyusutan Semester II	6.110.430.587,30
Pengurangan Penyusutan 2021		**12.347.021.992,95**
1	Pengurangan Penyusutan Mutasi Antar OPD	105.993.750,00
2	Pengurangan Penyusutan Reklas	3.192.386.297,92
3	Pengurangan Penyusutan Penghapusan	6.844.793.720,00
4	Pengurangan Penyusutan Koreksi	2.203.848.225,03
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 31 Desember 2021	**150.491.974.783,84**
	Nilai Buku Aset Lainnya 31 Desember 2021	**58.777.231.889,00**

Tabel 5.2.66
Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya 2021

KIB/Sub KIB	Saldo Lainnya 2020 (Audited)	Jumlah Penambahan Aset Lainnya 2021	Jumlah Pengurangan Aset Lainnya 2021	Saldo Aset Lainnya 2021
Aset Lainnya	**217.663.880.361,84**	**7.726.989.218,00**	**16.121.662.907,00**	**209.269.206.672,84**
Aset Lain-Lain	**213.829.466.684,84**	**7.548.135.618,00**	**16.121.662.907,00**	**205.255.939.395,84**
KIB/Sub KIB	**Saldo Lainnya 2020 (Audited)**	**Jumlah Penambahan Aset Lainnya 2021**	**Jumlah Pengurangan Aset Lainnya 2021**	**Saldo Aset Lainnya 2021**
Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	60.583.781.694,84	2.499.146.286,00	1.880.952.507,00	61.201.975.473,84
Aset yang dipinjampakaikan	10.685.015.719,00	1.037.326.100,00	2.766.382.725,00	8.955.959.094,00
Aset yang akan diserahkan ke masyarakat	142.560.669.271,00	4.011.663.232,00	11.474.327.675,00	135.098.004.828,00

Aset Tidak Berwujud	**3.834.413.677,00**	**178.853.600,00**	**-**	**4.013.267.277,00**
Aset Tidak Berwujud	3.834.413.677,00	178.853.600,00	-	4.013.267.277,00
Penyusutan Aset Tetap	**(143.582.850.085,92)**	**(19.256.146.690,87)**	**(12.347.021.992,95)**	**(150.491.974.783,84)**
Nilai Buku	**74.081.030.275,92**	**(11.529.157.472,87)**	**3.774.640.914,05**	**58.777.231.889,00**

V.C.1.e.1. Tuntutan Ganti Rugi

Pada Tahun 2021 saldo Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah sebesar Rp293.258.963,00. Adapun rincian Aset Lainnya berupa TGR per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020 (Audited)	Tren
	Rp	Rp	%
Tuntutan Ganti Rugi	293.258.963,00	293.258.963,00	100,00%

Selama Tahun 2021 terdapat pengurangan TGR sebesar Rp8.861.288,44 yang merupakan penyetoran temuan yang telah diterbitkan SKTJM atas Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) Inspektorat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.67
Rincian Aset Tuntutan Ganti Rugi

No	Nomor SKTJM	Nomor LHP	Nama / NIP / Unit Kerja	Uraian Temuan	31-Des-21	31-Des-20
1	961/002/SKTJM-2016 Tgl 18 Januari 2016	LAP-24/R/Inspektorat-2011	Ir. AMIYUSAR 19640517 199303 1 007 Dinas Peternakan	Kurang fisik pembangunan rumah kompos	5.351.234,00	5.351.234,00
2	Surat Keputusan Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK Nomor 14.TP.04-2016/XII/2016.SKPc tentang pencatatan kerugian Negara tanggal 23 Jan 2017	LHP BPK RI No.212/S/XVIII.PDG/11/2009	Neneng Elis Herlina, S.Si 19691026 200604 2 001 Bendahara Badan Lingkungan Hidup	Ketekoran Kas pada kas di bendahara pengeluaran SKPD Badan Lingkungan Hidup Tahun 2008 yang sampai pada LKPD Tahun 2014 berada pada akun Kas di Bendahara Pengeluaran.	287.907.729,00	287.907.729,00
JUMLAH					**293.258.963,00**	**293.258.963,00**

V.C.1.e.2. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud merupakan aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Dharmasraya merupakan Aset Tidak Berwujud Lainnya berupa software komputer. Software komputer adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu dan dapat digunakan di komputer lain, adapun nilai aset tidak berwujud, terkait penerapan Permendagri Nomor 108 tahun 2016 saldo aset tak berwujud tidak mengalami perubahan, adapun saldo aset tak berwujud adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2021	31 Desember 2020 (Audited)
	Rp.	Rp.
Aset Tidak Berwujud	4.013.267.277,00	3.834.413.677,00
Akumulasi Penyusutan (Amortisasi)	(1.906.478.687,00)	(1.569.821.608,17)
Jumlah	2.106.788.590,00	2.264.592.068,83

Adapun rincian Nilai Aset Tak berwujud per OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.68
Penambahan Pengurangan Aset Tidak Berwujud Per OPD

No.	Nama OPD	Saldo Aset Tidak Berwujud 2020 (audited)	Penambahan Aset Tidak Berwujud 2021	Pengurangan Aset Tidak Berwujud 2021	Saldo Aset Tidak Berwujud 2021
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
2	Sekretariat Daerah	145.750.000,00	-	-	145.750.000,00
3	Kec. Pulau Punjung	-	-	-	-
4	Kec. Sitiung	-	-	-	-
5	Kec. Koto Baru	-	-	-	-
6	Kec. Sngai Rumbai	-	-	-	-
7	Kec. IX Koto	-	-	-	-
8	Kec. Timpeh	-	-	-	-
9	Kec. Padang Laweh	-	-	-	-
10	Kec Tiumang	-	-	-	-
11	Kec Koto Besar	-	-	-	-
12	Kec Koto Salak	-	-	-	-
13	Kec. Asam Jujuhan	-	-	-	-
14	Dinas PUPR	-	-	-	-
15	Dinas PERKIMTAN	-	-	-	-
16	Dinas Perhubungan	197.100.000,00		-	197.100.000,00
17	Dinas Kesehatan	144.650.000,00		-	144.650.000,00
18	RSUD	223.334.000,00		-	223.334.000,00

No.	Nama OPD	Saldo Aset Tidak Berwujud 2020 (audited)	Penambahan Aset Tidak Berwujud 2021	Pengurangan Aset Tidak Berwujud 2021	Saldo Aset Tidak Berwujud 2021
19	Dinas Pendidikan	925.382.392,00		-	925.382.392,00
20	Dinas BUDPARPORA	37.892.941,00	79.853.600	-	117.746.541,00
21	Dinas TRANSNAKER	-	-	-	-
22	DSP3KB	-	-	-	-
23	DISDUKCAPIL	141.179.569,00	-	-	141.179.569,00
24	Dinas PMD	52.675.000,00	-	-	52.675.000,00
25	Dinas Pertanian	-	-	-	-
26	Dinas Pangan dan Perikanan	-	-	-	-
27	Dinas KUMPERDAG	-	-	-	-
28	BKD	1.338.630.400,00	99.000.000,00-	-	1.437.630.400,00
29	DPMPTSP	-	-	-	-
30	Inspektorat Kabupaten	-	-	-	-
31	BAPPPEDA	-	-	-	-
32	DLH				
33	Kantor KESBANGPOL	-	-	-	-
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	-	-	-	-
35	BPBD	-	-	-	-
36	BKPSDM	142.000.000,00	-	-	142.000.000,00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-
38	Dinas KOMINFO	485.819.375,00	-	-	485.819.375,00
Jumlah		**3.834.413.677**	**178.853.600**	**-**	**4.013.267.277**

Pada tahun 2021 terdapat penambahan Aset Tidak berwujud sebesar Rp178.853.600,00 sehingga total Aset Tak Berwujud di tahun 2021 menjadi Rp4.013.267.277,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.70
Rincian Penambahan Aset Tidak Berwujud

Jumlah Penambahan Aset Tidak Berwujud 2021			**178.853.600,00**
1	**Penambahan Belanja Modal Menjadi Aset**		**178.853.600,00**
	1	Dinas BUDPARPORA berupa Penambahan Belanja Modal Perencanaan Bangunan Tempat Parkir Kawasan Candi Pulau Sawah	79.853.600,00
	2	Badan Keuangan Daerah berupa penambahan Belanja Modal Software Aplikasi Host to Host BPHTB-BPN	99.000.000,00

Saldo Penyusutan Aset Tidak Berwujud (Amortisasi) adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.71
Rekap Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2021

No.	Nama OPD	Saldo Aset Tidak Berwujud 2021	Akumulasi Penyusutan 2020 (Audited)	Penambahan Penyusutan 2021	Pengurangan Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan (Amortisasi) 2021	Nilai Buku Aset Tidak Berwujud 2021
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat Daerah	145.750.000,00	30.364.583,33	14.574.999,67	-	44.939.583,00	100.810.417,00
3	Kec. Pulau Punjung	-	-	-	-	-	-
4	Kec. Sitiung	-	-	-	-	-	-
5	Kec. Koto Baru	-	-	-	-	-	-
6	Kec. Sngai Rumbai	-	-	-	-	-	-
7	Kec. IX Koto	-	-	-	-	-	-
8	Kec. Timpeh	-	-	-	-	-	-
9	Kec. Padang Laweh	-	-	-	-	-	-
10	Kec Tiumang	-	-	-	-	-	-
11	Kec Koto Besar	-	-	-	-	-	-
12	Kec Koto Salak	-	-	-	-	-	-
13	Kec. Asam Jujuhan	-	-	-	-	-	-
14	Dinas PUPR	-	-	-	-	-	-
15	Dinas PERKIMTAN	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Perhubungan	197.100.000,00	66.672.500,00	19.785.000,00	-	86.457.500,00	110.642.500,00
17	Dinas Kesehatan	144.650.000,00	114.514.583,33	14.464.999,67	-	128.979.583,00	15.670.417,00
18	RSUD	223.334.000,00	85.304.908,00	22.333.400,00	-	107.638.308,00	115.695.692,00
19	Dinas Pendidikan	925.382.392,00	403.483.173,33	85.451.755,67	-	488.934.929,00	436.447.463,00
20	Dinas BUDPARPORA	117.746.541,00	-	-	-	-	117.746.541,00
21	Dinas TRANSNAKER	-	-	-	-	-	-
22	DSP3KB	-	-	-	-	-	-
23	DISDUKCAPIL	141.179.569,00	23.328.432,18	14.117.955,82	-	37.446.388,00	103.733.181,00
24	Dinas PMD	52.675.000,00	19.753.125,00	5.267.500,00	-	25.020.625,00	27.654.375,00
25	Dinas Pertanian	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pangan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-

No.	Nama OPD	Saldo Aset Tidak Berwujud 2021	Akumulasi Penyusutan 2020 (Audited)	Penambahan Penyusutan 2021	Pengurangan Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan (Amortisasi) 2021	Nilai Buku Aset Tidak Berwujud 2021
27	Dinas KUMPERDAG	-	-	-	-	-	-
28	BKD	1.437.630.400,00	712.195.241,00	126.133.041,00	-	838.328.282,00	599.302.118,00
29	DPMPTSP	-	-	-	-	-	-
30	Inspektorat Kabupaten	-	-	-	-	-	-
31	BAPPPEDA	-	-	-	-	-	-
32	DLH	-	-	-	-	-	-
33	Kantor KESBANGPOL	-	-	-	-	-	-
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	-	-	-	-	-	-
35	BPBD	-	-	-	-	-	-
36	BKPSDM	142.000.000,00	46.425.000,00	14.200.000,00	-	60.625.000,00	81.375.000,00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	-
38	Dinas KOMINFO	485.819.375,00	67.780.062,00	20.328.427,00	-	88.108.489,00	397.710.886,00
Jumlah		**4.013.267.277,00**	**1.569.821.608,17**	**336.657.078,83**	**-**	**1.906.478.687,00**	**2.106.788.590,00**

Tabel 5.2.72
Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Aset Tidak Berwujud Tahun 2021

Saldo Aset Tidak Berwujud 2021		**4.013.267.277,00**
Akumulasi Penyusutan 2020 (Audited)		1.569.821.608,17
Penambahan Penyusutan Aset Tidak Berwujud 2021		336.657.078,83
1	Penyusutan Semester I	168.299.178,16
2	Penyusutan Semester II	168.357.900,67
Akumulasi Penyusutan Aset 2021		1.906.478.687,00
Nilai Buku Aset Tidak Berwujud 2021		**2.106.788.590,00**

Saldo Aset Tidak Berwujud 2021			**4.013.267.277,00**
Akumulasi Penyusutan 2020 (Audited)			1.569.821.608,17
Penambahan Penyusutan Aset Tidak Berwujud 2021			336.657.078,83
1	Penyusutan Semester I		168.299.178,16
	1	Sekretariat Daerah	7.287.499,67
	2	Dinas Perhubungan	9.930.000,00
	3	Dinas Kesehatan	7.232.500,00
	4	RSUD	11.166.700,00
	5	Dinas Pendidikan	43.484.017,67
	6	DISDUKCAPIL	7.058.976,82
	7	Dinas PMD	2.633.750,00
	8	BKD	62.241.521,00
	9	BKPSDM	7.100.000,00
	10	Dinas KOMINFO	10.164.213,00
2	Penyusutan Semester II		168.357.900,67
	1	Sekretariat Daerah	7.287.500,00
	2	Dinas Perhubungan	9.855.000,00
	3	Dinas Kesehatan	7.232.499,67
	4	RSUD	11.166.700,00
	5	Dinas Pendidikan	41.967.738,00
	6	DISDUKCAPIL	7.058.979,00
	7	Dinas PMD	2.633.750,00
	8	BKD	63.891.520,00
	9	BKPSDM	7.100.000,00
	10	Dinas KOMINFO	10.164.214,00
Akumulasi Penyusutan Aset 2021			1.906.478.687,00
Nilai Buku Aset Tidak Berwujud 2021			**2.106.788.590,00**

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan, Saldo Aset Tidak Berwujud Tahun 2021 adalah sejumlah Rp3.841.231.827,00, setelah dikurangi akumulasi penyusutan (Amortisasi) sebesar Rp1.573.097.843,17. Nilai Buku Aset Tidak Berwujud Tahun 2021 menjadi Rp2.268.133.983,83. Akumulasi Penyusutan (Amortisasi) 2021 terbesar ada di Dinas Pendidikan diikuti oleh Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan RSUD Sungai Dareh.

V.C.1.e.3.Aset Lain-Lain

Aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi kedalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/ atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif. Saldo aset lain-lain 31 desember 2021 dan 31 Desember 2020 (Audited) adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2021	31 Desember 2020 (Audited)	Tren
	Rp.	Rp.	%
Aset Lain-Lain	205.255.939.395,84	221.011.350.127,84	96,66%
Penyusutan Aset Lain-lain	(148.585.496.096,84)	(3.745.411.425,00)	100,53%
Jumlah	56.670.443.299,00	217.265.938.702,84	96,59%

Tabel 5.2.74
Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain 2021

Saldo Aset Lain-lain 2020 (audited)		**213.829.466.684,84**
Jumlah Penambahan Aset Lain-lain 2021		**7.548.135.618,00**
1	Penambahan Mutasi Antar OPD	109.929.000,00
2	Penambahan reklas aset tetap/lainnya/ekstrakompatibel	3.497.965.386,00
3	Penambahan Reklas sesama Aset Tetap/lainnya/ektrakompatibel	3.940.155.323,00
4	Penambahan Koreksi	85.909,00
Jumlah Pengurangan Aset Lain-lain 2021		**16.121.662.907,00**
1	Pengurangan Reklas Sesama Aset Tetap/lainnya/Ekstrakompatibel	3.940.155.323,00
2	Pengurangan Mutasi Antar OPD	109.929.000,00
3	Pengurangan Koreksi	85.909,00
4	Penghapusan	12.071.492.675,00
Saldo Aset Lain-lain 2021		**205.255.939.395,84**

Penambahan dan pengurangan Aset lain-lain 31 Desember 2021 masing-masing OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.75
Penambahan Pengurangan Aset Lain-Lain Per OPD

No.	Nama OPD	Saldo Aset Lain-lain 2020 (audited)	Penambahan Aset Lain-lain 2021	Pengurangan Aset Lain-lain 2021	Saldo Aset Lain-lain 2021
1	Sekretariat DPRD	285.817.600,00	127.326.900,00	-	413.144.500,00
2	Sekretariat Daerah	7.612.721.529,00	78.943.000,00	241.083.000,00	7.450.581.529,00
3	Kec. Pulau Punjung	421.429.000,00	48.600.000,00	32.850.000,00	437.179.000,00
4	Kec. Sitiung	239.900.000,00	32.200.000,00	28.600.000,00	243.500.000,00
5	Kec. Koto Baru	402.111.800,00	-	-	402.111.800,00
6	Kec. Sngai Rumbai	485.398.000,00	-	38.700.000,00	446.698.000,00
7	Kec. IX Koto	309.220.000,00	6.913.000,00	-	316.133.000,00
8	Kec. Timpeh	367.441.950,00	-	-	367.441.950,00
9	Kec. Padang Laweh	270.493.000,00	9.900.000,00	-	280.393.000,00
10	Kec Tiumang	331.166.000,00	-	-	331.166.000,00
11	Kec Koto Besar	520.163.334,00	-	-	520.163.334,00
12	Kec Koto Salak	790.437.000,00	-	-	790.437.000,00
13	Kec. Asam Jujuhan	311.345.000,00	38.700.000,00	35.250.000,00	314.795.000,00
14	Dinas PUPR	124.819.762.022,00	2.153.353.598,00	970.829.598,00	126.002.286.022,00
15	Dinas PERKIMTAN	5.536.285.361,00	50.756.050,00	3.023.720.689,00	2.563.320.722,00
16	Dinas Perhubungan	1.367.606.530,00	-	-	1.367.606.530,00
17	Dinas Kesehatan	9.984.366.009,00	-	81.000.000,00	9.903.366.009,00
18	RSUD	9.230.974.996,00	450.130.200,00	-	9.681.105.196,00
19	Dinas Pendidikan	17.876.100.766,84	-	58.700.000,00	17.817.400.766,84
20	Dinas BUDPARPORA	55.844.311,00	-	-	55.844.311,00
21	Dinas TRANSNAKER	262.319.858,00	149.829.000,00	-	412.148.858,00
22	DSP3KB	1.587.630.663,00	-	-	1.587.630.663,00
23	DISDUKCAPIL	330.748.300,00	-	-	330.748.300,00
24	Dinas PMD	638.614.593,00	-	126.000.000,00	512.614.593,00
25	Dinas Pertanian	23.104.165.264,00	2.450.585.634,00	10.863.424.120,00	14.691.326.778,00
26	Dinas Pangan dan Perikanan	966.902.800,00	-	-	966.902.800,00
27	Dinas KUMPERDAG	92.703.833,00	49.450.000,00	-	142.153.833,00
28	BKD	1.292.709.972,00	-	-	1.292.709.972,00
29	DPMPTSP	128.073.400,00	-	-	128.073.400,00

No.	Nama OPD	Saldo Aset Lain-lain 2020 (audited)	Penambahan Aset Lain-lain 2021	Pengurangan Aset Lain-lain 2021	Saldo Aset Lain-lain 2021
30	Inspektorat Kabupaten	75.570.490,00	6.150.000,00	-	81.720.490,00
31	BAPPPEDA	435.769.795,00	-	-	435.769.795,00
32	DLH	1.562.896.780,00	1.890.258.236,00	583.737.000,00	2.869.418.016,00
33	Kantor KESBANGPOL	151.091.700,00	5.040.000,00	-	156.131.700,00
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	284.242.598,00	-	-	284.242.598,00
35	BPBD	1.327.312.000,00	-	-	1.327.312.000,00
36	BKPSDM	178.329.400,00	-	-	178.329.400,00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	115.441.080,00	-	37.768.500,00	77.672.580,00
38	Dinas KOMINFO	76.359.950,00	-	-	76.359.950,00
Jumlah		**213.829.466.684,84**	**7.548.135.618,00**	**16.121.662.907,00**	**205.255.939.395,84**

Rincian penambahan dan pengurangan Aset lain-lain berdasarkan perolehan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.76
Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain Berdasarkan Perolehan Tahun 2021

Saldo Aset Lain-lain 2020 (audited)		**213.829.466.684,84**
Jumlah Penambahan Aset Lain-lain 2021		**7.548.135.618,00**
1	Penambahan Mutasi Antar OPD	109.929.000,00
2	Penambahan reklas aset tetap/lainnya/ekstrakompatibel	3.497.965.386,00
3	Penambahan Reklas sesama Aset Tetap/lainnya/ektrakompatibel	3.940.155.323,00
4	Penambahan Koreksi	85.909,00
Jumlah Pengurangan Aset Lain-lain 2021		**16.121.662.907,00**
1	Pengurangan Reklas Sesama Aset Tetap/lainnya/Ekstrakompatibel	3.940.155.323,00
2	Pengurangan Mutasi Antar OPD	109.929.000,00
3	Pengurangan Koreksi	85.909,00
4	Penghapusan	12.071.492.675,00
Saldo Aset Lain-lain 2021		**205.255.939.395,84**

Penambahan aset lain-lain selama tahun 2021 yang berpengaruh secara keseluruhan kepada jumlah aset lain-lain karena rusak berat senilai Rp2.355.949.286,00, dipinjampakaikan kepada pihak lain sebesar Rp551.768.100,00dan akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp590.248.000,00.
Adapun rincian penambahan Aset lain-lain sebesar Rp7.548.135.618,00 berdasarkan perolehan per OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.77
Uraian Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain Per OPD

Aset Lain-Lain			Jumlah
Saldo Aset Lain-lain 2020 (audited)			**213.829.466.684,84**
Jumlah Penambahan Aset Lain-lain 2021			**7.548.135.618,00**
1	Penambahan Mutasi Antar OPD		109.929.000,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya		109.929.000,00
	1	Kec. Asam Jujuhan	38.700.000,00
	2	Dinas TRANSNAKER	71.229.000,00
2	Penambahan reklas aset tetap/lainnya/ekstrakompatibel		3.497.965.386,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya		2.355.949.286,00
	1	Sekretariat DPRD	127.326.900,00
	2	Sekretariat Daerah	72.625.000,00
	3	Kec. Pulau Punjung	48.600.000,00
	4	Kec. Sitiung	32.200.000,00
	5	Kec. IX Koto	6.913.000,00
	6	Kec. Padang Laweh	9.900.000,00
	7	Dinas PUPR	592.276.000,00
	8	Dinas PERKIMTAN	50.756.050,00
	9	RSUD	450.130.200,00
	10	Dinas TRANSNAKER	78.600.000,00
	11	Dinas KUMPERDAG	49.450.000,00
	12	Inspektorat Kabupaten	6.150.000,00
	13	DLH	825.982.136,00
	14	Kantor KESBANGPOL	5.040.000,00
	Aset yang dipinjampakaikan		551.768.100,00
	1	DLH	551.768.100,00
	Aset yang akan diserahkan ke masyarakat		590.248.000,00
	1	Dinas PUPR	590.248.000,00
3	Penambahan Reklas sesama Aset Tetap/lainnya/ektrakompatibel		3.940.155.323,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya		33.268.000,00
	1	Sekretariat Daerah	6.318.000,00
	2	DLH	26.950.000,00
	Aset yang dipinjampakaikan		485.558.000,00
	1	DLH	485.558.000,00
	Aset yang akan diserahkan ke masyarakat		3.421.329.323,00
	1	Dinas PUPR	970.829.598,00
	2	Dinas Pertanian	2.450.499.725,00
4	Penambahan Koreksi		85.909,00
	Aset yang akan diserahkan ke masyarakat		85.909,00
	1	Dinas Pertanian	85.909,00

Aset Lain-Lain			Jumlah
Jumlah Pengurangan Aset Lain-lain 2021			**16.121.662.907,00**
1	Pengurangan Reklas Sesama Aset Tetap/lainnya/Ekstrakompatibel		3.940.155.323,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya		1.456.387.598,00
	1	Dinas PUPR	970.829.598,00
	2	DLH	485.558.000,00
	Aset yang dipinjampakaikan		2.483.767.725,00
	1	Sekretariat Daerah	6.318.000,00
	2	Dinas Pertanian	2.450.499.725,00
	3	DLH	26.950.000,00
2	Pengurangan Mutasi Antar OPD		109.929.000,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya		109.929.000,00
	1	Kec. Sungai Rumbai	38.700.000,00
	2	DLH	71.229.000,00
3	Pengurangan Koreksi		85.909,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya		85.909,00
	1	Dinas Pertanian	85.909,00
4	Penghapusan		12.071.492.675,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya		314.550.000,00
	1	Kec. Sitiung	28.600.000,00
	2	Kec. Asam Jujuhan	20.250.000,00
	3	Dinas Kesehatan	81.000.000,00
	4	Dinas Pendidikan	58.700.000,00
	5	Dinas PMD	126.000.000,00
	Aset yang dipinjampakaikan		282.615.000,00
	1	Sekretariat Daerah	234.765.000,00
	2	Kec. Pulau Punjung	32.850.000,00
	3	Kec. Asam Jujuhan	15.000.000,00
	Aset yang akan diserahkan ke masyarakat		11.474.327.675,00
	1	Dinas PERKIMTAN	3.023.720.689,00
	2	Dinas Pertanian	8.412.838.486,00
	3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	37.768.500,00
Saldo Aset Lain-lain 2021			**205.255.939.395,84**

Rincian Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Aset lain-lain berdasarkan perolehan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.78
Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Aset Lain-Lain 2021 Berdasarkan Perolehan

Saldo Aset Lain-lain 2021		**205.255.939.395,84**
Akumulasi Penyusutan 2020 (Audited)		**142.013.028.477,75**
Penambahan Penyusutan Aset Lain-lain 2021		18.919.489.612,04
1	Penambahan Penyusutan Mutasi Antar OPD	105.993.750,00
2	Penambahan Penyusutan Reklas	4.927.927.398,92
3	Penambahan Penyusutan Koreksi	2.203.848.225,03
4	Penyusutan Semester I	5.739.647.551,46
5	Penyusutan Semester II	5.942.072.686,63
Pengurangan Penyusutan Aset Lain-lain 2021		12.347.021.992,95
1	Pengurangan Penyusutan Mutasi Antar OPD	105.993.750,00
2	Pengurangan Penyusutan Reklas	3.192.386.297,92
3	Pengurangan Penyusutan Penghapusan	6.844.793.720,00
4	Pengurangan Penyusutan Koreksi	2.203.848.225,03
Akumulasi Penyusutan Aset 2021		148.585.496.096,84
Nilai Buku Aset Lain-lain 2021		**56.670.443.299,00**

Uraian Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Aset lain-lain per OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.79
Uraian Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Aset Lain – Lain OPD Tahun 2021

Aset Lain-lain			Jumlah
Saldo Aset Lain-lain 2021			**205.255.939.395,84**
Akumulasi Penyusutan 2020 (Audited)			142.013.028.477,75
Penambahan Penyusutan Aset Lain-lain 2021			18.919.489.612,04
1	**Penambahan Penyusutan Mutasi Antar OPD**		**105.993.750,00**
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya		105.993.750,00
	1	Kec. Asam Jujuhan	38.700.000,00
	2	Dinas TRANSNAKER	67.293.750,00
2	**Penambahan Penyusutan Reklas**		**4.927.927.398,92**
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya		1.798.549.376,04
	1	Sekretariat DPRD	127.326.900,00
	2	Sekretariat Daerah	32.629.041,00

Aset Lain-lain			Jumlah
	3	Kec. Pulau Punjung	48.600.000,00
	4	Kec. Sitiung	32.200.000,00
	5	Kec. IX Koto	6.048.875,00
	6	Kec. Padang Laweh	9.900.000,00
	7	Dinas PERKIMTAN	5.869.531,00
	8	Dinas Perhubungan	223.060.572,92
	9	RSUD	445.294.366,00
	10	Dinas TRANSNAKER	30.675.000,00
	11	Inspektorat Kabupaten	6.150.000,00
	12	DLH	825.755.090,12
	13	Kantor KESBANGPOL	5.040.000,00
	Aset yang dipinjampakaikan		678.878.297,88
	1	DLH	678.878.297,88
	Aset yang akan diserahkan ke masyarakat		2.450.499.725,00
	1	Dinas Pertanian	2.450.499.725,00
3	**Penambahan Penyusutan Koreksi**		**2.203.848.225,03**
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya		2.102.425.873,93
	1	Kec. Sungai Rumbai	34.143.214,29
	2	Dinas PUPR	1.952.830.064,38
	3	Dinas PERKIMTAN	14.288.666,67
	4	DSP3KB	97.803.928,60
	5	DISDUKCAPIL	3.360.000,00
	Aset yang dipinjampakaikan		99.209.042,10
	1	Sekretariat Daerah	73.512.265,00
	2	Dinas PMD	1.976.774,14
	3	DLH	23.720.002,96
	Aset yang akan diserahkan ke masyarakat		2.213.309,00
	1	Dinas Pertanian	2.213.309,00
4	**Penyusutan Semester I**		**5.739.647.551,46**
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya		377.267.937,06
	1	Sekretariat DPRD	735.714,14
	2	Sekretariat Daerah	29.216.232,00
	3	Kec. Koto Baru	275.418,00
	4	Kec. Sungai Rumbai	16.712,58
	5	Kec. IX Koto	720.104,00
	6	Kec. Padang Laweh	282.500,00

Aset Lain-lain			Jumlah
	7	Kec Koto Salak	3.220.850,00
	8	Kec. Asam Jujuhan	250.000,00
	9	Dinas PUPR	24.101.417,61
	10	Dinas PERKIMTAN	1.848.438,33
	11	Dinas Perhubungan	4.400.892,57
	12	Dinas Kesehatan	29.920.714,14
	13	RSUD	52.841.637,50
	14	Dinas Pendidikan	171.608.505,54
	15	Dinas BUDPARPORA	656.702,41
	16	Dinas TRANSNAKER	7.350.000,00
	17	DSP3KB	8.681.089,25
	18	DISDUKCAPIL	908.275,00
	19	Dinas Pertanian	2.127.400,00
	20	Dinas Pangan dan Perikanan	16.387.668,22
	21	BKD	669.552,08
	22	DPMPTSP	250.000,00
	23	BAPPPEDA	3.139.090,63
	24	DLH	12.426.561,60
	25	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	2.474.694,13
	26	BPBD	2.757.767,33
	Aset yang dipinjampakaikan		245.096.308,51
	1	Sekretariat Daerah	182.839.476,87
	2	Kec. Sungai Rumbai	18.623.573,29
	3	DSP3KB	20.235.295,60
	4	Dinas PMD	20.235.295,60
	5	DLH	3.162.667,16
	Aset yang akan diserahkan ke masyarakat		5.117.283.305,89
	1	Dinas PUPR	4.619.179.585,19
	2	Dinas PERKIMTAN	84.732.546,17
	3	Dinas Perhubungan	293.562,92
	4	Dinas Pertanian	413.077.611,62
5	**Penyusutan Semester II**		**5.942.072.686,63**
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya		345.787.356,96
	1	Sekretariat DPRD	735.714,00
	2	Sekretariat Daerah	23.590.408,00

Aset Lain-lain			Jumlah
	3	Kec. Koto Baru	275.418,00
	4	Kec. Sungai Rumbai	16.713,00
	5	Kec. IX Koto	144.021,00
	6	Kec. Padang Laweh	282.500,33
	7	Kec Koto Salak	3.220.849,67
	8	Kec. Asam Jujuhan	249.999,67
	9	Dinas PUPR	23.209.750,00
	10	Dinas PERKIMTAN	1.848.438,00
	11	Dinas Perhubungan	4.400.893,00
	12	Dinas Kesehatan	23.490.749,00
	13	RSUD	54.363.032,58
	14	Dinas Pendidikan	151.625.054,00
	15	Dinas BUDPARPORA	608.691,00
	16	Dinas TRANSNAKER	8.311.250,00
	17	DSP3KB	8.312.337,00
	18	Dinas Pangan dan Perikanan	16.387.667,00
	19	DPMPTSP	125.000,00
	20	BAPPPEDA	3.639.091,69
	21	DLH	16.205.369,02
	22	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	2.120.579,00
	23	BPBD	2.623.832,00
	Aset yang dipinjampakaikan		245.448.394,00
	1	Sekretariat Daerah	178.833.339,00
	2	Kec. Sungai Rumbai	15.519.641,00
	3	DSP3KB	20.235.296,00
	4	DLH	30.860.118,00
	Aset yang akan diserahkan ke masyarakat		5.350.836.935,67
	1	Dinas PUPR	4.851.501.026,00
	2	Dinas PERKIMTAN	84.732.545,00
	3	Dinas Perhubungan	293.563,00
	4	Dinas Pertanian	414.309.801,67
Pengurangan Penyusutan Aset Lain-lain 2021			**12.347.021.992,95**
1	**Pengurangan Penyusutan Mutasi Antar OPD**		**105.993.750,00**
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya		105.993.750,00
	1	Kec. Sungai Rumbai	38.700.000,00

Aset Lain-lain			Jumlah
	2	DLH	67.293.750,00
2	**Pengurangan Penyusutan Reklas**		**3.192.386.297,92**
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya		485.558.000,00
	1	DLH	485.558.000,00
	Aset yang dipinjampakaikan		2.483.767.725,00
	1	Sekretariat Daerah	6.318.000,00
	2	Dinas Pertanian	2.450.499.725,00
	3	DLH	26.950.000,00
	Aset yang akan diserahkan ke masyarakat		223.060.572,92
	1	Dinas Perhubungan	223.060.572,92
3	**Pengurangan Penyusutan Penghapusan**		**6.844.793.720,00**
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya		314.550.000,00
	1	Kec. Sitiung	28.600.000,00
	2	Kec. Asam Jujuhan	20.250.000,00
	3	Dinas Kesehatan	81.000.000,00
	4	Dinas Pendidikan	58.700.000,00
	5	Dinas PMD	126.000.000,00
	Aset yang dipinjampakaikan		282.615.000,00
	1	Sekretariat Daerah	234.765.000,00
	2	Kec. Pulau Punjung	32.850.000,00
	3	Kec. Asam Jujuhan	15.000.000,00
	Aset yang akan diserahkan ke masyarakat		6.247.628.720,00
	1	Dinas PERKIMTAN	777.103.239,00
	2	Dinas Pertanian	5.432.756.981,00
	3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	37.768.500,00
4	**Pengurangan Penyusutan Koreksi**		**2.203.848.225,03**
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya		101.422.351,10
	1	Sekretariat Daerah	73.512.265,00
	2	Dinas PMD	1.976.774,14
	3	Dinas Pertanian	2.213.309,00
	4	DLH	23.720.002,96
	Aset yang dipinjampakaikan		131.947.142,88
	1	Kec. Sungai Rumbai	34.143.214,29
	2	DSP3KB	97.803.928,60
	Aset yang akan diserahkan ke masyarakat		1.970.478.731,05
	1	Dinas PUPR	1.952.830.064,38
	2	Dinas PERKIMTAN	14.288.666,67
	3	DISDUKCAPIL	3.360.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset 2021			**148.585.496.096,84**
Nilai Buku Aset Lain-lain 2021			**56.670.443.299,00**

V.C.2 KEWAJIBAN

Total Kewajiban Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18.045.680.349,38 mengalami penurunan sebesar Rp17.910.301.573,69 atau 49,81% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp35.955.981.923,07. Jumlah tersebut terdiri atas Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan rincian sebagai berikut.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.C.2.a Kewajiban Jangka Pendek	**18.045.680.349,38**	**35.955.981.923,07**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman (bagian lancar utang jangka panjang dan utang kepada pihak ketiga) utang bunga maupun utang perhitungan fihak ketiga (PFK).

Utang jangka pendek Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.C.2.a.1 Utang kepada Pihak Ketiga (PFK)	**765.399.544,27**	**4.900.000,00**

Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2021 sebesarRp765.399.544,27 terdiri dari

1. Utang sebesar Rp491.715.681,00 berdasarkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Iuran Jaminan kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah Daerah antara KPPN Sijunjung, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dan BPJS Kesehatan Triwulan Tahun 2021 Nomor 900/2208A/BKD-2021 dan
2. 537/BA/II-06/1221 tanggal 28 Desember 2021. Utang tersebut timbul karena adanya selisih kurang bayar iuran 1% dan 4 % pada Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.80
Utang PFK Tahun 2021

No	SKPD	Iuran 1%	Iuran 4%	Total
1	Dinas Pendidikan	278.061.440,00		**278.061.440,00**
2	Dinas Kesehatan			**109.717.370,00**
	- Jasa Medis RSUD Sungai Rumbai	171.394,00	685.576,00	
	- Jasa Pelayanan Puskesmas	21.772.080,00	87.088.320,00	
3	RSUD Sungai Dareh	20.787.374,00	83.149.497,00	**103.936.871,00**
	Jumlah			**491.715.681,00**

3. Utang sebesar Rp273.683.863,27 adalah Pajak Negara yang dipungut Bendahara BOS dan belum disetor ke Kas Negara pada Tahun 2021 terdiri dari PPN sebesar Rp193.305.603,27, PPh 21 sebesar Rp75.116.467,00, PPh 22 sebesar Rp4.976.593,00, dan PPh 23 sebesar Rp285.200,00.

Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2020 sebesar Rp4.900.000,00 merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang telah disetor ke Kas Negara Tahun 2021 yaitu:

1. PPN sebesar Rp3.809.100,00 pada RSUD Sungai Rumbai berupa belanja modal pengadaan alat kesehatan sebesar Rp102.400,00 telah disetor ke kas negara tanggal 7 Maret 2021 dan SDN 09 Koto Besar berupa pembelian perlengkapan sekolah sebesar Rp3.706.700 disetor ke kas negara tanggal 14 April 2021.
2. PPh Pasal 21 sebesar Rp612.500,00 pada Puskesmas Sungai Limau berupa honor pengelola keuangan sebesar Rp42.500,00 disetor ke kas negara tanggal 22 Maret 2021, SDN 09 Koto Besar sebesar Rp570.000,00 berupa honor insentif BOS disetor ke kas negara tanggal 14 April 2021.
3. PPh Pasal 22 sebesar Rp470.400,00 pada SDN 09 Koto Besar disetor ke kas negara tanggal 14 April 2021
4. PPh Pasal 23 sebesar Rp8.000,00 pada SDN 09 Koto Besar disetor ke kas negara tanggal 14 April 2021

		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.C.2.a.2	**Pendapatan Diterima Dimuka**	**102.623.340,64**	**2.661.665.181,07**

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2021 sebesar Rp102.623.340,64 tersebut terdiri atas pendapatan diterima dimuka atas kerja sama pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian sewa gedung ATM pada beberapa SKPD, sewa untuk tanah dan bangunan, pengawasan menara telekomunikasi dan lebih salur klaim BPJS BLUD Dinas Kesehatan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.2.81
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2021

No	SKPD	Nomor / Jangka Waktu / Jumlah Kontrak	Tahun Pembayaran s.d. Selesai kontrak	Pendapatan Diterima Dimuka	Pendapatan Retribusi LO s.d. Tahun 2021
1	**Dinas Kesehatan**				
	ATM Bank Nagari Cabang Koto Baru	PKS/007/KB/12-2021 dan 010/2646/Umum-Dinkes/XII/2021	01/01/2021 s.d. 31/12/2021		1.600.985,22
			01/01/2022 s.d. 31/12/2022	2.996.715,93	
		20 Juni 2016 sd 20 Juni 2021	01/01/2023 s.d. 31/12/2023	2.996.715,93	
		5 Tahun	01/01/2024 s.d. 31/12/2024	3.004.926,11	
		Rp15.000.000,00	01/01/2025 s.d. 31/12/2025	2.996.715,93	
		1827 hari	01/01/2026 s.d. 20/06/2026	1.403.940,89	
	Jumlah			**13.399.014,79**	**1.600.985,22**
2	**BLUD Puskesmas**				
	Pendapatan diterima dimuka dana Kapitasi			15.368.800,00	
	Lebih salur Non Kapitasi			1.100.000,00	
	Jumlah			**16.468.800,00**	**0,00**
3	**RSUD Sungai Dareh**				
a.	Payment Point dan ATM Bank Nagari	445/789/RSUD-2016	01/01/2021 s.d. 31/12/2021		7.060.387,39
		01 Februari 2017 s.d 01 Februari 2022	01/01/2022 s.d. 01/02/2022	618.992,86	
		5 Tahun Rp35.340.624,00 1827 hari			
b.	Payment Point dan ATM Bank Nagari	445/29/RSUD-2021	16/11/2021 s.d. 31/12/2021		1.151.857,74
		16 November 2021 s.d 16 November 2024	01/01/2022 s.d. 31/12/2022	9.139.740,74	
		3 Tahun	01/01/2023 s.d. 31/12/2023	9.139.740,74	
		Rp27.469.303,00	01/01/2024 s.d. 31/12/2024	8.037.963,78	
		1097 hari			

No	SKPD	Nomor / Jangka Waktu / Jumlah Kontrak	Tahun Pembayaran s.d. Selesai kontrak	Pendapatan Diterima Dimuka	Pendapatan Retribusi LO s.d. Tahun 2021
c.	ATM BRI	16 Nov 2021 s.d 16 Nov 2024			
		3 Tahun	01/01/2021 s.d. 04/05/2021		1.256.986,30
		Rp27.469.303,00			
		1051 hari			
	Jumlah			**26.936.438,12**	**9.469.231,43**
4	**Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan**				
	Pendapatan Diterima dimuka dari Rusunawa			11.722.580,65	
	Jumlah			**11.722.580,65**	**0,00**
5	**Dinas Komunikasi dan Informatika**				
	Pendapatan diterima dimuka atas kelebihan bayar dari Protelindo			1.000.000,00	
	Jumlah			**1.000.000,00**	**0,00**
6	**Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu**				
	Pendapatan diterima dimuka atas IMB			18.300.000,00	
	Jumlah			**18.300.000,00**	**0,00**
7	**Badan Keuangan Daerah**				
a.	Menara Telekomunikasi PT. Dayamitra Telekomunikasi	Nomor:415.4/14/BUP-2018 Nomor: 0001/DMT/RC-3/M-R010/VIII/2018	01/01/2021 s.d. 31/12/2021		6.296.549,84
			01/01/2022 s.d. 01/02/2022	6.296.549,84	
		17 Juni 2018 s.d 16 Juni 2023	01/01/2023 s.d. 16/06/2023	2.880.887,19	
		5 Tahun			
		Rp31.500.000,00			
b.	ATM Bank Nagari	030/654/BKD-XII/2017			
		20 Juni 2016 s.d 30 Nov 2022	01/01/2021 s.d. 31/12/2021		6.116.648,41
		5 tahun	01/01/2022 s.d. 30/11/2022	5.597.152,25	
		Rp30.600.000,00			
		1826 hari			
	Jumlah			**14.774.589,28**	**12.413.198,25**

No	SKPD	Nomor / Jangka Waktu / Jumlah Kontrak	Tahun Pembayaran s.d. Selesai kontrak	Pendapatan Diterima Dimuka	Pendapatan Retribusi LO s.d. Tahun 2021
8	**Sekretariat Daerah**				
	ATM Bank BRI	Nomor:B.13 2-KC.III/LOG/)/2021	02/01/2020 s.d. 01/01/2021		3.978.082,19
		2 Januari 2021 s.d 2 Januari 2022	01/01/2022 s.d. 02/01/2022	21.917,80	
		1 Tahun			
		Rp4.000.000,00			
		365 Hari			
	Jumlah			**21.917,80**	**3.978.082,19**
	Total			**102.623.340,64**	**27.461.497,09**

Realisasi Pendapatan Kapitasi Puskesmas pada Tahun 2021 terdapat pembayaran kapitasi lebih salur oleh BPJS Tahun 2021 sebesar Rp16.468.800,00. Pembayaran lebih salur kapitasi Tahun 2021 akan dilakukan pemotongan pada penerimaan kapitasi pada tahun 2022. Rincian lebih salur pendapatan kapitasi puskesmas dapat uraikan sebagai berikut.

Tabel 5.2.82

Pendapatan Diterima Dimuka BLUD Puskesmas Tahun 2021

No	Puskesmas	Klaim BPJS 2018 dan 2019	Lebih Salur Kapitasi 2021	Lebih Salur Non Kapitasi 2021	Pendapatan Diterima Dimuka 2021
1	RSUD Sungai Rumbai	-	-	-	-
2	Sungai Rumbai		1.065.900,00		1.065.900,00
3	Koto Besar		1.282.500,00	1.100.000,00	2.382.500,00
4	Sungai Limau		767.500,00		767.500,00
5	Koto Baru		1.414.800,00		1.414.800,00
6	Tiumang		462.000,00		462.000,00
7	Padang Laweh		246.000,00		246.000,00
8	Sitiung I		826.500,00		826.500,00
9	Timpeh	3.165.000,00	500.700,00		3.665.700,00

No	Puskesmas	Klaim BPJS 2018 dan 2019	Lebih Salur Kapitasi 2021	Lebih Salur Non Kapitasi 2021	Pendapatan Diterima Dimuka 2021
10	Gunung Medan		1.216.200,00		1.216.200,00
11	Sitiung II		1.161.000,00		1.161.000,00
12	Beringin Sakti		312.000,00		312.000,00
13	Silago		659.700,00		659.700,00
14	Sungai Dareh		1.657.200,00		1.657.200,00
15	Sialang		631.800,00		631.800,00
Jumlah		**3.165.000,00**	**12.203.800,00**	**1.100.000,00**	**16.468.800,00**

Nilai klaim BPJS tahun 2018 dan 2019 pada Puskesmas Timpeh sebesar Rp3.165.000,00 adalah Hasil temuan audit Tim BPJS tanggal 9 November 2020, adanya kesalahan prosedur pengajuan klaim pada 21 kasus pada tahun 2018 dan 2019, dimana bidan yang menolong persalinan bukan bidan wilayah kerja puskesmas timpeh, tetapi bidan berada di wilayah kerja Puskesmas Beringin Sakti (pemekaran dari Puskesmas Timpeh) sehingga penerimaan klaim sebesar Rp13.075.000,00 yang telah disetor ke Puskesmas Timpeh oleh BPJS, dibatalkan dan dilakukan pemotongan selama tahun 2020 sebesar Rp4.080.000,00 dan tahun 2021 sebesar Rp5.830.000,00 sehingga nilai pendapatan diterima dimuka atas klaim per 31 Desember 2021 menjadi Rp3.165.000,00.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.C.2.a.3 Utang Belanja	**12.286.454.764,47**	**33.289.416.742,00**

Utang Belanja per 31 Desember 2021 sebesar 12.286.454.764,47 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.2.83
Utang Belanja Tahun 2021

No	Utang Belanja	Uraian	Saldo Utang
a.	**Belanja Pegawai**		
1	BKD	Utang Insentif Pemungutan Pajak daerah	91.169.999,00
I	**Jumlah**		**91.169.999,00**
b.	**Belanja Barang Jasa**		

No	Utang Belanja	Uraian	Saldo Utang
2	BLUD Puskesmas	Utang Jasa Layanan 2021	1.234.071.892,47
3	BLUD RSUD Sungai Dareh	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	4.223.447.396,00
		Belanja Bahan Pakai Habis/ Kedokteran	3.022.174.035,00
		Belanja Bahan Obat	2.131.840.150,00
		Belanja Bahan Laboratorium	643.757.928,00
4	Dinas PMPTSP	Utang Listrik	6.569.051,00
5	Dinas PMPTSP	Utang Air	585.000,00
II	**Jumlah**		**11.262.445.452,47**
c.	**Belanja Modal**		
3	Dinas PUPR	Utang Belanja Modal	34.932.500,00
III	**Jumlah**		**34.932.500,00**
d.	**Belanja Bantuan Keuangan**		
	BKD	Utang DBH PDRD Nagari Triwulan IV tahun 2021	864.906.813,00
IV	**Jumlah**		**864.906.813,00**
e.	**Belanja Tak Terduga**		
	BKD	Utang Belanja tak terduga atas bencana kebakaran	33.000.000,00
V	**Jumlah**		**33.000.000,00**
JUMLAH (I + II + III + IV + V)			**12.286.454.764,47**

		Tahun 2021	Tahun 2020
a.	**Utang Belanja Pegawai**	**91.169.999,00**	**99.907.066,00,00**

Utang Belanja Pegawai 2021

Utang Belanja Pegawai 2021 sebesar Rp91.169.999,00,00 merupakan utang Insentif Pemungutan PBB pada Badan Keuangan Daerah Sesuai Dengan SK Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor 862.1/50/KPTS-BKD/2022 tanggal 25 Februari tentang Penetapan Kekurangan Insentif Kepada Pemungut / Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Tahun 2021.

Uraian Utang Belanja Pegawai Tahun 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 28** di Laporan Keuangan ini.

Utang Belanja Pegawai 2020

Utang Belanja Pegawai 2020 sebesar Rp99.907.066,00,00 merupakan utang Insentif Pemungutan PBB pada Badan Keuangan Daerah Sesuai Dengan SK Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor 862.1/26/KPTS-BKD/2021 tentang Penetapan Kekurangan Insentif Kepada Pemungut / Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Tahun 2020 yang telah dibayarkan pada tahun 2021.

		Tahun 2021	Tahun 2020
b.	**Utang Belanja Barang dan Jasa**	**11.262.445.452,47**	**8.545.079.120,00**

Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 terdiri dari.

1. Utang belanja pada BLUD Dinas Kesehatan sebesar Rp1.234.071.892,47 merupakan Utang BLUD UPT Puskesmas dan RSUD Sungai Rumbai atas utang klaim BPJS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.84
Utang Belanja UPT Puskesmas dan RSUD Sungai Rumbai Tahun 2021

No	Puskesmas	Utang 2020	Utang 2021
1	RSUD Sungai Rumbai	347.950.854,00	955.989.418,20
2	Sungai Rumbai	43.015.260,00	5.052.600,00
3	Koto Besar	40.371.340,00	84.228.954,27
4	Sungai Limau	13.192.800,00	33.000,00
5	Koto Baru	63.714.000,00	84.883.680,00
6	Tiumang	-	17.359.060,00
7	Padang Laweh	10.138.800,00	3.508.800,00
8	Sitiung I	27.825.360,00	48.816.060,00
9	Timpeh	31.799.160,00	22.027.380,00
10	Gunung Medan	2.332.200,00	3.813.180,00
11	Sitiung II	-	1.721.000,00
12	Beringin Sakti	462.000,00	1.148.400,00

No	Puskesmas	Utang 2020	Utang 2021
13	Silago	68.644.440,00	5.205.360,00
14	Sungai Dareh	3.247.800,00	285.000,00
15	Sialang	-	0,00
Jumlah		**652.694.014,00**	**1.234.071.892,47**

2. Utang Belanja pada BLUD RSUD Sungai Dareh sebesar Rp10.021.219.509,00 terdiri dari Utang Jasa pelayanan sebesar Rp4.223.447.396,00, Utang Bahan Pakai Habis Kedokteran sebesar Rp3.022.174.035,00, Utang Obat sebesar Rp2.131.840.150,00 dan Utang Bahan Laboratorium sebesar Rp643.757.928,00.
3. Utang belanja jasa pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebesar Rp7.154.051,00 meruapakan utang belanja listrik Bulan Desember 2021 sebesar Rp6.569.051,00 dan Utang Belanja Air Bulan Desember 2021 sebesar Rp585.000,000,00

Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 terdiri dari.

1. Utang belanja pada BLUD Dinas Kesehatan sebesar Rp414.022.410,00 merupakan Utang BLUD UPT Puskesmas dan RSUD Sungai Rumbai atas utang klaim BPJS yang sudah dibayarkan di tahun 2021.
2. Utang Belanja pada BLUD RSUD Sungai Dareh sebesar Rp6.514.985.149,00 yang telah dibayar pada tahun 2021.
3. Utang belanja pada SKPD sebesar Rp1.616.071.561,00 sudah dibayarkan pada tahun 2021.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
c. Utang Belanja Modal	**34.932.500,00**	**23.965.887.303,00**

Utang Belanja Modal Tahun 2021 sebesar Rp34.932.500,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Utang ini terdiri dari :

1. Sisa pembayaran dari Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan (DAK Reguler) Paket IV Nomor Kontrak 620.04/PRC/PEMB-JLN/DAK/BM-DPUPR/IX-2020 oleh perusahaan konsultan CV. Diazka Konsultan sebesar Rp99.850.000,00 yang fisiknya belum selesai dikerjakan pada Tahun 2020 pembayaran pekerjaan baru dibayarkan sebesar Rp79.880.000,00 (85%) pada tahun 2021, sehingga masih ada sisa pembayaran sebesar Rp19.970.000,00.

2. Sisa pembayaran termyn final 100% kegiatan pembangunan gedung kantor pekerjaan review perencanaan pembangunan Landscape Mesjid Agung Dharmasraya Nomor Kontrak 640/09/014-SL/PRC/PGK-APBD/CK-DPUPR/2020 oleh CV Gatra Consultant dengan jumlah Rp99.750.000,00 yang dibayarkan pada Tahun 2021 sebesar Rp84.787.500,00 (85%) sehingga masih ada sisa utang sebesar Rp14.962.500,00.

Utang Belanja Modal tahun 2020 sebesar Rp23.965.887.303,00 terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp119.341.200,00, RSUD Sungai Dareh sebesar Rp122.700.000,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp238.671.604,00 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp23.485.174.499,00 merupakan utang KDP Mesjid Agung sebesar Rp22.522.720.499,00 dan utang belanja modal lainnya sebesar Rp962.454.000,00 dibayarkan pada tahun 2021 sebesar Rp927.521.500,00 dan masih sisa sebesar Rp34.932.500,00 dibayarkan pada Tahun 2022**.** Utang Belanja Modal 2020 yang telah dibayarkan pada tahun 2021 sebesar Rp23.930.954.803,00.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
d. Utang Belanja Bantuan Keuangan	**864.906.813,00**	**678.543.253,00**

Utang Belanja bantuan Keuangan 2021 merupakan Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBHPDRD) Triwulan IV Tahun 2021 untuk 52 Nagari di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/49/KPTS-BUP/2022 tanggal 22 Februari 2022 tentang Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Nagari Triwulan 4 Tahun 2021 sebesar Rp.864.906.813,00

Uraian Utang Belanja Bantuan Keuangan dapat diuraikan pada **Lampiran 29** di Laporan Keuangan ini.

Utang Belanja bantuan Keuangan 2020 sebesar Rp.678.543.253,00 merupakan Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBHPDRD) Triwulan IV Tahun 2020 untuk 52 Nagari di Kabupaten Dharmasraya yang telah dibayarkan pada tahun 2021.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
e. Utang Belanja Tak Terduga	**33.000.000,00**	**0,00**

Utang Belanja Tak Terduga sebesar Rp33.000.000,00 terdiri dari belanja tak terduga untuk bantuan bencana kebakaran di Sungai Duo sebesar Rp28.000.000,00 dan bencana kebakaran di Sialang Gaung sebesar Rp5.000.000,00 yang belum dibayarkan pada akhir tahun.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.C.2.a.4 Utang Jangka Pendek Lainnya	**4.891.202.700,00**	**0,00**

Utang jangka pendek lainnya tahun 2021 berupa utang retensi pada dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada PT Nindya Karya atas Pembangunan Masjid Agung yang muncul karena adanya pekerjaan yang belum diselesaikan pada Tahun 2021 sebesar Rp4.891.202.700,00.

Utang jangka pendek lainnya Tahun 2020 adalah Rp0,00

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.C.2.b Kewajiban Jangka Panjang	**0,00**	**0,00**

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.C.3 EKUITAS	**2.488.069.809.561,05**	**2.346.493.866.411,02**

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Total ekuitas akhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.488.069.809.561,05 diperoleh dari ekuitas awal sebesar Rp2.346.493.866.411,02 ditambah surplus laporan operasional sebesar Rp127.994.985.144,14 ditambah dampak kumulatif kesalahan mendasar sebesar Rp13.580.958.005,89.

Ekuitas Awal	**2.346.493.866.411,02**
Surplus/Defisit LO	**127.994.985.144,14**
Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar	**13.580.958.005,89**
Ekuitas Akhir	**2.488.069.809.561,05**

V.D. Laporan Operasional

V.D.1. Pendapatan – LO

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
5.	**PENDAPATAN**	**1.051.385.580.493,23**	**962.701.597.597,06**	**88.683.982.896,17**

Pendapatan Operasional Tahun 2021 dan Tahun 2020 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan LO Tahun 2021 sebesar Rp1.051.385.580.493,23 bila dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp962.701.597.597,06, terdapat kenaikan sebesar Rp88.683.982.896,17 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.1
Pendapatan Operasional Tahun 2021 dan 2020

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	Kenaikan/Penurunan
		Rp	Rp	Rp
8.	**PENDAPATAN**	1.051.385.580.493,23	962.701.597.597,06	88.683.982.896,17
8.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	93.834.740.104,23	78.237.222.767,86	15.597.517.336,37
8.2.	Pendapatan Transfer	835.428.784.613,00	829.499.881.968,00	5.928.902.645,00
8.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	122.122.055.776,00	54.964.492.861,20	67.157.562.914,80

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	93.834.740.104,23	78.237.222.767,86	15.597.517.336,37

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021 dan Tahun 2020. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, terdapat kenaikan sebesar Rp15.597.517.336,37.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahan dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.2
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 dan 2020

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**93.834.740.104,23**	**78.237.222.767,86**	**15.597.517.336,37**
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	22.455.754.207,25	20.059.644.354,45	2.396.109.852,80
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.499.784.055,43	1.985.918.356,61	513.865.698,82
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahan	10.284.830,00	3.524.570.411,00	(3.514.285.581,00)
8.1.4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	68.868.917.011,55	52.667.089.645,80	16.201.827.365,75

a.1. Pendapatan Pajak Daerah

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.1	**Pendapatan Pajak Daerah**	22.455.754.207,25	20.059.644.354,45	2.396.109.852,80

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, terdapat kenaikan sebesar Rp2.396.109.852,80.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel. 5.3.3
Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah antara LRA dan LO Tahun 2021

Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA Rp	Pendapatan-LO Rp	Selisih +/- Rp
Pendapatan Pajak Daerah	**20.495.633.388,25**	**22.455.754.207,25**	**1.960.120.819,00**
Pajak Hotel	113.415.750,00	110.615.750,00	(2.800.000,00)
Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.322.388.104,00	1.360.958.886,00	38.570.782,00
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	281.958.792,00	281.958.792,00	-
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan			

Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA Rp	Pendapatan-LO Rp	Selisih +/- Rp
Sendiri	486.813.407,00	493.473.974,00	6.660.567,00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	11.489.499.944,00	11.529.127.172,00	39.627.228,00
Pajak Air Tanah	13.959.165,00	13.959.165,00	-
Pajak Sarang Burung Walet	26.500.000,00	26.500.000,00	-
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	279.629.242,25	279.629.242,25	-
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	2.564.106.809,00	4.442.169.051,00	1.878.062.242,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	3.917.362.175,00	3.917.362.175,00	-

Penjelasan perbedaan Pendapatan Pajak Daerah-LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO jumlah sebesar Rp1.960.120.819,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel. 5.3.4
Selisih Pendapatan Pajak Daerah antara LRA dan LO Tahun 2021

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Penerimaan piutang Pajak Hotel	2.800.000,00		(2.800.000,00)
Penerimaan pendapatan Pajak restoran	903.200,00		(903.200,00)
Penambahan piutang pajak restoran		1.540.275,00	1.540.275,00
koreksi pencatatan penerimaan pajak restoran yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2021 pada SDN dan SMP		37.933.707,00	37.933.707,00
Penerimaan piutang pajak penerangan jalan Non PLN	41.557.677,00		(41.557.677,00)
Penambahan piutang pajak penerangan jalan Non PLN		48.218.244,00	48.218.244,00
Penerimaan piutang pajak penerangan jalan PLN	979.410.413,00		(979.410.413,00)

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Penambahan piutang pajak penerangan jalan PLN tahun 2021		1.019.037.641,00	1.019.037.641,00
Penerimaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	400.233.634,00		(400.233.634,00)
Penambahan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		2.278.295.876,00	2.278.295.876,00
JUMLAH	1.424.904.924,00	3.385.025.743,00	1.960.120.819,00

Penjelasan Selisih

a. Penerimaan piutang pajak Hotel Tahun 2020 sebesar Rp2.800.000,00
b. Penerimaan pajak restoran pada SDN 09 Koto Besar sebesar Rp903.200,00
c. Penerimaan piutang pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri Tahun 2020 yang diterima Tahun 2021 sebesar Rp41.557.677,00
d. Penerimaan piutang pajak penerangan jalan sumber lain Tahun 2020 yang diterima Tahun 2021 sebesar Rp979.410.413,00
e. Penerimaan piutang pajak PBBP2 Tahun 2020 yang diterima Tahun 2021 sebesar Rp400.233.634,00
f. Adanya Penambahan piutang pajak restoran Tahun 2021 yang belum diterima sebesar Rp1.540.275,00
g. Adanya koreksi pencatatan penerimaan pajak restoran yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2021 pada SDN dan SMP sebesar Rp37.933.707,00
h. Adanya Penambahan piutang pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri Tahun 2021 yang belum diterima sebesar Rp48.218.244,00
i. Adanya Penambahan piutang pajak penerangan jalan sumber lain Tahun 2021 yang belum diterima sebesar Rp1.019.037.641,00
j. Adanya piutang pajak PBBP2 Tahun 2021 yang belum diterima sebesar Rp2.278.295.876,00

a.2. Pendapatan Retribusi Daerah

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**2.499.784.055,43**	**1.985.918.356,61**	**513.865.698,82**

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, terdapat kenaikan sebesar Rp513.865.698,82.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel. 5.3.5
Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah antara LRA dan LO Tahun 2021

Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA Rp	Pendapatan-LO Rp	Selisih +/- Rp
Pendapatan Retribusi Daerah	**2.411.365.382,00**	**2.499.784.055,43**	**88.418.673,43**
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	179.266.100,00	179.266.100,00	-
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	129.612.000,00	129.612.000,00	-
Retribusi Kios	162.721.000,00	110.054.000,00	(52.667.000,00)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	261.618.000,00	260.627.000,00	(991.000,00)
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	39.300.000,00	39.300.000,00	-
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	58.055.500,00	58.055.500,00	-
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	199.897.100,00	324.446.549,84	124.549.449,84
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	413.297.703,00	377.254.041,37	(36.043.661,63)
Retribusi Penyewaan Tanah	15.000.000,00	1.600.985,22	(13.399.014,78)
Retribusi Penyewaan Bangunan	16.391.634,00	16.391.634,00	-
Retribusi Pemakaian Alat	134.740.000,00	134.740.000,00	-
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	-	-	-
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	21.132.895,00	21.132.895,00	-
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	3.520.000,00	3.520.000,00	-
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	50.355.000,00	50.355.000,00	-
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	105.160.100,00	105.160.100,00	-
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	431.650.000,00	516.919.900,00	85.269.900,00
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	189.648.350,00	171.348.350,00	(18.300.000,00)

Penjelasan perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO jumlah sebesar Rp88.418.673,43 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel. 5.3.6

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah antara LRA dan LO Tahun 2021

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Dinas Koperindag - piutang retribusi pelayanan pasar	54.967.000,00	2.300.000,00	(52.667.000,00)
Dinas Perhubungan - kas di bendahara penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor	991.000,00		(991.000,00)
piutang retribusi pengendalian menara telekomunikasi :	50.050.000,00	174.599.449,84	124.549.449,84
Dinas Kominfo - piutang retribusi pengendalian menara telekomunikasi	49.050.000,00	168.302.900,00	
Dinas Kominfo - Pendapatan diterima dimuka retribusi pengendalian menara telekomunikasi	1.000.000,00		
BKD - Pendapatan retribusi daerah diterima dimuka Menara Telekomunikasi PT. Dayamitra Telekomunikasi dengan Kontrak Nomor:415.4/14/BUP-2018 Nomor: 0001/DMT/RC-3/M-R010/VIII/2018, jangka waktu 17 Juni 2018 s.d 16 Juni 2023		6.296.549,84	
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan :	51.666.743,72	15.623.082,09	(36.043.661,63)
BKD - Pendapatan retribusi daerah diterima dimuka ATM Bank Nagari dengan Nomor Kontrak 030/654/BKD-XII/2017, jangka waktu 20 Juni 2016 s.d 30 Nov 2022		6.116.648,41	
Dinas Pendidikan - Penerimaan Piutang Sewa Rumah Dinas	11.179.000,00		
Dinas Kesehatan - Pendapatan Sewa ATM		1.178.131,03	
RSUD Sungai Dareh	26.317.445,26	8.317.373,69	
Dinas Perkimtan - Sewa Rusunawa	13.548.380,65		
Sekretariat Daerah - Sewa ATM	21.917,81	10.928,96	

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Kecamatan Koto Baru - Retribusi Kendaraan Dinas	600.000,00		
Dinas Kesehatan - Retribusi Penyewaan Tanah	13.399.014,78		(13.399.014,78)
- Dinas PUPR - Piutang SPAM	75.482.500,00	160.752.400,00	85.269.900,00
- Dinas PM-PTSP - Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	18.300.000,00		(18.300.000,00)
JUMLAH	264.856.258,50	353.274.931,93	88.418.673,43

Penjelasan selisih antara LRA dan LO pada Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2020 sebesar Rp88.418.673,43 pada tabel tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan terdapat selisih sebesar Rp52.667.000,00 yang terdiri dari:

- Adanya penerimaan piutang retribusi pelayanan pasar tahun 2020 sebesar Rp54.967.000,00 di tahun 2021 dan penambahan piutang tahun 2021 sebesar Rp2.300.000,00

2) Dinas Perhubungan terdapat selisih sebesar Rp991.000,00 merupakan Kas di Bendahara Penerimaan berupa retribusi pengujian kendaraan bermotor yang sudah disetor ke Kas Daerah sebesar Rp991.000,00 di tahun 2021.

3) Adanya penambahan pendapatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp124.549.449,84 pada SKPD:

- Dinas Kominfo sebesar Rp119.252.900 berasal dari penerimaan piutang retribusi menara tahun 2020 sebesar Rp49.050.00,00 dan penambahan piutang retribusi menara tahun 2021 sebesar Rp168.302.900,00.
- Pada dinas Kominfo terdapat pendapatan diterima dimuka sebesar Rp1.000.000,00 yang berasal dari keterlanjuran pembayaran dari Perusahaan Protelindo yang tagihan nya berjumlah Rp97.100.000,00 dan ditransfer sebesar Rp98.100.000,00 sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp1.000,000,00
- Badan Keuangan Daerah sebesar Rp6.296.549,84 merupakan penerimaan Pendapatan retribusi daerah diterima dimuka Menara Telekomunikasi PT. Dayamitra Telekomunikasi dengan Kontrak Nomor:415.4/14/BUP-2018 Nomor: 0001/DMT/RC-3/M-R010/VIII/2018, jangka waktu 17 Juni 2018 s.d 16 Juni 2023

4) Adanya pengurangan retribusi penyewaan tanah dan bangunan sebesar Rp36.043.661,63 yang terdapat pada SKPD:

- BKD sebesar Rp6.116.648,41 berasal dari penambahan Pendapatan retribusi daerah diterima dimuka ATM Bank Nagari dengan Nomor Kontrak 030/654/BKD-XII/2017, jangka waktu 20 Juni 2016 s.d 30 Nov 2022.

- Dinas Pendidikan sebesar Rp11.179.000,00 berasal dari penerimaan piutang sewa rumah dinas tahun 2020 yang telah dibayarkan pada tahun 2021.
- Dinas Kesehatan sebesar Rp1.178.131,03, berasal dari penambahan sewa ATM oleh Bank Nagari dengan Nomor Kontrak PKS/007/KB/12-2021,jangka waktu 20 Juni 2021 s.d 20 Juni 2026.
- RSUD Sungai Dareh sebesar Rp18.000.071,57 yang berasal dari penerimaan sewa ATM Payment Point Rp26.317.445,26 tahun 2020 dan penambahan sewa ATM Payment Point tahun 2021 sebesar Rp8.317.373,69
- Dinas Perkimtan sebesar Rp13.548.380,65 yang berasal dari pendapatan diterima dimuka atas sewa rusunawa.
- Sekretariat Daerah terdapat penerimaan sewa ATM sebesar Rp21.917,81 tahun 2020 dan penambahan sewa ATM tahun 2021 sebesar Rp10.928,96.
- Kecamatan Koto Baru sebesar Rp600.000,00 merupakan penerimaan retribusi kendaraan dinas tahun 2020 yang telah di setor pada tahun 2021.

5) Adanya penerimaan sewa tanah tahun 2020 pada Dinas Kesehatan untuk sewa ATM sebesar Rp13.399.014,78 yang diterima pada tahun 2021.

- Pada Dinas PUPR terdapat penerimaan piutang SPAM tahun sebelumnya sebesar Rp75.482.500,00 di tahun 2021 dan adanya penambahan piutang di tahun 2021 sebesar Rp160.752.400,00.

a.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
8.1.1	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahan**	10.284.830,00	3.524.570.411,00	(3.514.285.581,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2021 dan Tahun 2020. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, terdapat penurunan sebesar Rp3.514.285.581,00.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahan Daerah-LRA dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan -LO dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel. 5.3.7
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahan antara LRA dan LO Tahun 2021

Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA Rp	Pendapatan-LO Rp	Selisih +/- Rp
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahan	**3.524.570.411,00**	**10.284.830,00**	**(3.514.285.581,00)**
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	3.524.570.411,00	10.284.830,00	(3.514.285.581,00)

Penjelasan perbedaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan -LRA dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO jumlah sebesar Rp3.514.285.581,00, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel. 5.3.8
Selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan antara LRA dan LO Tahun 2021

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Penerimaan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-atas Deviden Bank Nagari	3.515.054.721,00		(3.515.054.721,00)
Penerimaan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-atas Deviden PT.BPR Pulau Punjung	9.515.690,00		(9.515.690,00)
Penambahan pencatatan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-atas Deviden PT.BPR Pulau Punjung		10.284.830,00	10.284.830,00
JUMLAH	3.524.570.411,00	10.284.830,00	(3.514.285.581,00)

Penjelasan selisih antara LRA dan LO pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2020 sebesar Rp3.514.285.581,00 pada tabel tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Adanya Penyesuaian Pengurangan pencatatan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-atas Deviden Bank Nagari Rp3.515.054.721,00 dan PT.BPR Pulau Punjung Rp9.515.690,00
- Adanya Penambahan pencatatan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-atas Deviden PT.BPR Pulau Punjung Rp10.284.830,00

a.4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
8.1.1	**Pendapatan Asli Daerah Lainnya**	**68.868.917.011,55**	**52.667.089.645,80**	**16.201.827.365,75**

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Asli Daerah Lainnya Tahun 2021 dan Tahun 2020. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, terdapat kenaikan sebesar Rp16.201.827.365,75.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Lain-lain PAD yang sah-LRA dengan Pendapatan Asli Daerah Lainnya -LO dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel. 5.3.9
Perbedaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya antara LRA dan LO Tahun 2021

Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA Rp	Pendapatan-LO Rp	Selisih +/- Rp
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	**56.397.892.339,62**	**68.868.917.011,55**	**12.471.024.671,93**
Hasil Penjualan Tanaman	21.504.000,00	21.504.000,00	-
Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya	240.617.100,00	-	(240.617.100,00)
Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi	233.743.000,00	111.968.000,00	(121.775.000,00)
Jasa Giro pada Kas Daerah	1.210.144.144,00	1.210.144.144,00	-
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	73.895.711,00	74.462.248,00	566.537,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	486.674.700,67	419.706.372,60	(66.968.328,07)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.230.702.038,12	1.220.621.408,12	(10.080.630,00)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	209.701.248,16	209.701.248,16	-
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	-	-	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2.414.879.040,00	2.414.879.040,00	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	145.236.376,00	145.236.376,00	-
Pendapatan BLUD	43.221.909.781,67	56.142.786.574,67	12.920.876.793,00

Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA Rp	Pendapatan-LO Rp	Selisih +/- Rp
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.908.885.200,00	6.897.907.600,00	(10.977.600,00)

Penjelasan perbedaan Lain-lainPendapatan Asli Daerah yang sah-LRA dengan Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO jumlah sebesar Rp12.471.024.671,93 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel. 5.3.10
Penjelasan Perbedaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya
antara LRA dan LO Tahun 2021

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Reklas pendapatan Hasil Penjualan Aset daerah yang dipisahkan atas lelang aset ke Surplus penjualan aset non lancar	363.292.100,00	900.000,00	(362.392.100,00)
Kas Giro Di Bendahara		566.537,00	566.537,00
Penambahan dan Penerimaan piutang TGR	486.674.700,67	419.706.372,60	(66.968.328,07)
Penerimaan piutang bunga deposito pada Bank Nagari Pulau Punjung	10.080.630,00		(10.080.630,00)
Pendapatan BLUD RSUD :			-
- Piutang Jasa Layanan BLUD	381.077.730,00	13.303.054.523,00	12.921.976.793,00
- Lebih Salur Non Kapitasi	1.100.000,00		(1.100.000,00)
Pendapatan Dana Kapitasi :			
- Piutang Kapitasi	1.144.200,00	1.548.100,00	403.900,00
- Lebih Salur Kapitasi	12.203.800,00	822.300,00	(11.381.500,00)
JUMLAH	1.255.573.160,67	13.726.597.832,60	12.471.024.671,93

Penjelasan selisih antara LRA dan LO pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021 sebesar R12.471.024.671,93 yang terdapat pada BLUD Puskesmas, BLUD RSUD Sungai Dareh, Badan Keuangan Daerah, dan Dinas Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 5.3.11
Perbedaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah antara LO dan LRA
pada SKPD Tahun 2021

NO	NAMA OPD	LO	LRA	SELISIH
1	2	4	3	5
1	BLUD Puskesmas	10.669.423.731,00	9.786.612.331,00	882.811.400,00
2	BLUD RSUD Sungai Dareh	52.371.270.443,67	40.344.182.650,67	12.027.087.793,00
3	Badan Keuangan Daerah	5.585.590.987,72	6.025.032.045,79	(439.441.058,07)
4	Dinas Pendidikan	566.537,00	0,00	566.537,00
	Jumlah	**68.626.851.699,39**	**56.155.827.027,46**	**12.471.024.671,93**

Penjelasan selisih antara LRA dan LO pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021 sebesar Rp12.471.024.671,93 pada tabel tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Pada BLUD Puskesmas terdapat selisih sebesar Rp882.811.400,00 yang terdiri penambahan piutang BLUD Tahun 2021 sebesar Rp1.248.862.100,00 dan lebih salur klaim BPJS 2020 sebesar Rp822.300,00. Pengurangan piutang BLUD Tahun 2020 sebesar Rp353.569.200,00, lebih salur kapitasi kapitasi Tahun 2021 sebesar Rp12.203.800,00 dan lebih salur non kapitasi Puskesmas Koto Besar Tahun 2021 sebesar Rp1.100.000,00.
2) Pada BLUD RSUD Sungai Dareh terdapat selisih sebesar Rp12.027.087.793 yang terdiri dari penambahan piutang BLUD Tahun 2021 sebesar Rp12.055.740.523,00 dan pengurangan piutang BLUD 2020 sebesar Rp28.652.730,00.
3) Pada Badan Keuangan Daerah terdapat selisih sebesar Rp439.441.058,07 yang terdiri dari:

   Penyesuaian penambahan sebesar Rp420.606.372,60 yang terdiri dari:

   - Penambahan Piutang TGR Tahun 2021 sebesar Rp419.706.372,60.
   - Reklasifikasi Penerimaan atas Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan-LO atas lelang asset tercatat di surplus penjualan aset non lancar sebesar Rp900.000,00.

   Penyesuaian pengurangan sebesar Rp860.047.430,67 yang terdiri dari.

- Penerimaan Piutang TGR 2020 sebesar Rp486.674.700,67.
- Reklasifikasi pendapatan Hasil Penjualan Aset daerah- LO ke Surplus defisit penjualan aset Non lancar sebesar Rp363.292.100,00.
- Penerimaan piutang bunga deposito pada Bank Nagari Pulau Punjung sebesar Rp10.080.630,00

4) Pada Dinas Pendidikan terdapat selisih sebesar Rp566.537,00 yang merupakan pendapatan jasa giro dana BOS Tahun 2021.

b. Pendapatan Transfer

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.	**Pendapatan Transfer**	835.428.784.613,00	829.499.881.968,00	5.928.902.645,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Transfer Tahun 2021 dan Tahun 2020. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, terdapat kenaikan sebesar Rp5.928.902.645,00.

Pendapatan Transfer ini terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel. 5.3.12

Perbedaan Pendapatan Transfer antara LRA dan LO Tahun 2021

KODE REK	Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA	Pendapatan-LO	Selisih +/-
		Rp	Rp	Rp
8.2.	**Pendapatan Transfer**	**838.657.002.069,00**	**835.428.784.613,00**	**(3.228.217.456,00)**
8.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**713.844.105.329,00**	**709.953.250.674,00**	**(3.890.854.655,00)**
	Dana Bagi Hasil Pajak	30.199.842.269,00	26.352.048.498,00	(3.847.793.771,00)
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	3.462.713.300,00	3.419.652.416,00	(43.060.884,00)
	Dana Alokasi Umum (DAU)	472.416.143.000,00	472.416.143.000,00	-
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	207.765.406.760,00	207.765.406.760,00	-
8.2.2	**Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**	**73.540.405.000,00**	**73.540.405.000,00**	**-**

KODE REK	Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA	Pendapatan-LO	Selisih +/-
		Rp	Rp	Rp
	Dana Penyesuaian	73.540.405.000,00	73.540.405.000,00	-
8.2.3	**Transfer Pemerintah Provinsi**	**51.272.491.740,00**	**51.935.128.939,00**	**662.637.199,00**
	Pendapatan bagi Hasil Pajak	51.272.491.740,00	51.935.128.939,00	662.637.199,00
	Pendapatan bagi Hasil Lainnya	-	-	-
	Bantuan Keuangan	-	-	-

Penjelasan perbedaan Pendapatan Transfer-LRA dengan Pendapatan Transfer-LO jumlah sebesar Rp3.228.217.456,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel. 5.3.13
Penjelasan Perbedaan Pendapatan Transfer antara LRA dan LO Tahun 2021

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Penerimaan piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat Tahun 2020 yang belum diterima	6.505.389.322,00		(6.505.389.322,00)
Lebih Salur Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat Tahun 2020		2.614.534.667,00	2.614.534.667,00
Penerimaan dan Penambahan Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi	8.967.719.269,00	9.630.356.468,00	662.637.199,00
JUMLAH	**15.473.108.591,00**	**12.244.891.135,00**	**(3.228.217.456,00)**

Penjelasan penyesuaian :

Penyesuaian penambahan sebesar Rp3.277.171.866,00 yang terdiri dari:
- Lebih salur Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat Tahun 2020 sebesar Rp2.614.534.667,00.
- Penambahan piutang Dana Bagi Hasil Provinsi Tahun 2021 yang belum diterima sebesar Rp9.630.356.468,00.

Penyesuaian pengurangan sebesar Rp6.505.389.322,00 yang terdiri dari:
- Penerimaan Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat Tahun 2020 sebesar Rp6.505.389.322,00.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.	**Pendapatan Hibah**	122.122.055.776,00	54.964.492.861,20	67.157.562.914,80

Jumlah tersebut merupakan saldo Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2021 dan Tahun 2020. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, terdapat kenaikan sebesar Rp67.157.562.914,80.

Lain-lain Pendapatan yang Sah ini merupakan pendapatan hibah yang terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri, Pendapatan Hibah BOS, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel. 5.3.14
Perbedaan Lain-lain Pendapatan yang sah antara LRA dan LO Tahun 2021

KODE REK	Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA	Pendapatan-LO	Selisih +/-
		Rp	Rp	Rp
8.3.	**Lain-Lain Pendapatan Yang Sah**	**57.434.253.512,00**	**122.122.055.776,00**	**64.687.802.264,00**
	Pendapatan Hibah	**57.434.253.512,00**	**122.122.055.776,00**	64.687.802.264,00
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA	-	62.835.283.605,00	62.835.283.605,00
	Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA	26.548.313.512,00	28.400.832.171,00	1.852.518.659,00
	Pendapatan Hibah BOS - LRA	30.885.940.000,00	30.885.940.000,00	-

Penjelasan perbedaan Lain-lain Pendapatan yang Sah -LRA dengan Lain-lain Pendapatan yang sah - LO jumlah sebesar Rp64.687.802.264,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pada Dinas Pendidikan adanya penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari hibah masyarakat sebesar Rp28.710.000,00 dan penambahan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp23.000.000,00.
2. Pada Dinas Kesehatan adanya penambahan persediaan dari Dinas Kesehatan Provinsi sebesar Rp4.001.809.656,00,00 yang terdiri dari persediaan alat kesehatan habis pakai sebesar Rp1.704.000.000,00 dan penambahan persediaan obat-obatan sebesar Rp2.297.809.656,00.
3. Pada BLUD Puskesmas adanya penambahan pendapatan hibah - LO sebesar Rp6.657.861.360,00, dengan rincian:

No	BLUD	Hibah Alat Kesehatan Habis	Hibah Aset tetap Gedung	Hibah Aset Tetap Peralatan	Jumlah

		pakai	dan Bangunan	dan Mesin	
1	RSUD Sungai Rumbai	344.338.860,00	-	-	344.338.860,00
2	Sungai Rumbai	-	-	-	0,00
3	Koto Besar	-	-	-	0,00
4	Sungai Limau	-	-	-	0,00
5	Koto Baru	-	1.029.480.000,00	362.960.000,00	1.392.440.000,00
6	Tiumang	-	-	-	0,00
7	Padang Laweh	-	-	-	0,00
8	Sitiung I	6.777.500,00	-	-	6.777.500,00
9	Timpeh	-	1.306.575.000,00	453.570.000,00	1.760.145.000,00
10	Gunung Medan	-	-	-	0,00
11	Sitiung II	-	-	362.960.000,00	362.960.000,00
12	Beringin Sakti	-	-	-	0,00
13	Silago	-	1.233.445.000,00	400.000.000,00	1.633.445.000,00
14	Sungai Dareh	-	794.795.000,00	-	794.795.000,00
15	Sialang	-	-	362.960.000,00	362.960.000,00
	TOTAL	**351.116.360,00**	**4.364.295.000,00**	**1.942.450.000,00**	**6.657.861.360,00**

4. Pada RSUD Sungai Dareh adanya penambahan hibah sebesar Rp1.192.264.659,00 yang terdiri dari aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.186.014.659,00 dan alat kesehatan habis pakai dari Dinas Kesehatan Provinsi dalam rangka penanganan covid 19 sebesar Rp6.250.000,00.
5. Pada Dinas PUPR adanya penambahan aset dari hibah sebesar Rp28.198.279.188,00 yang terdiri dari aset gedung dan bangunan sebesar Rp5.003.368.000,00, dan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp23.194.911.188,00.
6. Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adanya penambahan aset dari hibah sebesar Rp23.243.319.000,00 berupa aset tetap jalan, jaringan dan irigasi.
7. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adanya penambahan hibah alat kesehatan habis pakai sebesar Rp538.544.000,00.
8. Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga adanya penambahan persediaan dari sumbangan pihak ketiga sebesar Rp706.342.801,00
9. Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip adanya penambahan aset dari hibah sebesar Rp82.408.600,00 yang terdiri dari aset peralatan dan mesin sebesar Rp49.820.000,00 dan aset tetap lainnya sebesar Rp32.588.600,00.

Pada Dinas Pertanian adanya penambahan persediaan obat-obatan ternak dari Provinsi sebesar Rp15.263.000,00.

V.D.2. Beban

Beban pada Laporan Operasional sesuai dengan format Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.	**BEBAN**	**923.556.448.119,09**	**890.555.469.704,29**	**33.000.978.414,80**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Operasional Tahun 2021 dan Tahun 2020, yang terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, dan beban transfer. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, terdapat kenaikan sebesar Rp33.000.978.414,80 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.15
Beban Operasional Tahun 2021 dan 2020

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.	**BEBAN**	**923.556.448.119,09**	**890.555.469.704,29**	**33.000.978.414,80**
9.1.1.	Beban Pegawai	382.354.718.195,46	425.276.572.735,00	(42.921.854.539,54)
9.1.2	Beban Persediaan	72.600.984.126,33	69.109.719.631,87	3.491.264.494,46
9.1.2	Beban Jasa	98.084.318.217,81	61.054.627.884,27	37.029.690.333,54
9.1.2	Beban Sewa	2.509.976.767,12	2.217.298.064,03	292.678.703,09
9.1.2	Beban Pemeliharan	11.196.376.603,00	8.647.223.670,00	2.549.152.933,00
9.1.2	Beban Perjalanan Dinas	47.517.031.727,00	36.283.810.392,00	11.233.221.335,00
9.1.5	Beban Hibah	21.567.610.832,00	72.886.229.581,03	(51.318.618.749,03)
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	-	17.918.600.000,00	(17.918.600.000,00)
9.1.7	Beban Penyusutan Aset tetap	156.458.476.461,00	125.070.937.211,03	31.387.539.249,97
9.1.7	Beban Penyusutan Aset lain-	11.678.665.931,90	14.150.005.898,05	(2.471.339.966,15)
9.1.7	Beban Amortisasi	336.657.078,83	339.300.810,18	(2.643.731,35)
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	3.573.789.229,02	2.991.191.038,83	582.598.190,19
9.1.9	Beban Transfer	112.110.404.801,00	54.609.952.788,00	57.500.452.013,00
9.1.9	Beban Transfer	3.567.438.148,62	-	3.567.438.148,62

d. Beban Pegawai

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.1.1.	**Beban Pegawai**	**382.354.718.195,46**	**425.276.572.735,00**	**(42.921.854.539,54)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2021 dan Tahun 2020. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, terdapat penurunan sebesar Rp42.921.854.539,54 yang dipengaruhi antara lain berkurangnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan beban kerja dan honor pengelola keuangan dibayarkan 10 (sebelas) bulan.

Beban Pegawai ini terdiri dari Beban Gaji dan Tunjangan, Beban Tambahan Penghasilan PNS, Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Uang Lembur, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Beban Pegawai BLUD, Beban Pegawai Dana BOS, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.16
Beban Pegawai Tahun 2021 dan 2020

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.1.1	**Beban Pegawai**	**382.354.718.195,46**	**425.276.572.735,00**	**(42.921.854.539,54)**
9.1.1.01.	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	240.631.981.156,00	231.767.137.816,00	8.864.843.340,00
9.1.1.02.	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	45.783.786.049,00	120.480.140.860,00	(74.696.354.811,00)
9.1.1.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	62.836.372.488,00	881.924.166,00	61.954.448.322,00
9.1.1.04.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.273.970.318,00		12.273.970.318,00
9.1.1.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	478.985.416,00		478.985.416,00
9.1.1.06.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	490.716.000,00	6.406.185.000,00	(5.915.469.000,00)
9.1.1.07.	Uang Lembur - LO	-	1.070.951.000,00	(1.070.951.000,00)
9.1.1.08.	Honorarium PNS LO	-	6.846.055.000,00	(6.846.055.000,00)
9.1.1.09.	Honorarium Non PNS LO	-	35.746.190.000,00	(35.746.190.000,00)
9.1.1.10.	Beban Pegawai BLUD	19.858.906.768,46	22.077.988.893,00	(2.219.082.124,54)

Saldo Beban Pegawai tersebut adalah jumlah *netto* setelah dikuranginya pengembalian beban pegawai selama Tahun 2021.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel. 5.3.17

Perbedaan Belanja Pegawai antara LRA dan LO Tahun 2021

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA (Rp)	Belanja-LO (Rp)	Selisih +/- (Rp)
Beban Pegawai	**380.289.821.307,81**	**382.354.718.195,46**	**(2.064.896.887,65)**
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	241.475.377.325,00	240.631.981.156,00	843.396.169,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	45.783.786.049,00	45.783.786.049,00	-
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	63.034.119.555,00	62.836.372.488,00	197.747.067,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.273.970.318,00	12.273.970.318,00	-
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	478.985.416,00	478.985.416,00	-
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	490.716.000,00	490.716.000,00	-
Beban Pegawai BLUD	16.752.866.644,81	19.858.906.768,46	(3.106.040.123,65)

Penjelasan perbedaan belanja persediaan-LRA dengan beban persediaan-LO jumlah sebesar Rp2.064.896.887,65 dapat dijelaskan sebagai berikut.

URAIAN	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Utang belanja pegawai	4.936.950.002,00	2.571.093.114,35	(2.365.856.887,65)
Beban Pegawai menambah nilai aset	-	300.960.000,00	300.960.000,00
JUMLAH	**4.936.950.002,00**	**2.872.053.114,35**	**(2.064.896.887,65)**

Penjelasan Selisih

a. Penyesuaian atas utang belanja pegawai sebesar Rp2.365.856.887,65,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 5.3.18

Penjelasan Selisih Utang Belanja Pegawai antara LRA dan LO Tahun 2021

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	**491.715.681,00**	**1.335.111.850,00**	**843.396.169,00**
utang PFK atas adanya selisih kurang bayar iuran 1% dan 4 % pada iuran jaminan kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)			
Dinas Pendidikan	278.061.440,00	1.335.111.850,00	
Dinas Kesehatan :			
- Jasa Medis RSUD Sungai Rumbai	856.970,00		
- Jasa Pelayanan Puskesmas	108.860.400,00		
RSUD Sungai Dareh	103.936.871,00		
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	**91.169.999,00**	**99.907.066,00**	**8.737.067,00**
BKD - Utang Insentif Pemungutan Pajak daerah	91.169.999,00	99.907.066,00	
Beban Pegawai BLUD	**4.354.064.322,00**	**1.136.074.198,35**	**(3.217.990.123,65)**
Utang jasa layanan kesehatan RSUD Sungai Dareh	4.223.447.396,00	1.103.407.950,00	
Utang jasa layanan kesehatan BLUD RSUD Sungai Rumbai	113.594.926,00	12.805.665,00	
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Koto Besar	17.022.000,00	19.860.583,35	
Jumlah	**4.936.950.002,00**	**2.571.093.114,35**	**(2.365.856.887,65)**

Penjelasan selisih utang belanja pegawai sebagai berikut :

- Penambahan Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2021 sebesarRp491.715.681,00 merupakan utang atas Iuran Jaminan kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah Daerah antara KPPN Sijunjung, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dan BPJS Kesehatan. Utang tersebut dikarenakan adanya selisih kurang bayar iuran 1% dan 4 % pada iuran jaminan kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU).

- Penambahan utang belanja pegawai pada Badan Keuangan Daerah yang merupakan merupakan utang Insentif Pemungutan PBB sebesar Rp91.169.999,00,00 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor 862.1/50/KPTS-BKD/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Penetapan Kekurangan Insentif Kepada Pemungut / Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Tahun 2021.
- Penambahan Utang Belanja Jasa Layanan pada BLUD RSUD Sungai Dareh sebesar Rp4.223.447.396,00, RSUD Sungai Rumbai sebesar Rp113.594.926,00 dan Puskesmas Koto Besar sebesar Rp17.022.000,00.
- Belanja dibayar dimuka atas kelebihan bayar iuran Jaminan kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) 1% dari TPP sebesar Rp207.710.735,00 dan 4% dari Gaji Induk/TPP/TPG sebesar Rp1.127.401.115,00.
- Pembayaran utang belanja pegawai pada Badan Keuangan Daerah yang merupakan utang Insentif Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2020 sebesar Rp99.907.066,- yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 862.1/35/KPTS-BKD/2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Penetapan Kekurangan Insentif kepada Pemungut/Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Tahun 2020 di Kabupaten Dharmasraya.
- Pembayaran Utang Belanja Jasa Layanan pada pada BLUD RSUD Sungai Dareh sebesar Rp1.103.407.950,00 RSUD Sungai Rumbai sebesar Rp12.805.665,00 dan Puskesmas Koto Besar sebesar Rp19.860.583,35.

b. Penyesuaian untuk mengakui beban pegawai menambah nilai aset sebesar Rp300.960.000,00. Dengan rincian :

Tabel. 5.3.19

Beban pegawai menambah nilai aset Tahun 2021

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Dinas Kesehatan - Belanja Pegawai menambah nilai aset gedung	-	6.250.000,00	6.250.000,00
RSUD Sungai Dareh - Belanja Pegawai menambah nilai aset	-	64.500.000,00	64.500.000,00
Sekretariat Daerah - Belanja Pegawai menambah nilai aset (honor ULP)	-	177.570.000,00	177.570.000,00
Sekretariat DPRD - Belanja Pegawai menambah nilai aset tanah, gedung dan JIJ	-	5.190.000,00	5.190.000,00
BLUD Puskesmas - Belanja Pegawai menambah nilai aset :			
- RSUD Sungai Rumbai	-	9.450.000,00	9.450.000,00

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
- Puskesmas Sungai Limau	-	6.000.000,00	6.000.000,00
- Puskesmas Padang Laweh	-	6.500.000,00	6.500.000,00
- Puskesmas Sitiung I	-	8.250.000,00	8.250.000,00
- Puskesmas Timpeh	-	6.000.000,00	6.000.000,00
- Puskesmas Beringin Sakti	-	6.000.000,00	6.000.000,00
- Puskesmas Silago	-	5.250.000,00	5.250.000,00
Jumlah		**300.960.000,00**	**300.960.000,00**

e. Beban Persediaan

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
9.1.2.b	**Beban Persediaan**	**72.600.984.126,33**	**69.109.719.631,87**	**3.491.264.494,46**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Persediaan dalam Tahun 2021 dan Tahun 2020. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, terdapat kenaikan sebesar Rp3.491.264.494,46.

Beban Persediaan ini terdiri dari beban pakai habis, beban bahan material, beban cetak dan penggandaan serta beban persediaan BLUD dan beban persediaan BOS, yaitu :

Untuk perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa (Persediaan)-LRA dengan Beban Persediaan-LO adalah sebagai berikut.

Tabel. 5.3.20
Perbedaan Belanja Barang dan Jasa (Persediaan) LRA dan Beban Persediaan LO Tahun 2021

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Persediaan	**84.007.521.706,83**	**72.600.984.126,33**	**11.406.537.580,50**
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	184.077.000,00	603.757.111,50	(419.680.111,50)
Beban Bahan-Bahan Kimia	427.702.725,00	396.416.589,00	31.286.136,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.906.922.408,00	3.848.662.217,40	58.260.190,60

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	296.666.000,00	296.666.000,00	-
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	24.082.000,00	24.082.000,00	-
Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	299.930.100,00	220.654.100,00	79.276.000,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	673.261.750,00	1.185.587.425,00	(512.325.675,00)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	166.004.500,00	166.004.500,00	-
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.432.141.060,00	1.778.107.553,41	(345.966.493,41)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	224.588.273,00	163.120.273,00	61.468.000,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	193.738.500,00	128.938.500,00	64.800.000,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	1.930.500,00	1.930.500,00	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.964.737.969,00	2.907.708.800,00	57.029.169,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	543.346.001,00	541.534.846,59	1.811.154,41
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.159.038.000,00	1.121.389.150,00	37.648.850,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	202.963.000,00	202.694.000,00	269.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	947.334.108,00	948.938.108,00	(1.604.000,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	548.177.301,00	544.789.751,00	3.387.550,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	425.427.607,00	502.525.004,78	(77.097.397,78)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	129.493.200,00	129.493.200,00	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	3.000.000,00	3.000.000,00	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	44.800.000,00	53.360.000,00	(8.560.000,00)
Beban Obat-Obatan-Obat	4.488.889.574,00	2.728.938.037,81	1.759.951.536,19
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	-	-	-

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	26.232.219.048,83	7.319.723.370,00	18.912.495.678,83
Beban Natura dan Pakan-Natura	3.901.098.250,00	3.887.591.100,00	13.507.150,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	3.418.503.000,00	3.418.503.000,00	-
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	43.913.000,00	43.913.000,00	-
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	55.615.000,00	55.615.000,00	-
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	104.502.000,00	104.502.000,00	-
Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	57.500.000,00	57.500.000,00	-
Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	674.400.000,00	674.400.000,00	-
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	6.000.000,00	6.000.000,00	-
Beban Pakaian Kerja Laboratorium	-	-	-
Beban Persediaan Dana BLUD - LO	17.709.760.634,00	26.035.561.790,84	(8.325.801.156,84)
Beban Persediaan Dana BOS - LO	12.515.759.198,00	12.496.877.198,00	16.382.000,00

Penjelasan perbedaan belanja persediaan-LRA dengan beban persediaan-LO jumlah sebesar Rp11.406.537.580,50 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Penyesuaian persediaan yang terpakai pada Tahun 2020 dan yang masih menjadi persediaan (*stock*) pada Tahun 2021 berdasarkan *stock opname* persediaan per 31 Desember 2021.
b. Penyesuaian penambahan persediaan yang berasal dari belanja Jasa Tenaga Keamanan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp46.850.000,00
c. Penyesuaian beban persediaan menambah nilai aset pada Dinas Pendidikan sebesar Rp16.382.000,00, RSUD Sungai Rumbai sebesar Rp200.000,00 dan Puskesmas Sitiung I sebesar Rp480.000,00.
d. Penyesuaian utang belanja persediaan Tahun 2021 sebesar Rp5.940.427.851,20 di debet dan Tahun 2020 yang mengurangi beban persediaan sebesar Rp5.940.774.534,00 dikredit, dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel. 5.3.21
Penyesuaian utang belanja persediaan Tahun 2021

Skpd/ Uraian	Penyesuaian		Selisih LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
DINAS KESEHATAN			
Utang belanja bahan obat-obatan		370.667.750,00	370.667.750,00
BLUD RSUD SUNGAI DAREH	-	-	-

Skpd/ Uraian	Penyesuaian		Selisih LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Utang belanja bahan pakai habis/ kedokteran	3.022.174.035,00	2.241.507.965,00	(780.666.070,00)
Utang belanja bahan obat-obatan	2.131.840.150,00	2.304.654.951,00	172.814.801,00
Utang belanja bahan laboratorium	643.757.928,00	822.481.283,00	178.723.355,00
Utang belanja Gas Medis		42.933.000,00	42.933.000,00
BLUD RSUD SUNGAI RUMBAI	-	-	-
Utang bahan medis habis pakai/ suku cadang alat kedokteran	88.148.092,00	47.507.196,00	(40.640.896,00)
Utang obat dan bahan medis habis pakai pada Rsud Sungai Rumbai	48.510.396,20	48.966.389,00	455.992,80
BLUD PUSKESMAS KOTO BESAR	-	-	-
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.802.250,00	-	(5.802.250,00)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (oksigen)	195.000,00	-	(195.000,00)
DINAS PERTANIAN	-	-	-
Utang Belanja Bahan kimia		62.056.000,00	62.056.000,00
Utang Belanja Bahan/alat Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan*)		66.150.000,00	66.150.000,00
JUMLAH	**5.940.427.851,20**	**6.006.924.534,00**	**66.496.682,80**

e. Penambahan persediaan berasal dari belanja modal sebesar Rp411.103.175,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 5.3.22
Penyesuaian belanja persediaan berasal dari belanja modal Tahun 2021

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Dinas Pendidikan	321.718.575,00		(321.718.575,00)
Dinas PU PR	1.915.000,00		(1.915.000,00)
Dinas Lingkungan Hidup	600.000,00		(600.000,00)
BLUD RSUD Sungai Rumbai	200.000,00		(200.000,00)
BLUD Puskesmas Sitiung I	480.000,00		(480.000,00)
BLUD Puskesmas Sungai Dareh	4.499.000,00		(4.499.000,00)
Dinas Perhubungan	43.990.600,00		(43.990.600,00)
Budparpora	2.080.000,00		(2.080.000,00)
Dinas Transnaker	400.000,00		(400.000,00)

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Sekretariat Daerah	25.990.000,00		(25.990.000,00)
Sekretariat DPRD	8.930.000,00		(8.930.000,00)
Badan Keuangan Daerah	300.000,00		(300.000,00)
Jumlah	411.103.175,00	-	(411.103.175,00)

f. Penambahan belanja persediaan dari bantuan/sumbangan pihak ketiga untuk penanganan covid-19, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel. 5.3.23
Penambahan persediaan dari bantuan/sumbangan pihak ketiga Tahun 2021

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
BLUD RSUD Sungai Rumbai	344.338.860,00		(344.338.860,00)
BLUD Puskesmas Sitiung I	6.777.500,00		(6.777.500,00)
BLUD RSUD Sungai Dareh	6.250.000,00		(6.250.000,00)
BPBD	538.544.000,00		(538.544.000,00)
	895.910.360,00	-	(895.910.360,00)

f. Beban Jasa

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.1.2.b	Beban Jasa	98.084.318.217,81	61.054.627.884,27	37.029.690.333,54

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Jasa Tahun 2021 dan Tahun 2020. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, terdapat kenaikan sebesar Rp37.029.690.333,54.

Beban Jasa ini terdiri dari beban jasa kantor, beban premi asuransi, beban jasa konsultasi dan beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis serta beban jasa BLUD dan beban jasa BOS.

Untuk perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa (Persediaan)-LRA dengan Beban Jasa-LO adalah sebagai berikut.

Tabel. 5.3.24

Perbedaan Belanja Jasa LRA dan LO Tahun 2021

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-

	Rp	Rp	Rp
Beban Jasa	**101.386.859.504,52**	**98.084.318.217,81**	**3.302.541.286,71**
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	513.350.000,00	513.350.000,00	-
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.631.960.000,00	1.631.960.000,00	-
Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	125.800.000,00	125.800.000,00	-
Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	81.500.000,00	81.500.000,00	-
Beban Honorarium Rohaniwan	1.120.100.000,00	1.120.100.000,00	-
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi	-	-	-
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	15.800.000,00	15.800.000,00	-
Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	635.400.000,00	635.400.000,00	-
Beban Jasa Tenaga Pendidikan	4.352.150.000,00	1.859.550.000,00	2.492.600.000,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	4.914.101.403,00	4.914.101.403,00	-
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	30.924.000,00	30.924.000,00	-
Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.570.840.000,00	5.570.840.000,00	-
Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	-	-	-
Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	96.800.000,00	96.800.000,00	-
Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	783.400.000,00	783.400.000,00	-
Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	1.200.000,00	1.200.000,00	-
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	25.975.000,00	25.975.000,00	-
Beban Jasa Tenaga Administrasi	12.172.530.000,00	12.172.530.000,00	-
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	-	-	-
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	885.273.000,00	885.273.000,00	-
Beban Jasa Tenaga Ahli	321.364.000,00	321.364.000,00	-
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	3.598.192.777,00	3.598.192.777,00	-
Beban Jasa Tenaga Keamanan	2.640.470.000,00	2.593.620.000,00	46.850.000,00
Beban Jasa Tenaga Supir	2.056.970.000,00	2.056.970.000,00	-
Beban Jasa Tenaga Juru Masak	13.750.000,00	13.750.000,00	-
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	23.260.000,00	23.260.000,00	-
Beban Jasa Tata Rias	180.736.825,00	180.736.825,00	-
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	110.000.000,00	110.000.000,00	-

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	-	-	-
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	-	-	-
Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	128.180.000,00	128.180.000,00	-
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	27.500.000,00	27.500.000,00	-
Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	13.750.000,00	13.750.000,00	-
Beban Jasa Kalibrasi	212.746.000,00	212.746.000,00	-
Beban Jasa Pengolahan Sampah	18.512.280,00	18.512.280,00	-
Beban Jasa Pengukuran Tanah	58.435.060,00	58.435.060,00	-
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.321.382.000,00	1.121.382.000,00	200.000.000,00
Beban Tagihan Telepon	469.089.870,00	469.089.870,00	-
Beban Tagihan Air	40.766.600,00	41.351.600,00	(585.000,00)
Beban Tagihan Listrik	2.968.290.734,00	2.974.859.785,00	(6.569.051,00)
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	219.870.000,00	319.870.000,00	(100.000.000,00)
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	923.075.316,00	923.075.316,00	-
Beban Paket/Pengiriman	1.832.650,00	1.832.650,00	-
Beban Penambahan Daya	6.350.000,00	6.350.000,00	-
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	275.001.550,00	275.001.550,00	-
Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	4.966.194.346,00	4.966.194.346,00	-
Beban Pengolahan Air Limbah	-	-	-
Beban Lembur	781.083.000,00	781.083.000,00	-
Beban Medical Check Up	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	7.865.178.728,00	7.743.035.866,00	122.142.862,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	344.922.240,00	344.922.240,00	-
Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	638.812.075,00	638.812.075,00	-
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	8.969.083.200,00	8.969.083.200,00	-
Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	355.546.400,00	355.546.400,00	-
Beban Asuransi Barang Milik Daerah	348.984.012,00	340.305.688,67	8.678.323,33
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	14.510.000,00	14.510.000,00	-
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi	272.582.200,00	59.675.000,00	212.907.200,00

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	85.650.000,00	85.650.000,00	-
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.172.000.000,00	1.157.100.000,00	14.900.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan	-	-	-
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	288.813.000,00	9.820.000,00	278.993.000,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil	571.433.800,00	551.633.800,00	19.800.000,00
Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	16.767.520,00	16.767.520,00	-
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	-	-	-
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	61.000.000,00	61.000.000,00	-
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	74.930.000,00	74.930.000,00	-
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	743.208.300,00	743.208.300,00	-
Beban Sosialisasi	-	-	-
Beban Bimbingan Teknis	2.405.186.182,00	2.405.186.182,00	-
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	-	-	-
Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	22.500.000,00	22.500.000,00	-
Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	385.000.000,00	385.000.000,00	-
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	342.500.000,00	3.000.000,00	339.500.000,00
Beban Jasa dana BLUD - LO	10.997.176.304,52	11.323.852.352,14	(326.676.047,62)
Beban Jasa dana BOS - LO	10.977.169.132,00	10.977.169.132,00	-

Penjelasan perbedaan belanja jasa-LRA dengan jasa-LO sebesar Rp3.302.541.286,71 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel. 5.3.25
Selisih Belanja Jasa LRA dan LO Tahun 2021

Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)

Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Utang belanja jasa	727.176.675,27	607.025.438,65	(120.151.236,62)
Premi asuransi barang milik daerah	218.683.760,71	223.112.084,04	4.428.323,33
Belanja barang dan jasa menambah nilai persediaan		46.850.000,00	46.850.000,00
Belanja barang dan jasa menambah nilai aset		635.064.200,00	635.064.200,00
Pengadaan serial majalah dari belanja modal	100.000.000,00		(100.000.000,00)
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain direklas ke beban hibah		339.500.000,00	339.500.000,00
Reklasifikasi beban jasa ke beban hibah atas belanja insentif guru-guru swasta pada Dinas Pendidikan		2.492.600.000,00	2.492.600.000,00
Reklasifikasi beban persediaan ke beban jasa pada Sekretariat Daerah		4.250.000,00	4.250.000,00
JUMLAH	**1.045.860.435,98**	**4.348.401.722,69**	**3.302.541.286,71**

Penjelasan selisih :

a.) Selisih penyesuaian utang belanja jasa sebesar Rp120.151.236,62, yaitu.

Tabel. 5.3.26
Penyesuaian utang belanja jasa Tahun 2021

SKPD/ Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Dinas Kesehatan			
Utang 2020 pada Dinas Kesehatan - Insentif covid-19 untuk : - Dinas Kesehatan - Puskesmas Sungai Dareh - Puskesmas Sitiung II		 20.000.000,00 62.142.862,00 40.000.000,00	 20.000.000,00 62.142.862,00 40.000.000,00
Dinas Penanaman Modal –Pelayanan Terpadu Satu Pintu - utang tagihan air - utang tagihan listrik	 585.000,00 6.569.051,00	 -	 (585.000,00) (6.569.051,00)
Sekretariat Daerah -Utang Kerja sama dengan Media Online		 200.000.000,00	 200.000.000,00
BLUD Puskesmas Koto Besar			

SKPD/ Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
- Utang tagihan listrik	202.750,00		(202.750,00)
- Utang langganan internet	1.200.000,00		(1.200.000,00)
- Utang pemeriksaan sampel air	625.000,00		(625.000,00)
BLUD Puskesmas			
- Utang 2020 Jasa Pelayanan dan Jasa Klaim BPJS		284.882.576,65	284.882.576,65
- Utang 2021 Jasa Pelayanan dan Jasa Klaim BPJS	717.994.874,27		(717.994.874,27)
JUMLAH	**727.176.675,27**	**607.025.438,65**	**(120.151.236,62)**

b.) Penyesuaian beban jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp4.428.323,33, sebagai berikut :

Tabel. 5.3.27
Penyesuaian beban jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah Tahun 2021

Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Premi asuransi kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah	135.983.455,23	138.298.412,39	2.314.957,17
Premi asuransi kendaraan dinas pada Sekretariat DPRD	20.186.168,49	19.430.033,29	(756.135,21)
Premi asuransi Gedung pada Sekretariat DPRD	62.514.136,99	65.383.638,36	2.869.501,37
JUMLAH	**218.683.760,71**	**223.112.084,04**	**4.428.323,33**

Penjelasan selisih

- penyesuaian premi asuransi dibayar dimuka atas kendaraan dinas Tahun 2019 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp130.321.980,83 dan Sekretariat DPRD sebesar Rp19.321.512,30.
- penyesuaian premi asuransi dibayar dimuka atas kendaraan dinas Tahun 2020 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp135.983.455,23 dan Sekretariat DPRD sebesar Rp20.186.168,49.
- penyesuaian premi asuransi dibayar dimuka atas kendaraan dinas Tahun 2021 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp138.298.412,40 dan Sekretariat DPRD sebesar Rp19.430.033,29.

- penyesuaian premi asuransi dibayar dimuka atas gedung kantor Tahun 2020 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp62.514.136,99.
- penyesuaian premi asuransi dibayar dimuka atas gedung kantor Tahun 2021 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp65.383.638,36.

c.) Penyesuaian beban jasa atas pengurangan dari jasa tenaga keamana menambah nilai persediaan pada Dinas perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan sebesar Rp46.850.000,00.

d.) Penyesuaian beban jasa atas pengurangan dari jasa menambah nilai aset pada SKPD sebesar Rp635.064.200,00, yaitu.

Tabel. 5.3.28
Penyesuaian beban jasa menambah nilai aset Tahun 2021

SKPD	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Dinas Kesehatan - Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur		491.900.200,00	491.900.200,00
BLUD RSUD Sungai Dareh - Beban Jasa Konsultansi Perencanaan		67.529.000,00	67.529.000,00
Dinas Pertanian - Beban Jasa Konsultansi Perencanaan		14.900.000,00	14.900.000,00
BLUD RSUD Sungai Dareh - Beban Jasa Konsultansi Pengawasan		40.935.000,00	40.935.000,00
Dinas Pertanian - Beban Jasa Konsultansi Pengawasan		19.800.000,00	19.800.000,00
JUMLAH	**-**	**635.064.200,00**	**635.064.200,00**

e.) Penyesuaian beban jasa atas penambahan pengadaan serial majalah dari belanja modal pada Sekretariat DPRD sebesar Rp100.000.000,00.

f.) Penyesuaian beban jasa atas reklas Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain ke beban hibah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp339.500.000,00.

g.) Reklasifikasi beban jasa ke beban hibah atas belanja insentif guru-guru swasta pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.492.600.000,00.

h.) Reklasifikasi beban persediaan (Makan Minum Rapat) menjadi beban jasa (Iuran Jaminan Asuransi /Belanja Asuransi Barang Milik Daerah) pada Sekretariat Daerah sebesar Rp4.250.000,00.

g. Beban Sewa

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.1.2.c	**Beban Sewa**	**2.509.976.767,12**	**2.217.298.064,03**	**292.678.703,09**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Sewa Tahun 2021 dan Tahun 2020. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, terdapat kenaikan sebesar Rp292.678.703,09.

Beban sewa ini terdiri dari beban sewa rumah/gedung/gudang/parkir, beban sewa sarana mobilitas, beban sewa alat berat dan beban sewa perlengkapan dan peralatan kantor serta beban sewa BLUD dan beban jasa BOS.

Untuk perbedaan jumlah Belanja Sewa-LRA dengan Beban Sewa-LO adalah sebagai berikut.

Tabel. 5.3.29
Perbedaan Belanja Barang dan Jasa (Sewa) LRA dan Beban Sewa LO Tahun 2021

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Sewa	**2.497.648.000,00**	**2.509.976.767,12**	**(12.328.767,12)**
Beban Sewa Alat Pengangkat	8.400.000,00	8.400.000,00	-
Beban Sewa Electric Generating Set	-	-	-
Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	143.500.000,00	143.500.000,00	-
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	27.750.000,00	27.750.000,00	-
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	-	-
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	374.788.000,00	374.788.000,00	-
Beban Sewa Mebel	567.650.000,00	567.650.000,00	-
Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	70.275.000,00	70.275.000,00	-
Beban Sewa Komputer Jaringan	56.700.000,00	56.700.000,00	-
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.009.050.000,00	1.021.378.767,12	(12.328.767,12)
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	29.840.000,00	29.840.000,00	-
Beban Sewa Bangunan Terbuka	84.750.000,00	84.750.000,00	-
Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	-	-	-
Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	25.200.000,00	25.200.000,00	-
Beban Sewa dana BLUD - LO	-	-	-
Beban Sewa dana BOS - LO	99.745.000,00	99.745.000,00	-

Penjelasan perbedaan belanja sewa-LRA dengan beban sewa-LO sebesar Rp12.328.767,12 disebabkan karena penyesuaian sewa kantor dibayar dimuka Tahun 2020 sebesar Rp12.328.767,12, dapat dijelaskan sebagai berikut.

SKPD/ Uraian	Penyesuaian		Selisih LRA-LO
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	(Rp)
Dinas Kumperdag - Sewa dibayar dimuka	12.328.767,12	-	(12.328.767,12)
JUMLAH	**12.328.767,12**	**12.328.767,12**	**(12.328.767,12)**

h. Beban Pemeliharaan

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.1.2.d	**Beban Pemeliharaan**	**11.196.376.603,00**	**8.647.223.670,00**	**2.549.152.933,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan Tahun 2020. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, terdapat kenaikan sebesar Rp2.549.152.933,00.

Beban pemeliharaan ini terdiri dari beban perawatan kendaraan bermotor dan Beban Pemeliharaan serta beban pemeliharaan BLUD dan beban pemeliharaan BOS.

Tidak terdapat perbedaan jumlah Belanja Pemeliharaan-LRA dengan Beban Pemeliharaan-LO adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.30
Perbedaan Belanja Pemeliharaan LRA dan Beban Pemeliharaan LO Tahun 2021

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Pemeliharaan	**11.208.181.203,00**	**11.196.376.603,00**	**191.238.000,00**
Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah	6.900.000,00	6.900.000,00	-
Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	193.343.000,00	-	193.343.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	776.262.040,00	776.262.040,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	108.800.000,00	108.800.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.663.836.913,00	1.663.836.913,00	-

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	958.444.164,00	958.444.164,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	398.409.350,00	398.409.350,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	9.915.000,00	9.915.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	181.465.980,00	181.465.980,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	-	-	-
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	-	-	
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	118.193.000,00	118.193.000,00	
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	-	-	
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	57.005.000,00	57.005.000,00	
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	19.706.620,00	19.706.620,00	
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	45.140.000,00	45.140.000,00	
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	26.000.000,00	26.000.000,00	
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	-	-	
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	289.616.100,00	289.616.100,00	
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	20.000.000,00	20.000.000,00	
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	11.945.000,00	11.945.000,00	
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	364.950.000,00	364.950.000,00	
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	-	-	
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	-	-	
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	-	-	
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	-	-	
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	4.992.000,00	4.992.000,00	
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	11.775.000,00	11.775.000,00	
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	262.069.000,00	262.069.000,00	
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	35.000.000,00	35.000.000,00	
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	-	-	
Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik	-	-	
Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik	-	-	
Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya	-	-	
Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	7.000.000,00	7.000.000,00	
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	752.014.102,00	931.447.502,00	
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	-	-	

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	79.837.000,00	79.837.000,00	
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan Penyeberangan	1.324.680.000,00	1.324.680.000,00	
Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	4.950.000,00	4.950.000,00	
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	-	-	
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	-	-	
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	164.300.000,00	164.300.000,00	
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	-	-	
Beban Pemeliharaan dana BLUD - LO	891.265.675,00	893.370.675,00	(2.105.000,00)
Beban Pemeliharaan dana BOS - LO	910.366.259,00	910.366.259,00	-

Penjelasan perbedaan belanja Pemeliharaan-LRA dengan beban sewa-LO sebesar Rp191.238.000,00, yaitu :

SKPD/ Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Sekretariat DPRD - Belanja Pemeliharaan Tanah Taman menambah nilai aset tanah		193.343.000,00	193.343.000,00
BLUD Puskesmas Koto Besar - Penambahan utang Pemeliharaan Ambulan	2.105.000,00		(2.105.000,00)
	2.105.000,00	193.343.000,00	191.238.000,00

Penjelasan selisih :

- Adanya Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman pada Sekretariat DPRD menambah nilai aset tetap Tanah sebesar Rp193.343.000
- Adanya penambahan utang pemeliharaan ambulan pada Puskesmas Koto Besar sebesar Rp2.105.000,00

i. Beban Perjalanan Dinas

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.1.2	**Beban Perjalanan Dinas**	**47.517.031.727,00**	**36.283.810.392,00**	**11.233.221.335,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan Tahun 2020. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, terdapat kenaikan sebesar Rp11.233.221.335,00.

Beban perjalanan dinas ini terdiri dari beban perjalanan dinas biasa, beban perjalanan dinas dalam Kota, beban perjanan dinas paket meeting dalam kota, beban perjanan dinas paket meeting luar kota, beban perjalanan dinas BLUD, dan beban perjalanan dinas dalam daerah BOS.

Untuk perbedaan jumlah Belanja Perjalanan dinas-LRA dengan Beban Perjalanan Dinas-LO adalah sebagai berikut.

Tabel. 5.3.31
Perbedaan Belanja Barang dan Jasa (Perjalanan Dinas)-LRA dan Beban Perjalanan Dinas LO Tahun 2021

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA Rp	Beban-LO Rp	Selisih +/- Rp
Beban Perjanan Dinas	**47.517.031.727,00**	**47.517.031.727,00**	**-**
Beban Perjalanan Dinas Biasa	32.664.925.303,00	32.664.925.303,00	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.787.825.250,00	12.787.825.250,00	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	220.420.000,00	220.420.000,00	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	139.160.948,00	139.160.948,00	-
Beban Perjalanan Dinas dana BLUD - LO	798.723.546,00	798.723.546,00	-
Beban Perjalanan Dinas dana BOS - LO	905.976.680,00	905.976.680,00	-

Tidak terdapat perbedaan belanja perjalanan dinas antara LRA dengan LO.

j. Beban Hibah

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.1.5	**Beban Hibah**	**21.567.610.832,00**	**72.886.229.581,03**	**(51.318.618.749,03)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Hibah Tahun 2021 dan Tahun 2020. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, terdapat penurunan sebesar Rp51.318.618.749,03.

Beban hibah ini terdiri dari :

Tabel 5.3.32
Beban Hibah Tahun 2021 dan 2020

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	Kenaikan/Penurunan
		Rp	Rp	Rp
8.1.	**Beban Hibah**	**21.567.610.832,00**	**72.886.229.581,03**	**(51.318.618.749,03)**
8.1.5.05.01.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.167.600.000,00		3.167.600.000,00
8.1.5.05.01.0002	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.865.825.000,00		5.865.825.000,00
8.1.5.05.02.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	349.795.417,00		349.795.417,00
8.1.5.05.03.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.819.732.000,00	72.886.229.581,03	(71.066.497.581,03)
8.1.5.05.03.0002	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.603.095.795,00		9.603.095.795,00
8.1.5.07.01.0001	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	761.562.620,00		761.562.620,00

Saldo/jumlah beban hibah tersebut di atas adalah jumlah *netto* setelah dikuranginya pengembalian beban hibah selama Tahun 2020, yaitu.

Untuk perbedaan jumlah Belanja Hibah-LRA dengan Beban Hibah-LO adalah sebagai berikut.

Tabel. 5.3.33

Perbedaan Belanja Hibah-LRA dan Beban Hibah LO Tahun 2021

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Hibah	**11.804.111.087,00**	**21.567.610.832,00**	**(9.763.499.745,00)**
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	675.000.000,00	3.167.600.000,00	(2.492.600.000,00)
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.459.550.000,00	5.865.825.000,00	(406.275.000,00)
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	349.795.417,00	349.795.417,00	-
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.819.732.000,00	1.819.732.000,00	-
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.738.471.050,00	9.603.095.795,00	(6.864.624.745,00)
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	761.562.620,00	761.562.620,00	-

Penjelasan perbedaan belanja hibah-LRA dengan beban hibah-LO sebesar Rp9.763.499.745,00, yaitu :

SKPD/ Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Dinas Pendidikan	2.898.875.000,00		(2.898.875.000,00)
Dinas PUPR	7.205.381.990,00	1.312.525.000,00	(5.892.856.990,00)
BPBD	406.587.000,00		(406.587.000,00)
Dinas Sosial	565.180.755,00		(565.180.755,00)
	11.076.024.745,00	1.312.525.000,00	(9.763.499.745,00)

Penjelasan selisih :

1) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.898.875.000,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :
   - Penambahan aset yang diserahkan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Al Bina Pulau Punjung dari Dinas Pendidikan berupa 1 (satu) unit ruang kelas baru sebesar Rp199.700,000,00, yang berasal dari belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain berupa bangunan fisik sebesar Rp169.700.000,00 dan dari belanja modal perupa perencanan sebesar Rp19.875.000,00 dan pengawasan sebesar 10.000.000,00;
   - Penambahan aset yang diserahkan SMP IT Al Munawaroh Koto Besar dari Dinas Pendidikan berupa 1 (satu) unit ruang kelas baru sebesar Rp199.575,000,00, yang berasal dari belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain berupa bangunan fisik sebesar Rp169.800.000,00 dan dari belanja modal perupa perencanan sebesar Rp19.900.000,00 dan pengawasan sebesar 10.000.000,00; dan
   - Penambahan persediaan yang diserahkan kepada PAUD dari Dinas Pendidikan yang berasal dari belanja modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp7.000.000,00 berupa tas sekolah, buku gambar dan pewarna kegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD dalam rangka pemenuhan SPM PAUD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
   - Penambahan beban hibah dari reklas beban jasa atas belanja insentif guru-guru swasta pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.492.600.000,00.

2) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp5.892.856.990,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :
   - Penambahan Beban Hibah atas Persediaan yang telah diserahkan kepada masyarakat berasal dari belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.205.381.990,00;
   - Adanya pengurangan beban hibah atas pembayaran utang belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp158.630.000,00 terdiri dari Pembangunan Gedung Kantor Pekerjaan Pembangunan Partisi dan Interior Kejaksaan sebesar Rp128.400.000,00, Perencanaan serta Pengawasan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pekerjaan Paket I sebesar Rp17.350.000,00 dan Rp12.880.000,00 persediaan sudah di akui di tahun 2020; dan
   - Persediaan akhir per 31 Desember 2021 (Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan) sebesar Rp1.153.895.000,00.
3) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp406.587.000,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :
   - Penambahan beban hibah atas penggunaan persediaan logistik covid dari pihak ketiga yang diterima selama tahun 2020 sebesar Rp32.500.000,00;
   - Penambahan beban hibah atas penggunaan persediaan logistik covid dari pihak ketiga yang diterima selama tahun 2021 sebesar Rp374.087.000,00.

4) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat penambahan beban hibah sebesar Rp565.180.755,00 atas penggunaan persediaan penanggulangan bencana seperti obat-obatan, bahan material makanan dan bahan kebutuhan keperluan bencana lainnya.
5)

k. Beban Bantuan Sosial

KODE	PERKIRAAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	Kenaikan/Penurunan

REK		Rp	Rp	Rp
9.1.6.	Beban Bantuan Sosial	-	17.918.600.000,00	(17.918.600.000,00)

Tidak terdapat saldo beban bantuan sosial Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, sebesar Rp17.918.600.000,00, yang merupakan bantuan sosial untuk Masyarakat akibat pandemi covid 19 di Kabupaten Dharmasraya

l. Beban Penyusutan dan Amortisasi

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.1.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	168.473.799.471,73	139.560.243.919,26	28.913.555.552,47

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2021 dan Tahun 2020. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, maka terdapat kenaikan sebesar Rp28.913.555.552,47.

Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari.

PERKIRAAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
Beban Penyusutan dan Amortisasi	**168.473.799.471,73**	**139.560.243.919,26**	**28.913.555.552,47**
Beban Penyusutan Aset Tetap	156.458.476.461,00	125.070.937.211,03	31.387.539.249,97
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	11.678.665.931,90	14.150.005.898,05	(2.471.339.966,15)
Beban Penyusutan Amorisasi Aset Tak Berwujud	336.657.078,83	339.300.810,18	(2.643.731,35)

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok aset dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 87 Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2015.

m. Beban Penyisihan Piutang

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp

9.1.8	**Beban Penyisihan Piutang**	**3.573.789.229,02**	**2.991.191.038,83**	**582.598.190,19**

Jumlah tersebut merupakan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021 dan Tahun 2020. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, terdapat kenaikan sebesar Rp582.598.190,19.

Beban Penyisihan Piutang ini terdiri dari beban penyisihan piutang pajak, beban penyisihan piutang retribusi, beban penyisihan piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkandan, beban penyisihan piutang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, beban penyisishan piutang transfer dan beban penyisihan piutang lainnya.

Saldo Beban Penyisihan Piutang dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel. 5.3.34
Saldo Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021 dan 2020

PERKIRAAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
Beban Penyisihan Piutang	**3.573.789.229,02**	**2.991.191.038,83**	**582.598.190,19**
Beban Penyisihan Piutang Pajak	2.138.225.254,46	2.552.185.796,32	(413.960.541,86)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	92.328.636,00	2.684.214,00	89.644.422,00
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	51.424,15	17.622.852,06	(17.571.427,91)
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.331.438.237,61	418.698.176,45	912.740.061,16
Beban Penyisihan Piutang Transfer pemerintah pusat	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	11.745.676,80	-	11.745.676,80

Beban Penyisihan untuk Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Piutang Lain-Lain PAD dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Penjelasan terkait Beban Penyisihan Piutang dapat dilihat pada Lampiran 30 pada laporan keuangan ini.

n. Beban Transfer

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	Kenaikan/Penurunan
		Rp	Rp	Rp
9.2.	**Beban Transfer**	**112.110.404.801,00**	**54.609.952.788,00**	**57.500.452.013,00**

Jumlah tersebut merupakan Beban Transfer dalam Tahun 2021 dan Tahun 2020. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, terdapat kenaikan sebesar Rp57.500.452.013,00.

Beban Transfer terdiri dari.

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	Kenaikan/Penurunan
		Rp	Rp	Rp
8.3.	**Beban Transfer**	**112.110.404.801,00**	**54.609.952.788,00**	**57.500.452.013,00**
8.3.1.01.03.0001	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.831.842.298,00	1.611.562.308,00	220.279.990,00
8.3.1.01.03.0001	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	215.699.503,00		215.699.503,00
8.3.1.01.03.0001	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	110.062.863.000,00		110.062.863.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		52.199.999.600,00	(52.199.999.600,00)
	Beban Bantuan Keuangan Lainnya		798.390.880,00	(798.390.880,00)

Untuk perbedaan jumlah Belanja Transfer-LRA dengan Beban Transfer-LO adalah sebagai berikut :

Tabel. 5.3.35

Perbedaan Belanja Transfer antara LRA dan LO Tahun 2021

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Transfer	**111.924.041.243,00**	**112.110.404.801,00**	**(186.363.558,00)**
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.658.321.536,00	1,831,842,298.00	(173.520.762,00)
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	202.856.707,00	215.699.503,00	(12.842.796,00)
Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	110.062.863.000,00	110.062.863.000,00	-
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	-	-
Beban Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-

Penjelasan selisih sebesar Rp186.363.558,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

SKPD/ Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Badan Keuangan Daerah	781.724.747,00	608.203.985,00	(173.520.762,00)
Badan Keuangan Daerah	83.182.066,00	70.339.270,00	(12.842.796,00)
	864.906.813,00	678.543.255,00	(186.363.558,00)

Penjelasan :

- Penambahan utang belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Triwulan IV kepada 52 Nagari Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp781.724.747,00 sesuai dengan Keputusan Bupati Dharmasraya No:862.1/49/KPTS-BUP/2022 tanggal 25 Februari 2022.
- Penambahan utang belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Triwulan IV kepada 52 Nagari Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp83.182.066,00 sesuai dengan Keputusan Bupati Dharmasraya No: 862.1/49/KPTS-BUP/2022 tanggal 25 Februari 2022.
- Pembayaran Utang Belanja DBH PDRD Triwulan IV kepada Nagari TA 2020 An. Irvan Budianto Dt.Rangkayo Mulia Wali Nagagari Koto Gadang,dkk (32 Nagari) dibayarkan sesuai dengan Keputusan Bupati Dharmasraya No:188.45/345/KPTS-BUP/2020 tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp406.618.428,00

- Pembayaran Utang Belanja DBH PDRD Triwulan IV kepada Nagari TA 2020 An. Suwanto Wali Nagari Panyubarangan,dkk (20 Nagari) dibayarkan sesuai dengan Keputusan Bupati Dharmasraya No:188.45/345/KPTS-BUP/2020 tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp271.924.828,00.

o. Beban Lain-lain

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.2.	Beban Lain-lain	3.567.438.148,62		3.567.438.148,62

Jumlah tersebut merupakan Beban Lain-lain dalam Tahun 2021 dan Tahun 2020. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020, terdapat kenaikan sebesar Rp3.567.438.148,62.

Beban Lain-lain tersebut merupakan aset ekstrakomptabel yang berasal dari belanja modal 2021 tidak menjadi aset tetap karena dibawah nilai kapitalisasi. Rincian beban lain terdapat pada beberapa SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 5.3.36
Rincian Beban Lain-lain

No	Nama SKPD	Beban Lain-Lain
1	Dinas Pendidikan	2.926.678.284,62
2	Dinas Kesehatan	401.301.210,00
3	BLUD Puskesmas	51.530.300,00
4	BLUD RSUD	15.948.150,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	31.959.600,00
6	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertahanan	2.380.000,00
7	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	600.000,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	58.330.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	2.075.000,00
10	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	1.425.000,00
11	Dinas Perhubungan	720.000,00
12	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	5.432.500,00
13	Dinas Pertanian	4.081.000,00
14	Sekretariat Daerah	48.000.000,00
15	Inspektorat Kabupaten	16.977.104,00

No	Nama SKPD	Beban Lain-Lain
	JUMLAH	3.567.438.148,62

V.D.3. Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp127.829.132.374,14 merupakan surplus dari Pendapatan sebesar Rp1.051.385.580.493,23 dikurangi Beban Operasi sebesar Rp923.556.448.119,09.

V.D.4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp363.292.100,00 merupakan reklasifikasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan atas penjualan Aset Tetap pada Tahun 2021 ke Surplus Penjualan Aset Nonlancar. Terdiri dari penerimaan atas penjualan kendaraan dinas operasional yang dilakukan dengan pelelangan umum sebanyak dua kali melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pada tanggal 22 April 2021 dengan realisasi sebesar Rp114.250.000,00 dan tanggal 28 Oktober 2021 sebesar Rp240.617.100,00, penjualan atas sisa bongkaran atap sekolah lama pada kegiatan DAK pada Dinas Pendidikan sebesar Rp8.425.000,00. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan aset yang tidak ada nilai buku pada per 31 Desember 2021.

V.D.5. Pos Luar Biasa

Saldo Pos Luar Biasa Tahun 2021 sebesar Rp197.439.330,00 merupakan Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2021 yang terealisasi untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup yang direklasifikasi ke beban luar biasa pada Laporan Operasional.

V.D.6. Surplus/ Defisit LO

Surplus Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp127.994.985.144,14 merupakan penjumlahan dari Surplus/Defisit dari Operasi sebesar Rp127.829.132.374,14 dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp363.292.100,00 setelah Pengurangan beban transfer atas reklas pengakuan Belanja Tak Terduga pada LO dari Beban Tak Terduga ke Beban Luar Biasa sebesar Rp197.439.330,00.

Surplus Laporan Operasional Tahun 2021 sebesar Rp127.994.985.144,14 mengalami kenaikan sebesar Rp56.363.499.242,36 bila dibandingkan dengan Surplus Laporan Operasional Tahun 2020 sebesar Rp71.631.485.901,77.

V.E PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang memberikan informasi arus kas masuk *(Cash In Flow)* dan arus kas keluar *(Cash Out Flow)* yang setara dalam Kas Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi.

Laporan Arus Kas memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris selama satu periode akuntansi. Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 sebagai berikut.

V.E.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah. Posisi selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.E.1.a	**Arus Masuk Kas**	**978.557.425.001,87**	**990.125.596.482,12**

Arus Masuk Kas merupakan pendapatan operasi yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah lainnya, Pendapatan Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Penerimaan kas dari aktivitas operasi sebagai berikut.

Tabel 5.5.1
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	20.495.633.388,25	17.751.808.580,45
2	Penerimaan Retribusi Daerah	2.411.365.382,00	1.861.712.711,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.524.570.411,00	4.063.752.034,00
4	Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah	56.034.600.239,62	59.135.018.327,67
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	30.199.842.269,00	12.973.433.646,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3.462.713.300,00	2.174.079.602,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	472.416.143.000,00	478.355.774.000,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	207.765.406.760,00	237.995.156.977,00
9	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-
10	Penerimaan Dana Penyesuaian	73.540.405.000,00	99.826.676.000,00

11	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	51.272.491.740,00	41.101.030.883,00
12	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	-	-
13	Penerimaan Hibah	26.548.313.512,00	2.466.323.721,00
14	Penerimaan Dana Darurat	-	-
15	Penerimaan Lainnya	30.885.940.000,00	32.420.830.000,00
16	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas	**978.557.425.001,87**	**990.125.596.482,12**

		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.E.1.b	**Arus Keluar Kas**	**750.795.405.109,16**	**791.224.720.710,68**

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi mencakup seluruh pengeluaran kas untuk keperluan operasional pemerintahan. Berdasarkan SAP, pengeluaran ini mencakup belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja tak terduga, dan belanja bagi hasil. Pada Tahun 2021 pengeluaran kas untuk aktivitas operasi sebagai berikut.

Tabel 5.5.2
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	380.289.821.307,81	418.043.145.643,00
2	Pembayaran Barang	246.612.992.141,35	185.947.730.070,85
3	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
4	Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
5	Pembayaran Hibah	11.804.111.087,00	54.874.970.568,83
6	Pembayaran Bantuan Sosial	0,00	164.000.000,00
7	Pembayaran Tak Terduga	164.439.330,00	24.924.272.319,00
8	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	1.708.764.771,00	829.546.015,00
9	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	152.413.472,00	103.473.040,00
10	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan	0,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	Lainnya		
11	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan	110.062.863.000,00	106.337.583.054,00
12	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	**750.795.405.109,16**	**791.224.720.710,68**

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**227.762.019.892,71**	**198.900.875.771,44**

Merupakan kenaikan/penurunan kas dari aktivitas operasi. Pada Tahun 2021 terjadi kenaikan kas (arus masuk kas - arus keluar kas) dari aktivitas operasi sebesar Rp227.762.019.892,71.

Arus Masuk Kas	Rp 978.557.425.001,87
Arus Keluar Kas	(Rp 750.795.405.109,16)
Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi	Rp 227.762.019.892,71

V.E.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset nonkeuangan lainnya.

		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.E.2.a	**Arus Masuk Kas**	**363.292.100,00**	**65.550.000,00**

Pada Tahun 2020 terdapat penerimaan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp363.292.100,00 terdiri dari penerimaan atas penjualan kendaraan dinas operasional yang dilakukan dengan pelelangan umum sebanyak dua kali melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pada tanggal 22

April 2021 dengan realisasi sebesar Rp114.250.000,00 dan tanggal 28 Oktober 2021 sebesar Rp240.617.100,00 dan penjualan atas sisa bongkaran atap sekolah lama pada kegiatan DAK pada Dinas Pendidikan sebesar Rp8.425.000,00.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.E.2.b Arus Keluar Kas	**166.252.751.216,49**	**194.525.452.178,27**

Pada Tahun 2021 terdapat pengeluaran kas dari aktivitas investasi sebesar Rp166.252.751.216,49. Pengeluaran kas dimaksud ditujukan untuk perolehan aset tetap sebagai berikut.

Tabel 5.5.3
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Perolehan Tanah	-	-
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	51.541.549.729,92	64.751.373.002,50
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	85.986.356.136,57	94.052.704.714,97
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	22.155.213.262,00	34.663.993.010,80
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	6.569.632.088,00	1.057.381.450,00
6	Perolehan Aset Lainnya	-	-
	Jumlah	**166.252.751.216,49**	**194.525.452.178,27**

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(165.889.459.116,49)**	**(194.459.902.178,27)**

Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam rangka perolehan dan pelepasan sumberdaya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang. Pada Tahun 2021 arus kas bersih (arus masuk kas - arus keluar kas) dari Aktivitas Investasi sebesar Rp(165.889.459.116,49)

Arus Masuk Kas	Rp 363.292.100,00
Arus Keluar Kas	(Rp 166.252.751.216,49)
Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi	(Rp 165.889.459.116,49)

V.E.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Posisi selama Tahun 2021 arus masuk kas dan arus keluar kas dari Aktivitas Pendanaan adalah.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.E.3.a Arus Masuk Kas	**0,00**	**0,00**

Pada Tahun 2021 tidak terdapat penerimaan kas dari aktivitas pendanaan yang diterima kembali.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.E.3.b Arus Keluar Kas	**0,00**	**0,00**

Pengeluaran kas dari aktivitas pendanaan yang akan diterima kembali dan atau dibayar kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang dan utang jangka panjang. Pada Tahun 2021 arus kas keluar dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 atau tidak terdapat arus kas keluar selama Tahun Anggaran 2021.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**0,00**	**0,00**

Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Saldo arus kas bersih dari aktivitas pendanaan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00

V.E.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.E.4.a Arus Masuk Kas	**62.160.558.243,27**	**47.830.727.682,00**

Arus masuk kas selama Tahun 2021 sebesar Rp62.160.558.243,27 yang berasal dari.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Penerimaan PFK	62.122.057.999,27	47.828.833.482,00
Penerimaan kas	38.500.244,00	1.894.200,00
Jumlah	**62.160.558.243,27**	**47.830.727.682,00**

Rincian penerimaan PFK Tahun 2021 dan 2020 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.5.4

Penerimaan PFK Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Penerimaan IWP	2.739.119.685,00	2.981.584.044,00
2	Penerimaan TASPEN	12.822.474.981,00	13.005.993.261,00
3	Penerimaan TAPERUM	-	234.558.000,00
4	Penerimaan Tapera	2.719.054.451,00	0,00
5	Penerimaan BPJS 4%	12.354.283.452,00	0,00
6	Penerimaan JKK	349.447.303,00	0,00
7	Penerimaan JKM	1.048.342.812,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
8	Penerimaan PPN	14.520.254.635,27	14.578.344.626,00
9	Penerimaan PPh Psl 21	10.946.681.889,00	13.168.403.955,00
10	Penerimaan PPh Psl 22	885.499.710,00	953.344.563,00
11	Penerimaan PPh Psl 23	174.347.400,00	82.912.371,00
12	Penerimaan PPh Psl 26	1.452.654,00	3.773.818,00
13	Penerimaan PPh Psl 4	2.958.996.324,00	2.819.918.844,00
14	Penerimaan Tapera Pegawai PPPK	42.104.108,00	0,00
15	Penerimaan Tapera Pemberi kerja	550.028.643,00	0,00
16	Penerimaan Tapera Pemberi kerja PPPK	9.969.952,00	0,00
	Jumlah	**62.122.057.999,27**	**47.828.833.482,00**

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) merupakan penerimaan dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga.

Penerimaan kas pada Bendahara BOS yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp38.500.244,00 terdiri dari pemungutan pajak restoran sebesar Rp37.933.707,00 dan saldo jasa giro dana BOS sebesar Rp566.537,00.

		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.E.4.b	**Arus Keluar Kas**	**61.855.171.336,00**	**47.827.926.567,00**

Arus keluar kas selama Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp61.855.171.336,00 yang berasal dari:

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Penyetoran PFK	61.853.274.136,00	47.824.534.567,00
Pengeluaran Kas	1.897.200,00	3.392.000,00
Jumlah	**61.855.171.336,00**	**47.827.926.567,00**

Tabel 5.5.5

Penyetoran PFK Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Penyetoran IWP	2.739.119.685,00	2.981.584.044,00
2	Penyetoran TASPEN	12.822.474.981,00	13.005.993.261,00
3	Penyetoran TAPERUM	-	234.558.000,00
4	Penyetoran Tapera	2.719.054.451,00	0,00
5	Penyetoran BPJS 4%	12.354.283.452,00	0,00
6	Penyetoran JKK	349.447.303,00	0,00
7	Penyetoran JKM	1.048.342.812,00	0,00
8	Penyetoran PPN	14.330.758.132,00	14.574.535.526,00
9	Penyetoran PPh Psl 21	10.872.177.922,00	13.168.392.540,00
10	Penyetoran PPh Psl 22	880.993.517,00	952.874.163,00
11	Penyetoran PPh Psl 23	174.070.200,00	82.904.371,00
12	Penyetoran PPh Psl 26	1.452.654,00	3.773.818,00
13	Penyetoran PPh Psl 4	2.958.996.324,00	2.819.918.844,00
14	Penyetoran Tapera Pegawai PPPK	42.104.108,00	
15	Penyetoran Tapera Pemberi kerja	550.028.643,00	
16	Penyetoran Tapera Pemberi kerja PPPK	9.969.952,00	
	Jumlah	**61.853.274.136,00**	**47.824.534.567,00**

Penyetoran PFK Tahun 2021 sebesar Rp61.853.274.136,00 terdapat penyetoran utang PFK Tahun 2020 ke Kas Negara sebesar Rp4.900.000,00 terdiri dari PPN sebesar Rp3.809.100,00, PPh Pasal 21 sebesar Rp612.500,00, PPh Pasal 22 sebesar Rp470.400,00 dan PPh Pasal 23 sebesar Rp8.000,00.

Penyetoran kas sebesar Rp1.897.200,00 adalah penyetoran kas dibendahara penerimaan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp991.000,00, penyetoran pajak restoran SDN 09 Koto Besar sebesar Rp903.200,00 dan penyetoran kekurangan debet SP2D 5711/LS/2016 ke CV. Mulla Karya sebesar Rp3.000,00.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**(305.386.907,27)**	**(2.801.115,00)**

Merupakan total kenaikan/penurunan kas dari Aktivitas Transitoris. Pada Tahun 2021 arus kas bersih (arus masuk kas – arus keluar kas) dari aktivitas transitoris sebesar Rp(305.386.907,27).

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Kenaikan / Penurunan Kas	**62.177.947.683,49**	**4.443.774.708,17**

Merupakan total kenaikan/penurunan kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris. Pada Tahun 2021 terjadi kenaikan kas (arus masuk kas – arus keluar kas) sebesar Rp62.177.947.683,49.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Kenaikan/Penurunan Kas	**62.177.947.683,49**	**4.443.774.708,17**
Saldo Awal Kas di Kas Daerah dan Setara Kas	6.155.879.601,54	94.194.632,52
Saldo Awal Kas di Kas BLUD	1.526.712.732,95	1.094.990.941,80
Saldo Awal Kas di Dana BOS	645.579.320,00	2.695.211.372,00
Jumlah Saldo Awal Kas	**8.328.171.654,49**	**3.884.396.946,32**
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	66.539.152.597,42	6.154.888.601,54
Saldo Akhir Kas di BLUD	3.500.297.770,29	1.526.712.732,95
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	991.000,00
Saldo Akhir pada Dana BOS	154.484.863,00	645.579.320,00
Saldo Akhir Kas Lainnya	312.184.107,27	0,00
Saldo Akhir Kas	**70.506.119.337,98**	**8.328.171.654,49**

Perbedaan komponen yang terdapat pada Saldo Akhir Kas di LAK dan SiLPA di LRA Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Saldo akhir kas di LAK sebesar Rp70.506.119.337,98 sedangkan SiLPA menurut LRA sebesar Rp70.206.985.982,71 sehingga terdapat selisih sebesar Rp299.133.355,27. Selisih tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

No	Uraian	Rp
1.	SiLPA LRA	70.206.985.982,71
2.	Saldo Arus Kas	70.506.119.337,98
	Selisih	**(299.133.355,27)**
	Rincian Selisih	
a.	Kas Lainnya atas jasa giro dana BOS belum setor ke Kas Daerah	(566.537,00)
b.	Kas Lainnya atas penerimaan PFK yang belum disetor ke Kas Negera pada Dana BOS	(273.683.863,27)
c.	Kas Lainnya atas penerimaan pajak restoran yang belum disetor ke Kas Daerah pada Dana BOS	(37.933.707,00)
b.	Piutang atas Pembatalan Kontrak Kerja Tahun 2017 No.02.BA-PPP/AIR/DPU-PR/X-2017	13.050.752,00
	Selisih	**(299.133.355,27)**

VF. PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
V.F.	**Ekuitas**	**2.488.069.809.561,05**	**2.346.493.866.411,02**

Saldo Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.488.069.809.561,05 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.346.493.866.411,02.

Uraian dan rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas sebagai berikut.

Saldo awal ekuitas	Rp	2.346.493.866.411,02
Surplus/Defisit LO	Rp	127.994.985.144,14
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar		
a. Dampak Kumulatif perubahan Kebijakan	Rp	0,00
b. Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar	Rp	13.580.958.005,89
Saldo akhir Laporan Perubahan Ekuitas	**Rp**	**2.488.069.809.561,05**

BAB VI
PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

VI.A Gambaran Umum Kabupaten Dharmasraya

Kabupaten Dharmasraya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten Dharmasraya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Dharmasraya diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Dharmasraya dikenal juga dengan sebutan Ranah Cati Nan Tigo.

Visi

Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, mempunyai visi yaitu.

"***Terwujudnya Kabupaten Dharmasraya Maju Yang Mandiri Dan Berbudaya"***

Definisi kalimat Visi RPJMD :

Maju :

Kabupaten Dharmasraya yang lebih baik sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial yang berdaya saing pada wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat.

Mandiri :

Kondisi daerah yang memiliki daya tahan sosial, ekonomi dan keuangan daerah, serta pelayanaan publik yang memadai dengan pengelolaan sumber daya daerah secara optimal.

Berbudaya :

Masyarakat yang melestarikan nilai dan tradisi multikultural dalam berkarya dan berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan berdasarkan Iman dan Taqwa.

Misi

Berdasarkan VISI di atas, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mempunyai enam Misi, yaitu.

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing.
4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien.
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.
6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah.

Letak dan Luas Wilayah

Secara geografi Kabupaten Dharmasraya berada di ujung tenggara Provinsi Sumatera Barat, dengan topografi daerah bervariasi antara berbukit, bergelombang, dan datar dengan variasi ketinggian dari 100 m - 1.500 m di atas permukaan laut. Kabupaten Dharmasraya mempunyai luas wilayah ± 2.961,13 Km atau 296.113 Ha. Secara geografis Kabupaten Dharmasraya berada pada posisi,00 47'7" LS -- 141' 56",Lintang Selatan (LS) dan,1019' 21",BT -- 1010 54' 27", Bujur Timur (BT).

Kabupaten Dharmasraya dilalui oleh jalur lalu lintas Sumatera dan berbatasan dengan.

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Dharmasraya, penduduk kabupaten Dharmasraya pada tahun 2020 berjumlah 228.591 jiwa, dengan kepadatan penduduk 77 jiwa/km2. Tingkat pertumbuhan penduduk jika dibandingkan dengan kondisi Tahun 2017 meningkat 3,09 % dengan kepadatan 64,64 jiwa/km². dan merupakan salah satu daerah tujuan transmigrasi di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari komposisi penduduk menurut suku bangsa diperoleh data Suku Minang 62,93%, Suku Jawa 32,96%, Suku Sunda 1,49%, Suku Batak 0,88%, Melayu 0,71% dan Suku lainnya 1,03%. Berdasarkan distribusi penduduk menurut tingkat usia, diperoleh data angkatan kerja (15-59 tahun) sebanyak 104.123 jiwa (61,30%) dengan tingkat ketergantungan 63,15%.

VI.B Susunan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Pasal 212 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal ini, Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 maka entitas akuntansi mengalami pergeseran dalam susunan perangkat daerah Kabupaten Dharmasraya. Secara lebih rinci Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya dibagi dalam tiga tipe,yaitu.

1. Perangkat Daerah Tipe A, yaitu.
    1) Sekretariat Daerah
    2) Inspektorat
    3) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
    4) Badan Keuangan Daerah
    5) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
    6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    7) Dinas Pertanian
    8) Kecamatan Asam Jujuhan
    9) Kecamatan Koto Baru
    10) Kecamatan Koto Besar
    11) Kecamatan Koto Salak
    12) Kecamatan Pulau Punjung
    13) Kecamatan Sembilan Koto
    14) Kecamatan Sitiung
    15) Kecamatan Sungai Rumbai
    16) Kecamatan Timpeh
    17) Kecamatan Tiumang
2. Perangkat Daerah Tipe B, yaitu.
    1) Dinas Pendidikan
    2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Olahraga
    3) Dinas Kesehatan

4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
6) Dinas Komunikasi dan Informatika,
7) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8) Dinas Lingkungan Hidup
9) Kecamatan Padang Laweh
10) Dinas Pangan dan Perikanan

3. Perangkat Daerah Tipe C, yaitu.
1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2) Sekretariat DPRD
3) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
5) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
6) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan,dan
7) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
8) Dinas Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang berjumlah 35 Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 18 Dinas, 3 Badan dan 11 Kecamatan. Selain 35 Perangkat Daerah tersebut, ada 3 SKPD yang masih tetap mengacu kepada Peraturan Daerah Tahun 2010 yakni RSUD Sungai Dareh, BPBD, dan Kantor Kesbangpol. Ketiga SKPD tersebut tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukannya ditetapkan. Peraturan Daerah dimaksud di atas terdiri dari.

a. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dharmasraya;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Berikut rincian Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan urusan/urusan penunjang, seperti tabel di bawah ini.

Tabel 6.1
SKPD Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Urusan/Urusan Penunjang

No.	Urusan / Urusan Penunjang	No.	OPD HASIL EVALUASI
1	Pendidikan	1.	Dinas Pendidikan
2	Kebudayaan	2	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	Kepemudaan dan Olahraga		
4	Pariwisata		
5	Kesehatan	3	Dinas Kesehatan
6	Sosial	4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
9	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Kebakaran)	7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
12	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Pol PP)		
13	Penanaman Modal	8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menegah dan Perdagangan
15	Perindustrian		

No.	Urusan / Urusan Penunjang	No.	OPD HASIL EVALUASI
16	Perdagangan		
17	Energi dan Sumber Daya Mineral		-
18	Transmigrasi	10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
19	Tenaga Kerja		
20	Komunikasi dan Informatika	11	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Statistik		
22	Persandian		
23	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
24	Perumahan dan Kawasan Permukiman	13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
25	Pertanahan		
26	Perhubungan	14	Dinas Perhubungan
27	Lingkungan Hidup	15	Dinas Lingkungan Hidup
28	Kehutanan		-
29	Pangan	16	Dinas Pangan dan Perikanan
30	Pertanian	17	Dinas Pertanian
31	Kelautan dan Perikanan		
32	Perpustakaan	18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
33	Kearsipan		
34	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
35	Perencanaan	20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
36	Penelitian dan Pengembangan		
37	Keuangan	21	Badan Keuangan Daerah
38	Sekretariat Daerah	22	Sekretariat Daerah
39	Sekretariat Dewan	23	Sekretariat DPRD
40	Inspektorat	24	Inspektorat

No.	Urusan / Urusan Penunjang	No.	OPD HASIL EVALUASI
41	Kecamatan Asam Jujuhan	25	Kecamatan Asam Jujuhan
42	Kecamatan Koto Baru	26	Kecamatan Koto Baru
43	Kecamatan Koto Besar	27	Kecamatan Koto Besar
44	Kecamatan Koto Salak	28	Kecamatan Koto Salak
45	Kecamatan Padang Laweh	29	Kecamatan Padang Laweh
46	Kecamatan Pulau Punjung	30	Kecamatan Pulau Punjung
47	Kecamatan IX Koto	31	Kecamatan IX Koto
48	Kecamatan Sitiung	32	Kecamatan Sitiung
49	Kecamatan Sungai Rumbai	33	Kecamatan Sungai Rumbai
50	Kecamatan Timpeh	34	Kecamatan Timpeh
51	Kecamatan Tiumang	35	Kecamatan Tiumang

Kabupaten Dharmasraya telah melakukan Pemilu Legislatif pada tanggal 17 April 2019 dan pelantikan terhadap 30 orang anggota DPRD terpilih untuk periode 2019 s.d. 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2019, sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya definif dilantik pada tanggal 20 November 2019.

Tahun 2020 Kabupaten Dharmasraya juga telah melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada Serentak) pada tanggal 9 Desember 2020. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya terpilih untuk periode 2021 s.d. 2024 dilaksanakan tanggal 26 Februari 2021 oleh Gubernur Sumatera Barat.

Secara umum Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, yaitu.

1) Bupati : Sutan Riska Tuanku Kerajaan, S.E.
2) Wakil Bupati : Drs. DP Datuak Labuan.
3) Ketua DPRD : Pariyanto, S.H.
4) Sekretaris Daerah : H. Adlisman, S.Sos, M.Si.

Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya mengalami berita duka karena Wakil Bupati Dharmasraya periode 2021-2024 Drs. DP Datuak Labuan meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2022.

VI.C Pelaksanaan Transaksi Non Tunai

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910-1867-SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Bupati Dharmasraya meneruskan dengan Instruksi Bupati Bupati Dharmasraya Nomor 188.55/1/INST-BUP/2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai tanggal 28 Desember 2017. Pelaksanaan Transaksi Non Tunai mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018. Transaksi pembayaran melalui mekanisme non tunai dilakukan untuk pembayaran sebagai berikut.

1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3. Belanja Makanan dan Minuman
4. Belanja Honorarium dan lembur PNS dan Non PNS
5. Belanja Jasa Servis Peralatan Kantor, Jasa Servis dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas
6. Belanja Alat Tulis Kantor, Alat Listrik, Alat Rumah Tangga, Belanja Peralatan/Perlengkapan Pakai habis, Seminar Kit, Belanja Cetak dan Penggandaan

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melakukan pembayaran secara non tunai sebelum ditetapkannya Pelaksanaan Transaksi Non Tunai secara nasional untuk pembayaran Belanja Tidak langsung.

VI.D Revaluasi Aset Tetap

Kabupaten Dharmasraya belum menerapkan Revaluasi Aset Tetap seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Revaluasi merupakan penilaian kembali aset tetap karena kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan. Revaluasi dapat berdampak meningkatkan nilai tercatat Aset Tetap atau menurunkan nilai tercatat Aset Tetap. Belum adanya penyusunan kebijakan akuntansi tentang Revaluasi Aset Tetap di Kabupaten Dharmasraya disebabkan karena belum adanya pedoman pelaksanaan penilaian kembali barang milik daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 yang dapat kami sampaikan.

Kami terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang lebih baik dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih (*good governance and clean goverment*).

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan bagi kita semua, terutama dalam mengemban tugas amanah pengabdian kita kepada daerah, bangsa, dan negara.

Sekian dan terima kasih.

Wabillahi Taufiq Walhidayah, Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 4 Tahun 2022
Tanggal : 13 Juli 2022

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)
1	**Badan Keuangan Daerah**	**Piutang Pajak**	**34.309.133.716,00**	**5.510.962.211,00**	**(3.587.871.899,00)**	**36.232.224.028,00**
		- Pajak PBB-P2	33.285.365.626,00	4.442.166.051,00	(2.564.103.809,00)	35.163.427.868,00
		- Pajak Penerangan Jalan	1.020.968.090,00	1.067.255.885,00	(1.020.968.090,00)	1.067.255.885,00
		- Pajak Restoran	0,00	1.540.275,00	0,00	1.540.275,00
		- Pajak Hotel	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	0,00
2		**Piutang Retribusi**	**242.685.161,00**	**524.642.650,00**	**0,00**	**767.327.811,00**
		- Retribusi Pelayanan Pasar	54.967.000,00	101.804.000,00	(154.471.000,00)	2.300.000,00
		- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	121.046.361,00	119.252.900,00	0,00	240.299.261,00
		- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	66.671.800,00	0,00	(13.604.800,00)	53.067.000,00
3		**Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**	**3.524.570.411,00**	**0,00**	**(3.514.285.581,00)**	**10.284.830,00**
4		**Piutang Lain-lain PAD yang sah**	**5.821.956.800,88**	**13.727.366.896,60**	**(1.267.523.869,11)**	**18.281.799.828,37**
		- Piutang BLUD	388.006.830,00	13.306.760.523,00	(384.379.830,00)	13.310.387.523,00
		- Piutang Dana Bergulir	554.897.679,00	0,00	0,00	554.897.679,00
		- Piutang Bunga Deposito	10.080.637,00	0,00	(10.080.637,00)	0,00
		- Piutang Air Minum UPT SPAM	386.391.650,00	0,00	(386.391.650,00)	0,00
		- Piutang TGR	4.477.450.013,88	419.706.373,60	(486.671.752,11)	4.410.484.635,37
		- Piutang Pengembalian Belanja	5.129.991,00	0,00	0,00	5.129.991,00
		- Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
5		**- Piutang Transfer Pemerintah Daerah Pusat**	**6.505.389.322,00**	**0,00**	**(6.505.389.322,00)**	**0,00**
6		**Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**	**8.967.719.269,00**	**51.935.128.939,00**	**(51.272.491.740,00)**	**9.630.356.468,00**
		- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4.704.676.479,00	11.061.924.195,00	(13.494.506.426,00)	2.272.094.248,00
		- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	774.255.747,00	6.122.130.075,00	(4.916.864.196,00)	1.979.521.626,00
		- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	3.468.666.824,00	22.319.383.208,00	(20.419.916.155,00)	5.368.133.877,00
		- Pajak Air Permukaan (PAP)	20.120.219,00	109.364.875,00	(118.878.377,00)	10.606.717,00
		- Pajak Rokok	0,00	12.322.326.586,00	(12.322.326.586,00)	-
7		**Piutang Lainnya**	**13.050.752,00**	**0,00**	**0,00**	**13.050.752,00**
		Jumlah	59.384.505.431,88	71.698.100.696,60	-66.147.562.411,11	64.935.043.717,37

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 4 Tahun 2022
Tanggal : 13 Juli 2022

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2021

No	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		NIHIL		
	JUMLAH			

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 4 Tahun 2022
Tanggal : 13 Juli 2022

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	2	3	4	5
	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya	**554.897.679,00**	**554.897.679,00**	-
	1. Kec. Pulau Punjung	122.349.281,00		-
	a. s/d tanggal Jatuh Tempo		-	-
	b. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan		-	-
	c. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan		-	-
	d. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan		122.349.281,00	-
				-
	2. Kec. Sitiung	42.186.005,00		-
	a. s/d tanggal Jatuh Tempo		-	-
	b. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan		-	-
	c. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan		-	-
	d. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan		42.186.005,00	-
				-
	3. Kec. Koto Baru	339.304.897,00		-
	a. s/d tanggal Jatuh Tempo		-	-

NO	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	2	3	4	5
	b. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan		-	-
	c. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan		-	-
	d. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan		339.304.897,00	-
				-
	4. Kec. Sungai Rumbai	51.057.496,00		-
	a. s/d tanggal Jatuh Tempo		-	-
	b. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan		-	-
	c. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan		-	-
	d. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan		51.057.496,00	-
JUMLAH		554.897.679,00	554.897.679,00	-

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 4 Tahun 2022
Tanggal : 13 Juli 2022

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan / Lembaga / Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal yang telah Disertakan sampai dengan awal tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan akhir tahun ini	Sisa Modal yang belum disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (Investasi) yang diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7+8	10	11	12	13 = 9-12
1	2006 dan 2007 2012 2013 2017	PT BPD Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari	Perda No. 2 Tahun 2009 Perda No.8 Tahun 2017	11.000 lembar saham Seri A 3.236 lembar saham Seri A 5.400 lembar saham seri A 3.716 lembar saham seri A	25.852.000.000,00	25.852.000.000,00	-	25.852.000.000,00	-		-	25.852.000.000,00
				saham seri A.000232 Saham Nomor A.000232				-				
2	2010	PT. Balairung Citra Jaya Sumbar	Surat Gubernur Sumbar	900 lembar saham Seri A 600.000 lembar Saham Seri B	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	-	-	-	1.500.000.000,00
3	2012	PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pulau Punjung		10.000 lembar saham Seri B	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	-		100.000.000,00
JUMLAH					27.452.000.000,00	27.452.000.000,00	-	27.452.000.000,00	-	-	-	27.452.000.000,00

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 4 Tahun 2022
Tanggal : 13 Juli 2022

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	OPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Sekretariat DPRD	63.271.232.565,00	959.856.899,00	188.781.900,00	64.042.307.564,00
2	Sekretariat Daerah	484.567.930.095,00	21.900.046.730,00	844.681.500,00	505.623.295.325,00
3	Kec. Pulau Punjung	2.599.807.545,00	-	54.900.000,00	2.544.907.545,00
4	Kec. Sitiung	2.036.517.865,00	-	32.200.000,00	2.004.317.865,00
5	Kec. Koto Baru	3.306.365.686,00	-	-	3.306.365.686,00
6	Kec. Sungai Rumbai	3.091.561.053,00	-	-	3.091.561.053,00
7	Kec. IX Koto	815.189.379,00	-	6.913.000,00	808.276.379,00
8	Kec. Timpeh	2.830.507.271,00	-	-	2.830.507.271,00
9	Kec. Padang Laweh	1.842.828.683,00	-	9.900.000,00	1.832.928.683,00
10	Kec Tiumang	2.934.837.284,00	-	-	2.934.837.284,00
11	Kec Koto Besar	3.148.939.052,00	-	-	3.148.939.052,00
12	Kec Koto Salak	2.532.556.224,00	-	15.950.000,00	2.516.606.224,00
13	Kec. Asam Jujuhan	3.484.912.125,00	2.000.000,00	13.150.000,00	3.473.762.125,00
14	Dinas PUPR	1.534.070.185.914,49	168.068.393.675,00	102.832.175.455,00	1.599.306.404.134,49
15	Dinas PERKIMTAN	7.823.720.280,00	23.565.150.480,00	265.616.050,00	31.123.254.710,00
16	Dinas Perhubungan	14.767.506.386,00	181.509.500,00	25.268.000,00	14.923.747.886,00
17	Dinas Kesehatan	140.623.890.902,89	55.201.302.503,34	20.808.990.004,60	175.016.203.401,63
18	RSUD	137.238.791.824,60	26.526.612.802,92	450.130.200,00	163.315.274.427,52
19	Dinas Pendidikan	374.245.533.079,28	43.604.567.700,21	978.512.000,00	416.871.588.779,49
20	Dinas BUDPARPORA	105.789.755.752,85	13.300.000,00	-	105.803.055.752,85
21	Dinas TRANSNAKER	6.765.172.581,00	8.000.000,00	78.600.000,00	6.694.572.581,00
22	DSP3KB	5.975.230.598,00	1.027.360.000,00	-	7.002.590.598,00
23	DISDUKCAPIL	4.225.341.122,00	323.251.700,00	-	4.548.592.822,00
24	Dinas PMD	1.421.779.800,00	6.923.500,00	-	1.428.703.300,00
25	Dinas Pertanian	38.516.941.715,30	1.508.522.000,00	391.118.000,00	39.634.345.715,30
26	Dinas Pangan dan Perikanan	18.609.188.951,50	189.442.000,00	-	18.798.630.951,50
27	Dinas KUMPERDAG	81.599.442.556,80	142.580.000,00	49.450.000,00	81.692.572.556,80
28	BKD	10.706.520.010,00	98.533.500,00	135.760.000,00	10.669.293.510,00
29	DPMPTSP	2.028.554.441,00	118.711.000,00	-	2.147.265.441,00
30	Inspektorat Kabupaten	2.885.349.491,00	189.174.196,00	6.150.000,00	3.068.373.687,00
31	BAPPPEDA	1.768.155.442,00	19.650.000,00	90.000.000,00	1.697.805.442,00
32	DLH	12.804.465.079,00	106.211.362,00	1.377.750.236,00	11.532.926.205,00
33	Kantor KESBANGPOL	259.218.500,00	4.076.000,00	5.040.000,00	258.254.500,00
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	6.508.067.096,00	43.160.000,00	-	6.551.227.096,00
35	BPBD	16.610.561.626,00	394.951.182,00	-	17.005.512.808,00
36	BKPSDM	2.033.706.136,00	81.836.000,00	-	2.115.542.136,00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.083.270.783,00	792.575.700,00	-	5.875.846.483,00
38	Dinas KOMINFO	3.263.546.394,00	494.249.150,00	-	3.757.795.544,00
	JUMLAH	**3.112.087.081.289,71**	**345.571.947.580,47**	**128.661.036.345,60**	**3.328.997.992.524,58**

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 4 Tahun 2022
Tanggal : 13 Juli 2022

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	OPD	Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2020	Mutasi		Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2021
			Tambah	Kurang	
	Sekretariat DPRD	63.271.232.565,00	959.856.899,00	188.781.900,00	64.042.307.564,00
	Sekretariat Daerah	484.567.930.095,00	21.900.046.730,00	844.681.500,00	505.623.295.325,00
	Kec. Pulau Punjung	2.599.807.545,00	-	54.900.000,00	2.544.907.545,00
	Kec. Sitiung	2.036.517.865,00	-	32.200.000,00	2.004.317.865,00
	Kec. Koto Baru	3.306.365.686,00	-	-	3.306.365.686,00
	Kec. Sungai Rumbai	3.091.561.053,00	-	-	3.091.561.053,00
	Kec. IX Koto	815.189.379,00	-	6.913.000,00	808.276.379,00
	Kec. Timpeh	2.830.507.271,00	-	-	2.830.507.271,00
	Kec. Padang Laweh	1.842.828.683,00	-	9.900.000,00	1.832.928.683,00
	Kec Tiumang	2.934.837.284,00	-	-	2.934.837.284,00
	Kec Koto Besar	3.148.939.052,00	-	-	3.148.939.052,00
	Kec Koto Salak	2.532.556.224,00	-	15.950.000,00	2.516.606.224,00
	Kec. Asam Jujuhan	3.484.912.125,00	2.000.000,00	13.150.000,00	3.473.762.125,00
	Dinas PUPR	1.534.070.185.914,49	168.068.393.675,00	102.832.175.455,00	1.599.306.404.134,49
	Dinas PERKIMTAN	7.823.720.280,00	23.565.150.480,00	265.616.050,00	31.123.254.710,00
	Dinas Perhubungan	14.767.506.386,00	181.509.500,00	25.268.000,00	14.923.747.886,00
	Dinas Kesehatan	140.623.890.902,89	55.201.302.503,34	20.808.990.004,60	175.016.203.401,63
	RSUD	137.238.791.824,60	26.526.612.802,92	450.130.200,00	163.315.274.427,52
	Dinas Pendidikan	374.245.533.079,28	43.604.567.700,21	978.512.000,00	416.871.588.779,49
	Dinas BUDPARPORA	105.789.755.752,85	13.300.000,00	-	105.803.055.752,85
	Dinas TRANSNAKER	6.765.172.581,00	8.000.000,00	78.600.000,00	6.694.572.581,00
	DSP3KB	5.975.230.598,00	1.027.360.000,00	-	7.002.590.598,00
	DISDUKCAPIL	4.225.341.122,00	323.251.700,00	-	4.548.592.822,00
	Dinas PMD	1.421.779.800,00	6.923.500,00	-	1.428.703.300,00
	Dinas Pertanian	38.516.941.715,30	1.508.522.000,00	391.118.000,00	39.634.345.715,30
	Dinas Pangan dan Perikanan	18.609.188.951,50	189.442.000,00	-	18.798.630.951,50
	Dinas KUMPERDAG	81.599.442.556,80	142.580.000,00	49.450.000,00	81.692.572.556,80
	BKD	10.706.520.010,00	98.533.500,00	135.760.000,00	10.669.293.510,00
	DPMPTSP	2.028.554.441,00	118.711.000,00	-	2.147.265.441,00
	Inspektorat Kabupaten	2.885.349.491,00	189.174.196,00	6.150.000,00	3.068.373.687,00
	BAPPPEDA	1.768.155.442,00	19.650.000,00	90.000.000,00	1.697.805.442,00
	DLH	12.804.465.079,00	106.211.362,00	1.377.750.236,00	11.532.926.205,00
	Kantor KESBANGPOL	259.218.500,00	4.076.000,00	5.040.000,00	258.254.500,00
	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	6.508.067.096,00	43.160.000,00	-	6.551.227.096,00
	BPBD	16.610.561.626,00	394.951.182,00	-	17.005.512.808,00
	BKPSDM	2.033.706.136,00	81.836.000,00	-	2.115.542.136,00
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.083.270.783,00	792.575.700,00	-	5.875.846.483,00
	Dinas KOMINFO	3.263.546.394,00	494.249.150,00	-	3.757.795.544,00
	JUMLAH	**3.112.087.081.289,71**	**345.571.947.580,47**	**128.661.036.345,60**	**3.328.997.992.524,58**

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 4 Tahun 2022
Tanggal : 13 Juli 2022

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PER 31 DESEMBER 2021

NO	OPD	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	REKLASIFIKASI								PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2021
			BERKURANG				BERTAMBAH					
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN		
1	SEKRETARIAT DAERAH				17.040.000,00				17.040.000,00			-
2	DINAS PUPR	105.548.268.107,00	49.420.000,00	82.603.802.578,00	20.122.061.877,00				162.399.415,00			2.935.383.067,00
3	DINAS PERKIMTAN	366.648.550,00		39.900.000,00	87.228.550,00							239.520.000,00
4	DINAS KESEHATAN	5.007.327.230,00		5.046.994.110,00				7.077.404.738,00				7.037.737.858,00
5	DINAS PENDIDIKAN	978.512.000,00		978.512.000,00								-
6	DISKUMPERDAG	382.365.000,00		49.450.000,00								332.915.000,00
7	BPBD								368.216.182,00			368.216.182,00
8	Dinas Perpustakaan dan Arsip	836.767.350,00										836.767.350,00
	JUMLAH	**113.119.888.237,00**	**49.420.000,00**	**88.718.658.688,00**	**20.226.330.427,00**	**-**	**-**	**7.077.404.738,00**	**547.655.597,00**	**-**	**-**	**11.750.539.457,00**

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Lampiran XV : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 4 Tahun 2022
Tanggal : 13 Juli 2022

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR REKAPITULASI ASET T LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2021

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	**Aset lain-lain**	**213.829.466.684,84**	**7.548.135.618,00**	**16.121.662.907,00**	**205.255.939.395,84**
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	60.583.781.694,84	2.499.146.286,00	1.880.952.507,00	61.201.975.473,84
	Aset Yang Dipinjampakaikan	10.685.015.719,00	1.037.326.100,00	2.766.382.725,00	8.955.959.094,00
	Aset Yang Akan Diserahkan Kemasyarakat	142.560.669.271,00	4.011.663.232,00	11.474.327.675,00	135.098.004.828,00
2	**Aset Tidak Berwujud**	**3.834.413.677,00**	**178.853.600,00**	**-**	**4.013.267.277,00**
	Aset Tidak Berwujud	3.834.413.677,00	178.853.600,00	-	4.013.267.277,00
	JUMLAH	**217.663.880.361,84**	**7.726.989.218,00**	**16.121.662.907,00**	**209.269.206.672,84**

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

Lampiran XVI : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 4 Tahun 2022
Tanggal : 13 Juli 2022

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Daerah	Transfer ke Kas Daerah	Saldo Akhir	Sisa Dana yang Belum dicadangkan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				NIHIL				
	JUMLAH							

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Lampiran XVII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 4 Tahun 2022
Tanggal : 13 Juli 2022

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	4.900.000,00	765.399.544,27	4.900.000,00	765.399.544,27
2	Pendapatan Diterima Dimuka	2.661.665.181,07	102.623.340,64	2.661.665.181,07	102.623.340,64
3	Utang Belanja	33.289.416.742,00	12.286.454.764,47	33.289.416.742,00	12.286.454.764,47
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	4.891.202.700,00	0,00	4.891.202.700,00
	JUMLAH	**35.955.981.923,07**	**18.045.680.349,38**	**35.955.981.923,07**	**18.045.680.349,38**

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Lampiran XVIII : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya

Nomor : 4 Tahun 2022
Tanggal : 13 Juli 2022

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
			NIHIL		
	JUMLAH	-	-	-	-

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Lampiran XIX : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 4 Tahun 2022
Tanggal : 13 Juli 2022

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR SUB KEGIATAN-SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN DAN DIANGGARAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA OPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH REALISASI (TAHUN T-2, TAHUN T-1, TAHUN T)			JUMLAH AKUMULASI (REALISASI S.D. TAHUN T)	JUMLAH YANG DIANGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA
			REALISASI TAHUN T-2	REALISASI TAHUN T-1	REALISASI TAHUN T		
1	2	3	4	5	6	7	
KONSTRUKS DALAM PEKERJAAN							
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		63.065.171.388,00	42.483.096.719,00	(102.612.885.040,00)	2.935.383.067,00	
		Perencanaan Pembangunan Command Center	79.696.000,00			79.696.000,00	
		DED Pembangunan Rumah Dinas Camat Padang Laweh	29.275.000,00			29.275.000,00	
		Perencanaan Tugu Simpang Silago	39.606.000,00	(39.606.000,00)		-	
		Pembangunan Mesjid Agung	38.305.296.552,00	44.034.830.026,00	(82.340.126.578,00)	-	
		DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan	127.020.000,00			127.020.000,00	
		DED Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil	125.059.000,00			125.059.000,00	
		DED Pembangunan Gedung Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	127.899.000,00			127.899.000,00	
		DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan	123.920.000,00			123.920.000,00	
		Perencanaan RTH Batas Kabupaten Dharmasraya Sijunjung	46.453.000,00			46.453.000,00	
		DED Rumah Dinas Wakil Bupati	79.680.000,00			79.680.000,00	
		DED Pembangunan Gedung Kantor Kodim Dharmasraya	79.200.000,00			79.200.000,00	
		DED Rumah Dinas Sekda	79.720.000,00			79.720.000,00	
		DED Kawasan Rawan Bencana Kec.Pulau Punjung	49.910.000,00			49.910.000,00	
		DED Kawasan Kumuh Nagari Sungai Duo Kec. Sitiung	49.920.000,00			49.920.000,00	
		Penyusunan Master Plan Kawasan Koto Padang	263.676.000,00		(263.676.000,00)	-	
		Perencanaan pembangunan Sarana olahraga nagari Sungai Duo	49.960.000,00			49.960.000,00	
		Perencanaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Permukiman Rawan Bencana Kawasan Sei.Kambut dan Lubuk Bulang	47.800.000,00		(47.800.000,00)	-	
		Perencanaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Permukiman Rawan Bencana Kawasan Kampung Baru Kec.Pulau	24.570.000,00		(24.570.000,00)	-	
		Perencanaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Permukiman Rawan Bencana Kawasan Koto Baru dan Ampang Kuranji	47.391.000,00		(47.391.000,00)	-	

NO	NAMA OPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH REALISASI (TAHUN T-2, TAHUN T-1, TAHUN T)			JUMLAH AKUMULASI (REALISASI S.D. TAHUN T)	JUMLAH YANG DIANGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA
			REALISASI TAHUN T-2	REALISASI TAHUN T-1	REALISASI TAHUN T		
1	2	3	4	5	6	7	
		Perencanaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Permukiman Rawan Bencana Kawasan Koto Padang dan Piruko	49.569.000,00		(49.569.000,00)	-	
		Perencanaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Permukiman Rawan Bencana Kawasan Blok B Sitiung I dan Sitiung II	49.890.000,00		(49.890.000,00)	-	
		Perencanaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Permukiman Rawan Bencana Kawasan Kec.Timpeh	47.890.000,00		(47.890.000,00)	-	
		Perencanaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Permukiman Rawan Bencana Kawasan Marga Makmur dan Pinang	49.880.000,00		(49.880.000,00)	-	
		Perencanaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Permukiman Rawan Bencana Kawasan Kurnia Selatan	49.849.000,00		(49.849.000,00)	-	
		Perencanaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Permukiman Rawan Bencana Kawasan Padang Laweh	24.570.000,00		(24.570.000,00)	-	
		Perencanaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Permukiman Rawan Bencana Kawasan Koto Besar dan Sungai Rumbai	49.569.000,00		(49.569.000,00)	-	
		Perencanaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Permukiman Rawan Bencana Kawasan Ampalu dan Pulau Mainan	49.800.000,00		(49.800.000,00)	-	
		Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket I	49.710.000,00			49.710.000,00	
		Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket II	49.796.000,00			49.796.000,00	
		Perencanaan dan DED SPAM Koto Baru	147.752.000,00		(147.752.000,00)	-	
		Perencanaan dan DED SPAM Sungai Rumbai	147.746.500,00		(147.746.500,00)	-	
		Perencanaan dan DED SPAM Pulau Punjung	147.812.500,00		(147.812.500,00)	-	
		Inventarisasi SPAM Kawasan Pulau Punjung	49.420.000,00		(49.420.000,00)	-	
		Perencanaan SPAM Lubuk Bulang	49.577.000,00			49.577.000,00	
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Minum Bukit IX Asam Jujuhan	349.749.738,00		(349.749.738,00)	-	
		Perencanaan Paket VI	49.860.000,00		(49.860.000,00)	-	
		Perencanaan Paket VII	49.820.000,00		(49.820.000,00)	-	
		Perencanaan Paket VIII	49.800.000,00		(49.800.000,00)	-	
		Perencanaan Paket X	49.718.000,00		(49.718.000,00)	-	
		Perencanaan Rigit Beton APBN 2016 Kawasan Agro Politan Sitiung	49.660.000,00		(49.660.000,00)	-	
		Perencanaan Jembatan Paket I	49.800.000,00			49.800.000,00	
		Perencanaan Jembatan Paket II	49.700.000,00			49.700.000,00	
		Perencanaan Jembatan Batang Momong Lubuk	49.750.000,00		(49.750.000,00)	-	
		Perencanaan Jembatan Sungai Kapur	39.800.000,00		(39.800.000,00)	-	
		Perencanaan Jembatan Paket III	49.750.000,00			49.750.000,00	

NO	NAMA OPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH REALISASI (TAHUN T-2, TAHUN T-1, TAHUN T)			JUMLAH AKUMULASI (REALISASI S.D. TAHUN T)	JUMLAH YANG DIANGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA
			REALISASI TAHUN T-2	REALISASI TAHUN T-1	REALISASI TAHUN T		
1	2	3	4	5	6	7	
		DED / PerencanaanJaringan Irigasi Batang Mimpi Sei. Dareh (Belakang Kantor PU	29.000.000,00		(29.000.000,00)	-	
		DED / Perencanaan Batang Siat Koto Baru	39.828.000,00			39.828.000,00	
		DED / Perencanaan Sungai koto Balai Koto Padang	39.828.000,00			39.828.000,00	
		DED Perencanaan Embung Koto Ranah	49.775.000,00			49.775.000,00	
		DED/Perencanaan Sungai Batang Hari lubuk Bulang	49.921.000,00			49.921.000,00	
		DED/Perencanaan Sungai Batang Momong Lubuk Karak	49.729.000,00		(49.729.000,00)	-	
		DED/Perencanaan Sungai Batang Hari Siguntur	49.851.000,00			49.851.000,00	
		DED/Perencanaan Sungai Batang Jujuhan Tanjung Alam Asam Jujuhan	49.900.000,00		(49.900.000,00)	-	
		Perencanaan Drainase kawasan Pulau Punjung (Usulan APBD 2017)	49.930.000,00		(49.930.000,00)	-	
		Perencanaan Drainase (APBD-P)	43.350.000,00		(43.350.000,00)	-	
		Pengawasan Drainase (APBD-P)	49.900.000,00		(49.900.000,00)	-	
		Perencanaan sistem Tranmisi SPAM Gunung Medan	50.185.500,00			50.185.500,00	
		Perencanaan Jambatan Pipa Siguntur	50.135.500,00			50.135.500,00	
		Perencanaan lanjutan pipa Distribusi SPAM Sitiung (Pendamping Dana APBD)	37.064.500,00		(37.064.500,00)	-	
		Perencanaan Optimalisasi Sistem Transmisi SPAM IKK Pulau punjung	50.120.500,00		(50.120.500,00)	-	
		Trotoar / Median Jalan Pulau Punjung - Sungai Rumbai	2.231.178.307,00	(2.231.178.307,00)		-	
		DED Jalan Nasional (Pulau Punjung)	49.800.000,00		(49.800.000,00)	-	
		DED Jalan Nasional (Sei Rumbai)	49.775.000,00		(49.775.000,00)	-	
		Perencanaan DED Jembatan Gantung Siguntur	49.750.000,00		(49.750.000,00)	-	
		Perencanaan DED Jembatan Rumah Padang	49.650.000,00		(49.650.000,00)	-	
		Perencanaan DED Jembatan Padukuan	49.700.000,00		(49.700.000,00)	-	
		DED Embung Koto Padang II	44.637.000,00			44.637.000,00	
		Pembangunan Sungai Batang Panglan	17.317.305.191,00		(17.317.305.191,00)	-	
		DED/ Perencanaan Sungai Batang Piruko	39.908.000,00		-	39.908.000,00	
		Survey Hidrologi Sungai Batang Hari	49.731.000,00			49.731.000,00	
		DED Sungai Batang Hari	49.939.000,00			49.939.000,00	
		UKL/ UPL Sungai Batang Hari	49.857.000,00			49.857.000,00	
		DED Pengaman Tebing Sungai Batang Siat Koto Baru	49.749.000,00			49.749.000,00	

NO	NAMA OPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH REALISASI (TAHUN T-2, TAHUN T-1, TAHUN T)			JUMLAH AKUMULASI (REALISASI S.D. TAHUN T)	JUMLAH YANG DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA
			REALISASI TAHUN T-2	REALISASI TAHUN T-1	REALISASI TAHUN T		
1	2	3	4	5	6	7	
		DED Pengaman Tebing Sungai Batang Piruko Jorong Seberang Piruko Koto Baru	49.833.000,00			49.833.000,00	
		Perencanaan Optimalisasi SPAM Kampung Surau	53.962.067,00			53.962.067,00	
		Perencanaan Optimalisasi Sistem Transmisi SPAM Sungai Rumbai	43.040.533,00		(43.040.533,00)	-	
		Perencanaan Paket I	74.510.000,00			74.510.000,00	
		Perencanaan Paket II	74.850.000,00			74.850.000,00	
		Perencanaan Paket III	74.848.000,00			74.848.000,00	
		Perencanaan Paket IV	49.810.000,00		(49.810.000,00)	-	
		Perencanaan Paket V	49.850.000,00			49.850.000,00	
		Perencanaan Paket II	49.880.000,00			49.880.000,00	
		Perencanaan Paket I	89.500.000,00			89.500.000,00	
		Perencanaan Embung Kurnia Selatan	59.300.000,00			59.300.000,00	
		Perencaan Paket III Jalan		99.867.000,00	(99.867.000,00)	-	
		Perencaan Pket II jalan		99.873.000,00	(99.873.000,00)	-	
		Perencanaan Paket I Jalan		99.881.000,00	(99.881.000,00)	-	
		Perencanaan Paket III Jalan		79.904.000,00		79.904.000,00	
		Perencanaan Paket II Jalan		79.896.000,00		79.896.000,00	
		Perencanaan Paket I jalan		79.880.000,00		79.880.000,00	
		Perencanaan Paket IV Jembatan		99.850.000,00	(19.970.000,00)	79.880.000,00	
		Perencanaan paket V Jembatan		79.900.000,00		79.900.000,00	
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		366.648.550,00	-	(127.128.550,00)	239.520.000,00	
		Rusun Sungai Rumbai	39.900.000,00			39.900.000,00	
		Rusus Sitiung	39.900.000,00		(39.900.000,00)	-	
		Master Plan dan DED PSU Nagari IV Koto Pulau Punjung dan Sungai Kambut	99.913.000,00			99.913.000,00	
		Nagari Koto Salak Kecamatan Koto Salak	49.757.000,00			49.757.000,00	
		Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumnag	49.950.000,00			49.950.000,00	
		Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai	49.960.000,00		(49.960.000,00)	-	
		Pasar Sungai Rumbai	37.268.550,00		(37.268.550,00)	-	
	Dinas Kesehatan		115.255.441,00	4.892.071.789,00	2.030.410.628,00	7.037.737.858,00	

NO	NAMA OPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH REALISASI (TAHUN T-2, TAHUN T-1, TAHUN T)			JUMLAH AKUMULASI (REALISASI S.D. TAHUN T)	JUMLAH YANG DIANGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA
			REALISASI TAHUN T-2	REALISASI TAHUN T-1	REALISASI TAHUN T		
1	2	3	4	5	6	7	
		Perencanaan Rehabilitasi Berat/Total Puskesmas Gunung Medan	115.255.441,00	-115255441			
		RSUD Sungai Rumbai		4.768.655.626,00	(4.768.655.626,00)	-	
		Sungai Rumbai		238.671.604,00	(238.671.604,00)	-	
		Gedung Rawat Inap RSUD Sungai Rumbai			6.998.070.978,00	6.998.070.978,00	
		Perencanaan Pustu Sopan Jaya			39.666.880,00	39.666.880,00	
	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh		559.659.728,00	(559.659.728,00)	(1.957.024.000,00)	-	
		Perencanaan Mobiler Interior Rumah Sakit Baru	478.764.728,00	(478.764.728,00)			
		RSUD Sungai Dareh	80.895.000,00	(80.895.000,00)		-	
	Dinas Pendidikan		978.512.000,00	-	(978.512.000,00)	-	
		Lanjutan bangunan SD	506.490.000,00		(506.490.000,00)	-	
		Lanjutan bangunan SD	472.022.000,00		(472.022.000,00)	-	
	DINAS KUMPERDAG		21.326.358.258,93	(20.943.993.258,93)	(49.450.000,00)	332.915.000,00	
		Perencanaan Kawasan Kuliner Pulau Punjung	49.450.000,00		(49.450.000,00)	-	
		Pasar Sungai Rumbai	332.915.000,00			332.915.000,00	
		Musholla	489.021.416,00	(489.021.416,00)		-	
		Kafetaria	907.245.343,00	(907.245.343,00)		-	
		Minimarket	467.540.115,00	(467.540.115,00)		-	
		Pos Jaga	117.476.799,00	(117.476.799,00)		-	
		Toilet	545.401.958,00	(545.401.958,00)		-	
		Workshop 2	971.689.246,00	(971.689.246,00)		-	
		Workshop 4	2.358.459.930,00	(2.358.459.930,00)		-	
		Ruang Pompa	794.939.334,00	(794.939.334,00)		-	
		Power House (Rumah Genset)	368.051.202,00	(368.051.202,00)		-	
		Pondasi Septic Tank	96.436.085,00	(96.436.085,00)		-	
		Lanskep / Taman	257.034.902,00	(257.034.902,00)		-	
		Pintu Gerbang	74.696.475,93	(74.696.475,93)		-	
		Jalan Beton Sentra	6.254.156.415,00	(6.254.156.415,00)		-	

NO	NAMA OPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH REALISASI (TAHUN T-2, TAHUN T-1, TAHUN T)			JUMLAH AKUMULASI (REALISASI S.D. TAHUN T)	JUMLAH YANG DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA
			REALISASI TAHUN T-2	REALISASI TAHUN T-1	REALISASI TAHUN T		
1	2	3	4	5	6	7	
		Jembatan	518.162.445,00	(518.162.445,00)		-	
		Saluran Drainase	1.157.458.651,00	(1.157.458.651,00)		-	
		Instalasi Air Bersih /Plumbing	1.060.041.987,00	(1.060.041.987,00)		-	
		Instalasi Pemadam Kebakaran	940.191.335,00	(940.191.335,00)		-	
		Jaringan Listrik	3.565.989.620,00	(3.565.989.620,00)		-	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		836.767.350,00	-	-	836.767.350,00	
		Gedung Layanan Perpustakaan Koto Padang	836.767.350,00			836.767.350,00	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		-	-	368.216.182,00	368.216.182,00	
		Jln Poros Pinang Makmur- Marga Makmur			79.898.400,00	79.898.400,00	
		Jalan Kabupaten Simpang Tabek- Ranah Palabi			79.893.600,00	79.893.600,00	
		Ruas jalan Poros Timpeh-Taratak Tinggi			42.499.794,00	42.499.794,00	
		Jln. Simpang Tabek- Ranah Palabi			42.499.794,00	42.499.794,00	
		tebing pengaman banjir sungai			79.904.800,00	79.904.800,00	
		Tanggul Pengaman Banjir			43.519.794,00	43.519.794,00	
	JUMLAH TOTAL		**87.248.372.715,93**	**25.871.515.521,07**	**(103.326.372.780,00)**	**11.750.539.457,00**	

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Lampiran XX.1 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

KABUPATEN DHARMASRAYA
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Perusahaan Daerah Tahun	Sumber	Status	Aktiva Lancar	Aktiva Tidak Lancar	Aktiva Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5+6+7	9	10	11 = 9+10	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 x18
								NIHIL										

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Lampiran XX .2 : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juli 2022

KABUPATEN DHARMASRAYA
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/ RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH / PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Perusahaan Daerah Tahun	Sumber	Status	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di luar usaha	Beban di luar usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				NIHIL					

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA